



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4259);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan, dan Lembaga Teknis Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.

6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
7. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan daerah kabupaten kepulauan selayar.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dan juga sebagai SKPD.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

24. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
26. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
27. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
28. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
31. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
32. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

33. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
34. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
36. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
37. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
38. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
39. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diajukan untuk permintaan pembayaran.
40. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
41. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai kegiatan.
42. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
43. Buku Jurnal adalah catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat dan mengklasifikasikan data transaksi keuangan yang berfungsi sebagai arsip transaksi.

44. Buku Besar adalah buku yang digunakan untuk mengelompokkan (*posting*) data transaksi keuangan dari buku jurnal yang berfungsi sebagai arsip permanen.
45. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
46. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode pos-pos sebelumnya.
47. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan satuan kerja dan Pemerintah Daerah pada satu tanggal tertentu.
48. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menggambarkan pengakuan pendapatan dan pengakuan beban akibat terjadinya kesepakatan atau penetapan secara sah.
49. Penyajian Laporan Operasional adalah pendapatan dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa dan surplus/defisit LO.
50. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.
51. Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan perubahan ekuitas yang menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar dan ekuitas akhir.
52. Catatan atas laporan keuangan adalah hal-hal yang mengungkapkan catatan atas laporan keuangan yang disajikan setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SAPD dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan sistem akuntansi bagi SKPD dan SKPKD.

Pasal 3

SAPD bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman untuk pencatatan seluruh transaksi pada SKPD dan SKPKD;
- b. mengatur proses akuntansi dan pelaporan keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang lengkap dan akurat secara tepat waktu; dan
- c. menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) SAPD terdiri atas :
 - a. Sistem Akuntansi Pendapatan-LO;
 - b. Sistem Akuntansi Pendapatan-LRA;
 - c. Sistem Akuntansi Beban;
 - d. Sistem Akuntansi Belanja;
 - e. Sistem Akuntansi Transfer;
 - f. Sistem Akuntansi Pembiayaan;
 - g. Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas;
 - h. Sistem Akuntansi Piutang;
 - i. Sistem Akuntansi Persediaan;
 - j. Sistem Akuntansi Investasi;
 - k. Sistem Akuntansi Aset Tetap;
 - l. Sistem Akuntansi Aset Lainnya;
 - m. Sistem Akuntansi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud;
 - n. Sistem Akuntansi Kewajiban;
 - o. Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan;
 - p. Penyusunan Laporan Keuangan; dan
 - q. Bagan Akun Standar.

- (2) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Sistem Akuntansi pada SKPD dan/atau Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 24 November 2022
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 24 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,



MESDIYONO

DAFTAR ISI

	Halaman
SK PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2022.....	1
DAFTAR ISI.....	12
LAMPIRAN I SISTEM AKUNTANSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.....	13
01 Bab I Sistem Akuntansi Pendapatan - LO.....	13
02 Bab II Sistem Akuntansi Pendapatan - LRA.....	31
03 Bab III Sistem Akuntansi Beban.....	45
04 Bab IV Sistem Akuntansi Belanja.....	65
05 Bab V Sistem Akuntansi Transfer.....	78
06 Bab VI Sistem Akuntansi Pembiayaan.....	87
07 Bab VII Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas.....	90
08 Bab VIII Sistem Akuntansi Piutang.....	95
09 Bab IX Sistem Akuntansi Persediaan.....	103
10 Bab X Sistem Akuntansi Investasi.....	111
11 Bab XI Sistem Akuntansi Aset Tetap.....	120
12 Bab XII Sistem Akuntansi Aset Lainnya.....	129
13 Bab XIII Sistem Akuntansi Penyusutan dan Amortisasi.....	142
14 Bab XIV Sistem Akuntansi Kewajiban.....	146
15 Bab XV Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan.....	153
16 Bab XVI Sistem Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan.....	159
LAMPIRAN II BAGAN AKUN STANDAR.....	171
A. Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.....	171
B. Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening Neraca.....	229
C. Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran.....	347
D. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Laporan Operasional.....	443

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

BAB I
SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN – LO

A. DEFINISI

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

B. KLASIFIKASI

Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer	Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
	Bantuan Keuangan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah
	Dana Darurat
	Pendapatan Lainnya

C. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN - LO DI SKPD

1. PIHAK PIHAK TERKAIT

Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD antara lain:

- a) Wajib Pajak atau Retribusi,
- b) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD),

Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LO dan Neraca;

- 2) Melakukan posting jurnal transaksi/ kejadian pendapatan LO Buku Besar masing masing rekening (rincian objek);
 - 3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.
- c) Bendahara Penerimaan SKPD
- 1) Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku kas penerimaan;
 - 2) Membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari Pendapatan;
 - 3) Melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari.
- d) PA/KPA
- 1) menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah;
 - 2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

2. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Kelompok Pendapatan	Jenis Pendapatan	Dokumen
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	SKP Daerah/SKR Daerah/ STS/TBP/Dokumen Lain yang dipersamakan
	Retribusi Daerah	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
	Lain-lain PAD yang Sah	

Pendapatan LO diakui pada saat:

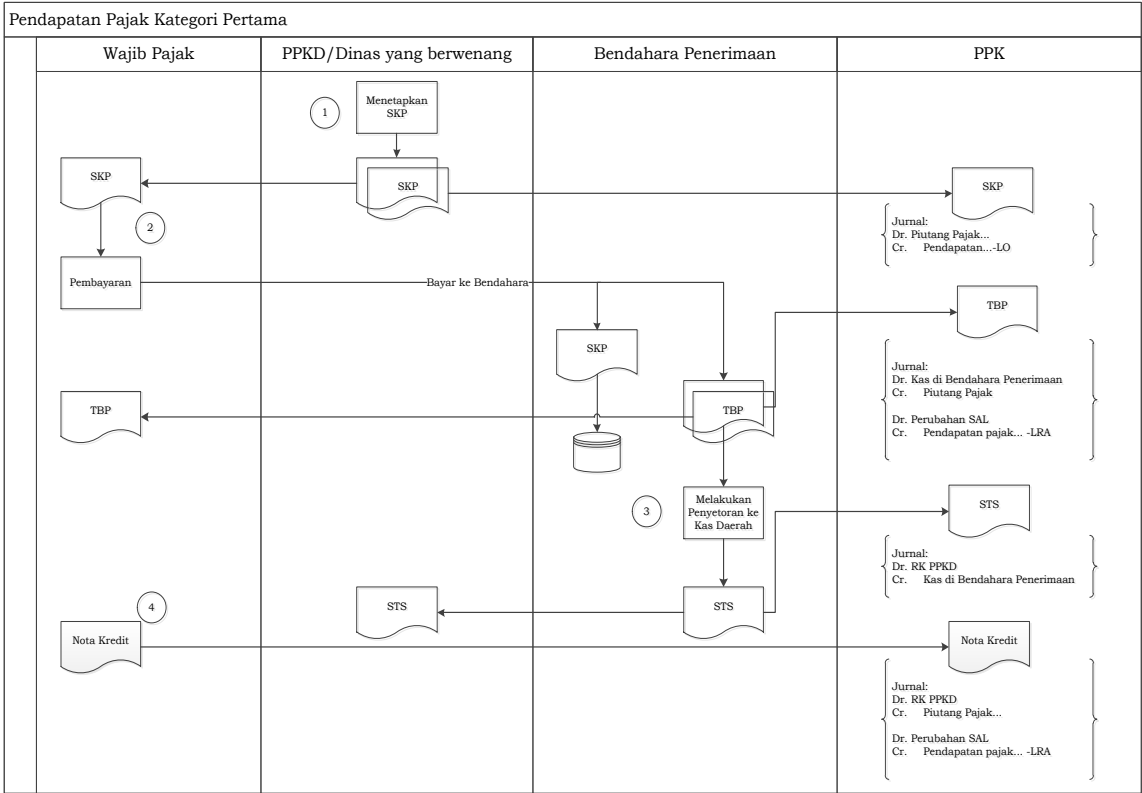
- a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

3. FLOWCHART DAN JURNAL STANDAR

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan di SKPD dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif flowchart dan jurnal standar sebagai berikut:

a. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Pajak

Pengakuan pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*earned*).



Kelompok pertama merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPR Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pendapatan yang masuk dalam kelompok pendapatan ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan.

Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPD telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya dari wajib pajak. Oleh karena itu, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan pajak LO dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak.....	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....LO		XXX

Pada saat wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam SKP tersebut, wajib pajak akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar pajak. TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mencatat pendapatan pajak tersebut dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang Pajak.....		XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan tersebut ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

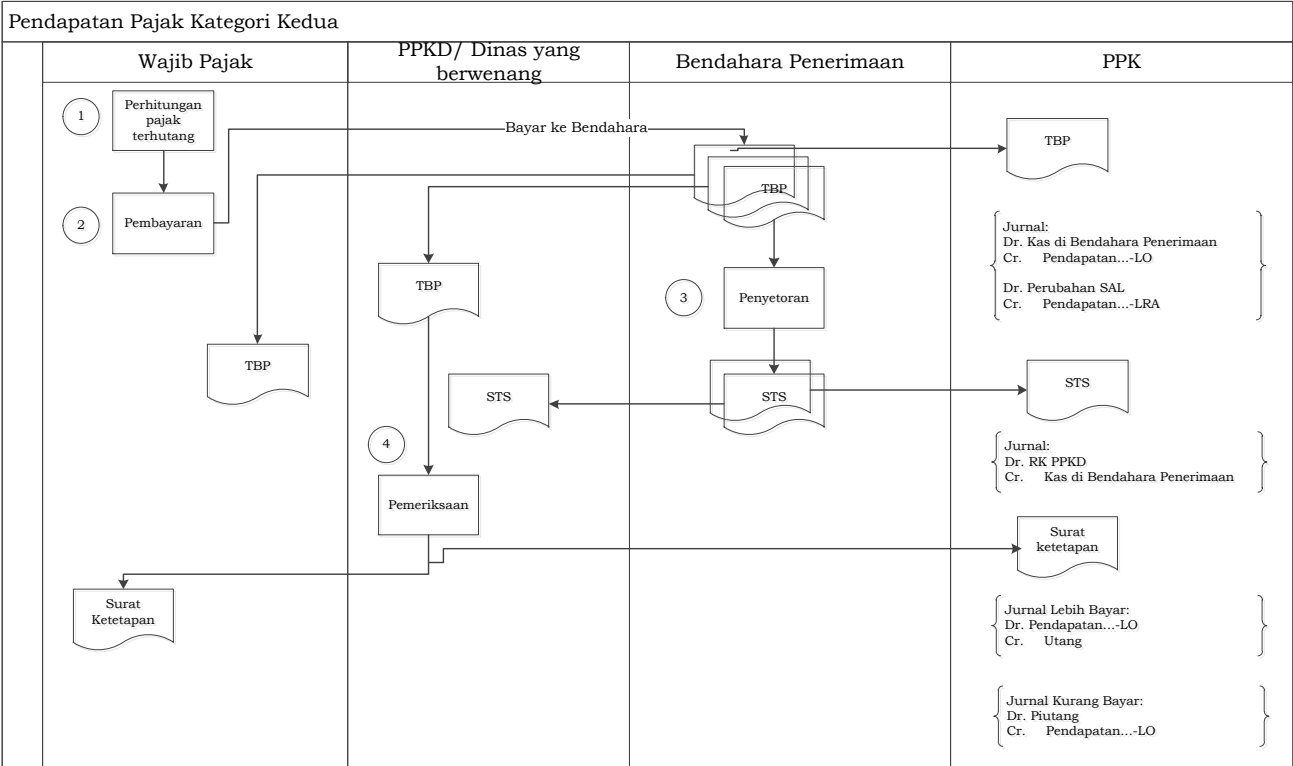
Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Bila Wajib Pajak membayar langsung ke rekening Kas Daerah, maka berdasarkan Nota Kredit dari Bank, PPK-SKPD akan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Piutang Pajak...		XXX

- 1)
- Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut.



Pendapatan Pajak ini didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Contoh pendapatan pajak yang termasuk dalam kelompok pendapatan ini adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak lingkungan, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang sudah dilakukan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*), PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan pajak LO dan pendapatan pajak LRA dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak LO		XXX

Saat Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, apabila ditemukan adanya kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Keterangan Kurang Bayar. SKPD mengakui adanya penambahan Pendapatan LO. Berdasarkan Surat Keterangan tersebut PPK SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak.....	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak..... LO		XXX

Apabila ditemukan adanya lebih bayar maka akan diterbitkan Surat Keterangan Lebih Bayar. SKPD mengakui adanya pengurangan Pendapatan LO. Berdasarkan Surat Keterangan tersebut PPK SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

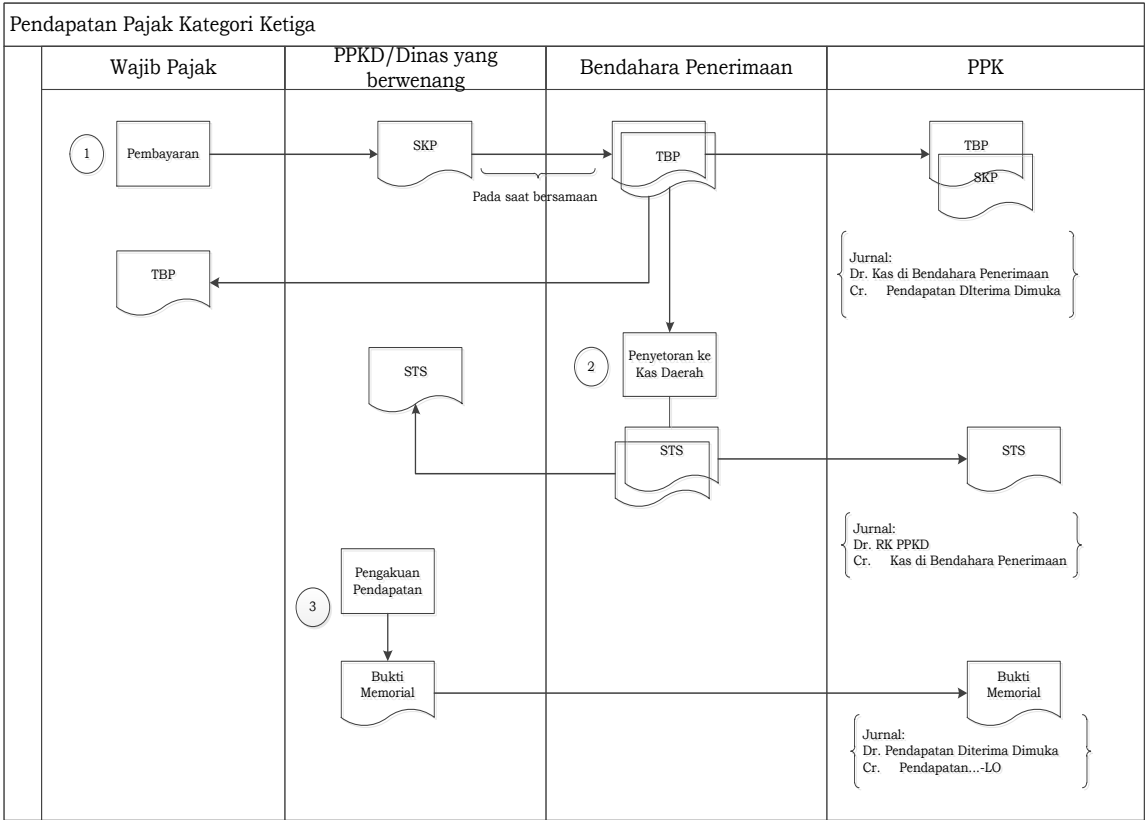
Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Pajak..... LO	XXX	
		XXX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		XXX

Namun, apabila kurang bayar maka PPK akan mengakui adanya piutang pendapatan pajak. PPK SKPD akan menjurnal

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang pendapatan...	XXX	
		XXX	Pendapatan...-LO		XXX

2) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.



Contoh pendapatan kategori ketiga adalah Pajak kendaraan bermotor. Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, PPK-SKPD mengakui adanya Pendapatan Diterima Dimuka dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK-SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

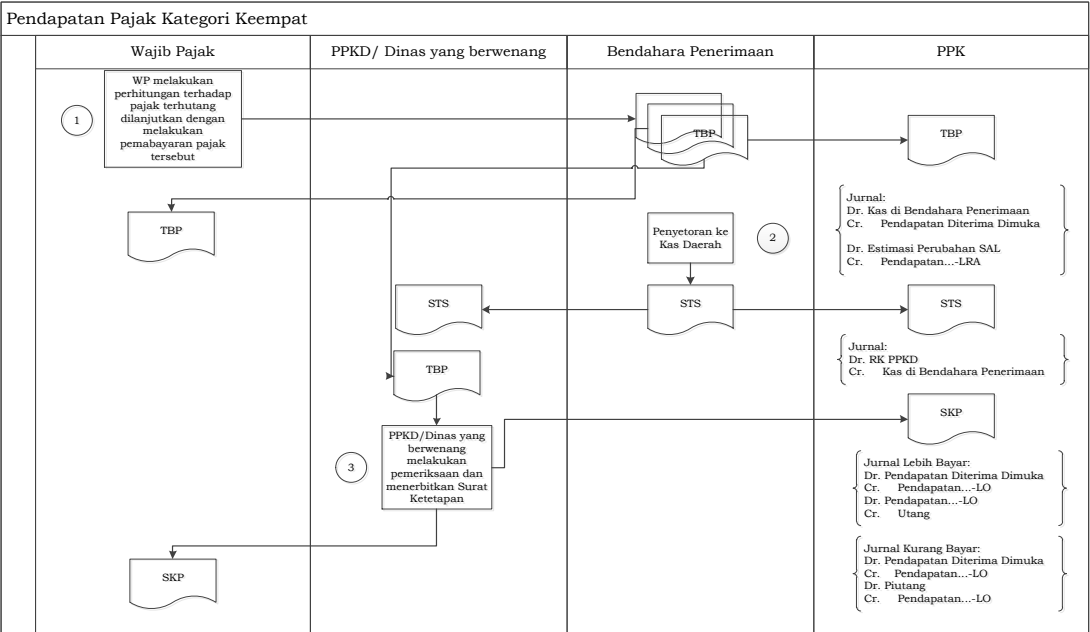
Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Di akhir tahun atau akhir periode akan diterbitkan bukti memorial untuk mengakui pendapatan LO, PPK SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....LO		XXX

- 3) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.



Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Contoh pendapatan daerah yang masuk dalam kategori ini adalah pajak reklame.

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan diterima dimuka dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Pada akhir periode SKPD melakukan pemeriksaan. Apabila ditemukan adanya pajak kurang bayar, SKPD akan mengeluarkan surat ketetapan kurang bayar. Berdasarkan surat ketetapan tersebut, dicatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Pengakuan Pendapatan –LO pada saat pemeriksaan					
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak...LO		XXX
Pengakuan Piutang atas Pajak Kurang Bayar					
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak...LO		XXX

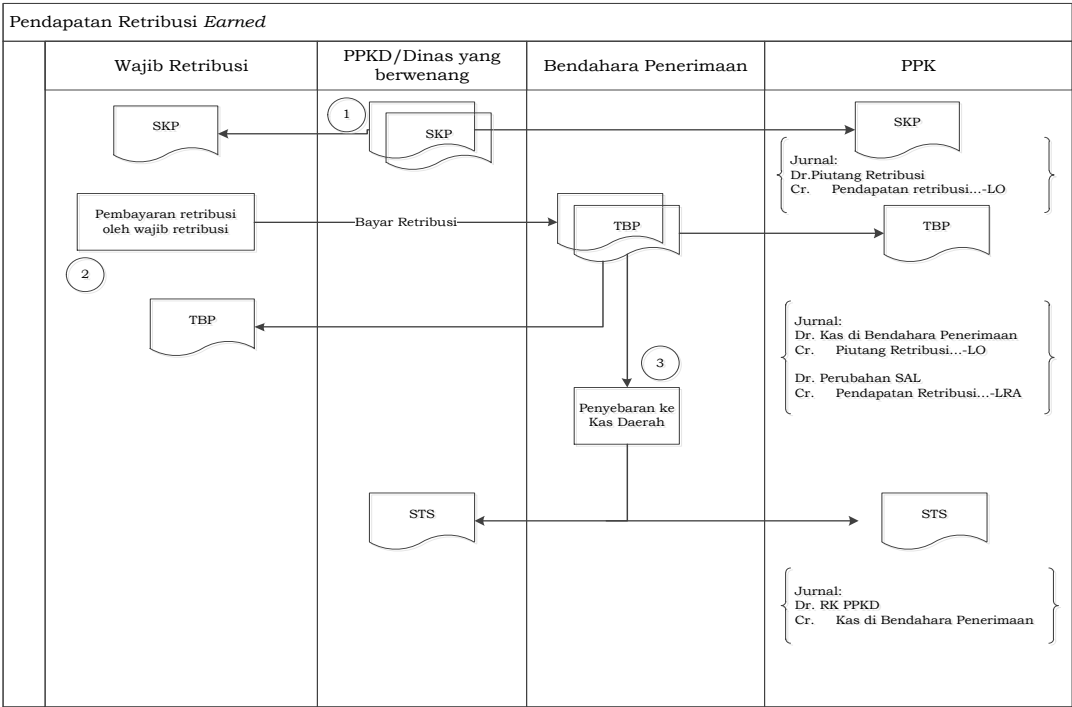
Apabila ditemukan adanya pajak lebih bayar, SKPD akan mengeluarkan surat ketetapan lebih bayar atas pajak. Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Pengakuan Pendapatan –LO pada saat pemeriksaan					
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak....LO		XXX
Pengakuan Piutang atas Pajak Lebih Bayar					
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Pajak....LO	XXX	
		XXX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		XXX

b. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Retribusi

1) Jurnal Standar - *Earned*



Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, SKPD telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya oleh wajib retribusi (*earned*). Oleh karena itu, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan retribusi LO dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Retribusi	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi....LO		XXX

Pada saat wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat dalam SKR tersebut, wajib retribusi akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar retribusi. TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mencatat pendapatan retribusi -LRA dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

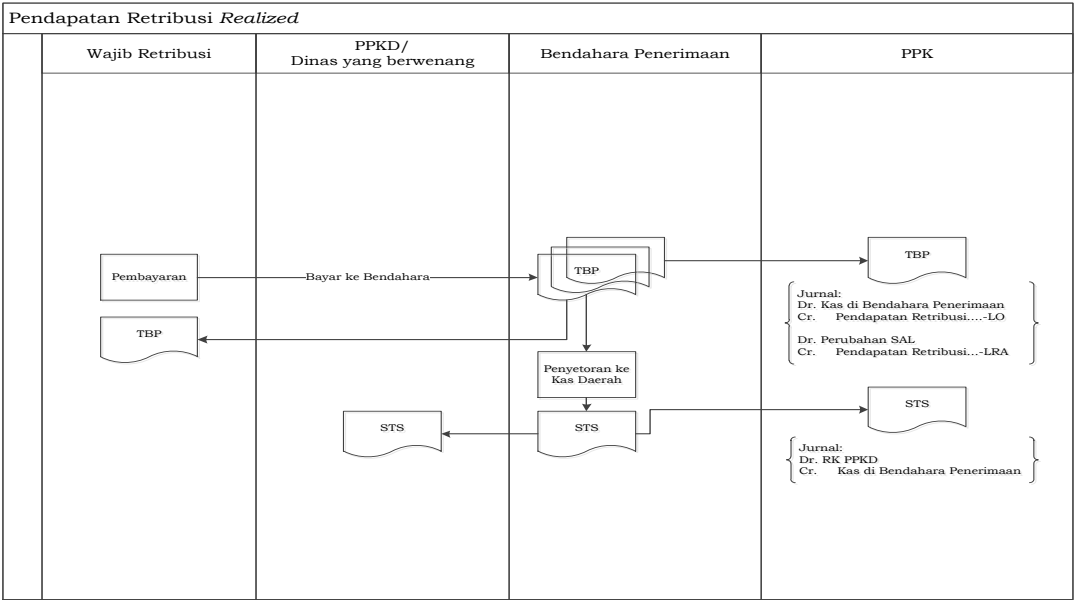
Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang Retribusi....LO		XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

2) Jurnal Standar - *Realized*



Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mengakui pendapatan dengan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi.....LO		XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

D. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN-LO DI PPKD

1. PIHAK PIHAK TERKAIT

Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada PPKD antara lain Pemerintah Pusat, Fungsi Akuntansi PPKD, Bendahara PPKD, dan PPKD selaku BUD.

a. Pemerintah Pusat

b. Fungsi Akuntansi PPKD

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LO dan Neraca;
- 2) melakukan posting jurnal jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian objek);
- 3) menyusun Laporan Keuangan.

c. Bendahara PPKD

- 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku kas penerimaan.
- 2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari Pendapatan.
- 3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari.

d. PPKD Selaku BUD

- 1) Menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah.
- 2) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

2. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

		Dokumen
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Hasil RUPS/Dokumen yang dipersamakan
	Lain-lain PAD yang Sah :	
	• Penjualan Aset yang dipisahkan	Dokumen Kontrak Penjualan /Perjanjian Penjualan/Dokumen yang dipersamakan
	• Jasa giro/bunga deposito	Nota Kredit/sertifikat deposito / dokumen yang dipersamakan
	• Tuntutan Ganti Rugi	SK Pembebanan/SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan
Pendapatan Transfer	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :	

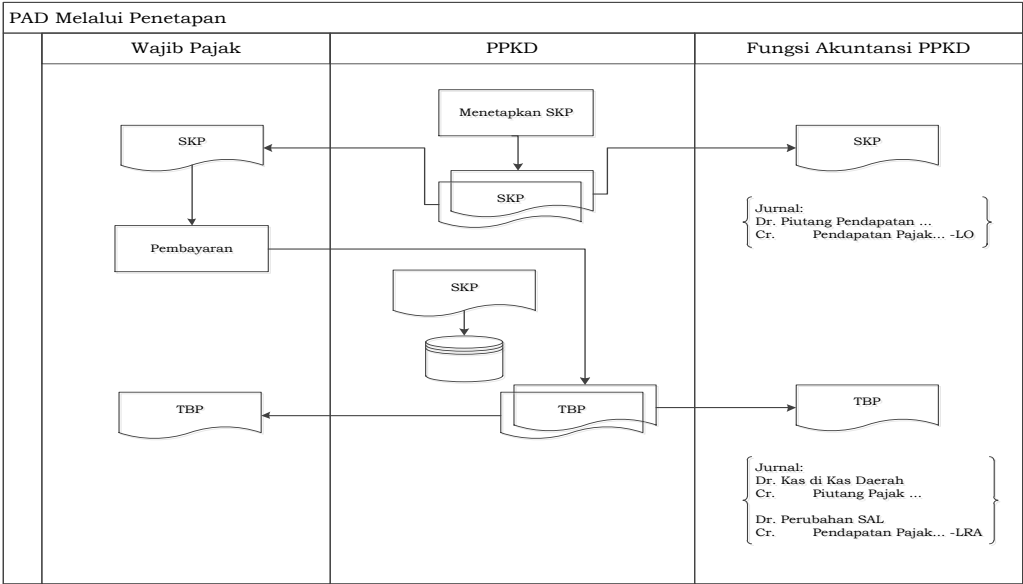
		Dokumen
	• Bagi Hasil Pajak	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	• Bagi hasil bukan Pajak	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	• DAU	Perpres/Dokumen yang dipersamakan
	• DAK	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya :	
	• Dana Otonomi Khusus	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	• Dana Keistimewaan	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	• Dana Penyesuaian	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya:	
	• Pendapatan bagi hasil Pajak	Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan
	• Bantuan Keuangan	Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah	Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan
	Dana Darurat	Keputusan Kepala Daerah /PMK / Dokumen yang dipersamakan
	Pendapatan Lainnya	Dokumen yang dipersamakan

3. FLOWCHART DAN JURNAL STANDAR

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan di PPKD dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif jurnal standar sebagai berikut:

a. Prosedur Pencatatan PAD

1) PAD melalui Penetapan



Ketika PPKD menerbitkan Dokumen Ketetapan yang mengindikasikan adanya hak Pemda atas suatu pendapatan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

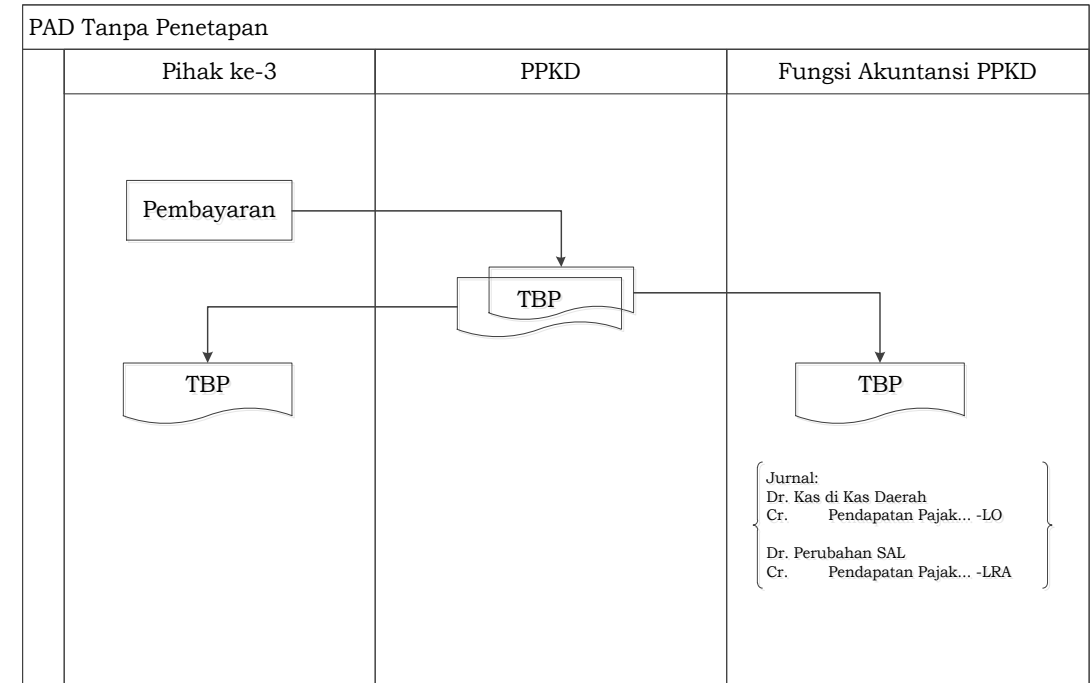
Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pendapatan.....	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak- LO		XXX

Piutang Pendapatan atas Surat Ketetapan itu akan dibayar oleh Wajib Pajak yang selanjutnya akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah menyetor PAD melalui Penetapan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Pajak		XXX

2) PAD Tanpa Penetapan



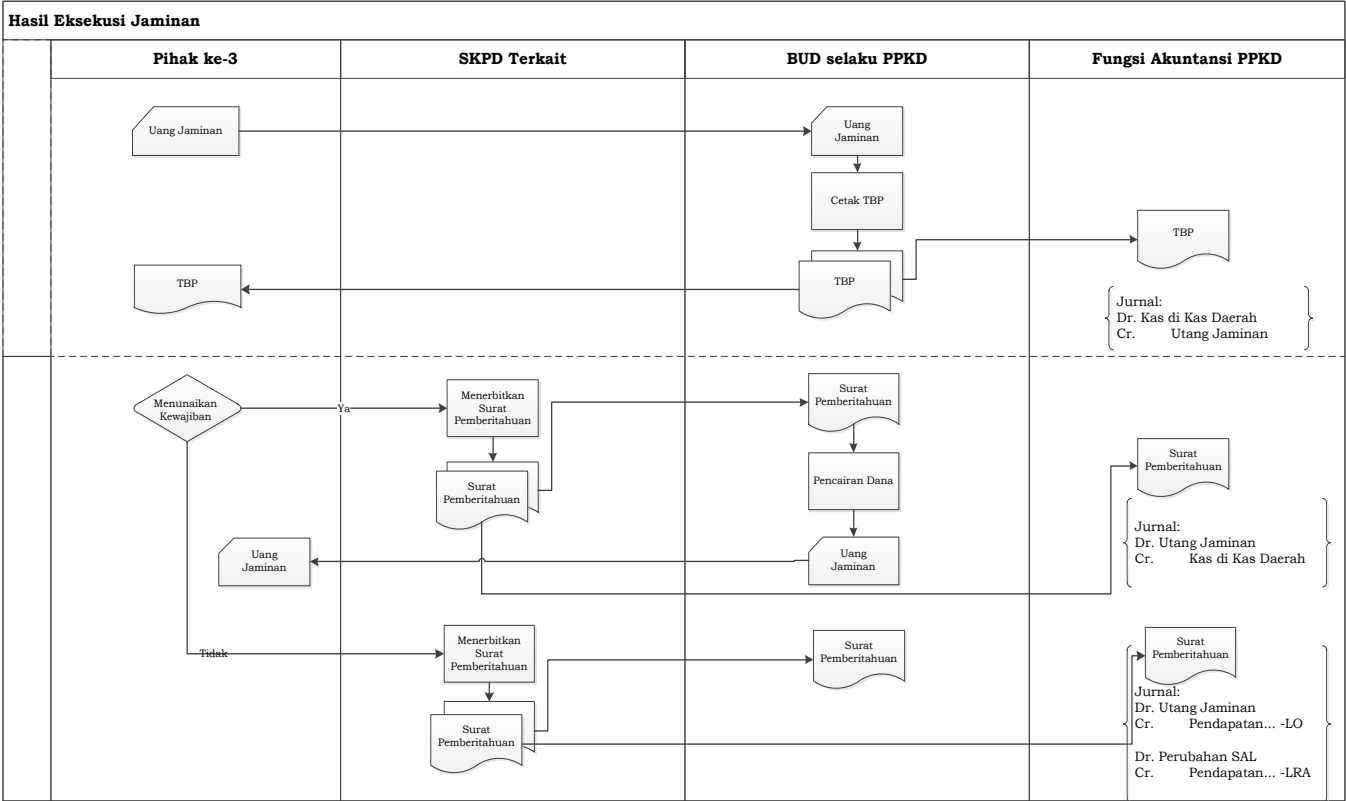
Ketika Pihak ketiga melakukan pembayaran PAD Tanpa Penetapan kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP).

Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	xxxx	
		XXX	Pendapatan Pajak....LO		xxxx

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan



Pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan bersamaan dengan pembayaran perizinan, misal perizinan pemasangan iklan, kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di kas daerah	xxxx	
		XXX	Utang Jaminan...		xxxx

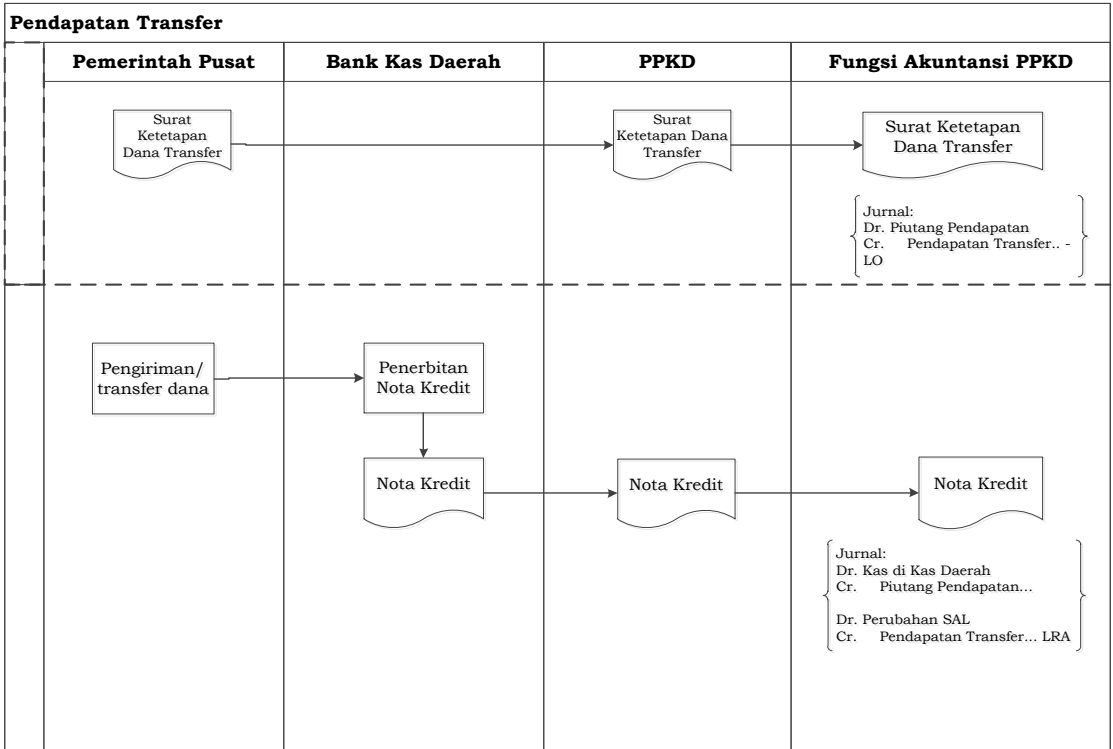
Pada saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan. Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat bukti memorial

terkait eksekusi jaminan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Jaminan	xxxx	
		XXX	Pendapatan....LO		xxxx

b. Prosedur Pencatatan Transfer/Dana Perimbangan



Ketika Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan dari Pemerintah Pusat terkait ketetapan jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketetapan tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang pendapatan...	xxxx	
		XXX	Pendapatan Transfer....LO		xxxx

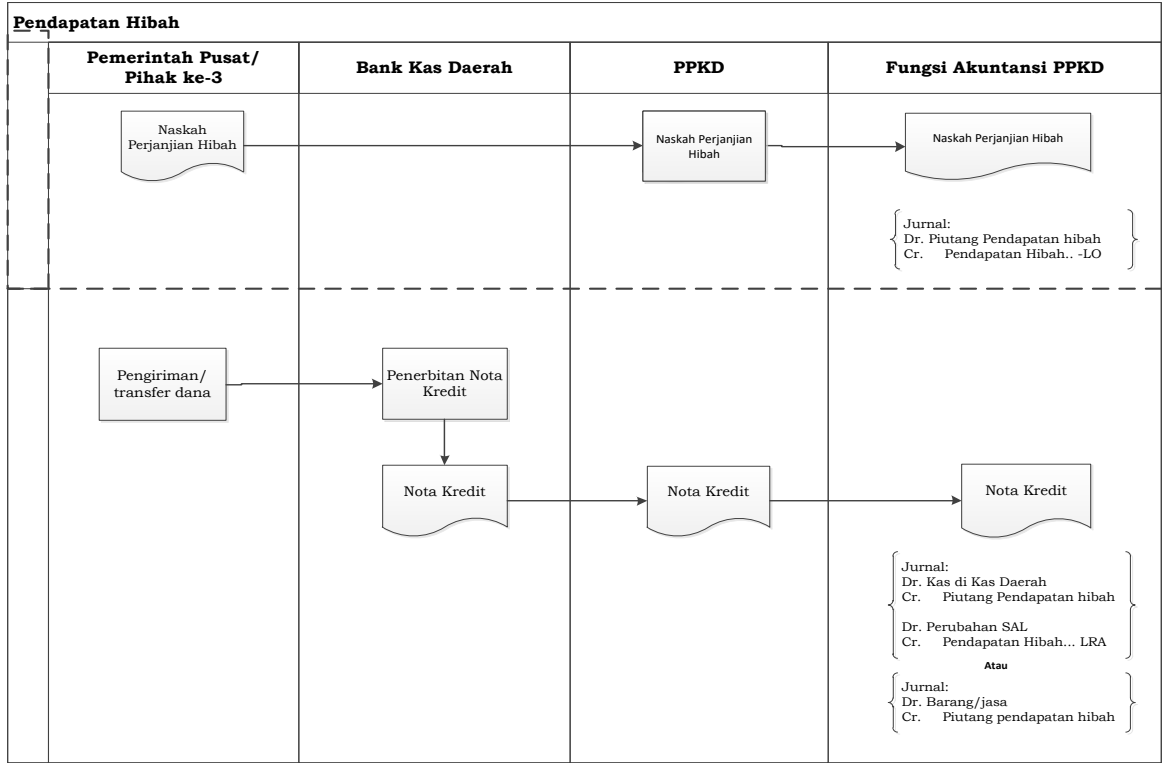
Ketika pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di kas daerah	xxxx	
		XXX	Piutang Pendapatan....		xxxx

c. Prosedur Pencatatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Hibah



Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pendapatan Hibah	xxxx	
		XXX	Pendapatan Transfer Hibah LO		xxxx

Selanjutnya, ketika hibah diterima oleh Pemerintah Daerah, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di kas daerah	xxxx	
		XXX	Piutang Pendapatan hibah....		xxxx

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS.

PEMERINTAH PROVINSI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam rupiah)					
No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Jumlah Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
22					
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
27	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB II
SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN – LRA

A. DEFINISI

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaann Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pencatatan pendapatan-LRA ini merupakan realisasi dari anggaran pendapatan.

Pendapatan-LRA dicatat dan diakui ketika ada kas yang diterima.

B. KLASIFIKASI

Pendapatan - LRA diklasifikasikan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer	Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
	Bantuan Keuangan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah
	Dana Darurat
	Pendapatan Lainnya

C. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA DI SKPD

1. PIHAK PIHAK TERKAIT

Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD antara lain:

- a) Wajib Pajak atau Retribusi,
- b) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD),

Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA;
 - 2) melakukan posting jurnal jurnal transaksi/ kejadian pendapatan-LRA Buku Besar masing masing rekening (rincian objek);
 - 3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.
- c) Bendahara Penerimaan SKPD
- 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku kas penerimaan;
 - 2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari Pendapatan;
 - 3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari.
- d) PA/KPA
- 1) menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah;
 - 2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

2. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Kelompok Pendapatan	Jenis Pendapatan	Dokumen
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	- SKP Daerah/SKR Daerah/ STS/TBP/Dokumen Lain yang dipersamakan - Tanda Bukti Pembayaran
	Retribusi Daerah	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
	Lain-lain PAD yang Sah	

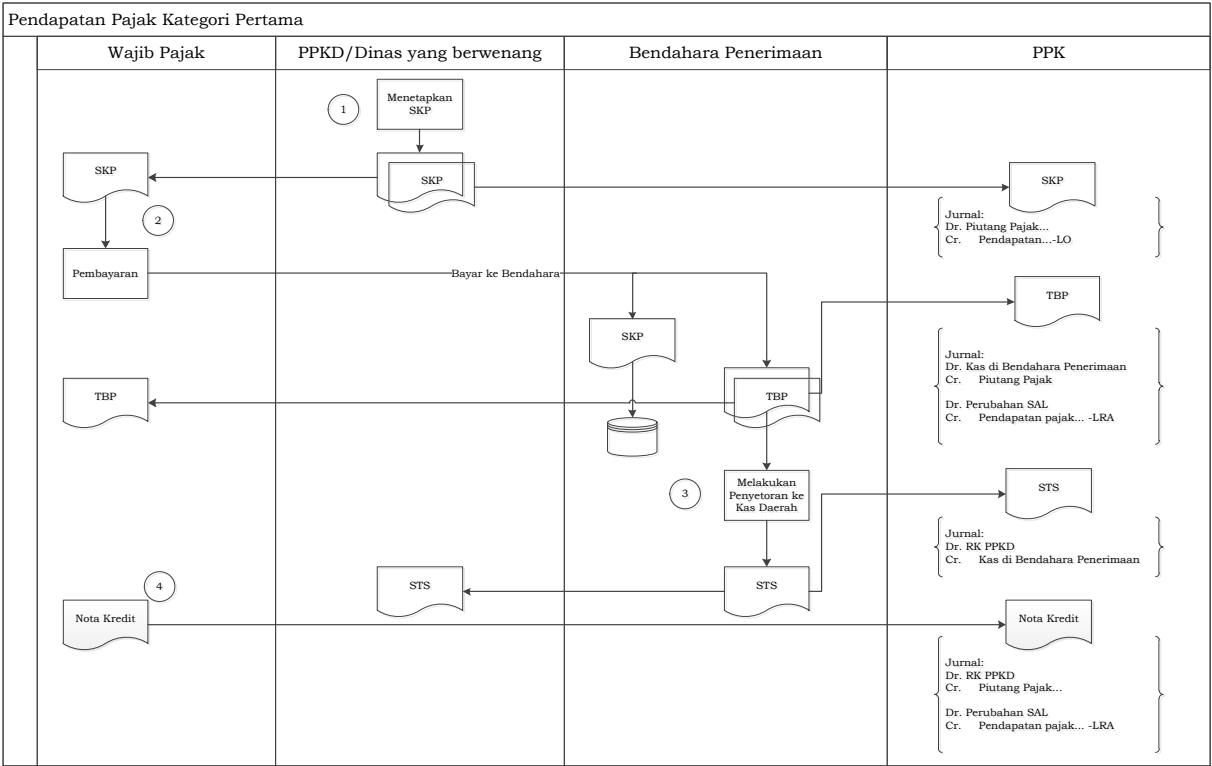
3. FLOWCHART DAN JURNAL STANDAR

Pendapatan-LRA pada level SKPD juga dapat dikelompokkan ke dalam 6 (kategori), yakni Pendapatan Pajak Kategori Pertama, Pendapatan Pajak Kategori Kedua, Pendapatan Pajak Kategori Ketiga, Pendapatan Pajak Kategori Keempat, Pencatatan Retribusi *Earned*, dan Pencatatan Retribusi *Realized*.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan di SKPD dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif flowchart dan jurnal standar sebagai berikut:

a. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Pajak

- 1) Pengakuan pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*earned*).



Kelompok pertama merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPR Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pendapatan yang masuk dalam kelompok pendapatan ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan.

Pada saat wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam SKP tersebut, wajib pajak akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar pajak. TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mencatat pendapatan pajak tersebut dengan jurnal:

Jurnal LRA

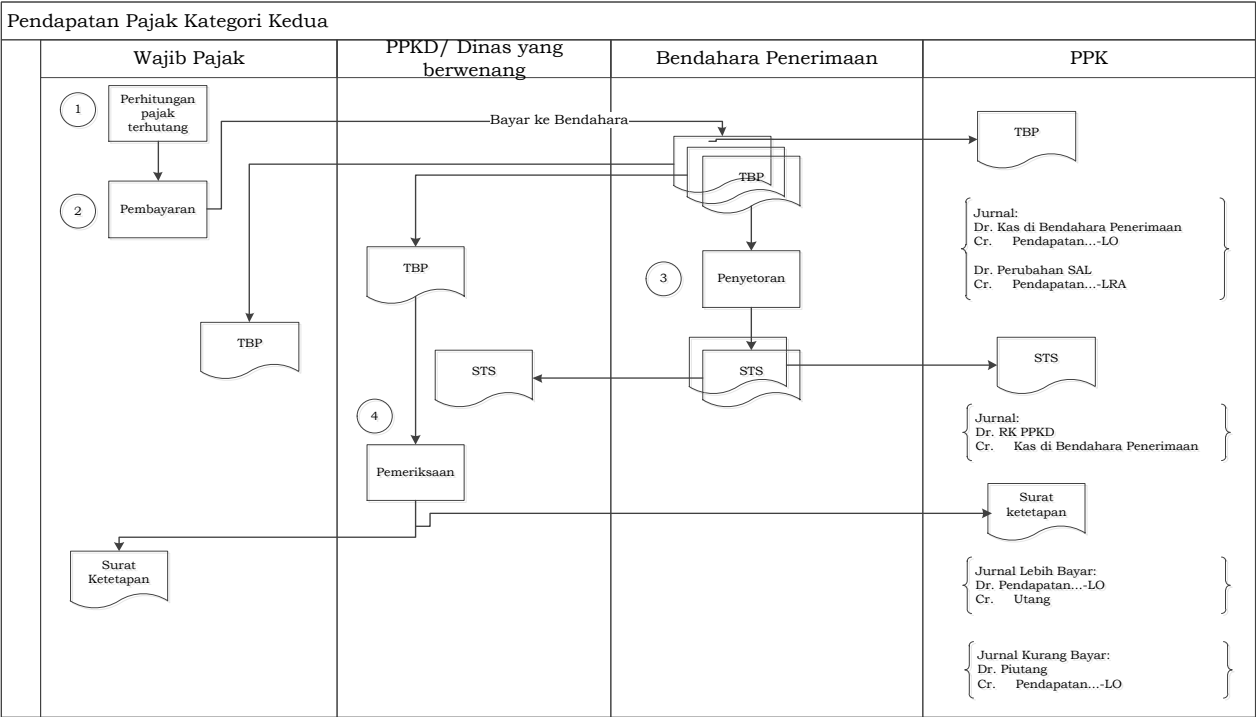
Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....LRA		XXX

Bila Wajib Pajak membayar langsung ke rekening Kas Daerah, maka berdasarkan Nota Kredit dari Bank, PPK-SKPD akan menjurnal:

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....LRA		XXX

- 2) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut.



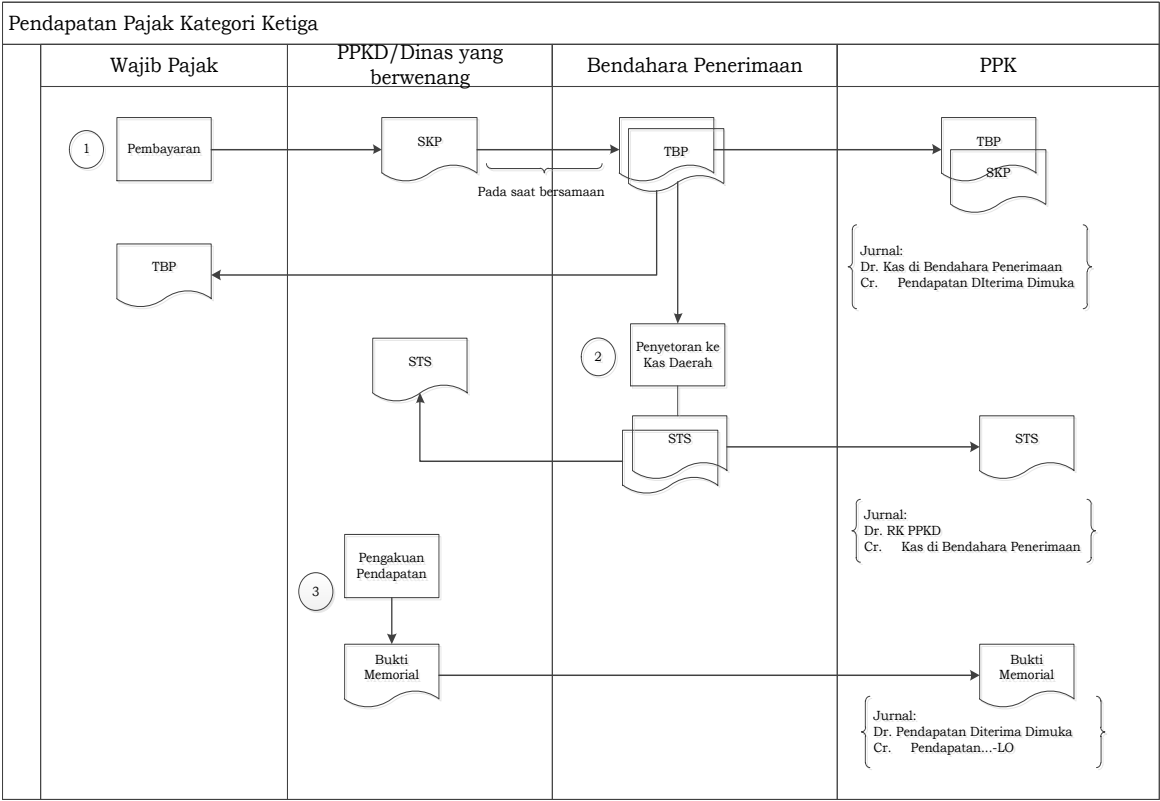
Pendapatan Pajak ini didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Contoh pendapatan pajak yang termasuk dalam kelompok pendapatan ini adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak lingkungan, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang sudah dilakukan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*), PPK-SKPD menjurnal:

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak LRA		XXX

3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.

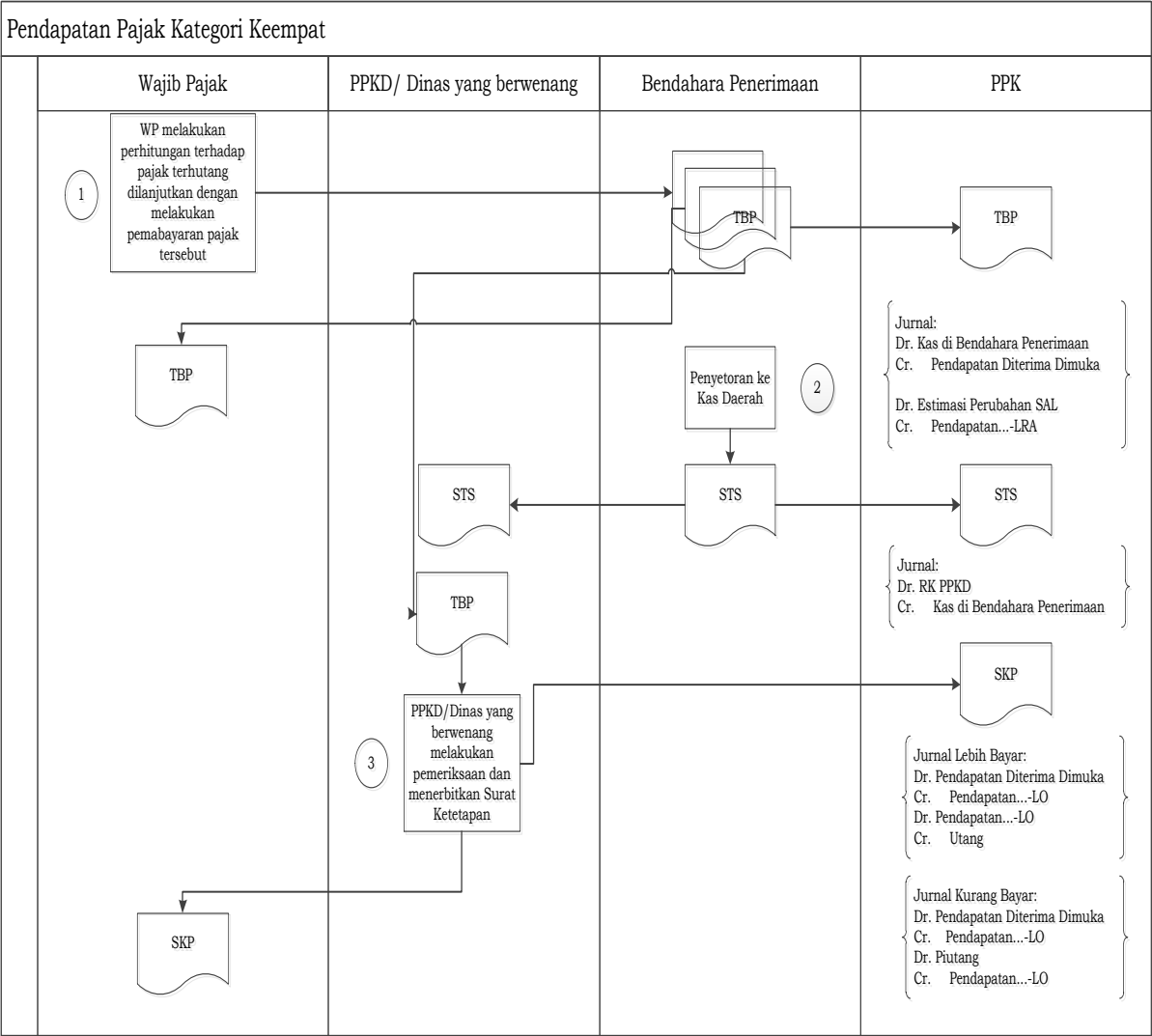


Contoh pendapatan kategori ketiga adalah Pajak kendaraan bermotor. Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, PPK-SKPD menjurnal:

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....LRA		XXX

- 4) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.



Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Contoh pendapatan daerah yang masuk dalam kategori ini adalah pajak reklame.

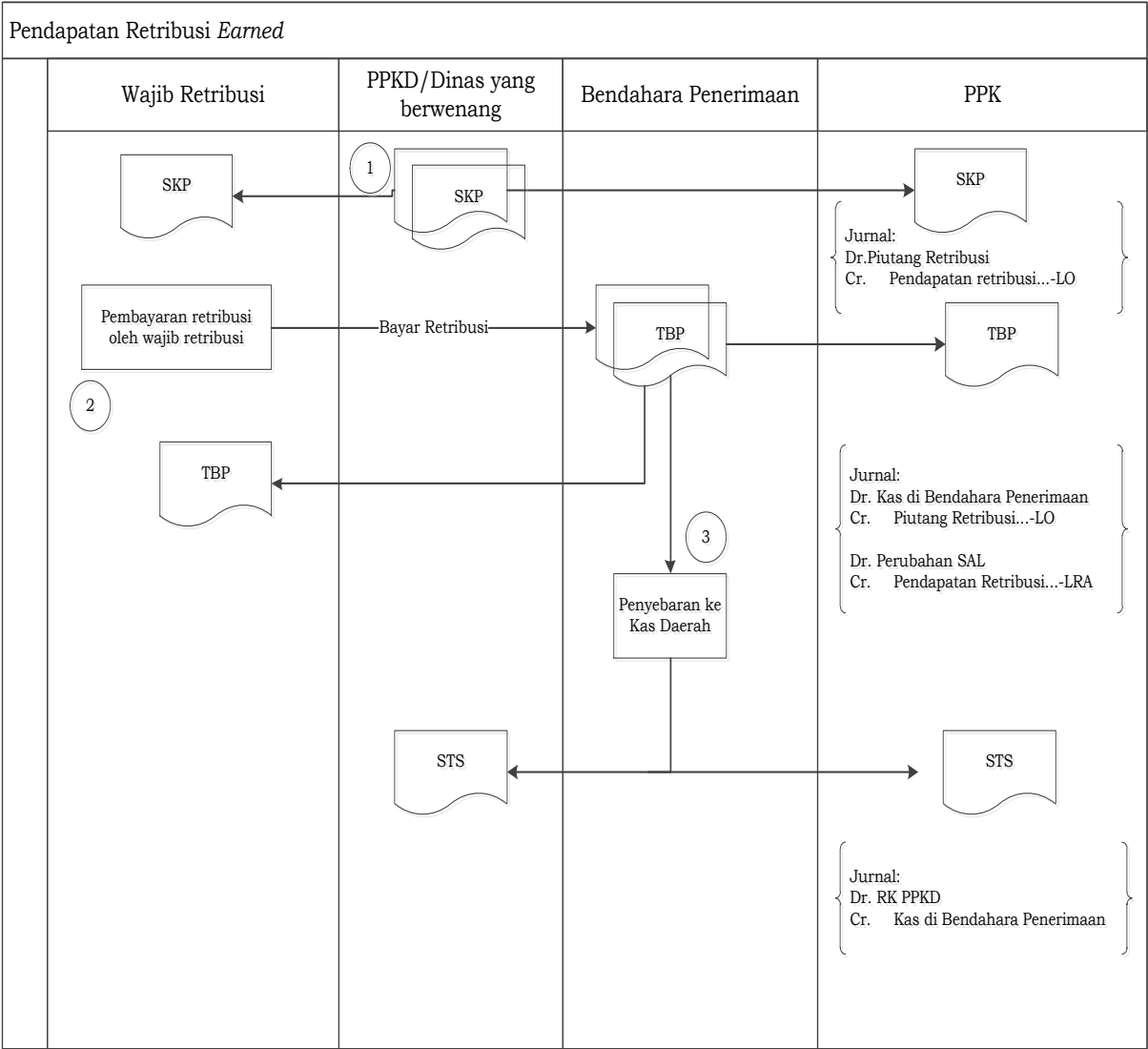
Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, PPK-SKPD menjurnal:

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak..LRA		XXX

b. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Retribusi

1) Jurnal Standar - *Earned*

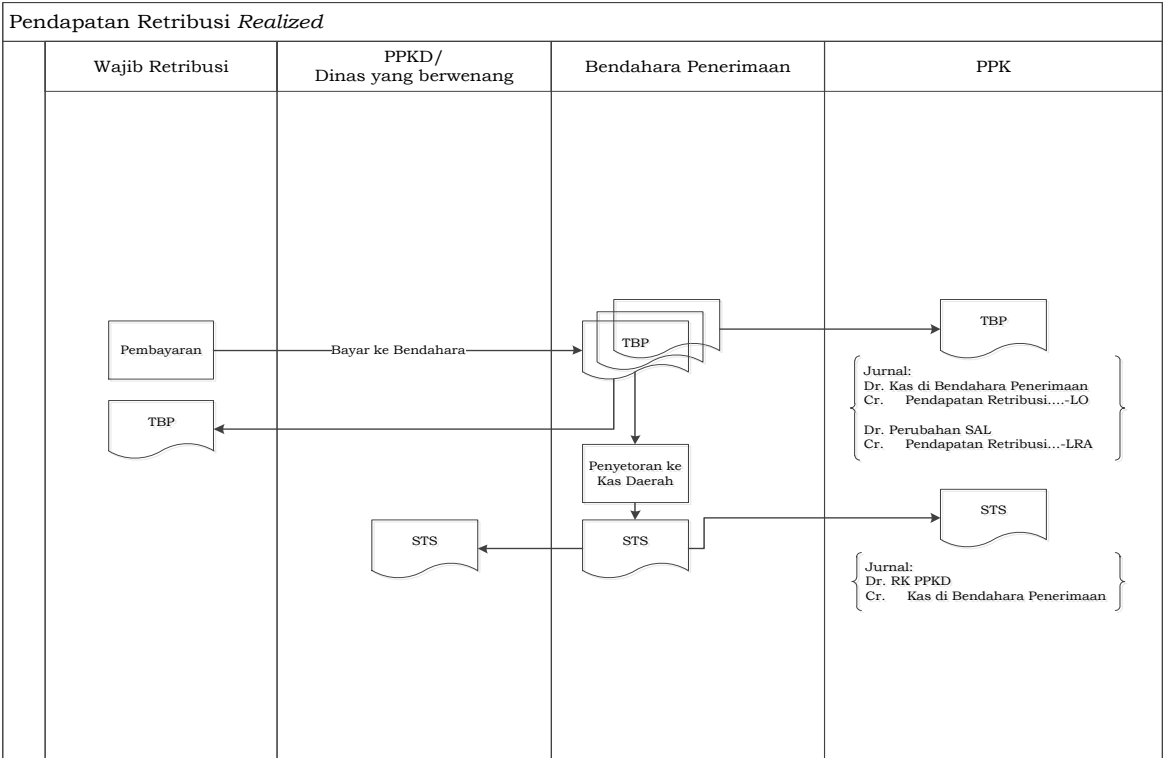


Pada saat wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat dalam SKR, wajib retribusi akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar retribusi. TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mencatat pendapatan retribusi -LRA dengan jurnal:

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi..... LRA		XXX

2) Jurnal Standar – *Realized*



Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mengakui pendapatan LRA dengan mencatat jurnal:

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi.....LRA		XXX

D. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA DI PPKD

1. Pihak Pihak Terkait

Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada PPKD antara lain Bendahara PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD, dan PPKD selaku BUD.

a. Fungsi Akuntansi PPKD

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian Pendapatan LRA berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LRA;

- 2) melakukan posting jurnal transaksi/kejadian pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian objek);
- 3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP.SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara PPKD

- 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku kas penerimaan.
- 2) Membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari Pendapatan.
- 3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari.

c. PPKD Selaku BUD

- 1) Menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah.
- 2) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

2. Dokumen yang Digunakan

		Dokumen
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	HasilRUPS/Dokumen yang dipersamakan
	Lain-lain PAD yang Sah :	
	• Penjualan Aset yang dipisahkan	Dokumen Kontrak Penjualan /Perjanjian Penjualan/Dokumen yang dipersamakan
	• Jasa giro/bunga deposito	Nota Kredit/sertifikat deposito / dokumen yang dipersamakan
	• Tuntutan Ganti Rugi	SK Pembebanan/SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan
Pendapatan Transfer	PendapatanTransfer Pemerintah Pusat :	
	• Bagi Hasil Pajak	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	• Bagi hasil bukan Pajak	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	• DAU	Perpres/Dokumen yang dipersamakan

		Dokumen
	• DAK	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya :	
	• Dana Otonomi Khusus	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	• Dana Keistimewaan	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	• Dana Penyesuaian	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya:	
	• Pendapatan bagi hasil Pajak	Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan
	• Bantuan Keuangan	Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah	Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan
	Dana Darurat	Keputusan Kepala Daerah /PMK / Dokumen yang dipersamakan
	Pendapatan Lainnya	Dokumen yang dipersamakan

3. Jurnal Standar

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

- diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- diterima oleh SKPD; atau
- diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan di PPKD dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif jurnal standar sebagai berikut:

a. Prosedur Pencatatan PAD

1) PAD melalui Penetapan

PPKD menerbitkan Dokumen Ketetapan yang mengindikasikan adanya hak Pemda atas suatu pendapatan. Piutang Pendapatan atas Surat Ketetapan itu akan dibayar oleh Wajib Pajak yang selanjutnya akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah menyetor PAD melalui Penetapan. Berdasarkan

Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	xxxx	
		XXX	Pendapatan Pajak LRA		xxxx

2) PAD Tanpa Penetapan

Ketika Pihak ketiga melakukan pembayaran PAD Tanpa Penetapan kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	xxxx	
		XXX	Pendapatan Pajak...LRA		xxxx

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan bersamaan dengan pembayaran perizinan, misal perizinan pemasangan iklan, kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Pada saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan. Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat bukti memorial terkait eksekusi jaminan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	xxxx	
		XXX	Pendapatan LRA		xxxx

b. Prosedur Pencatatan Transfer/Dana Perimbangan

Ketika Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan dari Pemerintah Pusat terkait ketetapan jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah.

Ketika pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	xxxx	
		XXX	Pendapatan Transfer LRA		xxxx

c. Prosedur Pencatatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani, ketika hibah diterima oleh Pemerintah Daerah, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	xxxx	
		XXX	Pendapatan Hibah - LRA		xxxx

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.

PEMERINTAH PROVINSI				
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH				
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0				
(Dalam Rupiah)				
URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xxx
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Total Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB III
SISTEM AKUNTANSI BEBAN

A. UMUM

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui ketika sudah timbul kewajiban akan belanja yang kita lakukan.

2. Klasifikasi

Klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:

BEBAN	KEWENANGAN
Beban Operasi – LO	
Beban Pegawai	SKPD
Beban Barang dan Jasa	SKPD
Beban Bunga	PPKD
Beban Subsidi	PPKD
Beban Hibah	PPKD&SKPD
Beban Bantuan Sosial	PPKD
Beban Penyusutan dan Amortisasi	SKPD
Beban Penyisihan Piutang	SKPD
Beban Lain-Lain	SKPD
Beban Transfer	
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	PPKD
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	PPKD
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	PPKD
Defisit Non Operasional	PPKD
Beban Luar Biasa	PPKD

B. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DI SKPD

a. Pihak-pihak terkait

a. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

b. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Dalam sistem akuntansi Beban, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1.mencatat transaksi/kejadian beban berdasarkan bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LO dan Neraca.
- 2.melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/ kejadian beban kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian objek).
- 3.menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan keuangan.

c. Bendahara Pengeluaran

1. mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban kedalam buku kas umum SKPD.
2. membuat SPJ atas beban.

d. Pengguna Anggaran

e. Pejabat Pelaksana Teknis Anggaran

b. Dokumen Terkait

a. Daftar barang/honor

b. Nota Permintaan Dana (NPD)

c. Bukti Pembayaran Gaji/Barang/Jasa

d. Berita Serah Terima Barang

e. Surat Perintah Pembayaran (SPP)

f. Surat Perintah Membayar (SPM)

g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

c. Flowchart dan Jurnal Standar

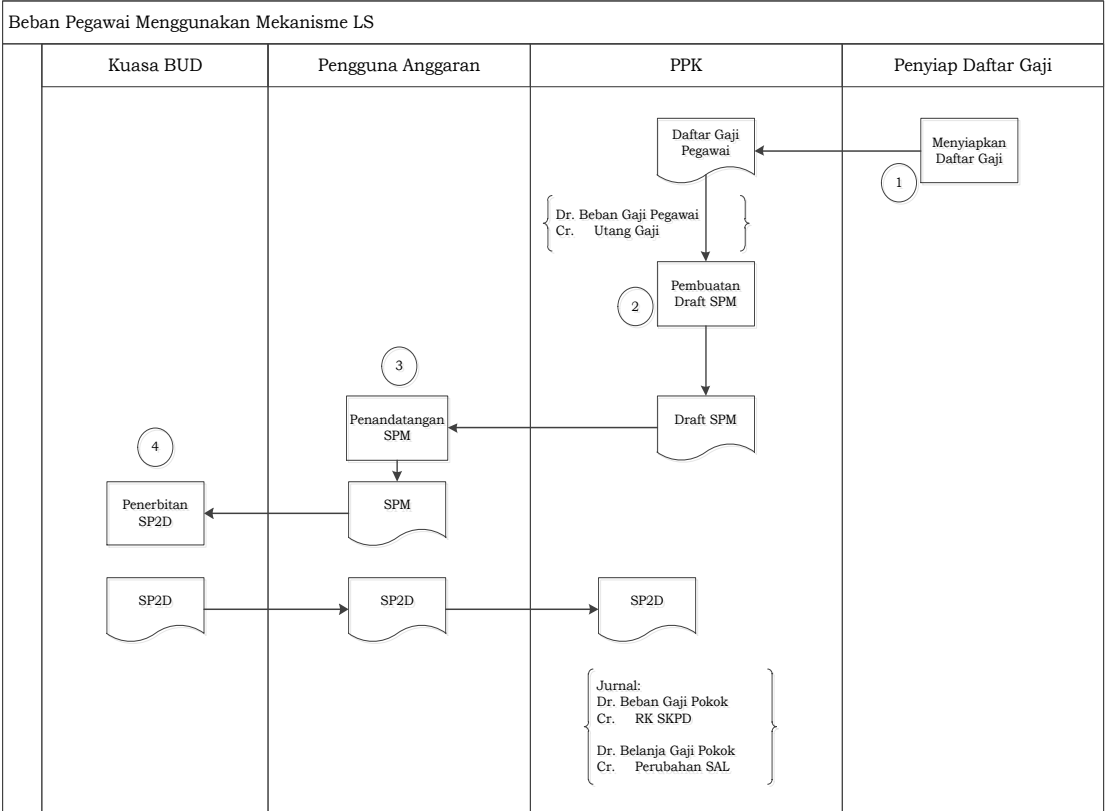
Akuntansi Beban pada SKPD dilakukan oleh PPK SKPD. Sistem dan prosedur akuntansi beban ini meliputi akuntansi beban pegawai, beban barang dan jasa, beban hibah, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain.

1) Beban Pegawai

Beban pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur, Beban Beasiswa Pendidikan PNS, Beban Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

PNS, dan Beban Pegawai BLUD. Beban pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Dalam konteks beban pegaawai dengan mekanisme LS, akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, beban pegawai melalui mekanisme LS diasumsikan dana dari Kas Daerah langsung diterima oleh pegawai.



Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS dimana pembayaran tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing PNSD. Berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan, maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Gaji Pokok	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

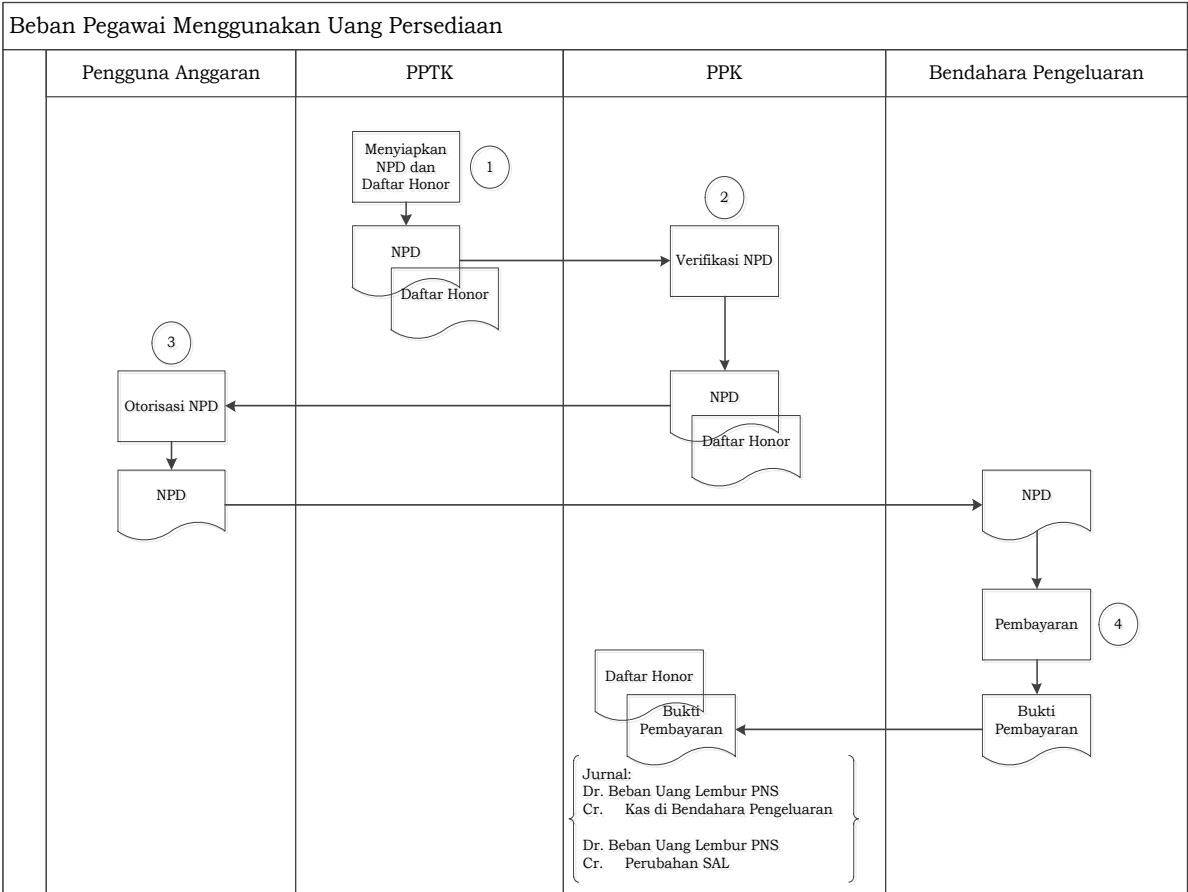
Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS dimana pembayaran ditransfer ke Bendahara Pengeluaran kemudian oleh bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing masing PNS. Berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan, maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX
		XXX	Beban Gaji Pokok	XXX	
		XXX	Kas di bendahara Pengeluaran		XXX

Beban pegawai menggunakan Uang Persediaan

Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (Bukti Pembayaran Honor) telah diterima oleh PPK. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban pegawai diakui ketika Daftar Gaji telah terbit dan diterima oleh PPK.



Beban pegawai (misalnya pembayaran lembur) yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU dimana pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran ke masing masing PNS, maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Uang Lembur PNS	XXX	
		XXX	Kas Bendahara Pengeluaran		XXX

2) Beban Barang dan Jasa

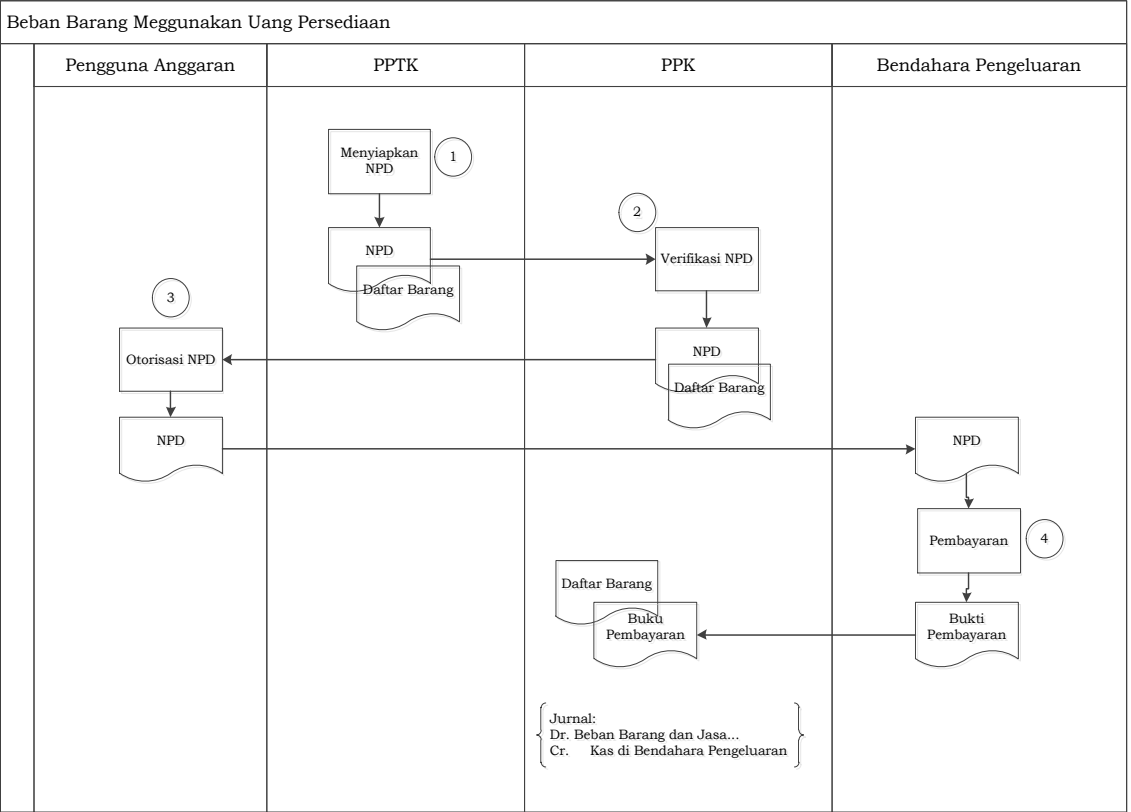
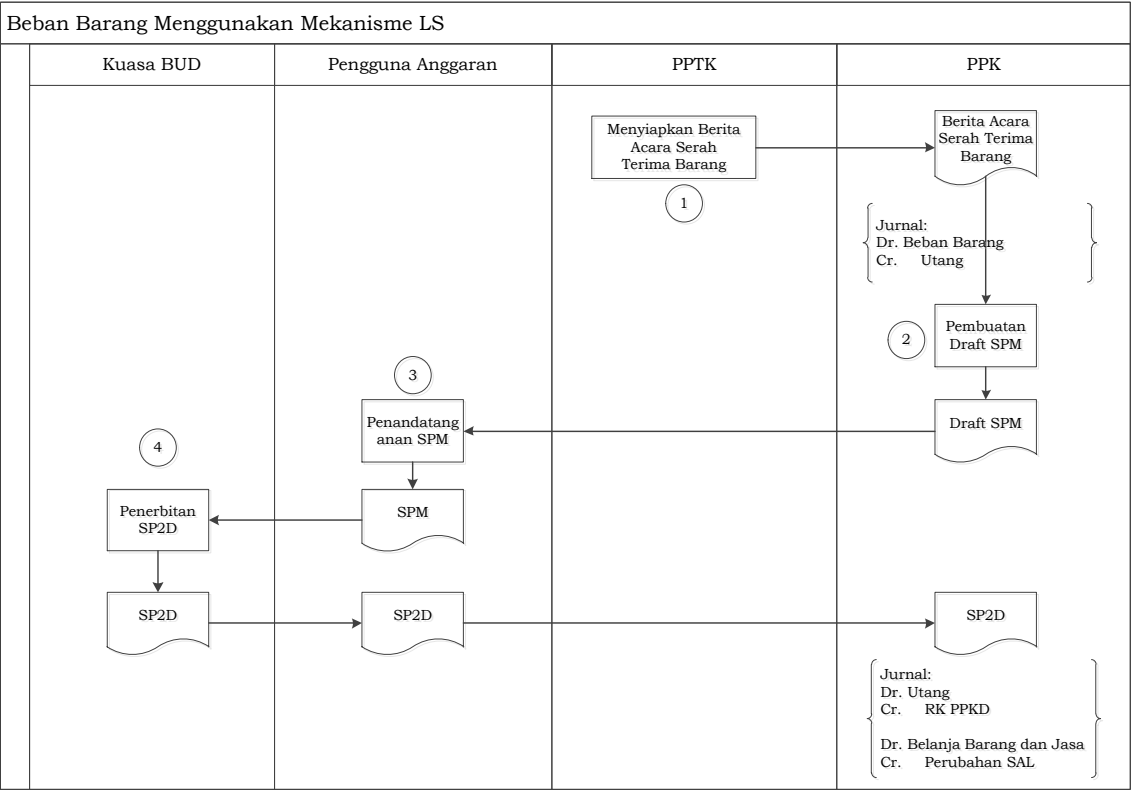
Beban barang dan jasa terdiri atas Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, dan Beban Perjalanan Dinas. Beban barang dan jasa dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU maupun dengan mekanisme LS.

Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban barang diakui ketika bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diterima oleh PPK. Hal ini terjadi pada saat adanya pengajuan GU. Dalam mekanisme LS, beban barang diakui ketika Berita Acara (yang mengindikasikan telah diterimanya barang oleh SKPD atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga) diterima oleh PPK.

Khusus untuk beban persediaan, terdapat 2 (dua) alternatif pendekatan yang dapat dilakukan sebagai metode pengakuan transaksi pembelian persediaan serta metode pencatatan persediaan.

Pengakuan persediaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Melalui pendekatan aset, setiap pembelian persediaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah langsung akan menambah aset yaitu pada akun persediaan. Melalui pendekatan beban, transaksi pembelian persediaan tidak secara langsung menambah akun persediaan, melainkan diakui sebagai beban.

Metode pencatatan persediaan terbagi 2 (dua), yaitu metode perpetual dan metode periodik. Metode perpetual menuntut dilakukannya pemutakhiran setiap terjadi perubahan posisi akun persediaan. Sedangkan penggunaan metode periodik dalam pencatatan persediaan hanya meminta pemutakhiran posisi akun persediaan di akhir periode (saat dilakukannya penyesuaian).



i. Pendekatan Beban

Pembelian Barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut akan langsung digunakan segera pada kegiatan. Serta Pembelian tersebut belum dilakukan Pembayaran dan Barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan surat Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Persediaan ATK	XXX	
		XXX	Utang Belanja ATK		XXX

Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D LS maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja ATK	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Atau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja ATK	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Pada akhir periode fungsi akuntansi akan melakukan Penghitungan fisik (*Stock Opname*) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan dan berdasarkan hasil *stock opname* maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan ATK	XXX	
		XXX	Beban ATK		XXX

ii. Pendekatan Aset

Pembelian Barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut tidak langsung akan digunakan/dikonsumsi segera tapi sifatnya untuk digunakan dalam satu periode atau sifatnya berjaga-jaga. Serta pembelian tersebut belum dilakukan Pembayaran dan Barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan Surat Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan ATK	XXX	
		XXX	Utang Belanja ATK		XXX

Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D LS maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja ATK	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Atau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja ATK	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Apabila perhitungan persediaan menggunakan metode perpetual maka pada akhir periode akuntansi tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Selanjutnya apabila perhitungan persediaan menggunakan metode periodik, maka fungsi akuntansi melakukan Penghitungan fisik (*Stock Opname*) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan, dan berdasarkan hasil *stock opname* tersebut jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban ATK	XXX	
		XXX	Persediaan ATK		XXX

3) Beban Hibah dan Bantuan Sosial

Beban hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk barang, pengakuannya pada saat penanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/ dokumen yang dipersamakan atau dapat juga pada saat penyerahan kepada penerima hibah/bantuan sosial. Beban hibah dan Bantuan Sosial menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

a) Pendekatan Beban

SKPD melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan Barang dan jasa tersebut telah diterima dari rekanan dengan Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan akan tetapi belum dilakukan pembayaran, serta kemudian barang tersebut langsung diserahkan ke penerima hibah bersamaan dengan NPHD atau dokumen yang sah ditanda tangani maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Barang yang akan diserahkan kpd Masyarakat	XXX	
		XXX	Utang Belanja Barang ... yang akan diserahhkan pada pihak ketiga		XXX

Kemudian PPK SKPD melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme LS maka pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Barang ... yang akan diserahhkan pada pihak ketiga	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja barang ... dihibahkan kepada Masyarakat	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Pada akhir periode fungsi akuntansi akan melakukan Penghitungan fisik (*Stock Opname*) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan dan berdasarkan hasil stock opname maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan Barang...yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	XXX	
		XXX	Beban Barang... yang akan diserahkan kepada pihak ketiga		XXX

b) Pendekatan Aset

SKPD melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan Barang dan jasa tersebut telah diterima dari rekanan dengan Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan akan tetapi belum dilakukan pembayaran, serta NPHD/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/Dokumen yang dipersamakan telah ditanda tangani akan tetapi barang tersebut belum diserahkan ke ke penerima hibah. Berdasarkan kejadian tersebut, maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan Barang yang akan diberikan kpd Pihakketiga	XXX	
		XXX	Utang Belanja Barang ...		XXX

Kemudian PPK SKPD melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme LS maka pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Brg ...	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Setelah itu barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat oleh kepala SKPD melakukan penyerahan barang kepada penerima hibah/bantuan sosial dimana berdasarkan NPHD/Surat Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan yang telah ditanda tangani maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Barang yang akan diserahkan kpd Masyarakat	XXX	
		XXX	Persediaan barang ... yang akan diserahkan kpd Masyarakat		XXX

4) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan SKPD jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan	XXX	
		XXX	Akm Penyusutan ...		XXX

5) Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Jurnal standar beban penyisihan piutang:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyisihan Piutang.....	XXX	
		XXX	Penyisihan Piutang		XXX

C. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DI PPKD

a. Pihak Pihak Terkait

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan Bendahara Pengeluaran PPKD.

1) Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi Beban, PPK-PPKD melaksanakan fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

- (a) mencatat transaksi/kejadian beban berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LO dan Neraca;
- (b) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian beban kedalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
- (c) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan.

2) Bendahara Pengeluaran PPKD

- (a) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban kedalam buku kas umum PPKD.
- (b) membuat SPJ atas beban

3) Kuasa BUD

4) Pemda Lain/PD/Masyarakat/Ormas

2. Dokumen yang digunakan

Dokumen berdasarkan klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

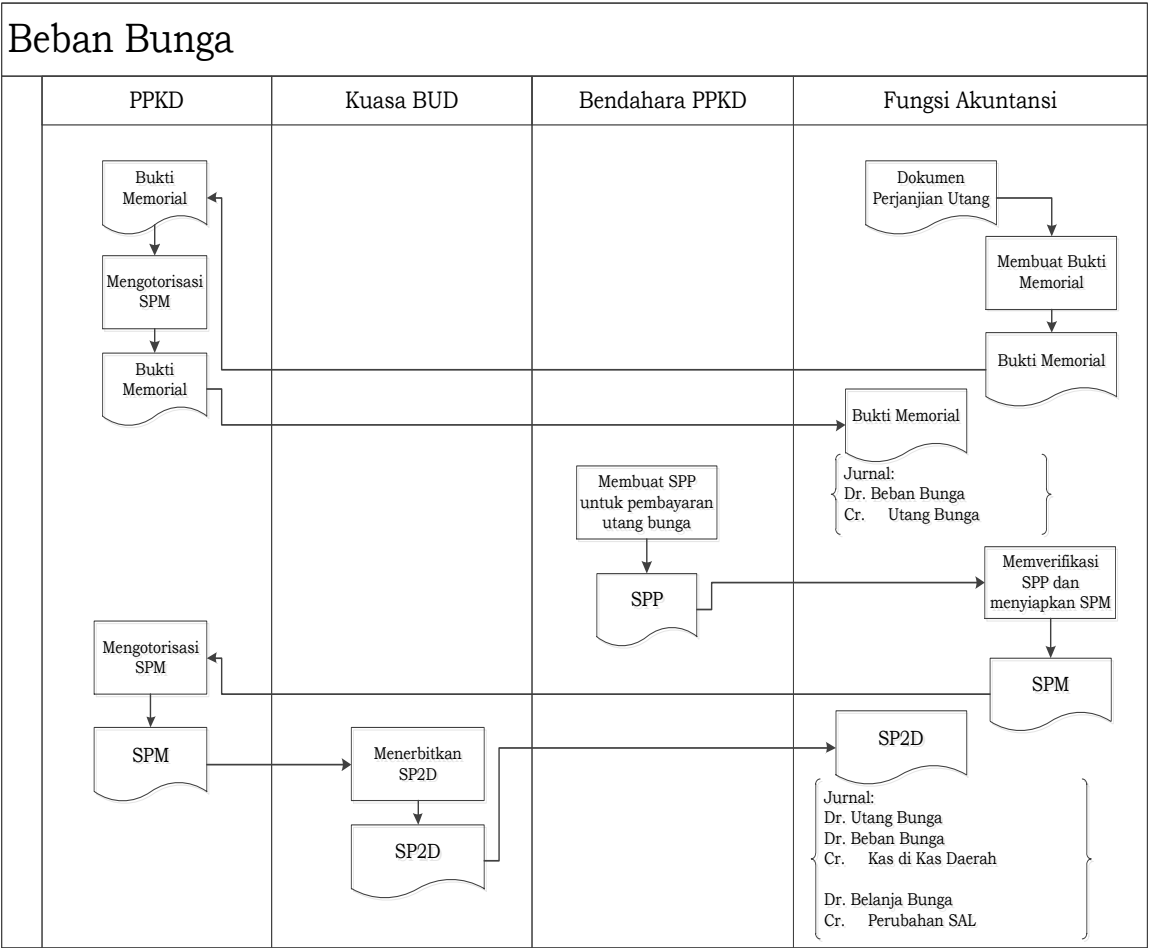
Uraian	Dokumen
Beban Operasi – LO	
Beban Bunga	Nota Debet/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Subsidi	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Hibah	NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Bantuan Sosial	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer	
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Defisit Non Operasional	Bukti memorial/dokumen yang dipersamakan
Beban Luar Biasa	Bukti memorial/dokumen yang dipersamakan

3. Flowchart dan Jurnal Standar

Sistem dan prosedur Akuntansi Beban ini meliputi Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, dan Beban Transfer.

a. Beban bunga

Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Beban bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui tiap akhir tahun atau ketika pinjaman telah jatuh tempo.



Pemerintah Daerah menandatangani Perjanjian Utang dengan pihak ketiga, dimana konsekuensi dari utang tersebut akan timbul adanya kewajiban bunga, berdasarkan kejadian tersebut maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban bunga utang pinjaman	XXX	
		XXX	Utang Bunga kpd Pemerintah		XXX

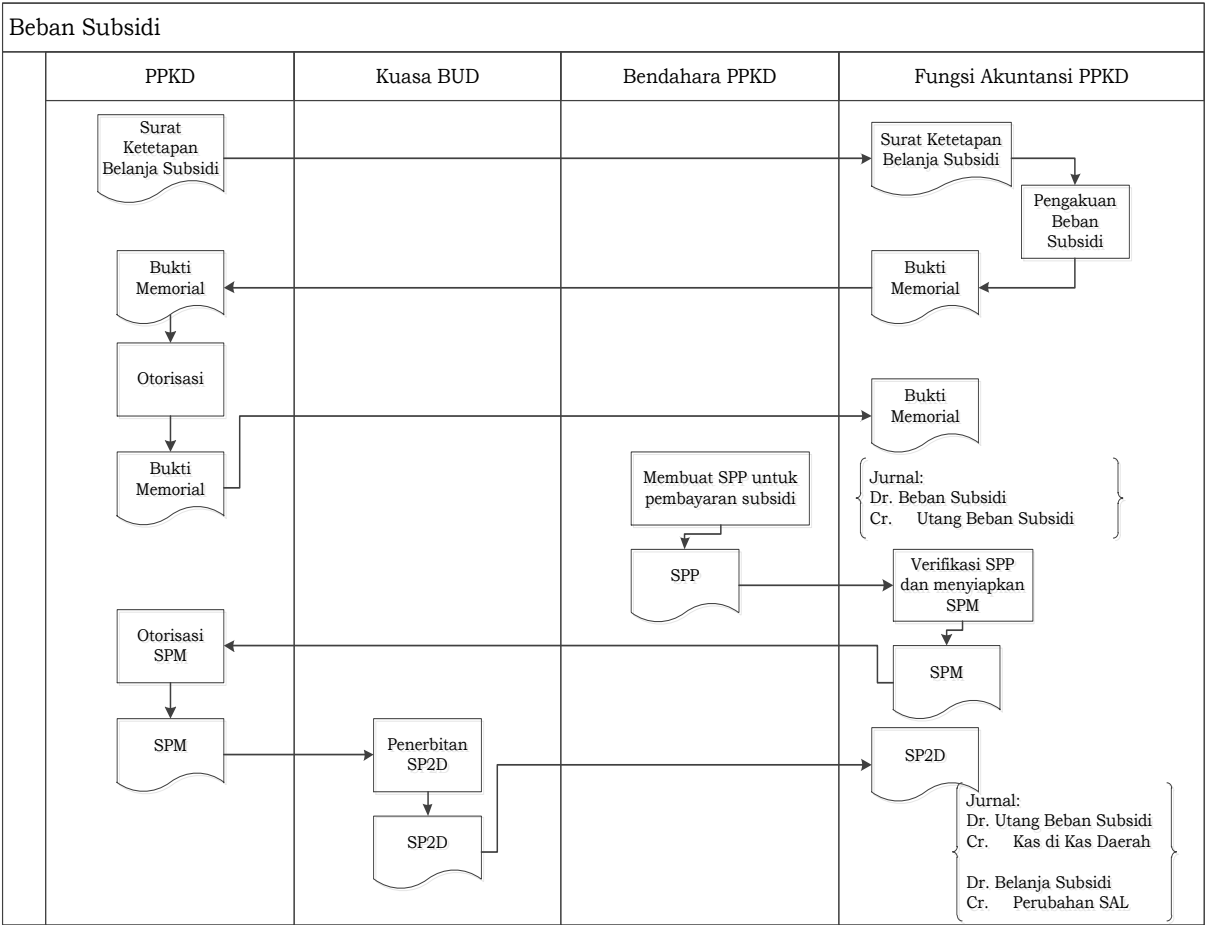
Pemerintah Daerah melakukan pembayaran bunga dengan mekanisme SP2D LS berdasarkan pembayaran SP2D LS maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Bunga kpd Pemerintah	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

b. Beban subsidi

Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan negara/daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.



Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian subsidi kepada entitas lain. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Subsidi kepada BUMD	XXX	
		XXX	Utang Belanja subsidi BUMD		XXX

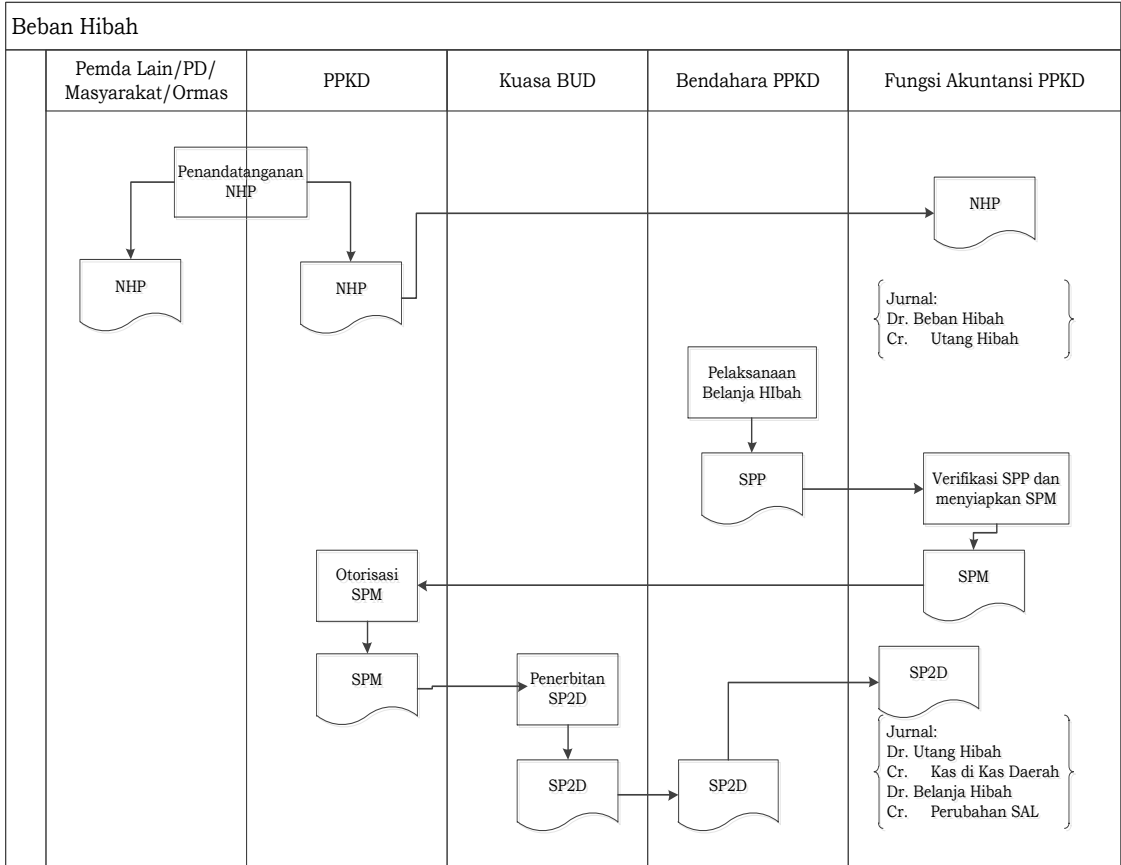
Kemudian Pemeritah Daerah melakukan pencairan subsidi dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada yang berhak menerima subsidi berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja subsidi BUMD	XXX	
		XXX	Kas dikas daerah		XXX

c. Beban hibah

Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban hibah meliputi beban hibah kepada pemerintah pusat, beban hibah kepada pemerintah daerah lainnya, beban hibah kepada pemerintah desa, beban hibah kepada perusahaan daerah/BUMD/BUMN, beban hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta, beban hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan, beban hibah kepada satuan pendidikan dasar. Beban hibah diakui ketika nota perjanjian hibah sudah ditandatangani oleh PPKD dan pihak penerima hibah.



Pemerintah Daerah menerbitkan SK tentang nama-nama penerima hibah daerah dan telah menandatangani NPHD/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian hibah kepada kelompok masyarakat berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban hibah kpd masyarakat	XXX	
		XXX	Utang Belanja Lain-lain		XXX

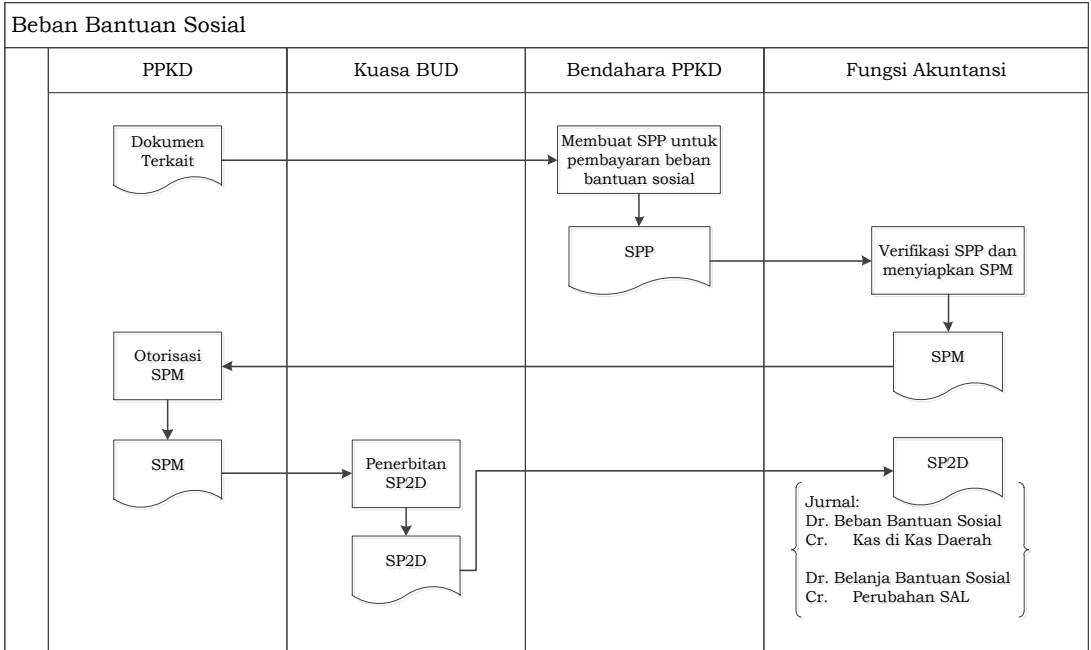
Kemudian Pemeritah Daerah melakukan pencairan bantuan hibah dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada yang berhak menerima hibah dalam bentuk uang berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang belanja lain lain	XXX	
		XXX	Kas di kas daerah		XXX

d. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban bantuan sosial meliputi beban bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan, beban bantuan sosial kepada kelompok masyarakat, dan beban bantuan sosial kepada anggota masyarakat. Beban bantuan sosial diakui ketika SP2D atas beban ini sudah diterbitkan.



Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan kepala daerah tentang penerima bantuan sosial berupa uang serta menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan sosial dengan penerima bantuan sosial. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah dan surat perjanjian pemberian bantuan sosial maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban bantuan sosial kpd organisasi sosial masyarakatan	XXX	
		XXX	Utang Belanja Lain lain		XXX

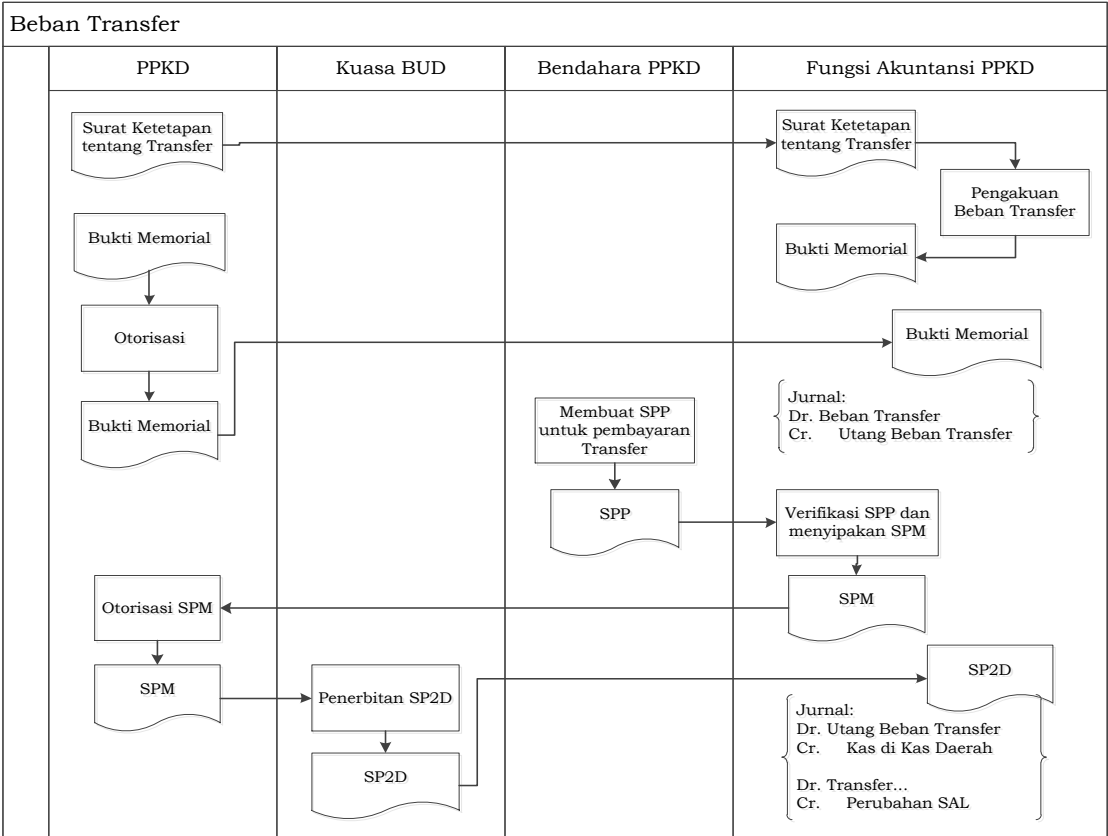
Kemudian Pemeritah Daerah melakukan pencairan bantuan sosial dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima bantuan sosial dalam bentuk uang berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang belanja lain-lain	XXX	
		XXX	Kas di kas daerah		XXX

e. Beban Transfer Bagi hasil Pajak Daerah

Beban transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban transfer meliputi bagi hasil pajak, bagi hasil pendapata lainnya, bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan ke desa, dan bantuan keuangan lainnya. Bantuan transfer diakui saat ketika SP2D atas beban ini sudah diterbitkan.



Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Bagi Hasil Pajak Ke kabupaten/kota. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bagi hasil pajak kabupaten/kota maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

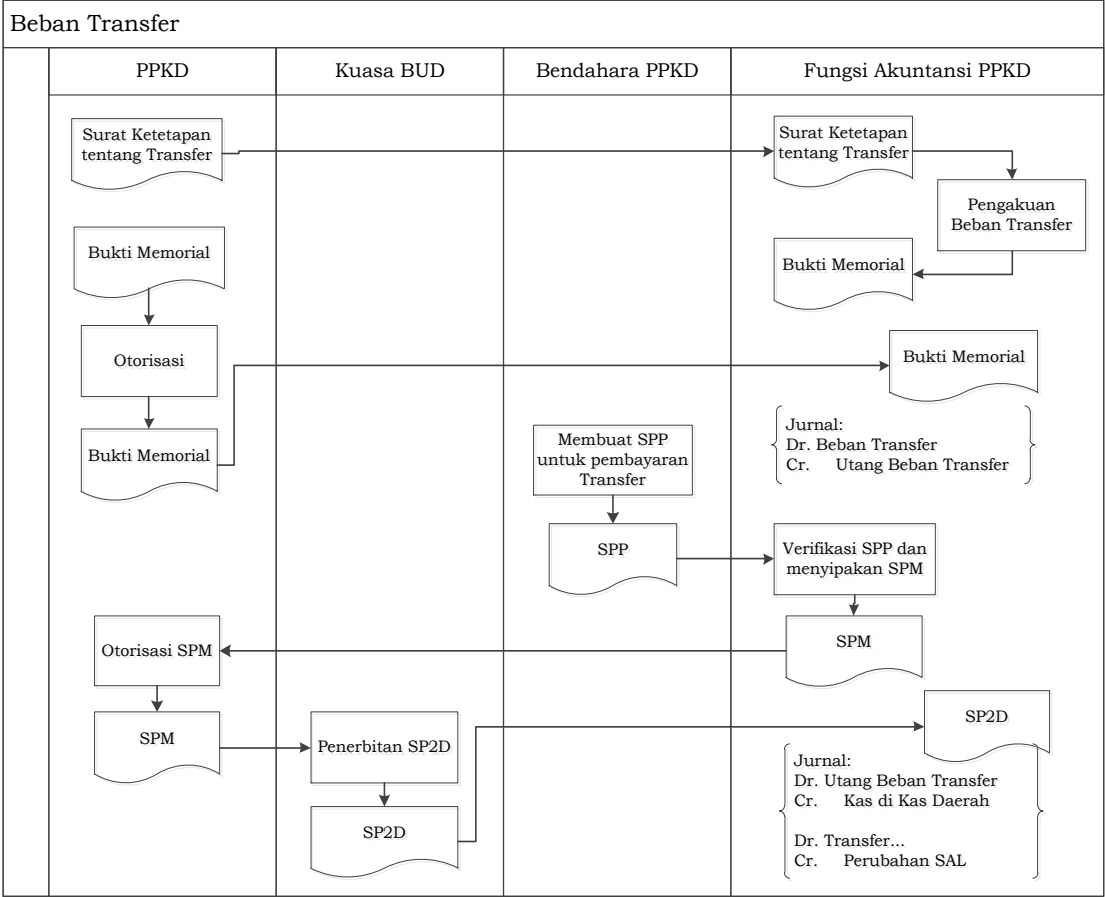
Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban transfer bagi hasil pajak	XXX	
		XXX	Utang transfer bagi hasil pajak		XXX

Kemudian Pemeritah Daerah melakukan pencairan dana bagi hasil pajak ke kabupaten/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada kabupaten/kota berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang transfer bagi hasil pajak	XXX	
		XXX	Kas di kas daerah		XXX

f. Beban transfer Bantuan Keuangan



Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban transfer bantuan keuangan ke kabupaten	XXX	
		XXX	Utang transfer bantuan keuangan		XXX

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang transfer bantuan keuangan	XXX	
		XXX	Kas di kas daerah		XXX

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Beban disajikan di Laporan Operasional sebagaimana dalam gambar berikut:

PEMERINTAH PROVINSI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam rupiah)					
No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Jumlah Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
22					
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
27	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx
28					
29	BEBAN				
30	BEBAN OPERASI				
31	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Beban Barang Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
36	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
38	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
39	Jumlah Beban Operasi	xxx	xxx	xxx	xxx
40					
41	BEBAN TRANSFER				
42	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
44	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
45	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	xxx	xxx	xxx	xxx
46	Beban Transfer Keuangan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
47	Jumlah Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
48	JUMLAH BEBAN	xxx	xxx	xxx	xxx
49					
50	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	xxx	xxx	xxx	xxx
51					
52	SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
53	SURPLUS NON OPERASIONAL				
54	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
55	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
56	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
57	Jumlah Surplus Non Operasional	xxx	xxx	xxx	xxx
58					
59	DEFISIT NON OPERASIONAL				
60	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
61	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
62	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
63	Jumlah Defisit Non Operasional	xxx	xxx	xxx	xxx
64	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx	xxx
65					
66	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
67					
68	POS LUAR BIASA				
69	PENDAPATAN LUAR BIASA				
70	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
71	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
72					
73	BEBAN LUAR BIASA				
74	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
75	Jumlah Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
76	POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
77					
78	SURPLUS/ DEFISIT - LO	xxx	xxx	xxx	xxx

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

1. rincian beban per SKPD.
2. penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB IV
SISTEM AKUNTANSI BELANJA

A. UMUM

1. Definisi

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pencatatan belanja merupakan realisasi dari anggaran belanja sehingga akan masuk ke dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun dan disajikan dengan basis kas. Belanja akan diakui ketika kas sudah keluar.

2. Klasifikasi

Klasifikasi belanja dan kewenangan atas belanja tersebut:

Belanja	Kewenangan
Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	SKPD
Belanja Barang	SKPD
Bunga	PPKD
Subsidi	PPKD
Hibah (Uang, barang dan Jasa)*)	PPKD/SKPD
Bantuan Sosial (uang dan barang)*)	PPKD/SKPD
Belanja Modal	
Belanja Tanah	SKPD
Belanja Peralatan dan Mesin	SKPD
Belanja Gedung dan Bangunan	SKPD
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	SKPD
Belanja Aset tetap lainnya	SKPD
Belanja Aset Lainnya	SKPD
Belanja Tak Terduga	
Belanja Tak Terduga	PPKD

*) Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan SKPD.

B. SISTEM AKUNTANSI BELANJA DI SKPD

a. Pihak-pihak terkait

1. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Dalam sistem akuntansi Belanja, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

- a) mencatat transaksi/kejadian belanja berdasarkan bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA.
- b) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian Belanja kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian objek).
- c) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan keuangan.

3. Bendahara Pengeluaran

- a) mencatat dan membukukan semua pengeluaran belanja kedalam buku kas umum SKPD.
- b) membuat SPJ atas belanja.

4. Pengurus Barang

5. Pengguna Anggaran

6. Pejabat Pelaksana Teknis Anggaran

b. Dokumen Terkait

- a. Daftar barang/honor
- b. Nota Permintaan Dana (NPD)
- c. Bukti Pembayaran Gaji/Barang/Jasa
- d. Berita Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Pembayaran (SPP)
- f. Surat Perintah Membayar (SPM)
- g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

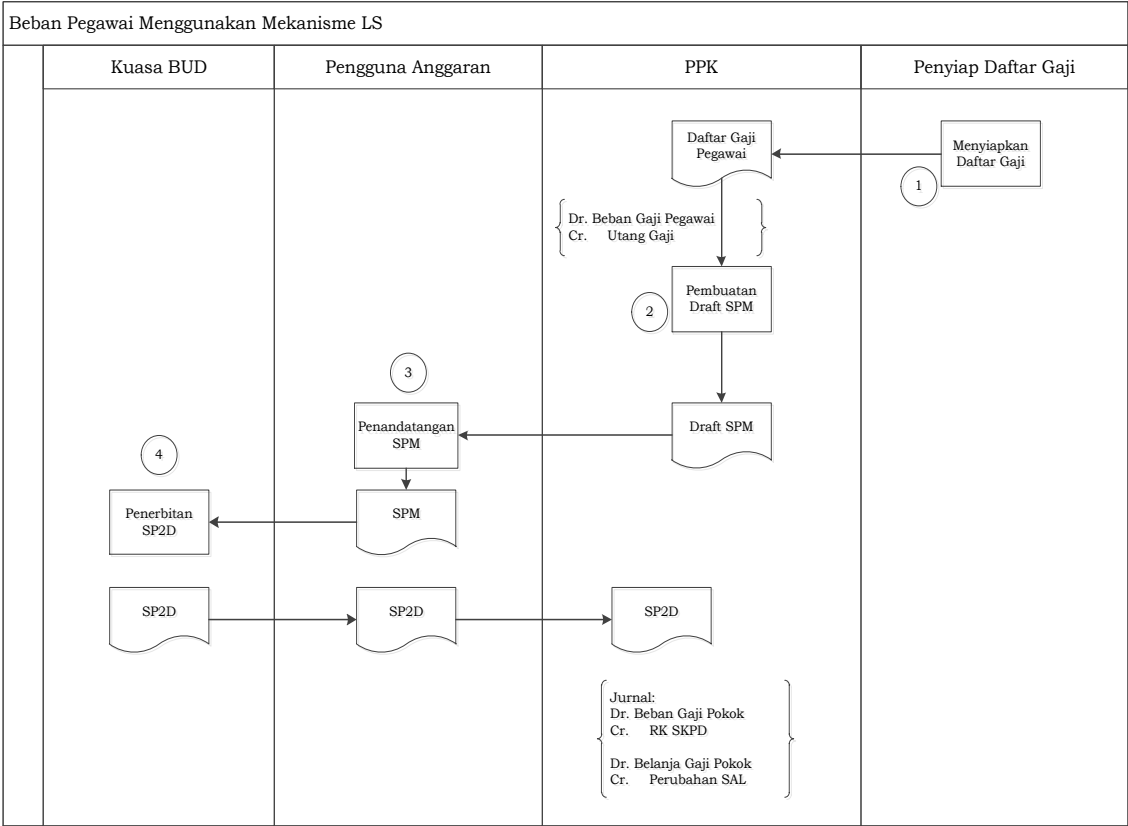
c. Flowchart dan Jurnal Standar

Akuntansi Belanja pada SKPD dilakukan oleh PPK SKPD. Sistem dan prosedur akuntansi belanja ini meliputi akuntansi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal.

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur, Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan Belanja Pegawai BLUD. Belanja pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti Belanja gaji dan tunjangan.

Dalam konteks Belanja pegawai dengan mekanisme LS, akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Belanja pegawai melalui mekanisme LS diasumsikan dana dari Kas Daerah langsung diterima oleh pegawai.



Belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS dimana pembayaran tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing PNSD. Berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan, maka jurnal standar:

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Gaji Pokok	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

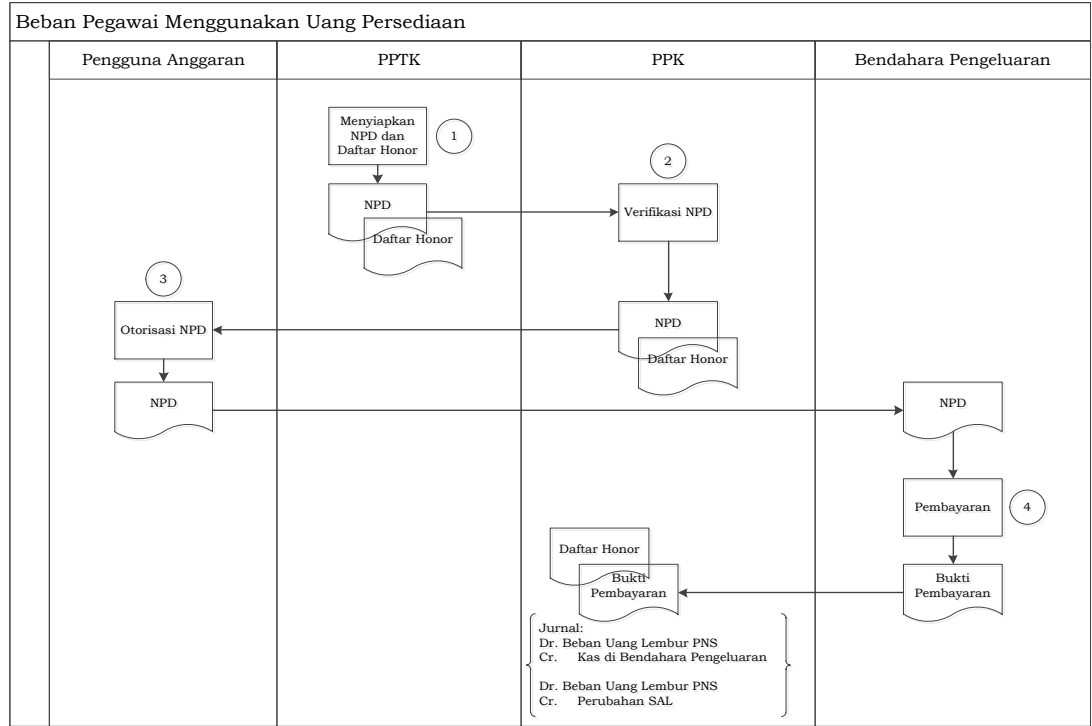
Belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS dimana pembayaran ditransfer ke Bendahara Pengeluaran kemudian oleh bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing masing PNS. Berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan, maka jurnal standar:

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xXX	XXX	XXX	Belanja Gaji Pokok	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Belanja pegawai menggunakan Uang Persediaan

Dalam mekanisme UP/GU/TU/LS, Belanja pegawai diakui ketika bukti pembayaran Belanja (Bukti Pembayaran Honor) telah diterima oleh PPK.



Belanja pegawai (misalnya pembayaran lembur) yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU dimana pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran ke masing masing PNS, maka jurnal standar:

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja UangLembur PNS	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

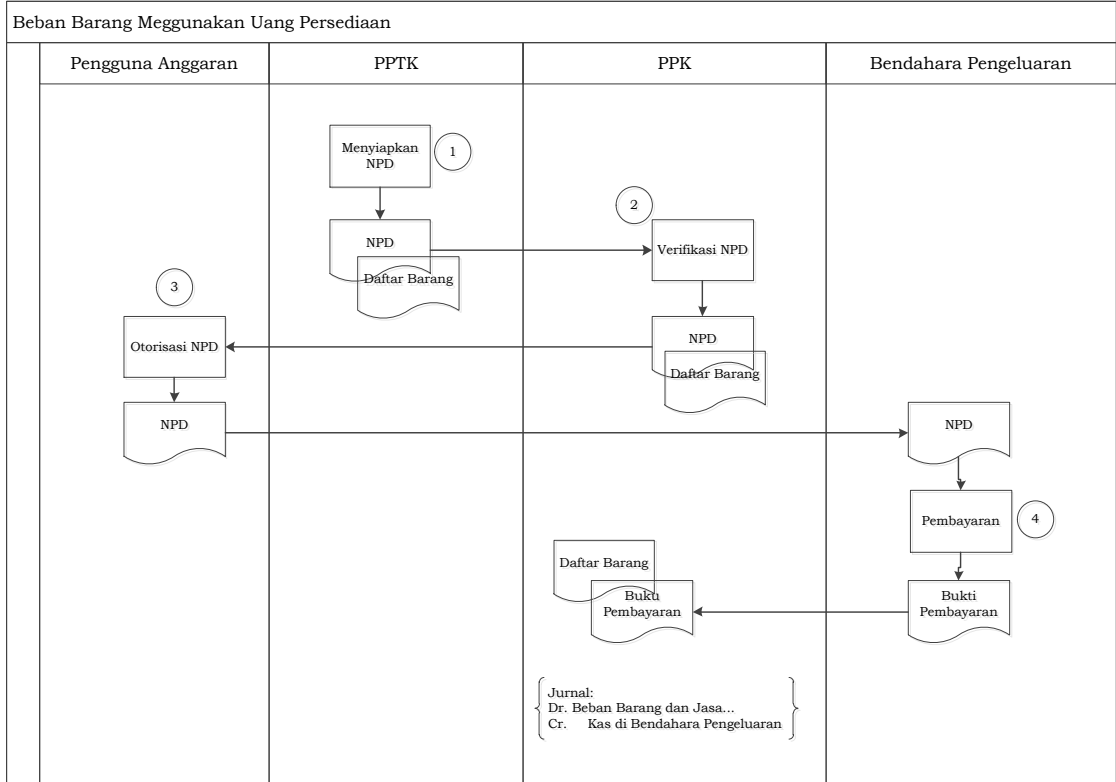
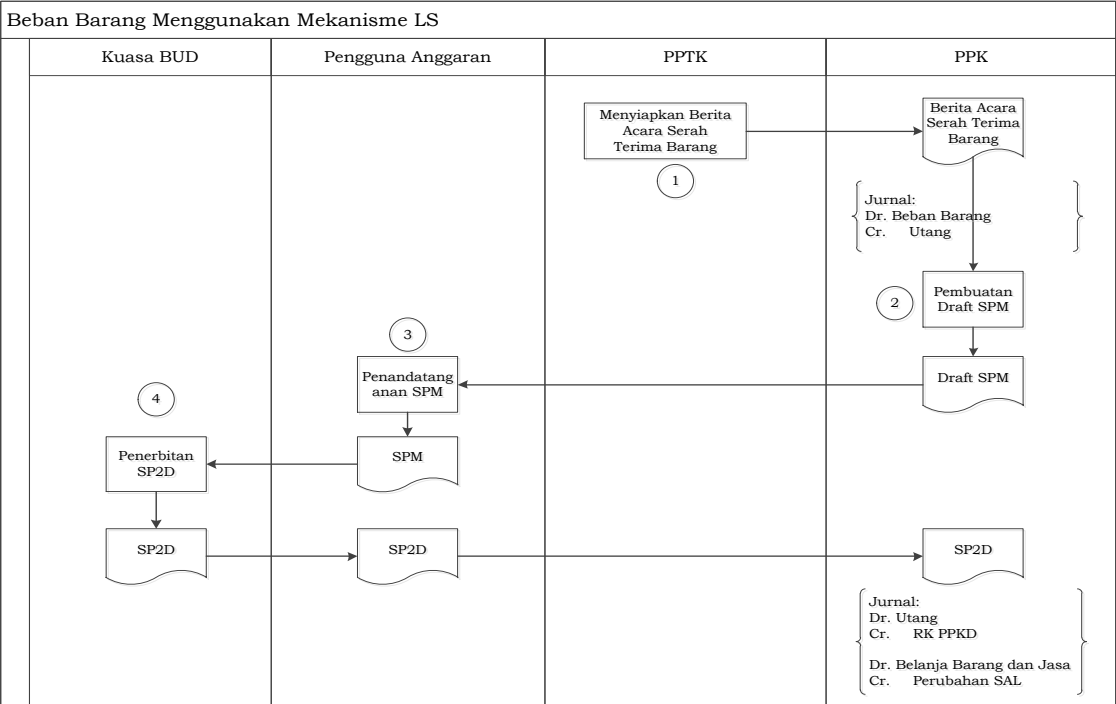
2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa terdiri atas Belanja Persediaan, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas. Belanja barang dan jasa dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU maupun dengan mekanisme LS.

Dalam mekanisme UP/GU/TU/LS, Belanja barang dan jasa diakui ketika bukti pembayaran Belanja kepada pihak ketiga sudah diterima PPK .

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ATK	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX



3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

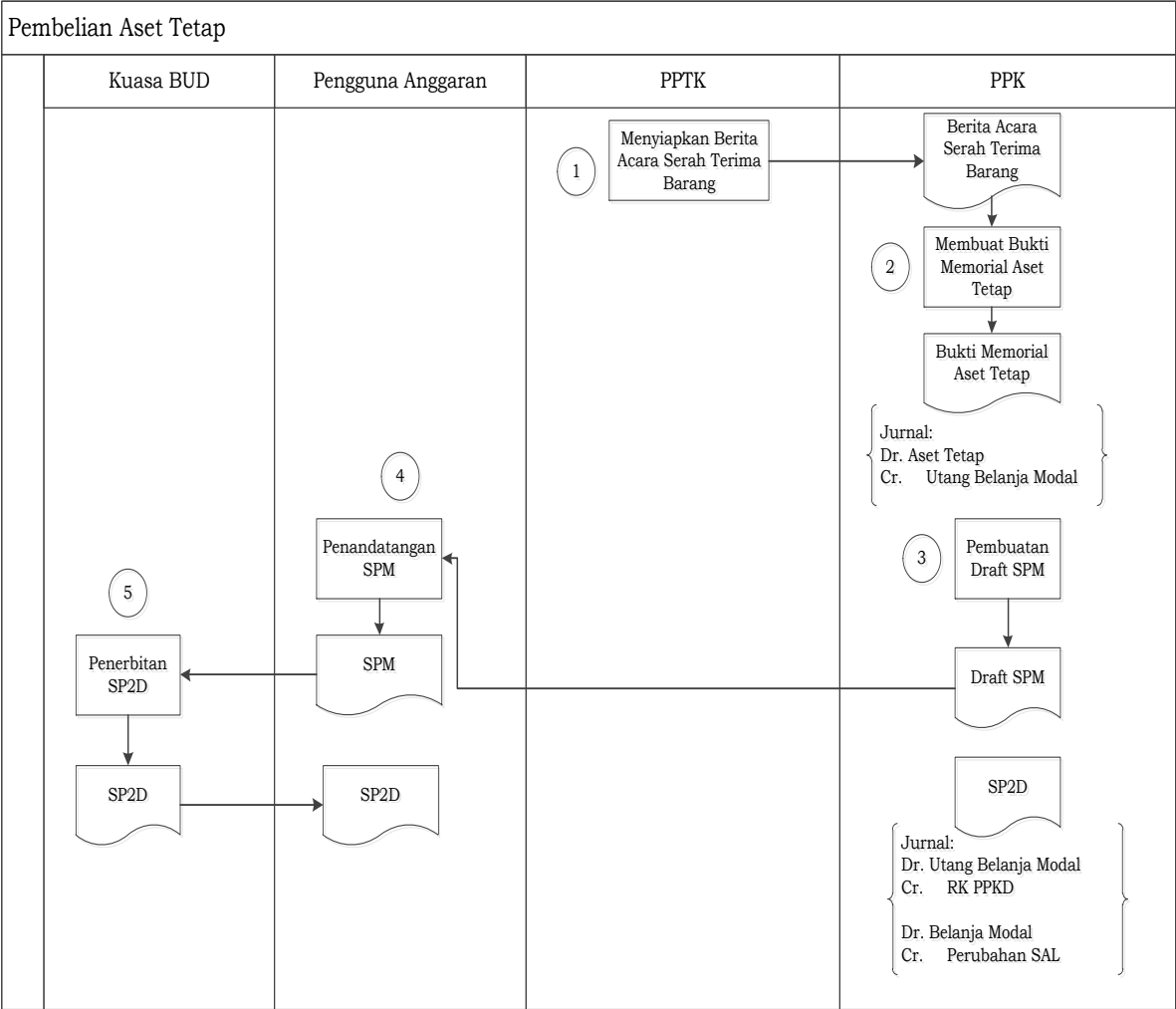
Belanja hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk barang, pengakuannya pada saat penanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/ dokumen yang dipersamakan atau dapat juga pada saat penyerahan kepada penerima hibah/bantuan sosial. Kemudian SKPD melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme LS maka pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal standar:

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja barang ... dihibahkan kepada Masyarakat	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

4) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.



Berdasarkan SP2D-LS, PPK-SKPD akan membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Apabila pembelian aset tetap dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU, pengakuannya dilakukan berdasarkan bukti pembayaran (bukti belanjanya). Berdasarkan bukti tersebut, PPK-SKPD akan menjurnal:

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

C. SISTEM AKUNTANSI BELANJA DI PPKD

- 1. Pihak Pihak Terkait
 - a. PPK PPKD
 - b. Bendahara Pengeluaran PPKD
 - c. PPKD
 - d. Pengurus Barang
 - e. Kuasa BUD
 - f. Pemda lain/Perusahaan Daerah/Masyarakat/Ormas

2. Dokumen yang digunakan

Dokumen berdasarkan klasifikasi belanja dalam LRA:

Uraian	Dokumen
Belanja Operasi	
Bunga	Nota Debet/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Subsidi	Surat Keputusan Kepala Daerah /SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Hibah (Uang, barang dan Jasa*)	NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Bantuan Sosial (uang dan barang*)	Surat Keputusan Kepala Daerah /SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Tak Terduga	
Belanja Tak Terduga	Surat Keputusan Kepala Daerah /SP2D/Dokumen yang dipersamakan

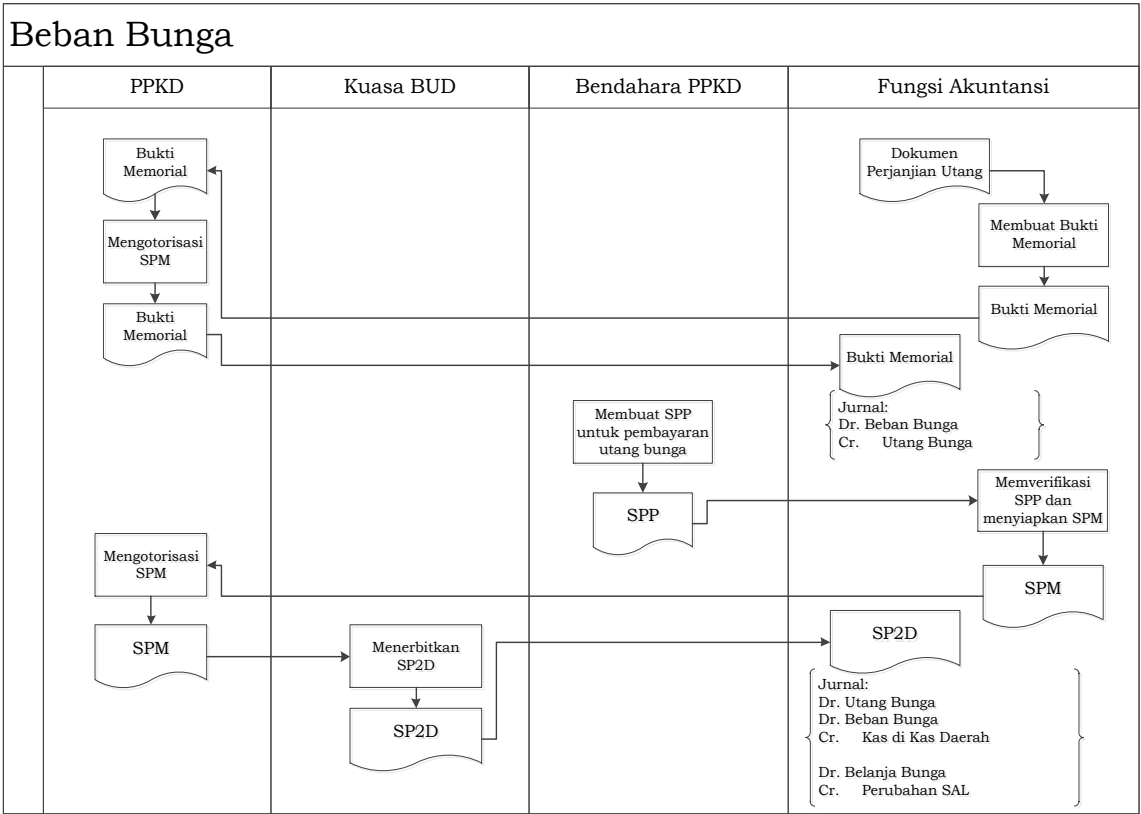
3. Jurnal Standar

Fungsi akuntansi PPKD akan mengakui belanja ketika terjadi realisasi belanja yang ditandai dengan adanya pengeluaran kas baik itu yang berasal dari Bendahara Pengeluaran (Belanja dengan menggunakan Uang Persediaan) maupun dari kas daerah (belanja dengan mekanisme LS). Fungsi akuntansi PPKD akan mengakui adanya belanja dengan menjurnal “Belanja... (sesuai rincian objek belanja)” dan “Perubahan SAL”.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

a. Belanja Bunga

Flowchart dan Jurnal Standar

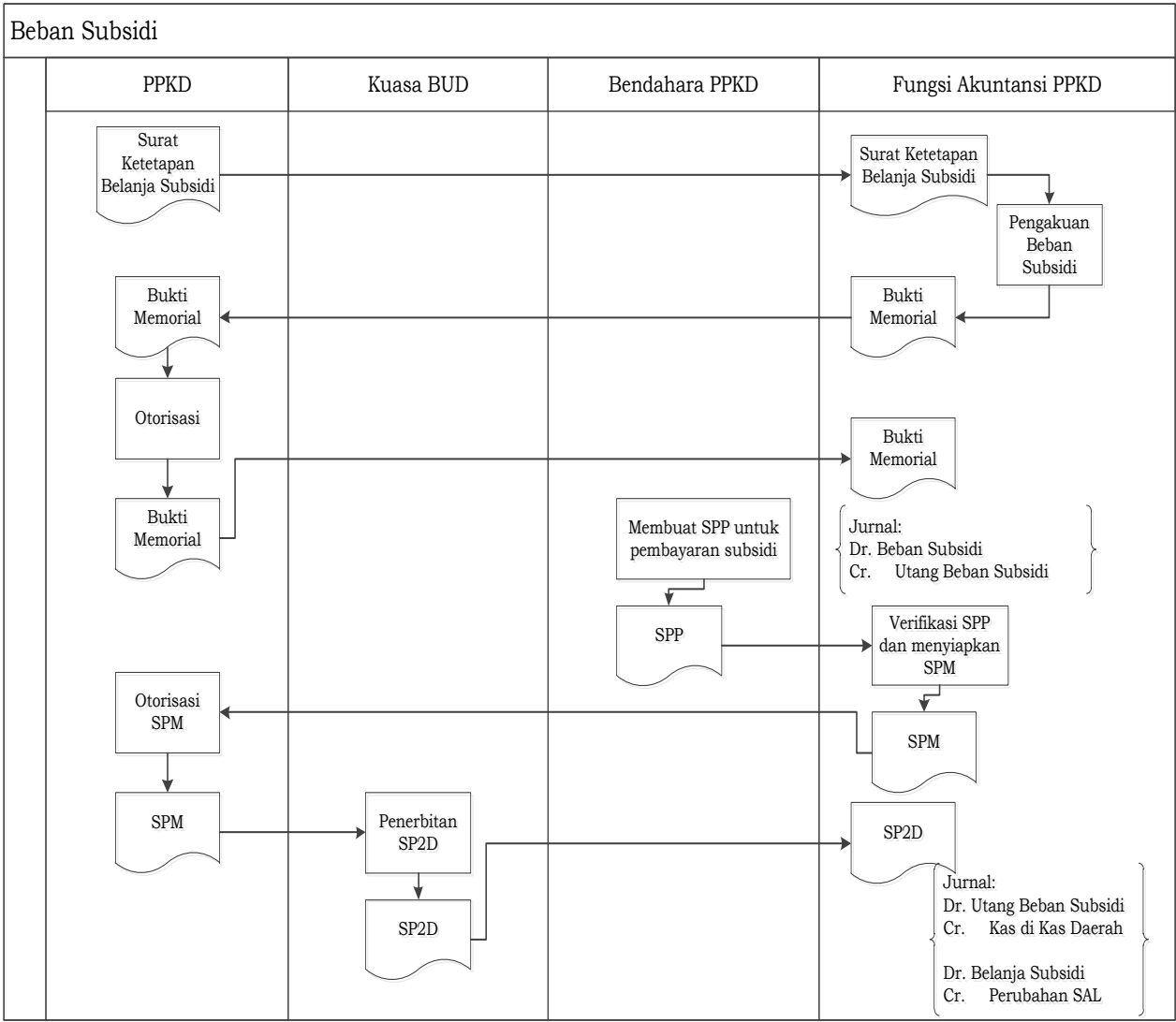


Pemerintah Daerah melakukan pembayaran bunga dengan mekanisme SP2D LS berdasarkan pembayaran SP2D LS maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja bunga utang pinjaman	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

b. Belanja Subsidi

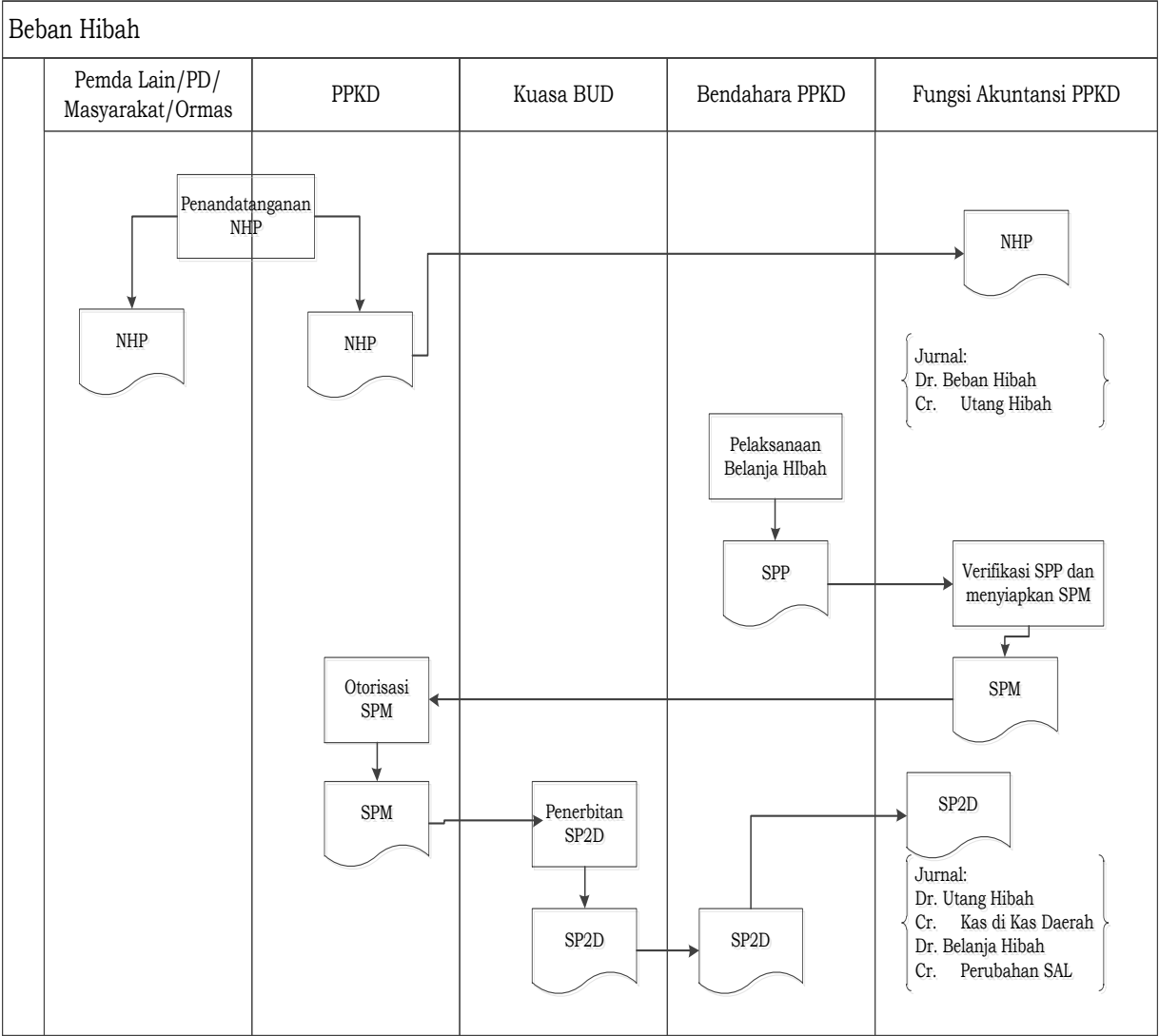


Pada saat Pemerintah Daerah melakukan pencairan subsidi dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada yang berhak menerima subsidi berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Subsidi kepada BUMD	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

c. Belanja Hibah

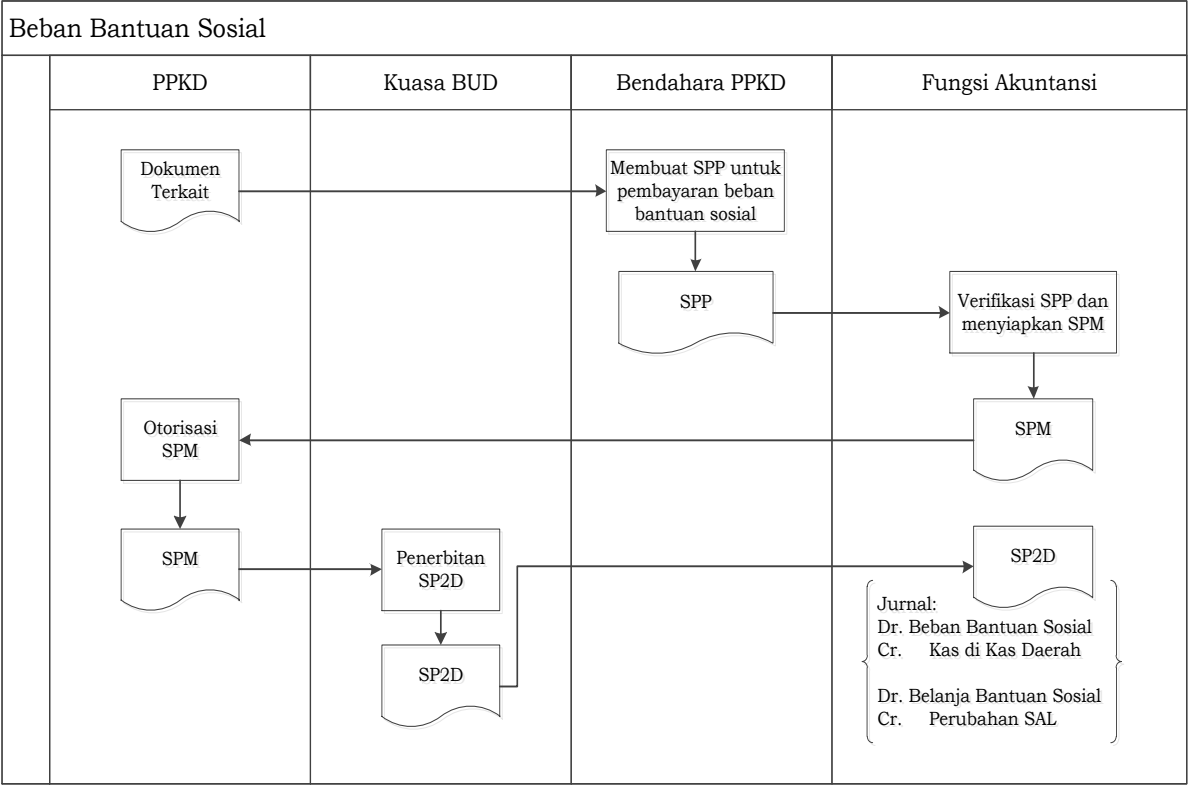


Pemerintah Daerah melakukan pencairan bantuan hibah dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada yang berhak menerima hibah dalam bentuk uang berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja hibah kpd masyarakat	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

d. Belanja Bantuan Sosial



Pemerintah Daerah melakukan pencairan bantuan sosial dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima bantuan sosial dalam bentuk uang berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja sosial kpd organisasi kemasyarakatan	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

e. Belanja tak terduga

Pemerintah Daerah melakukan pembayaran belanja tak terduga dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja tak terduga	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Belanja disajikan di Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dalam gambar berikut ini

PEMERINTAH PROVINSI					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0					
(Dalam Rupiah)					
NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Total Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
22					
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
28	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx
29	BELANJA				
30	BELANJA OPERASI				
31	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
36	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Jumlah Belanja Operasi	xxx	xxx	xxx	xxx
38					
39	BELANJA MODAL				
40	Belanja Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
45	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
46	Jumlah Belanja Modal	xxx	xxx	xxx	xxx
47					
48	BELANJA TAK TERDUGA				
49	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	xxx
50	Jumlah Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	xxx
51	Jumlah Belanja	xxx	xxx	xxx	xxx
52					
53	TRANSFER				
54	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA				
55	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xxx	xxx
56	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xxx	xxx
57	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xxx	xxx
58	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota	xxx	xxx	xxx	xxx
59					
60	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN				
61	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
62	Bantuan Keuangan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
63	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xxx
64	Jumlah Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xxx
66					
67	SURPLUS/DERSIT	xxx	xxx	xxx	xxx
68					
69	PEMBIAYAAN				
70					
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
72	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xxx	xxx
73	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx	xxx
76	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
78	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
79	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xxx	xxx
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xxx	xxx
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
83	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
84	Jumlah Penerimaan	xxx	xxx	xxx	xxx
85					
86	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
87	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
94	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx	xxx
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xxx	xxx
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
95	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xxx	xxx
96	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
97	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
98	Jumlah Pengeluaran	xxx	xxx	xxx	xxx
99	PEMBIAYAAN NETO	xxx	xxx	xxx	xxx
100					
101	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	xxx	xxx	xxx	xxx

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- a. rincian belanja per SKPD.
- b. penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- c. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
- d. informasi lainnya yang dianggap perlu

BAB V
SISTEM AKUNTANSI TRANSFER

A. UMUM

1. Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

2. Klasifikasi

Klasifikasi
Pendapatan Transfer
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendaptan Bagi Hasil Lainnya
Beban Transfer
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke desa

Klasifikasi
Beban Transfer Keuangan Lainnya
Transfer/Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota atau ke Desa
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Retribusi
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Transfer Bantuan Keuangan
Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya
Bantuan Keuangan Lainnya

B. SISTEM AKUNTANSI TRANSFER DI SKPKD

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi transfer masuk dan transfer keluar antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD dan Bendahara Pengeluaran SKPKD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK SKPKD)

Dalam sistem akuntansi transfer, PPK-SKPKD melaksanakan fungsi akuntansi SKPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mencatat transaksi/kejadian transfer berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
- 2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
- 3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Penerimaan SKPKD

- 1) mencatat dan membukukan semua transfer kedalam buku Penerimaan SKPKD;
- 2) membuat SPJ penerimaan.

c. Bendahara Pengeluaran SKPKD

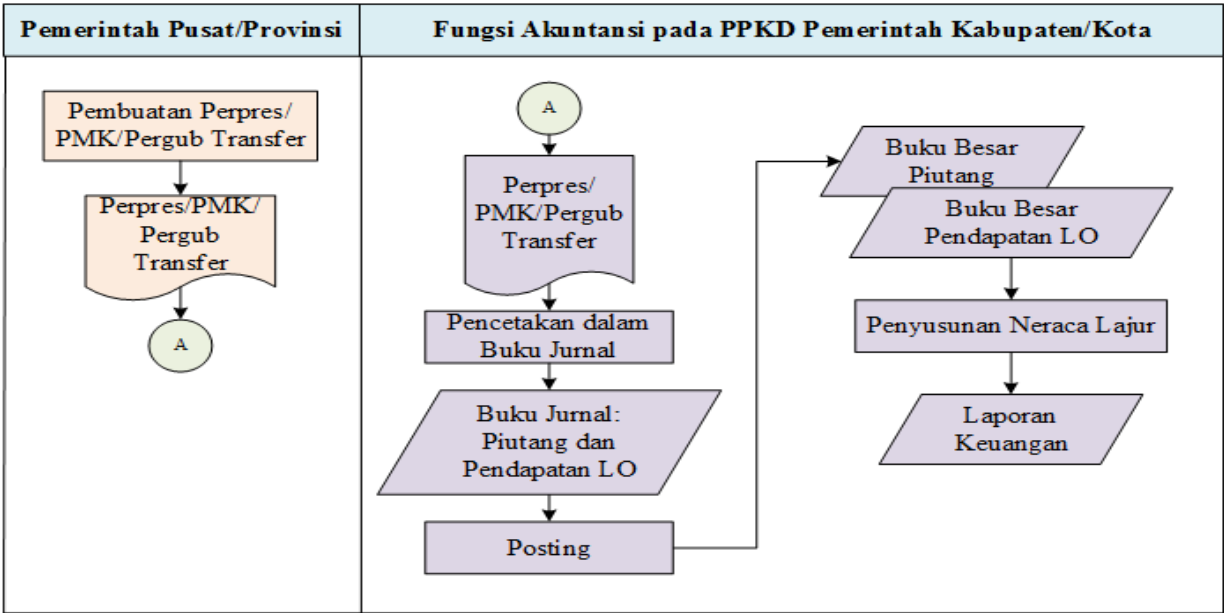
- 1) mencatat dan membukukan semua transfer kedalam buku Pengeluaran SKPKD;
- 2) membuat SPJ pengeluaran.

2. Dokumen yang digunakan

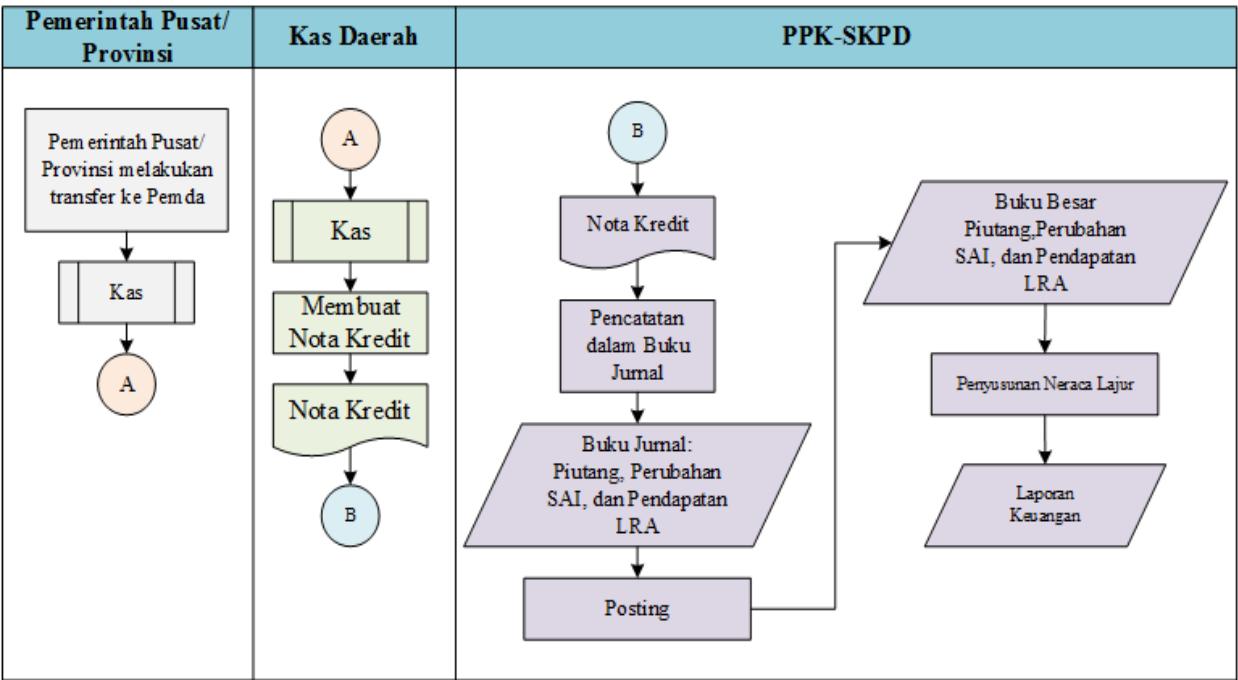
Uraian	Dokumen
Pendapatan Transfer	
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	PMK/Perpres/Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Dana Bagi Hasil Pajak	PMK/ Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Dana Bagi hasil Sumber daya Alam	PMK/ Dokumen yang Dipersamakan
Dana Alokasi Umum	PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan
Dana Alokasi Khusus	PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	PMK/Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Dana Otonomi Khusus	PMK/Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Dana Penyesuaian	PMK/Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Transfer Pemerintah Provinsi	PMK/Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	PMK/Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	PMK/Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer	
Beban Transfer Bagi hasil Pajak	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke desa	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Keuangan Lainnya	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota atau ke Desa	
Bagi Hasil Pajak	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Bagi Hasil Retribusi	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Transfer Bantuan Keuangan	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Bantuan Keuangan Lainnya	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan

3. Flowchart

Flowchart ketika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan tentang dana transfer



Pada saat Pemerintah Pusat/Provinsi melakukan transfer (pencairan dana transfer) ke Pemerintah Daerah



4. Jurnal Standar

a. Transfer Masuk

1) Dana Darurat

Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan tentang dana transfer dana darurat maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Transfer/Dana Darurat	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer/Dana Darurat LO		XXX

Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana darurat dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atas PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di kas daerah	XXX	
		XXX	Piutang Transfer/Dana Darurat		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer/Dana Darurat LRA		XXX

2) Dana Bagi hasil Pajak dari Pemerintah Pusat

Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Bagi Hasil Pajak	XXX	
		XXX	Pendapatan Bagi Hasil PajakLO		XXX

Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana bagi hasil pajak dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK /Perpres /Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Bagi Hasil Pajak		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA		XXX

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang DAU	XXX	
		XXX	Pendapatan Dana Alokasi Umum- LO		XXX

Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana alokasi umum dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas daerah	XXX	
		XXX	Piutang Dana Alokasi Umum		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Dana alokasi umum LRA		XXX

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang DAK	XXX	
		XXX	Pendapatan Dana Alokasi Khusus LO		XXX

Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana alokasi umum dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Dana Alokasi Khusus		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Dana Alokasi Khusus LRA		XXX

b. Transfer keluar

1) Beban transfer bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota

Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan tentang beban transfer bagi hasil pajak ke kabupaten/kota. Berdasarkan Keputusan/Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota	XXX	
		XXX	Utang Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota		XXX

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan bagi hasil pajak daerah ke kab/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota, berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Bagi hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota	XXX	
		XXX	Kas Di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota	XXX	
		X.XX	Perubahan SAL		XXX

2) Beban transfer bantuan keuangan ke kabupaten/kota

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat persetujuan pemberian bantuan keuangan/ dokumen yang dipersamakan tentang bantuan keuangan ke kabupaten/kota. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten	XXX	
		XXX	Utang Transfer Bantuan Keuangan		XXX

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan ke kabupaten/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Transfer Bantuan Keuangan	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

3) Beban Transfer bantuan keuangan ke desa

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat persetujuan pemberian bantuan ke desa/ dokumen yang dipersamakan tentang bantuan keuangan desa. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	XXX	
		XXX	Utang Transfer Bantuan Keuangan		XXX

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan kedesa dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Transfer Bantuan Keuangan	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

BAB VI SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. UMUM

1. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pembiayaan antara lain Fungsi Akuntansi SKPKD, BUD dan PPKD.

1. Fungsi Akuntansi - SKPKD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, fungsi akuntansi pada SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- b. memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
- c. menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. BUD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, BUD melakukan fungsi mengadministrasi transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, sehingga BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.

3. PPKD

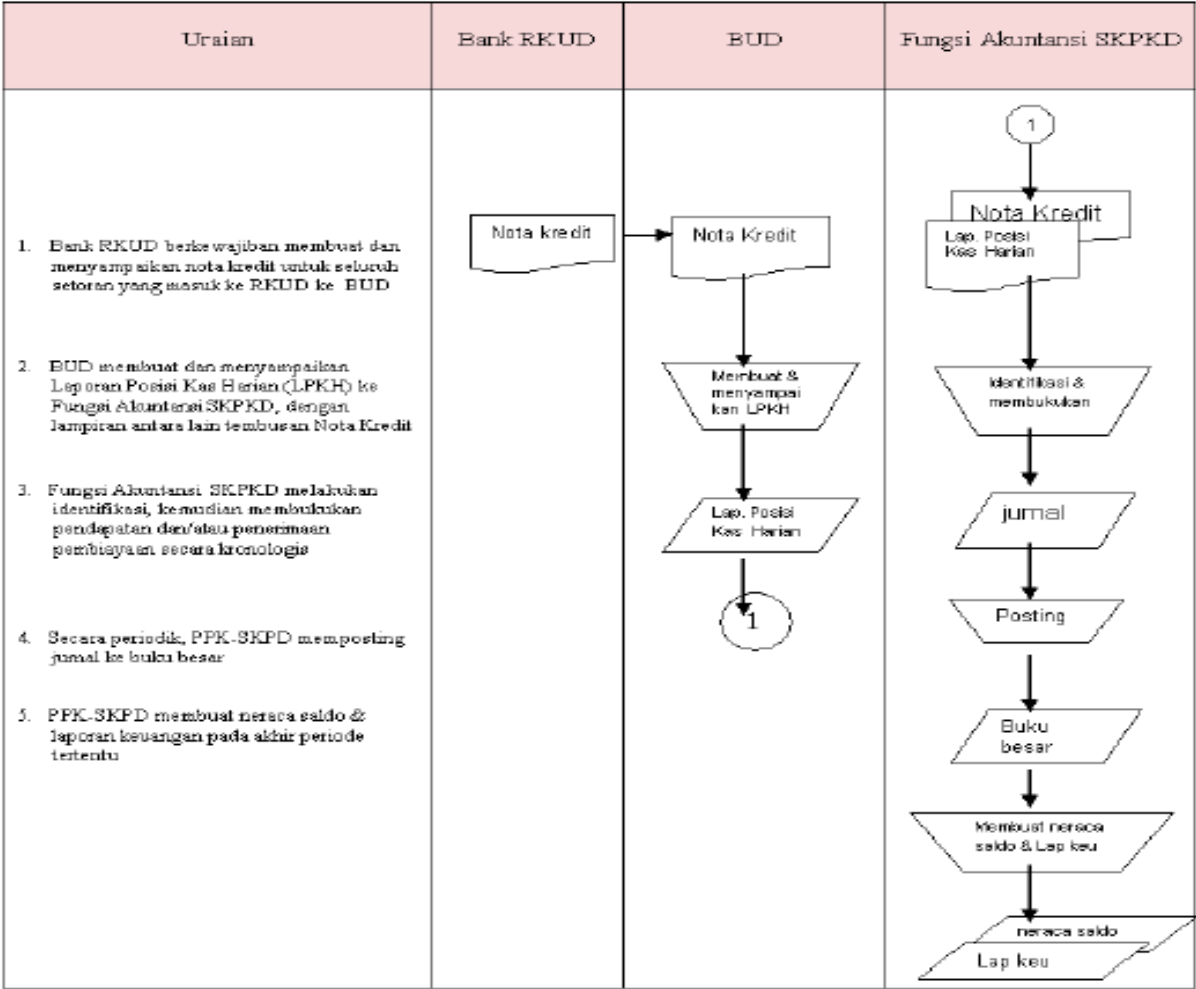
Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembiayaan antara lain:

1. Peraturan Daerah terkait transaksi pembiayaan;
2. Naskah Perjanjian Kredit;
3. SP2D LS sebagai dokumen pencairan dari rekening kas umum daerah;
4. Nota Kredit;
5. Dokumen lainnya.

D. FLOWCHART



E. JURNAL STANDAR

Pada dasarnya transaksi pembiayaan dilaksanakan oleh PPKD. Berikut adalah jurnal standar pengakuan penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari transaksi kewajiban, sebagai berikut:

No.	Transaksi	PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debet	Kredit
1	Saat penerimaan pembiayaan	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Kewajiban Jangka Panjang		xxx
		Perubahan SAL	xxx	
		Penerimaan Pembiayaan		xxx
2	Saat pembayaran bungakewajiban	Beban Bunga	xxx	
		Kas di Kas Daerah		xxx
		Bunga Utang	xxx	
		Perubahan SAL		xxx
3	Saat pelunasan kewajiban	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	
		Kas di Kas Daerah		xxx
		Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
		Perubahan SAL		xxx
4	Saat reklasifikasi	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	
		Bagian Lancar Kewajiban Jk. Panjang		xxx

BAB VII
SISTEM AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. UMUM

1. Definisi

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD

Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam system akuntansi kas dan setara kas, PPK-SKPD melaksanakan Fungsi Akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum
- 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian kas dan setara kas ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek)
- 3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Penerimaan SKPD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke PPK-SKPD.

c. Bendahara Pengeluaran SKPD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi Kas dan Setara Kas ke PPK-SKPD.

d. Pengguna Anggaran (PA)

Dalam sistem akuntansi Kas dan Setara Kas, Pengguna Anggaran memiliki tugas:

- 1) menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi SKPKD pada SKPKD (PPK-SKPKD)
- 2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran.

2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada SKPKD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK-SKPKD), Bendahara Penerimaan SKPKD, Bendahara Pengeluaran SKPKD dan PPKD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK-SKPKD)

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK-SKPKD melaksanakan fungsi akuntansi SKPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian kas dan setara kas ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
- 3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Penerimaan SKPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Penerimaan SKPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke fungsi akuntansi SKPKD (PPK-SKPKD).

c. Bendahara Pengeluaran SKPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Pengeluaran SKPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke fungsi akuntansi SKPKD (PPK-SKPKD).

d. PPKD

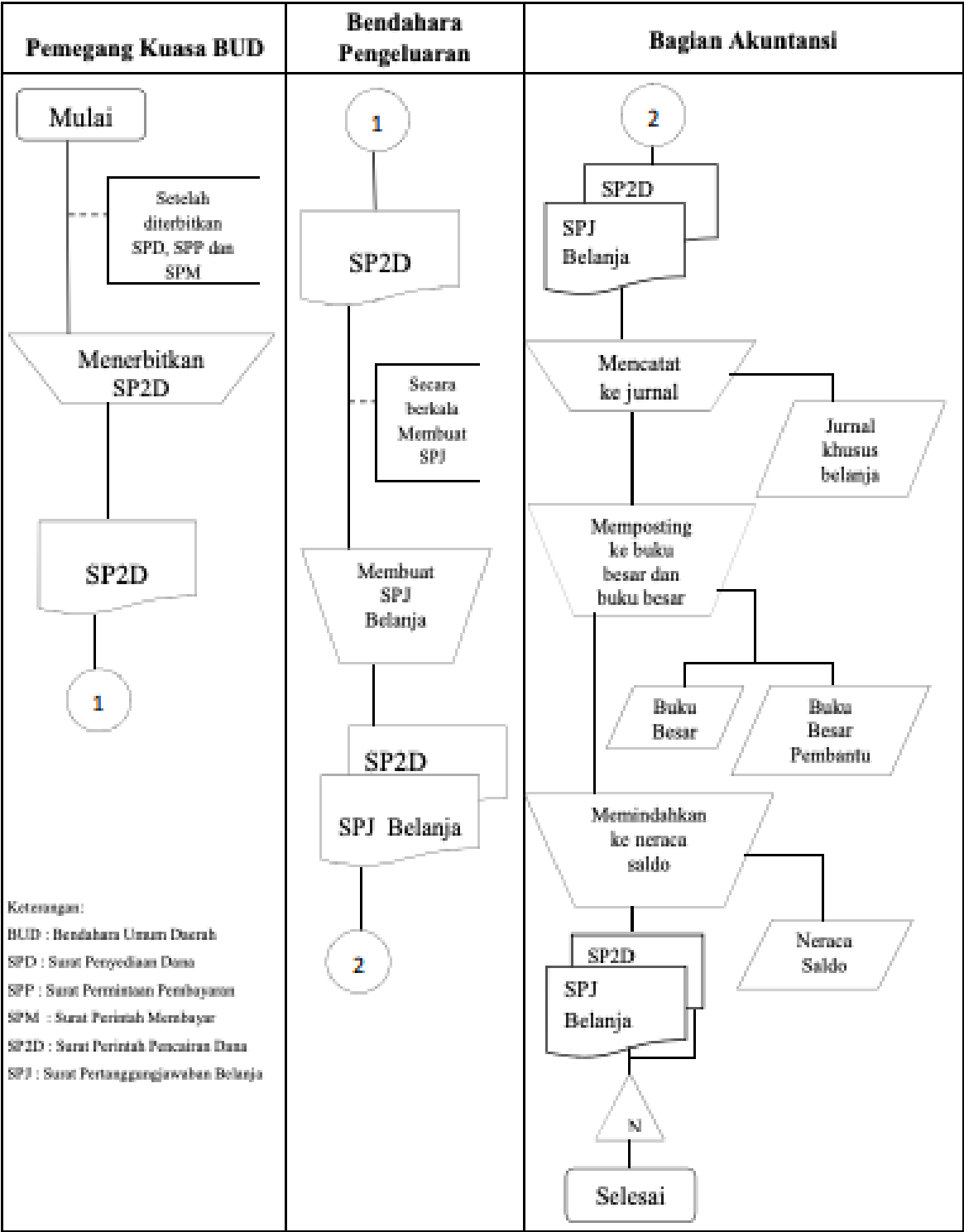
Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPKD memiliki tugas:

- 1) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi SKPKD (PPK-SKPKD)
- 2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada SKPD maupun SKPKD mengikuti dokumen terkait penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun-akun Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

D. FLOWCHART DAN JURNAL STANDAR



Jurnal standar terkait kas dan setara kas pada SKPD maupun PPKD mengikuti transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun-akun Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Jika kas dan setara kas bertambah maka akan dicatat disisi “debit” sedangkan jika kas dan setara kas berkurang akan dicatat disisi “kredit”.

Jurnal Standar – Kas dan Setara Kas Saat Bertambah

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas dan Setara Kas	XXX	
		XXX	Pendapatan-LO/Aset/Kewajiban/Ekuitas		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan-LRA		XXX

Jurnal Standar – Kas dan Setara Kas Saat Berkurang

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban/Aset/Kewajiban/Ekuitas	XXX	
		XXX	Kas dan Setara Kas		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

BAB VIII
SISTEM AKUNTANSI PIUTANG

A. UMUM

1. Definisi

Piutang merupakan salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (net realizable value). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

2. Klasifikasi

Klasifikasi
Piutang Pajak Daerah
Piutang Retribusi
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Piutang Pendapatan Lainnya
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Uang Muka

B. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI SKPD

1. Pihak-pihak Terkait

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan atau Unit SKPD (PPK-SKPD dan atau PPK-Unit SKPD) dan Bendahara Penerimaan SKPD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan atau Unit SKPD (PPK-SKPD dan atau Unit SKPD)

Dalam sistem akuntansi piutang, PPK-SKPD dan atau PPK-Unit SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD dan atau Unit SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca.
- 2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian piutang kedalam Buku Besar masing-masing rekening.
- 3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Penerimaan SKPD.

- 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan ke dalam buku kas penerimaan SKPD.
- 2) membuat SPJ atas pendapatan.

2. Dokumen yang digunakan

Uraian	Dokumen
Piutang Retribusi	SKR Daerah/Dokumen yang dipersamakan

3. Jurnal Standar

Pada saat Diterbitkan SKR Daerah oleh SKPD maka jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang	XXX	
		XXX	Pendapatan LO		XXX

Jika Wajib Retribusi melakukan pembayaran maka jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan ... LRA		XXX

Apabila Wajib Retribusi menyetor langsung ke kas daerah pada Bank yang ditunjuk, maka pada saat diterima Nota Kredit dari bank, jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Pendapatan LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan... LRA		XXX

Pada saat diterima Nota Kredit dari bank untuk pembayaran yang bersumber dari piutang maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Piutang LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan ... LRA		XXX

Penyisihan Piutang SKPD

Berdasarkan perhitungan dengan pendekatan kualitas piutang maka didapatkan Beban Penyisihan Piutang, PPK SKPD akan mencatat penyisihan piutang dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyisihan Piutang Pajak	XXX	
		XXX	Penyisihan Piutang Pajak		XXX

C. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI SKPKD

1. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK-SKPKD) dan Bendahara Penerimaan SKPKD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK-SKPKD)

Dalam sistem akuntansi piutang, PPK-SKPKD melaksanakan fungsi akuntansi SKPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca.
- 2) melakukan posting jurnal jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening.
- 3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LP SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Penerimaan SKPKD

- 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan kedalam buku kas penerimaan PPKD;
- 2) membuat SPJ atas pendapatan.

2. Dokumen yang digunakan

Uraian	Dokumen
Piutang Pajak Daerah	SKP Daerah/SKPDKB/Dokumen yang dipersamakan
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Hasi RUPS/Dokumen yang dipersamakan
Piutang Lain-lain PAD yang sah:	
Jasa Giro/Bunga deposito	Nota Kredit/sertifikat deposito/dokumen yang dipersamakan
Tuntutan Ganti kerugian daerah	SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan
Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan	Keputusan Pengadilan/Dokumen yang dipersamakan
Piutang Transfer Pemerintah Pusat :	
Bagi Hasil Pajak	PMK
Bukan hasil pajak	PMK

Uraian	Dokumen
• DAU	Perpres
• DAK	PMK
• Bukan hasil pajak	PMK
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya: • Dana Otsus • Dana Penyesuaian • Piutang Dana Bos Kurang Salur	PMK PMK Keputusan Kepala Daerah/PMK/Dokumen yang dipersamakan
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	
• Bagi Hasil Pajak	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
• Bantuan Keuangan	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
• Piutang Pendapatan Lainnya	Dokumen yang dipersamakan
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	Surat keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	Surat Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Kontrak/Perjanjian Penjualan secara angsuran/Dokumen yang dipersamakan
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Surat Keputusan Pembebanan kerugian/Dokumen yang dipersamakan
Uang Muka	SP2D/Nota Debet/Dokumen yang dipersamakan

3. Jurnal Standar

Telah diterima dokumen berupa PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala Daerah/Kontrak/Surat Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan dan belum diterima pembayaran maka fungsi akuntansi akan melakukan jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang	XXX	
		XXX	Pendapatan LO		XXX

Telah diterima Nota Kredit dari bank/bukti tanda terima pembayaran/bukti penerimaan kas/dokumen yang dipersamakan dimana terjadi pemindahbukuan ke kas daerah, oleh itu bendahara penerimaan akan mencatat sebagai penerimaan kas untuk pelunasan piutang maka fungsi akuntansi melakukan jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan ... LRA		XXX

Penyisihan Piutang PPKD

Berdasarkan perhitungan dengan pendekatan kualitas piutang maka didapatkan Beban Penyisihan Piutang dan selanjutnya PPK SKPD akan mencatat penyisihan piutang dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Penyisihan Piutang Pajak	XXX	
		XXX	Beban Penyisihan Piutang Pajak		XXX

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut adalah contoh penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0			
(Dalam Rupiah)			
No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Retribusi	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
11	Belanja Dibayar Dimuka	(xxx)	(xxx)
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
18	Piutang Lainnya	xxx	xxx
19	Persediaan	xxx	xxx
20	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)	xxx	xxx
21			
22	INVESTASI JANGKA PANJANG		
23	Investasi Nonpermanen		
24	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
25	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
28	Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27)	xxx	xxx
29	Investasi Permanen		
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
31	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
32	Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)	xxx	xxx
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)	xxx	xxx
34			
35	ASET TETAP		
36	Tanah	xxx	xxx
37	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
38	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
39	Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
40	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
41	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
42	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
43	Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)	xxx	xxx
44			
45	DANA CADANGAN		
46	Dana Cadangan	xxx	xxx
47	Jumlah Dana Cadangan (46)	xxx	xxx
48			
49	ASET LAINNYA		
50	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
51	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
53	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
54	Aset Lain-lain	xxx	xxx
55	Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)	xxx	xxx
56			
57	JUMLAH ASET (20+33+43+47+55)	xxx	xxx

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

BAB IX
SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM

1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan jika memenuhi salah satu kriteria, yaitu:

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Termasuk dalam kelompok ini adalah barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi. Persediaan dalam kelompok ini meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, dan lain-lain;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contoh persediaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah alat-alat pertanian setengah jadi;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contohnya adalah hewan/tanaman.

2. Klasifikasi

Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Persediaan Bahan Pakai Habis	Persediaan Alat Tulis Kantor
	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)
	Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos

	Lainnya
	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
	Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran
	Persediaan Isi Tabung Gas
Persediaan Bahan/Material	Persediaan Bahan Baku Bangunan
	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman
	Persediaan Bibit Ternak
	Persediaan Bahan Obat-Obatan
	Persediaan Bahan Kimia
	Persediaan Bahan Makanan Pokok
Persediaan Barang Lainnya	Persediaan Barang yang akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga

B. PIHAK –PIHAK YANG TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara lain adalah:

1. **Pengurus Barang**
 Dalam sistem akuntansi persediaan, pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen- dokumen atas pengelolaan persediaan.
2. **Bendahara Pengeluaran**
 Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan.
3. **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**
 Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan.
4. **Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan atau Unit SKPD**
 Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuangan SKPD dan atau Unit SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi persediaan antara lain adalah:

1. Bukti Belanja Persediaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal pengakuan beban persediaan dan belanja persediaan dengan cara pembayaran UP.

2. Berita Acara Serah Terima Barang

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas pengakuan beban persediaan dengan cara pembayaran LS.

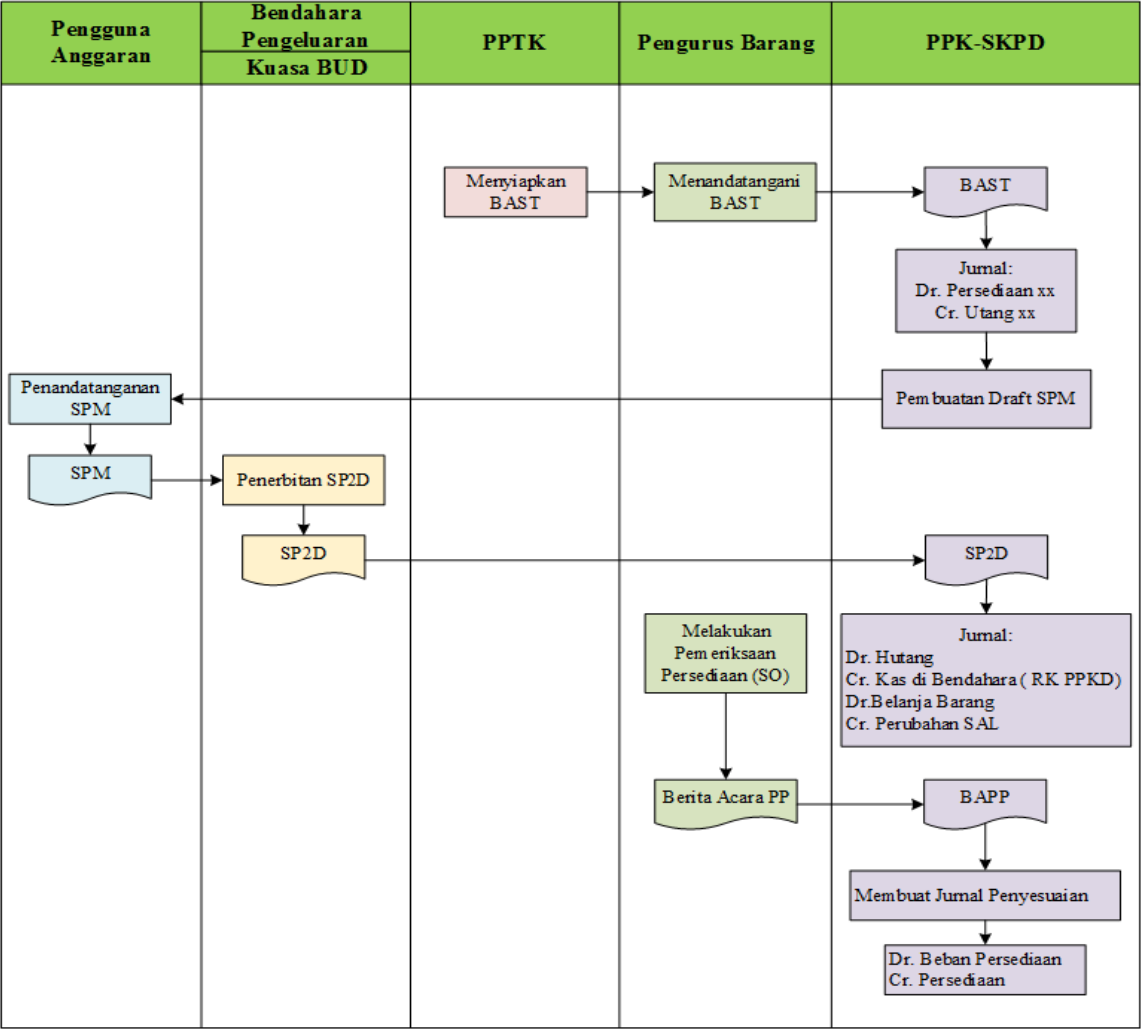
3. Berita Acara Pemeriksaan Persediaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal penyesuaian untuk pengakuan beban persediaan setelah dilakukannya stock opname.

4. SP2D LS

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja persediaan dengan cara pembayaran LS.

D. FLOWCHART DAN JURNAL STANDAR



1. Pencatatan Persediaan dengan Metode Periodik

Pembelian persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan UP (Uang Persediaan) maupun LS (Langsung). Ketika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan UP, bendahara pengeluaran SKPD akan menyerahkan bukti belanja persediaan kepada PPK SKPD. Bukti transaksi ini akan menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk melakukan pengakuan persediaan. PPK SKPD akan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No.Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan ...	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Persediaan ...	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Jika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan LS, pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan ...	XXX	
		XXX	Utang Belanja Barang dan Jasa		XXX

Ketika SP2D LS untuk pembayaran persediaan telah terbit, PPK-SKPD akan menghapus utang belanja dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Barang dan Jasa	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Persediaan ...	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Pada akhir periode (bulanan, triwulanan, semesteran), sebelum menyusun laporan keuangan, bagian gudang akan melakukan stock opname untuk mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan berita acara hasil perhitungan persediaan akhir tahun (stock opname), PPK-SKPD akan menjurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Persediaan ...	XXX*	
		XXX	Persediaan ...		XXX

**Sebesar persediaan yang dipakai*

2. Pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual

Ketika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan UP, bendahara pengeluaran SKPD akan menyerahkan bukti belanja persediaan kepada PPK SKPD. Bukti transaksi ini akan menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Persediaan ...	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Jika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan LS, pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan	XXX	
		XXX	Utang Belanja Barang dan Jasa		XXX

Ketika SP2D LS untuk pembayaran persediaan terbit, PPK-SKPD akan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Barang dan Jasa	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Persediaan ...	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Berdasarkan dokumen yang menjelaskan penggunaan/pemakaian persediaan (untuk metode perpetual), seperti Kartu Inventaris Barang (KIB), Buku Inventaris (BI), dan kartu kendali barang, PPK SKPD akan mengakui beban persediaan sejumlah yang terpakai dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Persediaan ...	XXX	
		XXX	Persediaan ...		XXX

Jurnal standar dari setiap jenis transaksi terkait persediaan tersebut secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Jurnal Standar Persediaan dengan Sistem Pencatatan Periodik

No	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
1a	Pembelian Persediaan dengan uang UP/GU/TU	Persediaan	xxx		Tidak ada jurnal		
		Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx			
		Belanja Persediaan	xxx		Tidak ada jurnal		
		Perubahan SAL		xxx			
1b	Pembelian Persediaan dengan uang LS (Utang)	Persediaan	xxx		Tidak ada jurnal		
		Utang Belanja		xxx			
	Pelunasan Utang/Penerbitan SP2DLS Barang	Utang Belanja	xxx		RK PPKD	xxx	
		RK PPKD		xxx	Kas di kas Daerah		xxx
		Belanja Persediaan	xxx		Tidak ada jurnal		
		Perubahan SAL		xxx			
2	Pemakaian Persediaan	Tidak ada jurnal			Tidak ada jurnal		
3	Penyesuaian di Akhir Tahun	Beban Persediaan	xxx		Tidak ada jurnal		
		Persediaan		xxx			

Jurnal Standar Persediaan dengan Sistem Pencatatan Perpetual

No	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
1a	Pembelian Persediaan dengan uang UP/GU/TU	Persediaan	xxx		Tidak ada jurnal		
		Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx			
		Belanja Persediaan	xxx		Tidak ada jurnal		
		Perubahan SAL		xxx			
1b	Pembelian Persediaan dengan uang LS (Utang)	Persediaan	xxx		Tidak ada jurnal		
		Utang Belanja		xxx			
	Pelunasan Utang/Penerbitan SP2DLS Barang	Utang Belanja	xxx		RK PPKD	xxx	
		RK PPKD		xxx	Kas di kas Daerah		xxx
		Belanja Persediaan	xxx		Tidak ada jurnal		
		Perubahan SAL		xxx			
2	Pemakaian Persediaan	Persediaan			Tidak ada jurnal		
		Beban Persediaan					
3	Penyesuaian Di Akhir Tahun	Tidak ada jurnal	xxx		Tidak ada jurnal		
				xxx			

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA		
NERACA		
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0		
(Dalam Rupiah)		
Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
Piutang Pajak	xxx	xxx
Piutang Retribusi	xxx	xxx
Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
Piutang Lainnya	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)	xxx	xxx

Disamping penyajian diatas hal-hal yang dipandang perlu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan sehubungan dengan persediaan meliputi:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- 2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 3) Kondisi persediaan. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal-hal tersebut di atas tidak dilaporkan dalam Neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB X

SISTEM AKUNTANSI INVESTASI

A. UMUM

1. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

2. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Nomor 06 tentang Investasi antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Dalam Bagan Akun Standar, investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham
	Investasi dalam Deposito
	Investasi dalam SUN
	Investasi dalam SBI
	Investasi dalam SPN
	Investasi Jangka Pendek BLUD
	Investasi Jangka Pendek Lainnya
Investasi Jangka PanjangNon Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta
	Investasi dalam Obligasi
	Investasi dalam Proyek Pembangunan
	Dana Bergulir
	Deposito Jangka Panjang
Investasi Jangka Panjang Permanen	Investasi Non Permanen Lainnya
	Penyertaan Modal Kepada BUMN
	Penyertaan Modal Kepada BUMD
	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta
	Investasi Permanen Lainnya

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan PPKD.

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi investasi, PPK-PPKD melaksanakan fungsi akuntansi PPKD yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mencatat transaksi/kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.
- b. Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).
- c. Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. PPKD

Dalam sistem akuntansi investasi, PPKD memiliki tugas:

- a. menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD
- b. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Berikut disajikan dokumen utama terkait dengan sistem akuntansi Investasi pada PPKD:

Uraian		Dokumen
Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham	Sertifikat Saham/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi dalam Deposito	Sertifikat Deposito/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi dalam SUN	Sertifikat Obligasi/SUN/Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi dalam SBI	Sertifikat SBI/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi dalam SPN	Sertifikat SPN/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi Jangka Pendek Lainnya	-
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi dalam Obligasi	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Dana Bergulir	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan
	Deposito Jangka Panjang	SP2D-LS (jika tunai)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi Non Permanen Lainnya	SP2D-LS (jika tunai), BAST (jika berupa aset)/Dokumen yang Dipersamakan
	Penyertaan Modal Kepada BUMN	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Penyertaan Modal Kepada BUMD	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan
Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi Permanen Lainnya	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan

D. JURNAL STANDAR

1. Perolehan Investasi

a. Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek)

Ketika pemerintah daerah melakukan pembentukan/pembelian investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas, fungsi akuntansi PPKD mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Pendek	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

b. Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang)

Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam peraturan daerah direalisasikan. Pencatatan dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD berdasarkan SP2D-LS (jika tunai) yang menjadi dasar pencairan pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut.

fungsi akuntansi PPKD mencatat perolehan investasi jangka panjang dengan jurnal:

1)Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pengeluaran Pembiayaan –Dana Bergulir	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Panjang Permanen	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal/Investasi Pemda	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

2. Hasil Investasi

a. Hasil Investasi Jangka Pendek

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan dengan pelepasan investasi jangka pendek tersebut, sehingga pembahasannya akan digabungkan ke sub bagian pelepasan investasi.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Bunga...- LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Bunga...- LRA		XXX

b. Hasil Investasi Jangka Panjang

1) Metode Biaya

Dalam metode biaya, keuntungan/kerugian perusahaan tidak mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya menerima dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Berdasarkan pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan investee, PPKD dapat mengetahui jumlah dividen yang akan diterima pada periode berjalan. Selanjutnya fungsi akuntansi PPKD menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	
		XXX	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		XXX

Pada saat perusahaan investee membagikan dividen tunai kepada pemerintah daerah, fungsi akuntansi PPKD mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL		
		XXX	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA		XXX

2) Metode Ekuitas

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tempat pemerintah daerah berinvestasi, PPKD dapat mengetahui jumlah keuntungan perusahaan pada periode berjalan. Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Pada saat perusahaan mengumumkan laba, fungsi akuntansi PPKD mencatat kejadian tersebut dengan melakukan penjurnalan sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Panjang...	XXX	
		XXX	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan-LO		XXX

Pada saat perusahaan membagikan dividen, fungsi akuntansi PPKD akan mencatat penerimaan dividen (tunai) tersebut dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Investasi Jangka Panjang		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA		XXX

3) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang non permanen (misalnya pendapatan bunga dari dana bergulir) telah diterima, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat penerimaan bunga dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Bunga Dana Bergulir – LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Bunga Dana Bergulir – LRA		XXX

c. Pelepasan Investasi

1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek

Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan dengan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan ..LO		XXX
		XXX	Investasi Jangka Pendek		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan ... – LRA		XXX

Pelepasan Investasi Jangka Panjang

Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka panjang misalnya saham, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, fungsi akuntansi PPKD melakukan pencatatan dengan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Investasi Jangka Panjang		XXX
		XXX	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan – Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		XXX

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen. Berikut adalah contoh penyajian investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

NERACA		
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA		
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0		
(Dalam Rupiah)		
Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
Piutang Pajak	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Nonpermanen		
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Investasi Nonpermanen	xxx	xxx
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Investasi Permanen	xxx	xxx
Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

BAB XI

SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM

1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Dari definisi tersebut, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu (1) berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap menurut adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, masa manfaatnya lebih dari 12 bulan, dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah; dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

B. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:

1. Pengurus Barang

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan aset tetap.

2. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap.

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap.

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan SKPD dan atau Unit SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD dan atau Unit SKPD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:

1. Bukti Belanja/Pembayaran Aktiva Tetap

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal pengakuan aktiva tetap dan belanja modal dengan cara pembayaran UP.

2. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas pengakuan aktiva tetap dengan cara pembayaran LS.

3. SP2D LS

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja modal dengan cara pembayaran LS.

4. Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya.

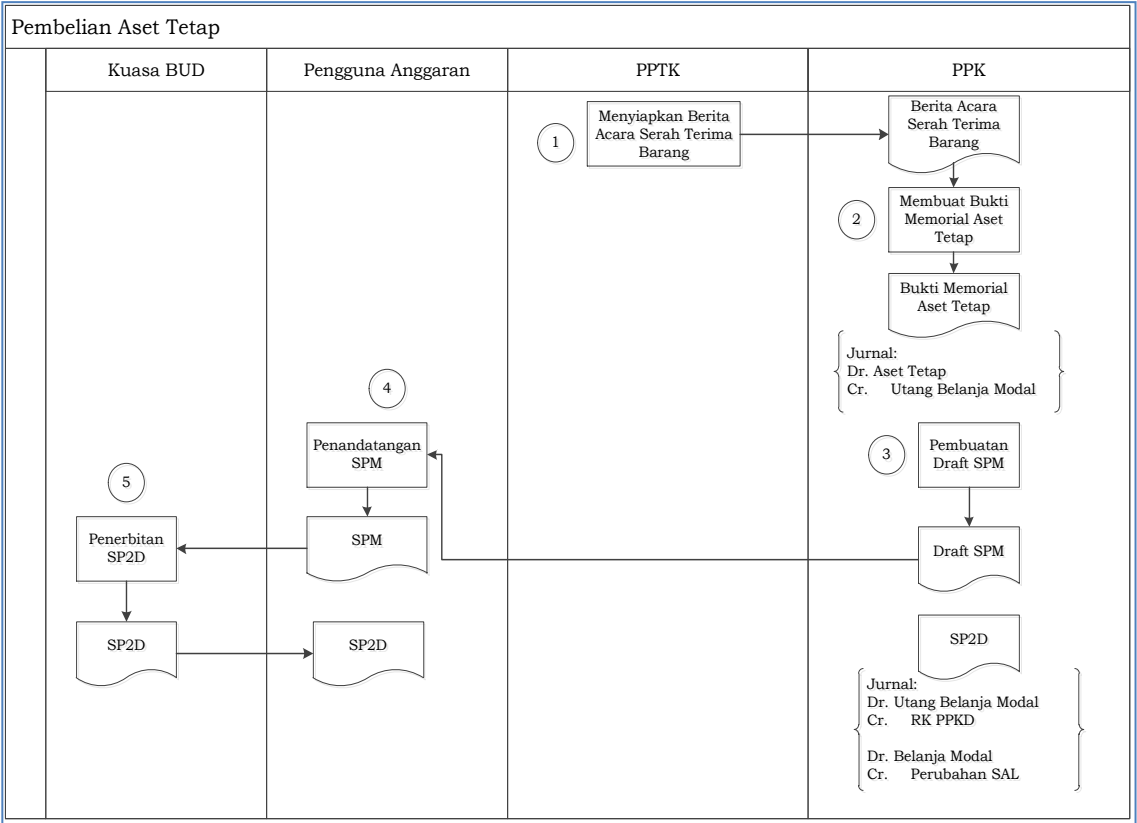
5. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan penghapusan aset tetap.

6. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan aset tetap konstruksi dalam pekerjaan.

D. *FLOWCHART* DAN JURNAL STANDAR

Dalam transaksi pembelian aset tetap yang menggunakan mekanisme LS, aset tetap diakui ketika telah terjadi serah terima barang dari pihak ketiga dengan SKPD terkait. Berdasarkan bukti transaksi berupa Berita Acara Penerimaan Barang atau Berita Acara Serah Terima, PPK-SKPD membuat bukti memorial aset tetap yang kemudian diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, PPK- SKPD akan mengakui adanya penambahan aset tetap dengan jurnal:



Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap	XXX	
		XXX	Utang Belanja Modal		XXX

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran perolehan aset tetap tersebut hingga SP2D LS terbit. Berdasarkan SP2D- LS tersebut PPK-SKPD akan membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Apabila pembelian aset tetap dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU, pengakuannya dilakukan berdasarkan bukti pembayaran (bukti belanjanya). Berdasarkan bukti tersebut, PPK-SKPD akan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan. Untuk aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Menambah manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara yang dapat berupa:
 - a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - b) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - c) bertambah volume, dan/atau
 - d) bertambah kapasitas produksi.

2. Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi ini harus dituangkan di dalam kebijakan akuntansi di masing-masing entitas pelaporan.

Sebagai contoh, SKPD ABC melakukan renovasi aset tetapnya sehingga masa manfaat aset tetap tersebut bertambah, misalnya umur ekonomis bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Biaya renovasi telah melebihi satuan minimum kapitalisasi. Atas transaksi ini, PPK-SKPD menjurnal kapitalisasi sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

PELEPASAN ASET TETAP

Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset tetap yang dapat diikuti dengan proses pemindahtanganan, seperti penjualan, maupun pemusnahan aset tetap.

Untuk penghapusan aset tetap dengan pemusnahan, PPK SKPD akan membuat bukti memorial yang dibuat berdasarkan SK Kepala Daerah tentang penghapusan aset tetap. Setelah bukti memorial tersebut diotorisasi oleh pengguna anggaran, PPK SKPD kemudian membuat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Akumulasi Penyusutan	XXX	
		XXX	Aset Lainnya	XXX	
		XXX	Aset Tetap		XXX

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	XXX	
		XXX	Aset Lainnya		XXX

Sedangkan untuk penghapusan aset tetap yang diikuti dengan proses penjualan, SKPD harus menyerahkan aset tetap tersebut kepada PPKD, sebab kewenangan untuk menjual aset tetap ada di PPKD. Namun demikian, PPKD SKPD tetap mencatat penghapusan aset tetap tersebut. Jurnal penghapusan aset tetap untuk aset yang akan diserahkan ke PPKD untuk kemudian dijual, yaitu:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Akumulasi Penyusutan	XXX	
		XXX	Aset Lainnya	XXX	
		XXX	Aset Tetap		XXX

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Aset Lainnya		XXX

Setelah menerima pelimpahan aset dari SKPD, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Lainnya	XXX	
		XXX	RK SKPD		XXX

Pada saat aset tersebut telah dijual oleh PPKD, berdasarkan bukti transaksi penjualan, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Aset Lainnya		XXX
		XXX	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		XXX

atau

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Defisit penjualan Aset Non Lancar	XXX	
		XXX	Aset Lainnya		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		XXX

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset tetap di SKPD:

No	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
1	Perolehan Aset	Aset Tetap	xxx		Tidak ada jurnal		
		Utang Belanja Modal		xxx			
		Utang Belanja Modal	xxx		RK SKPD	xxx	
		RK PPKD		xxx	Kas di Kas Daerah		xxx
		Belanja Modal	xxx				
		Perubahan SAL		xxx			
2	Perolehan Aset Tetap dengan Mekanisme UP/GU/TU	Aset Tetap	xxx		Tidak ada jurnal		
		Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx			
		Belanja Modal	xxx				
		Perubahan SAL		xxx			
3	Kapitalisasi Pengeluaran setelah Perolehan	Aset Tetap	xxx		Tidak ada jurnal		
		Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx			
		Belanja Modal	xxx				
		Perubahan SAL		xxx			
4	Reklasifikasi Aset Tetap ke Pos Aset Lainnya	Aset Lainnya	xxx		Tidak ada jurnal		
		Akumulasi Penyusutan	xxx				
		Aset Tetap		xxx			
5	Pelepasan Aset Lainnya dengan Pemusnahan	Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	xxx				
		Aset Lainnya		xxx			
6	Penyerahan Aset Lainnya ke PPKD (untuk dijual/dimanfaatkan)	RK PPKD	xxx		Aset Lainnya	xxx	
		Aset Lainnya		xxx	RK SKPD		xxx
7	Aset Lainnya yang dihapus (dihentikan penggunaannya)	Tidak ada jurnal			Kas di Kas Daerah	xxx	
					Aset Lainnya		xxx
					Surplus Penjualan Aset Non Lancar		xxx
					Perubahan SAL	xxx	
					Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		xxx
		Tidak ada jurnal			Atau		
					Kas di Kas Daerah	xxx	
					Defisit Penjualan Aset NonLancar	xxx	
					Aset Lainnya		xxx
					Perubahan SAL	xxx	
					Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		xxx

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA		
NERACA		
NERACA ASET TETAP		
(Dalam Rupiah)		
Uraian	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
Piutang Pajak	xxx	xxx
Piutang Retribusi	xxx	xxx
Penyisihan Piutang	xxx	xxx
Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
Piutang Lainnya	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Nonpermanen		
Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Investasi Nonpermanen	xxx	xxx
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Investasi Permanen	xxx	xxx
Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
ASET TETAP		
Tanah	xxx	xxx
Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
Jumlah Aset Tetap	xxx	xxx
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	xxx	xxx
Jumlah Dana Cadangan	xxx	xxx
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
Aset Lain-lain	xxx	xxx
Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx
JUMLAH ASET	xxx	xxx

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan;
 - b) Pelepasan;
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d) Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a) Nilai penyusutan;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

BAB XII
SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA

A.UMUM

1. Definisi

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomi dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

2. Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Goodwill
	Lisensi dan Frenchise
	Hak Cipta
	Paten
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- a. Tagihan jangka panjang;
- b. Kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- c. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- a. Aset tak berwujud; dan
- b. Aset lain-lain.

B. SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA DI SKPD

1. Pihak-pihak yang terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya pada SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK- SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

a. PPK-SKPD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti- bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.
- 2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).
- 3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Penerimaan SKPD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

c. Bendahara Pengeluaran SKPD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen- dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

d. PA/KPA

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PA/KPA memiliki tugas:

- 1) Menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD pada PPKD (PPK-PPKD).
- 2) Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA.

2. Dokumen terkait

Berikut disajikan dokumen terkait dengan sistem akuntansi Aset lainnya pada SKPD:

Uraian		Dokumen
Aset Tidak Berwujud	Lisensi dan Frenchise	Surat/Ijin dari pemegang Haki/Dokumen yang Dipersamakan
	Hak Cipta	Haki/Dokumen yang Dipersamakan
	Paten	Haki/Dokumen yang Dipersamakan
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Dokumen menyesuaikan
Aset Lain-lain	Barang Rusak dalam Proses Penghapusan	Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang Dipersamakan.

3. Jurnal Standar

a. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non- moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

- a) Goodwill;
- b) Hak Paten atau Hak Cipta;
- c) Royalti;
- d) Software;
- e) Lisensi;
- f) Hasil Kajian/ Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang;
- g) Aset Tak Berwujud Lainnya;
- h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.

Pada saat aset tidak berwujud diperoleh, maka fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal pengakuan aset tidak berwujud untuk perolehan menggunakan (UP/GU/TU)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tidak Berwujud - Software	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Barang dan Jasa- Konsultansi - Software	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Untuk perolehan Aset Tak berwujud menggunakan LS maka Jurnal Standar Pengakuan Aset Tidak Berwujud:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tidak Berwujud - Software	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Barang dan Jasa- Konsultasi - Software	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan (Asumsi ada masa manfaatnya) disebut amortisasi.

Amortisi terhadap aset tidak berwujud dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab asset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, pemerintah daerah dapat menggunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Jurnal Standar Pengakuan Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Amortisasi - Software	XXX	
		XXX	Akumulasi Amortisasi Software		XXX

b. Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi kedalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau ast tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (Proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif

pemerintah daerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, fungsi akuntansi SKPD akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi.

Jurnal Standar Pengakuan Aset Lain lain

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset lain-lain – Traktor Rusak	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Besar Darat – Traktor	XXX	
		XXX	Alat-alat besar Darat – Traktor		XXX

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset lainnya di SKPD:

No	Transaksi	Pencatatan oleh SKPD			Pencatatan oleh SKPD		
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
1	Aset Tidak Berwujud						
	Saat Aset Diterima	Aset Tidak Berwujud	XXX		Tidak Ada Jurnal		
		Utang Belanja		XXX			
	Saat Pembayaran UP/GU/TU				Tidak Ada Jurnal		
		Utang Belanja	XXX				
		Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX			
	Saat Pembayaran LS	Utang Belanja	XXX		RK SKPD	XXX	
		RK PPKD		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX
2	Aset lain-lain	Aset Lain-lain	XXX		Tidak Ada Jurnal		
		Akumulasi Penyusutan	XXX				
		Aset Tetap		XXX			

C. SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA DI SKPKD

1. Pihak-Pihak Terkait SKPKD

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi Aset Lainnya pada SKPKD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK-PPKD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK-SKPKD)

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPKD melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPKD yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti- bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.
- 2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).

3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. PPKD

Dalam sistem akuntansi Aset lainnya, PPKD mempunyai tugas menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPKD.

2. Dokumen terkait

Berikut disajikan dokumen terkait dengan sistem akuntansi aset lainnya pada SKPKD:

Uraian		Dokumen
Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran:	Kontrak/Perjanjian Penjualan secara Angsuran/Berita Acara Penjualan/ yang Dipersamakan
	a. Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Kepala Daerah b. Penjualan Rumah Golongan III	
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Keputusan Pembebanan dan/ atau Dokumen yang Dipersamakan
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa	Kontrak/Perjanjian – Sewa/ yang Dipersamakan
	Kerjasama Pemanfaatan	Kontrak/Perjanjian Kerjasama – Pemanfaatan/ dokumen yang Dipersamakan
	Bangun Guna Serah (BOT)	Kontrak/Perjanjian Kerjasama - BOT/ Dokumen yang Dipersamakan
	Bangun Serah Guna (BTO)	Kontrak/Perjanjian Kerjasama – BOT & BAST/ Dokumen yang Dipersamakan
Aset Lain-lain	<i>Restricted Cash</i>	<i>PerKDH/ SP2D/ Dokumen yang Dipersamakan</i>

3. Jurnal Standar pada SKPKD

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat

diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III kepada pegawai.

Barang milik daerah yang dipindahtangankan/dijual adalah aset tetap yang dikuasai oleh SKPD. Sebelum proses dipindah tangankan/dijual, SKPD “menghapus” dari pembukuannya dengan mekanisme SKPD akan menyerahkan aset tersebut kepada PPKD. PPKD menerima pelimpahan aset yang hendak dijual ini dengan mencatatnya sebagai aset tetap/barang milik daerah yang akan dijual.

Selanjutnya, ketika PPKD melakukan penjualan aset ini secara angsuran, maka fungsi akuntansi PPKD akan membuat jurnal pengakuan tagihan penjualan angsuran berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan dengan angsuran. Besaran tagihan penjualan angsuran yang dicatat adalah sesuai yang ditetapkan dalam naskah/dokumen perjanjian penjualan.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Tagihan Angsuran Penjualan	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	XXX	
		XXX	Surplus penjualan Aset Gedung dan Bangunan-LO		XXX
		XXX	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		XXX

Jika penguasaan aset tetap yang dijual berada dibawah penguasaan SKPD maka sebelum dilakukan jurnal tersebut diatas harus dilakukan pencatatan atas pengembalian penguasaan aset tetap dari SKPD ke PPKD. Fungsi akuntansi PPKD dan PPK-SKPD melakukan jurnal atas pengembalian penguasaan aset tetap tersebut sebagai berikut:

Jurnal Standar – Penyerahan/Pengembalian Aset Tetap dari SKPD ke SKPKD

Fungsi Akuntansi SKPKD - Jurnal LO dan Neraca:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	XXX	
		XXX	RK SKPD		XXX
		XXX	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		XXX

PPK-SKPD - Jurnal LO dan Neraca:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	XXX	
		XXX	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		XXX

Karena tagihan penjualan tersebut bersifat jangka panjang maka setiap akhir tahun Fungsi Akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukti memorial, fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi dengan jurnal:

Jurnal Standar – Reklasifikasi Tagihan Angsuran Penjualan ke Bagian Lancar Angsuran

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran – Rumah Dinas	XXX	
		XXX	Tagihan Angsuran Penjualan		XXX

Jika pembeli tersebut melakukan pembayaran angsuran, maka fungsi akuntansi PPKD melakukan penjurnalan sebagai berikut (misalkan angsuran per bulan Rp1.000.000,00):

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Bagian Lancar Tagihan Angsuran Penjualan– Rumah Dinas		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan - Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas - LRA		XXX

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) ini diakui ketika putusan Pembebanan dan/atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD akan membuat jurnal pengakuan tagihan tuntutan kerugian daerah. Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat:

Jurnal Standar – Pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara	XXX	
		XXX	Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara-LO		XXX

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan asset nonlancar, atau piutang yang sifatnya jangka panjang. Untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan, fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi di setiap akhir tahun dengan jurnal:

Jurnal Standar – Reklasifikasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ke Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara	XXX	
		XXX	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara		XXX

Ketika diterima pembayaran dari pegawai yang terkena kasus TGR ini, fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal:

Jurnal Standar – Penerimaan Pembayaran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara		XXX*)

*) Jurnal ini dibuat setiap bulan saat ada transaksi pembayaran cicilan TGR

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara-LRA		XXX

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini bisa berupa:

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan-sewa. Pada saat perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kedua pihak, fungsi akuntansi PPKD akan mereklasifikasi dari Aset Tetap ke “Aset Lain-lain-Kemitraan dengan Pihak Ketiga”.

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga– Sewa

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga –Sewa Tanah Kantor	XXX	
		XXX	Aset Tetap – Tanah Lapangan Olahraga		XXX

Hasil dari kerjasama berupa uang sewa akan diakui sebagai pendapatan “Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LO”. Berdasarkan Nota Kredit yang diterima dari Bank, fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Sewa – LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Sewa - LRA		XXX

Pada masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap – Tanah Lapangan Olahraga	XXX	
		XXX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa Tanah Kantor		XXX

2. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan pemanfaatan (KSP).

3. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

BGS adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga– Bangun Guna Serah – BGS/BOT

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Bangun Guna Serah/BGS (BOT) atas Tanah Kantor	XXX	
		XXX	Aset Tetap – Tanah Lapangan Olahraga		XXX

4. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 Tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa BSG adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Bangun Serah Guna – BSG/BTO

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Bangun Serah Guna/BSG (BTO) atas Tanah Lapangan & Gedung Olahraga	XXX	
		XXX	Aset Tetap – Tanah Lapangan Olahraga		XXX
		XXX	Utang Jangka Panjang Lainnya- Utang kepada Pihak Ketiga BGS/BTO		XXX

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset lainnya di SKPKD:

No	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH SKPKD		
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
1	Tagihan Penjualan Angsuran						
	Saat Penjualan Aset Tetap				Tagihan Angsuran Penjualan...	xxx	
		Tidak Ada Jurnal			Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan- LO		xxx
					Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		xxx
	Surplus						
		Tidak Ada Jurnal			Tagihan Angsuran Penjualan	xxx	
					Defisit Penjualan Aset Non Lancar	xxx	
					Aset Lain-lain...		xxx
	Defisit						
		Tidak Ada Jurnal					
	Jika penguasaan Aset Tetap yang dijual berada dibawah penguasaan SKPD maka sebelum dilakukan penjualan maka harus dilakukan pengembalian atas penguasaan aset tetap dari SKPD ke PPKD.				Fungsi Akuntansi PPKD:		
					Aset Tetap – Gedung&Bangunan	xxx	
					RK SKPD		xxx
					Aset Lain-lain (berupa Gedung & Bangunan)	xxx	
					Aset Tetap – gedung & Bangunan		xxx
		PPK-SKPD:					
		RK PPKD	xxx				
	Saat Piutang Jatuh Tempo	Aset Tetap Gedung & Bangunan		xxx			
	Saat Pembayaran Angsuran	Tidak Ada Jurnal			Bagian Lancar Tagihan Angsuran Penjualan... –	xxx	
					Tagihan Angsuran Penjualan		xxx
		Tidak Ada Jurnal			Kas di Kas Daerah	xxx	
					Bagian Lancar Tagihan Angsuran Penjualan...-		xxx
					Perubahan SAL	xxx	
					Pendapatan Angsuran/Cicilan Penjualan...-LRA		xxx
2	Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah						
	Saat Pengakuan TGR	Tidak Ada Jurnal			Tuntutan Ganti Kerugian Daerah...	xxx	
					Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah...-LO		xxx
		Tidak Ada Jurnal			Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah...	xxx	
					Tuntutan Ganti		xxx

BAB XIII

SISTEM AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP DAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

A. UMUM

1. Definisi

Penyusutan (Amortisasi) merupakan alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tetap (Aset tidak berwujud) yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas.

Penyusutan (Amortisasi) dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan (amortisasi) secara periodik sepanjang masa manfaat aset. Tanpa penyusutan, nilai aset tetap (aset tak berwujud) dalam neraca akan lebih saji (*overstated*).

Tidak semua aset tetap perlu disusutkan karena tidak semua jenis aset tetap mengalami penurunan nilai. Beberapa jenis aset tetap justru dapat meningkat nilainya seiring waktu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, disebutkan bahwa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan merupakan dua jenis aset tetap yang tidak disusutkan.

B. PIHAK –PIHAK YANG TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud antara lain adalah:

1. Pengurus Barang SKPD/ SKPKD

Dalam sistem akuntansi penyusutan/amortisasi, pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen.

2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/ SKPKD

Dalam sistem akuntansi penyusutan/amortisasi, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi penyusutan/amortisasi yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penyusutan/amortisasi adalah:

Bukti Memorial

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud.

D. JURNAL STANDAR

Beban penyusutan di jurnal setiap akhir periode (bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan). Setiap penyusutan/amortisasi akan di jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan dan amortisasi	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi		XXX

Beban penyusutan/amortisasi merupakan alokasi penyusutan/amortisasi yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional entitas. Seperti layaknya beban lainnya, beban penyusutan/amortisasi merupakan akun nominal yang pada akhir periode harus ditutup sehingga saldonya nol di setiap awal periode. Sedangkan akumulasi penyusutan/amortisasi akan dilaporkan dalam neraca. Akumulasi penyusutan/amortisasi merupakan akun nominal sehingga angkanya tidak akan pernah ditutup di akhir tahun.

Akumulasi penyusutan/amortisasi merupakan total dari penyusutan suatu aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan/amortisasi menjadi pengurang aset tetap/aset tak berwujud dalam neraca dimana harga perolehan aset tetap/aset tak berwujud yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutan/amortisasi menjadi nilai buku (*book value*) aset tetap/aset tak berwujud tersebut.

Metode Penyusutan

Terdapat 3 (tiga) jenis metode penyusutan yang dapat dipergunakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu Garis Lurus (*Straight Line Method*), Saldo Menurun Ganda (*Double Declining Balance Method*), Unit Produksi (*Unit of Production Method*).

- a. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)
Metode garis lurus merupakan metode yang paling umum digunakan dalam penyusutan/amortisasi. Metode garis lurus menghitung penurunan nilai aset dengan rumus:

$$beban\ penyusutan = \frac{harga\ perolehan - estimasi\ nilai\ sisa}{estimasi\ masa\ manfaat}$$

- b. Metode Saldo Menurun Ganda (*Double Declining Method*)
Metode ini menghitung penurunan nilai aset dengan rumus:

$$beban\ penyusutan = \frac{100\%}{masa\ manfaat\ aset} \times 2 \times harga\ perolehan$$

- c. Metode Unit Produksi (*Unit of Production Method*)

Metode unit produksi menghasilkan perhitungan alokasi jumlah beban penyusutan periodik yang berbeda-beda tergantung jumlah penggunaan aset tetap dalam produksi. Metode ini paling tepat digunakan jika unit manfaat dari aset bersifat spesifik dan terkuantifikasi. Metode ini menghitung penurunan nilai aset tetap dengan rumus:

beban penyusutan

=
$$\frac{\text{harga perolehan} - \text{estimasi nilai sisa}}{\text{estimasi masa manfaat produksi}} \times \text{produksi tahun ini}$$

Dalam metode ini, besaran beban penyusutan setiap tahunnya tergantung dengan besaran unit yang diproduksi setiap tahun. Biasanya, setiap tahun beban penyusutan akan semakin kecil sebab semakin lama kemampuan aset tetap menghasilkan produk semakin kecil.

Metode Amortisasi

Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.

E. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Penyajian beban penyusutan/amortisasi di Laporan Operasional dapat diilustrasikan sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA					
LAPORAN OPERASIONAL					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0					
(Dalam rupiah)					
No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanPendapatan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah(3 s/d 6)	xxx	xxx	xxx	xxx
8					
34					
35	BEBAN				
36	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
38	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
39	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
40	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
44	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
45	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
46	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
47	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
48	JUMLAH BEBAN (36 s/d 47)	xxx	xxx	xxx	xxx

Penyajian akumulasi penyusutan aset tetap dapat diilustrasikan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI KABUPATEN KOTA			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0			
(Dalam Rupiah)			
No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
35	ASET TETAP		
36	Tanah	xxx	xxx
37	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
38	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
39	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
40	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
41	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
42	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
43	Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)	xxx	xxx

BAB IV

SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM

1. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Sistem akuntansi kewajiban adalah suatu proses yang dimulai dari pembelian/pengadaan barang/jasa (secara kredit) yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sampai kepada proses penyelesaian/pembayaran utang yang bersangkutan.

2. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrua! Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang

- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Jangka Panjang Lainnya

B. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI SKPD

Akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas penerimaan utang, pembayaran utang khususnya utang jangka pendek.

1. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban si SKPD terdiri atas: PPTK, PPK-SKPD dan PPKD.

a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPTK melaksanakan fungsi untuk pengadaan barang/jasa kegiatan, dengan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembelian/pengadaan barang/jasa berdasarkan kebutuhan kegiatan dengan menggunakan nota pesanan/ dokumen lain yang dipersamakan;
- 2) menerima barang berdasarkan nota pesanan dengan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST);
- 3) menyiapkan dokumen pembayaran.

b. Pejabat Penatausahaan Keuangan – SKPD

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD dengan memiliki tugas sebagai berikut:

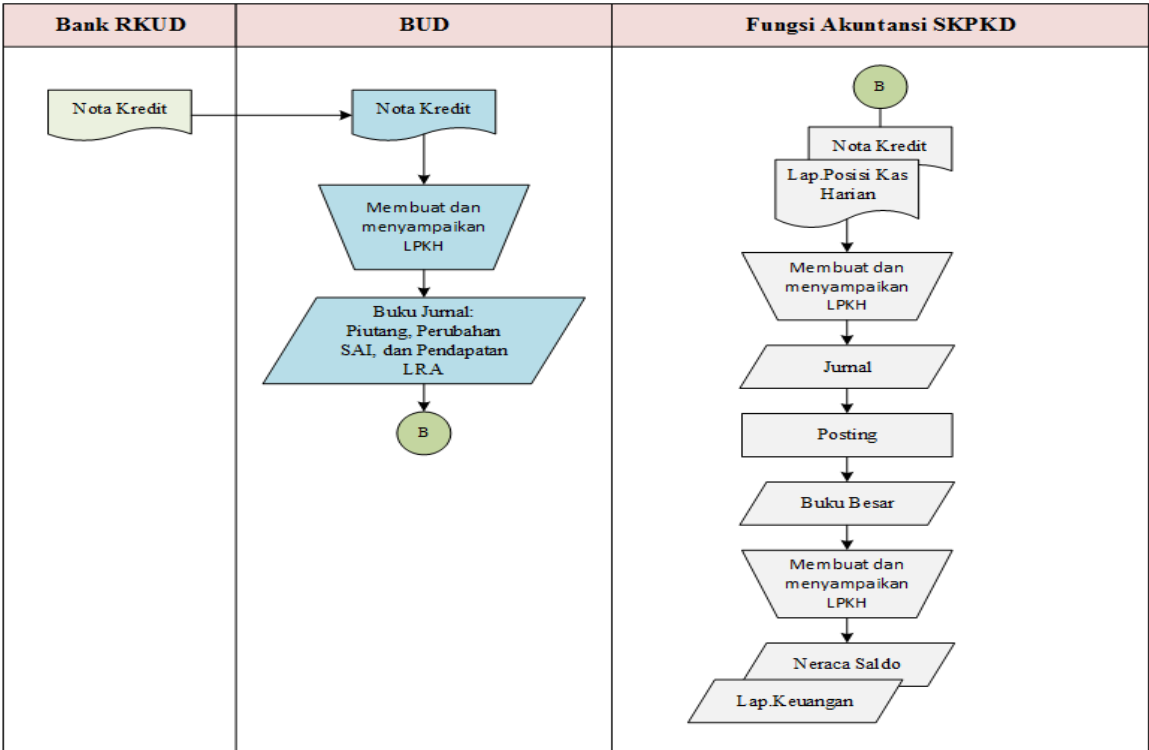
- 1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
- 3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
- Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD terlibat dalam hal pengadaan barang/jasa oleh SKPD dilakukan dengan mekanisme pembayaran LS, sehingga fungsi akuntansi PPKD memiliki tugas:
- 1) Menyampaikan dokumen transaksi yang dilakukan dengan mekanisme LS kepada SKPD;
 - 2) Melakukan pengecekan terhadap transaksi konsolidasi antara PPKD dan SKPD untuk meyakinkan kebenaran pencatatan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPD.
- d. Pengguna Anggaran (PA / KPA)
- Dalam sistem akuntansi kewajiban, PA/KPA menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

2. Dokumen yang Digunakan

- Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain:
- 1) Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - 2) Nota Pesanan;
 - 3) Berita Acara Serah Terima;
 - 4) Kuitansi;
 - 5) Surat Perjanjian Kerja;
 - 6) SP2D UP/GU/TU;
 - 7) SP2D LS;
 - 8) Surat Pernyataan PA tentang tanggungjawab PA terhadap laporan keuangan SKPD.

3. Flowchart dan Jurnal Standar



Akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas pencatatan atas terjadinya utang dan pembayaran utang.

Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, PPK-SKPD akan mengakui adanya utang.

Pencatatan atas pengadaan/pembelian barang/jasa dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan Beban dan (2) Pendekatan Aset.

a. Transaksi pengakuan terjadinya utang pada saat pengadaan/pembelian ATK yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan.

1) Jika menggunakan pendekatan beban, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban ATK	XXX	
		XXX	Utang Belanja Bahan Pakai Habis		XXX

2) Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan Alat Tulis Kantor	XXX	
		XXX	Utang Belanja Bahan Pakai Habis		XXX

b. Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme UP/GU, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah:

1) Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Bahan Pakai Habis	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ATK	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Bahan Pakai Hahis	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ATK	XXX*)	
		XXX	Perubahan SAL		XXX*)

*) Pengakuan nilai belanja ditentukan berdasarkan metode pencatatan yang dilakukan. Apakah menggunakan metode perpetual atau metode periodik
Perlakuan Metode Perpetual maupun Metode Periodik dibahas dalam Modul PERSEDIAAN

- c. Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme LS, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Bahan Pakai Hahis	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ATK	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Catatan :

Pengakuan adanya utang terkait dengan transaksi pembelian/pengadaan barang dan jasa harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran/dana untuk menyelesaikan/membayar utang.

C. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI SKPKD

Akuntansi kewajiban SKPKD terdiri atas penerimaan utang, pembayaran utang, dan reklasifikasi utang yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu : (1) Akuntansi kewajiban, dan (2) akuntansi pembiayaan.

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di PPKD terdiri atas : Fungsi Akuntansi SKPKD, BUD dan PPKD.

a. Fungsi Akuntansi - SKPKD

Dalam sistem akuntansi kewajiban, fungsi akuntansi pada SKPKD dengan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
- 3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, BUD melakukan fungsi mengadministrasi penerimaan utang, pembayaraan utang dan reklasifikasi utang, sehingga BUD memiliki tugas:

- 1) menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan reklasifikasi utang;
- 2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.

c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)

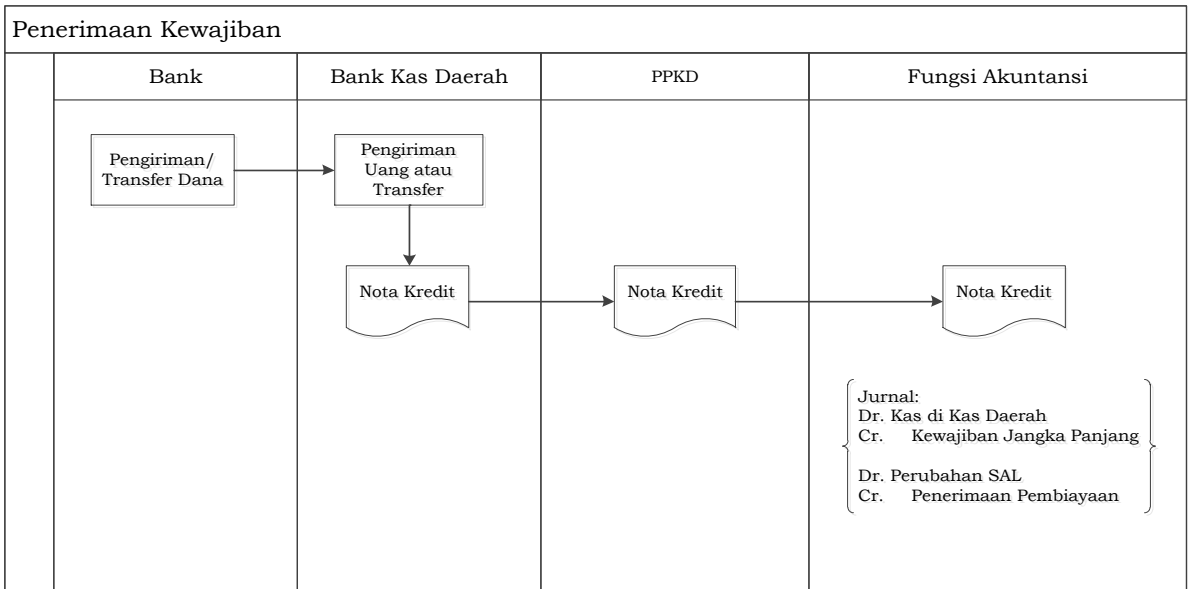
Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.

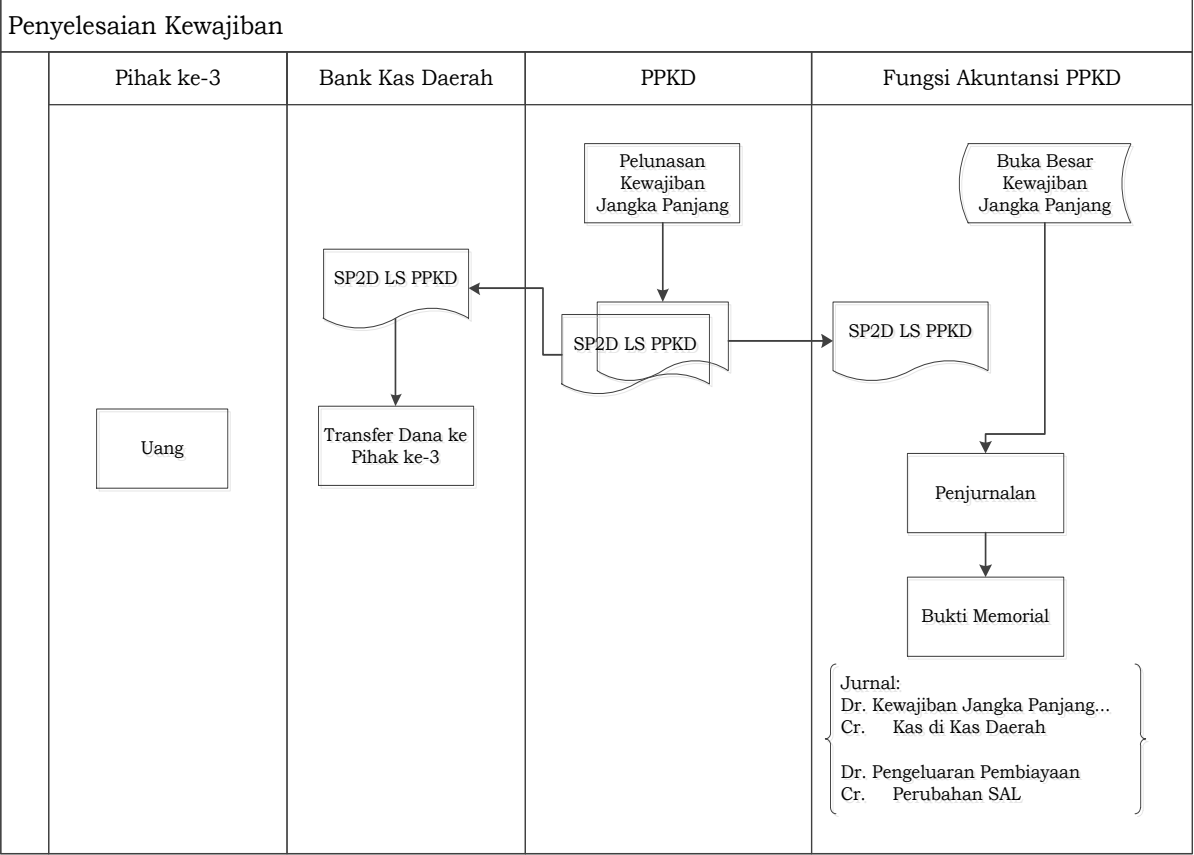
2. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban SKPKD antara lain:

- a. Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. Surat Perjanjian Utang;
- c. Nota Kredit;
- d. SP2D LS.

3. Flowchart dan Jurnal Standar





No	Transaksi	PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit
1	Saat penerimaan pembiayaan	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Kewajiban Jangka Panjang		xxx
		Perubahan SAL	xxx	
		Penerimaan Pembiayaan		xxx
2	Saat Pembayaran Bunga Kewajiban	Beban Bunga	xxx	
		Kas di Kas Daerah		xxx
		Bunga Utang	xxx	
		Perubahan SAL		xxx
3	Saat Pelunasan Kewajiban	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	
		Kas di Kas Daerah		xxx
		Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
		Perubahan SAL		xxx
4	Saat reklasifikasi	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	
		Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang		xxx

BAB XV

SISTEM AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

A. UMUM

1. Definisi

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

2. Klasifikasi

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Sistem akuntansi koreksi kesalahan yang diatur dalam modul ini adalah sistem akuntansi koreksi kesalahan yang terjadi di SKPD dan sistem akuntansi koreksi kesalahan yang terjadi di PPKD. Penyebab terjadinya

kesalahan antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Dari sifat kejadiannya, koreksi kesalahan dapat terjadi berulang dan tidak berulang.

Berikut disajikan tabel atas koreksi kesalahan :

Sifat	Kelompok	Jenis	Batasan
KesalahanTidak Berulang	Terjadi padaperiode berjalan		
	Terjadi padaperiode sebelumnya	Laporan Keuangan Belum diterbitkan	
		Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan	Sudah ditetapkan dalam Perda (PSAP Nomor 10 Paragraf 29)
Kesalahan berulang			

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan di SKPD terdiri atas :

- 1. PPK-SKPD
- 2. PA/KPA.

sedangkan pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan di SKPKD terdiri atas :

- 1. Fungsi Akuntansi SKPKD dan
- 2. PPKD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan antara lain :

- 1. Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 2. Bukti Memorial/Dokumen lain yang dipersamakan;

D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI

1. Kesalahan Tidak Berulang

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

Ilustrasi :

Pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

Jurnal Semula:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	XXX	
		8.3.1.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	0.0.0.00.00	Perubahan SAL	XXX	
		4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah -LRA		XXX

Jurnal Koreksi :

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	8.3.1.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	XXX	
		1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah -LRA	XXX	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		XXX

b. Kesalahan Tidak Berulang yang Terjadi Pada Periode Sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Ilustrasi :

Terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji.

Jurnal semula :

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	9.1.1.XX.XX	Beban Pegawai - LO	XXX	
		3.1.3.01.01	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	5.1.1.XX.XX	Belanja Pegawai - LRA	XXX	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		XXX

Jurnal Koreksi:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	XXX	
		8.3.3.01.02	Pendapatan Lainnya - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	0.0.0.00.00	Perubahan SAL	XXX	
		4.3.3.01.02	Pendapatan Lainnya - LRA		XXX

2) Koreksi - Laporan Keuangan sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Ilustrasi :

Terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji.

Jurnal semula:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	9.1.1.01.01	Beban Gaji Pokok PNS - LO	XXX	
		1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	5.1.1.0101	Belanja Gaji Pokok PNS- LRA	XXX	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		XXX

Jurnal Koreksi:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	XXX	
		3.1.1.01.01	Ekuitas		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	0.0.0.00.00	Perubahan SAL	XXX	
		0.2.1.00.00	Surplus/Defisit LRA		XXX

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Ilustrasi :

Pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat

Jurnal semula :

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	XXX	
		8.2.1.03.01	Dana Alokasi Umum - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	0.0.0.00.00	Perubahan SAL	XXX	
		4.2.1.03.01	Dana Alokasi Umum - LRA		XXX

Jurnal Koreksi

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	3.1.1.01.01	Ekuitas	XXX	
		1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah...		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	0.2.1.00.00	Surplus / Defisit LRA	XXX	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		XXX

Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

BAB XVI
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

A. UMUM

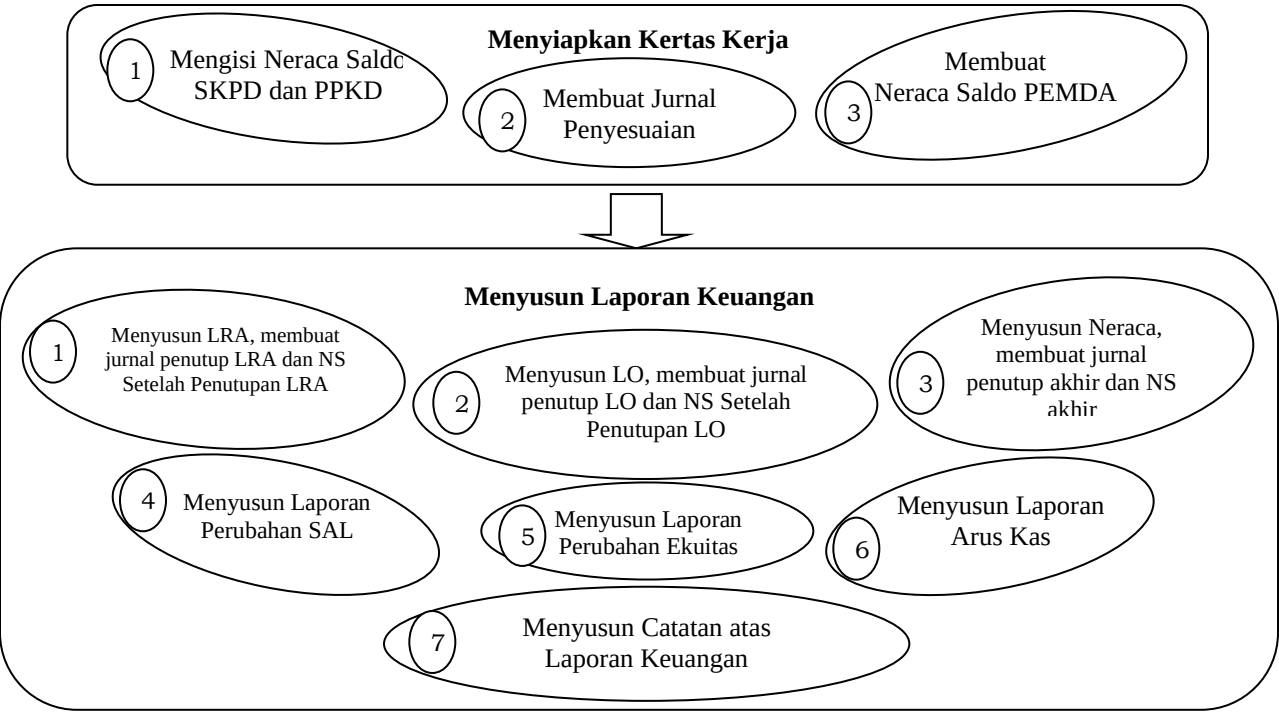
Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada pemerintah daerah. Neraca saldo dari semua entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Terdapat 7 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Bagan berikut ini menunjukkan proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:



B. PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi Akuntansi PPKD
- 2) PPKD

C. SISTEM DAN PROSEDUR

a. Menyiapkan Kertas Kerja Konsolidasi

Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) dengan lajur sesuai banyaknya SKPD dan PPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo Gabungan SKPD dan PPKD. Kertas kerja ini adalah alat bantu yang digunakan untuk menyiapkan kolom neraca saldo pemerintah daerah dalam kertas kerja penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.

Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo PPKD yang dimasukkan kedalam kertas kerja konsolidasi adalah Neraca Saldo yang sudah disesuaikan. Setelah memasukkan semua neraca saldo kedalam kertas kerja konsolidasi, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK PPKD dan RK SKPD. Berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo PPKD serta Jurnal Eliminasi, Fungsi Akuntansi PPKD mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah. Untuk eliminasi kedua akun tersebut, fungsi akuntansi PPKD mencatat “RK-PPKD” di debet dan “RK-SKPD” di kredit dengan jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK- PPKD	XXX	
		XXX	RK-SKPD		XXX

Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Informasi minimal yang harus ada pada format kertas kerja sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Neraca Saldo SKPD A		Neraca Saldo SKPD B		Neraca Saldo SKPD dst		Neraca Saldo PPKD		Jurnal Eliminasi		Neraca Saldo Pemda	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K

b. Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi

- 1) Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

Berdasarkan Neraca Saldo Pemerintah Daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian disajikan dalam “Laporan Realisasi Anggaran”.

Nilai kolom debit dan kredit pada kolom “Laporan Realisasi Anggaran” dijumlahkan. Selisih antara kedua nilai ini merupakan nilai “SILPA tahun berjalan”. Nilai ini ditempatkan di bawah kolom yang nilainya lebih kecil, sehingga akan diperoleh nilai yang seimbang antara kolom debit dan kredit.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, PPKD juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0. Berikut contoh jurnal penutup LRA:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan-LRA	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan –LRA	XXX	
		XXX	Apropriasi Belanja	XXX	
		XXX	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX
		XXX	Belanja		XXX
		XXX	Pengeluaran Pembiayaan –LRA		XXX
		XXX	Estimasi Pendapatan		XXX
		XXX	Estimasi Penerimaan Pembiayaan		XXX

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0					
(Dalam Rupiah)					
NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Pendapatan Transfer Antar Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
16					
17	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
18	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perturan Perundang-Undangan	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
22					
23	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
24	BELANJA				
25					
26					
27		xxx	xxx	xxx	xxx
28		xxx	xxx	xxx	xxx
29		xxx	xxx	xxx	xxx
30		xxx	xxx	xxx	xxx
31		xxx	xxx	xxx	xxx
32		xxx	xxx	xxx	xxx
33		xxx	xxx	xxx	xxx
34					
35					
40		xxx	xxx	xxx	xxx
41		xxx	xxx	xxx	xxx
42		xxx	xxx	xxx	xxx
43		xxx	xxx	xxx	xxx
44		xxx	xxx	xxx	xxx
45		xxx	xxx	xxx	xxx
46		xxx	xxx	xxx	xxx
47					
48					
49		xxx	xxx	xxx	xxx
50		xxx	xxx	xxx	xxx
51		xxx	xxx	xxx	xxx
52					
53	BELANJA TRANSFER				
54		xxx	xxx	xxx	xxx
55		xxx	xxx	xxx	xxx
56		xxx	xxx	xxx	xxx
72					
73	SURPLUS/DEFISIT	xxx	xxx	xxx	xxx
74					
75	PEMBIAYAAN				
76					
77					
78		xxx	xxx	xxx	xxx
79		xxx	xxx	xxx	xxx
80		xxx	xxx	xxx	xxx
81		xxx	xxx	xxx	xxx
82		xxx	xxx	xxx	xxx
83		xxx	xxx	xxx	xxx
90		xxx	xxx	xxx	xxx
91	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
92					
93		xxx	xxx	xxx	xxx
94		xxx	xxx	xxx	xxx
95		xxx	xxx	xxx	xxx
96		xxx	xxx	xxx	xxx
97		xxx	xxx	xxx	xxx
104	Jumlah Pengeluaran	xxx	xxx	xxx	xxx
105	PEMBIAYAAN NETO	xxx	xxx	xxx	xxx
106					
107	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Xxx	xxx	xxx	xxx

2) Menyusun LO, membuat jurnal penutup LO dan Neraca Saldo setelah Penutupan LO.

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional untuk kemudian membuat Laporan Operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, PPKD juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0. Berikut ini contoh jurnal penutup LO.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan-LO	XXX	
		XXX	Surplus/Defisit-LO		XXX
		XXX	Beban		XXX

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO.

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Operasional:

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR					
LAPORAN OPERASIONAL					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0					
(Dalam rupiah)					
No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4	Pajak Daerah-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
5	Retribusi Daerah-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7	Lain-lain PAD yang Sah-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Jumlah Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
14	Pendapatan Hibah-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Dana Darurat-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
18					
19	JUMLAH				
20	PENDAPATAN	XXX	XXX	XXX	XXX
21	BEBAN				
22	BEBAN OPERASI-LO				
23	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Beban Barang Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
28	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
29	Jumlah Beban Operasi	xxx	xxx	xxx	xxx
30	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
31	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XXX	XXX
32	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XXX	XXX
33	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	XXX	XXX	XXX	XXX
34	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
35	Beban Penyusutan Aset Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
36	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	XXX	XXX	XXX	XXX
37	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXX	XXX	XXX	XXX
38					
39					

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dalam rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
40					
41	BEBAN TRANSFER				
42	Beban Bagi Hasil	XXX	XXX	XXX	XXX
43	Beban Bantuan Keuangan	XXX	XXX	XXX	XXX
44	Jumlah Beban Transfer	XXX	XXX	XXX	XXX
45					
46	BEBAN TAK TERDUGA				
47	Beban Tak Terduga	XXX	XXX	XXX	XXX
48	Jumlah Beban Tak Terduga	XXX	XXX	XXX	XXX
49	JUMLAH BEBAN	XXX	XXX	XXX	XXX
50					
51	SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
52					
53	SURPLUS NON OPERASIONAL				
	Surplus				
53	Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	XXX	XXX	XXX	XXX
54	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX	XXX	XXX
55	Jumlah Surplus Non Operasional	XXX	XXX	XXX	XXX
56					
57	DEFISIT NON OPERASIONAL				
58	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	XXX	XXX	XXX	XXX
59	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX	XXX	XXX
60	Jumlah Defisit Non Operasional	XXX	XXX	XXX	XXX
61	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	XXX	XXX	XXX	XXX
62					
63	SURPLUS/ DEFISIT – LO	XXX	XXX	XXX	XXX

3) Menyusun Neraca, membuat jurnal penutup akhir, dan Neraca Saldo Akhir

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi Akuntansi PPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus/Defisit–LO ke akun Ekuitas. Berikut ini contoh jurnal penutup akhir:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Surplus/Defisit-LO	XXX	
		XXX	Ekuitas		XXX

Setelah membuat jurnal penutup akhir, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya.

Berikut ini merupakan contoh format Neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar:

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Retribusi	xxx	xxx
10	Piutang Hasil Pengellaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	xxx	xxx
11	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	xxx	xxx
12	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	xxx	xxx
13	Piutang Transfer Antar Daerah	xxx	xxx
14	Piutang Lainnya	xxx	xxx
15	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
16	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
17	Persediaan	xxx	xxx
18	Aset Untuk Dikonsolidasikan	xxx	xxx
19	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx
20			
21	INVESTASI JANGKA PANJANG		
22	Investasi Nonpermanen		
23	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
24	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
25	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
26	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
27	Jumlah Investasi Nonpermanen	xxx	xxx
28	Investasi Permanen		
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
30	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
31	Jumlah Investasi Permanen	xxx	xxx
32	Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
33			
34	ASET TETAP		
35	Tanah	xxx	xxx
36	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
37	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
38	Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
39	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
40	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
41	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
42	Jumlah Aset Tetap	xxx	xxx
43			
44	ASET LAINNYA		
45	Tagihan Jangka Panjang	xxx	xxx
46	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
47	Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
48	Aset Lain-lain	xxx	xxx
49	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berujud	xxx	xxx
50	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	xxx	xxx
51	Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx
52			
53	JUMLAH ASET	xxx	xxx
54			
55	KEWAJIBAN		
56			
57	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
58	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
59	Utang Bunga	xxx	xxx
60	Utang Pinjaman Jangka Pendek	xxx	xxx
61	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
62	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
63	Utang Belanja	xxx	xxx
64	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
65	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx	xxx

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
66	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Kepada Pemerintah Pusat Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Utang Kepada Masyarakat		
67			
68		xxx	xxx
69		xxx	xxx
70		xxx	xxx
71		xxx	xxx
72	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx
73	JUMLAH KEWAJIBAN	xxx	xxx
74	EKUITAS Ekuitas Ekuitas SAL Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan		
75			
76		xxx	xxx
77		xxx	xxx
78		xxx	xxx
79	Jumlah Ekuitas	xxx	xxx
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	xxx	xxx
81			

4) Menyusun Laporan Perubahan SAL

Dari Laporan Realisasi Anggaran yang telah dibuat sebelumnya, Fungsi Akuntansi PPKD dapat menyusun Laporan Perubahan SAL. Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX	XXX
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(XXX)	(XXX)
3	Subtotal (1 + 2)	XXX	XXX
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	XXX	XXX
5	Subtotal (3 + 4)	XXX	XXX
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	XXX	XXX
7	Lain-lain	XXX	XXX
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	XXX	XXX

- 5) Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas
- Selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD membuat Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD.

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah:

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0			
(Dalam Rupiah)			
No.	Uraian	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX

- 6) Membuat Laporan Arus Kas
- Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Inti unsur dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas dan juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Semua transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris. Berikut ini merupakan contoh format Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR			
LAPORAN ARUS KAS			
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0			
Metode Langsung			
(Dalam Rupiah)			
No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Lain-lain PAD yang Sah	XXX	XXX
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	XXX	XXX
8	Pendapatan Transfer Antar Daerah	XXX	XXX

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
9	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
10	Dana Darurat	XXX	XXX
11	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perturan Perundang-Undangan	XXX	XXX
12	Jumlah Arus Masuk Kas	XXX	XXX
13			
14	Arus Keluar Kas	XXX	XXX
15	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
16	Pembayaran Barang	XXX	XXX
17	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
18	Pembayaran Subsidi	XXX	XXX
19	Pembayaran Tidak Terduga	XXX	XXX
20	Pembayaran Bagi Hasil	XXX	XXX
21	Pembayaran Bantuan Keuangan	XXX	XXX
22	Jumlah Arus Keluar Kas	XXX	XXX
23	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	XXX	XXX
24			
25	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
26	Arus Masuk Kas		
27	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
28	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
29	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
30	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
31	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
32	Penjualan Aset Tetap	XXX	XXX
33	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
34	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
35	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	XXX	XXX
36	Jumlah Arus Masuk Kas	XXX	XXX
37	Arus Keluar Kas		
38	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
39	Perolehan Tanah	XXX	XXX
40	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
41	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
42	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
43	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
44	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
45	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
46	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	XXX	XXX
47	Jumlah Arus Keluar Kas	XXX	XXX
48	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	XXX	XXX
49	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
50	Arus Masuk Kas		
51	Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	XXX	XXX
52	Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
53	Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
54	Pinjaman Kepada Masyarakat	XXX	XXX
55	Jumlah Arus Masuk Kas	XXX	XXX
56	Arus Keluar Kas		
57	Pembayaran Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	XXX	XXX
58	Pembayaran Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
59	Pembayaran Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
60	Pembayaran Pinjaman Kepada Masyarakat	XXX	XXX
61	Jumlah Arus Keluar Kas	XXX	XXX
62	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	XXX	XXX
63			
64	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
65	Arus Masuk Kas		
66	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	XXX	XXX
67	Jumlah Arus Masuk Kas	XXX	XXX
68	Arus Keluar Kas		
69	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
70	Jumlah Arus Keluar Kas	XXX	XXX
71	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris	XXX	XXX

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
72	Kenaikan/Penurunan Kas	XXX	XXX
73	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
74	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
75	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
76	Saldo Akhir Kas	XXX	XXX

7) Membuat Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- ✓ Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- ✓ Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
- ✓ Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- ✓ Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- ✓ Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- ✓ Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- ✓ Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar:

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN	
Bab I	Pendahuluan
1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah

Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
2.1	Ekonomi makro
2.2	Kebijakan keuangan
2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi
4.1	Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
5.1.1	Pendapatan – LRA
5.1.2	Belanja
5.1.3	Transfer
5.1.4	Pembiayaan
5.1.5	Pendapatan – LO
5.1.6	Beban
5.1.7	Aset
5.1.8	Kewajiban
5.1.9	Ekuitas Dana
5.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
Bab VII	Penutup

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

BAGAN AKUN STANDAR

A. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
X					
X	XX				
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
X	XX	1	201		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	1	201	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
X	XX	1	201	2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
X	XX	1	201	3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
X	XX	1	201	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
X	XX	1	201	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	1	202		Administrasi Keuangan
X	XX	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
X	XX	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
X	XX	1	202	3	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
X	XX	1	202	4	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
X	XX	1	202	5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
X	XX	1	202	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X	XX	1	202	7	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
X	XX	1	202	8	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
X	XX	1	202	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
X	XX	1	203		Administrasi Umum
X	XX	1	203	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
X	XX	1	203	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
X	XX	1	203	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	XX	1	203	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns
X	XX	1	203	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
X	XX	1	203	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	1	203	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
X	XX	1	203	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
X	XX	1	203	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
X	XX	1	203	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
X	XX	1	203	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
X	XX	1	203	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
X	XX	1	203	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	XX	1	203	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
X	XX	1	203	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
X	XX	1	203	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
X	XX	1	203	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
X	XX	1	203	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
X	XX	1	203	19	Pengadaan Mobil Jabatan
X	XX	1	203	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	1	203	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	1	203	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
X	XX	1	203	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	1	203	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
X	XX	1	203	25	Pengadaan Mebeleur
X	XX	1	203	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
X	XX	1	203	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
X	XX	1	203	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
X	XX	1	203	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
X	XX	1	203	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	1	203	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	1	203	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
X	XX	1	203	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	1	203	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
X	XX	1	203	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
X	XX	1	203	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
X	XX	1	203	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
X	XX	1	203	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
X	XX	1	203	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
X	XX	1	203	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	1	204		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
X	XX	1	204	1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
X	XX	1	204	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
X	XX	1	204	3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
X	XX	1	204	4	Pengadaan Pakaian Korpri
X	XX	1	204	5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
X	XX	1	204	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
X	XX	1	204	7	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
X	XX	1	204	8	Pemindahan Tugas PNS
X	XX	1	204	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal
X	XX	1	204	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
X	XX	1	204	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1	1	2	201		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1	1	2	201	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
1	1	2	201	2	Penambahan Ruang Kelas Baru
1	1	2	201	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	1	2	201	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	1	2	201	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1	1	2	201	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	1	2	201	7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1	1	2	201	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
1	1	2	201	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	1	2	201	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	1	2	201	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
1	1	2	201	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	1	2	201	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1	1	2	201	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah
1	1	2	201	15	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1	1	2	201	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1	1	2	201	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa
1	1	2	201	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
1	1	2	201	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	1	2	201	20	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1	1	2	201	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
1	1	2	201	22	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1	1	2	201	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1	1	2	201	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
1	1	2	201	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
1	1	2	201	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
1	1	2	201	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
1	1	2	201	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
1	1	2	202		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1	1	2	202	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
1	1	2	202	2	Penambahan Ruang Kelas Baru
1	1	2	202	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	1	2	202	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	1	2	202	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1	1	2	202	6	Pembangunan Laboratorium
1	1	2	202	7	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1	1	2	202	8	Pembangunan Asrama Sekolah
1	1	2	202	9	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1	1	2	202	10	Pembangunan Fasilitas Parkir
1	1	2	202	11	Pembangunan Kantin Sekolah
1	1	2	202	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	1	2	202	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
1	1	2	202	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1	1	2	202	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
1	1	2	202	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	1	2	202	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
1	1	2	202	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
1	1	2	202	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
1	1	2	202	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sedang/Berat Asrama
1	1	2	202	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1	1	2	202	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
1	1	2	202	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
1	1	2	202	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	1	2	202	25	Pengadaan Mebeluer Sekolah
1	1	2	202	26	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1	1	2	202	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1	1	2	202	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa
1	1	2	202	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
1	1	2	202	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	1	2	202	31	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	1	2	202	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
1	1	2	202	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
1	1	2	202	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik
1	1	2	202	35	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1	1	2	202	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1	1	2	202	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1	1	2	202	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1	1	2	202	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1	1	2	202	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1	1	2	202	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
1	1	2	203		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1	1	2	203	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
1	1	2	203	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1	1	2	203	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
1	1	2	203	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1	1	2	203	5	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
1	1	2	203	6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
1	1	2	203	7	Pengadaan Mebeluer PAUD
1	1	2	203	8	Pengadaaan Alat Rumah Tangga PAUD
1	1	2	203	9	Pengadaan Perlengkapan PAUD
1	1	2	203	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
1	1	2	203	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
1	1	2	203	12	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
1	1	2	203	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
1	1	2	203	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
1	1	2	203	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
1	1	2	203	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
1	1	2	203	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
1	1	2	204		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	1	2	204	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
1	1	2	204	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
1	1	2	204	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	1	2	204	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
1	1	2	204	5	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	1	2	204	6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
1	1	2	204	7	Pengadaan Mebeluer Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	1	2	204	8	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	1	2	204	9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	1	2	204	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
1	1	2	204	11	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
1	1	2	204	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
1	1	2	204	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	1	2	204	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	1	2	204	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	1	2	204	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
1	1	3	201		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
1	1	3	201	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar
1	1	3	201	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
1	1	3	201	3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
1	1	3	201	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
1	1	3	202		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
1	1	3	202	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
1	1	3	202	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
1	1	3	202	3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1	1	4	201		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	1	4	201	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	1	4	201	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
1	1	5	201		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	1	5	201	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
1	1	5	201	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	1	5	202		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	1	5	202	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	1	5	202	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	1	5	202	3	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	1	6			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
1	1	6	201		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	1	6	201	1	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota
1	1	6	201	2	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota
1	1	6	201	3	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota
1	1	6	201	4	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota
1	1	6	201	5	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota
1	1	6	201	6	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
1	1	6	201	7	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	2	2	201		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
1	2	2	201	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
1	2	2	201	2	Pembangunan Puskesmas
1	2	2	201	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	2	2	201	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
1	2	2	201	5	Pengembangan Rumah Sakit
1	2	2	201	6	Pengembangan Puskesmas
1	2	2	201	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	2	2	201	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
1	2	2	201	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
1	2	2	201	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	2	2	201	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
1	2	2	201	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	2	2	201	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	2	2	201	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	2	2	201	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
1	2	2	201	16	Pengadaan Obat, Vaksin
1	2	2	201	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai
1	2	2	201	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	2	2	201	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	2	2	201	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	2	2	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	2	2	202	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1	2	2	202	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
1	2	2	202	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
1	2	2	202	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
1	2	2	202	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1	2	2	202	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
1	2	2	202	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
1	2	2	202	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
1	2	2	202	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
1	2	2	202	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
1	2	2	202	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
1	2	2	202	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
1	2	2	202	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1	2	2	202	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
1	2	2	202	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1	2	2	202	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1	2	2	202	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1	2	2	202	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
1	2	2	202	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
1	2	2	202	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
1	2	2	202	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
1	2	2	202	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
1	2	2	202	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
1	2	2	202	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
1	2	2	202	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1	2	2	202	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
1	2	2	202	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
1	2	2	202	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
1	2	2	202	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
1	2	2	202	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	2	2	202	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan
1	2	2	202	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
1	2	2	202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas
1	2	2	202	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	2	2	202	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
1	2	2	202	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
1	2	2	202	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
1	2	2	203		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
1	2	2	203	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
1	2	2	203	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
1	2	2	203	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
1	2	2	204		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota
1	2	2	204	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D
1	2	2	204	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	2	2	204	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
1	2	2	204	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1	2	3	201		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota
1	2	3	201	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
1	2	3	202		Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
1	2	3	202	1	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	2	3	202	2	Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan
1	2	3	202	3	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	2	3	203		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota
1	2	3	203	1	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	2	3	203	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
1	2	3	204		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
1	2	3	204	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	2	3	204	2	Sertifikasi Tenaga Kesehatan
1	2	3	205		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	2	3	205	1	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	2	3	205	2	Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1	2	4	201		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1	2	4	201	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1	2	4	201	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1	2	4	201	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1	2	4	202		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga
1	2	4	202	1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
1	2	4	202	2	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
1	2	4	203		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1	2	4	203	1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1	2	4	204		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
1	2	4	204	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)
1	2	4	205		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
1	2	4	205	1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
1	2	4	206		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
1	2	4	206	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
1	2	4	206	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1	2	5	201		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
1	2	5	201	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
1	2	5	202		Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
1	2	5	202	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1	2	5	203		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	2	5	203	1	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
1	3	2	201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1	3	2	201	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1	3	2	201	2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
					Tanah dan Air Baku
1	3	2	201	3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
1	3	2	201	4	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
1	3	2	201	5	Pembangunan Bendungan
1	3	2	201	6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
1	3	2	201	7	Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku
1	3	2	201	8	Pembangunan Unit Air Baku
1	3	2	201	9	Pembangunan Tanggul Sungai
1	3	2	201	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
1	3	2	201	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1	3	2	201	12	Pembangunan Kanal Banjir
1	3	2	201	13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
1	3	2	201	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
1	3	2	201	15	Pembangunan Bangunan Sabo
1	3	2	201	16	Pembangunan Check Dam
1	3	2	201	17	Pembangunan Breakwater
1	3	2	201	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	3	2	201	19	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)
1	3	2	201	20	Rehabilitasi Bendungan
1	3	2	201	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
1	3	2	201	22	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
1	3	2	201	23	Rehabilitasi Unit Air Baku
1	3	2	201	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai
1	3	2	201	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
1	3	2	201	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1	3	2	201	27	Rehabilitasi Kanal Banjir
1	3	2	201	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
1	3	2	201	29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
1	3	2	201	30	Rehabilitasi Bangunan Sabo
1	3	2	201	31	Rehabilitasi Check Dam
1	3	2	201	32	Rehabilitasi Breakwater
1	3	2	201	33	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	3	2	201	34	Peningkatan Tanggul Sungai
1	3	2	201	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1	3	2	201	36	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1	3	2	201	37	Peningkatan Kanal Banjir
1	3	2	201	38	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir
1	3	2	201	39	Peningkatan Polder/Kolam Retensi
1	3	2	201	40	Peningkatan Bangunan Sabo
1	3	2	201	41	Peningkatan Check Dam
1	3	2	201	42	Peningkatan Breakwater
1	3	2	201	43	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	3	2	201	44	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)
1	3	2	201	45	Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau
1	3	2	201	46	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai
1	3	2	201	47	Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air
1	3	2	201	48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan
1	3	2	201	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
1	3	2	201	50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
1	3	2	201	51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
1	3	2	201	52	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku
1	3	2	201	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
1	3	2	201	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
1	3	2	201	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
1	3	2	201	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
1	3	2	201	57	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo
1	3	2	201	58	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam
1	3	2	201	59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	3	2	201	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota
1	3	2	201	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
1	3	2	201	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
1	3	2	201	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
1	3	2	202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1	3	2	202	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1	3	2	202	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
1	3	2	202	3	Pembangunan Bendung Irigasi
1	3	2	202	4	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
1	3	2	202	5	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
1	3	2	202	6	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	3	2	202	7	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
1	3	2	202	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
1	3	2	202	9	Peningkatan Bendung Irigasi
1	3	2	202	10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
1	3	2	202	11	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak
1	3	2	202	12	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	3	2	202	13	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
1	3	2	202	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
1	3	2	202	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi
1	3	2	202	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
1	3	2	202	17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
1	3	2	202	18	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	3	2	202	19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
1	3	2	202	20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa
1	3	2	202	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
1	3	2	202	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
1	3	2	202	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
1	3	2	202	24	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
1	3	2	202	25	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	3	2	202	26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
1	3	2	202	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi
1	3	2	202	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
1	3	2	202	29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1	3	3	201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
1	3	3	201	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
1	3	3	201	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
1	3	3	201	3	Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan
1	3	3	201	4	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan
1	3	3	201	5	Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan
1	3	3	201	6	Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan
1	3	3	201	7	Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan
1	3	3	201	8	Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
1	3	3	201	9	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum
1	3	3	201	10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri
1	3	3	201	11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
1	3	3	201	12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM
1	3	3	201	13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM
1	3	3	201	14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
1	3	3	201	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
1	3	3	201	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
1	3	4	201		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1	3	4	201	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
1	3	4	201	2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
1	3	4	201	3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1	3	4	201	4	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1	3	4	201	5	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1	3	4	201	6	Penyediaan Sarana Persampahan
1	3	4	201	7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan
1	3	4	201	8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1	3	5	201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	3	5	201	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	3	5	201	2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	3	5	201	3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	3	5	201	4	Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	3	5	201	5	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	3	5	201	6	Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	3	5	201	7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	3	5	201	8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	3	5	201	9	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	3	5	201	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1	3	6	201		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	3	6	201	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
1	3	6	201	2	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
1	3	6	201	3	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
1	3	6	201	4	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
1	3	6	201	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
1	3	6	201	6	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan
1	3	6	201	7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan
1	3	6	201	8	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
1	3	6	201	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
1	3	7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
1	3	7	201		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota
1	3	7	201	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
1	3	7	201	2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
1	3	7	201	3	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
1	3	7	201	4	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
1	3	8	201		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1	3	8	201	1	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
1	3	8	201	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
1	3	8	201	3	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
1	3	8	201	4	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
1	3	8	201	5	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota
1	3	8	201	6	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota
1	3	8	201	7	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan tingkat Kabupaten/Kota
1	3	8	201	8	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif Kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota
1	3	8	201	9	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan
1	3	8	201	10	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
1	3	8	201	11	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
1	3	9	201		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1	3	9	201	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
1	3	9	201	2	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
1	3	9	201	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan
1	3	9	201	4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
1	3	9	201	5	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan
1	3	9	201	6	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1	3	10	201		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1	3	10	201	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan
1	3	10	201	2	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan
1	3	10	201	3	Pengelolaan Leger Jalan
1	3	10	201	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
1	3	10	201	5	Pembangunan Jalan
1	3	10	201	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar
1	3	10	201	7	Pelebaran Jalan Menambah Lajur
1	3	10	201	8	Rekonstruksi Jalan
1	3	10	201	9	Rehabilitasi Jalan
1	3	10	201	10	Pemeliharaan Berkala Jalan
1	3	10	201	11	Pemeliharaan Rutin Jalan
1	3	10	201	12	Pembangunan Jembatan
1	3	10	201	13	Pembangunan Flyover
1	3	10	201	14	Pembangunan Underpass
1	3	10	201	15	Pembangunan Terowongan/Tunnel
1	3	10	201	16	Penggantian Jembatan
1	3	10	201	17	Pelebaran Jembatan
1	3	10	201	18	Rehabilitasi Jembatan
1	3	10	201	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan
1	3	10	201	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan
1	3	10	201	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1	3	11	201		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1	3	11	201	1	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) pelatihan tenaga terampil konstruksi
1	3	11	201	2	Penyiapan Intsruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan
1	3	11	201	3	Penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi
1	3	11	201	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1	3	11	201	5	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
1	3	11	201	6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
1	3	11	201	7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
1	3	11	201	8	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1	3	11	202		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1	3	11	202	1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
1	3	11	202	2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
1	3	11	202	3	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
1	3	11	202	4	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU
1	3	11	202	5	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur
1	3	11	202	6	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
1	3	11	202	7	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
1	3	11	202	8	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi
1	3	11	202	9	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
1	3	11	202	10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi
1	3	11	202	11	Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi
1	3	11	203		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
1	3	11	203	1	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota
1	3	11	203	2	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
1	3	11	203	3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi
1	3	11	203	4	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait Iujk Nasional
1	3	11	203	5	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan
1	3	11	204		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1	3	11	204	1	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1	3	11	204	2	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1	3	11	204	3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1	3	12	201		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
1	3	12	201	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
1	3	12	201	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
1	3	12	201	3	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
1	3	12	201	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang
1	3	12	202		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1	3	12	202	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
1	3	12	202	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
1	3	12	202	3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
1	3	12	203		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1	3	12	203	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
1	3	12	203	2	Sistem Informasi Penataan Ruang
1	3	12	204		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1	3	12	204	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
1	3	12	204	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang
1	3	12	204	3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang
1	3	12	204	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1	4	2	201		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	4	2	201	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	4	2	201	2	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
1	4	2	201	3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
1	4	2	201	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
1	4	2	201	5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	4	2	201	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
1	4	2	202		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	4	2	202	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
1	4	2	202	2	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan
1	4	2	202	3	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP
1	4	2	202	4	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
1	4	2	202	5	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana
1	4	2	202	6	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan
1	4	2	203		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	4	2	203	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
1	4	2	203	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	4	2	203	3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1	4	2	203	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1	4	2	203	5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	4	2	203	6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	4	2	204		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	4	2	204	1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	4	2	204	2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	4	2	205		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
1	4	2	205	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
1	4	2	205	2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
1	4	2	206		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
1	4	2	206	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik
1	4	2	206	2	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana
1	4	2	206	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
1	4	2	206	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum
1	4	2	207		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
1	4	2	207	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH
1	4	3	201		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
1	4	3	201	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
1	4	3	201	2	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
1	4	3	201	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
1	4	3	202		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1	4	3	202	1	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh
1	4	3	202	2	Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
1	4	3	202	3	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
1	4	3	202	4	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh
1	4	3	202	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh
1	4	3	202	6	Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
1	4	3	202	7	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
1	4	3	203		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1	4	3	203	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
1	4	3	203	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
1	4	3	203	3	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
1	4	3	203	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh
1	4	3	203	5	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh
1	4	4			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1	4	4	201		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1	4	4	201	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
1	4	4	201	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
1	4	4	201	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	5	201		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
1	4	5	201	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	5	2	201		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1	5	2	201	1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1	5	2	201	2	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
1	5	2	201	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
1	5	2	201	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
1	5	2	201	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
1	5	2	201	6	Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamongpraja
1	5	2	201	7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1	5	2	201	8	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
1	5	2	202		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
1	5	2	202	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
1	5	2	202	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
1	5	2	202	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota
1	5	2	203		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
1	5	2	203	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1	5	3	201		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
1	5	3	201	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
1	5	3	201	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
1	5	3	202		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1	5	3	202	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
1	5	3	202	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
1	5	3	202	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
1	5	3	202	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
1	5	3	202	5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
1	5	3	202	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1	5	3	202	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
1	5	3	202	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
1	5	3	203		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1	5	3	203	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
1	5	3	203	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
1	5	3	203	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
1	5	3	203	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
1	5	3	204		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
1	5	3	204	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
1	5	3	204	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
1	5	3	204	3	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
1	5	4			PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
1	5	4	201		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	5	4	201	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	5	4	201	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	5	4	201	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
1	5	4	201	4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	5	4	202		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
1	5	4	202	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
1	5	4	202	2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
1	5	4	203		Investigasi Kejadian Kebakaran
1	5	4	203	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
1	5	4	204		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
1	5	4	204	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1	6	2	201		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
1	6	2	201	1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
1	6	2	201	2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
1	6	2	202		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	6	2	202	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
1	6	2	203		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
1	6	2	203	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	2	203	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
1	6	2	203	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	2	203	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	2	203	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
1	6	3			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
1	6	3	201		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
1	6	3	201	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1	6	4	201		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1	6	4	201	1	Penyediaan Permakanan
1	6	4	201	2	Penyediaan Sandang
1	6	4	201	3	Penyediaan Alat Bantu
1	6	4	201	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1	6	4	201	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
1	6	4	201	6	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
1	6	4	201	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
1	6	4	201	8	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	6	4	201	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
1	6	4	201	10	Pemberian Layanan Kedaruratan
1	6	4	201	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1	6	4	201	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1	6	4	201	13	Pemberian Layanan Rujukan
1	6	4	202		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
1	6	4	202	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
1	6	4	202	2	Pemberian Layanan Kedaruratan
1	6	4	202	3	Penyediaan Permakanan
1	6	4	202	4	Penyediaan Sandang
1	6	4	202	5	Penyediaan Alat Bantu
1	6	4	202	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti
1	6	4	202	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
1	6	4	202	8	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
1	6	4	202	9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
1	6	4	202	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	6	4	202	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1	6	4	202	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1	6	4	202	13	Pemberian Layanan Rujukan
1	6	4	202	14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1	6	5	201		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
1	6	5	201	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
1	6	5	201	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar
1	6	5	201	3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
1	6	5	202		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1	6	5	202	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1	6	5	202	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1	6	6	201		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
1	6	6	201	1	Penyediaan Makanan
1	6	6	201	2	Penyediaan Sandang
1	6	6	201	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
1	6	6	201	4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
1	6	6	201	5	Pelayanan Dukungan Psikososial
1	6	6	202		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
1	6	6	202	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
1	6	6	202	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1	6	7	201		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1	6	7	201	1	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1	6	7	201	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1	6	7	201	3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
2	7	2	201		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2	7	2	201	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
2	7	2	201	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2	7	3	201		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2	7	3	201	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
2	7	3	201	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
2	7	3	202		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
2	7	3	202	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
2	7	3	203		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
2	7	3	203	1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi
2	7	3	204		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
2	7	3	204	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
2	7	3	205		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	7	3	205	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2	7	4	201		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
2	7	4	201	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
2	7	4	201	2	Pelayanan antar Kerja
2	7	4	201	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
2	7	4	201	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
2	7	4	202		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	7	4	202	1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
2	7	4	202	2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
2	7	4	203		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2	7	4	203	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
2	7	4	203	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
2	7	4	203	3	Job Fair/Bursa Kerja
2	7	4	204		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
2	7	4	204	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
2	7	4	204	2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
2	7	4	204	3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
2	7	4	205		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	7	4	205	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2	7	5	201		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	7	5	201	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
2	7	5	201	2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
2	7	5	201	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2	7	5	202		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2	7	5	202	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	7	5	202	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	7	5	202	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi
2	7	5	202	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
2	7	6			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
					Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	2			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2	8	2	201		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	2	201	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
2	8	2	201	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	2	201	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2	8	2	201	4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG
2	8	2	202		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	2	202	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2	8	2	202	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2	8	2	203		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	2	203	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	2	203	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	2	203	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2	8	3	201		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	8	3	201	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	8	3	201	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	3	202		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	3	202	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	3	202	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	3	203		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
2	8	3	203	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	3	203	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	3	203	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	3	203	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2	8	4	201		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	8	4	201	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	4	201	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	4	201	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	4	202		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	8	4	202	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	8	4	202	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	8	4	202	3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	8	4	203		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	8	4	203	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
2	8	5	201		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
2	8	5	201	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	5	201	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2	8	6	201		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	6	201	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	6	201	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	6	202		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	6	202	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	6	202	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	8	6	202	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	8	6	202	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2	8	7	201		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	8	7	201	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	7	201	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
2	8	7	202		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	8	7	202	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	8	7	202	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	7	202	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	7	202	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2	8	7	203		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	8	7	203	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	8	7	203	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	8	7	203	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2	9	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
2	9	2	201		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	9	2	201	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
2	9	2	201	2	Penyediaan Infrastruktur Lantaijemur
2	9	2	201	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
2	9	2	201	4	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
2	9	2	201	5	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2	9	3	201		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2	9	3	201	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
2	9	3	201	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	9	3	201	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
2	9	3	201	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
2	9	3	201	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
2	9	3	201	6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
2	9	3	202		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2	9	3	202	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2	9	3	202	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
2	9	3	202	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
2	9	3	202	4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
2	9	3	203		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
2	9	3	203	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
2	9	3	204		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
2	9	3	204	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
2	9	3	204	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	9	3	204	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2	9	4	201		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2	9	4	201	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
2	9	4	202		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	9	4	202	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
2	9	4	202	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2	9	5	201		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
2	9	5	201	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
2	9	5	201	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2	9	5	201	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2	9	5	201	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2	9	5	201	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2	10	2			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI
2	10	2	201		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	10	2	201	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha
2	10	3			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
					Tidak Ada Kewenangan
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
2	10	4	201		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
2	10	4	201	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2	10	4	201	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2	10	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
2	10	5	201		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	10	5	201	1	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	10	5	201	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	10	6			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
2	10	6	201		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	10	6	201	1	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
2	10	6	201	2	Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah
2	10	6	201	3	Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota
2	10	6	201	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/kota
2	10	7			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
2	10	7	201		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	10	7	201	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	10	7	201	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	10	7	201	3	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
2	10	8			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
2	10	8	201		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
2	10	8	201	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	10	8	202		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
2	10	8	202	1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
2	10	8	202	2	Pemanfataan Tanah Kosong

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
2	10	9			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
2	10	9	201		Penerbitan Izin Membuka Tanah
2	10	9	201	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah
2	10	9	201	2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
2	10	10	201		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
2	10	10	201	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
2	10	10	201	2	Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
2	10	10	201	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2	201		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
2	11	2	201	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
2	11	2	201	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
2	11	2	202		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota
2	11	2	202	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
2	11	2	202	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2	11	2	202	3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	201		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2	11	3	201	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
2	11	3	201	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
2	11	3	202		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2	11	3	202	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
2	11	3	202	2	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	11	3	202	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	11	3	203		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2	11	3	203	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
2	11	3	203	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
2	11	3	203	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi
2	11	3	203	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
2	11	3	203	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2	11	4	201		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
2	11	4	201	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2	11	4	201	2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
2	11	4	201	3	Pengelolaan Kebun Raya
2	11	4	201	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2	11	4	201	5	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
2	11	4	201	6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2	11	4	201	7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
2	11	5	201		Penyimpanan Sementara Limbah B3
2	11	5	201	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	11	5	201	2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
2	11	5	202		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
2	11	5	202	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	11	5	202	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2	11	6	201		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	11	6	201	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
2	11	6	201	2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
2	11	6	201	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	11	6	201	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
2	11	7			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
2	11	7	201		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
2	11	7	201	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
2	11	7	202		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
2	11	7	202	1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2	11	8	201		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	11	8	201	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
2	11	8	201	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2	11	9	201		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	11	9	201	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	201		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2	11	10	201	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
2	11	10	201	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2	11	11	201		Pengelolaan Sampah
2	11	11	201	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
2	11	11	201	2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
2	11	11	201	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2	11	11	201	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
2	11	11	201	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
2	11	11	201	6	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
2	11	11	202		Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta
2	11	11	202	1	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	11	11	203		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
2	11	11	203	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
2	11	11	203	2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
2	11	11	203	3	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2	12	2	201		Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2	12	2	201	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
2	12	2	201	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
2	12	2	201	3	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
2	12	2	201	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2	12	2	201	5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
2	12	2	201	6	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
2	12	2	201	7	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL
2	12	3	201		Pelayanan Pencatatan Sipil
2	12	3	201	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
2	12	3	201	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2	12	4	201		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
2	12	4	201	1	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pendaftaran Penduduk
2	12	4	201	2	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil
2	12	4	201	3	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Perkembangan Penduduk
2	12	4	201	4	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
2	12	4	201	5	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
2	12	4	201	6	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
2	12	4	202		Penataan Administrasi Kependudukan
2	12	4	202	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota
2	12	4	202	2	Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan
2	12	4	203		Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan
2	12	4	203	1	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
2	12	4	203	2	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
2	12	4	203	3	Koordinasi Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan
2	12	4	203	4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting
2	12	4	203	5	Penerimaan Dan Permintaan Data Kependudukan Dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri
2	12	4	203	6	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
2	12	4	203	7	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
2	12	4	203	8	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
2	12	4	203	9	Kerja Sama Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Perguruan Tinggi
2	12	4	203	10	Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat
2	12	4	203	11	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan
2	12	4	204		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2	12	4	204	1	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2	12	4	204	2	Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadap Pelaksanaan Tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota, termasuk Meminta Laporan Pelaksanaan Tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang Berkaitan dengan Pelayanan Pencatatan Sipil
2	12	4	204	3	Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadap Penugasan kepada Desa atau

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
					yang Disebut dengan Nama Lain
2	12	4	204	4	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam Rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan
2	12	4	204	5	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
2	12	5	201		Penyusunan Profil Kependudukan
2	12	5	201	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
2	12	5	201	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	2			PROGRAM PENATAAN DESA
2	13	2	201		Penyelenggaraan Penataan Desa
2	13	2	201	1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
2	13	2	201	2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa
2	13	2	201	3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
2	13	2	201	4	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa
2	13	2	201	5	Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi antar Wilayah
2	13	2	201	6	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
2	13	2	201	7	Penyediaan dana Operasional, Penghasilan Tetap, dan Tunjangan Lainnya bagi Perangkat Pemerintahan Desa
2	13	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
2	13	3	201		Fasilitasi Kerja sama antar Desa
2	13	3	201	1	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa
2	13	3	201	2	Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
2	13	4	201		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa
2	13	4	201	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2	13	4	201	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
2	13	4	201	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
2	13	4	201	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
2	13	4	201	5	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD
2	13	4	201	6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
2	13	4	201	7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
2	13	4	201	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
2	13	4	201	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
2	13	4	201	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
2	13	4	201	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa
2	13	4	201	12	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2	13	5	201		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	13	5	201	1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
2	13	5	201	2	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
2	13	5	201	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
2	13	5	201	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan
2	13	5	201	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
2	13	5	201	6	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
2	14	2	201		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
2	14	2	201	1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
2	14	2	201	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
2	14	2	201	3	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
2	14	2	201	4	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan
2	14	2	201	5	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
2	14	2	201	6	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal
2	14	2	201	7	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
2	14	2	201	8	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
2	14	2	201	9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal
2	14	2	201	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
2	14	2	201	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
2	14	2	201	12	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
2	14	2	201	13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
2	14	2	201	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
2	14	2	201	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
2	14	2	202		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
2	14	2	202	1	Perumusan Parameter Kependudukan
2	14	2	202	2	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
2	14	2	202	3	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
2	14	2	202	4	Pemetaan Kependudukan
2	14	2	202	5	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
2	14	2	202	6	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
2	14	2	202	7	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)
2	14	2	202	8	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
2	14	2	202	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
2	14	2	202	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
2	14	2	202	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
2	14	2	202	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
2	14	2	202	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
2	14	2	202	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
2	14	3	201		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2	14	3	201	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
2	14	3	201	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2	14	3	201	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
2	14	3	201	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang
2	14	3	201	5	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)
2	14	3	201	6	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK
2	14	3	201	7	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
2	14	3	201	8	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK
2	14	3	201	9	Pengendalian Program KKBPK
2	14	3	202		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
2	14	3	202	1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB
2	14	3	202	2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
2	14	3	202	3	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
2	14	3	202	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
2	14	3	203		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
2	14	3	203	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
2	14	3	203	2	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
2	14	3	203	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
2	14	3	203	4	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
2	14	3	203	5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
2	14	3	203	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
2	14	3	203	7	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB
2	14	3	203	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
2	14	3	203	9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
2	14	3	203	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
2	14	3	203	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
2	14	3	203	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
2	14	3	203	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria
2	14	3	204		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2	14	3	204	1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2	14	3	204	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
2	14	3	204	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
2	14	3	204	4	Pembinaan Terpadu Kampung KB
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
2	14	4	201		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2	14	4	201	1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
2	14	4	201	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	4	201	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	4	201	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	4	201	5	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	4	201	6	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	4	201	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
2	14	4	201	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
2	14	4	201	9	Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
2	14	4	201	10	Penyerdiaan dan Pengembangan Materi IPK
2	14	4	201	11	Advokasi dan Promosi IPK
2	14	4	201	12	Sosialisasi IPK
2	14	4	201	13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK
2	14	4	202		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2	14	4	202	1	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	4	202	2	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	4	202	3	Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	4	202	4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2	15	2	201		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2	15	2	201	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2	15	2	201	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2	15	2	201	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2	15	2	202		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2	15	2	202	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2	15	2	202	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2	15	2	202	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
2	15	2	202	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2	15	2	203		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
2	15	2	203	1	Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
2	15	2	203	2	Pembangunan Gedung Terminal
2	15	2	203	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
2	15	2	203	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
2	15	2	203	5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
2	15	2	204		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
2	15	2	204	1	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	15	2	204	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	2	205		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	2	205	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	2	205	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	2	205	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	2	205	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	2	205	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	2	205	6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
2	15	2	205	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	2	205	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	2	205	9	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	2	205	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	2	206		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
					Kabupaten/Kota
2	15	2	206	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
2	15	2	206	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2	15	2	206	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
2	15	2	206	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi
2	15	2	207		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
2	15	2	207	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
2	15	2	207	2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
2	15	2	207	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
2	15	2	207	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
2	15	2	208		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
2	15	2	208	1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ
2	15	2	208	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	2	208	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
2	15	2	208	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
2	15	2	208	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
2	15	2	209		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	2	209	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	2	209	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2	15	2	210		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	2	210	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	2	210	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2	15	2	211		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	2	211	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	2	211	2	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	2	211	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	2	212		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	2	212	1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota
2	15	2	212	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	2	213		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	2	213	1	Perumusan kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	2	213	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	2	214		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	2	214	1	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
2	15	2	214	2	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	2	215		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	2	215	1	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
2	15	2	215	2	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	2	216		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	2	216	1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	2	216	2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	2	216	3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
2	15	3	201		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota
2	15	3	201	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	15	3	201	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	3	202		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2	15	3	202	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	15	3	202	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	3	203		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha
2	15	3	203	1	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	3	203	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	3	204		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 daerah Kabupaten/Kota
2	15	3	204	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	3	204	2	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	3	205		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha
2	15	3	205	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	3	205	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	3	206		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
2	15	3	206	1	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	15	3	206	2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	15	3	207		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	15	3	207	1	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	15	3	207	2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	15	3	208		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal
2	15	3	208	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	3	208	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal
2	15	3	209		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	15	3	209	1	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	15	3	209	2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	15	3	209	3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota
2	15	3	210		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	3	210	1	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	3	210	2	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	3	210	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	3	211		Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
2	15	3	211	1	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
2	15	3	211	2	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
2	15	3	211	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
2	15	3	212		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	3	212	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	3	212	2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	3	212	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	3	212	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	3	213		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
2	15	3	213	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
2	15	3	213	2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
2	15	3	213	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
2	15	3	213	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
2	15	3	214		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
2	15	3	214	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	3	214	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	3	215		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	3	215	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	3	215	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	3	216		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	3	216	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	3	216	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	3	217		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	3	217	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	3	217	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	3	218		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	3	218	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	3	218	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	3	219		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	3	219	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	3	219	2	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
2	15	4	201		Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
2	15	4	201	1	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter
2	15	4	202		Penyelenggaraan Kebandarudaraan
2	15	4	202	1	Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan
2	15	4	202	2	Penetapan Kebijakan Besaran Tarif, Personil, Sarana, dan Prasarana Penyelenggaraan Kebandarudaraan
2	15	4	202	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di Sekitar Bandar Udara
2	15	4	202	4	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas untuk Menunjang Kegiatan Bandar Udara
2	15	4	202	5	Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	5			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
2	15	5	201		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
2	15	5	201	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian
2	15	5	201	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian
2	15	5	201	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
2	15	5	202		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	5	202	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
2	15	5	202	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	5	203		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	5	203	1	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	5	203	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	5	204		Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
2	15	5	204	1	Perumusan kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
2	15	5	205		Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	5	205	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	5	205	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	5	206		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi
2	15	5	206	1	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi
2	15	5	206	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi
2	15	5	207		Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	15	5	207	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	5	207	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2	16	2	201		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	16	2	201	1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2	16	2	201	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2	16	2	201	3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
2	16	2	201	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
2	16	2	201	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2	16	2	201	6	Pelayanan Informasi Publik
2	16	2	201	7	Layanan Hubungan Media
2	16	2	201	8	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
2	16	2	201	9	Manajemen Komunikasi Krisis
2	16	2	201	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
2	16	2	201	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
2	16	2	201	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
2	16	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
2	16	3	201		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	16	3	201	1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
2	16	3	201	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	16	3	201	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2	16	3	202		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	16	3	202	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
					Pemerintahan Daerah Provinsi
2	16	3	202	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	16	3	202	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
2	16	3	202	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
2	16	17	202	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
2	16	3	202	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
2	16	3	202	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	16	3	202	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
2	16	3	202	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
2	16	3	202	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
2	16	3	202	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
2	17	2	201		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	17	2	201	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	17	2	202		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	17	2	202	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2	17	3	201		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2	17	3	201	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2	17	3	201	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
2	17	4	201		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	17	4	201	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2	17	4	201	2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
2	17	5	201		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2	17	5	201	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
2	17	6	201		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2	17	6	201	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2	17	7	201		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
2	17	7	201	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
2	17	7	201	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
2	17	7	201	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
2	17	7	201	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
2	17	7	201	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
2	17	8	201		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
					Usaha Kecil
2	17	8	201	1	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2	18	2	201		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	18	2	201	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2	18	2	201	2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2	18	2	202		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2	18	2	202	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
2	18	2	202	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2	18	3	201		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2	18	3	201	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
2	18	3	201	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
2	18	4	201		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2	18	4	201	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	18	4	201	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
2	18	4	201	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
2	18	4	201	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2	18	5	201		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	18	5	201	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	18	5	201	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	18	5	201	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
2	18	6	201		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	18	6	201	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
2	19	2	201		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2	19	2	201	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
2	19	2	201	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
2	19	2	201	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota
2	19	2	201	4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
2	19	2	201	5	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota
2	19	2	201	6	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota
2	19	2	201	7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
2	19	2	201	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
2	19	2	202		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	19	2	202	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
2	19	2	202	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2	19	3	201		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	19	3	201	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
2	19	3	201	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar
2	19	3	201	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
2	19	3	202		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	19	3	202	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
2	19	3	202	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota
2	19	3	202	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
2	19	3	203		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
2	19	3	203	1	Seleksi Atlet Daerah
2	19	3	203	2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
2	19	3	203	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota
2	19	3	203	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
2	19	3	203	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
2	19	3	204		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
2	19	3	204	1	Standardisasi Organisasi Keolahragaan
2	19	3	204	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
2	19	3	204	3	Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait
2	19	3	204	4	Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
2	19	3	205		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
2	19	3	205	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
2	19	3	205	2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
2	19	3	205	4	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
2	19	3	205	5	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
2	19	3	205	6	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
2	19	4	201		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
2	19	4	201	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
2	19	4	201	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
2	19	4	201	3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
2	19	4	201	4	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
2	19	4	201	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
2	19	4	201	6	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
2	19	4	201	7	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
2	19	4	201	8	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2	20	2	201		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	20	2	201	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
2	20	2	201	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
					Terintegrasi
2	20	2	201	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral
2	20	2	201	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
2	20	2	201	5	Pengembangan Infrastruktur
2	20	2	201	6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
2	21	2	201		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	21	2	201	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	21	2	201	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	21	2	201	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
2	21	2	201	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	21	2	202		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
2	21	2	202	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2	22	2	201		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	22	2	201	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
2	22	2	201	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
2	22	2	202		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	22	2	202	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
2	22	2	202	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
2	22	2	202	3	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
2	22	2	203		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	22	2	203	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
2	22	2	203	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
2	22	2	203	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
2	22	3	201		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	22	3	201	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
2	22	3	201	2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
2	22	3	201	3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
2	22	4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2	22	4	201		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	22	4	201	1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
2	22	4	201	2	penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
2	22	4	201	3	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
2	22	5	201		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
2	22	5	201	1	Register Cagar Budaya
2	22	5	201	2	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
2	22	5	201	3	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
2	22	5	201	4	Pendayagunaan Cagar Budaya
2	22	5	201	5	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
2	22	5	202		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
2	22	5	202	1	Register Cagar Budaya
2	22	5	202	2	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
2	22	5	202	3	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
2	22	5	202	4	Pendayagunaan Cagar Budaya
2	22	5	202	5	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
2	22	5	203		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	22	5	203	1	Register Cagar Budaya
2	22	5	203	2	Pencegahan dan Penanggulungan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
2	22	5	203	3	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
2	22	5	203	4	Pendayagunaan Cagar Budaya
2	22	5	203	5	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
2	22	6			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2	22	6	201		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
2	22	6	201	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
2	22	6	201	2	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
2	22	6	201	3	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum
2	22	6	201	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
2	22	6	201	5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2	23	2	201		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	23	2	201	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
2	23	2	201	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	23	2	201	3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	23	2	201	4	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
2	23	2	201	5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
2	23	2	201	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	23	2	201	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
2	23	2	201	8	Pengembangan Bahan Pustaka
2	23	2	201	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
2	23	2	201	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	23	2	202		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	23	2	202	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat
2	23	2	202	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	23	2	202	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
2	23	2	202	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
2	23	2	202	5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi
2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
2	23	3	201		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
2	23	3	201	1	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
2	23	3	201	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan
2	23	3	202		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	23	3	202	1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
2	23	3	202	2	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
2	24	2	201		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
2	24	2	201	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
2	24	2	201	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
2	24	2	202		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
2	24	2	202	1	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI
2	24	2	202	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
2	24	2	203		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
2	24	2	203	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN
2	24	2	203	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
2	24	3	201		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
2	24	3	201	1	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
2	24	3	201	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
2	24	3	202		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
2	24	3	202	1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
2	24	3	202	2	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
2	24	3	203		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2	24	3	203	1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
2	24	3	203	2	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
2	24	3	203	3	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan
2	24	3	203	4	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan
2	24	3	204		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
2	24	3	204	1	penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
2	24	3	204	2	penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
2	24	3	205		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
2	24	3	205	1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang
2	24	3	205	2	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang
2	24	3	205	3	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)
2	24	4			PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP
2	24	4	201		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
2	24	4	201	1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
2	24	4	201	2	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3	25	2	201		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Dusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3	25	2	201	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
3	25	2	201	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
3	25	2	201	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
3	25	2	202		Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	25	2	202	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
3	25	2	202	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
3	25	2	202	3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
3	25	2	203		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3	25	2	203	1	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3	25	2	203	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
3	25	2	204		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3	25	2	204	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT
3	25	2	204	2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT
3	25	2	205		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3	25	2	205	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT
3	25	2	205	2	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT
3	25	2	206		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	2	206	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT
3	25	2	206	2	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3	25	3	201		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	3	201	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
3	25	3	201	2	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
3	25	3	202		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3	25	3	202	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
3	25	3	202	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3	25	3	202	3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
3	25	3	202	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
3	25	3	203		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
3	25	3	203	1	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	3	203	2	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	3	204		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
3	25	3	204	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	3	204	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	3	204	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	3	204	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	3	204	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
3	25	3	204	6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
3	25	3	204	7	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
3	25	4			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	201		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
3	25	4	201	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
3	25	4	201	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
3	25	5			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3	25	5	201		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil
3	25	5	201	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	5	202		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3	25	5	202	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3	25	5	203		Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3	25	5	203	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	5	203	2	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
3	26	2	201		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
3	26	2	201	1	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
3	26	2	201	2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
3	26	2	201	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
3	26	2	201	4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
3	26	2	202		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	2	202	1	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	2	202	2	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	2	202	3	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	2	202	4	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	2	202	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	2	202	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	2	202	7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	2	203		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	2	203	1	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	2	203	2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	2	203	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	2	203	4	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	2	203	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	2	203	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	2	203	7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	2	204		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
3	26	2	204	1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	2	204	2	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	2	204	3	Pengelolaan Investasi Pariwisata
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
3	26	3	201		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	3	201	1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
3	26	3	201	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	3	201	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
3	26	3	201	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri
3	26	4			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
3	26	4	201		Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
3	26	4	201	1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3	26	5	201		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3	26	5	201	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3	26	5	201	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
3	26	5	201	3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
3	26	5	201	4	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
3	26	5	201	5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif
3	26	5	201	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3	27	2	201		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
3	27	2	201	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
3	27	2	201	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
3	27	2	202		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota
3	27	2	202	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
3	27	2	202	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
3	27	2	202	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
3	27	2	203		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
3	27	2	203	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
3	27	2	203	2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
3	27	2	204		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
3	27	2	204	1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
3	27	2	204	2	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan
3	27	2	205		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
3	27	2	205	1	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
3	27	2	205	2	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak
3	27	2	205	3	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
3	27	2	205	4	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
3	27	2	205	5	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
3	27	2	205	6	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
3	27	2	206		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain
3	27	2	206	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3	27	2	206	2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3	27	3	201		Pengembangan Prasarana Pertanian
3	27	3	201	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
3	27	3	201	2	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
3	27	3	201	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
3	27	3	201	4	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan
3	27	3	202		Pembangunan Prasarana Pertanian
3	27	3	202	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
3	27	3	202	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
3	27	3	202	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
3	27	3	202	4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
3	27	3	202	5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage
3	27	3	202	6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
3	27	3	202	7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
3	27	3	202	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
3	27	3	202	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
3	27	3	203		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
3	27	3	203	1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
3	27	3	203	2	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
3	27	4	204		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum
3	27	3	204	1	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum
3	27	3	204	2	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum
3	27	3	204	3	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
3	27	4	201		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	27	4	201	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
3	27	4	201	2	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	27	4	201	3	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
3	27	4	202		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota
3	27	4	202	1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
3	27	4	202	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
3	27	4	202	3	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	27	4	203		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota
3	27	4	203	1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
3	27	4	203	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
3	27	4	204		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Masyarakat Veteriner
3	27	4	204	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
3	27	4	204	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
3	27	4	204	3	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis
3	27	4	204	4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	4	205		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
3	27	4	205	1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan
3	27	4	205	2	Penanganan atas Pelanggaran kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3	27	5	201		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
3	27	5	201	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	5	201	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	5	201	3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	5	201	4	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
3	27	5	201	5	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
3	27	6	201		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
3	27	6	201	1	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
3	27	6	201	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
3	27	6	201	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
3	27	6	202		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
3	27	6	202	1	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
3	27	6	202	2	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
3	27	6	202	3	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
3	27	6	202	4	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan
3	27	6	202	5	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan
3	27	6	203		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
3	27	6	203	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
3	27	6	203	2	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3	27	7	201		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
3	27	7	201	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
3	27	7	201	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
3	27	7	201	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
3	27	7	201	4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
3	28	2			PROGRAM PERENCANAAN HUTAN
					Tidak ada kewenangan Kabupaten/Kota
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
					Tidak ada kewenangan Kabupaten/Kota
3	28	4			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
3	28	4	201		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota
3	28	4	201	1	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
3	28	4	201	2	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota
3	28	4	201	3	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota
3	28	4	201	4	Pengawetan Koridor Hidupan Liar
3	28	4	201	5	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota
3	28	4	201	6	Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota
3	28	4	201	7	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota
3	28	4	201	8	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota
3	28	4	201	9	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Kabupaten/Kota
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
					Tidak ada kewenangan Kabupaten/Kota
3	28	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
					Tidak ada kewenangan Kabupaten/Kota
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	2			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGI
					Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota
3	29	3			PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA
					Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota
3	29	4			PROGRAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI
					Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota
3	29	5			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
3	29	5	201		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	29	5	201	1	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
3	29	5	201	2	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	29	5	201	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	29	6			PROGRAM KETENAGALISTRIKAN
					Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
3	30	2	201		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
3	30	2	201	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3	30	2	202		Penerbitan Tanda Daftar Gudang
3	30	2	202	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
3	30	2	203		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri
3	30	2	203	1	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik
3	30	2	203	2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
3	30	2	204		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri
3	30	2	204	1	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri
3	30	2	204	2	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri
3	30	2	205		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat
3	30	2	205	1	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
3	30	2	206		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
3	30	2	206	1	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan berbahaya
3	30	2	206	2	Fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2
3	30	2	206	3	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)
3	30	2	207		Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
3	30	2	207	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3	30	3	201		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	3	201	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	3	201	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	3	202		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya
3	30	3	202	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	3	202	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
3	30	4	201		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
3	30	4	201	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
3	30	4	201	2	Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
3	30	4	201	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
3	30	4	202		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3	30	4	202	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
3	30	4	202	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
3	30	4	202	3	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
3	30	4	203		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	30	4	203	1	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
3	30	4	203	2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
3	30	4	203	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3	30	5	201		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	30	5	201	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
3	30	5	201	2	Pameran Dagang Nasional
3	30	5	201	3	Pameran Dagang Lokal
3	30	5	201	4	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
3	30	5	201	5	Peningkatan Citra Produk Ekspor
3	30	5	201	6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
3	30	6	201		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
3	30	6	201	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
3	30	6	201	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
3	30	6	201	3	Penyidikan Metrologi Legal
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
3	30	7	201		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
3	30	7	201	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota
3	30	7	201	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota
3	30	7	201	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3	31	2	201		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3	31	2	201	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
3	31	2	201	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri
3	31	2	201	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
3	31	2	201	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3	31	2	201	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
3	31	2	201	6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
3	31	3	201		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah
3	31	3	201	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3	31	3	201	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan
3	31	3	201	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
3	31	4	201		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
3	31	4	201	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
3	31	4	201	2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
3	32	2			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI
3	32	2	201		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
3	32	2	201	1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
3	32	2	201	2	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan
3	32	2	201	3	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi
3	32	2	201	4	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
3	32	3			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
3	32	3	201		Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3	32	3	201	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3	32	3	201	2	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran
3	32	3	201	3	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi
3	32	3	201	4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3	32	3	201	5	Penyuluhan Transmigrasi Lokal
3	32	3	201	6	Pelatihan Transmigrasi lokal
3	32	3	201	7	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi
3	32	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
3	32	4	201		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
3	32	4	201	1	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
3	32	4	201	2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4	1				SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	2	201		Administrasi Tata Pemerintahan
4	1	2	201	1	Penataan Administrasi Pemerintahan
4	1	2	201	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
4	1	2	201	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
4	1	2	202		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
4	1	2	202	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
4	1	2	202	2	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
4	1	2	202	3	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
4	1	2	203		Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah
4	1	2	203	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
4	1	2	203	2	Fasilitasi Bantuan Hukum
4	1	2	203	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
4	1	2	204		Fasilitasi Kerjasama Daerah
4	1	2	204	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
4	1	2	204	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
4	1	2	204	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4	1	3	201		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
4	1	3	201	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
4	1	3	201	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
4	1	3	201	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
4	1	3	202		Administrasi Pembangunan
4	1	3	202	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
4	1	3	202	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
4	1	3	202	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
4	1	3	203		Pengadaan Barang dan Jasa

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
4	1	3	203	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	3	203	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
4	1	3	203	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	3	204		Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam
4	1	3	204	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
4	1	3	204	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
4	1	3	204	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
4	1	4			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
4	1	4	201		Pelaksanaan Administrasi Umum
4	1	4	201	1	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
4	1	4	201	2	Pengelolaan Perlengkapan
4	1	4	201	3	Pengelolaan Rumah Tangga
4	1	4	202		Penataan Organisasi
4	1	4	202	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
4	1	4	202	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
4	1	4	202	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4	1	4	203		Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4	1	4	203	1	Fasilitasi Keprotokolan
4	1	4	203	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
4	1	4	203	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
4	1	4	204		Perencanaan dan Keuangan
4	1	4	204	1	Pengelolaan Perencanaan
4	1	4	204	2	Pengelolaan Keuangan
4	1	4	204	3	Penatausahaan Pelaporan
4	2				SEKRETARIAT DPRD
4	2	2			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN
4	2	2	201		Layanan Administrasi DPRD
4	2	2	201	1	Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD
4	2	2	201	2	Fasilitasi Rapat DPRD
4	2	2	201	3	Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD
4	2	2	201	4	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD
4	2	2	201	5	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD
4	2	2	201	6	Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4	2	2	202		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
4	2	2	202	1	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
4	2	2	202	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
4	2	2	202	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
4	2	3			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
4	2	3	201		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
4	2	3	201	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
4	2	3	201	2	Pembahasan Rancangan Perda
4	2	3	201	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
4	2	3	201	4	Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik
4	2	3	201	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD
4	2	3	202		Pembahasan Kebijakan Anggaran
4	2	3	202	1	pembahasan KUA dan PPAS
4	2	3	202	2	pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan
4	2	3	202	3	Pembahasan APBD
4	2	3	202	4	Pembahasan APBD Perubahan
4	2	3	202	5	Pembahasan Laporan Semester
4	2	3	202	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
4	2	3	203		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
4	2	3	203	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
4	2	3	203	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
4	2	3	203	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
4	2	3	203	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
4	2	3	203	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
4	2	3	203	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan
4	2	3	203	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran
4	2	3	204		Peningkatan Kapasitas DPRD
4	2	3	204	1	Orientasi DPRD
4	2	3	204	2	Bimbingan Teknis DPRD
4	2	3	204	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
4	2	3	204	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
4	2	3	204	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
4	2	3	204	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
4	2	3	204	7	Penyusunan Program Kerja DPRD
4	2	3	205		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
4	2	3	205	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah
4	2	3	205	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
4	2	3	205	3	Pelaksanaan Reses
4	2	3	206		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
4	2	3	206	1	Penyusunan Kode Etik DPRD
4	2	3	206	2	Pengawasan Kode Etik DPRD
4	2	3	207		Pembahasan Kerja Sama Daerah
4	2	3	207	1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
4	2	3	207	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
4	2	3	208		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
4	2	3	208	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
4	2	3	208	2	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD
4	2	3	208	3	Pelaksanaan Undangan DPRD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5	1				PERENCANAAN
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	201		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	201	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota
5	1	2	201	2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan
5	1	2	201	3	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
5	1	2	201	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5	1	2	201	5	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya
5	1	2	201	6	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
5	1	2	201	7	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
5	1	2	201	8	Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah
5	1	2	201	9	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	202		Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	202	1	Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah
5	1	2	202	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah
5	1	2	202	3	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	203		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
5	1	2	203	1	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
5	1	2	203	2	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
5	1	2	203	3	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
5	1	2	203	4	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah
5	1	3			PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
5	1	3	201		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan
5	1	3	201	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
5	1	3	201	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
5	1	3	201	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
5	1	3	202		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
5	1	3	202	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
5	1	3	202	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
5	1	3	202	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
5	1	3	203		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
5	1	3	203	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
5	1	3	203	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
5	1	3	203	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
5	1	4			PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
5	1	4	201		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian
5	1	4	201	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
5	1	4	201	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
5	1	4	201	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
5	1	4	202		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif
5	1	4	202	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
5	1	4	202	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
5	1	4	202	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
5	1	4	203		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam
5	1	4	203	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
5	1	4	203	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
5	1	4	203	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
5	1	5			PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
5	1	5	201		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
5	1	5	201	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
5	1	5	201	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
5	1	5	201	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
5	1	5	202		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
5	1	5	202	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
5	1	5	202	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
5	1	5	202	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
5	1	5	203		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan
5	1	5	203	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan
5	1	5	203	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan
5	1	5	203	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakarya dan Kewilayahan
5	2				KEUANGAN
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	201		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5	2	2	201	1	Penyusunan KUA dan PPAS
5	2	2	201	2	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
5	2	2	201	3	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD
5	2	2	201	4	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD
5	2	2	201	5	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
5	2	2	201	6	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
5	2	2	201	7	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD
5	2	2	201	8	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran
5	2	2	201	9	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
5	2	2	201	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
5	2	2	201	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
5	2	2	202		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
5	2	2	202	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
5	2	2	202	2	Penatausahaan Pembiayaan Daerah
5	2	2	202	3	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
5	2	2	202	4	Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D
5	2	2	202	5	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
5	2	2	202	6	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
5	2	2	202	7	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas
5	2	2	202	8	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
5	2	2	202	9	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)
5	2	2	202	10	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
5	2	2	203		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5	2	2	203	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
5	2	2	203	2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5	2	2	203	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
5	2	2	203	4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
5	2	2	203	5	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
5	2	2	203	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5	2	2	203	7	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan
5	2	2	203	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5	2	2	203	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
5	2	2	203	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
5	2	2	203	11	Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial
5	2	2	203	12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
5	2	2	204		Kegiatan Penunjang Urusan
5	2	2	204	1	Pelaksanaan Pinjaman Pada Pemerintah Daerah
5	2	2	204	2	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi
5	2	2	204	3	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5	2	3	201		Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	2	3	201	1	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang
5	2	3	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
5	2	3	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
5	2	3	201	4	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
5	2	3	201	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah
5	2	3	201	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah
5	2	3	201	7	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
5	2	3	201	8	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
5	2	3	201	9	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
5	2	3	201	10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
5	2	3	201	11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
5	2	3	201	12	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD
5	2	3	201	13	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	202		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
5	2	4	202	1	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
5	2	4	202	2	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	2	4	202	3	Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	2	4	202	4	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	2	4	202	5	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat
5	2	4	202	6	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi
5	2	4	202	7	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi
5	2	4	202	8	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	2	4	202	9	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	2	4	202	10	Pemeriksaan Pajak Daerah
5	2	4	202	11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	3				KEPEGAWAIAN
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	201		Pengelolaan Data dan Informasi ASN
5	3	2	201	1	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
5	3	2	201	2	Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional
5	3	2	201	3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
5	3	2	201	4	Pengelolaan Data Kepegawaian
5	3	2	202		Administrasi Kepegawaian
5	3	2	202	1	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN
5	3	2	202	2	Penataan dan Mutasi Jabatan
5	3	2	202	3	Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, dan Kepangkatan
5	3	2	202	4	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun
5	3	2	202	5	Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai
5	3	2	202	6	Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian.
5	3	2	202	7	Pengelolaan Mutasi ASN
5	3	2	202	8	Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN
5	3	2	202	9	Pembuatan Daftar Penjagaan Kenaikan Pangkat
5	3	2	202	10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
5	3	2	203		Peningkatan Kapastitas ASN
5	3	2	203	1	Peningkatan Kapasitas ASN
5	3	2	203	2	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN
5	3	2	203	3	Pengembangan Assessment Center
5	3	2	203	4	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)
5	3	2	203	5	Fasilitasi Profesi ASN
5	3	2	203	6	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
5	3	2	203	7	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
5	3	2	203	8	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
5	3	2	203	9	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional
5	3	2	204		Pengembangan Karir ASN
5	3	2	204	1	Pengembangan Karir dan Promosi ASN
5	3	2	204	2	Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir
5	3	2	205		Pembinaan ASN
5	3	2	205	1	Pembinaan Disiplin ASN
5	3	2	205	2	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
5	3	2	205	3	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	201		Pengembangan Kompetensi Teknis
5	4	2	201	1	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5	4	2	201	2	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5	4	2	201	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5	4	2	201	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5	4	2	202		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
5	4	2	202	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional
5	4	2	202	2	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
5	4	2	202	3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5	4	2	202	4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
5	4	2	202	5	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
5	4	2	202	6	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
5	4	2	202	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
5	4	2	202	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	201		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
5	5	2	201	1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
5	5	2	201	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
5	5	2	201	3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
5	5	2	201	4	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
5	5	2	201	5	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
5	5	2	201	6	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
5	5	2	201	7	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa
5	5	2	201	8	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
5	5	2	201	9	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa
5	5	2	201	10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa
5	5	2	201	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
5	5	2	201	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
5	5	2	201	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
5	5	2	201	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
5	5	2	201	15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian Bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian Oleh Instansi yang Berwenang
5	5	2	202		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
5	5	2	202	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
5	5	2	202	2	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	5	2	202	3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5	5	2	202	4	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
5	5	2	202	5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
5	5	2	202	6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
5	5	2	202	7	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	5	2	202	8	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	5	2	202	9	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
5	5	2	202	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
5	5	2	202	11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi
5	5	2	203		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
5	5	2	203	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	5	2	203	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
5	5	2	203	3	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
5	5	2	203	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
5	5	2	203	5	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
5	5	2	203	6	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
5	5	2	203	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
5	5	2	203	8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
5	5	2	203	9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
5	5	2	203	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
5	5	2	203	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	5	2	203	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
5	5	2	203	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
5	5	2	204		Pengembangan Inovasi dan Teknologi
5	5	2	204	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
5	5	2	204	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
5	5	2	204	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
5	5	2	204	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
5	5	2	204	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
5	6				PENGHUBUNG
5	6	2			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
5	6	2	201		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Kabupaten/Kota
5	6	2	201	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat
5	6	2	201	2	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat
5	6	2	201	3	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
5	6	2	201	4	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya
5	6	2	201	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penghubung
5	7				PENGELOAN PERBATASAN
5	7	2			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN
5	7	2	201		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Kabupaten/Kota
5	7	2	201	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6	1				INSPEKTORAT DAERAH
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6	1	2	201		Penyelenggaraan Pengawasan Internal
6	1	2	201	1	Audit Kinerja dan Keuangan
6	1	2	201	2	Review Kinerja dan Keuangan
6	1	2	201	3	Pemantauan Kinerja dan Keuangan
6	1	2	201	4	Evaluasi Kinerja dan Keuangan
6	1	2	202		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
6	1	2	202	1	Audit Kinerja dan Keuangan
6	1	2	202	2	Review Kinerja dan Keuangan
6	1	2	202	3	Pemantauan Kinerja dan Keuangan
6	1	2	202	4	Evaluasi Kinerja dan Keuangan
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6	1	3	201		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan
6	1	3	201	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
6	1	3	201	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
6	1	3	202		Asistensi dan Pendampingan
6	1	3	202	1	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
6	1	3	202	2	Asistensi dan Pendampingan
7					UNSUR KEWILAYAHAN
7	1				KECAMATAN
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	1	2	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7	1	2	201	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7	1	2	201	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
7	1	2	202		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7	1	2	202	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan
7	1	2	202	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
7	1	2	202	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7	1	2	203		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7	1	2	203	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
7	1	2	203	2	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
7	1	2	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7	1	2	204	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan
7	1	2	204	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
7	1	2	204	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	1	3	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7	1	3	201	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7	1	3	201	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
7	1	3	201	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7	1	3	202		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7	1	3	202	1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
7	1	3	202	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7	1	3	202	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7	1	3	202	4	Evaluasi Kelurahan
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	1	4	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7	1	4	201	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
7	1	4	201	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7	1	4	202		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
7	1	4	202	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	1	5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
7	1	5	201	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7	1	5	201	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7	1	5	201	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
7	1	5	201	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
7	1	5	201	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
7	1	5	201	6	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
7	1	5	201	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
7	1	5	201	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	1	6	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7	1	6	201	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
7	1	6	201	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
7	1	6	201	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
7	1	6	201	4	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
7	1	6	201	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
7	1	6	201	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
7	1	6	201	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
7	1	6	201	8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
7	1	6	201	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa
7	1	6	201	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
7	1	6	201	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7	1	6	201	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
7	1	6	201	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
7	1	6	201	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga
7	1	6	201	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
7	1	6	201	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
7	1	6	201	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
7	1	6	201	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
8	1	2	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8	1	2	201	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8	1	2	201	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8	1	2	201	3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8	1	2	201	4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8	1	2	201	5	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
8	1	3	201		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8	1	3	201	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	1	3	201	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
8	1	3	201	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
8	1	3	201	4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	1	3	201	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	1	3	201	6	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
8	1	4	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8	1	4	201	1	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8	1	4	201	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8	1	4	201	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8	1	4	201	4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8	1	4	201	5	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
8	1	5	201		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
8	1	5	201	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	1	5	201	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	1	5	201	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	1	5	201	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	1	5	201	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	1	5	201	6	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Oleh Pimpinan
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
8	1	6	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8	1	6	201	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	1	6	201	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	1	6	201	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	1	6	201	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	1	6	201	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	1	6	201	6	Pelaksanaan Pimpinan

B. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR REKENING NERACA

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	1	1	1	1	001	Kas di Kas Daerah	
1	1	1	2	1	001	Kas di Bendahara Penerimaan	
1	1	1	3	1	001	Kas di Bendahara Pengeluaran	
1	1	1	4	1	001	Kas di BLUD ...	
1	1	1	4	1	002	Dst ...	
1	1	1	5	1	001	Kas Dana BOS ...	
1	1	1	5	1	002	Dst ...	
1	1	1	6	1	001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP ...	
1	1	1	6	1	002	Dst ...	
1	1	1	7	1	001	Kas Lainnya	
1	1	1	8	1	001	Setara Kas	
1	1	2	1	1	001	Investasi dalam Saham ...	
1	1	2	1	1	002	Dst	
1	1	2	2	1	001	Deposito Jangka Pendek ...	
1	1	2	2	1	002	Dst ...	
1	1	2	3	1	001	Investasi dalam SUN ...	
1	1	2	3	1	002	Dst ...	
1	1	2	4	1	001	Investasi dalam SBI ...	
1	1	2	4	1	002	Dst ...	
1	1	2	5	1	001	Investasi dalam SPN ...	
1	1	2	5	1	002	Dst ...	
1	1	2	6	1	001	Investasi Jangka Pendek BLUD	
1	1	3	1	1	001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	
1	1	3	1	1	002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	
1	1	3	1	1	003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan- Pemerintah Pusat	
1	1	3	1	1	004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan- Pemerintah Daerah	
1	1	3	1	2	001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	
1	1	3	1	2	002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	
1	1	3	1	2	003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	
1	1	3	1	2	004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	
1	1	3	1	3	001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	
1	1	3	1	3	002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	
1	1	3	1	3	003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus- Pemerintah Pusat	
1	1	3	1	3	004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus- Pemerintah Daerah	
1	1	3	1	4	001	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	
1	1	3	1	4	002	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	
1	1	3	1	4	003	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	
1	1	3	1	4	004	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	
1	1	3	1	5	001	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	
1	1	3	1	5	002	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	
1	1	3	1	5	003	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	
1	1	3	1	5	004	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	
1	1	3	1	6	001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pribadi	
1	1	3	1	6	002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Umum	
1	1	3	1	6	003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pemerintah Pusat	
1	1	3	1	6	004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pemerintah Daerah	
1	1	3	1	7	001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pribadi	
1	1	3	1	7	002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Umum	
1	1	3	1	7	003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pemerintah Pusat	
1	1	3	1	7	004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pemerintah Daerah	
1	1	3	1	8	001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	
1	1	3	1	8	002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	
1	1	3	1	8	003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck- Pemerintah Pusat	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	1	3	1	8	004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck- Pemerintah Daerah	
1	1	3	1	9	001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pribadi	
1	1	3	1	9	002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Umum	
1	1	3	1	9	003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pemerintah Pusat	
1	1	3	1	9	004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pemerintah Daerah	
1	1	3	1	10	001	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	
1	1	3	1	10	002	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	
1	1	3	1	10	003	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	
1	1	3	1	10	004	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	
1	1	3	1	11	001	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	
1	1	3	1	11	002	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	
1	1	3	1	11	003	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	
1	1	3	1	11	004	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	
1	1	3	1	12	001	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi	
1	1	3	1	12	002	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum	
1	1	3	1	12	003	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat	
1	1	3	1	12	004	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah	
1	1	3	1	13	001	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi	
1	1	3	1	13	002	Piutang PKB--Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum	
1	1	3	1	13	003	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat	
1	1	3	1	13	004	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah	
1	1	3	1	14	001	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	
1	1	3	1	14	002	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	
1	1	3	1	14	003	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat	
1	1	3	1	14	004	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	
1	1	3	2	1	001	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	
1	1	3	2	2	001	Piutang BBNKB- <i>Jeep</i>	
1	1	3	2	3	001	Piutang BBNKB-Minibus	
1	1	3	2	4	001	Piutang BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>	
1	1	3	2	5	001	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus	
1	1	3	2	6	001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>	
1	1	3	2	7	001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>	
1	1	3	2	8	001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>	
1	1	3	2	9	001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>	
1	1	3	2	10	001	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	
1	1	3	2	11	001	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	
1	1	3	2	12	001	Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	
1	1	3	2	13	001	Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	
1	1	3	2	14	001	Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga	
1	1	3	3	1	001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin	
1	1	3	3	2	001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar	
1	1	3	3	3	001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas	
1	1	3	3	4	001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya	
1	1	3	4	1	001	Piutang Pajak Air Permukaan	
1	1	3	5	1	001	Piutang Pajak Rokok	
1	1	3	6	1	001	Piutang Pajak Hotel	
1	1	3	6	2	001	Piutang Pajak Motel	
1	1	3	6	3	001	Piutang Pajak Losmen	
1	1	3	6	4	001	Piutang Pajak Gubuk Pariwisata	
1	1	3	6	5	001	Piutang Pajak Wisma Pariwisata	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	1	3	6	6	001	Piutang Pajak Pesanggrahan	
1	1	3	6	7	001	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	
1	1	3	6	8	001	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	
1	1	3	7	1	001	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	
1	1	3	7	2	001	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	
1	1	3	7	3	001	Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	
1	1	3	7	4	001	Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya	
1	1	3	7	5	001	Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya	
1	1	3	7	6	001	Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya	
1	1	3	7	7	001	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	
1	1	3	8	1	001	Piutang Pajak Tontonan Film	
1	1	3	8	2	001	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/Busana	
1	1	3	8	3	001	Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	
1	1	3	8	4	001	Piutang Pajak Pameran	
1	1	3	8	5	001	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	
1	1	3	8	6	001	Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	
1	1	3	8	7	001	Piutang Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>	
1	1	3	8	8	001	Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	
1	1	3	8	9	001	Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	
1	1	3	8	10	001	Piutang Pajak Pertandingan Olahraga-LO	
1	1	3	9	1	001	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	
1	1	3	9	2	001	Piutang Pajak Reklame Kain	
1	1	3	9	3	001	Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker	
1	1	3	9	4	001	Piutang Pajak Reklame Selebaran	
1	1	3	9	5	001	Piutang Pajak Reklame Berjalan	
1	1	3	9	6	001	Piutang Pajak Reklame Udara	
1	1	3	9	7	001	Piutang Pajak Reklame Apung	
1	1	3	9	8	001	Piutang Pajak Reklame Suara	
1	1	3	9	9	001	Piutang Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i>	
1	1	3	9	10	001	Piutang Pajak Reklame Peragaan	
1	1	3	10	1	001	Piutang Pajak Penerangan Dihasilkan Sendiri	
1	1	3	10	2	001	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	
1	1	3	11	1	001	Piutang Pajak Parkir	
1	1	3	1	12	001	Piutang Pajak Air Tanah	
1	1	3	13	1	001	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	
1	1	3	14	1	001	Piutang Pajak Asbes	
1	1	3	14	2	001	Piutang Pajak Batu Tulis	
1	1	3	14	3	001	Piutang Pajak Batu Setengah Permata	
1	1	3	14	4	001	Piutang Pajak Batu Kapur	
1	1	3	14	5	001	Piutang Pajak Batu Apung	
1	1	3	14	6	001	Piutang Pajak Batu Permata	
1	1	3	14	7	001	Piutang Pajak Bentonit	
1	1	3	14	8	001	Piutang Pajak Dolomit	
1	1	3	14	9	001	Piutang Pajak Felspar	
1	1	3	14	10	001	Piutang Pajak Garam Batu (Halite)	
1	1	3	14	11	001	Piutang Pajak Grafit	
1	1	3	14	12	001	Piutang Pajak Granit/Andesit	
1	1	3	14	13	001	Piutang Pajak Gips	
1	1	3	14	14	001	Piutang Pajak Kalsit	
1	1	3	14	15	001	Piutang Pajak Kaolin	
1	1	3	14	16	001	Piutang Pajak Leusit	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	1	3	14	17	001	Piutang Pajak Magnesit	
1	1	3	14	18	001	Piutang Pajak Mika	
1	1	3	14	1	001	Piutang Pajak Marmer	
1	1	3	14	20	001	Piutang Pajak Nitrat	
1	1	3	14	21	001	Piutang Pajak Opsidien	
1	1	3	14	22	001	Piutang Pajak Oker	
1	1	3	14	23	001	Piutang Pajak Pasir dan Kerikil	
1	1	3	14	24	001	Piutang Pajak Pasir Kuarsa	
1	1	3	14	25	001	Piutang Pajak Perlit	
1	1	3	14	26	001	Piutang Pajak Phospat	
1	1	3	14	27	001	Piutang Pajak Talk	
1	1	3	14	28	001	Piutang Pajak Tanah Serap (<i>Fullers earth</i>)	
1	1	3	14	29	001	Piutang Pajak Tanah Diatome	
1	1	3	14	30	001	Piutang Pajak Tanah Liat	
1	1	3	14	31	001	Piutang Pajak Tawas (Alum)	
1	1	3	14	32	001	Piutang Pajak Tras	
1	1	3	14	33	001	Piutang Pajak Yarosif	
1	1	3	14	34	001	Piutang Pajak Zeolit	
1	1	3	14	35	001	Piutang Pajak Basal	
1	1	3	14	36	001	Piutang Pajak Trakit	
1	1	3	14	37	001	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	
1	1	3	15	1	001	Piutang PBBP2	
1	1	3	16	1	001	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	
1	1	3	16	2	001	Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru	
1	1	4	1	1	001	Piutang Retribusi Puskesmas	
1	1	4	1	1	002	Piutang Retribusi Puskesmas Keliling	
1	1	4	1	1	003	Piutang Retribusi Pelayanan Puskesmas Pembantu	
1	1	4	1	1	004	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	
1	1	4	1	1	005	Piutang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	
1	1	4	1	1	006	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis	
1	1	4	1	2	001	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	
1	1	4	1	3	001	Piutang Retribusi Pelayanan Penguburan/ Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	
1	1	4	1	3	002	Piutang Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	
1	1	4	1	4	001	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
1	1	4	1	5	001	Piutang Retribusi Pelataran	
1	1	4	1	5	002	Piutang Retribusi Los	
1	1	4	1	5	003	Piutang Retribusi Kios	
1	1	4	1	6	001	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
1	1	4	1	7	001	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	
1	1	4	1	7	002	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Alat Penanggulangan Kebakaran	
1	1	4	1	7	003	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Alat Penyelamatan Jiwa	
1	1	4	1	8	001	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)	
1	1	4	1	8	002	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Foto	
1	1	4	1	8	003	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Digital	
1	1	4	1	8	004	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Tematik	
1	1	4	1	8	005	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)	
1	1	4	1	9	001	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
1	1	4	1	10	001	Piutang Retribusi Rumah Tangga	
1	1	4	1	10	002	Piutang Retribusi Perkantoran	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	1	4	1	10	003	Piutang Retribusi Industri	
1	1	4	1	11	001	Piutang Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	
1	1	4	1	11	002	Piutang Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus	
1	1	4	1	12	001	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis	
1	1	4	1	12	002	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis	
1	1	4	1	12	003	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	
1	1	4	1	13	001	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	
1	1	4	2	1	001	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	
1	1	4	2	1	002	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	
1	1	4	2	1	003	Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	
1	1	4	2	1	004	Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium	
1	1	4	2	1	005	Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan	
1	1	4	2	1	006	Piutang Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	
1	1	4	2	2	001	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	
1	1	4	2	2	002	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	
1	1	4	2	3	001	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	
1	1	4	2	3	002	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	
1	1	4	2	4	001	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	
1	1	4	2	4	002	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	
1	1	4	2	4	003	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	
1	1	4	2	5	001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	
1	1	4	2	6	001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	
1	1	4	2	7	001	Piutang Hewan	
1	1	4	2	8	001	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	
1	1	4	2	9	001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	
1	1	4	2	10	001	Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	
1	1	4	2	10	002	Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang	
1	1	4	2	11	001	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	
1	1	4	2	11	002	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	
1	1	4	2	11	003	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	
1	1	4	2	11	004	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	
1	1	4	3	1	001	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
1	1	4	3	2	001	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
1	1	4	3	3	001	Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	
1	1	4	3	4	001	Piutang Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	
1	1	4	3	4	002	Piutang Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	
1	1	4	3	5	001	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu	
1	1	4	3	5	002	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu	
1	1	4	3	5	003	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu	
1	1	4	3	6	001	Piutang Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	
1	1	5	1	1	001	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN ...	
1	1	5	1	1	002	Dst ...	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	1	5	2	1	001	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) ...	
1	1	5	2	1	002	Dst ...	
1	1	5	2	2	001	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha) ...	
1	1	5	2	2	002	Dst ...	
1	1	5	2	3	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) ...	
1	1	5	2	3	002	Dst ...	
1	1	5	2	4	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Limbah) ...	
1	1	5	2	4	002	Dst ...	
1	1	5	2	5	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Sanitasi) ...	
1	1	5	2	5	002	Dst ...	
1	1	6	1	1	001	Piutang Hasil Penjualan Tanah	
1	1	6	1	2	001	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar	
1	1	6	1	2	002	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan	
1	1	6	1	2	003	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	1	6	1	2	004	Piutang Hasil Penjualan Alat Pertanian	
1	1	6	1	2	005	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	1	6	1	2	006	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
1	1	6	1	2	007	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	1	6	1	2	008	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium	
1	1	6	1	2	10	Piutang Hasil Penjualan Komputer	
1	1	6	1	2	11	Piutang Hasil Penjualan Alat Eksplorasi	
1	1	6	1	2	12	Piutang Hasil Penjualan Alat Pengeboran	
1	1	6	1	2	13	Piutang Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	
1	1	6	1	2	14	Piutang Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi	
1	1	6	1	2	15	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja	
1	1	6	1	2	16	Piutang Hasil Penjualan Alat Peraga	
1	1	6	1	2	17	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi	
1	1	6	1	2	18	Piutang Hasil Penjualan Rambu-Rambu	
1	1	6	1	2	19	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Olahraga	
1	1	6	1	3	001	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung	
1	1	6	1	3	002	Piutang Hasil Penjualan Monumen	
1	1	6	1	3	003	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Menara	
1	1	6	1	3	004	Piutang Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	1	6	1	4	001	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan	
1	1	6	1	4	002	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air	
1	1	6	1	4	003	Piutang Hasil Penjualan Instalasi	
1	1	6	1	4	004	Piutang Hasil Penjualan Jaringan	
1	1	6	1	5	001	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan	
1	1	6	1	5	002	Piutang Hasil Penjualan Barang Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
1	1	6	1	5	003	Piutang Hasil Penjualan Hewan	
1	1	6	1	5	004	Piutang Hasil Penjualan Biota Perairan	
1	1	6	1	5	005	Piutang Hasil Penjualan Tanaman	
1	1	6	1	5	006	Piutang Budaya	
1	1	6	1	5	007	Piutang Hasil Renovasi	
1	1	6	1	6	001	Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	
1	1	6	1	6	002	Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain- Lain	
1	1	6	2	1	001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah	
1	1	6	2	2	001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	1	6	2	2	002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan	
1	1	6	2	2	003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	1	6	2	2	004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian	
1	1	6	2	2	005	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	1	6	2	2	006	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
1	1	6	2	2	007	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	1	6	2	2	008	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium	
1	1	6	2	2	10	Piutang Hasil Komputer	
1	1	6	2	2	11	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi	
1	1	6	2	2	12	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran	
1	1	6	2	2	13	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	
1	1	6	2	2	14	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi	
1	1	6	2	2	15	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja	
1	1	6	2	2	16	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga	
1	1	6	2	2	17	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi	
1	1	6	2	2	18	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu	
1	1	6	2	2	19	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga	
1	1	6	2	3	001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung	
1	1	6	2	3	002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen	
1	1	6	2	3	003	Piutang Hasil Selisih Bangunan Menara	
1	1	6	2	3	004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	1	6	2	4	001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan	
1	1	6	2	4	002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air	
1	1	6	2	4	003	Piutang Instalasi	
1	1	6	2	4	004	Piutang Jaringan	
1	1	6	2	5	001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan	
1	1	6	2	5	002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
1	1	6	2	5	003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan	
1	1	6	2	5	004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan	
1	1	6	2	5	005	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman	
1	1	6	2	5	006	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya	
1	1	6	2	5	007	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi	
1	1	6	2	6	001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	
1	1	6	2	6	002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	
1	1	6	3	1	001	Piutang Hasil Sewa BMD	
1	1	6	3	2	001	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	
1	1	6	3	3	001	Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah	
1	1	6	3	4	001	Piutang Hasil dari Bangun Serah Guna	
1	1	6	3	5	001	Piutang Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	
1	1	6	4	1	001	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	
1	1	6	5	1	001	Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah	
1	1	6	5	2	001	Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara	
1	1	6	5	3	001	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan ...	
1	1	6	5	3	002	Dst ...	
1	1	6	5	4	001	Piutang Jasa Giro pada BLUD ...	
1	1	6	5	4	002	Dst ...	
1	1	6	5	5	001	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS ...	
1	1	6	5	5	002	Dst ...	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	1	6	5	6	001	Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP ...	
1	1	6	5	6	002	Dst ...	
1	1	6	6	1	001	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
1	1	6	7	1	001	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	
1	1	6	8	1	001	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	
1	1	6	8	2	001	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	
1	1	6	9	1	001	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	
1	1	6	10	1	001	Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	
1	1	6	11	1	001	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
1	1	6	12	1	001	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	
1	1	6	12	1	002	Piutang Pendapatan Penumpang-Jeep	
1	1	6	12	1	003	Piutang Pendapatan Penumpang-Minibus	
1	1	6	12	1	004	Piutang Microbus	
1	1	6	12	1	005	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus	
1	1	6	12	1	006	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	
1	1	6	12	1	007	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	
1	1	6	12	1	008	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	
1	1	6	12	1	009	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	
1	1	6	12	1	10	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua	
1	1	6	12	1	11	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Tiga	
1	1	6	12	1	12	Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	
1	1	6	12	1	13	Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	
1	1	6	12	1	14	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga	
1	1	6	12	2	001	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	
1	1	6	12	2	002	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	
1	1	6	12	2	003	Piutang Pendapatan Penumpang-Minibus	
1	1	6	12	2	004	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus- Microbus	
1	1	6	12	2	005	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus- Bus	
1	1	6	12	2	006	Piutang Pendapatan Barang/Beban-Pick Up	
1	1	6	12	2	007	Piutang Pendapatan Denda Barang/Beban-Light Truck	
1	1	6	12	2	008	Piutang Pendapatan Barang/Beban-Truck	
1	1	6	12	2	009	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	
1	1	6	12	2	10	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	
1	1	6	12	2	11	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	
1	1	6	12	2	12	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	
1	1	6	12	2	13	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	
1	1	6	12	2	14	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga	
1	1	6	12	3	001	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Bensin	
1	1	6	12	3	002	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Solar	
1	1	6	12	3	003	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Gas	
1	1	6	12	3	004	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Lainnya	
1	1	6	12	4	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	
1	1	6	12	5	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rokok	
1	1	6	12	6	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	
1	1	6	12	6	002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Motel	
1	1	6	12	6	003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Losmen	
1	1	6	12	6	004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	1	6	12	6	005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata	
1	1	6	12	6	006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan	
1	1	6	12	6	007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya	
1	1	6	12	6	008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	
1	1	6	12	7	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	
1	1	6	12	7	002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	
1	1	6	12	7	003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	
1	1	6	12	7	004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	
1	1	6	12	7	005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	
1	1	6	12	7	006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya	
1	1	6	12	7	007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	
1	1	6	12	8	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	
1	1	6	12	8	002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	
1	1	6	12	8	003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	
1	1	6	12	8	004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pameran	
1	1	6	12	8	005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	
1	1	6	12	8	006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	
1	1	6	12	8	007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	
1	1	6	12	8	008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	
1	1	6	12	8	009	Piutang Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (<i>fitness center</i>)	
1	1	6	12	8	10	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	
1	1	6	12	9	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	
1	1	6	12	9	002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	
1	1	6	12	9	003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker	
1	1	6	12	9	004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran	
1	1	6	12	9	005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	
1	1	6	12	9	006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara	
1	1	6	12	9	007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung	
1	1	6	12	9	008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara	
1	1	6	12	9	009	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/Slide	
1	1	6	12	9	10	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan	
1	1	6	12	10	001	Piutang Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	
1	1	6	12	10	002	Piutang Penerangan Jalan Sumber Lain	
1	1	6	12	11	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	
1	1	6	12	12	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	
1	1	6	12	13	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	
1	1	6	12	14	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Asbes	
1	1	6	12	14	002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis	
1	1	6	12	14	003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata	
1	1	6	12	14	004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur	
1	1	6	12	14	005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Apung	
1	1	6	12	14	006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Permata	
1	1	6	12	14	007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bentonit	
1	1	6	12	14	008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Dolomit	
1	1	6	12	14	009	Piutang Pendapatan Denda Pajak Felspar	
1	1	6	12	14	10	Piutang Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (Halite)	
1	1	6	12	14	11	Piutang Pendapatan Denda Pajak Grafit	
1	1	6	12	14	12	Piutang Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	1	6	12	14	13	Piutang Pendapatan Denda Pajak Gips	
1	1	6	12	14	14	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kalsit	
1	1	6	12	14	15	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kaolin	
1	1	6	12	14	16	Piutang Pendapatan Denda Pajak Leusit	
1	1	6	12	14	17	Piutang Pendapatan Denda Pajak Magnesit	
1	1	6	12	14	18	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mika	
1	1	6	12	14	19	Piutang Pendapatan Denda Pajak Marmer	
1	1	6	12	14	20	Piutang Pendapatan Denda Pajak Nitrat	
1	1	6	12	14	21	Piutang Pendapatan Denda Pajak Opsidien	
1	1	6	12	14	22	Piutang Pendapatan Denda Pajak Oker	
1	1	6	12	14	23	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil	
1	1	6	12	14	24	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa	
1	1	6	12	14	25	Piutang Pendapatan Denda Pajak Perlit	
1	1	6	12	14	26	Piutang Pendapatan Denda Pajak Phospat	
1	1	6	12	14	27	Piutang Pendapatan Denda Pajak Talk	
1	1	6	12	14	28	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	
1	1	6	12	14	29	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome	
1	1	6	12	14	30	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat	
1	1	6	12	14	31	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)	
1	1	6	12	14	32	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tras	
1	1	6	12	14	33	Piutang Pendapatan Denda Pajak Yarosif	
1	1	6	12	14	34	Piutang Pendapatan Denda Pajak Zeolit	
1	1	6	12	14	35	Piutang Pendapatan Denda Pajak Basal	
1	1	6	12	14	36	Piutang Pendapatan Denda Pajak Trakit	
1	1	6	12	14	37	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	
1	1	6	12	15	001	Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan,Pedesaan dan Perkotaan	
1	1	6	12	16	001	Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemindahan Hak	
1	1	6	12	16	002	Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemberian Hak Baru	
1	1	6	13	1	001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan	
1	1	6	13	1	002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
1	1	6	13	1	003	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
1	1	6	13	1	004	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
1	1	6	13	1	005	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	
1	1	6	13	1	006	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
1	1	6	13	1	007	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
1	1	6	13	1	008	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	
1	1	6	13	1	009	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
1	1	6	13	1	10	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair	
1	1	6	13	1	11	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	
1	1	6	13	1	12	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan	
1	1	6	13	1	13	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	
1	1	6	13	2	001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
1	1	6	13	2	002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	
1	1	6	13	2	003	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan	
1	1	6	13	2	004	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Terminal	
1	1	6	13	2	005	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat	
1	1	6	13	2	006	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	1	6	13	2	007	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan	
1	1	6	13	2	008	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	
1	1	6	13	2	009	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
1	1	6	13	2	10	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air	
1	1	6	13	2	11	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
1	1	6	13	3	001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
1	1	6	13	3	002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
1	1	6	13	3	003	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	
1	1	6	13	3	004	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan	
1	1	6	13	3	005	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	
1	1	6	13	3	006	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
1	1	6	14	1	001	Piutang Hasil Eksekusi Pengadaan Barang/Jasa	
1	1	6	15	1	001	Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	
1	1	6	15	2	001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan	
1	1	6	15	3	001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	
1	1	6	15	4	001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	
1	1	6	15	5	001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	
1	1	6	15	6	001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM	
1	1	6	15	7	001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKN	
1	1	6	16	1	001	Piutang Pendapatan BLUD ...	
1	1	6	16	1	002	Dst ...	
1	1	6	17	1	001	Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	
1	1	6	17	2	001	Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	
1	1	6	18	1	001	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	
1	1	6	19	1	001	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
1	1	6	20	1	001	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	
1	1	6	21	1	001	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah ...	
1	1	6	21	1	002	Dst ...	
1	1	6	22	1	001	Pendapatan Zakat	
1	1	7	1	1	001	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	
1	1	7	1	1	002	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	
1	1	7	1	1	003	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	
1	1	7	1	1	004	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	
1	1	7	1	1	005	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi	
1	1	7	1	1	006	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi	
1	1	7	1	1	007	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara- <i>Landrent</i>	
1	1	7	1	1	008	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara- <i>Royalty</i>	
1	1	7	1	1	009	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH	
1	1	7	1	1	10	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-IIUPH	
1	1	7	1	1	11	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-DR	
1	1	7	1	1	12	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Perikanan	
1	1	7	1	1	13	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Panas Bumi	
1	1	7	1	2	001	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU	
1	1	7	1	2	002	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	
1	1	7	1	3	001	Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SD	
1	1	7	1	3	002	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	1	7	1	3	003	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	
1	1	7	1	3	004	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SDLB/SMPLB/SMALB	
1	1	7	1	3	005	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	
1	1	7	0	3	006	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	
1	1	7	1	3	007	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Olahraga	
1	1	7	1	3	008	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	
1	1	7	1	3	009	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	
1	1	7	1	3	10	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler	
1	1	7	1	3	11	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler	
1	1	7	1	3	12	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	
1	1	7	1	3	13	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	
1	1	7	1	3	14	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	
1	1	7	1	3	15	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB	
1	1	7	1	3	16	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Reguler	
1	1	7	1	3	17	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Reguler	
1	1	7	1	3	18	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Reguler	
1	1	7	1	3	19	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Reguler	
1	1	7	1	3	20	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	
1	1	7	1	3	21	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Pelayanan Kesehatan Rujukan	
1	1	7	1	3	22	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Penurunan Stunting	
1	1	7	1	3	23	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Pengendalian Penyakit	
1	1	7	1	3	24	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-BAPELKES	
1	1	7	1	3	25	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	
1	1	7	1	3	26	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	
1	1	7	1	3	27	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	
1	1	7	1	3	28	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan	
1	1	7	1	3	29	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang	
1	1	7	1	3	30	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	
1	1	7	1	3	31	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan- Lingkungan Hidup	
1	1	7	1	3	32	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan- Kehutanan	
1	1	7	1	3	33	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-Penguatan Puskesmas-DTPK	
1	1	7	1	3	34	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-Penguatan Pembangunan Rumah Sakit Pratama	
1	1	7	1	3	35	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi	
1	1	7	1	3	36	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi	
1	1	7	1	3	37	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi	
1	1	7	1	3	38	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi-Afirmasi	
1	1	7	1	3	39	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD	
1	1	7	1	3	40	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP	
1	1	7	1	3	41	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA	
1	1	7	1	4	001	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Reguler	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	1	7	1	4	002	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Afirmasi	
1	1	7	1	4	003	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Kinerja	
1	1	7	1	4	004	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP PAUD	
1	1	7	1	4	005	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	
1	1	7	1	4	006	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-TPG PNSD	
1	1	7	1	4	007	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	
1	1	7	1	4	008	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-TKG PNSD	
1	1	7	1	4	009	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	
1	1	7	1	4	10	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	
1	1	7	1	4	11	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- BOKKB-BOK	
1	1	7	1	4	12	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- BOKKB-Akreditasi RS	
1	1	7	1	4	13	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- BOKKB-Akreditasi Puskesmas	
1	1	7	1	4	14	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- BOKKB-Akreditasi Labkesda	
1	1	7	1	4	15	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- BOKKB-Jaminan Persalinan	
1	1	7	1	4	16	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- BOKKB-BOKB	
1	1	7	1	4	17	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- PK2UKM	
1	1	7	1	4	18	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	
1	1	7	1	4	19	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	
1	1	7	1	4	20	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana BLPS	
1	1	7	2	1	001	Piutang DID	
1	1	7	3	1	001	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
1	1	7	3	2	001	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat	
1	1	7	3	3	001	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	
1	1	7	3	4	001	Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua	
1	1	7	3	5	001	Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua Barat	
1	1	7	4	1	001	Piutang Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
1	1	7	5	1	001	Piutang Dana Desa	
1	1	8	1	1	001	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	
1	1	8	1	1	002	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
1	1	8	1	1	003	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
1	1	8	1	1	004	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	
1	1	8	1	1	005	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	
1	1	8	2	1	001	Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi ...	
1	1	8	2	1	002	Dst ...	
1	1	8	2	2	001	Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi ...	
1	1	8	2	2	002	Dst ...	
1	1	8	2	3	001	Piutang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota ...	
1	1	8	2	3	002	Dst ...	
1	1	8	2	4	001	Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota ...	
1	1	8	2	4	002	Dst ...	
1	1	8	3	1	001	Piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
1	1	8	3	1	002	Dst ...	
1	1	8	3	2	001	Piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah ...	
1	1	8	3	2	002	Dst ...	
1	1	8	3	3	001	Piutang Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri ...	
1	1	8	3	3	002	Dst ...	
1	1	8	3	4	001	Piutang Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri ...	
1	1	8	3	4	002	Dst ...	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	1	8	3	5	001	Piutang Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri ...	
1	1	8	3	5	002	Dst ...	
1	1	8	3	6	001	Piutang Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri ...	
1	1	8	3	6	002	Dst ...	
1	1	8	3	7	001	Piutang Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri ...	
1	1	8	3	7	002	Dst ...	
1	1	8	4	1	001	Piutang Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis ...	
1	1	8	4	1	002	Dst ...	
1	1	8	5	1	001	Piutang Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana ...	
1	1	8	6	1	001	Piutang Pendapatan Hibah Dana BOS...	
1	1	8	7	1	001	Piutang Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah...	
1	1	8	7	2	001	Piutang Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya...	
1	1	8	7	3	001	Piutang Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN...	
1	1	8	7	4	001	Piutang Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD...	
1	1	8	7	5	001	Piutang Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia...	
1	1	8	7	6	001	Piutang Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik...	
1	1	9	1	1	001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat ...	
1	1	9	1	1	002	Dst ...	
1	1	9	1	2	001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah ...	
1	1	9	1	2	002	Dst ...	
1	1	9	1	3	001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD ...	
1	1	9	1	3	002	Dst ...	
1	1	9	1	4	001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN ...	
1	1	9	1	4	002	Dst ...	
1	1	9	1	5	001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi ...	
1	1	9	1	5	002	Dst ...	
1	1	9	1	6	001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat	
1	1	9	1	7	001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada BLUD ...	
1	1	9	1	7	002	Dst ...	
1	1	9	2	1	001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat ...	
1	1	9	2	1	002	Dst ...	
1	1	9	2	2	001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah ...	
1	1	9	2	2	002	Dst ...	
1	1	9	2	3	001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD ...	
1	1	9	2	3	002	Dst ...	
1	1	9	2	4	001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMN ...	
1	1	9	2	4	001	Dst ...	
1	1	9	2	5	001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi ...	
1	1	9	2	5	002	Dst ...	
1	1	9	2	6	001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	
1	1	9	2	7	001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang BLUD ...	
1	1	9	2	7	002	Dst ...	
1	1	9	3	1	001	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	
1	1	9	3	2	001	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
						Perorangan Dinas	
1	1	9	4	1	001	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	
1	1	9	4	2	001	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	
1	1	9	5	1	001	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	
1	1	10	1	1	001	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	
1	1	10	1	2	001	Penyisihan Piutang Retribusi	
1	1	10	1	3	001	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1	1	10	1	4	001	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	
1	1	10	1	5	001	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	
1	1	10	1	6	001	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	
1	1	10	1	7	001	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	
1	1	11	1	1	001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	
1	1	10	2	2	001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain	
1	1	10	2	3	001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bank	
1	1	10	2	4	001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
1	1	10	2	5	001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman BLUD	
1	1	10	2	6	001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
1	1	10	2	7	001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1	1	10	2	8	001	Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka	
1	1	11	1	1	001	Beban Dibayar Dimuka	
1	1	12	1	1	001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	
1	1	12	1	1	002	Bahan Kimia	
1	1	12	1	1	003	Bahan Peledak	
1	1	12	1	1	004	Bahan Bakar dan Pelumas	
1	1	12	1	1	005	Bahan Baku	
1	1	12	1	1	006	Bahan Kimia Nuklir	
1	1	12	1	1	007	Barang Dalam Proses	
1	1	12	1	1	008	Bahan/Bibit Tanaman	
1	1	12	1	1	009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	
1	1	12	1	1	10	Isi Tabung Gas	
1	1	12	1	1	11	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	
1	1	12	1	1	12	Bahan Lainnya	
1	1	12	1	2	001	Suku Cadang Alat Angkutan	
1	1	12	1	2	002	Suku Cadang Alat Besar	
1	1	12	1	2	003	Suku Cadang Alat Kedokteran	
1	1	12	1	2	004	Suku Cadang Alat Laboratorium	
1	1	12	1	2	005	Suku Cadang Alat Pemancar	
1	1	12	1	2	006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	
1	1	12	1	2	007	Suku Cadang Alat Pertanian	
1	1	12	1	2	008	Suku Cadang Alat Bengkel	
1	1	12	1	2	009	Suku Cadang Alat Persenjataan	
1	1	12	1	2	10	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	
1	1	12	1	2	11	Suku Cadang Lainnya	
1	1	12	1	3	001	Alat Tulis Kantor	
1	1	12	1	3	002	Kertas dan Cover	
1	1	12	1	3	003	Bahan Cetak	
1	1	12	1	3	004	Benda Pos	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	1	12	1	3	005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	
1	1	12	1	3	006	Bahan Komputer	
1	1	12	1	3	007	Perabot Kantor	
1	1	12	1	3	008	Alat Listrik	
1	1	12	1	3	009	Perlengkapan Dinas	
1	1	12	1	3	10	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	
1	1	12	1	3	11	Perlengkapan Pendukung Olahraga	
1	1	12	1	3	12	Suvenir/Cendera Mata	
1	1	12	1	3	13	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	
1	1	12	1	4	001	Obat	
1	1	12	1	4	002	Obat-obatan Lainnya	
1	1	12	1	5	001	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	
1	1	12	1	5	002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	
1	1	12	1	6	001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	
1	1	12	1	6	002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	
1	1	12	1	7	001	Natura	
1	1	12	1	7	002	Pakan	
1	1	12	1	7	003	Natura dan Pakan Lainnya	
1	1	12	1	8	001	Persediaan Penelitian Biologi	
1	1	12	1	8	002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	
1	1	12	1	8	003	Persediaan Penelitian Teknologi	
1	1	12	1	8	004	Persediaan Penelitian Lainnya	
1	1	12	1	9	001	Persediaan Dalam Proses	
1	1	12	1	9	002	Persediaan Dalam Proses Lainnya	
1	1	12	2	1	001	Komponen Jembatan Baja	
1	1	12	2	1	002	Komponen Jembatan Pratekan	
1	1	12	2	1	003	Komponen Peralatan	
1	1	12	2	1	004	Komponen Rambu-Rambu	
1	1	12	2	1	005	Attachment	
1	1	12	2	1	006	Komponen Lainnya	
1	1	12	2	2	001	Pipa Air Besi Tuang (DCI)	
1	1	12	2	2	002	Pipa Asbes Semen (ACP)	
1	1	12	2	2	003	Pipa Baja	
1	1	12	2	2	004	Pipa Beton Pratekan	
1	1	12	2	2	005	Pipa Fiber Glass	
1	1	12	2	2	006	Pipa Plastik PVC (UPVC)	
1	1	12	2	2	007	Pipa Lainnya	
1	1	12	3	1	001	Komponen Bekas	
1	1	12	3	1	002	Pipa Bekas	
1	1	12	3	1	003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	
1	1	13	1	1	001	RK SKPD ...	
1	1	13	1	1	002	Dst ...	
1	2	1	1	1	001	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara ...	
1	2	1	1	1	002	Dst ...	
1	2	1	2	1	001	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah ...	
1	2	1	2	1	002	Dst ...	
1	2	1	3	1	001	Investasi dalam Obligasi	
1	2	1	4	1	001	Investasi dalam Proyek Pembangunan ...	
1	2	1	4	1	002	Dst ...	
1	2	1	4	2	001	Investasi dalam Proyek Pembangunan ...	
1	2	1	4	2	002	Dst ...	
1	2	1	5	1	001	Dana Bergulir ...	
1	2	1	5	1	002	Dst ...	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	2	1	5	1	001	Dana Bergulir kepada Masyarakat	
1	2	1	5	1	001	Dana Bergulir kepada BLUD	
1	2	2	1	1	001	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ...	
1	2	2	1	1	002	Dst ...	
1	2	2	1	1	001	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ...	
1	2	2	1	1	002	Dst ...	
1	2	2	2	1	001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat...	
1	2	2	2	1	002	Dst ...	
1	2	2	2	2	001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah ...	
1	2	2	2	2	001	Dst ...	
1	2	2	2	3	001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD ...	
1	2	2	2	3	002	Dst ...	
1	2	2	2	4	001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN ...	
1	2	2	2	4	002	Dst ...	
1	2	2	2	5	001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi ...	
1	2	2	2	5	002	Dst ...	
1	2	2	2	6	001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	
1	3	1	1	1	001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	
1	3	1	1	1	002	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	
1	3	1	1	1	003	Tanah untuk Bangunan Industri	
1	3	1	1	1	004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	
1	3	1	1	1	005	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	
1	3	1	1	1	006	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	
1	3	1	1	1	007	Tanah Persil Lainnya	
1	3	1	1	2	001	Tanah Non Persil	
1	3	1	1	2	002	Tanah Basah	
1	3	1	1	2	003	Tanah Kering	
1	3	1	1	2	004	Tanah Perkebunan	
1	3	1	1	2	005	Tanah Hutan	
1	3	1	1	2	006	Tanah Tandus	
1	3	1	1	2	007	Tanah Padang Alang-Alang/Rumput	
1	3	1	1	2	008	Tanah Pertanian	
1	3	1	1	2	009	Tanah Pertambangan	
1	3	1	1	2	10	Tanah Non Persil Lainnya	
1	3	1	1	3	001	Tanah Lapangan Olahraga	
1	3	1	1	3	002	Tanah Lapangan Parkir	
1	3	1	1	3	003	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	
1	3	1	1	3	004	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	
1	3	1	1	3	005	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	
1	3	1	1	3	006	Tanah Lapangan Terbang	
1	3	1	1	3	007	Tanah untuk Jalan	
1	3	1	1	3	008	Tanah untuk Bangunan Air	
1	3	1	1	3	009	Tanah untuk Bangunan Instalasi	
1	3	1	1	3	10	Tanah untuk Bangunan Jaringan	
1	3	1	1	3	11	Tanah untuk Bangunan Bersejarah	
1	3	1	1	3	12	Tanah untuk Makam	
1	3	1	1	3	13	Tanah untuk Taman	
1	3	1	1	3	14	Tanah untuk Latihan	
1	3	1	1	3	15	Tanah Daerah Pertahanan	
1	3	1	1	3	16	Tanah Lapangan PBB	
1	3	1	1	3	17	Tanah Kampung	
1	3	1	1	3	18	<i>Emplasment</i>	
1	3	1	1	3	19	Lapangan Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	2	1	1	001	<i>Tractor</i>	
1	3	2	1	1	002	<i>Grader</i>	
1	3	2	1	1	003	<i>Excavator</i>	
1	3	2	1	1	004	<i>Pile Driver</i>	
1	3	2	1	1	005	<i>Hauler</i>	
1	3	2	1	1	006	<i>Asphalt Equipment</i>	
1	3	2	1	1	007	<i>Compacting Equipment</i>	
1	3	2	1	1	008	<i>Aggregate and Concrete Equipment</i>	
1	3	2	1	1	009	<i>Loader</i>	
1	3	2	1	1	10	Alat Pengangkat	
1	3	2	1	1	11	Mesin Proses	
1	3	2	1	1	12	Alat Besar Darat Lainnya	
1	3	2	1	2	001	<i>Dredger</i>	
1	3	2	1	2	002	<i>Floating Excavator</i>	
1	3	2	1	2	003	<i>Amphibi Dredger</i>	
1	3	2	1	2	004	Kapal Tarik	
1	3	2	1	2	005	Mesin Proses Apung	
1	3	2	1	2	006	Alat Besar Apung Lainnya	
1	3	2	1	3	001	Alat Penarik	
1	3	2	1	3	002	<i>Feeder</i>	
1	3	2	1	3	003	<i>Compressor</i>	
1	3	2	1	3	004	<i>Electric Generating Set</i>	
1	3	2	1	3	005	Pompa	
1	3	2	1	3	006	Mesin Bor	
1	3	2	1	3	007	Unit Pemeliharaan Lapangan	
1	3	2	1	3	008	Alat Pengolahan Air Kotor	
1	3	2	1	3	009	Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>	
1	3	2	1	3	10	Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	
1	3	2	1	3	11	Mesin <i>Tatoo</i>	
1	3	2	1	3	12	Perlengkapan Kebakaran Hutan	
1	3	2	1	3	13	Peralatan Selam	
1	3	2	1	3	14	Peralatan SAR <i>Mountenering</i>	
1	3	2	1	3	15	Peralatan Intelijen	
1	3	2	1	3	16	Alat Bantu Lainnya	
1	3	2	2	1	001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	
1	3	2	2	1	002	Kendaraan Bermotor Penumpang	
1	3	2	2	1	003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
1	3	2	2	1	004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	
1	3	2	2	1	005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	
1	3	2	2	1	006	Kendaraan Bermotor Khusus	
1	3	2	2	1	007	Kendaraan Tempur	
1	3	2	2	1	008	Alat Angkutan Kereta Rel	
1	3	2	2	1	009	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	
1	3	2	2	2	001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	
1	3	2	2	2	002	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	
1	3	2	2	2	003	Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	
1	3	2	2	2	004	Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	
1	3	2	2	3	001	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	
1	3	2	2	3	002	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	
1	3	2	2	3	003	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	
1	3	2	2	3	004	Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	
1	3	2	2	3	005	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	
1	3	2	2	4	001	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	2	2	4	002	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	
1	3	2	2	4	003	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	
1	3	2	2	4	004	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	
1	3	2	2	5	001	Kapal Terbang	
1	3	2	2	5	002	Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	
1	3	2	3	1	001	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	
1	3	2	3	1	002	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	
1	3	2	3	1	003	Perkakas Bengkel Listrik	
1	3	2	3	1	004	Perkakas Bengkel <i>Service</i>	
1	3	2	3	1	005	Perkakas Pengangkat Bermesin	
1	3	2	3	1	006	Perkakas Bengkel Kayu	
1	3	2	3	1	007	Perkakas Bengkel Khusus	
1	3	2	3	1	008	Peralatan Las	
1	3	2	3	1	009	Perkakas Pabrik Es	
1	3	2	3	1	10	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	
1	3	2	3	2	001	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	
1	3	2	3	2	002	Perkakas Bengkel Listrik	
1	3	2	3	2	003	Perkakas Bengkel <i>Service</i>	
1	3	2	3	2	004	Perkakas Pengangkat	
1	3	2	3	2	005	Perkakas <i>Standard (Standard Tools)</i>	
1	3	2	3	2	006	Perkakas Khusus (<i>Special Tools</i>)	
1	3	2	3	2	007	Perkakas Bengkel Kerja	
1	3	2	3	2	008	Peralatan Tukang Besi	
1	3	2	3	2	009	Peralatan Tukang Kayu	
1	3	2	3	2	10	Peralatan Tukang Kayu	
1	3	2	3	2	11	Peralatan Ukur, Gip dan <i>Feeting</i>	
1	3	2	3	2	12	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	
1	3	2	3	2	13	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	
1	3	2	3	3	001	Alat Ukur Universal	
1	3	2	3	3	002	Alat Ukur/Tes Inteligensia	
1	3	2	3	3	003	Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian	
1	3	2	3	3	004	Alat Ukur/Tes Klinis Lain	
1	3	2	3	3	005	Alat Kalibrasi	
1	3	2	3	3	006	<i>Oscilloscope</i>	
1	3	2	3	3	007	<i>Universal Tester</i>	
1	3	2	3	3	008	Alat Ukur/Pembanding	
1	3	2	3	3	009	Alat Ukur Lain-Lain	
1	3	2	3	3	10	Alat Timbangan/Biara	
1	3	2	3	3	11	Anak Timbangan/Biara	
1	3	2	3	3	12	Takaran Kering	
1	3	2	3	3	13	Takaran Bahan Bangunan	
1	3	2	3	3	14	Takaran Lainnya	
1	3	2	3	3	15	Alat Penguji Kendaraan Bermotor	
1	3	2	3	3	16	<i>Specific Set</i>	
1	3	2	3	3	17	Alat Pengukur Keadaan Alam	
1	3	2	3	3	18	Alat Pengukur Penglihatan	
1	3	2	3	3	19	Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu	
1	3	2	3	3	20	Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>	
1	3	2	3	3	21	Alat Ukur Lainnya	
1	3	2	4	1	001	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	
1	3	2	4	1	002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	
1	3	2	4	1	003	Alat Panen	
1	3	2	4	1	004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	2	4	1	005	Alat Laboratorium Pertanian	
1	3	2	4	1	006	Alat <i>Processing</i>	
1	3	2	4	1	007	Alat Pasca Panen	
1	3	2	4	1	008	Alat Produksi Perikanan	
1	3	2	4	1	009	Alat-Alat Peternakan	
1	3	2	4	1	10	Alat Pengolahan Lainnya	
1	3	2	5	1	001	Mesin Ketik	
1	3	2	5	1	002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	
1	3	2	5	1	003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	
1	3	2	5	1	004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	
1	3	2	5	1	005	Alat Kantor Lainnya	
1	3	2	5	2	001	Meubelair	
1	3	2	5	2	002	Alat Pengukur Waktu	
1	3	2	5	2	003	Alat Pembersih	
1	3	2	5	2	004	Alat Pendingin	
1	3	2	5	2	005	Alat Dapur	
1	3	2	5	2	006	Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	
1	3	2	5	2	007	Alat Pemadam Kebakaran	
1	3	2	5	3	001	Meja Kerja Pejabat	
1	3	2	5	3	002	Meja Rapat Pejabat	
1	3	2	5	3	003	Kursi Kerja Pejabat	
1	3	2	5	3	004	Kursi Rapat Pejabat	
1	3	2	5	3	005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	
1	3	2	5	3	006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	
1	3	2	5	3	007	Lemari dan Arsip Pejabat	
1	3	2	6	1	001	Peralatan Studio Audio	
1	3	2	6	1	002	Peralatan Studio Video dan Film	
1	3	2	6	1	003	Peralatan Studio Gambar	
1	3	2	6	1	004	Peralatan Cetak	
1	3	2	6	1	005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	
1	3	2	6	1	006	Alat Studio Lainnya	
1	3	2	6	2	001	Alat Komunikasi <i>Telephone</i>	
1	3	2	6	2	002	Alat Komunikasi Radio SSB	
1	3	2	6	2	003	Alat Komunikasi Radio HF/FM	
1	3	2	6	2	004	Alat Komunikasi Radio VHF	
1	3	2	6	2	005	Alat Komunikasi Radio UHF	
1	3	2	6	2	006	Alat Komunikasi Sosial	
1	3	2	6	2	007	Alat-Alat Sandi	
1	3	2	6	2	008	Alat Komunikasi Khusus	
1	3	2	6	2	009	Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	
1	3	2	6	2	10	Alat Komunikasi Satelit	
1	3	2	6	2	11	Alat Komunikasi Lainnya	
1	3	2	6	3	001	Peralatan Pemancar MF/MW	
1	3	2	6	3	002	Peralatan Pemancar HF/SW	
1	3	2	6	3	003	Peralatan Pemancar VHF/FM	
1	3	2	6	3	004	Peralatan Pemancar UHF	
1	3	2	6	3	005	Peralatan Pemancar SHF	
1	3	2	6	3	006	Peralatan Antena MF/MW	
1	3	2	6	3	007	Peralatan Antena HF/SW	
1	3	2	6	3	008	Peralatan Antena VHF/FM	
1	3	2	6	3	009	Peralatan Antena UHF	
1	3	2	6	3	10	Peralatan Antena SHF/Parabola	
1	3	2	6	3	11	Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	2	6	3	12	Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF	
1	3	2	6	3	13	Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF	
1	3	2	6	3	14	Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF	
1	3	2	6	3	15	Peralatan <i>Microwave</i> FPU	
1	3	2	6	3	16	Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>	
1	3	2	6	3	17	Peralatan <i>Microwave</i> TVRO	
1	3	2	6	3	18	Peralatan <i>Dummy Load</i>	
1	3	2	6	3	19	<i>Switcher</i> Antena	
1	3	2	6	3	20	<i>Switcher</i> /Menara Antena	
1	3	2	6	3	21	<i>Feeder</i>	
1	3	2	6	3	22	<i>Humidity Control</i>	
1	3	2	6	3	23	Program <i>Input Equipment</i>	
1	3	2	6	3	24	Peralatan Antena Penerima VHF	
1	3	2	6	3	25	Peralatan Pemancar LF	
1	3	2	6	3	26	Unit Pemancar MF+HF	
1	3	2	6	3	27	Peralatan Antena Pemancar MF+HF	
1	3	2	6	3	28	Peralatan Penerima	
1	3	2	6	3	29	Peralatan Pemancar dan Penerima LF	
1	3	2	6	3	30	Peralatan Pemancar dan Penerima MF	
1	3	2	6	3	31	Peralatan Pemancar dan Penerima HF	
1	3	2	6	3	32	Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF	
1	3	2	6	3	33	Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	
1	3	2	6	3	34	Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	
1	3	2	6	3	35	Peralatan Pemancar dan Penerima SHF	
1	3	2	6	3	36	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF	
1	3	2	6	3	37	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF	
1	3	2	6	3	38	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF	
1	3	2	6	3	39	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF	
1	3	2	6	3	40	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF	
1	3	2	6	3	41	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	
1	3	2	6	3	42	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF	
1	3	2	6	3	43	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah	
1	3	2	6	3	44	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi	
1	3	2	6	3	45	Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	
1	3	2	6	3	46	Peralatan Perlengkapan Radio	
1	3	2	6	3	47	Sumber Tenaga	
1	3	2	6	3	48	Peralatan Pemancar Lainnya	
1	3	2	6	4	001	Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System	
1	3	2	6	4	002	<i>Very High Frequence Omni Range (VOR)</i>	
1	3	2	6	4	003	<i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>	
1	3	2	6	4	004	Radar	
1	3	2	6	4	005	Alat Pengatur Telekomunikasi	
1	3	2	6	4	006	Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	
1	3	2	6	4	007	Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	
1	3	2	7	1	001	Alat Kedokteran Umum	
1	3	2	7	1	002	Alat Kedokteran Gigi	
1	3	2	7	1	003	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	
1	3	2	7	1	004	Alat Kedokteran Bedah	
1	3	2	7	1	005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	
1	3	2	7	1	006	Alat Kedokteran THT	
1	3	2	7	1	007	Alat Kedokteran Mata	
1	3	2	7	1	008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	
1	3	2	7	1	009	Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	2	7	1	10	Alat Kedokteran Anak	
1	3	2	7	1	11	Alat Kedokteran Poliklinik	
1	3	2	7	1	12	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	
1	3	2	7	1	13	Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	
1	3	2	7	1	14	Alat Kedokteran Jantung	
1	3	2	7	1	15	Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>	
1	3	2	7	1	16	Alat Kedokteran Patalogi <i>Anatomy</i>	
1	3	2	7	1	17	Alat Kedokteran Transfusi Darah	
1	3	2	7	1	18	Alat Kedokteran Radioterapi	
1	3	2	7	1	19	Alat Kedokteran Nuklir	
1	3	2	7	1	20	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	
1	3	2	7	1	21	Alat Kedokteran Gawat Darurat	
1	3	2	7	1	22	Alat Kedokteran Jiwa	
1	3	2	7	1	23	Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	
1	3	2	7	1	24	Alat Kedokteran ICU	
1	3	2	7	1	25	Alat Kedokteran ICCU	
1	3	2	7	1	26	Alat Kedokteran Bedah Jantung	
1	3	2	7	1	27	Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>	
1	3	2	7	1	28	Alat Kedokteran Anestesi	
1	3	2	7	1	29	Alat Kedokteran Lainnya	
1	3	2	7	2	001	Alat Kesehatan Matra Laut	
1	3	2	7	2	002	Alat Kesehatan Matra Udara	
1	3	2	7	2	003	Alat Kesehatan Kepolisian	
1	3	2	7	2	004	Alat Kesehatan Olahraga	
1	3	2	7	2	005	Alat Kesehatan Umum Lainnya	
1	3	2	8	1	001	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	
1	3	2	8	1	002	Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	
1	3	2	8	1	003	Alat Laboratorium Hidrokimia	
1	3	2	8	1	004	Alat Laboratorium Model Hidrolika	
1	3	2	8	1	005	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	
1	3	2	8	1	006	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	
1	3	2	8	1	007	Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	
1	3	2	8	1	008	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	
1	3	2	8	1	009	Alat Laboratorium Cocom Tanam	
1	3	2	8	1	10	Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	
1	3	2	8	1	11	Alat Laboratorium Umum	
1	3	2	8	1	12	Alat Laboratorium Mikrobiologi	
1	3	2	8	1	13	Alat Laboratorium Kimia	
1	3	2	8	1	14	Alat Laboratorium Patologi	
1	3	2	8	1	15	Alat Laboratorium Immunologi	
1	3	2	8	1	16	Alat Laboratorium Hematologi	
1	3	2	8	1	17	Alat Laboratorium Film	
1	3	2	8	1	18	Alat Laboratorium Makanan	
1	3	2	8	1	19	Alat Laboratorium Farmasi	
1	3	2	8	1	20	Alat Laboratorium Fisika	
1	3	2	8	1	21	Alat Laboratorium Hidrodinamika	
1	3	2	8	1	22	Alat Laboratorium Klimatologi	
1	3	2	8	1	23	Alat Laboratorium Proses Peleburan	
1	3	2	8	1	24	Alat Laboratorium Pasir	
1	3	2	8	1	25	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan	
1	3	2	8	1	26	Alat Laboratorium Pembuatan Pola	
1	3	2	8	1	27	Alat Laboratorium Metalografi	
1	3	2	8	1	28	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	2	8	1	29	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	
1	3	2	8	1	30	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	
1	3	2	8	1	31	Alat Laboratorium Metrologi	
1	3	2	8	1	32	Alat Laboratorium Pelapisan Logam	
1	3	2	8	1	33	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	
1	3	2	8	1	34	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	
1	3	2	8	1	35	Alat Laboratorium Uji Tekstil	
1	3	2	8	1	36	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	
1	3	2	8	1	37	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	
1	3	2	8	1	38	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik	
1	3	2	8	1	39	Alat Laboratorium Uji Keramik	
1	3	2	8	1	40	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	
1	3	2	8	1	41	Alat Laboratorium Pertanian	
1	3	2	8	1	42	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	
1	3	2	8	1	43	Alat Laboratorium Energi Surya	
1	3	2	8	1	44	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass	
1	3	2	8	1	45	Alat Laboratorium Oseanografi	
1	3	2	8	1	46	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	
1	3	2	8	1	47	Alat Laboratorium Biologi Perairan	
1	3	2	8	1	48	Alat Laboratorium Biologi	
1	3	2	8	1	49	Alat Laboratorium Geofisika	
1	3	2	8	1	50	Alat Laboratorium Tambang	
1	3	2	8	1	51	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	
1	3	2	8	1	52	Alat Laboratorium Proses Industri	
1	3	2	8	1	53	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	
1	3	2	8	1	54	Laboratorium Kearsipan	
1	3	2	8	1	55	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	
1	3	2	8	1	56	Alat Laboratorium Lain	
1	3	2	8	1	57	Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi	
1	3	2	8	1	58	Alat Laboratorium Pendidikan	
1	3	2	8	1	59	Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim	
1	3	2	8	1	60	Alat Laboratorium Teknik Pantai	
1	3	2	8	1	61	Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi	
1	3	2	8	1	62	Alat Laboratorium Populasi	
1	3	2	8	1	63	Alat Pengukur Gelombang	
1	3	2	8	1	64	Unit Alat Laboratorium Lainnya	
1	3	2	8	2	001	<i>Analytical Instrument</i>	
1	3	2	8	2	002	<i>Instrument Probe/Sensor</i>	
1	3	2	8	2	003	<i>General Laboratory Tool</i>	
1	3	2	8	2	004	<i>Glassware Plastic/Utensils</i>	
1	3	2	8	2	005	<i>Laboratory Safety Equipment</i>	
1	3	2	8	2	006	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	
1	3	2	8	3	001	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	
1	3	2	8	3	002	Alat Peraga Studi: Matematika	
1	3	2	8	3	003	Alat Peraga Dasar	
1	3	2	8	3	004	Alat Peraga Lanjutan	
1	3	2	8	3	005	Alat Peraga Menengah	
1	3	2	8	3	006	Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas	
1	3	2	8	3	007	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS	
1	3	2	8	3	008	Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi: Agama	
1	3	2	8	3	009	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	
1	3	2	8	3	10	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian	
1	3	2	8	3	11	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	2	8	3	12	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	
1	3	2	8	3	13	Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	
1	3	2	8	3	14	Alat Peraga Kejuruan	
1	3	2	8	3	15	Alat Peraga PAUD/TK	
1	3	2	8	3	16	Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	
1	3	2	8	4	001	<i>Radiation Detector</i>	
1	3	2	8	4	002	<i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>	
1	3	2	8	4	003	<i>Assembly/ Counting System</i>	
1	3	2	8	4	004	<i>Recorder Display</i>	
1	3	2	8	4	005	<i>System/Power Supply</i>	
1	3	2	8	4	006	<i>Measuring/Testing Device</i>	
1	3	2	8	4	007	<i>Opto Electronics</i>	
1	3	2	8	4	008	<i>Accelerator</i>	
1	3	2	8	4	009	<i>Reactor Experimental System</i>	
1	3	2	8	4	10	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	
1	3	2	8	5	001	Alat Ukur Fisika Kesehatan	
1	3	2	8	5	002	Alat Kesehatan Kerja	
1	3	2	8	5	003	Proteksi Lingkungan	
1	3	2	8	5	004	<i>Meteorological Equipment</i>	
1	3	2	8	5	005	Sumber Radiasi	
1	3	2	8	5	006	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	
1	3	2	8	6	001	<i>Radiation Application Equipment</i>	
1	3	2	8	6	002	<i>Non Destructive Test (NDT) Device</i>	
1	3	2	8	6	003	Peralatan Hidrologi	
1	3	2	8	6	004	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	
1	3	2	8	7	001	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	
1	3	2	8	7	002	Alat Laboratorium Kualitas Udara	
1	3	2	8	7	003	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	
1	3	2	8	7	004	Laboratorium Lingkungan	
1	3	2	8	7	005	Alat Laboratorium Penunjang	
1	3	2	8	7	006	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	
1	3	2	8	8	001	<i>Towing Carriage</i>	
1	3	2	8	8	002	<i>Wave Generator and Absorber</i>	
1	3	2	8	8	003	<i>Data Acquisition and Analyzing System</i>	
1	3	2	8	8	004	<i>Cavitation Tunnel</i>	
1	3	2	8	8	005	<i>Overhead Cranes</i>	
1	3	2	8	8	006	Peralatan Umum	
1	3	2	8	8	007	Pemesinan: <i>Model Ship Workshop</i>	
1	3	2	8	8	008	Pemesinan: <i>Propeller Model Workshop</i>	
1	3	2	8	8	009	Pemesinan: <i>Mechanical Workshop</i>	
1	3	2	8	8	10	Pemesinan: <i>Precision Mechanical Workshop</i>	
1	3	2	8	8	11	Pemesinan: <i>Painting Shop</i>	
1	3	2	8	8	12	Pemesinan: <i>Ship Model Preparation Shop</i>	
1	3	2	8	8	13	Pemesinan: <i>Electrical Workshop</i>	
1	3	2	8	8	14	MOB	
1	3	2	8	8	15	<i>Photo and Film Equipment</i>	
1	3	2	8	8	16	Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> Lainnya	
1	3	2	8	9	001	Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	
1	3	2	8	9	002	Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	
1	3	2	8	9	003	Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	
1	3	2	8	9	004	Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	
1	3	2	8	9	005	Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	
1	3	2	8	9	006	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	2	8	9	007	Alat Laboratorium Natus	
1	3	2	8	9	008	Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran	
1	3	2	8	9	009	Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	
1	3	2	8	9	10	Alat Laboratorium Uji Perangkat	
1	3	2	8	9	11	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	
1	3	2	10	1	001	Komputer Jaringan	
1	3	2	10	1	002	<i>Personal Computer</i>	
1	3	2	10	1	003	Komputer Unit Lainnya	
1	3	2	10	2	001	Peralatan <i>Mainframe</i>	
1	3	2	10	2	002	Peralatan <i>Mini Computer</i>	
1	3	2	10	2	003	Peralatan <i>Personal Computer</i>	
1	3	2	10	2	004	Peralatan Jaringan	
1	3	2	10	2	005	Peralatan Komputer Lainnya	
1	3	2	11	1	001	Optik	
1	3	2	11	1	002	Ukur/Instrumen	
1	3	2	11	1	003	Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	
1	3	2	11	2	001	Mekanik	
1	3	2	11	2	002	Elektronik/ <i>Electric</i>	
1	3	2	11	2	003	Manual	
1	3	2	11	2	004	Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya	
1	3	2	12	1	001	Bor Mesin Tumbuk	
1	3	2	12	1	002	Bor Mesin Putar	
1	3	2	12	1	003	Alat Pengeboran Mesin Lainnya	
1	3	2	12	2	001	Bangka	
1	3	2	12	2	002	Pantek	
1	3	2	12	2	003	Putar	
1	3	2	12	2	004	Peralatan Bantu	
1	3	2	12	2	005	Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya	
1	3	2	13	1	001	Peralatan Sumur Minyak	
1	3	2	13	1	002	Sumur Pemboran	
1	3	2	13	1	003	Sumur Lainnya	
1	3	2	13	2	001	RIG	
1	3	2	13	2	002	Produksi Lainnya	
1	3	2	13	3	001	Alat Pengolahan Minyak	
1	3	2	13	3	002	Alat Pengolahan Air	
1	3	2	13	3	003	Alat Pengolahan <i>Steam</i>	
1	3	2	13	3	004	Alat Pengolahan <i>Wax</i>	
1	3	2	13	3	005	Pengolahan dan Pemurnian Lainnya	
1	3	2	14	1	001	Mekanik	
1	3	2	14	1	002	Elektrik	
1	3	2	14	1	003	Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	
1	3	2	14	2	001	Perawatan Sumur	
1	3	2	14	2	002	Tes Unit	
1	3	2	14	2	003	Alat Bantu Produksi Lainnya	
1	3	2	15	1	001	Radiasi	
1	3	2	15	1	002	Suara	
1	3	2	15	1	003	Alat Deteksi Lainnya	
1	3	2	15	2	001	Baju Pengaman	
1	3	2	15	2	002	Masker	
1	3	2	15	2	003	Topi Kerja	
1	3	2	15	2	004	Sabuk Pengaman	
1	3	2	15	2	005	Sepatu Lapangan	
1	3	2	15	2	006	Alat Pelindung Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	2	15	3	001	Alat Penolong	
1	3	2	15	3	002	Alat Pendukung Pencarian	
1	3	2	15	3	003	Alat Kerja Bawah Air	
1	3	2	15	3	004	Alat SAR Lainnya	
1	3	2	15	4	001	Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan	
1	3	2	15	4	002	Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan	
1	3	2	15	4	003	Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan	
1	3	2	15	4	004	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	
1	3	2	15	4	005	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	
1	3	2	15	4	006	Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>	
1	3	2	15	4	007	Alat Kerja Penerbangan Lainnya	
1	3	2	16	1	001	Alat Peraga Pelatihan	
1	3	2	16	1	002	Alat Peraga Percontohan	
1	3	2	16	1	003	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	
1	3	2	17	1	001	<i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>	
1	3	2	17	1	002	<i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>	
1	3	2	17	1	003	<i>Solid-Solid Screening Equipment</i>	
1	3	2	17	1	004	<i>Solid-Solid Classifier</i>	
1	3	2	17	1	005	<i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>	
1	3	2	17	1	006	<i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>	
1	3	2	17	1	007	<i>Ion Exchange Absortion Equipment</i>	
1	3	2	17	1	008	<i>Leaching Equipment</i>	
1	3	2	17	1	009	<i>Gravity Sedimentation Equipment</i>	
1	3	2	17	1	10	<i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>	
1	3	2	17	1	11	<i>Centrifuge for Solid Liquid</i>	
1	3	2	17	1	12	<i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>	
1	3	2	17	1	13	<i>Gas-Solid Drying Equipment</i>	
1	3	2	17	1	14	<i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>	
1	3	2	17	1	15	<i>Gas-Solid Separation Equipment</i>	
1	3	2	17	1	16	<i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>	
1	3	2	17	1	17	<i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>	
1	3	2	17	1	18	<i>Isotope Separation Equipment</i>	
1	3	2	17	1	19	<i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>	
1	3	2	17	1	20	<i>Solid Material Handling Equipment</i>	
1	3	2	17	1	21	<i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>	
1	3	2	17	1	22	<i>Heat Generating Equipment</i>	
1	3	2	17	1	23	<i>Heat Transfer Equipment</i>	
1	3	2	17	1	24	<i>Mechanical Process</i>	
1	3	2	17	1	25	<i>Chemical Reaction Equipment</i>	
1	3	2	17	1	26	Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	
1	3	2	18	1	001	Rambu Bersuar	
1	3	2	18	1	002	Rambu Tidak Bersuar	
1	3	2	18	1	003	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	
1	3	2	18	2	001	<i>Runway/Threshold Light</i>	
1	3	2	18	2	002	<i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>	
1	3	2	18	2	003	<i>Approach Light</i>	
1	3	2	18	2	004	<i>Runway Identification Light (REILS)</i>	
1	3	2	18	2	005	<i>Signal</i>	
1	3	2	18	2	006	<i>Flood Lights</i>	
1	3	2	18	2	007	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	
1	3	2	18	3	001	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	
1	3	2	18	3	002	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	
1	3	2	19	1	001	Peralatan Olahraga Atletik	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	2	19	1	002	Peralatan Permainan	
1	3	2	19	1	003	Peralatan Senam	
1	3	2	19	1	004	Peralatan Olahraga Air	
1	3	2	19	1	005	Peralatan Olahraga Udara	
1	3	2	19	1	006	Peralatan Olahraga Lainnya	
1	3	3	1	1	001	Bangunan Gedung Kantor	
1	3	3	1	1	002	Bangunan Gudang	
1	3	3	1	1	003	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	
1	3	3	1	1	004	Bangunan Gedung Instalasi	
1	3	3	1	1	005	Bangunan Gedung Laboratorium	
1	3	3	1	1	006	Bangunan Kesehatan	
1	3	3	1	1	007	Bangunan Oseanarium/Observatorium	
1	3	3	1	1	008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
1	3	3	1	1	009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	
1	3	3	1	1	10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
1	3	3	1	1	11	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	
1	3	3	1	1	12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	
1	3	3	1	1	13	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	
1	3	3	1	1	14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	
1	3	3	1	1	15	Bangunan Gedung Pemotong Hewan	
1	3	3	1	1	16	Bangunan Gedung Perpustakaan	
1	3	3	1	1	17	Bangunan Gedung Museum	
1	3	3	1	1	18	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	
1	3	3	1	1	19	Bangunan Pengujian Kelaikan	
1	3	3	1	1	20	Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan	
1	3	3	1	1	21	Bangunan Rumah Tahanan	
1	3	3	1	1	22	Bangunan Gedung Krematorium	
1	3	3	1	1	23	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	
1	3	3	1	1	24	Bangunan Tempat Persidangan	
1	3	3	1	1	25	Bangunan Terbuka	
1	3	3	1	1	26	Bangunan Penampung Sekam	
1	3	3	1	1	27	Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
1	3	3	1	1	28	Bangunan Industri	
1	3	3	1	1	29	Bangunan Peternakan/Perikanan	
1	3	3	1	1	30	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
1	3	3	1	1	31	Bangunan Peralatan Geofisika	
1	3	3	1	1	32	Bangunan Fasilitas Umum	
1	3	3	1	1	33	Bangunan Parkir	
1	3	3	1	1	34	Bangunan Gedung Pabrik	
1	3	3	1	1	35	Bangunan Stasiun Bus	
1	3	3	1	1	36	Taman	
1	3	3	1	1	37	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
1	3	3	1	2	001	Rumah Negara Golongan I	
1	3	3	1	2	002	Rumah Negara Golongan II	
1	3	3	1	2	003	Rumah Negara Golongan III	
1	3	3	1	2	004	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	
1	3	3	1	2	005	Asrama	
1	3	3	1	2	006	Hotel	
1	3	3	1	2	007	Motel	
1	3	3	1	2	008	Flat/Rumah Susun	
1	3	3	1	2	009	Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	
1	3	3	1	2	10	Panti Asuhan	
1	3	3	1	2	11	Apartemen	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	3	1	2	12	Rumah Tidak Bersusun	
1	3	3	1	2	13	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	
1	3	3	2	1	001	Candi	
1	3	3	2	1	002	Tugu	
1	3	3	2	1	003	Bangunan Peninggalan	
1	3	3	2	1	004	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	
1	3	3	3	1	001	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	
1	3	3	3	1	002	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	
1	3	3	3	1	003	Bangunan Menara Telekomunikasi	
1	3	3	3	1	004	Bangunan Menara Pengawas	
1	3	3	3	1	005	Bangunan Menara Perambuan Lainnya	
1	3	3	4	1	001	Tugu/Tanda Batas Administrasi	
1	3	3	4	1	002	Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	
1	3	3	4	1	003	Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	
1	3	3	4	1	004	Pagar	
1	3	3	4	1	005	Tugu/Tanda Batas Lainnya	
1	3	4	1	1	001	Jalan Nasional	
1	3	4	1	1	002	Jalan Provinsi	
1	3	4	1	1	003	Jalan Kabupaten	
1	3	4	1	1	004	Jalan Kota	
1	3	4	1	1	005	Jalan Desa	
1	3	4	1	1	006	Jalan Tol	
1	3	4	1	1	007	Jalan Kereta Api	
1	3	4	1	1	008	Landasan Pacu Pesawat Terbang	
1	3	4	1	1	009	Jalan Khusus	
1	3	4	1	1	10	Jalan Lainnya	
1	3	4	1	2	001	Jembatan pada Jalan Nasional	
1	3	4	1	2	002	Jembatan pada Jalan Provinsi	
1	3	4	1	2	003	Jembatan pada Jalan Kabupaten	
1	3	4	1	2	004	Jembatan pada Jalan Kota	
1	3	4	1	2	005	Jembatan pada Jalan Desa	
1	3	4	1	2	006	Jembatan pada Jalan Tol	
1	3	4	1	2	007	Jembatan pada Jalan Kereta Api	
1	3	4	1	2	008	Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	
1	3	4	1	2	009	Jembatan pada Jalan Khusus	
1	3	4	1	2	10	Jembatan Penyeberangan	
1	3	4	1	2	11	Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	
1	3	4	1	2	12	Jembatan Pengukur	
1	3	4	1	2	13	Jembatan Lainnya	
1	3	4	2	1	001	Bangunan Waduk Irigasi	
1	3	4	2	1	002	Bangunan Pengambilan Irigasi	
1	3	4	2	1	003	Bangunan Pembawa Irigasi	
1	3	4	2	1	004	Bangunan Pembuang Irigasi	
1	3	4	2	1	005	Bangunan Pengaman Irigasi	
1	3	4	2	1	006	Bangunan Pelengkap Irigasi	
1	3	4	2	1	007	Bangunan Sawah Irigasi	
1	3	4	2	1	008	Bangunan Air Irigasi Lainnya	
1	3	4	2	2	001	Bangunan Waduk Pasang Surut	
1	3	4	2	2	002	Bangunan Pengambilan Pasang Surut	
1	3	4	2	2	003	Bangunan Pembawa Pasang Surut	
1	3	4	2	2	004	Saluran Pembuang Pasang Surut	
1	3	4	2	2	005	Bangunan Pengaman Pasang Surut	
1	3	4	2	2	006	Bangunan Pelengkap Pasang Surut	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	4	2	2	007	Bangunan Sawah Pasang Surut	
1	3	4	2	2	008	Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	
1	3	4	2	3	001	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	
1	3	4	2	3	002	Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	
1	3	4	2	3	003	Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	
1	3	4	2	3	004	Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	
1	3	4	2	3	005	Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	
1	3	4	2	3	006	Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	
1	3	4	2	3	007	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	
1	3	4	2	3	008	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya	
1	3	4	2	4	001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	
1	3	4	2	4	002	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	
1	3	4	2	4	003	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	
1	3	4	2	4	004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	
1	3	4	2	4	005	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	
1	3	4	2	4	006	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	
1	3	4	2	4	007	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	
1	3	4	2	5	001	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	
1	3	4	2	5	002	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	
1	3	4	2	5	003	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	
1	3	4	2	5	004	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	
1	3	4	2	5	005	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	
1	3	4	2	5	006	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	
1	3	4	2	5	007	Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	
1	3	4	2	5	008	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	
1	3	4	2	6	001	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	
1	3	4	2	6	002	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	
1	3	4	2	6	003	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	
1	3	4	2	6	004	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	
1	3	4	2	6	005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	
1	3	4	2	6	006	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	
1	3	4	2	7	001	Bangunan Pembawa Air Kotor	
1	3	4	2	7	002	Bangunan Waduk Air Kotor	
1	3	4	2	7	003	Bangunan Pembuang Air Kotor	
1	3	4	2	7	004	Bangunan Pengaman Air Kotor	
1	3	4	2	7	005	Bangunan Pelengkap Air Kotor	
1	3	4	2	7	006	Bangunan Air Kotor Lainnya	
1	3	4	3	1	001	Instalasi Air Permukaan	
1	3	4	3	1	002	Instalasi Air Sumber / Mata Air	
1	3	4	3	1	003	Instalasi Air Tanah Dalam	
1	3	4	3	1	004	Instalasi Air Tanah Dangkal	
1	3	4	3	1	005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	
1	3	4	3	2	001	Instalasi Air Buangan Domestik	
1	3	4	3	2	002	Instalasi Air Buangan Industri	
1	3	4	3	2	003	Instalasi Air Buangan Pertanian	
1	3	4	3	2	004	Instalasi Air Kotor Lainnya	
1	3	4	3	3	001	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	
1	3	4	3	3	002	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	
1	3	4	3	3	003	Bangunan Penampung Sampah	
1	3	4	3	3	004	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	
1	3	4	3	4	001	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan	
1	3	4	3	4	002	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	4	3	4	003	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	
1	3	4	3	4	004	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	
1	3	4	3	5	001	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	
1	3	4	3	5	002	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	
1	3	4	3	5	003	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	
1	3	4	3	5	004	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	
1	3	4	3	5	005	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	
1	3	4	3	5	006	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	
1	3	4	3	5	007	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	
1	3	4	3	5	008	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	
1	3	4	3	5	009	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	
1	3	4	3	5	10	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	
1	3	4	3	5	11	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera	
1	3	4	3	5	12	Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	
1	3	4	3	6	001	Instalasi Gardu Listrik Induk	
1	3	4	3	6	002	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	
1	3	4	3	6	003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	
1	3	4	3	6	004	Instalasi Gardu Listrik Lainnya	
1	3	4	3	7	001	Instalasi Pertahanan di Darat	
1	3	4	3	7	002	Instalasi Pertahanan Lainnya	
1	3	4	3	8	001	Instalasi Gardu Gas	
1	3	4	3	8	002	Instalasi Jaringan Pipa Gas	
1	3	4	3	8	003	Instalasi Pengolahan Gas	
1	3	4	3	8	004	Instalasi Gas Lainnya	
1	3	4	3	9	001	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	
1	3	4	3	9	002	Instalasi Reaktor Nuklir	
1	3	4	3	9	003	Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	
1	3	4	3	9	004	Instalasi Pengaman Lainnya	
1	3	4	3	10	001	Instalasi Lain	
1	3	4	4	1	001	Jaringan Pembawa	
1	3	4	4	1	002	Jaringan Induk Distribusi	
1	3	4	4	1	003	Jaringan Cabang Distribusi	
1	3	4	4	1	004	Jaringan Sambungan ke Rumah	
1	3	4	4	1	005	Jaringan Air Minum Lainnya	
1	3	4	4	2	001	Jaringan Transmisi	
1	3	4	4	2	002	Jaringan Distribusi	
1	3	4	4	2	003	Jaringan Listrik Lainnya	
1	3	4	4	3	001	Jaringan Telepon di atas Tanah	
1	3	4	4	3	002	Jaringan Telepon di bawah Tanah	
1	3	4	4	3	003	Jaringan Telepon di dalam Air	
1	3	4	4	3	004	Jaringan dengan Media Udara	
1	3	4	4	3	005	Jaringan Telepon Lainnya	
1	3	4	4	4	001	Jaringan Pipa Gas Transmisi	
1	3	4	4	4	002	Jaringan Pipa Distribusi	
1	3	4	4	4	003	Jaringan Pipa Dinas	
1	3	4	4	4	004	Jaringan BBM	
1	3	4	4	4	005	Jaringan Gas Lainnya	
1	3	5	1	1	001	Buku Umum	
1	3	5	1	1	002	Buku Filsafat	
1	3	5	1	1	003	Buku Agama	
1	3	5	1	1	004	Buku Ilmu Sosial	
1	3	5	1	1	005	Buku Ilmu Bahasa	
1	3	5	1	1	006	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	5	1	1	007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	
1	3	5	1	1	008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	
1	3	5	1	1	009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	
1	3	5	1	1	10	Serial	
1	3	5	1	1	11	Buku Laporan	
1	3	5	1	1	12	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	
1	3	5	1	2	001	Audio Visual	
1	3	5	1	2	002	Bentuk Mikro (<i>Microform</i>)	
1	3	5	1	2	003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	
1	3	5	1	3	001	Bahan Kartografi	
1	3	5	1	3	002	Naskah (Manuskrip)/Asli	
1	3	5	1	3	003	Lukisan dan Ukiran	
1	3	5	1	3	004	Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya	
1	3	5	1	4	001	Karya Musik	
1	3	5	1	4	002	Musik Lainnya	
1	3	5	1	5	001	Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)	
1	3	5	1	5	002	Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>) Lainnya	
1	3	5	1	6	001	<i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i>	
1	3	5	1	6	002	<i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i> Lainnya	
1	3	5	1	7	001	<i>Tarscalt</i>	
1	3	5	1	7	002	<i>Tarscalt</i> Lainnya	
1	3	5	2	1	001	Alat Musik	
1	3	5	2	1	002	Lukisan	
1	3	5	2	1	003	Alat Peraga Kesenian	
1	3	5	2	1	004	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	
1	3	5	2	2	001	Pahatan	
1	3	5	2	2	002	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	
1	3	5	2	2	003	Barang Kerajinan	
1	3	5	2	2	004	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	
1	3	5	2	3	001	Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	
1	3	5	2	3	002	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	
1	3	5	3	1	001	Hewan Pengaman	
1	3	5	3	1	002	Hewan Pengangkut	
1	3	5	3	1	003	Hewan Kebun Binatang	
1	3	5	3	1	004	Hewan Piaraan Lainnya	
1	3	5	3	2	001	Ternak Potong	
1	3	5	3	2	002	Ternak Perah	
1	3	5	3	2	003	Ternak Unggas	
1	3	5	3	2	004	Ternak Lainnya	
1	3	5	3	3	001	Hewan Lainnya	
1	3	5	4	1	001	Ikan Budidaya	
1	3	5	4	2	001	<i>Crustacea</i> Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	
1	3	5	4	3	001	<i>Mollusca</i> Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)	
1	3	5	4	4	001	Coelenterata Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)	
1	3	5	4	5	001	Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)	
1	3	5	4	6	001	<i>Amphibia</i> Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)	
1	3	5	4	7	001	Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)	
1	3	5	4	8	001	Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)	
1	3	5	4	9	001	Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh- Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)	
1	3	5	4	10	001	Budidaya Biota Perairan Lainnya	
1	3	5	5	1	001	Tanaman	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	5	6	1	001	Hewan Koleksi	
1	3	5	6	1	002	Biota Perairan Koleksi	
1	3	5	6	1	003	Tanaman Koleksi	
1	3	5	6	1	004	Mikroba Koleksi	
1	3	5	6	1	005	Batuan Koleksi	
1	3	5	6	1	006	Fosil	
1	3	5	6	1	007	Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	
1	3	5	7	1	001	Aset Tetap Dalam Renovasi	
1	3	6	1	1	001	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1	3	7	1	1	001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Tractor</i>	
1	3	7	1	1	002	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Grader</i>	
1	3	7	1	1	003	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Excavator	
1	3	7	1	1	004	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Pile Driver	
1	3	7	1	1	005	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Hauler</i>	
1	3	7	1	1	006	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	
1	3	7	1	1	007	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Compacting Equipment	
1	3	7	1	1	008	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Aggregate and Concrete Equipment	
1	3	7	1	1	009	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Loader</i>	
1	3	7	1	1	10	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	
1	3	7	1	1	11	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	
1	3	7	1	1	12	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	
1	3	7	1	1	13	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung- <i>Dreger</i>	
1	3	7	1	1	14	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung- Floating Excavator	
1	3	7	1	1	15	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung- Amphibi Dredger	
1	3	7	1	1	16	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Kapal Tarik	
1	3	7	1	1	17	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Mesin	
1	3	7	1	1	18	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	
1	3	7	1	1	19	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik	
1	3	7	1	1	20	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu- <i>Feeder</i>	
1	3	7	1	1	21	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu- <i>Compressor</i>	
1	3	7	1	1	22	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	
1	3	7	1	1	23	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	
1	3	7	1	1	24	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor	
1	3	7	1	1	25	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	
1	3	7	1	1	26	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	
1	3	7	1	1	27	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	
1	3	7	1	1	28	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	
1	3	7	1	1	29	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin <i>Tatoo</i>	
1	3	7	1	1	30	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	
1	3	7	1	1	31	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Selam	
1	3	7	1	1	32	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering	
1	3	7	1	1	33	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Intelijen	
1	3	7	1	1	34	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	
1	3	7	1	2	001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	
1	3	7	1	2	002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	
1	3	7	1	2	003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
1	3	7	1	2	004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	
1	3	7	1	2	005	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	7	1	2	006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat	
1	3	7	1	2	007	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur	
1	3	7	1	2	008	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	
1	3	7	1	2	009	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	
1	3	7	1	2	10	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	
1	3	7	1	2	11	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak	
1	3	7	1	2	12	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	
1	3	7	1	2	13	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	
1	3	7	1	2	14	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	
1	3	7	1	2	15	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	
1	3	7	1	2	16	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	
1	3	7	1	2	17	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	
1	3	7	1	2	18	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	
1	3	7	1	2	19	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	
1	3	7	1	2	20	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	
1	3	7	1	2	21	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	
1	3	7	1	2	22	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	
1	3	7	1	2	23	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang	
1	3	7	1	2	24	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	
1	3	7	1	3	001	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada	
1	3	7	1	3	002	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)	
1	3	7	1	3	003	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Listrik	
1	3	7	1	3	004	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Service	
1	3	7	1	3	005	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Pengangkat Bermesin	
1	3	7	1	3	006	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Kayu	
1	3	7	1	3	007	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Khusus	
1	3	7	1	3	008	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Peralatan Las	
1	3	7	1	3	009	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Pabrik Es	
1	3	7	1	3	10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Alat Bengkel Bermesin Lainnya	
1	3	7	1	3	11	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	
1	3	7	1	3	12	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	
1	3	7	1	3	13	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	
1	3	7	1	3	14	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	
1	3	7	1	3	15	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
						(Standard Tools)	
1	3	7	1	3	16	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)	
1	3	7	1	3	17	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	
1	3	7	1	3	18	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	
1	3	7	1	3	19	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	
1	3	7	1	3	20	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	
1	3	7	1	3	21	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	
1	3	7	1	3	22	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	
1	3	7	1	3	23	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	
1	3	7	1	3	24	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	
1	3	7	1	3	25	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Test Inteligensia	
1	3	7	1	3	26	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	
1	3	7	1	3	27	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain	
1	3	7	1	3	28	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi	
1	3	7	1	3	29	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Oscilloscope	
1	3	7	1	3	30	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	
1	3	7	1	3	31	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	
1	3	7	1	3	32	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	
1	3	7	1	3	33	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	
1	3	7	1	3	34	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Anak	
1	3	7	1	3	35	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Kering	
1	3	7	1	3	36	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan	
1	3	7	1	3	37	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Lainnya	
1	3	7	1	3	38	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	
1	3	7	1	3	39	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Specific Set	
1	3	7	1	3	40	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam	
1	3	7	1	3	41	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan	
1	3	7	1	3	42	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu	
1	3	7	1	3	43	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Instrument Workshop	
1	3	7	1	3	44	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	
1	3	7	1	4	001	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	
1	3	7	1	4	002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	
1	3	7	1	4	003	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen	
1	3	7	1	4	004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	
1	3	7	1	4	005	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	
1	3	7	1	4	006	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Processing	
1	3	7	1	4	007	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	
1	3	7	1	4	008	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	
1	3	7	1	4	009	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	
1	3	7	1	4	10	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	
1	3	7	1	5	001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	
1	3	7	1	5	002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	
1	3	7	1	5	003	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	
1	3	7	1	5	004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	
1	3	7	1	5	005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	
1	3	7	1	5	006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Meubelair	
1	3	7	1	5	007	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	7	1	5	008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat	
1	3	7	1	5	009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	
1	3	7	1	5	10	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	
1	3	7	1	5	11	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	
1	3	7	1	5	12	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	
1	3	7	1	5	13	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	
1	3	7	1	5	14	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	
1	3	7	1	5	15	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	
1	3	7	1	5	16	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	
1	3	7	1	5	17	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	
1	3	7	1	5	18	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	
1	3	7	1	5	19	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	
1	3	7	1	6	001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	
1	3	7	1	6	002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	
1	3	7	1	6	003	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	
1	3	7	1	6	004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	
1	3	7	1	6	005	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	
1	3	7	1	6	006	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	
1	3	7	1	6	007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	
1	3	7	1	6	008	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	
1	3	7	1	6	009	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	
1	3	7	1	6	10	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	
1	3	7	1	6	11	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	
1	3	7	1	6	12	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	
1	3	7	1	6	13	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat- Alat Sandi	
1	3	7	1	6	14	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	
1	3	7	1	6	15	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	
1	3	7	1	6	16	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat	
1	3	7	1	6	17	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	
1	3	7	1	6	18	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar MF/MW	
1	3	7	1	6	19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar HF/SW	
1	3	7	1	6	20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar VHF/FM	
1	3	7	1	6	21	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar UHF	
1	3	7	1	6	22	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar SHF	
1	3	7	1	6	23	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena MF/MW	
1	3	7	1	6	24	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena HF/SW	
1	3	7	1	6	25	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena VHF/FM	
1	3	7	1	6	26	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena UHF	
1	3	7	1	6	27	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena SHF/Parabola	
1	3	7	1	6	28	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Translator VHF/VHF	
1	3	7	1	6	29	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Translator UHF/UHF	
1	3	7	1	6	30	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Translator VHF/UHF	
1	3	7	1	6	31	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Translator	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
						UHF/VHF	
1	3	7	1	6	32	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Microwave FPU	
1	3	7	1	6	33	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Microwave Terrestrial	
1	3	7	1	6	34	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Microwave TVRO	
1	3	7	1	6	35	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Dummy Load	
1	3	7	1	6	36	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Switcher Antena	
1	3	7	1	6	37	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Switcher/Menara Antena	
1	3	7	1	6	38	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Feeder	
1	3	7	1	6	39	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Humidity Control	
1	3	7	1	6	40	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Program Input Equipment	
1	3	7	1	6	41	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Penerima VHF	
1	3	7	1	6	42	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar LF	
1	3	7	1	6	43	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF	
1	3	7	1	6	44	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar MF+HF	
1	3	7	1	6	45	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima	
1	3	7	1	6	46	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima LF	
1	3	7	1	6	47	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima MF	
1	3	7	1	6	48	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima HF	
1	3	7	1	6	49	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF	
1	3	7	1	6	50	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	
1	3	7	1	6	51	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	
1	3	7	1	6	52	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima SHF	
1	3	7	1	6	53	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF	
1	3	7	1	6	54	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF	
1	3	7	1	6	55	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF	
1	3	7	1	6	56	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF	
1	3	7	1	6	57	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF	
1	3	7	1	6	58	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	
1	3	7	1	6	59	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF	
1	3	7	1	6	60	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah	
1	3	7	1	6	61	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi	
1	3	7	1	6	62	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	
1	3	7	1	6	63	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Perlengkapan Radio	
1	3	7	1	6	64	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Sumber Tenaga	
1	3	7	1	6	65	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar Lainnya	
1	3	7	1	6	66	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	7	1	6	67	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Very High Frequence Omni Range (VOR)	
1	3	7	1	6	68	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Distance Measuring Equipment (DME)	
1	3	7	1	6	69	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar	
1	3	7	1	6	70	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi	
1	3	7	1	6	71	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	
1	3	7	1	6	72	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	
1	3	7	1	7	001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	
1	3	7	1	7	002	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	
1	3	7	1	7	003	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	
1	3	7	1	7	004	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	
1	3	7	1	7	005	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	
1	3	7	1	7	006	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	
1	3	7	1	7	007	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	
1	3	7	1	7	008	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	
1	3	7	1	7	009	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	
1	3	7	1	7	10	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	
1	3	7	1	7	11	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	
1	3	7	1	7	12	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	
1	3	7	1	7	13	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	
1	3	7	1	7	14	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	
1	3	7	1	7	15	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	
1	3	7	1	7	16	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	
1	3	7	1	7	17	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah	
1	3	7	1	7	18	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi	
1	3	7	1	7	19	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir	
1	3	7	1	7	20	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	
1	3	7	1	7	21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	
1	3	7	1	7	22	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa	
1	3	7	1	7	23	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	
1	3	7	1	7	24	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU	
1	3	7	1	7	25	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU	
1	3	7	1	7	26	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung	
1	3	7	1	7	27	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Traditional Medicine	
1	3	7	1	7	28	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi	
1	3	7	1	7	29	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat	
1	3	7	1	7	30	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Matra Laut	
1	3	7	1	7	31	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Matra Udara	
1	3	7	1	7	32	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Kepolisian	
1	3	7	1	7	33	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Olahraga	
1	3	7	1	7	34	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Umum Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	7	1	8	001	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	
1	3	7	1	8	002	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	
1	3	7	1	8	003	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hidrokimia	
1	3	7	1	8	004	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Model Hidrolika	
1	3	7	1	8	005	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Batuan/Geologi	
1	3	7	1	8	006	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	
1	3	7	1	8	007	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	
1	3	7	1	8	008	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	
1	3	7	1	8	009	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Cocos Tanam	
1	3	7	1	8	10	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	
1	3	7	1	8	11	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Umum	
1	3	7	1	8	12	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mikrobiologi	
1	3	7	1	8	13	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kimia	
1	3	7	1	8	14	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Patologi	
1	3	7	1	8	15	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Immunologi	
1	3	7	1	8	16	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hematologi	
1	3	7	1	8	17	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Film	
1	3	7	1	8	18	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Makanan	
1	3	7	1	8	19	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Farmasi	
1	3	7	1	8	20	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Fisika	
1	3	7	1	8	21	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hidrodinamika	
1	3	7	1	8	22	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Klimatologi	
1	3	7	1	8	23	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Peleburan	
1	3	7	1	8	24	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pasir	
1	3	7	1	8	25	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	
1	3	7	1	8	26	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pembuatan Pola	
1	3	7	1	8	27	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Metalografi	
1	3	7	1	8	28	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Pengelasan	
1	3	7	1	8	29	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	
1	3	7	1	8	30	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	
1	3	7	1	8	31	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Metrologi	
1	3	7	1	8	32	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pelapisan Logam	
1	3	7	1	8	33	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	7	1	8	34	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	
1	3	7	1	8	35	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Tekstil	
1	3	7	1	8	36	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	
1	3	7	1	8	37	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	
1	3	7	1	8	38	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik	
1	3	7	1	8	39	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Keramik	
1	3	7	1	8	40	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	
1	3	7	1	8	41	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pertanian	
1	3	7	1	8	42	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	
1	3	7	1	8	43	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Energi Surya	
1	3	7	1	8	44	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass	
1	3	7	1	8	45	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Oseanografi	
1	3	7	1	8	46	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	
1	3	7	1	8	47	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Biologi Perairan	
1	3	7	1	8	48	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Biologi	
1	3	7	1	8	49	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Geofisika	
1	3	7	1	8	50	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Tambang	
1	3	7	1	8	51	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	
1	3	7	1	8	52	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Industri	
1	3	7	1	8	53	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	
1	3	7	1	8	54	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Kearsipan	
1	3	7	1	8	55	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	
1	3	7	1	8	56	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Lain	
1	3	7	1	8	57	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan	
1	3	7	1	8	58	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pendidikan	
1	3	7	1	8	59	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim	
1	3	7	1	8	60	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Teknik Pantai	
1	3	7	1	8	61	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi	
1	3	7	1	8	62	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Populasi	
1	3	7	1	8	63	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Pengukur Gelombang	
1	3	7	1	8	64	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Unit Alat Laboratorium Lainnya	
1	3	7	1	8	65	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Analytical Instrument</i>	
1	3	7	1	8	66	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Instrument Probe/Sensor</i>	
1	3	7	1	8	67	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>General</i>	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
						<i>Laboratory Tool</i>	
1	3	7	1	8	68	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Glassware Plastic/ Utensils</i>	
1	3	7	1	8	69	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- Laboratory Safety Equipment	
1	3	7	1	8	70	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	
1	3	7	1	8	71	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	
1	3	7	1	8	72	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	
1	3	7	1	8	73	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	
1	3	7	1	8	74	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	
1	3	7	1	8	75	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	
1	3	7	1	8	76	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	
1	3	7	1	8	77	Akumulasi Penyusutan Alat Sekolah-Alat Peraga Praktik Studi:IPS	
1	3	7	1	8	78	Akumulasi Penyusutan Alat Sekolah-Alat Peraga Praktik Studi:Agama	
1	3	7	1	8	79	Akumulasi Penyusutan Alat Sekolah-Alat Peraga Praktik Studi: <u>Keterampilan</u>	
1	3	7	1	8	80	Akumulasi Penyusutan Alat Sekolah-Alat Peraga Praktik Studi: <u>Kesenian</u>	
1	3	7	1	8	81	Akumulasi Penyusutan Alat Sekolah-Alat Peraga Praktik Studi: <u>Olahraga</u>	
1	3	7	1	8	82	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	
1	3	7	1	8	83	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	
1	3	7	1	8	84	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan	
1	3	7	1	8	85	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	
1	3	7	1	8	86	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	
1	3	7	1	8	87	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Radiation Detector</i>	
1	3	7	1	8	88	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Modular Counting and Scientific Electronic	
1	3	7	1	8	89	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Assembly/Counting System	
1	3	7	1	8	90	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Recorder Display</i>	
1	3	7	1	8	91	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>System/Power Supply</i>	
1	3	7	1	8	92	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Measuring/ Testing Device</i>	
1	3	7	1	8	93	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Opto Electronics</i>	
1	3	7	1	8	94	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Accelerator</i>	
1	3	7	1	8	95	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Reactor Experimental System</i>	
1	3	7	1	8	96	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	
1	3	7	1	8	97	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan- Alat Ukur Fisika Kesehatan	
1	3	7	1	8	98	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan- Alat Kesehatan Kerja	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	7	1	8	99	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan	
1	3	7	1	8	100	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment	
1	3	7	1	8	101	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi	
1	3	7	1	8	102	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	
1	3	7	1	8	103	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Radiation Application Equipment	
1	3	7	1	8	104	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Non Destructive Test (NDT) Device	
1	3	7	1	8	105	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Peralatan Hidrologi	
1	3	7	1	8	106	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	
1	3	7	1	8	107	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	
1	3	7	1	8	108	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	
1	3	7	1	8	109	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan	
1	3	7	1	8	110	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	
1	3	7	1	8	111	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	
1	3	7	1	8	112	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	
1	3	7	1	8	113	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Towing Carriage	
1	3	7	1	8	114	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Wave Generator And Absorber	
1	3	7	1	8	115	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System	
1	3	7	1	8	116	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Cavitation Tunnel	
1	3	7	1	8	117	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Overhead Cranes	
1	3	7	1	8	118	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum	
1	3	7	1	8	119	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium	
1	3	7	1	8	120	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Propeller Model Workshop	
1	3	7	1	8	121	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Mechanical Workshop	
1	3	7	1	8	122	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Precision Mechanical Workshop	
1	3	7	1	8	123	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Painting Shop	
1	3	7	1	8	124	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Ship Model Preparation Shop	
1	3	7	1	8	125	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop	
1	3	7	1	8	126	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB	
1	3	7	1	8	127	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Photo and Film Equipment	
1	3	7	1	8	128	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	7	1	8	129	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	
1	3	7	1	8	130	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	
1	3	7	1	8	131	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	
1	3	7	1	8	132	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	
1	3	7	1	8	133	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	
1	3	7	1	8	134	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	
1	3	7	1	8	135	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natus	
1	3	7	1	8	136	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran	
1	3	7	1	8	137	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	
1	3	7	1	8	138	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat	
1	3	7	1	8	139	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	
1	3	7	1	10	001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	
1	3	7	1	10	002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	
1	3	7	1	10	003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	
1	3	7	1	10	004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe	
1	3	7	1	10	005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer	
1	3	7	1	10	006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	
1	3	7	1	10	007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	
1	3	7	1	10	008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	
1	3	7	1	11	001	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi- Optik	
1	3	7	1	11	002	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi- Ukur/Instrumen	
1	3	7	1	11	003	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi- Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	
1	3	7	1	11	004	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika- Mekanik	
1	3	7	1	11	005	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika- Elektronik/ <i>Electric</i>	
1	3	7	1	11	006	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika- Manual	
1	3	7	1	11	007	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika- Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya	
1	3	7	1	12	001	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin- Bor Mesin Tumbuk	
1	3	7	1	12	002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin- Bor Mesin Putar	
1	3	7	1	12	003	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin- Alat Pengeboran Mesin Lainnya	
1	3	7	1	12	004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka	
1	3	7	1	12	005	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek	
1	3	7	1	12	006	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Putar	
1	3	7	1	12	007	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu	
1	3	7	1	12	008	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya	
1	3	7	1	13	001	Akumulasi Penyusutan Sumur-Peralatan Sumur Minyak	
1	3	7	1	13	002	Akumulasi Penyusutan Sumur-Sumur Pemboran	
1	3	7	1	13	003	Akumulasi Penyusutan Sumur-Sumur Lainnya	
1	3	7	1	13	004	Akumulasi Penyusutan Produksi-RIG	
1	3	7	1	13	005	Akumulasi Penyusutan Produksi-Produksi Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	7	1	13	006	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak	
1	3	7	1	13	007	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	
1	3	7	1	13	008	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam	
1	3	7	1	13	009	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax	
1	3	7	1	13	10	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya	
1	3	7	1	14	001	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi- Mekanik	
1	3	7	1	14	002	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi- Elektrik	
1	3	7	1	14	003	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	
1	3	7	1	14	004	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi- Perawatan Sumur	
1	3	7	1	14	005	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi-Tes Unit	
1	3	7	1	14	006	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya	
1	3	7	1	15	001	Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Radiasi	
1	3	7	1	15	002	Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Suara	
1	3	7	1	15	003	Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya	
1	3	7	1	15	004	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Baju Pengaman	
1	3	7	1	15	005	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Masker	
1	3	7	1	15	006	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Topi Kerja	
1	3	7	1	15	007	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Sabuk Pengaman	
1	3	7	1	15	008	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	
1	3	7	1	15	009	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Penolong	
1	3	7	1	15	10	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	
1	3	7	1	15	11	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air	
1	3	7	1	15	12	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat SAR Lainnya	
1	3	7	1	15	13	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan	
1	3	7	1	15	14	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan	
1	3	7	1	15	15	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan	
1	3	7	1	15	16	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	
1	3	7	1	15	17	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	
1	3	7	1	15	18	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-	
1	3	7	1	15	19	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Alat Kerja Penerbangan Lainnya	
1	3	7	1	16	001	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	
1	3	7	1	16	002	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan	
1	3	7	1	16	003	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	
1	3	7	1	17	001	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment	
1	3	7	1	17	002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment	
1	3	7	1	17	003	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening Equipment	
1	3	7	1	17	004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Classifier	
1	3	7	1	17	005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment	
1	3	7	1	17	006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment	
1	3	7	1	17	007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment	
1	3	7	1	17	008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Leaching	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
						Equipment	
1	3	7	1	17	009	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation Equipment	
1	3	7	1	17	10	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering Equipment	
1	3	7	1	17	11	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid	
1	3	7	1	17	12	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment	
1	3	7	1	17	13	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Drying Equipment	
1	3	7	1	17	14	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment	
1	3	7	1	17	15	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Separation Equipment	
1	3	7	1	17	16	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Distillation Equipment	
1	3	7	1	17	17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Separation Equipment	
1	3	7	1	17	18	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Isotope Separation Equipment	
1	3	7	1	17	19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid	
1	3	7	1	17	20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment	
1	3	7	1	17	21	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment	
1	3	7	1	17	22	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment	
1	3	7	1	17	23	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer Equipment	
1	3	7	1	17	24	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process	
1	3	7	1	17	25	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment	
1	3	7	1	17	26	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	
1	3	7	1	18	001	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	
1	3	7	1	18	002	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	
1	3	7	1	18	003	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	
1	3	7	1	18	004	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway/Threshold Light	
1	3	7	1	18	005	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Visual Approach Slope Indicator (VASI)	
1	3	7	1	18	006	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Approach Light	
1	3	7	1	18	007	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway Identification Light (REILS)	
1	3	7	1	18	008	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Signal	
1	3	7	1	18	009	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Flood Lights	
1	3	7	1	18	10	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	
1	3	7	1	18	11	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	
1	3	7	1	18	12	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	
1	3	7	1	19	001	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Atletik	
1	3	7	1	19	002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan	
1	3	7	1	19	003	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Senam	
1	3	7	1	19	004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Air	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	7	1	19	005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Udara	
1	3	7	1	19	006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Lainnya	
1	3	7	2	1	001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-	
1	3	7	2	1	002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang	
1	3	7	2	1	003	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	
1	3	7	2	1	004	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Instalasi	
1	3	7	2	1	005	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Laboratorium	
1	3	7	2	1	006	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	
1	3	7	2	1	007	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Oseanarium/Observatorium	
1	3	7	2	1	008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
1	3	7	2	1	009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	
1	3	7	2	1	10	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
1	3	7	2	1	11	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga	
1	3	7	2	1	12	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	
1	3	7	2	1	13	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	
1	3	7	2	1	14	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool	
1	3	7	2	1	15	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pemotong Hewan	
1	3	7	2	1	16	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Perpustakaan	
1	3	7	2	1	17	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-	
1	3	7	2	1	18	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	
1	3	7	2	1	19	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Pengujian Kelaikan	
1	3	7	2	1	20	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan	
1	3	7	2	1	21	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Rumah Tahanan	
1	3	7	2	1	22	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Krematorium	
1	3	7	2	1	23	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	
1	3	7	2	1	24	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Tempat Persidangan	
1	3	7	2	1	25	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Terbuka	
1	3	7	2	1	26	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Penampung Sekam	
1	3	7	2	1	27	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
1	3	7	2	1	28	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Industri	
1	3	7	2	1	29	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peternakan/Perikanan	
1	3	7	2	1	30	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
1	3	7	2	1	31	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peralatan Geofisika	
1	3	7	2	1	32	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Fasilitas Umum	
1	3	7	2	1	33	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Parkir	
1	3	7	2	1	34	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pabrik	
1	3	7	2	1	35	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Stasiun Bus	
1	3	7	2	1	36	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Taman	
1	3	7	2	1	37	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
						Tempat Kerja Lainnya	
1	3	7	2	1	38	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	
1	3	7	2	1	39	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	
1	3	7	2	1	40	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	
1	3	7	2	1	41	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	
1	3	7	2	1	42	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	
1	3	7	2	1	43	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel	
1	3	7	2	1	44	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel	
1	3	7	2	1	45	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	
1	3	7	2	1	46	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	
1	3	7	2	1	47	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan	
1	3	7	2	1	48	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen	
1	3	7	2	1	49	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	
1	3	7	2	1	50	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	
1	3	7	2	2	001	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi	
1	3	7	2	1	002	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	
1	3	7	2	1	003	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	
1	3	7	2	1	004	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	
1	3	7	2	3	001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	
1	3	7	2	3	002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	
1	3	7	2	3	003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	
1	3	7	2	3	004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas	
1	3	7	2	3	005	Akumulasi Penyusutan Perambuan-Bangunan Lainnya	
1	3	7	2	4	001	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas- Tugu/Tanda Batas Administrasi	
1	3	7	2	4	002	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas- Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	
1	3	7	2	4	003	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	
1	3	7	2	4	004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	
1	3	7	2	4	005	Akumulasi	
1	3	7	3	1	001	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional	
1	3	7	3	1	002	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Provinsi	
1	3	7	3	1	003	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	
1	3	7	3	1	004	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kota	
1	3	7	3	1	005	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa	
1	3	7	3	1	006	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Tol	
1	3	7	3	1	007	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kereta Api	
1	3	7	3	1	008	Akumulasi Penyusutan Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang	
1	3	7	3	1	009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	
1	3	7	3	1	10	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	
1	3	7	3	1	11	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional	
1	3	7	3	1	12	Akumulasi Penyusutan pada Jalan Provinsi	
1	3	7	3	1	13	Akumulasi Penyusutan pada Jalan Kabupaten	
1	3	7	3	1	14	Akumulasi Penyusutan pada Jalan Kota	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	7	3	1	15	Akumulasi Penyusutan pada Jalan Desa	
1	3	7	3	1	16	Akumulasi Penyusutan pada Jalan Tol	
1	3	7	3	1	17	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api	
1	3	7	3	1	18	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	
1	3	7	3	1	19	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus	
1	3	7	3	1	20	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan	
1	3	7	3	1	21	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal	
1	3	7	3	1	22	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Pengukur	
1	3	7	3	1	23	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Lainnya	
1	3	7	3	2	001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Waduk Irigasi	
1	3	7	3	2	002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi	
1	3	7	3	2	003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi	
1	3	7	3	2	004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembuang Irigasi	
1	3	7	3	2	005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi	
1	3	7	3	2	006	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pelengkap Irigasi	
1	3	7	3	2	007	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Sawah Irigasi	
1	3	7	3	2	008	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya	
1	3	7	3	2	009	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut	
1	3	7	3	2	10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut	
1	3	7	3	2	11	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut	
1	3	7	3	2	12	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	
1	3	7	3	2	13	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	
1	3	7	3	2	14	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut	
1	3	7	3	2	15	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut	
1	3	7	3	2	16	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	
1	3	7	3	2	17	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	
1	3	7	3	2	18	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	
1	3	7	3	2	19	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	
1	3	7	3	2	20	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	
1	3	7	3	2	21	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	
1	3	7	3	2	22	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	
1	3	7	3	2	23	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	
1	3	7	3	2	24	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	7	3	2	25	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	
1	3	7	3	2	26	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	
1	3	7	3	2	27	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	
1	3	7	3	2	28	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	
1	3	7	3	2	29	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	
1	3	7	3	2	30	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	
1	3	7	3	2	31	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	
1	3	7	3	2	32	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	
1	3	7	3	2	33	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	
1	3	7	3	2	34	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	
1	3	7	3	2	35	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	
1	3	7	3	2	36	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	
1	3	7	3	2	37	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	
1	3	7	3	2	38	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	
1	3	7	3	2	39	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	
1	3	7	3	2	40	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	
1	3	7	3	2	41	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	
1	3	7	3	2	42	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	
1	3	7	3	2	43	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	
1	3	7	3	2	44	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	
1	3	7	3	2	45	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	
1	3	7	3	2	46	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor	
1	3	7	3	2	47	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Waduk Air Kotor	
1	3	7	3	2	48	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembuang Air Kotor	
1	3	7	3	2	49	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pengaman Air Kotor	
1	3	7	3	2	50	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pelengkap Air Kotor	
1	3	7	3	2	51	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Air Kotor Lainnya	
1	3	7	3	3	001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
						Permukaan	
1	3	7	3	3	002	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	
1	3	7	3	3	003	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	
1	3	7	3	3	004	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	
1	3	7	3	3	005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	
1	3	7	3	3	006	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Domestik	
1	4	3	3	7	007	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Industri	
1	3	7	3	3	008	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Pertanian	
1	3	7	3	3	009	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Kotor Lainnya	
1	3	7	3	3	10	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	
1	3	7	3	3	11	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	
1	3	7	3	3	12	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	
1	3	7	3	3	13	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	
1	3	7	3	3	14	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan	
1	3	7	3	3	15	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	
1	3	7	3	3	16	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	
1	4	3	3	7	17	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	
1	3	7	3	3	18	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	
1	3	7	3	3	19	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	
1	3	7	3	3	20	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	
1	3	7	3	3	21	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	
1	3	7	3	3	22	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	
1	3	7	3	3	23	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga	
1	3	7	3	3	24	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	
1	3	7	3	3	25	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	
1	3	7	3	3	26	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	
1	4	3	3	7	27	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	
1	3	7	3	3	28	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera	
1	3	7	3	3	29	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	
1	3	7	3	3	30	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Induk	
1	3	7	3	3	31	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Distribusi	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	3	7	3	3	32	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Pusat Pengatur Listrik	
1	3	7	3	3	33	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Lainnya	
1	3	7	3	3	34	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan- Instalasi Pertahanan di Darat	
1	3	7	3	3	35	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan- Instalasi Pertahanan Lainnya	
1	3	7	3	3	36	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas	
1	4	3	3	7	37	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas	
1	3	7	3	3	38	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas	
1	3	7	3	3	39	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya	
1	3	7	3	3	40	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengaman Penangkal Petir	
1	4	3	3	3	41	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Reaktor Nuklir	
1	3	7	3	3	42	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	
1	3	7	3	3	43	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengaman Lainnya	
1	3	7	3	3	44	Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain	
1	3	7	3	4	001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Pembawa	
1	3	7	3	4	002	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Induk Distribusi	
1	3	7	3	4	003	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Cabang Distribusi	
1	3	7	3	4	004	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Sambungan ke Rumah	
1	3	7	3	4	005	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Air Minum Lainnya	
1	3	7	3	4	006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	
1	3	7	3	4	007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	
1	3	7	3	4	008	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	
1	3	7	3	4	009	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di atas Tanah	
1	3	7	3	4	10	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di bawah Tanah	
1	3	7	3	4	11	Akumulasi Penyusutan Jaringan Jaringan Telepon di dalam Air	
1	3	7	3	4	12	Akumulasi Penyusutan Jaringan Jaringan dengan Media Udara	
1	3	7	3	4	13	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon Lainnya	
1	3	7	3	4	14	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi	
1	3	7	3	4	15	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	
1	3	7	3	4	16	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas	
1	3	7	3	4	17	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan BBM	
1	3	7	3	4	18	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya	
1	3	7	4	1	001	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	
1	3	7	4	2	001	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi	
1	4	1	1	1	001	Dana Cadangan ...	
1	4	1	1	1	002	Dst ...	
1	5	1	1	1	001	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III.	
1	5	1	1	2	001	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas.	
1	5	1	2	1	001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	
1	5	1	2	2	001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	
1	5	2	1	1	001	Sewa	
1	5	2	1	1	002	Kerja Sama Pemanfaatan	
1	5	2	1	1	003	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	
1	5	2	1	1	004	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	
1	5	3	1	1	001	Goodwill	
1	5	3	1	1	002	Lisensi dan <i>Franchise</i>	
1	5	3	3	1	003	Hak Cipta	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
1	5	3	4	1	004	Hak Paten	
1	5	3	1	1	005	Software	
1	5	3	1	1	006	Kajian	
1	5	3	1	1	007	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	
1	5	3	1	1	008	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	
1	5	3	1	1	009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	
1	5	4	1	1	001	Aset Rusak Berat/Usang	
1	5	4	1	1	002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	
1	5	4	1	1	002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	
1	5	5	1	1	001	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise	
1	5	5	1	1	002	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	
1	5	5	1	1	003	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	
1	5	5	1	1	004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	
1	5	5	1	1	005	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian	
1	5	6	1	1	001	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	
1	5	5	1	1	002	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	
1	5	5	1	1	003	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	
1	5	5	1	1	004	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur	
2	1	1	1	1	001	Utang Taspen	
2	1	1	2	1	001	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	
2	1	1	3	1	001	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	
2	1	1	4	1	001	Utang Iuran Jaminan Kematian	
2	1	1	5	1	001	Utang PPh 21	
2	1	1	5	2	001	Utang PPh 22	
2	1	1	5	3	001	Utang PPh 23	
2	1	1	5	4	001	Utang PPh 25	
2	1	1	6	1	001	Utang PPN Pusat	
2	1	1	7	1	001	Utang Taperum	
2	1	1	8	1	001	Utang Iuran Wajib Pegawai	
2	1	2	1	1	001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...-Jangka Menengah	
2	1	2	1	1	002	Dst ...	
2	1	2	1	2	001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...-Jangka Panjang	
2	1	2	1	2	002	Dst ...	
2	1	2	1	3	001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri ...-Jangka Menengah	
2	1	2	1	3	002	Dst ...	
2	1	2	1	4	001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri ...-Jangka Panjang	
2	1	2	1	4	002	Dst ...	
2	1	2	1	5	001	Utang Bunga Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Menengah	
2	1	2	1	5	002	Dst ...	
2	1	2	1	6	001	Utang Bunga Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Panjang	
2	1	2	1	6	002	Dst ...	
2	1	2	2	1	001	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain ...- Jangka Pendek	
2	1	2	2	1	002	Dst ...	
2	1	2	3	1	001	Utang kepada LKB-BUMN ...-Jangka Pendek	
2	1	2	3	1	002	Dst ...	
2	1	2	3	2	001	Utang kepada LKB-BUMN ...-Jangka Menengah	
2	1	2	3	2	002	Dst ...	
2	1	2	3	3	001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMN ...-Jangka Panjang	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	2	3	3	002	Dst ...	
2	1	2	3	4	001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMD ...-Jangka Pendek	
2	1	2	3	4	002	Dst ...	
2	1	2	3	5	001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMD ...-Jangka Menengah	
2	1	2	3	5	002	Dst ...	
2	1	2	3	6	001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMD ...-Jangka Panjang	
2	1	2	3	6	002	Dst ...	
2	1	2	3	7	001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta ...-Jangka Pendek	
2	1	2	3	7	002	Dst ...	
2	1	2	3	8	001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta ...-Jangka Menengah	
2	1	2	3	8	002	Dst ...	
2	1	2	3	9	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank- Swasta ...-Jangka Panjang	
2	1	2	3	9	002	Dst ...	
2	1	2	4	1	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN ...-Jangka Pendek	
2	1	2	4	1	002	Dst ...	
2	1	2	4	2	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN ...-Jangka Menengah	
2	1	2	4	2	002	Dst ...	
2	1	2	4	3	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN ...-Jangka Panjang	
2	1	2	4	3	002	Dst ...	
2	1	2	4	4	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD ...-Jangka Pendek	
2	1	2	4	4	002	Dst ...	
2	1	2	4	5	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD ...-Jangka Menengah	
2	1	2	4	5	002	Dst ...	
2	1	2	4	6	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD-Jangka Panjang	
2	1	2	4	6	002	Dst ...	
2	1	2	4	7	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta-Jangka Pendek	
2	1	2	4	7	002	Dst ...	
2	1	2	4	8	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan	
2	1	2	4	8	002	Dst ...	
2	1	2	4	9	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta-Jangka Panjang	
2	1	2	4	9	002	Dst ...	
2	1	2	5	1	001	Utang Bunga Obligasi Daerah	
2	1	2	6	1	001	Utang Bunga BLUD ...-Jangka Pendek	
2	1	2	6	1	002	Dst ...	
2	1	2	6	2	001	Utang Bunga BLUD ...-Jangka Menengah	
2	1	2	6	2	002	Dst ...	
2	1	2	6	3	001	Utang Bunga BLUD ...-Jangka Panjang	
2	1	2	6	3	002	Dst ...	
2	1	3	1	1	001	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah ...- Jangka Pendek	
2	1	3	1	1	002	Dst ...	
2	1	3	2	1	001	Utang Pinjaman dari LKB-BUMN ...-Jangka Pendek	
2	1	3	2	1	002	Dst ...	
2	1	3	2	2	001	Utang Pinjaman dari LKB-BUMD ...-Jangka Pendek	
2	1	3	2	2	002	Dst ...	
2	1	3	2	3	001	Utang Pinjaman dari LKB-Swasta ...-Jangka Pendek	
2	1	3	2	3	002	Dst ...	
2	1	3	3	1	001	Utang Pinjaman dari LKBB-BUMN ...-Jangka Pendek	
2	1	3	3	1	002	Dst ...	
2	1	3	3	2	001	Utang Pinjaman dari LKBB-BUMD ...-Jangka Pendek	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	3	3	2	002	Dst ...	
2	1	3	3	3	001	Utang Pinjaman dari LKBB-Swasta ...-Jangka Pendek	
2	1	3	3	3	002	Dst ...	
2	1	3	4	1	001	Utang Pinjaman BLUD ...-Jangka Pendek	
2	1	3	4	1	002	Dst ...	
2	1	4	1	1	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...-Jangka Menengah	
2	1	4	1	1	002	Dst ...	
2	1	4	1	2	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...-Jangka Panjang	
2	1	4	1	2	002	Dst ...	
2	1	4	1	3	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...-Jangka Menengah	
2	1	4	1	3	002	Dst ...	
2	1	4	1	4	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...-Jangka Panjang	
2	1	4	1	4	002	Dst ...	
2	1	4	1	5	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan ...-Jangka Menengah	
2	1	4	1	5	002	Dst ...	
2	1	4	1	6	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-Jangka Panjang	
2	1	4	1	6	002	Dst ...	
2	1	4	2	1	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMN ...-Jangka Menengah	
2	1	4	2	1	002	Dst ...	
2	1	4	2	2	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMN ... -Jangka Panjang	
2	1	4	2	2	002	Dst ...	
2	1	4	2	3	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMD ...-Jangka Menengah	
2	1	4	2	3	002	Dst ..	
2	1	4	2	4	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMD ...-Jangka Panjang	
2	1	4	2	4	002	Dst ..	
2	1	4	2	5	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-Swasta ...-Jangka Menengah	
2	1	4	2	5	002	Dst ...	
2	1	4	2	6	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-Swasta ...-Jangka Panjang	
2	1	4	2	6	002	Dst ...	
2	1	4	3	1	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Menengah	
2	1	4	3	1	002	Dst ...	
2	1	4	3	2	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN ...- Jangka Panjang	
2	1	4	3	2	002	Dst ...	
2	1	4	3	3	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Menengah	
2	1	4	3	3	002	Dst ...	
2	1	4	3	4	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Panjang	
2	1	4	3	4	002	Dst ...	
2	1	4	3	5	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Menengah	
2	1	4	3	5	002	Dst ...	
2	1	4	3	6	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta ...- Jangka Panjang	
2	1	4	3	6	002	Dst ...	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	4	4	1	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat-Obligasi Daerah	
2	1	4	5	1	001	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD ...- Jangka Menengah	
2	1	4	5	1	002	Dst ...	
2	1	4	5	2	001	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD ...- Jangka Panjang	
2	1	4	5	2	002	Dst ...	
2	1	5	1	1	001	Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III	
2	1	5	2	1	001	Uang Muka Penjualan Daerah Dari Pihak III	
2	1	5	3	1	001	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	
2	1	6	1	1	001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	
2	1	6	1	1	002	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	
2	1	6	1	1	003	Utang Belanja Tunjangan Tunjangan Keluarga PNS	
2	1	6	1	1	004	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PPPK	
2	1	6	1	1	005	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN- Tunjangan Jabatan PNS	
2	1	6	1	1	006	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN- Tunjangan Jabatan PPPK	
2	1	6	1	1	007	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PNS	
2	1	6	1	1	008	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PPPK	
2	1	6	1	1	009	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	
2	1	6	1	1	10	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN- Tunjangan Fungsional Umum PPPK	
2	1	6	1	1	11	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	
2	1	6	1	1	12	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK	
2	1	6	1	1	13	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS	
2	1	6	1	1	14	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN -Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	
2	1	6	1	1	15	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN- Pembulatan Gaji PNS	
2	1	6	1	1	16	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN- Pembulatan Gaji PPPK	
2	1	6	1	1	17	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	
2	1	6	1	1	18	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	
2	1	6	1	1	19	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	
2	1	6	1	1	20	Utang Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja ASN- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	
2	1	6	1	1	21	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN- Iuran Jaminan Kematian PNS	
2	1	6	1	1	22	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN- Iuran Jaminan Kematian PPPK	
2	1	6	1	2	001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	
2	1	6	1	2	002	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	
2	1	6	1	2	003	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	
2	1	6	1	2	004	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	
2	1	6	1	2	005	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	
2	1	6	1	2	006	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	
2	1	6	1	2	007	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	
2	1	6	1	2	008	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	1	2	009	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	
2	1	6	1	2	10	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	
2	1	6	1	3	001	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor	
2	1	6	1	3	002	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
2	1	6	1	3	003	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
2	1	6	1	3	004	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan	
2	1	6	1	3	005	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok	
2	1	6	1	3	006	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	
2	1	6	1	3	007	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	
2	1	6	1	3	008	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	
2	1	6	1	3	009	Utang Belanja Insentif bagi ASN Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	
2	1	6	1	3	10	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	
2	1	6	1	3	11	Utang Belanja Insentif bagi ASN Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	
2	1	6	1	3	12	Utang Belanja Insentif bagi ASN Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	
2	1	6	1	3	13	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	
2	1	6	1	3	14	Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi ASN	
2	1	6	1	3	15	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
2	1	6	1	3	16	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
2	1	6	1	3	17	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kesehatan	
2	1	6	1	3	18	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	
2	1	6	1	3	19	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
2	1	6	1	3	20	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
2	1	6	1	3	21	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pasar	
2	1	6	1	3	22	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengujian Kendaraan Bermotor	
2	1	6	1	3	23	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
2	1	6	1	3	24	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penggantian Biaya Cetak Peta	
2	1	6	1	3	25	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
2	1	6	1	3	26	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengolahan Limbah Cair	
2	1	6	1	3	27	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Tera/Tera Ulang	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	1	3	28	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pendidikan bagi ASN	
2	1	6	1	3	29	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	
2	1	6	1	3	30	Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Kekayaan Daerah	
2	1	6	1	3	31	Utang Belanja Insentif bagi ASN Pemungutan Retribusi Daerah-Pasar dan/atau Pertokoan	
2	1	6	1	3	32	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyediaan Tempat Pelelangan	
2	1	6	1	3	33	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Terminal	
2	1	6	1	3	34	Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Khusus Parkir	
2	1	6	1	3	35	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	
2	1	6	1	3	36	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Rumah Potong Hewan	
2	1	6	1	3	37	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kepelabuhan	
2	1	6	1	3	38	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Rekreasi dan Olahraga	
2	1	6	1	3	39	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyeberangan Air	
2	1	6	1	3	40	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penjualan Produksi Usaha Daerah	
2	1	6	1	3	41	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan	
2	1	6	1	3	42	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
2	1	6	1	3	43	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	
2	1	6	1	3	44	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Usaha Perikanan	
2	1	6	1	3	45	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengendalian Lalu Lintas	
2	1	6	1	3	46	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
2	1	6	1	3	47	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	
2	1	6	1	3	48	Utang Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD- Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	
2	1	6	1	3	49	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	
2	1	6	1	3	50	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	
2	1	6	1	3	51	Utang Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	
2	1	6	1	4	001	Utang Belanja Uang Representasi DPRD-Uang Representasi DPRD	
2	1	6	1	4	002	Utang Belanja Tunjangan Keluarga DPRD-	
2	1	6	1	4	003	Utang Belanja Tunjangan Beras DPRD- Tunjangan Beras DPRD	
2	1	6	1	4	004	Utang Belanja Uang Paket DPRD-Uang Paket DPRD	
2	1	6	1	4	005	Utang Belanja Belanja Tunjangan Jabatan DPRD-Tunjangan Jabatan DPRD	
2	1	6	1	4	006	Utang Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	
2	1	6	1	4	007	Utang Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	
2	1	6	1	4	008	Utang Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	1	4	009	Utang Belanja Tunjangan Reses DPRD- Tunjangan Reses DPRD	
2	1	6	1	4	10	Utang Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD- Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	
2	1	6	1	4	11	Utang Belanja Pembulatan Gaji DPRD- Pembulatan Gaji DPRD	
2	1	6	1	4	12	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kesehatan DPRD	
2	1	6	1	4	13	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	
2	1	6	1	4	14	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kematian DPRD	
2	1	6	1	4	15	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Perumahan DPRD	
2	1	6	1	4	16	Utang Belanja Tunjangan Transportasi DPRD- Tunjangan Transportasi DPRD	
2	1	6	1	4	17	Utang Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD- Uang Jasa Pengabdian DPRD	
2	1	6	1	5	001	Utang Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH-Gaji Pokok KDH/WKDH	
2	1	6	1	5	002	Utang Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH- Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	
2	1	6	1	5	003	Utang Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH- Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	
2	1	6	1	5	004	Utang Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH- Tunjangan Beras KDH/WKDH	
2	1	6	1	5	005	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	
2	1	6	1	5	006	Utang Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH- Pembulatan Gaji KDH/WKDH	
2	1	6	1	5	007	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	
2	1	6	1	5	008	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	
2	1	6	1	5	009	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	
2	1	6	1	5	10	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	
2	1	6	1	5	11	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
2	1	6	1	5	12	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
2	1	6	1	5	13	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pengumutan Pajak Air Permukaan	
2	1	6	1	5	14	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pengumutan Pajak Rokok	
2	1	6	1	5	15	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	
2	1	6	1	5	16	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	
2	1	6	1	5	17	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	
2	1	6	1	5	18	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	
2	1	6	1	5	19	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	
2	1	6	1	5	20	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	
2	1	6	1	5	21	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	1	5	22	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	
2	1	6	1	5	23	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
2	1	6	1	5	24	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
2	1	6	1	5	25	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
2	1	6	1	5	26	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	
2	1	6	1	5	27	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
2	1	6	1	5	28	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
2	1	6	1	5	29	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
2	1	6	1	5	30	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan	
2	1	6	1	5	31	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	
2	1	6	1	5	32	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
2	1	6	1	5	33	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	
2	1	6	1	5	34	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
2	1	6	1	5	35	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	
2	1	6	1	5	36	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	
2	1	6	1	5	37	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	
2	1	6	1	5	38	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	
2	1	6	1	5	39	Utang Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	
2	1	6	1	5	40	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	
2	1	6	1	5	41	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	
2	1	6	1	5	42	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	
2	1	6	1	5	43	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	
2	1	6	1	5	44	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	
2	1	6	1	5	45	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	
2	1	6	1	5	46	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	
2	1	6	1	5	47	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	
2	1	6	1	5	48	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyeberangan Air	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	1	5	49	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	
2	1	6	1	5	50	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	
2	1	6	1	5	51	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
2	1	6	1	5	52	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	
2	1	6	1	5	53	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	
2	1	6	1	5	54	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Pengendalian Lalu Lintas	
2	1	6	1	5	55	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	
2	1	6	1	6	001	Utang Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD-Dana Operasional Pimpinan DPRD	
2	1	6	1	6	002	Utang Belanja Dana Operasional KDH/WKDH- Dana Operasional KDH/WKDH	
2	1	6	2	1	001	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Tulis Kantor	
2	1	6	2	1	002	Utang Belanja Bahan Pakai Habis- Dokumen/Administrasi Tender	
2	1	6	2	1	003	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Listrik dan Elektronik	
2	1	6	2	1	004	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	
2	1	6	2	1	005	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	
2	1	6	2	1	006	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Bahan Bakar Minyak/Gas	
2	1	6	2	1	007	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	
2	1	6	2	1	008	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Pengisian Tabung Gas	
2	1	6	2	1	009	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Laboratorium	
2	1	6	2	1	10	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Rumah Tangga Kantor	
2	1	6	2	1	11	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Hadiah	
2	1	6	2	1	12	Lomba/Penghargaan/Suvenir	
2	1	6	2	1	12	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi	
2	1	6	2	1	13	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Perkakas Kerja	
2	1	6	2	1	14	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Kesehatan Pakai Habis	
2	1	6	2	1	15	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi	
2	1	6	2	1	16	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Perlengkapan Penerangan Jalan Umum	
2	1	6	2	1	17	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Bahan Peraga	
2	1	6	2	1	18	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Tong Sampah	
2	1	6	2	1	19	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai	
2	1	6	2	1	20	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Kesehatan	
2	1	6	2	1	21	Utang Belanja Bahan Pakai Habis Barang Pakai Habis Kebersihan	
2	1	6	2	1	22	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Keamanan dan Ketertiban	
2	1	6	2	1	23	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Lingkungan Hidup	
2	1	6	2	1	24	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Penanggulangan Bencana	
2	1	6	2	1	25	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Olahraga	
2	1	6	2	1	26	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Kesenian dan Kebudayaan	
2	1	6	2	1	27	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Transportasi dan Lalu Lintas	
2	1	6	2	1	28	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Perikanan dan Kelautan	
2	1	6	2	1	29	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	1	30	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Pertamanan dan Pemakaman	
2	1	6	2	1	31	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Perairan dan Tata Air	
2	1	6	2	1	32	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Bangunan	
2	1	6	2	1	33	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Jalan dan Jembatan	
2	1	6	2	1	34	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Saluran	
2	1	6	2	1	35	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Sandang	
2	1	6	2	1	36	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Pangan	
2	1	6	2	1	37	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi	
2	1	6	2	1	38	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Baku Bangunan	
2	1	6	2	1	39	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan/Bibit Tanaman	
2	1	6	2	1	40	Utang Belanja Bahan/Material-Bibit Ternak	
2	1	6	2	1	41	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Obat- Obatan	
2	1	6	2	1	42	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Kimia	
2	1	6	2	1	43	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Laboratorium	
2	1	6	2	1	44	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan dan Pangan	
2	1	6	2	1	45	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Makanan Ternak/Binatang	
2	1	6	2	1	46	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Percontohan	
2	1	6	2	1	47	Utang Belanja Bahan/Material-Ban Kendaraan Dinas Operasional	
2	1	6	2	1	48	Utang Belanja Bahan/Material-Ban Kendaraan Dinas Operasional Khusus	
2	1	6	2	1	49	Utang Belanja Bahan/Material-Ban Sepeda Motor Dinas Operasional	
2	1	6	2	1	50	Utang Belanja Bahan/Material-Ban Alat-Alat Berat	
2	1	6	2	1	51	Utang Belanja Bahan/Material-Aki Kendaraan Dinas Operasional	
2	1	6	2	1	52	Utang Belanja Bahan/Material-Aki Sepeda Motor Dinas Operasional	
2	1	6	2	1	53	Utang Belanja Bahan/Material-Aki Alat-Alat Berat	
2	1	6	2	1	54	Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional	
2	1	6	2	1	55	Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Khusus	
2	1	6	2	1	56	Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Sepeda Motor Dinas Operasional	
2	1	6	2	1	57	Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Alat-Alat Berat	
2	1	6	2	1	58	Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Transportasi Laut dan Sungai	
2	1	6	2	1	59	Utang Belanja Bahan/Material-BBM Kendaraan Dinas Operasional	
2	1	6	2	1	60	Utang Belanja Bahan/Material-BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus	
2	1	6	2	1	61	Utang Belanja Bahan/Material-BBM Sepeda Motor Dinas Operasional	
2	1	6	2	1	62	Utang Belanja Bahan/Material-BBM Alat-Alat Berat/Genset	
2	1	6	2	1	63	Utang Belanja Bahan/Material-BBM Transportasi Laut dan Sungai	
2	1	6	2	1	64	Utang Belanja Bahan/Material-BBG Kendaraan Bermotor	
2	1	6	2	1	65	Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Alat-Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi	
2	1	6	2	1	66	Utang Belanja Bahan/Material-Aki Kendaraan Dinas Operasional Khusus	
2	1	6	2	1	67	Utang Belanja Bahan/Material-Papan Nama Kepemilikan Aset	
2	1	6	2	1	68	Utang Belanja Cetak/Penggandaan-Cetak	
2	1	6	2	1	69	Utang Belanja Cetak/Penggandaan-Penggandaan	
2	1	6	2	1	70	Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Harian Pegawai	
2	1	6	2	1	71	Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Rapat	
2	1	6	2	1	72	Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Tamu	
2	1	6	2	1	73	Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia	
2	1	6	2	1	74	Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Lembur	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	1	75	Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Pemberian Makanan Tambahan pada Pos Pelayanan Terpadu	
2	1	6	2	1	76	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya- Pakaian Dinas KDH dan WKDH	
2	1	6	2	1	77	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya- Pakaian Sipil Harian (PSH)	
2	1	6	2	1	78	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya- Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	
2	1	6	2	1	79	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya- Pakaian Dinas Harian (PDH)	
2	1	6	2	1	80	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya- Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	
2	1	6	2	1	81	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya- Pakaian Sipil Resmi (PSR)	
2	1	6	2	1	82	Utang Belanja Pakaian Kerja-Pakaian Kerja Lapangan	
2	1	6	2	1	83	Utang Belanja Pakaian Kerja-Pakaian Kerja Laboratorium	
2	1	6	2	1	84	Utang Belanja Pakaian Kerja-Pakaian Kerja Bengkel	
2	1	6	2	1	85	Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian KORPRI	
2	1	6	2	1	86	Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian Adat Daerah	
2	1	6	2	1	87	Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian Batik Tradisional	
2	1	6	2	1	88	Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian Olahraga	
2	1	6	2	1	89	Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian Paskibraka	
2	1	6	2	1	90	Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian Jas/Safari	
2	1	6	2	2	001	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan	
2	1	6	2	2	002	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	
2	1	6	2	2	003	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Perangkat UKPBJ	
2	1	6	2	2	004	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	
2	1	6	2	2	005	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengurus/Penyimpan BMD	
2	1	6	2	2	006	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	
2	1	6	2	2	007	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara	
2	1	6	2	2	008	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyuluh Non ASN	
2	1	6	2	2	009	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Rohaniawan	
2	1	6	2	2	10	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa	
2	1	6	2	2	11	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan	
2	1	6	2	2	12	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	
2	1	6	2	2	13	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pengamanan	
2	1	6	2	2	14	Utang Belanja Jasa Kantor-Telepon	
2	1	6	2	2	15	Utang Belanja Jasa Kantor-Air	
2	1	6	2	2	16	Utang Belanja Jasa Kantor-Listrik	
2	1	6	2	2	17	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	
2	1	6	2	2	18	Utang Belanja Jasa Kantor-Surat Kabar/Majalah	
2	1	6	2	2	19	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/Pos	
2	1	6	2	2	20	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman	
2	1	6	2	2	21	Utang Belanja Jasa Kantor-Sertifikasi	
2	1	6	2	2	22	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan	
2	1	6	2	2	23	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	
2	1	6	2	2	24	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
2	1	6	2	2	25	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	2	26	Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum	
2	1	6	2	2	27	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengukuran Tanah	
2	1	6	2	2	28	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Jalan/Tol	
2	1	6	2	2	29	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	
2	1	6	2	2	30	Utang Belanja Jasa Kantor-Penambahan Daya	
2	1	6	2	2	31	Utang Belanja Jasa Kantor- Registrasi/Keanggotaan	
2	1	6	2	2	32	Utang Belanja Jasa Kantor-Perawatan Pasien Tidak Mampu	
2	1	6	2	2	33	Utang Belanja Jasa Kantor-Penguburan Jenazah Masyarakat Tidak Mampu	
2	1	6	2	2	34	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	
2	1	6	2	2	35	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemindahan Benda Bersejarah	
2	1	6	2	2	36	Utang Belanja Jasa Kantor-Pelayanan Santunan Sosial	
2	1	6	2	2	37	Utang Belanja Jasa Kantor-SPP Siswa Kurang Mampu	
2	1	6	2	2	38	Utang Belanja Jasa Kantor-Pelayanan Kesehatan Korban Bencana	
2	1	6	2	2	39	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	
2	1	6	2	2	40	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengambilan/Pengumpulan/Pengangkutan Sampah	
2	1	6	2	2	41	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Analisa	
2	1	6	2	2	42	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator Bus Sekolah	
2	1	6	2	2	43	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Pengisian BBG/BBM	
2	1	6	2	2	44	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian/Rumah Tangga	
2	1	6	2	2	45	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengurusan Perkara Hukum	
2	1	6	2	2	46	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Boga	
2	1	0	2	2	47	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyedia Tenaga Kerja	
2	1	6	2	2	48	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Asuransi, Perbankan, dan Keuangan	
2	1	6	2	2	49	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kependudukan	
2	1	6	2	2	50	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	
2	1	6	2	2	51	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi	
2	1	6	2	2	52	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengepakan, Pengangkutan, Pengurusan, dan Penyampaian Barang	
2	1	6	2	2	53	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penjahitan/Konveksi	
2	1	6	2	2	54	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Impor/Ekspor	
2	1	6	2	2	55	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penulisan dan Penerjemahan	
2	1	6	2	2	56	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyewaan	
2	1	6	2	2	57	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelaman	
2	1	6	2	2	58	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Akomodasi	
2	1	6	2	2	59	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Angkutan Penumpang	
2	1	6	2	2	60	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara	
2	1	6	2	2	61	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan Aset	
2	1	6	2	2	62	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Perpustakaan	
2	1	6	2	2	63	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kearsipan	
2	1	6	2	2	64	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Rawat Jalan (khusus Pimpinan Daerah)	
2	1	6	2	2	65	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Rawat Inap (Khusus Pimpinan Daerah)	
2	1	6	2	2	66	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tindakan Medis (Khusus Pimpinan Daerah)	
2	1	6	2	2	67	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemeriksaan	
2	1	6	2	2	68	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Perawatan Kesehatan dan Kebugaran (Khusus Pimpinan Daerah)	
2	1	6	2	2	69	Utang Belanja Jasa Kantor-Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	
2	1	6	2	2	70	Utang Belanja Jasa Kantor-Pelayanan Keluarga Berencana	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	2	71	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator dan Petugas Penanganan Angkutan Kebersihan	
2	1	6	2	2	72	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Advokat Bidang Perdata	
2	1	6	2	2	73	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Advokat Bidang TUN	
2	1	6	2	2	74	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Advokat Bidang Pidana	
2	1	6	2	2	75	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator Teknisi	
2	1	6	2	2	76	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah	
2	1	6	2	2	77	Utang Belanja Jasa Kantor-Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan Lalu Lintas	
2	1	6	2	2	78	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	
2	1	6	2	2	79	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Teknologi Informasi dan Kehumasan	
2	1	6	2	2	80	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan	
2	1	6	2	2	81	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pematangan Reklame	
2	1	6	2	2	82	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator Kapal Penyeberangan	
2	1	6	2	2	83	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tiketing	
2	1	6	2	2	84	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kontribusi Asosiasi	
2	1	6	2	2	85	Utang Belanja Asuransi-Asuransi Kesehatan	
2	1	6	2	2	86	Utang Belanja Asuransi-Asuransi Barang Milik Daerah	
2	1	6	2	2	87	Utang Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir-Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	
2	1	6	2	2	88	Utang Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir-Sewa Gedung/Kantor/Tempat	
2	1	6	2	2	89	Utang Belanja Sewa Sarana Mobilitas-Sewa Sarana Mobilitas Darat	
2	1	6	2	2	90	Utang Belanja Sewa Sarana Mobilitas-Sewa Sarana Mobilitas Air	
2	1	6	2	2	91	Utang Belanja Sewa Sarana Mobilitas-Sewa Sarana Mobilitas Udara	
2	1	6	2	2	92	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Ekskavator	
2	1	6	2	2	93	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Buldoser	
2	1	6	2	2	94	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa <i>Dump Truck</i>	
2	1	6	2	2	95	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Mesin Giling	
2	1	6	2	2	96	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Shovel Loader	
2	1	6	2	2	97	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa <i>Tyre Roler</i>	
2	1	6	2	2	98	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Asphalt Finisher	
2	1	6	2	2	99	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Direksi Kit	
2	1	6	2	2	100	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa <i>Generator Set</i>	
2	1	6	2	2	101	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Kontainer/Trailer	
2	1	6	2	2	102	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa <i>Crane</i>	
2	1	6	2	2	103	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Meja/ <i>Kursi</i>	
2	1	6	2	2	104	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Komputer dan <i>Printer</i>	
2	1	6	2	2	105	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV	
2	1	6	2	2	106	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Tenda	
2	1	6	2	2	107	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Pakaian Adat/Tradisional	
2	1	6	2	2	108	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Mesin Fotokopi	
2	1	6	2	2	109	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa OS/Hardware/software/Jaringan Komputer dan Lainnya	
2	1	6	2	2	110	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa <i>Sound System</i>	
2	1	6	2	2	111	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Alat Kesenian	
2	1	6	2	2	112	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Alat Olahraga	
2	1	6	2	2	113	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Alat Kerja	
2	1	6	2	2	114	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
						Level/Panggung	
2	1	5	2	2	115	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Alat/Peraga	
2	1	6	2	2	116	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Penelitian	
2	1	6	2	2	117	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Perencanaan	
2	1	6	2	2	118	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	
2	1	6	2	2	119	Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	
2	1	6	2	2	120	Utang Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer	
2	1	6	2	2	121	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/SDM	
2	1	6	2	2	122	Utang Belanja Konsultansi Sosial/Budaya	
2	1	6	2	2	123	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal	
2	1	6	2	2	124	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Rekayasa (Engineering)	
2	1	6	2	2	125	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Perancangan	
2	1	6	2	2	126	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	
2	1	6	2	2	127	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Jalan	
2	1	6	2	2	128	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	
2	1	6	2	2	129	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Air Minum	
2	1	6	2	2	130	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	
2	1	6	2	2	131	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	
2	1	6	2	2	132	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	
2	1	6	2	2	133	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
2	1	6	2	2	134	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	
2	1	6	2	2	135	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan	
2	1	6	2	2	136	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Konservasi Energi	
2	1	6	2	2	137	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan	
2	1	6	2	2	138	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan	
2	1	6	2	2	139	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian	
2	1	6	2	2	140	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kawasan	
2	1	6	2	2	141	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Pariwisata	
2	1	6	2	2	142	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	
2	1	6	2	2	143	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Lembaga Masyarakat	
2	1	6	2	2	144	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Perumahan Rakyat	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	2	145	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS- Beasiswa Tugas Belajar S1	
2	1	6	2	2	146	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS- Beasiswa Tugas Belajar S2	
2	1	6	2	2	147	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS- Beasiswa Tugas Belajar S3	
2	1	6	2	2	148	Utang Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK-Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	
2	1	6	2	2	149	Utang Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK-Sosialisasi	
2	1	6	2	2	150	Utang Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK-Bimbingan Teknis	
2	1	6	2	2	151	Utang Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK-Diklat Kepemimpinan	
2	1	6	2	2	152	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	
2	1	6	2	2	153	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
2	1	6	2	2	154	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan	
2	1	6	2	2	155	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	
2	1	6	2	2	156	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	
2	1	6	2	2	157	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	
2	1	6	2	2	158	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	
2	1	6	2	2	159	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	
2	1	6	2	2	160	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	
2	1	6	2	2	161	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	
2	1	6	2	2	162	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	
2	1	6	2	2	163	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	
2	1	6	2	2	164	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	
2	1	6	2	2	165	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
2	1	6	2	2	166	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
2	1	6	2	2	167	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
2	1	6	2	2	168	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	
2	1	6	2	2	169	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	2	170	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
2	1	6	2	2	171	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
2	1	6	2	2	172	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah oleh- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	
2	1	6	2	2	173	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah oleh Pegawai-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	
2	1	6	2	2	174	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
2	1	6	2	2	175	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	
2	1	6	2	2	176	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
2	1	6	2	2	177	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	
2	1	6	2	2	178	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	
2	1	6	2	2	179	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	
2	1	6	2	2	180	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	
2	1	6	2	2	181	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	
2	1	6	2	2	182	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	
2	1	6	2	2	183	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	
2	1	6	2	2	184	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	
2	1	6	2	2	185	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	
2	1	6	2	2	186	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	
2	1	6	2	2	187	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	2	188	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	
2	1	6	2	2	189	Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	
2	1	6	2	2	190	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	
2	1	6	2	2	191	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	
2	1	6	2	2	192	Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	
2	1	6	2	2	193	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
2	1	6	2	2	194	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	
2	1	6	2	2	195	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	
2	1	6	2	2	196	Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas	
2	1	6	2	2	197	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	
2	1	6	2	3	001	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	
2	1	6	2	3	002	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	
2	1	6	2	3	003	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Industri	
2	1	6	2	3	004	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	
2	1	6	2	3	005	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	
2	1	6	2	3	006	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	
2	1	6	2	3	007	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Persil Lainnya	
2	1	6	2	3	008	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Basah	
2	1	6	2	3	009	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Kering	
2	1	6	2	3	10	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Perkebunan	
2	1	6	2	3	11	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Hutan	
2	1	6	2	3	12	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Tandus	
2	1	6	2	3	13	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah	
2	1	6	2	3	14	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Pertanian	
2	1	6	2	3	15	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Pertambangan	
2	1	6	2	3	16	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil Lainnya	
2	1	6	2	3	17	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Olahraga	
2	1	6	2	3	18	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Parkir	
2	1	6	2	3	19	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Penimbunan Barang	
2	1	6	2	3	20	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	
2	1	6	2	3	21	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	3	22	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Terbang	
2	1	6	2	3	23	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Jalan	
2	1	6	2	3	24	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Air	
2	1	6	2	3	25	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah	
2	1	6	2	3	26	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Jaringan	
2	1	6	2	3	27	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Bersejarah	
2	1	6	2	3	28	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Makam	
2	1	6	2	3	29	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Taman	
2	1	6	2	3	30	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Latihan	
2	1	6	2	3	31	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Daerah Pertahanan	
2	1	6	2	3	32	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan PBB	
2	1	6	2	3	33	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Kampung	
2	1	6	2	3	34	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Emplasment	
2	1	6	2	3	35	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah- Lapangan Lainnya	
2	1	6	2	3	36	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Tractor	
2	1	6	2	3	37	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Grader	
2	1	6	2	3	38	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Excavator	
2	1	6	2	3	39	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Pile Driver	
2	1	6	2	3	40	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Hauler	
2	1	6	2	3	41	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Asphalt Equipment	
2	1	6	2	3	42	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Compacting Equipment	
2	1	6	2	3	43	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Aggregate and Concrete Equipment	
2	1	6	2	3	44	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Loader	
2	1	6	2	3	45	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	
2	1	6	2	3	46	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin Proses	
2	1	6	2	3	47	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat Lainnya	
2	1	6	2	3	48	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Dredger	
2	1	6	2	3	49	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Floating Excavator	
2	1	6	2	3	50	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Amphibi Dredger	
2	1	6	2	3	51	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Kapal Tarik	
2	1	6	2	3	52	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar-Mesin Proses Apung	
2	1	6	2	3	53	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung Lainnya	
2	1	6	2	3	54	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Penarik	
2	1	6	2	3	55	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan	
2	1	6	2	3	56	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Compressor	
2	1	6	2	3	57	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Electric Generating Set	
2	1	6	2	3	58	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Pompa	
2	1	6	2	3	59	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin Bor	
2	1	6	2	3	60	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Unit Pemeliharaan Lapangan	
2	1	6	2	3	61	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Pengolahan Air Kotor	
2	1	6	2	3	62	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	3	63	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	
2	1	6	2	3	64	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin Tatoo	
2	1	6	2	3	65	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Perlengkapan Kebakaran Hutan	
2	1	6	2	3	66	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan Selam	
2	1	6	2	3	67	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Alat Besar-Peralatan SAR Mountenering	
2	1	6	2	3	68	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan Intelijen	
2	1	6	2	3	69	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu Lainnya	
2	1	6	2	3	70	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	
2	1	6	2	3	71	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Penumpang	
2	1	6	2	3	72	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
2	1	6	2	3	73	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	
2	1	6	2	3	74	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	
2	1	6	2	3	75	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Khusus	
2	1	6	2	3	76	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tempur	
2	1	6	2	3	77	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Kereta Rel	
2	1	6	2	3	78	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	
2	1	6	2	3	79	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	
2	1	6	2	3	80	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	
2	1	6	2	3	81	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	
2	1	6	2	3	82	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	
2	1	6	2	3	83	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	
2	1	6	2	3	84	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	
2	1	6	2	3	85	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	
2	1	6	2	3	86	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan	
2	1	6	2	3	87	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	
2	1	6	2	3	88	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	
2	1	6	2	3	89	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	
2	1	6	2	3	90	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	
2	1	6	2	3	91	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	3	92	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kapal Terbang	
2	1	6	2	3	93	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	
2	1	6	2	3	94	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	
2	1	6	2	3	95	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	
2	1	6	2	3	96	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Listrik	
2	1	6	2	3	97	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Servis	
2	1	6	2	3	98	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Pengangkat Bermesin	
2	1	6	2	3	99	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Kayu	
2	1	6	2	3	100	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Khusus	
2	1	6	2	3	101	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Alat Angkutan-Peralatan Las	
2	1	6	2	3	102	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Alat Angkutan-Perkakas Pabrik Es	
2	1	6	2	3	103	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Alat Angkutan-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	
2	1	6	2	3	104	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	
2	1	6	2	3	105	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Listrik	
2	1	6	2	3	106	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Servis	
2	1	6	2	3	107	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Pengangkat	
2	1	6	2	3	108	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Standar (<i>Standard Tools</i>)	
2	1	6	2	3	109	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Khusus (<i>Special Tools</i>)	
2	1	6	2	3	110	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Kerja	
2	1	6	2	3	111	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Besi	
2	1	6	2	3	112	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Kayu	
2	1	6	2	3	113	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Kayu	
2	1	6	2	3	114	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Ukur, Gip, dan <i>Feeting</i>	
2	1	6	2	3	115	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	
2	1	6	2	3	116	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Bengkel Tak Bermesin	
2	1	6	2	3	117	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Universal	
2	1	6	2	3	118	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Inteligencia	
2	1	6	2	3	119	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian	
2	1	6	2	3	120	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Klinis Lain	
2	1	6	2	3	121	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Kalibrasi	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	3	122	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Oscilloscope	
2	1	6	2	3	123	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Universal Tester	
2	1	6	2	3	124	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Pembanding	
2	1	6	2	3	125	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Lain-Lain	
2	1	6	2	3	126	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Timbangan/Biara	
2	1	6	2	3	127	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Anak Timbangan/Biara	
2	1	6	2	3	128	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Takaran Kering	
2	1	6	2	3	129	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Takaran Bahan Bangunan	
2	1	6	2	3	130	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Takaran Lainnya	
2	1	6	2	3	131	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	
2	1	6	2	3	132	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Specific Set	
2	1	6	2	3	133	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Keadaan Alam	
2	1	6	2	3	134	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Penglihatan	
2	1	6	2	3	135	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu	
2	1	6	2	3	136	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Instrument Workshop	
2	1	6	2	3	137	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Lainnya	
2	1	6	2	3	138	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	
2	1	6	2	3	139	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	
2	1	6	2	3	140	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Panen	
2	1	6	2	3	141	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	
2	1	6	2	3	142	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Laboratorium Pertanian	
2	1	6	2	3	143	Utang Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Processing	
2	1	6	2	3	144	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pasca Panen	
2	1	6	2	3	145	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Produksi Perikanan	
2	1	6	2	3	146	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat-Alat Peternakan	
2	1	6	2	3	147	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan Lainnya	
2	1	6	2	3	148	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mesin Ketik	
2	1	6	2	3	149	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	
2	1	6	2	3	150	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Reproduksi (Penggandaan)	
2	1	6	2	3	151	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	
2	1	6	2	3	152	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	3	153	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meubelair	
2	1	6	2	3	154	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	
2	1	6	2	3	155	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pembersih	
2	1	6	2	3	156	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	
2	1	6	2	3	157	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Dapur	
2	1	6	2	3	158	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	
2	1	6	2	3	159	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	
2	1	6	2	3	160	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja Kerja Pejabat	
2	1	6	2	3	161	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja Rapat Pejabat	
2	1	6	2	3	162	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Kerja Pejabat	
2	1	6	2	3	163	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Rapat Pejabat	
2	1	6	2	3	164	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	
2	1	6	2	3	165	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	
2	1	6	2	3	166	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Lemari dan Arsip Pejabat	
2	1	6	2	3	167	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Studio Audio	
2	1	6	2	3	168	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Studio Video dan Film	
2	1	6	2	3	169	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Studio Gambar	
2	1	6	2	3	170	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Cetak	
2	1	6	2	3	171	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	
2	1	6	2	3	172	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Studio Lainnya	
2	1	6	2	3	173	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi Telephone	
2	1	6	2	3	174	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi Radio SSB	
2	1	6	2	3	175	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	
2	1	6	2	3	176	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi Radio VHF	
2	1	6	2	3	177	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi Radio UHF	
2	1	6	2	3	178	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi Sosial	
2	1	6	2	3	179	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat-Alat Sandi	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	3	180	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi Khusus	
2	1	6	2	3	181	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	
2	1	6	2	3	182	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi Satelit	
2	1	6	2	3	183	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi Lainnya	
2	1	6	2	3	184	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar MF/MW	
2	1	6	2	3	185	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan	
2	1	6	2	3	186	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar VHF/FM	
2	1	6	2	3	187	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar UHF	
2	1	6	2	3	188	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar SHF	
2	1	6	2	3	189	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena MF/MW	
2	1	6	2	3	190	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena HF/SW	
2	1	6	2	3	191	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena VHF/FM	
2	1	6	2	3	192	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena UHF	
2	1	6	2	3	193	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena SHF/Parabola	
2	1	6	2	3	194	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan	
2	1	6	2	3	195	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Translator UHF/UHF	
2	1	6	2	3	196	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Translator VHF/UHF	
2	1	6	2	3	197	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Translator UHF/VHF	
2	1	6	2	3	198	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan <i>Microwave</i> FPU	
2	1	6	2	3	199	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Microwave Terrestrial	
2	1	6	2	3	200	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Microwave TVRO	
2	1	6	2	3	201	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Dummy Load	
2	1	6	2	3	202	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Switcher Antena	
2	1	6	2	3	203	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-	
2	1	6	2	3	204	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Feeder	
2	1	6	2	3	205	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Humidity Control	
2	1	6	2	3	206	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Program <i>Input Equipment</i>	
2	1	6	2	3	207	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena Penerima VHF	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	3	208	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar LF	
2	1	6	2	3	209	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Unit Pemancar MF+HF	
2	1	6	2	3	210	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar MF+HF	
2	1	6	2	3	211	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Penerima	
2	1	6	2	3	212	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima LF	
2	1	6	2	3	213	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima MF	
2	1	6	2	3	214	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima HF	
2	1	6	2	3	215	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF	
2	1	6	2	3	216	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	
2	1	6	2	3	217	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	
2	1	6	2	3	218	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima SHF	
2	1	6	2	3	219	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF	
2	1	6	2	3	220	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF	
2	1	6	2	3	221	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF	
2	1	6	2	3	222	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF	
2	1	6	2	3	223	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF	
2	1	6	2	3	224	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	
2	1	6	2	3	225	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF	
2	1	6	2	3	226	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah	
2	1	6	2	3	227	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi	
2	1	6	2	3	228	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	
2	1	6	2	3	229	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Perlengkapan Radio	
2	1	6	2	3	230	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Sumber Tenaga	
2	1	6	2	3	231	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar Lainnya	
2	1	6	2	3	232	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System	
2	1	6	2	3	233	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Very High Frequence Omni Range (VOR)	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	3	234	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Distance Measuring Equipment (DME)	
2	1	6	2	3	235	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Radar	
2	1	6	2	3	236	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Pengatur Telekomunikasi	
2	1	6	2	3	237	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	
2	1	6	2	3	238	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	
2	1	6	2	3	239	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Umum	
2	1	6	2	3	240	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Gigi	
2	1	6	2	3	241	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	
2	1	6	2	3	242	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah	
2	1	6	2	3	243	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	
2	1	5	2	3	244	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran THT	
2	1	6	2	3	245	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Mata	
2	1	6	2	3	246	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	
2	1	6	2	3	247	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan	
2	1	6	2	3	248	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Anak	
2	1	6	2	3	249	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Poliklinik	
2	1	6	2	3	250	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	
2	1	6	2	3	251	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	
2	1	6	2	3	252	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Jantung	
2	1	6	2	3	253	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>	
2	1	6	2	3	254	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	
2	1	6	2	3	255	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Transfusi Darah	
2	1	6	2	3	256	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat	
2	1	6	2	3	257	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Nuklir	
2	1	6	2	3	258	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	
2	1	6	2	3	259	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Gawat Darurat	
2	1	6	2	3	260	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Jiwa	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	3	261	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	
2	1	6	2	3	262	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran ICU	
2	1	6	2	3	263	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran ICCU	
2	1	6	2	3	264	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah Jantung	
2	1	6	2	3	265	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Traditional Medicine	
2	1	6	2	3	266	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Anestesi	
2	1	6	2	3	267	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Lainnya	
2	1	6	2	3	268	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Matra Laut	
2	1	6	2	3	269	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Matra Udara	
2	1	6	2	3	270	Utang Belanja Pemeliharaan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian	
2	1	6	2	3	271	Utang Belanja Pemeliharaan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan Olahraga	
2	1	6	2	3	272	Utang Belanja Pemeliharaan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan Umum Lainnya	
2	1	6	2	3	273	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	
2	1	6	2	3	274	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	
2	1	6	2	3	275	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia	
2	1	6	2	3	276	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika	
2	1	6	2	3	277	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi	
2	1	6	2	3	278	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	
2	1	6	2	3	279	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium	
2	1	6	2	3	280	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	
2	1	6	2	3	281	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cokok Tanam	
2	1	6	2	3	282	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	
2	1	6	2	3	283	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	
2	1	6	2	3	284	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	
2	1	6	2	3	285	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	
2	1	6	2	3	286	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	
2	1	6	2	3	287	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi	
2	1	6	2	3	288	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	3	289	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	
2	1	6	2	3	290	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	
2	1	6	2	3	291	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	
2	1	6	2	3	292	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	
2	1	6	2	3	293	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika	
2	1	6	2	3	294	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi	
2	1	6	2	3	295	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan	
2	1	6	2	3	296	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir	
2	1	6	2	3	297	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan	
2	1	6	2	3	298	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola	
2	1	6	2	3	299	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi	
2	1	6	2	3	300	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan	
2	1	6	2	3	301	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	
2	1	6	2	3	302	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	
2	1	6	2	3	303	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium	
2	1	6	2	3	304	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam	
2	1	5	2	3	305	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	
2	1	6	2	3	306	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	
2	1	6	2	3	307	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil	
2	1	6	2	3	308	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	
2	1	6	2	3	309	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	
2	1	6	2	3	310	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik	
2	1	6	2	3	311	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik	
2	1	6	2	3	312	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	
2	1	6	2	3	313	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	
2	1	6	2	3	314	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	
2	1	6	2	3	315	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	3	316	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	
2	1	6	2	3	317	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium	
2	1	6	2	3	318	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	
2	1	6	2	3	319	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan	
2	1	6	2	3	320	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi	
2	1	6	2	3	321	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika	
2	1	6	2	3	322	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang	
2	1	6	2	3	323	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	
2	1	6	2	3	324	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri	
2	1	6	2	3	325	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	
2	1	6	2	3	326	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan	
2	1	6	2	3	327	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	
2	1	6	2	3	328	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	
2	1	6	2	3	329	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi	
2	1	6	2	3	330	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan	
2	1	6	2	3	331	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim	
2	1	6	2	3	332	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai	
2	1	6	2	3	333	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi	
2	1	6	2	3	334	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi	
2	1	6	2	3	335	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang	
2	1	6	2	3	336	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium	
2	1	6	2	3	337	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Analytical Instrument	
2	1	6	2	3	338	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Instrument Probe/Sensor	
2	1	6	2	3	339	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-General Laboratory Tool	
2	1	6	2	3	340	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Glassware Plastic/Utensils	
2	1	6	2	3	341	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratory Safety Equipment	
2	1	6	2	3	342	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	3	343	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	
2	1	6	2	3	344	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	
2	1	6	2	3	345	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	
2	1	6	2	3	346	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	
2	1	6	2	3	347	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	
2	1	6	2	3	348	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	
2	1	6	2	3	349	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	
2	1	6	2	3	350	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	
2	1	6	2	3	351	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	
2	1	6	2	3	352	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	
2	1	6	2	3	353	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	
2	1	6	2	3	354	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	
2	1	6	2	3	355	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	
2	1	6	2	3	356	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Kejuruan	
2	1	6	2	3	357	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga PAUD/TK	
2	1	6	2	3	358	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	
2	1	6	2	3	359	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Detector	
2	1	6	2	3	360	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Modular Counting and Scientific Electronic	
2	1	6	2	3	361	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Assembly/Counting System	
2	1	6	2	3	362	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Recorder Display	
2	1	6	2	3	363	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-System/Power Supply	
2	1	6	2	3	364	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Measuring/Testing Device	
2	1	6	2	3	365	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Opto Electronics	
2	1	6	2	3	366	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Accelerator	
2	1	6	2	3	367	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Reactor Experimental System	
2	1	6	2	3	368	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	
2	1	6	2	3	369	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Ukur Fisika Kesehatan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	3	370	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Kesehatan Kerja	
2	1	6	2	3	371	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Proteksi Lingkungan	
2	1	6	2	3	372	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Meteorological Equipment	
2	1	6	2	3	373	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Sumber Radiasi	
2	1	6	2	3	374	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	
2	1	6	2	3	375	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Application Equipment	
2	1	6	2	3	376	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Non Destructive Test (NDT) Device	
2	1	6	2	3	377	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Hidrologi	
2	1	6	2	3	377	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	
2	1	6	2	3	378	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	
2	1	6	2	3	379	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kualitas Udara	
2	1	6	2	3	380	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	
2	1	6	2	3	381	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium Lingkungan	
2	1	6	2	3	382	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Penunjang	
2	1	6	2	3	383	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	
2	1	6	2	3	384	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Towing Carriage	
2	1	6	2	3	385	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Wave Generator and Absorber	
2	1	6	2	3	386	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Data Acquisition and Analyzing System	
2	1	6	2	3	387	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Cavitation Tunnel	
2	1	6	2	3	388	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Overhead Cranes	
2	1	6	2	3	389	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Umum	
2	1	6	2	3	390	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Model Ship Workshop	
2	1	6	2	3	391	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Propeller Model Workshop	
2	1	6	2	3	392	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Mechanical Workshop	
2	1	6	2	3	393	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Precision	
2	1	6	2	3	394	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Painting Shop	
2	1	5	2	3	395	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Ship Model Preparation Shop	
2	1	6	2	3	396	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Electrical Workshop	
2	1	6	2	3	397	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-MOB	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	3	398	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Photo and Film Equipment	
2	1	6	2	3	399	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	
2	1	6	2	3	400	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	
2	1	6	2	3	401	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	
2	1	6	2	3	402	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	
2	1	6	2	3	403	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	
2	1	6	2	3	404	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	
2	1	6	2	3	405	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	
2	1	6	2	3	406	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Natus	
2	1	6	2	3	407	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran	
2	1	6	2	3	408	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	
2	1	6	2	3	409	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Perangkat	
2	1	6	2	3	410	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	
2	1	6	2	3	437	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Jaringan	
2	1	6	2	3	438	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Personal Computer	
2	1	6	2	3	439	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit Lainnya	
2	1	6	2	3	440	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Mainframe	
2	1	6	2	3	441	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Mini Computer	
2	1	6	2	3	442	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Personal Computer	
2	1	6	2	3	443	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Jaringan	
2	1	6	2	3	444	Utang Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	
2	1	6	2	3	445	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Optik	
2	1	6	2	3	446	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Ukur/Instrumen	
2	1	6	2	3	447	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	
2	1	6	2	3	448	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Mekanik	
2	1	6	2	3	449	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Elektronik/Electric	
2	1	6	2	3	450	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Manual	
2	1	6	2	3	451	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya	
2	1	6	2	3	452	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bor Mesin Tumbuk	
2	1	6	2	3	453	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bor Mesin Putar	
2	1	6	2	3	454	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Pengeboran Mesin	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	3	455	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bangka	
2	1	6	2	3	456	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Pantek	
2	1	6	2	3	457	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Putar	
2	1	6	2	3	458	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Peralatan Bantu	
2	1	6	2	3	459	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya	
2	1	6	2	3	460	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Peralatan Sumur Minyak	
2	1	6	2	3	461	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur Pemboran	
2	1	6	2	3	462	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur Lainnya	
2	1	6	2	3	463	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-RIG	
2	1	6	2	3	464	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi Lainnya	
2	1	6	2	3	465	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak	
2	1	6	2	3	466	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	
2	1	6	2	3	467	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam	
2	1	6	2	3	468	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax	
2	1	6	2	3	469	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya	
2	1	6	2	3	470	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik	
2	1	6	2	3	471	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik	
2	1	6	2	3	472	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	
2	1	6	2	3	473	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Perawatan Sumur	
2	1	6	2	3	474	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Tes Unit	
2	1	6	2	3	475	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi Lainnya	
2	1	6	2	3	476	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Radiasi	
2	1	6	2	3	477	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Suara	
2	1	6	2	3	478	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi Lainnya	
2	1	6	2	3	479	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Baju Pengaman	
2	1	6	2	3	480	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Masker	
2	1	6	2	3	481	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Topi Kerja	
2	1	6	2	3	482	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Sabuk Pengaman	
2	1	6	2	3	483	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Sepatu Lapangan	
2	1	6	2	3	484	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	3	485	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Penolong	
2	1	6	2	3	486	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pendukung Pencarian	
2	1	6	2	3	487	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Bawah Air	
2	1	6	2	3	488	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR Lainnya	
2	1	6	2	3	489	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan	
2	1	6	2	3	490	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan	
2	1	6	2	3	491	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan	
2	1	6	2	3	492	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	
2	1	6	2	3	493	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	
2	1	6	2	3	494	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Ukur Peralatan Fasketrik	
2	1	6	2	3	495	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan Lainnya	
2	1	6	2	3	496	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan	
2	1	6	2	3	497	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Percontohan	
2	1	6	2	3	498	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	
2	1	6	2	3	499	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment	
2	1	6	2	3	500	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment	
2	1	6	2	3	501	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening Equipment	
2	1	6	2	3	502	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Classifier	
2	1	6	2	3	503	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment	
2	1	6	2	3	504	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment	
2	1	6	2	3	505	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment	
2	1	6	2	3	506	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Leaching Equipment	
2	1	6	2	3	507	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation Equipment	
2	1	6	2	3	508	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering Equipment	
2	1	6	2	3	509	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid	
2	1	6	2	3	510	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment	
2	1	6	2	3	511	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Drying Equipment	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	3	512	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment	
2	1	6	2	3	513	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan	
2	1	6	2	3	514	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Distillation Equipment	
2	1	6	2	3	515	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Separation Equipment	
2	1	6	2	3	516	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Isotope Separation Equipment	
2	1	6	2	3	517	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid	
2	1	6	2	3	518	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment	
2	1	6	2	3	519	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment	
2	1	6	2	3	520	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment	
2	1	6	2	3	521	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer Equipment	
2	1	6	2	3	522	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process	
2	1	6	2	3	523	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment	
2	1	6	2	3	524	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	
2	1	6	2	3	525	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Bersuar	
2	1	6	2	3	526	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Tidak Bersuar	
2	1	6	2	3	527	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	
2	1	6	2	3	528	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Runway/Threshold Light	
2	1	6	2	3	529	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Visual Approach Slope Indicator (VASI)	
2	1	6	2	3	530	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Approach Light	
2	1	6	2	3	531	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Runway Identification Light (REILS)	
2	1	6	2	3	532	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Signal	
2	1	6	2	3	533	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Flood Lights	
2	1	6	2	3	534	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	
2	1	6	2	3	535	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	
2	1	6	2	3	536	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	
2	1	6	2	3	537	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	
2	1	6	2	3	538	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan	
2	1	6	2	3	539	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	
2	1	6	2	3	540	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	3	541	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara	
2	1	6	2	3	542	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	
2	1	6	2	3	543	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	
2	1	6	2	3	544	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gudang	
2	1	6	2	3	545	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	
2	1	6	2	3	546	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Instalasi	
2	1	6	2	3	547	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Laboratorium	
2	1	6	2	3	548	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan	
2	1	6	2	3	549	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Bangunan Gedung-Bangunan Oseanarium/ Observatorium	
2	1	6	2	3	550	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
2	1	6	2	3	551	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	
2	1	6	2	3	552	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
2	1	6	2	3	553	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	
2	1	6	2	3	554	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar	
2	1	6	2	3	555	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	
2	1	6	2	3	556	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Garasi/Pool	
2	1	6	2	3	557	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	
2	1	6	2	3	558	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Perpustakaan	
2	1	6	2	3	559	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Museum	
2	1	6	2	3	560	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara	
2	1	6	2	3	561	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Pengujian Kelaikan	
2	1	6	2	3	562	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan	
2	1	6	2	3	563	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Rumah Tahanan	
2	1	6	2	3	564	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Krematorium	
2	1	6	2	3	565	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	
2	1	6	2	3	566	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Persidangan	
2	1	6	2	3	567	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Terbuka	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	3	568	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Penampung Sekam	
2	1	6	2	3	569	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
2	1	6	2	3	570	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Industri	
2	1	6	2	3	571	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Peternakan/Perikanan	
2	1	6	2	3	572	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
2	1	6	2	3	573	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Peralatan Geofisika	
2	1	6	2	3	574	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Fasilitas Umum	
2	1	6	2	3	575	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Parkir	
2	1	5	2	3	576	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pabrik	
2	1	6	2	3	577	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Stasiun Bus	
2	1	6	2	3	578	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Taman	
2	1	6	2	3	579	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
2	1	6	2	3	580	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan I	
2	1	6	2	3	581	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan II	
2	1	6	2	3	582	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan III	
2	1	6	2	3	583	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	
2	1	6	2	3	584	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Asrama	
2	1	6	2	3	585	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Hotel	
2	1	6	2	3	586	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Motel	
2	1	6	2	3	587	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Flat/Rumah Susun	
2	1	6	2	3	588	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	
2	1	6	2	3	589	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Panti Asuhan	
2	1	6	2	3	590	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Apartemen	
2	1	6	2	3	591	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Tidak Bersusun	
2	1	6	2	3	592	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	
2	1	6	2	3	593	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi	
2	1	6	2	3	594	Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan-Monumen-Tugu	
2	1	6	2	3	595	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Bangunan Peninggalan	
2	1	6	2	3	596	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	
2	1	6	2	3	597	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	3	598	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	
2	1	6	2	3	599	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Telekomunikasi	
2	1	6	2	3	600	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Pengawas	
2	1	6	2	3	601	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan Lainnya	
2	1	6	2	3	602	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas Administrasi	
2	1	6	2	3	603	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan	
2	1	6	2	3	604	Utang Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	
2	1	6	2	3	605	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Pagar	
2	1	6	2	3	606	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas Lainnya	
2	1	6	2	3	607	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Nasional	
2	1	6	2	3	608	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Provinsi	
2	1	6	2	3	609	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kabupaten	
2	1	6	2	3	610	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kota	
2	1	6	2	3	611	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Desa	
2	1	6	2	3	612	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Tol	
2	1	6	2	3	613	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kereta Api	
2	1	6	2	3	614	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Landasan Pacu Pesawat Terbang	
2	1	6	2	3	615	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Khusus	
2	1	6	2	3	616	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Lainnya	
2	1	6	2	3	617	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional	
2	1	6	2	3	618	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	
2	1	6	2	3	619	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan,	
2	1	6	2	3	620	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	
2	1	6	2	3	621	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	
2	1	6	2	3	622	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol	
2	1	6	2	3	623	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api	
2	1	6	2	3	624	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	
2	1	6	2	3	625	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus	
2	1	6	2	3	626	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Penyeberangan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	3	627	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	
2	1	6	2	3	628	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Pengukur	
2	1	6	2	3	629	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Lainnya	
2	1	6	2	3	630	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Irigasi	
2	1	6	2	3	631	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Irigasi	
2	1	6	2	3	632	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Irigasi	
2	1	6	2	3	633	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Irigasi	
2	1	6	2	3	634	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Irigasi	
2	1	6	2	3	635	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Irigasi	
2	1	6	2	3	636	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Irigasi	
2	1	6	2	3	637	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi Lainnya	
2	1	6	2	3	638	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Pasang Surut	
2	1	6	2	3	639	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pasang Surut	
2	1	6	2	3	640	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pasang Surut	
2	1	6	2	3	641	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Saluran Pembuang Pasang Surut	
2	1	6	2	3	642	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pasang Surut	
2	1	6	2	3	643	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap	
2	1	6	2	3	644	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Pasang Surut	
2	1	6	2	3	645	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	
2	1	6	2	3	646	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	
2	1	6	2	3	647	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	
2	1	6	2	3	648	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	
2	1	6	2	3	649	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	
2	1	6	2	3	650	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	
2	1	6	2	3	651	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	
2	1	6	2	3	652	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	
2	1	6	2	3	653	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	3	654	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	
2	1	6	2	3	655	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	
2	1	6	2	3	656	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	
2	1	6	2	3	657	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	
2	1	6	2	3	658	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	
2	1	6	2	3	659	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	
2	1	6	2	3	660	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	
2	1	6	2	3	661	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	
2	1	6	2	3	662	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	
2	1	6	2	3	663	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	
2	1	6	2	3	664	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	
2	1	6	2	3	665	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	
2	1	6	2	3	666	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	
2	1	6	2	3	667	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	
2	1	6	2	3	668	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	
2	1	6	2	3	669	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	
2	1	6	2	3	670	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	
2	1	6	2	3	671	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	
2	1	6	2	3	672	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	
2	1	6	2	3	673	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	
2	1	6	2	3	674	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	
2	1	6	2	3	675	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Air Kotor	
2	1	6	2	3	676	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Air Kotor	
2	1	6	2	3	677	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Air Kotor	
2	1	6	2	3	678	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Air Kotor	
2	1	6	2	3	679	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan,	
2	1	6	2	3	680	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor Lainnya	
2	1	6	2	3	681	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
						Instalasi Air Permukaan	
2	1	6	2	3	682	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Air Sumber/Mata Air	
2	1	6	2	3	683	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Air Tanah Dalam	
2	1	6	2	3	684	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Air Tanah Dangkal	
2	1	6	2	3	685	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	
2	1	6	2	3	686	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Air Buangan Domestik	
2	1	6	2	3	687	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Air Buangan Industri	
2	1	6	2	3	688	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Air Buangan Pertanian	
2	1	6	2	3	689	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Air Kotor Lainnya	
2	1	6	2	3	690	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Pengolahan Sampah Organik	
2	1	6	2	3	691	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	
2	1	6	2	3	692	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Bangunan Penampung Sampah	
2	1	6	2	3	693	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	
2	1	6	2	3	694	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan,	
2	1	6	2	3	695	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	
2	1	6	2	3	696	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	
2	1	6	2	3	697	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	
2	1	6	2	3	698	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	
2	1	6	2	3	699	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	
2	1	6	2	3	700	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	
2	1	6	2	3	701	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	
2	1	6	2	3	702	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	
2	1	6	2	3	703	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	
2	1	6	2	3	704	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	
2	1	6	2	3	705	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	
2	1	6	2	3	706	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	
2	1	6	2	3	707	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	
2	1	6	2	3	708	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	3	709	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	
2	1	6	2	3	710	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Gardu Listrik Induk	
2	1	6	2	3	711	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Gardu Listrik Distribusi	
2	1	6	2	3	712	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Pusat Pengatur Listrik	
2	1	6	2	3	713	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Gardu Listrik Lainnya	
2	1	6	2	3	714	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Pertahanan di Darat	
2	1	6	2	3	715	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Pertahanan Lainnya	
2	1	6	2	3	716	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Gardu Gas	
2	1	6	2	3	717	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Jaringan Pipa Gas	
2	1	6	2	3	718	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Pengolahan Gas	
2	1	6	2	3	719	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Gas Lainnya	
2	1	6	2	3	720	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Pengaman Penangkal Petir	
2	1	6	2	3	721	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Reaktor Nuklir	
2	1	6	2	3	722	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	
2	1	6	2	3	723	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Pengaman Lainnya	
2	1	6	2	3	724	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi Instalasi Lain	
2	1	6	2	3	724	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pembawa	
2	1	6	2	3	725	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Induk Distribusi	
2	1	6	2	3	726	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Cabang Distribusi	
2	1	6	2	3	727	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Sambungan ke Rumah	
2	1	6	2	3	728	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum Lainnya	
2	1	6	2	3	729	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Transmisi	
2	1	6	2	3	730	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Distribusi	
2	1	6	2	3	731	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik Lainnya	
2	1	6	2	3	732	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di atas Tanah	
2	1	6	2	3	733	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di bawah Tanah	
2	1	6	2	3	734	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di dalam Air	
2	1	6	2	3	735	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan dengan Media Udara	
2	1	6	2	3	736	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	3	737	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Gas Transmisi	
2	1	6	2	3	738	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Distribusi	
2	1	6	2	3	739	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Dinas	
2	1	6	2	3	740	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan BBM	
2	1	6	2	3	741	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas Lainnya	
2	1	6	2	3	742	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Umum	
2	1	6	2	3	743	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Filsafat	
2	1	6	2	3	744	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Agama	
2	1	6	2	3	745	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Sosial	
2	1	6	2	3	746	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Bahasa	
2	1	6	2	3	747	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	
2	1	6	2	3	748	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	
2	1	6	2	3	749	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	
2	1	6	2	3	750	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	
2	1	6	2	3	751	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Serial	
2	1	6	2	3	752	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Laporan	
2	1	6	2	3	753	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	
2	1	6	2	3	754	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Audio Visual	
2	1	6	2	3	755	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Bentuk Mikro (Microform)	
2	1	6	2	3	756	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	
2	1	6	2	3	757	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi	
2	1	6	2	3	758	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Naskah (Manuskrip)/Asli	
2	1	6	2	3	759	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Lukisan dan Ukiran	
2	1	6	2	3	760	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya	
2	1	6	2	3	761	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Karya Musik	
2	1	6	2	3	762	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Musik Lainnya	
2	1	6	2	3	763	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (Graphic Material)	
2	1	6	2	3	764	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya	
2	1	6	2	3	765	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Three Dimensional Artifacts and Realita	
2	1	6	2	3	766	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Three Dimensional Artifacts and Realita Lainnya	
2	1	6	2	3	767	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
						Perpustakaan- <i>Tarscalt</i>	
2	1	6	2	3	768	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan- <i>Tarscalt</i> Lainnya	
2	1	6	2	3	769	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Musik	
2	1	6	2	3	770	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Lukisan	
2	1	6	2	3	771	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Peraga Kesenian	
2	1	6	2	3	772	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian Lainnya	
2	1	6	2	3	773	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak	
2	1	6	2	3	774	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	
2	1	6	2	3	775	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Kerajinan	
2	1	6	2	3	776	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	
2	1	6	2	3	777	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak	
2	1	6	2	3	778	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	
2	1	6	2	3	779	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Hewan Pengaman	
2	1	6	2	3	780	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Hewan Pengangkut	
2	1	6	2	3	781	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Hewan Kebun Binatang	
2	1	6	2	3	782	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-	
2	1	6	2	3	783	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Ternak Potong	
2	1	6	2	3	784	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Ternak Perah	
2	1	6	2	3	785	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Ternak Unggas	
2	1	6	2	3	786	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Ternak Lainnya	
2	1	6	2	3	787	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Hewan Lainnya	
2	1	6	2	3	788	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan-Ikan Budidaya	
2	1	6	2	3	789	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan-Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	
2	1	6	2	3	790	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan-Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi- cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)	
2	1	6	2	3	791	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan-Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)	
2	1	6	2	3	792	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan-Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)	
2	1	6	2	3	793	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan-Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)	
2	1	6	2	3	794	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura- Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)	
2	1	6	2	3	795	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan-Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)	
2	1	6	2	3	796	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh- Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)	
2	1	6	2	3	797	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan-Budidaya Biota Perairan Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	2	3	798	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Tanaman-Tanaman	
2	1	6	2	3	799	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi	
2	1	6	2	3	800	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi	
2	1	6	2	3	801	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi	
2	1	6	2	3	803	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi	
2	1	6	2	3	804	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi	
2	1	6	2	3	805	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Fosil	
2	1	6	2	3	806	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	
2	1	6	2	3	807	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Aset Dalam Renovasi-Aset Dalam Renovasi	
2	1	6	2	3	808	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor- Jasa Servis	
2	1	6	2	3	809	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor- Penggantian Suku Cadang	
2	1	6	2	3	810	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor- Minyak Pelumas	
2	1	6	2	3	811	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor- Jasa KIR	
2	1	6	2	3	812	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	
2	1	6	2	3	813	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor- Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)	
2	1	6	2	3	814	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	
2	1	6	2	3	815	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	
2	1	6	2	3	816	Utang Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	
2	1	6	2	4	001	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
2	1	6	2	4	002	Utang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	
2	1	6	2	4	003	Utang Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas Dalam Daerah	
2	1	6	2	4	004	Utang Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas Luar Daerah	
2	1	6	2	4	005	Utang Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah	
2	1	6	2	4	006	Utang Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	
2	1	6	2	5	001	Utang Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga- Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	
2	1	6	2	5	002	Utang Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga- Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga	
2	1	6	2	5	003	Utang Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat	
2	1	6	2	5	004	Utang Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Pihak Ketiga	
2	1	6	2	5	005	Utang Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat-Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	
2	1	6	2	5	006	Utang Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat-Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga	
2	1	6	3	1	001	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
2	1	6	3	1	002	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	
2	1	6	3	1	003	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah	
2	1	6	3	1	004	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
						Panjang	
2	1	6	3	1	005	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-Jangka Menengah	
2	1	6	3	1	006	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-Jangka Panjang	
2	1	6	3	2	001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya-Jangka Pendek	
2	1	6	3	3	001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada	
2	1	6	3	3	002	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Menengah	
2	1	6	3	3	003	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Panjang	
2	1	6	3	3	004	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Pendek	
2	1	6	3	3	005	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada- BUMD-Jangka Menengah	
2	1	6	3	3	006	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Panjang	
2	1	6	3	3	007	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Pendek	
2	1	6	3	3	008	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Menengah	
2	1	6	3	3	009	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Panjang	
2	1	6	3	4	001	Utang Belanja Bunga BUMN-Jangka Pendek	
2	1	6	3	4	002	Utang Belanja Bunga atas BUMN-Jangka Menengah	
2	1	6	3	4	003	Utang Belanja Bunga BUMN-Jangka Panjang	
2	1	6	3	4	004	Utang Belanja Bunga BUMD-Jangka Pendek	
2	1	6	3	4	005	Utang Belanja Bunga atas BUMD-Jangka Menengah	
2	1	6	3	4	006	Utang Belanja Bunga BUMD-Jangka Panjang	
2	1	6	3	4	007	Utang Belanja Bunga Swasta-Jangka pendek	
2	1	6	3	4	008	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Menengah	
2	1	6	3	4	009	Utang Belanja Bunga Swasta-Jangka Panjang	
2	1	6	3	5	001	Utang Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	
2	1	6	3	6	001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman BLUD- Jangka Pendek	
2	1	6	3	6	002	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman BLUD- Jangka Menengah	
2	1	6	3	6	003	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman BLUD- Jangka Panjang	
2	1	6	4	1	001	Utang Belanja Subsidi kepada BUMN ...	
2	1	6	4	1	002	Dst ...	
2	1	6	4	2	001	Utang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah/BUMD ...	
2	1	6	4	2	002	Dst ...	
2	1	6	4	3	001	Utang Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta ...	
2	1	6	4	3	002	Dst ...	
2	1	6	5	1	001	Utang Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	
2	1	6	5	1	002	Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	
2	1	6	5	1	003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	
2	1	6	5	2	001	Utang Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
2	1	6	5	2	002	Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
2	1	6	5	2	003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
2	1	6	5	3	001	Utang Belanja Hibah Uang kepada BUMN	
2	1	6	5	3	002	Utang Belanja Hibah Barang kepada BUMN	
2	1	6	5	3	003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada BUMN	
2	1	6	5	4	001	Utang Belanja Hibah Uang kepada BUMD	
2	1	6	5	4	002	Utang Belanja Hibah Barang kepada BUMD	
2	1	6	5	4	003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada BUMD	
2	1	6	5	5	001	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga	
2	1	6	5	5	002	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan/Lembaga	
2	1	6	5	5	003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan/Lembaga	
2	1	6	5	5	004	Utang Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan	
2	1	6	5	5	005	Utang Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan	
2	1	6	5	5	006	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	5	6	001	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	
2	1	6	5	6	002	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	
2	1	6	5	6	003	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	
2	1	6	5	6	004	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	
2	1	6	5	7	001	Utang Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ...	
2	1	6	6	1	001	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/ <u>Gedung Tempat Tinggal</u>	
2	1	6	6	1	002	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	
2	1	6	6	1	003	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri	
2	1	6	6	1	004	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	
2	1	6	6	1	005	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	
2	1	6	6	1	006	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	
2	1	6	6	1	007	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	
2	1	6	6	1	008	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Basah	
2	1	6	6	1	009	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Kering	
2	1	6	6	1	10	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Perkebunan	
2	1	6	6	1	11	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Hutan	
2	1	6	6	1	12	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Tandus	
2	1	6	6	1	13	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput	
2	1	6	6	1	14	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Pertanian	
2	1	6	6	1	15	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Pertambangan	
2	1	6	6	1	16	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Non Persil Lainnya	
2	1	6	6	1	17	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	
2	1	6	6	1	18	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Parkir	
2	1	6	6	1	19	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang	
2	1	6	6	1	20	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	
2	1	6	6	1	21	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan <u>Pengujian/Pengolahan</u>	
2	1	6	6	1	22	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Terbang	
2	1	6	6	1	23	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Jalan	
2	1	6	6	1	24	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air	
2	1	6	6	1	25	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi	
2	1	6	6	1	26	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan	
2	1	6	6	1	27	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah	
2	1	6	6	1	28	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Makam	
2	1	6	6	1	29	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Taman	
2	1	6	6	1	30	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Latihan	
2	1	6	6	1	31	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan	
2	1	6	6	1	32	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan PBB	
2	1	6	6	1	33	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Kampung	
2	1	6	6	1	34	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Emplasmement	
2	1	6	6	1	35	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Lapangan Lainnya	
2	1	6	7	1	001	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Tractor</i>	
2	1	6	7	1	002	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Grader</i>	
2	1	6	7	1	003	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Excavator</i>	
2	1	6	7	1	004	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Pile Driver</i>	
2	1	6	7	1	005	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Hauler</i>	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	7	1	006	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Asphalt Equipment	
2	1	6	7	1	007	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- Compacting Equipment	
2	1	6	7	1	008	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>	
2	1	6	7	1	009	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Loader</i>	
2	1	6	7	1	10	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Alat Pengangkat	
2	1	6	7	1	11	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Mesin Proses	
2	1	6	7	1	12	Utang Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	
2	1	6	7	1	13	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung- Equipment Dredger	
2	1	6	7	1	14	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Floating Excavator	
2	1	6	7	1	15	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Amphibi Dredger	
2	1	6	7	1	16	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Kapal Tarik	
2	1	6	7	1	17	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	
2	1	6	7	1	18	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	
2	1	6	7	1	19	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Alat Penarik	
2	1	6	7	1	20	Utang Belanja Modal Alat Bantu- <i>Feeder</i>	
2	1	6	7	1	21	Utang Belanja Modal Alat Bantu- <i>Compressor</i>	
2	1	6	7	1	22	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Electric Generating Set	
2	1	6	7	1	23	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Pompa	
2	1	6	7	1	24	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Mesin Bor	
2	1	6	7	1	25	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	
2	1	6	7	1	26	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	
2	1	6	7	1	27	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	
2	1	6	7	1	28	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	
2	1	6	7	1	29	Utang Belanja Modal Alat Bantu- <i>Tatoo</i>	
2	1	6	7	1	30	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	
2	1	6	7	1	31	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan Selam	
2	1	6	7	1	32	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering	
2	1	6	7	1	33	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan Intelejen	
2	1	6	7	1	34	Utang Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	
2	1	6	7	2	001	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	
2	1	6	7	2	002	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	
2	1	6	7	2	003	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
2	1	6	7	2	004	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	
2	1	6	7	2	005	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	
2	1	6	7	2	006	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	
2	1	6	7	2	007	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur	
2	1	6	7	2	008	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	
2	1	6	7	2	009	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	
2	1	6	7	2	10	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	
2	1	6	7	2	11	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	
2	1	6	7	2	12	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	
2	1	6	7	2	13	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	
2	1	6	7	2	14	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	7	2	15	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	
2	1	6	7	2	16	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	
2	1	6	7	2	17	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor -Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	
2	1	6	7	2	18	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	
2	1	6	7	2	19	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	
2	1	6	7	2	20	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	
2	1	6	7	2	21	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	
2	1	6	7	2	22	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak	
2	1	6	7	2	23	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang	
2	1	6	7	2	24	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya	
2	1	6	7	3	001	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	
2	1	6	7	3	002	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	
2	1	6	7	3	003	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Listrik	
2	1	6	7	3	004	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Service	
2	1	6	7	3	005	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Pengangkat Bermesin	
2	1	6	7	3	006	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Kayu	
2	1	6	7	3	007	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Khusus	
2	1	6	7	3	008	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Peralatan Las	
2	1	6	7	3	009	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Pabrik Es	
2	1	6	7	3	10	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	
2	1	6	7	3	11	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	
2	1	6	7	3	12	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Bengkel Listrik	
2	1	6	7	3	13	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Bengkel Service	
2	1	6	7	3	14	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Pengangkat	
2	1	6	7	3	15	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Standar (Standard Tools)	
2	1	6	7	3	16	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Khusus (<i>Special Tools</i>)	
2	1	6	7	3	17	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Bengkel Kerja	
2	1	6	7	3	18	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Tukang Besi	
2	1	6	7	3	19	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Tukang Kayu	
2	1	6	7	3	20	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Tukang Kayu	
2	1	6	7	3	21	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Ukur, Gip dan <i>Feeting</i>	
2	1	6	7	3	22	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Bengkel Khusus Peladam	
2	1	6	7	3	23	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	
2	1	6	7	3	24	Utang Belanja Universal	
2	1	6	7	3	25	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Intelegensia	
2	1	6	7	3	26	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian	
2	1	6	7	3	27	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain	
2	1	6	7	3	28	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Kalibrasi	
2	1	6	7	3	29	Utang Belanja Modal Alat Ukur- <i>Oscilloscope</i>	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	7	3	30	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Universal Tester	
2	1	6	7	3	31	Utang Belanja Ukur/Pembanding	
2	1	6	7	3	32	Utang Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	
2	1	6	7	3	33	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	
2	1	6	7	3	34	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara	
2	1	6	7	3	35	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Kering	
2	1	6	7	3	36	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan	
2	1	6	7	3	37	Utang Belanja Modal Takaran Lainnya	
2	1	6	7	3	38	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	
2	1	6	7	3	39	Utang Belanja Modal Alat Ukur- <i>Specific Set</i>	
2	1	6	7	3	40	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam	
2	1	6	7	3	41	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan	
2	1	6	7	3	42	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu	
2	1	6	7	3	43	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur Instrument Workshop	
2	1	6	7	3	44	Utang Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	
2	1	6	7	4	001	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	
2	1	6	7	4	002	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	
2	1	6	7	4	003	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Panen	
2	1	6	7	4	004	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	
2	1	6	7	4	005	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-alat laboratorium pertanian	
2	1	6	7	4	006	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Processing	
2	1	6	7	4	007	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	
2	1	6	7	4	008	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	
2	1	6	7	4	009	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	
2	1	6	7	4	10	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	
2	1	6	7	5	001	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Mesin Ketik	
2	1	6	7	5	002	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	
2	1	6	7	5	003	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	
2	1	6	7	5	004	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	
2	1	5	7	5	005	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	
2	1	5	7	5	006	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga- Meubelair	
2	1	5	7	5	007	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	
2	1	5	7	5	008	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	
2	1	6	7	5	009	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	
2	1	6	7	5	10	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	
2	1	6	7	5	11	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	
2	1	6	7	5	12	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	
2	1	6	7	5	13	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	
2	1	6	7	5	14	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	
2	1	6	7	5	15	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	
2	1	6	7	5	16	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	
2	1	6	7	5	17	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	
2	1	6	7	5	18	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	
2	1	6	7	5	19	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat-Lemari dan Arsip Pejabat	
2	1	6	7	6	001	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Audio	
2	1	6	7	6	002	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	
2	1	6	7	6	003	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	7	6	004	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Cetak	
2	1	6	7	6	005	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	
2	1	6	7	6	006	Utang Belanja Belanja Modal Alat Studio Lainnya	
2	1	6	7	6	007	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi- <i>Telephone</i>	
2	1	6	7	6	008	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	
2	1	6	7	6	009	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	
2	1	6	7	6	10	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	
2	1	6	7	6	11	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	
2	1	6	7	6	12	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	
2	1	6	7	6	13	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Sandi	
2	1	6	7	6	14	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	
2	1	6	7	6	15	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	
2	1	6	7	6	16	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit	
2	1	6	7	6	17	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	
2	1	6	7	6	18	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar MF/MW	
2	1	6	7	6	19	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar HF/SW	
2	1	6	7	6	20	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar VHF/FM	
2	1	6	7	6	21	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar UHF	
2	1	6	7	6	22	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar SHF	
2	1	6	7	6	23	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena MF/MW	
2	1	6	7	6	24	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena HF/SW	
2	1	6	7	6	25	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena VHF/FM	
2	1	6	7	6	26	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena UHF	
2	1	6	7	6	27	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-	
2	1	6	7	6	28	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Translator VHF/VHF	
2	1	6	7	6	29	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Translator UHF/UHF	
2	1	6	7	6	30	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Translator VHF/UHF	
2	1	6	7	6	31	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Translator UHF/VHF	
2	1	6	7	6	32	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Microwave FPU	
2	1	6	7	6	33	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Microwave Terrestrial	
2	1	6	7	6	34	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Microwave TVRO	
2	1	6	7	6	35	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Dummy Load	
2	1	6	7	6	36	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Switcher Antena	
2	1	6	7	6	37	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Switcher/Menara Antena	
2	1	6	7	6	38	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- <i>Feeder</i>	
2	1	6	7	6	39	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Humidity Control	
2	1	6	7	6	40	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Program Input Equipment	
2	1	6	7	6	41	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Penerima VHF	
2	1	6	7	6	42	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar LF	
2	1	6	7	6	43	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF	
2	1	6	7	6	44	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar MF+HF	
2	1	6	7	6	45	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima	
2	1	6	7	6	46	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima LF	
2	1	6	7	6	47	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima MF	
2	1	6	7	6	48	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima HF	
2	1	6	7	6	49	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	7	6	50	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- eralatan Pemancar dan Penerima VHF	
2	1	6	7	6	51	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	
2	1	6	7	6	52	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima SHF	
2	1	6	7	6	53	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF	
2	1	6	7	6	54	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-	
2	1	6	7	6	55	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF	
2	1	6	7	6	56	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF	
2	1	6	7	6	57	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF	
2	1	6	7	6	58	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	
2	1	6	7	6	59	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF	
2	1	6	7	6	60	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah	
2	1	6	7	6	61	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi	
2	1	6	7	6	62	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	
2	1	6	7	6	63	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Perlengkapan Radio	
2	1	6	7	5	64	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Sumber Tenaga	
2	1	6	7	5	65	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	
2	1	6	7	6	66	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrument Landing System	
2	1	6	7	6	67	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Very High Frequence Omni Range (VOR)	
2	1	6	7	6	68	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Distance Measuring Equipment (DME)	
2	1	6	7	6	69	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar	
2	1	6	7	6	70	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi	
2	1	6	7	6	71	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	
2	1	6	7	6	72	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	
2	1	6	7	7	001	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	
2	1	6	7	7	002	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	
2	1	6	7	7	003	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	
2	1	6	7	7	004	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	
2	1	6	7	7	005	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	
2	1	6	7	7	006	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	
2	1	6	7	7	007	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	
2	1	6	7	7	008	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	
2	1	6	7	7	009	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	
2	1	6	7	7	10	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	
2	1	6	7	7	11	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	
2	1	6	7	7	12	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	
2	1	6	7	7	13	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	7	7	14	Utang Belanja Modal Kedokteran Jantung	
2	1	6	7	7	15	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	
2	1	6	7	7	16	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	
2	1	6	7	7	17	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah	
2	1	6	7	7	18	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi	
2	1	6	7	7	19	Utang Belanja Modal Kedokteran Nuklir	
2	1	6	7	7	20	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	
2	1	6	7	7	21	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	
2	1	6	7	7	22	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa	
2	1	6	7	7	23	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	
2	1	6	7	7	24	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU	
2	1	6	7	7	25	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU	
2	1	6	7	7	26	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung	
2	1	6	7	7	27	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat	
2	1	6	7	7	28	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi	
2	1	6	7	7	29	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	
2	1	6	7	7	30	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut	
2	1	6	7	7	31	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara	
2	1	6	7	7	32	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian	
2	1	6	7	7	33	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga	
2	1	6	7	7	34	Utang Belanja Lainnya	
2	1	6	7	8	001	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	
2	1	6	7	8	002	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	
2	1	6	7	8	003	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia	
2	1	6	7	8	004	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika	
2	1	6	7	8	005	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi	
2	1	6	7	8	006	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	
2	1	6	7	8	007	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	
2	1	6	7	8	008	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	
2	1	6	7	8	009	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam	
2	1	6	7	8	10	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	
2	1	6	7	8	11	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	
2	1	6	7	8	12	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	
2	1	6	7	8	13	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat	
2	1	6	7	8	14	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	
2	1	6	7	8	15	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi	
2	1	6	7	8	16	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	
2	1	6	7	8	17	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	
2	1	6	7	8	18	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	
2	1	6	7	8	19	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	
2	1	6	7	8	20	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	7	8	21	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika	
2	1	6	7	8	22	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi	
2	1	6	7	8	23	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Proses Peleburan	
2	1	6	7	8	24	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	
2	1	6	7	8	25	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir	
2	1	6	7	8	26	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan	
2	1	6	7	8	27	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola	
2	1	6	7	8	28	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi	
2	1	6	7	8	29	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan	
2	1	6	7	8	30	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	
2	1	6	7	8	31	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	
2	1	6	7	8	32	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	
2	1	6	7	8	33	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam	
2	1	6	7	8	34	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	
2	1	6	7	8	35	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	
2	1	6	7	8	36	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil	
2	1	6	7	8	37	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	
2	1	6	7	8	38	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	
2	1	6	7	8	39	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik	
2	1	6	7	8	40	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik	
2	1	6	7	8	41	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	
2	1	6	7	8	42	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	
2	1	6	7	8	43	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	
2	1	6	7	8	44	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya	
2	1	6	7	8	45	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass	
2	1	6	7	8	46	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat	
2	1	6	7	8	47	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	
2	1	6	7	8	48	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan	
2	1	6	7	8	49	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi	
2	1	6	7	8	50	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika	
2	1	6	7	8	51	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang	
2	1	6	7	8	52	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass	
2	1	6	7	8	53	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri	
2	1	6	7	8	54	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	
2	1	6	7	8	55	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Kearsipan	
2	1	6	7	8	56	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	7	8	57	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	
2	1	6	7	8	58	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi	
2	1	6	7	8	59	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan	
2	1	6	7	8	60	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim	
2	1	6	7	8	61	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai	
2	1	6	7	8	62	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi	
2	1	6	7	8	63	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi	
2	1	6	7	8	64	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang	
2	1	6	7	8	65	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	
2	1	6	7	8	66	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	
2	1	6	7	8	67	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument Probe/Sensor	
2	1	6	7	8	68	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool	
2	1	6	7	8	69	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Glassware Plastic/Utensil	
2	1	6	7	8	70	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment	
2	1	6	7	8	71	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	
2	1	6	7	8	72	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Bahasa Indonesia	
2	1	6	7	8	73	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Matematika	
2	1	6	7	8	74	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:IPA Dasar	
2	1	6	7	8	75	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:IPA Lanjutan	
2	1	6	7	8	76	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:IPA Menengah	
2	1	6	7	8	77	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:IPA Atas	
2	1	6	7	8	78	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:IPS	
2	1	6	7	8	79	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Agama	
2	1	6	7	8	80	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Keterampilan	
2	1	6	7	8	81	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Kesenian	
2	1	6	7	8	82	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Olahraga	
2	1	6	7	8	83	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:PKN	
2	1	6	7	8	84	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	
2	1	6	7	8	85	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan	
2	1	6	7	8	86	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	
2	1	6	7	8	87	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	
2	1	6	7	8	88	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Radiation Detector	
2	1	6	7	8	89	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic	
2	1	6	7	8	90	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Assembly/Counting System	
2	1	6	7	8	91	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display	
2	1	6	7	8	92	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	
2	1	6	7	8	93	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	7	8	94	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Opto Electronics	
2	1	6	7	8	95	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Accelerator	
2	1	6	7	8	96	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Reactor Experimental System	
2	1	6	7	8	97	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	
2	1	6	7	8	98	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan	
2	1	6	7	8	99	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	
2	1	6	7	8	100	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan	
2	1	6	7	8	101	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment	
2	1	6	7	8	102	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi	
2	1	6	7	8	103	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	
2	1	6	7	8	104	Utang Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya- Radiation Application Equipment	
2	1	6	7	8	105	Utang Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Non Destructive Test (NDT) Device	
2	1	6	7	8	106	Utang Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya- Peralatan Hidrologi	
2	1	6	7	8	107	Utang Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	
2	1	6	7	8	108	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	
2	1	6	7	8	109	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	
2	1	6	7	8	110	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	
2	1	6	7	8	111	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	
2	1	6	7	8	112	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	
2	1	6	7	8	113	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	
2	1	6	7	8	114	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Towing Carriage	
2	1	6	7	8	115	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System	
2	1	6	7	8	116	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Cavitation Tunnel	
2	1	6	7	8	117	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Overhead Cranes	
2	1	6	7	8	118	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum	
2	1	6	7	8	119	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop	
2	1	6	7	8	120	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Propeller Model Workshop	
2	1	6	7	8	121	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Mechanical Workshop	
2	1	6	7	8	122	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Precision Mechanical Workshop	
2	1	6	7	8	123	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Painting Shop	
2	1	6	7	8	124	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Ship Model Preparation Shop	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	7	8	125	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop	
2	1	6	7	8	126	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB	
2	1	6	7	8	127	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Photo and Film Equipment	
2	1	6	7	8	128	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	
2	1	6	7	8	129	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Electromedik dan Biomedik	
2	1	6	7	8	130	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	
2	1	6	7	8	131	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	
2	1	6	7	8	132	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	
2	1	6	7	8	133	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	
2	1	6	7	8	134	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	
2	1	6	7	8	135	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius	
2	1	6	7	8	136	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran	
2	1	6	7	8	137	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	
2	1	6	7	8	138	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat	
2	1	6	7	8	139	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	
2	1	6	7	10	001	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Komputer	
2	1	6	7	10	002	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	
2	1	6	7	10	003	Utang Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	
2	1	6	7	10	004	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe	
2	1	6	7	10	005	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer	
2	1	6	7	10	006	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	
2	1	6	7	10	007	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	
2	1	6	7	10	008	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	
2	1	6	7	11	001	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi- Optik	
2	1	6	7	11	002	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi- Ukur/Instrumen	
2	1	6	7	11	003	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	
2	1	6	7	11	004	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika- Mekanik	
2	1	6	7	11	005	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika- Elektronik/Electric	
2	1	6	7	11	006	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika- Manual	
2	1	6	7	11	007	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya	
2	1	6	7	12	001	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk	
2	1	6	7	12	002	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar	
2	1	6	7	12	003	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya	
2	1	6	7	12	004	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran non Mesin- Bangka	
2	1	6	7	12	005	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin- Pantek	
2	1	6	7	12	006	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin- Putar	
2	1	6	7	12	007	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin- Peralatan Bantu	
2	1	6	7	12	008	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya	
2	1	6	7	13	001	Utang Belanja Modal Sumur-Peralatan Sumur Minyak	
2	1	6	7	13	002	Utang Belanja Modal Sumur-Sumur Pemboran	
2	1	6	7	13	003	Utang Belanja Modal Sumur Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	7	13	004	Utang Belanja Modal Produksi-Rig	
2	1	6	7	13	005	Utang Belanja Modal Produksi Lainnya	
2	1	6	7	13	006	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak	
2	1	6	7	13	007	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	
2	1	6	7	13	008	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam	
2	1	6	7	13	009	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax	
2	1	6	7	13	10	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya	
2	1	6	7	14	001	Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi- Mekanik	
2	1	6	7	14	002	Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi- Elektrik	
2	1	6	7	14	003	Utang Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi	
2	1	6	7	14	004	Utang Belanja Modal Alat Bantu Produksi- Perawatan Sumur	
2	1	6	7	14	005	Utang Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya	
2	1	6	7	15	001	Utang Belanja Modal Alat Deteksi-Radiasi	
2	1	6	7	15	002	Utang Belanja Modal Alat Deteksi-Suara	
2	1	6	7	15	003	Utang Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	
2	1	6	7	15	004	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Baju Pengaman	
2	1	6	7	15	005	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Masker	
2	1	6	7	15	006	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Topi Kerja	
2	1	6	7	15	007	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Sabuk Pengaman	
2	1	6	7	15	008	Utang Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	
2	1	6	7	15	009	Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	
2	1	6	7	15	10	Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Penolong	
2	1	6	7	15	11	Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air	
2	1	6	7	15	12	Utang Belanja Modal Alat SAR Lainnya	
2	1	6	7	15	13	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan	
2	1	6	7	15	14	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan	
2	1	6	7	15	15	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan	
2	1	6	7	15	16	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan	
2	1	6	7	15	17	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	
2	1	6	7	15	18	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	
2	1	6	7	15	19	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>	
2	1	6	7	15	20	Utang Belanja Lainnya	
2	1	6	7	16	001	Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	
2	1	6	7	16	002	Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan	
2	1	6	7	16	003	Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	
2	1	6	7	17	001	Utang Belanja Modal Proses/Produksi-Liquid-Liquid Equipment	
2	1	6	7	17	002	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment	
2	1	6	7	17	003	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening Equipment	
2	1	6	7	17	004	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Classifier	
2	1	6	7	17	005	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment	
2	1	6	7	17	006	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment	
2	1	6	7	17	007	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	7	17	008	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Leaching Equipment	
2	1	6	7	17	009	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation Equipment	
2	1	6	7	17	10	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering Equipment	
2	1	6	7	17	11	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid	
2	1	6	7	17	12	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment	
2	1	6	7	17	13	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Drying Equipment	
2	1	6	7	17	14	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment	
2	1	6	7	17	15	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Separation Equipment	
2	1	6	7	17	16	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Distillation Equipment	
2	1	6	7	17	17	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Separation Equipment	
2	1	6	7	17	18	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Isotope Separation Equipment	
2	1	6	7	17	19	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid	
2	1	6	7	17	20	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment	
2	1	6	7	17	21	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment	
2	1	6	7	17	22	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment	
2	1	6	7	17	23	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer Equipment	
2	1	6	7	17	24	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process	
2	1	6	7	17	25	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment	
2	1	6	7	17	26	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	
2	1	6	7	18	001	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	
2	1	6	7	18	002	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	
2	1	6	7	18	003	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	
2	1	6	7	18	004	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Runway/ Threshold Light</i>	
2	1	6	7	18	005	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Visual Approach Slope Indicator (VASI)	
2	1	6	7	18	006	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Approach Light	
2	1	6	7	18	007	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway Identification Light (REILS)	
2	1	6	7	18	008	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Signal	
2	1	6	7	18	009	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Flood Lights</i>	
2	1	6	7	18	10	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	
2	1	6	7	18	11	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	
2	1	6	7	18	12	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	
2	1	6	7	19	001	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Atletik	
2	1	6	7	19	002	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan	
2	1	6	7	19	003	Utang Belanja ModalPeralatan Olahraga- Peralatan Senam	
2	1	6	7	19	004	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Air	
2	1	6	7	19	005	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Udara	
2	1	6	7	19	006	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	
2	1	6	8	1	001	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	
2	1	6	8	1	002	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	8	1	003	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	
2	1	6	8	1	004	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	
2	1	6	8	1	005	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	
2	1	6	8	1	006	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	
2	1	6	8	1	007	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium	
2	1	6	8	1	008	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
2	1	6	8	1	009	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	
2	1	6	8	1	10	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
2	1	6	8	1	11	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	
2	1	6	8	1	12	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	
2	1	6	8	1	13	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	
2	1	6	8	1	14	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	
2	1	6	8	1	15	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	
2	1	6	8	1	16	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	
2	1	6	8	1	17	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	
2	1	6	8	1	18	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	
2	1	6	8	1	19	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan	
2	1	6	8	1	20	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan	
2	1	6	8	1	21	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	
2	1	6	8	1	22	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium	
2	1	6	8	1	23	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	
2	1	6	8	1	24	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan	
2	1	6	8	1	25	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	
2	1	6	8	1	26	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	
2	1	6	3	1	27	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
2	1	6	8	1	28	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	
2	1	6	8	1	29	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	
2	1	6	8	1	30	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
2	1	6	8	1	31	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika	
2	1	6	8	1	32	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	
2	1	6	8	1	33	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	
2	1	6	8	1	34	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	
2	1	6	8	1	35	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	8	1	36	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat	
2	1	6	8	1	37	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
2	1	6	8	1	38	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	
2	1	6	8	1	39	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	
2	1	6	8	1	40	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	
2	1	6	8	1	41	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	
2	1	6	8	1	42	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	
2	1	6	8	1	43	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel	
2	1	6	8	1	44	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel	
2	1	6	8	1	45	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Modal Flat/Rumah Susun	
2	1	6	8	1	46	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	
2	1	6	8	1	47	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan	
2	1	6	8	1	48	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen	
2	1	6	8	1	49	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	
2	1	6	8	1	50	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	
2	1	6	8	2	001	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi	
2	1	6	8	2	002	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	
2	1	6	8	2	003	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	
2	1	6	8	2	004	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	
2	1	6	8	3	001	Utang Belanja Modal Bangunan Menara	
2	1	6	8	3	002	Utang Belanja Modal Bangunan Menara-Pantai	
2	1	6	8	3	003	Utang Belanja Modal Bangunan Menara- Telekomunikasi	
2	1	6	8	3	004	Utang Belanja Modal Bangunan Menara- Pengawas	
2	1	6	8	3	005	Utang Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	
2	1	6	8	4	001	Utang Belanja Modal Tugu/Tanda-Batas Administrasi	
2	1	6	8	4	002	Utang Belanja Modal Tugu/Tanda-Jaring Kontrol Geodesi	
2	1	6	8	4	003	Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	
2	1	6	8	4	004	Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda-Pagar	
2	1	6	8	4	005	Utang Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	
2	1	6	9	1	001	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Nasional	
2	1	6	9	1	002	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi	
2	1	6	9	1	003	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	
2	1	6	9	1	004	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kota	
2	1	6	9	1	005	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Desa	
2	1	6	9	1	006	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Tol	
2	1	6	9	1	007	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kereta Api	
2	1	6	9	1	008	Utang Belanja ModalJalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang	
2	1	6	9	1	009	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Khusus	
2	1	6	9	1	10	Utang Belanja Modal Jalan Lainnya	
2	1	6	9	1	11	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional	
2	1	6	9	1	12	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	
2	1	6	9	1	13	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	
2	1	6	9	1	14	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	
2	1	6	9	1	15	Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	
2	1	6	9	1	16	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol	
2	1	6	9	1	17	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api	
2	1	6	9	1	18	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	
2	1	6	9	1	19	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	9	1	20	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Penyeberangan	
2	1	6	9	1	21	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	
2	1	6	9	1	22	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Pengukur	
2	1	6	9	1	23	Utang Belanja Modal Jembatan Lainnya	
2	1	6	9	2	001	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Waduk Irigasi	
2	1	6	9	2	002	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi	
2	1	6	9	2	003	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi	
2	1	6	9	2	004	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembuang Irigasi	
2	1	6	9	2	005	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi	
2	1	6	9	2	006	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pelengkap Irigasi	
2	1	6	9	2	007	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Sawah Irigasi	
2	1	6	9	2	008	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	
2	1	6	9	2	009	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut	
2	1	6	9	2	10	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut	
2	1	6	9	2	11	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut	
2	1	6	9	2	12	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	
2	1	6	9	2	13	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	
2	1	6	9	2	14	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut	
2	1	6	9	2	15	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan	
2	1	6	9	2	16	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	
2	1	6	9	2	17	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	
2	1	6	9	2	18	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	
2	1	6	9	2	19	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	
2	1	6	9	2	20	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	
2	1	6	9	2	21	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	
2	1	6	9	2	22	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	
2	1	6	9	2	23	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	
2	1	6	9	2	24	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya	
2	1	6	9	2	25	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	
2	1	6	9	2	26	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	
2	1	6	9	2	27	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	
2	1	6	9	2	28	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	
2	1	6	9	2	29	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
						Sungai/Pantai	
2	1	6	9	2	30	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	
2	1	6	9	2	31	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	
2	1	6	9	2	32	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	
2	1	6	9	2	33	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	
2	1	6	9	2	34	Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	
2	1	6	9	2	35	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	
2	1	6	9	2	36	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	
2	1	6	9	2	37	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	
2	1	6	9	2	38	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	
2	1	6	9	2	39	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	
2	1	6	9	2	40	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	
2	1	6	9	2	41	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	
2	1	6	9	2	42	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	
2	1	6	9	2	43	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	
2	1	6	9	2	44	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	
2	1	6	9	2	45	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	
2	1	6	9	2	46	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor	
2	1	6	9	2	47	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor- Bangunan Waduk Air Kotor	
2	1	6	9	2	48	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembuang Air Kotor	
2	1	6	9	2	49	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor- Bangunan Pengaman Air Kotor	
2	1	6	9	2	50	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor- Bangunan Pelengkap Air Kotor	
2	1	6	9	2	51	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	
2	1	6	9	3	001	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	
2	1	6	9	3	002	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	
2	1	6	9	3	003	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	
2	1	6	9	3	004	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Tanah Dangkal	
2	1	6	9	3	005	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	
2	1	6	9	3	006	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	
2	1	6	9	3	007	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri	
2	1	6	9	3	008	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian	
2	1	6	9	3	009	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	
2	1	6	9	3	10	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	9	3	11	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	
2	1	6	9	3	12	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	
2	1	6	9	3	13	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	
2	1	6	9	3	14	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan	
2	1	6	9	3	15	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	
2	1	6	9	3	16	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	
2	1	6	9	3	17	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	
2	1	6	9	3	18	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	
2	1	6	9	3	19	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	
2	1	6	9	3	20	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	
2	1	6	9	3	21	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	
2	1	6	9	3	22	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	
2	1	6	9	3	23	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	
2	1	6	9	3	24	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	
2	1	6	9	3	25	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	
2	1	6	9	3	26	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	
2	1	6	9	3	27	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	
2	1	6	9	3	28	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera	
2	1	6	9	3	29	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	
2	1	6	9	3	30	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Induk	
2	1	6	9	3	31	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Distribusi	
2	1	6	9	3	32	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Pusat Pengatur Listrik	
2	1	6	9	3	33	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	
2	1	6	9	3	34	Utang Belanja Modal Instalasi Pertahanan- Instalasi Pertahanan di Darat	
2	1	6	9	3	35	Utang Belanja Modal Instalasi Pertahanan Lainnya	
2	1	6	9	3	36	Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas	
2	1	6	9	3	37	Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas	
2	1	6	9	3	38	Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas	
2	1	6	9	3	39	Utang Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya	
2	1	6	9	3	40	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman- Instalasi Pengaman Penangkal Petir	
2	1	6	9	3	41	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman- Instalasi Reaktor Nuklir	
2	1	6	9	3	42	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman- Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	
2	1	6	9	3	43	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	
2	1	6	9	3	44	Utang Belanja Modal Instalasi Lain	
2	1	6	9	4	001	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum- Jaringan Pembawa	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	9	4	002	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum- Jaringan Induk Distribusi	
2	1	6	9	4	003	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum- Jaringan Cabang Distribusi	
2	1	6	9	4	004	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum- Jaringan Sambungan ke Rumah	
2	1	6	9	4	005	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	
2	1	6	9	4	006	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	
2	1	6	9	4	007	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	
2	1	6	9	4	008	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	
2	1	6	9	4	009	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah	
2	1	6	9	4	10	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon dibawah Tanah	
2	1	6	9	4	11	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon didalam Air	
2	1	6	9	4	12	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	
2	1	6	9	4	13	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	
2	1	6	9	4	14	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi	
2	1	6	9	4	15	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa	
2	1	6	9	4	16	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas	
2	1	6	9	4	17	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan BBM	
2	1	6	9	4	18	Utang Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya	
2	1	6	10	1	001	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	
2	1	6	10	1	002	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat	
2	1	6	10	1	003	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama	
2	1	6	10	1	004	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial	
2	1	6	10	1	005	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa	
2	1	6	10	1	006	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	
2	1	6	10	1	007	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	
2	1	6	10	1	008	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	
2	1	6	10	1	009	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	
2	1	6	10	1	10	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial	
2	1	6	10	1	11	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan	
2	1	6	10	1	12	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	
2	1	6	10	1	13	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual	
2	1	6	10	1	14	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (Microform)	
2	1	6	10	1	15	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	
2	1	6	10	1	16	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan	
2	1	6	10	1	17	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli	
2	1	6	10	1	18	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran	
2	1	6	10	1	19	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya	
2	1	6	10	1	20	Utang Belanja Modal Musik-Karya Musik	
2	1	6	10	1	21	Utang Belanja Modal Musik Lainnya	
2	1	6	10	1	22	Utang Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika (Graphic Material)	
2	1	6	10	1	23	Utang Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya	
2	1	6	10	1	24	Utang Belanja Modal <i>Three Dimensional Artifacts</i> and <i>Realita-Three Dimensional Artifacts</i> And <i>Realita</i>	
2	1	6	10	1	25	Utang Belanja Modal <i>Three Dimensional Artifacts</i> And <i>Realita</i> Lainnya	
2	1	6	10	1	26	Utang Belanja Modal Tarscalt-Tarscalt	
2	1	6	10	1	27	Utang Belanja Modal Tarscalt Lainnya	
2	1	6	10	2	001	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian- Alat Musik	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	10	2	002	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian- Lukisan	
2	1	6	10	2	003	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian- Alat Peraga Kesenian	
2	1	6	10	2	004	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	
2	1	6	10	2	005	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan- Pahatan	
2	1	6	10	2	006	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan- Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	
2	1	6	10	2	007	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan- Belanja Modal Barang Kerajinan	
2	1	6	10	2	008	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	
2	1	6	10	2	009	Utang Belanja Modal Tanda Penghargaan-Tanda	
2	1	6	10	2	10	Utang Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	
2	1	6	10	3	001	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Pengaman	
2	1	6	10	3	002	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut	
2	1	6	10	3	003	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang	
2	1	6	10	3	004	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan Lainnya	
2	1	6	10	3	005	Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Potong	
2	1	6	10	3	006	Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Perah	
2	1	6	10	3	007	Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Unggas	
2	1	6	10	3	008	Utang Belanja Modal Ternak Lainnya	
2	1	6	10	3	009	Utang Belanja Modal Hewan Lainnya	
2	1	6	10	4	001	Utang Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya	
2	1	6	10	4	002	Utang Belanja Modal Krustasea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Krustasea (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)	
2	1	6	10	4	003	Utang Belanja Modal Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)- Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)	
2	1	6	10	4	004	Utang Belanja Modal Coelenterata (Ubur-ubur dan Sebangsanya)- Coelenterata (Ubur-ubur dan Sebangsanya)	
2	1	6	10	4	005	Utang Belanja Modal Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)	
2	1	6	10	4	006	Utang Belanja Modal Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)-Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)	
2	1	6	10	4	007	Utang Belanja Modal Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)- Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)	
2	1	6	10	4	008	Utang Belanja Modal Mammalia (Paus, Lumba- lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)- Mammalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)	
2	1	6	10	4	009	Utang Belanja Modal Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)	
2	1	6	10	4	10	Utang Belanja Modal Budidaya Biota Perairan Lainnya	
2	1	6	10	5	001	Utang Belanja Modal Tanaman-Tanaman	
2	1	6	10	6	001	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi	
2	1	6	10	6	002	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya- Biota Perairan Koleksi	
2	1	6	10	6	003	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi	
2	1	6	10	6	004	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi	
2	1	6	10	6	005	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi	
2	1	6	10	6	006	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Fosil	
2	1	6	10	6	007	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	
2	1	6	10	7	001	Utang Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi- Aset Tetap Dalam Renovasi	
2	1	6	11	1	001	Utang Belanja Tidak Terduga	
2	1	6	12	1	001	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten ...	
2	1	6	12	1	002	Dst ...	
2	1	6	12	2	001	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota ...	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	6	12	2	002	Dst ...	
2	1	6	12	3	001	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ...	
2	1	6	12	3	002	Dst ...	
2	1	6	13	1	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi ...	
2	1	6	13	1	002	Dst ...	
2	1	6	13	2	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi ...	
2	1	6	13	2	002	Dst ...	
2	1	6	13	3	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ...	
2	1	6	13	3	002	Dst ...	
2	1	6	13	4	001	Utang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ...	
2	1	6	13	4	002	Dst ...	
2	1	6	13	5	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota ...	
2	1	6	13	5	002	Dst ...	
2	1	6	13	6	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota ...	
2	1	6	13	6	002	Dst ...	
2	1	6	13	7	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi ...	
2	1	6	13	7	002	Dst ...	
2	1	6	13	8	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi ...	
2	2	6	13	8	002	Dst ...	
2	1	6	13	9	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ...	
2	1	6	13	9	002	Dst ...	
2	1	6	13	10	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ...	
2	1	6	13	10	002	Dst ...	
2	1	6	13	11	001	Utang Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota ...	
2	1	6	13	11	002	Dst ...	
2	1	6	14	1	001	Utang Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu ...	
2	1	6	14	1	002	Dst ...	
2	1	6	14	2	001	Utang Belanja Bantuan Sosial Barang kepada Individu yang Direncanakan ...	
2	1	6	14	2	002	Dst ...	
2	1	6	14	3	001	Utang Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga ...	
2	1	6	14	3	002	Dst ...	
2	1	6	14	4	001	Utang Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga ...	
2	1	6	14	4	002	Dst ...	
2	1	6	14	5	001	Utang Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat ...	
2	1	6	14	5	002	Dst ...	
2	1	6	14	6	001	Utang Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat ...	
2	1	6	14	6	002	Dst ...	
2	1	6	14	7	001	Utang Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) ...	
2	1	6	14	7	002	Dst ...	
2	1	6	14	8	001	Utang Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) ...	
2	1	6	14	8	002	Dst ...	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	7	1	1	001	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	
2	1	7	1	1	002	Utang Kelebihan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
2	1	7	1	1	003	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
2	1	7	1	1	004	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Permukaan	
2	1	7	1	1	005	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok	
2	1	7	1	1	006	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel	
2	1	7	1	1	007	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran	
2	1	7	1	1	008	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan	
2	1	7	1	1	009	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame	
2	1	7	1	1	10	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan	
2	1	7	1	1	11	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Parkir	
2	1	7	1	1	12	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah	
2	1	7	1	1	13	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet	
2	1	7	1	1	14	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	
2	1	7	1	1	15	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	
2	1	7	1	1	16	Utang Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	
2	1	7	1	2	001	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum	
2	1	7	1	2	002	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha	
2	1	7	1	2	003	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu	
2	1	7	1	3	001	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN	
2	1	7	1	3	001	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan	
2	1	7	1	4	001	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	
2	1	7	1	4	002	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	
2	1	7	1	4	003	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	
2	1	7	1	4	004	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Kerja Sama Daerah	
2	1	7	1	4	005	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro	
2	1	7	1	4	006	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
2	1	7	1	4	007	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bunga	
2	1	7	1	4	008	Utang Kelebihan Pembayaran atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	
2	1	7	1	4	009	Utang Kelebihan Pembayaran Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	
2	1	7	1	4	10	Utang Kelebihan Pembayaran Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	
2	1	7	1	4	11	Utang Kelebihan Pembayaran Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
2	1	7	1	4	12	Utang Kelebihan Pembayaran Denda Pajak Daerah	
2	1	7	1	4	13	Utang Kelebihan Pembayaran Denda Retribusi Daerah	
2	1	7	1	4	14	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Eksekusi atas Jaminan	
2	1	7	1	4	15	Utang Kelebihan Pembayaran dari Pengembalian	
2	1	7	1	4	16	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD	
2	1	7	1	4	17	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	
2	1	7	1	4	18	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	
2	1	7	1	4	19	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
2	1	7	1	4	20	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	
2	1	7	1	4	21	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	1	7	1	4	22	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Zakat	
2	1	7	2	1	001	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	
2	1	7	2	1	002	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah	
2	1	7	2	1	003	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus	
2	1	7	2	1	004	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Keistimewaan	
2	1	7	2	1	005	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Desa	
2	1	7	2	2	001	Utang Kelebihan Pembayaran Bagi Hasil	
2	1	7	2	2	002	Utang Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	
2	1	7	3	1	001	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
2	1	7	3	1	002	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	
2	1	7	3	1	003	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	
2	1	7	3	1	004	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	
2	1	7	3	1	005	Utang Kelebihan Pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	
2	1	7	3	2	001	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan	
2	1	7	4	1	001	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	
2	1	7	4	1	002	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	
2	1	7	4	1	003	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
2	1	7	4	2	001	Utang Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	
2	1	7	4	2	002	Utang Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	
2	1	7	4	2	003	Utang Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	
2	1	7	4	2	004	Utang Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	
2	1	7	4	2	005	Utang Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	
2	1	7	4	2	006	Utang Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	
2	2	1	1	1	001	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...- Jangka Menengah	
2	2	1	1	1	002	Dst ...	
2	2	1	1	2	001	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...- Jangka Panjang	
2	2	1	1	2	002	Dst ...	
2	2	1	2	1	001	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...- Jangka Menengah	
2	2	1	2	1	002	Dst ...	
2	2	1	2	2	001	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...- Jangka Panjang	
2	2	1	2	2	001	Dst ...	
2	2	1	3	1	001	Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	
2	2	1	3	1	002	Dst ...	
2	2	1	3	2	001	Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang	
2	2	1	3	2	002	Dst ...	
2	2	2	1	1	001	Utang kepada LKB-BUMN ...-Jangka Menengah	
2	2	2	1	1	002	Dst ...	
2	2	2	1	2	001	Utang kepada LKB BUMN ...-Jangka Panjang	
2	2	2	1	2	002	Dst ...	
2	2	2	2	1	001	Utang kepada LKB-BUMD ...-Jangka Menengah	
2	2	2	2	1	002	Dst ...	
2	2	2	2	2	001	Utang kepada LKB-BUMD ...-Jangka Panjang	
2	2	2	2	2	002	Dst ...	
2	2	2	3	1	001	Utang kepada LKB-Swasta ...-Jangka Menengah	
2	2	2	3	1	002	Dst ...	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
2	2	2	3	2	001	Utang kepada LKB-Swasta ...-Jangka Panjang	
2	2	2	3	2	002	Dst ...	
2	2	3	1	1	001	Utang dari LKBB-BUMN ...-Jangka Menengah	
2	2	3	1	1	002	Dst ...	
2	2	3	1	1	001	Utang kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Panjang	
2	2	3	1	1	002	Dst ...	
2	2	3	2	1	001	Utang kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Menengah	
2	2	3	2	1	002	Dst ...	
2	2	3	2	2	001	Utang kepada LKBB-BUMD...-Jangka Panjang	
2	2	3	2	2	002	Dst ...	
2	2	3	3	1	001	Utang kepada Swasta ...-Jangka Menengah	
2	2	3	3	1	002	Dst ...	
2	2	3	3	2	001	Utang kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Panjang	
2	2	3	3	2	002	Dst ...	
2	2	4	1	1	001	Obligasi Daerah	
3	1	1	1	1	001	Ekuitas	
3	1	1	2	1	001	Surplus/Defisit-LO	
3	1	2	1	1	001	Estimasi Pendapatan	
3	1	2	2	1	001	Estimasi Penerimaan Pembiayaan	
3	1	2	3	1	001	Apropriasi Belanja	
3	1	2	4	1	001	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan	
3	1	2	5	1	001	Estimasi Perubahan SAL	
3	1	2	6	1	001	Surplus/Defisit-LRA	
3	1	3	1	1	001	RK PPKD	

C. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR REKENING PENYUSUNAN ANGGARAN DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
4						PENDAPATAN DAERAH	
4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	1	1				Pajak Daerah	
4	1	1	1			Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	
4	1	1	1	1		PKB-Mobil Penumpang-Sedan	
4	1	1	1	1	001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	
4	1	1	1	1	002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	
4	1	1	1	1	003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	
4	1	1	1	1	004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	
4	1	1	1	2		PKB-Mobil Penumpang-Jeep	
4	1	1	1	2	001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	
4	1	1	1	2	002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	
4	1	1	1	2	003	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	
4	1	1	1	2	004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	
4	1	1	1	3		PKB-Mobil Penumpang-Minibus	
4	1	1	1	3	001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	
4	1	1	1	3	002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	
4	1	1	1	3	003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
4	1	1	1	3	004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	
4	1	1	1	4		PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>	
4	1	1	1	4	001	PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pribadi	
4	1	1	1	4	002	PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Umum	
4	1	1	1	4	003	PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pemerintah Pusat	
4	1	1	1	4	004	PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pemerintah Daerah	
4	1	1	1	5		PKB-Mobil Bus-Bus	
4	1	1	1	5	001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	
4	1	1	1	5	002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	
4	1	1	1	5	003	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	
4	1	1	1	5	004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	
4	1	1	1	6		PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>	
4	1	1	1	6	001	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -Pribadi	
4	1	1	1	6	002	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -Umum	
4	1	1	1	6	003	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> - Pemerintah Pusat	
4	1	1	1	6	004	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> - Pemerintah Daerah	
4	1	1	1	7		PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>	
4	1	1	1	7	001	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -Pribadi	
4	1	1	1	7	002	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -Umum	
4	1	1	1	7	003	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> - Pemerintah Pusat	
4	1	1	1	7	004	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> - Pemerintah Daerah	
4	1	1	1	8		PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>	
4	1	1	1	8	001	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Pribadi	
4	1	1	1	8	002	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Umum	
4	1	1	1	8	003	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Pemerintah Pusat	
4	1	1	1	8	004	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Pemerintah Daerah	
4	1	1	1	9		PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>	
4	1	1	1	9	001	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -Pribadi	
4	1	1	1	9	002	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -Umum	
4	1	1	1	9	003	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> - Pemerintah Pusat	
4	1	1	1	9	004	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> - Pemerintah Daerah	
4	1	1	1	10		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	
4	1	1	1	10	001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Pribadi	
4	1	1	1	10	002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Umum	
4	1	1	1	10	003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Pemerintah Pusat	
4	1	1	1	10	004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Pemerintah Daerah	
4	1	1	1	11		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	
4	1	1	1	11	001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pribadi	
4	1	1	1	11	002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Umum	
4	1	1	1	11	003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pemerintah Pusat	
4	1	1	1	11	004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pemerintah Daerah	
4	1	1	1	12		PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	
4	1	1	1	12	001	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi	
4	1	1	1	12	002	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum	
4	1	1	1	12	003	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air- Pemerintah Pusat	
4	1	1	1	12	004	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air- Pemerintah Daerah	
4	1	1	1	13		PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	
4	1	1	1	13	001	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi	
4	1	1	1	13	002	PKB-Kendaraan Besar-Umum	
4	1	1	1	13	003	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat	
4	1	1	1	13	004	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
						Daerah	
4	1	1	1	14		PKB-Mobil Roda Tiga	
4	1	1	1	14	001	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	
4	1	1	1	14	002	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	
4	1	1	1	14	003	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat	
4	1	1	1	14	004	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	
4	1	1	2			Bea Balik (BBNKB)	
4	1	1	2	1		BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	
4	1	1	2	1	001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	
4	1	1	2	2		BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>	
4	1	1	2	2	001	BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>	
4	1	1	2	3		BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	
4	1	1	2	3	001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	
4	1	1	2	4		BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>	
4	1	1	2	4	001	BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>	
4	1	1	2	5		BBNKB-Mobil Bus-Bus	
4	1	1	2	5	001	BBNKB-Mobil Bus-Bus	
4	1	1	2	6		BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>	
4	1	1	2	6	001	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>	
4	1	1	2	7		BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>	
4	1	1	2	7	001	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>	
4	1	1	2	8		BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>	
4	1	1	2	8	001	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>	
4	1	1	2	9		BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>	
4	1	1	2	9	001	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>	
4	1	1	2	10		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	
4	1	1	2	10	001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	
4	1	1	2	11		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	
4	1	1	2	11	001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	
4	1	1	2	12		BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	
4	1	1	2	12	001	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	
4	1	1	2	13		BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	
4	1	1	2	13	001	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	
4	1	1	2	14		BBNKB-Mobil Roda Tiga	
4	1	1	2	14	001	BBNKB-Mobil Roda Tiga	
4	1	1	3			Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	
4	1	1	3	1		PBBKB-Bahan Bakar Bensin	
4	1	1	3	1	001	PBBKB Bahan Bakar Bensin	
4	1	1	3	2		PBBKB-Bahan Bakar Solar	
4	1	1	3	2	001	PBBKB Bahan Bakar Solar	
4	1	1	3	3		PBBKB-Bahan Bakar Gas	
4	1	1	3	3	001	PBBKB Bahan Bakar Gas	
4	1	1	3	4		PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	
4	1	1	3	4	001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya	
4	1	1	4			Pajak Air Permukaan	
4	1	1	4	1		Pajak Air Permukaan	
4	1	1	4	1	001	Pajak Air Permukaan	
4	1	1	5			Pajak Rokok	
4	1	1	5	1		Pajak Rokok	
4	1	1	5	1	001	Pajak Rokok	
4	1	1	6			Pajak Hotel	
4	1	1	6	1		Pajak Hotel	
4	1	1	6	1	001	Pajak Hotel	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
4	1	1	6	2		Pajak Motel	
4	1	1	6	2	001	Pajak Motel	
4	1	1	6	3		Pajak Losmen	
4	1	1	6	3	001	Pajak Losmen	
4	1	1	6	4		Pajak Gubuk Pariwisata	
4	1	1	6	4	001	Pajak Gubuk Pariwisata	
4	1	1	6	5		Pajak Wisma Pariwisata	
4	1	1	6	5	001	Pajak Wisma Pariwisata	
4	1	1	6	6		Pajak Pesanggrahan	
4	1	1	6	6	001	Pajak Pesanggrahan	
4	1	1	6	7		Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	
4	1	1	6	7	001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	
4	1	1	6	8		Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	
4	1	1	6	8	001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	
4	1	1	7			Pajak Restoran	
4	1	1	7	1		Pajak Restoran dan Sejenisnya	
4	1	1	7	1	001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	
4	1	1	7	2		Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	
4	1	1	7	2	001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	
4	1	1	7	3		Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	
4	1	1	7	3	001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	
4	1	1	7	4		Pajak Kantin dan Sejenisnya	
4	1	1	7	4	001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	
4	1	1	7	5		Pajak Warung dan Sejenisnya	
4	1	1	7	5	001	Pajak Warung dan Sejenisnya	
4	1	1	7	6		Pajak Bar dan Sejenisnya	
4	1	1	7	6	001	Pajak Bar dan Sejenisnya	
4	1	1	7	7		Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	
4	1	1	7	7	001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	
4	1	1	8			Pajak Hiburan	
4	1	1	8	1		Pajak Tontonan Film	
4	1	1	8	1	001	Pajak Tontonan Film	
4	1	1	8	2		Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	
4	1	1	8	2	001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	
4	1	1	8	3		Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	
4	1	1	8	3	001	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	
4	1	1	8	4		Pajak Pameran	
4	1	1	8	4	001	Pajak Pameran	
4	1	1	8	5		Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	
4	1	1	8	5	001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	
4	1	1	8	6		Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	
4	1	1	8	6	001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	
4	1	1	8	7		Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>	
4	1	1	8	7	001	Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>	
4	1	1	8	8		Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	
4	1	1	8	8	001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	
4	1	1	8	9		Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ <i>Spa</i> dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)	
4	1	1	8	9	001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ <i>Spa</i> dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)	
4	1	1	8	10		Pajak Pertandingan Olahraga	
4	1	1	8	10	001	Pajak Pertandingan Olahraga	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
4	1	1	9			Pajak Reklame	
4	1	1	9	1		Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	
4	1	1	9	1	001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	
4	1	1	9	2		Pajak Reklame Kain	
4	1	1	9	2	001	Pajak Reklame Kain	
4	1	1	9	3		Pajak Reklame Melekat/Stiker	
4	1	1	9	3	001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	
4	1	1	9	4		Pajak Reklame Selebaran	
4	1	1	9	4	001	Pajak Reklame Selebaran	
4	1	1	9	5		Pajak Reklame Berjalan	
4	1	1	9	5	001	Pajak Reklame Berjalan	
4	1	1	9	6		Pajak Reklame Udara	
4	1	1	9	6	001	Pajak Reklame Udara	
4	1	1	9	7		Pajak Reklame Apung	
4	1	1	9	7	001	Pajak Reklame Apung	
4	1	1	9	8		Pajak Reklame Suara	
4	1	1	9	8	001	Pajak Reklame Suara	
4	1	1	9	9		Pajak Reklame Film/Slide	
4	1	1	9	9	001	Pajak Reklame Film/Slide	
4	1	1	9	10		Pajak Reklame Peragaan	
4	1	1	9	10	001	Pajak Reklame Peragaan	
4	1	1	10			Pajak Penerangan Jalan	
4	1	1	10	1		Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	
4	1	1	10	1	001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	
4	1	1	10	2		Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	
4	1	1	10	2	001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	
4	1	1	11			Pajak Parkir	
4	1	1	11	1		Pajak Parkir	
4	1	1	11	1	001	Pajak Parkir	
4	1	1	12			Pajak Air Tanah	
4	1	1	12	1		Pajak Air Tanah	
4	1	1	12	1	001	Pajak Air Tanah	
4	1	1	13			Pajak Sarang Burung Walet	
4	1	1	13	1		Pajak Sarang Burung Walet	
4	1	1	13	1	001	Pajak Sarang Burung Walet	
4	1	1	14			Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
4	1	1	14	1		Pajak Asbes	
4	1	1	14	1	001	Pajak Asbes	
4	1	1	14	2		Pajak Batu Tulis	
4	1	1	14	2	001	Pajak Batu Tulis	
4	1	1	14	3		Pajak Batu Setengah Permata	
4	1	1	14	3	001	Pajak Batu Setengah Permata	
4	1	1	14	4		Pajak Batu Kapur	
4	1	1	14	4	001	Pajak Batu Kapur	
4	1	1	14	5		Pajak Batu Apung	
4	1	1	14	5	001	Pajak Batu Apung	
4	1	1	14	6		Pajak Batu Permata	
4	1	1	14	6	001	Pajak Batu Permata	
4	1	1	14	7		Pajak Bentonit	
4	1	1	14	7	001	Pajak Bentonit	
4	1	1	14	8		Pajak Dolomit	
4	1	1	14	8	001	Pajak Dolomit	
4	1	1	14	9		Pajak Felspar	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
4	1	1	14	9	001	Pajak Felspar	
4	1	1	14	10		Pajak Garam Batu (<i>Halite</i>)	
4	1	1	14	10	001	Pajak Garam Batu (<i>Halite</i>)	
4	1	1	14	11		Pajak Grafit	
4	1	1	14	11	001	Pajak Grafit	
4	1	1	14	12		Pajak Granit/Andesit	
4	1	1	14	12	001	Pajak Granit/Andesit	
4	1	1	14	13		Pajak Gips	
4	1	1	14	13	001	Pajak Gips	
4	1	1	14	14		Pajak Kalsit	
4	1	1	14	14	001	Pajak Kalsit	
4	1	1	14	15		Pajak Kaolin	
4	1	1	14	15	001	Pajak Kaolin	
4	1	1	14	16		Pajak Leusit	
4	1	1	14	16	001	Pajak Leusit	
4	1	1	14	17		Pajak Magnesit	
4	1	1	14	17	001	Pajak Magnesit	
4	1	1	14	18		Pajak Mika	
4	1	1	14	18	001	Pajak Mika	
4	1	1	14	19		Pajak Marmer	
4	1	1	14	19	001	Pajak Marmer	
4	1	1	14	20		Pajak Nitrat	
4	1	1	14	20	001	Pajak Nitrat	
4	1	1	14	21		Pajak Opsidien	
4	1	1	14	21	001	Pajak Opsidien	
4	1	1	14	22		Pajak Oker	
4	1	1	14	22	001	Pajak Oker	
4	1	1	14	23		Pajak Pasir dan Kerikil	
4	1	1	14	23	001	Pajak Pasir dan Kerikil	
4	1	1	14	24		Pajak Pasir Kuarsa	
4	1	1	14	24	001	Pajak Pasir Kuarsa	
4	1	1	14	25		Pajak Perlit	
4	1	1	14	25	001	Pajak Perlit	
4	1	1	14	26		Pajak Fosfat	
4	1	1	14	26	001	Pajak Fosfat	
4	1	1	14	27		Pajak Talk	
4	1	1	14	27	001	Pajak Talk	
4	1	1	14	28		Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)	
4	1	1	14	28	001	Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)	
4	1	1	14	29		Pajak Tanah Diatom	
4	1	1	14	29	001	Pajak Tanah Diatom	
4	1	1	14	30		Pajak Tanah Liat	
4	1	1	14	30	001	Pajak Tanah Liat	
4	1	1	14	31		Pajak Tawas (Alum)	
4	1	1	14	31	001	Pajak Tawas (Alum)	
4	1	1	14	32		Pajak Trass	
4	1	1	14	32	001	Pajak Trass	
4	1	1	14	33		Pajak Yarusif	
4	1	1	14	33	001	Pajak Yarusif	
4	1	1	14	34		Pajak Zeolit	
4	1	1	14	34	001	Pajak Zeolit	
4	1	1	14	35		Pajak Basal	
4	1	1	14	35	001	Pajak Basal	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
4	1	1	14	36		Pajak Trakit	
4	1	1	14	36	001	Pajak Trakit	
4	1	1	14	37		Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	
4	1	1	14	37	001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	
4	1	1	15			Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	
4	1	1	15	1		PBBP2	
4	1	1	15	1	001	PBBP2	
4	1	1	16			Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
4	1	1	16	1		BPHTB-Pemindahan Hak	
4	1	1	16	1	001	BPHTB-Pemindahan Hak	
4	1	1	16	2		BPHTB-Pemberian Hak Baru	
4	1	1	16	2	001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	
4	1	2				Retribusi Daerah	
4	1	2	1			Retribusi Jasa Umum	
4	1	2	1	1		Retribusi Pelayanan Kesehatan	
4	1	2	1	1	001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	
4	1	2	1	1	002	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling	
4	1	2	1	1	003	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	
4	1	2	1	1	004	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	
4	1	2	1	1	005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	
4	1	2	1	1	006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	
4	1	2	1	2		Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	
4	1	2	1	2	001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	
4	1	2	1	3		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
4	1	2	1	3	001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	
4	1	2	1	3	002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	
4	1	2	1	4		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan	
4	1	2	1	4	001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
4	1	2	1	5		Retribusi Pelayanan Pasar	
4	1	2	1	5	001	Retribusi Pelataran	
4	1	2	1	5	002	Retribusi Los	
4	1	2	1	5	003	Retribusi Kios	
4	1	2	1	6		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
4	1	2	1	6	001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
4	1	2	1	7		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
4	1	2	1	7	001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	
4	1	2	1	7	002	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran	
4	1	2	1	7	003	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa	
4	1	2	1	8		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	
4	1	2	1	8	001	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)	
4	1	2	1	8	002	Retribusi Penyediaan Peta Foto	
4	1	2	1	8	003	Retribusi Penyediaan Peta Digital	
4	1	2	1	8	004	Retribusi Penyediaan Peta Tematik	
4	1	2	1	8	005	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)	
4	1	2	1	9		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
4	1	2	1	9	001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
4	1	2	1	10		Retribusi Pengolahan Limbah Cair	
4	1	2	1	10	001	Retribusi Rumah Tangga	
4	1	2	1	10	002	Retribusi Perkantoran	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
4	1	2	1	10	003	Retribusi Industri	
4	1	2	1	11		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	
4	1	2	1	11	001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	
4	1	2	1	11	002	Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus	
4	1	2	1	12		Retribusi Pelayanan Pendidikan	
4	1	2	1	12	001	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis	
4	1	2	1	12	002	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis	
4	1	2	1	12	003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	
4	1	2	1	13		Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	
4	1	2	1	13	001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	
4	1	2	2			Retribusi Jasa Usaha	
4	1	2	2	1		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
4	1	2	2	1	001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	
4	1	2	2	1	002	Retribusi Penyewaan Tanah	
4	1	2	2	1	003	Retribusi Penyewaan Bangunan	
4	1	2	2	1	004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	
4	1	2	2	1	005	Retribusi Pemakaian Ruangan	
4	1	2	2	1	006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	
4	1	2	2	2		Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	
4	1	2	2	2	001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	
4	1	2	2	2	002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	
4	1	2	2	3		Retribusi Tempat Pelelangan	
4	1	2	2	3	001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	
4	1	2	2	3	002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	
4	1	2	2	4		Retribusi Terminal	
4	1	2	2	4	001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	
4	1	2	2	4	002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	
4	1	2	2	4	003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	
4	1	2	2	5		Retribusi Tempat Khusus Parkir	
4	1	2	2	5	001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	
4	1	2	2	6		Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila	
4	1	2	2	6	001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	
4	1	2	2	7		Retribusi Rumah Potong Hewan	
4	1	2	2	7	001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	
4	1	2	2	8		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	
4	1	2	2	8	001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	
4	1	2	2	9		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
4	1	2	2	9	001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	
4	1	2	2	10		Retribusi Penyeberangan di Air	
4	1	2	2	10	001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	
4	1	2	2	10	002	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang	
4	1	2	2	11		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
4	1	2	2	11	001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	
4	1	2	2	11	002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	
4	1	2	2	11	003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha	
4	1	2	2	11	004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	
4	1	2	3			Retribusi Perizinan Tertentu	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
4	1	2	3	1		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
4	1	2	3	1	001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	
4	1	2	3	2		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
4	1	2	3	2	001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
4	1	2	3	3		Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	
4	1	2	3	3	001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	
4	1	2	3	4		Retribusi Izin Usaha Perikanan	
4	1	2	3	4	001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	
4	1	2	3	4	002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	
4	1	2	3	5		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	
4	1	2	3	5	001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu	
4	1	2	3	5	002	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu	
4	1	2	3	5	003	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu	
4	1	2	3	6		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
4	1	2	3	6	001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	
4	1	3				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
4	1	3	1			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	
4	1	3	1	1		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	
4	1	3	1	1	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN ...	
4	1	3	1	1	002	Dst ...	
4	1	3	2			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	
4	1	3	2	1		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	
4	1	3	2	1	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) ...	
4	1	3	2	1	002	Dst ...	
4	1	3	2	2		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	
4	1	3	2	2	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) ...	
4	1	3	2	2	002	Dst ...	
4	1	3	2	3		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	
4	1	3	2	3	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) ...	
4	1	3	2	3	002	Dst ...	
4	1	3	2	4		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)	
4	1	3	2	4	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah) ...	
4	1	3	2	4	002	Dst ...	
4	1	3	2	5		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)	
4	1	3	2	5	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
						...	
4	1	3	2	5	002	Dst ...	
4	1	4				Lain-lain PAD yang Sah	
4	1	4	1			Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	
4	1	4	1	1		Hasil Penjualan Tanah	
4	1	4	1	1	001	Hasil Penjualan Tanah	
4	1	4	1	2		Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	
4	1	4	1	2	001	Hasil Penjualan Alat Besar	
4	1	4	1	2	002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	
4	1	4	1	2	003	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur	
4	1	4	1	2	004	Hasil Penjualan Alat Pertanian	
4	1	4	1	2	005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	
4	1	4	1	2	006	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
4	1	4	1	2	007	Hasil Penjualan Kesehatan	
4	1	4	1	2	008	Hasil Penjualan Alat Laboratorium	
4	1	4	1	2	10	Hasil Penjualan Komputer	
4	1	4	1	2	11	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi	
4	1	4	1	2	12	Hasil Penjualan Alat Pengeboran	
4	1	4	1	2	13	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	
4	1	4	1	2	14	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi	
4	1	4	1	2	15	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja	
4	1	4	1	2	16	Hasil Penjualan Alat Peraga	
4	1	4	1	2	17	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi	
4	1	4	1	2	18	Hasil Penjualan Rambu-rambu	
4	1	4	1	2	19	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga	
4	1	4	1	3		Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	
4	1	4	1	3	001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	
4	1	4	1	3	002	Hasil Penjualan Monumen	
4	1	4	1	3	003	Hasil Penjualan Bangunan Menara	
4	1	4	1	3	004	Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti	
4	1	4	1	4		Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
4	1	4	1	4	001	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan	
4	1	4	1	4	002	Hasil Penjualan Bangunan Air	
4	1	4	1	4	003	Hasil Penjualan Instalasi	
4	1	4	1	4	004	Hasil Penjualan Jaringan	
4	1	4	1	5		Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	
4	1	4	1	5	001	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan	
4	1	4	1	5	002	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
4	1	4	1	5	003	Hasil Penjualan Hewan	
4	1	4	1	5	004	Hasil Penjualan Biota Perairan	
4	1	4	1	5	005	Hasil Penjualan Tanaman	
4	1	4	1	5	006	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya	
4	1	4	1	5	007	Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi	
4	1	4	1	6		Hasil Penjualan Aset Lainnya	
4	1	4	1	6	001	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	
4	1	4	1	6	002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	
4	1	4	2			Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	
4	1	4	2	1		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah	
4	1	4	2	1	001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah	
4	1	4	2	2		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	
4	1	4	2	2	001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
4	1	4	2	2	002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan	
4	1	4	2	2	003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur	
4	1	4	2	2	004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian	
4	1	4	2	2	005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga	
4	1	4	2	2	006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
4	1	4	2	2	007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan	
4	1	4	2	2	008	Hasil Selisih Laboratorium	
4	1	4	2	2	10	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer	
4	1	4	2	2	11	Hasil Selisih Eksplorasi	
4	1	4	2	2	12	Hasil Selisih Pengeboran	
4	1	4	2	2	13	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	
4	1	4	2	2	14	Hasil Selisih Lebih Bantu Eksplorasi	
4	1	4	2	2	15	Hasil Selisih Lebih Keselamatan Kerja	
4	1	4	2	2	16	Hasil Selisih Peraga	
4	1	4	2	2	17	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi	
4	1	4	2	2	18	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu- Rambu	
4	1	4	2	2	19	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga	
4	1	4	2	3		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan	
4	1	4	2	3	001	Hasil Selisih Lebih Bangunan Gedung	
4	1	4	2	3	002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen	
4	1	4	2	3	003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara	
4	1	4	2	3	004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti	
4	1	4	2	4		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
4	1	4	2	4	001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan	
4	1	4	2	4	002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar	
4	1	4	2	4	003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi	
4	1	4	2	4	004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan	
4	1	4	2	5		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya	
4	1	4	2	5	001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan	
4	1	4	2	5	002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
4	1	4	2	5	003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan	
4	1	4	2	5	004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan	
4	1	4	2	5	005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman	
4	1	4	2	5	006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya	
4	1	4	2	5	007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi	
4	1	4	2	6		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya	
4	1	4	2	6	001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	
4	1	4	2	6	002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	
4	1	4	3			Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	
4	1	4	3	1		Hasil Sewa BMD	
4	1	4	3	1	001	Hasil Sewa BMD	
4	1	4	3	2		Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	
4	1	4	3	2	001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	
4	1	4	3	3		Hasil dari Bangun Guna Serah	
4	1	4	3	3	001	Hasil dari Bangun Guna Serah	
4	1	4	3	4		Hasil dari Bangun Serah Guna	
4	1	4	3	4	001	Hasil dari Bangun Serah Guna	
4	1	4	3	5		Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	
4	1	4	3	5	001	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
4	1	4	4			Hasil Kerja Sama Daerah	
4	1	4	4	1		Hasil Kerja Sama Daerah	
4	1	4	3	1	001	Hasil Kerja Sama Daerah	
4	1	4	5			Jasa Giro	
4	1	4	5	1		Jasa Giro pada Kas Daerah	
4	1	4	5	1	001	Jasa Giro pada Kas Daerah	
4	1	4	5	2		Jasa Giro pada Kas di Bendahara	
4	1	4	5	2	001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	
4	1	4	5	3		Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	
4	1	4	5	3	001	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan ...	
4	1	4	5	3	002	Dst ...	
4	1	4	5	4		Jasa Giro pada BLUD	
4	1	4	5	4	001	Jasa Giro pada BLUD ...	
4	1	4	5	4	002	Dst ...	
4	1	4	5	5		Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	
4	1	4	5	5	001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS ...	
4	1	4	5	5	002	Dst ...	
4	1	4	5	6		Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	
4	1	4	5	6	001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	
4	1	4	5	6	002	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	
4	1	4	6			Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
4	1	4	6	1		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
4	1	4	6	1	001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
4	1	4	7			Pendapatan Bunga	
4	1	4	7	1		Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	
4	1	4	7	1	001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	
4	1	4	8			Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	
4	1	4	8	1		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	
4	1	4	8	1	001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	
4	1	4	8	2		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	
4	1	4	8	2	001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	
4	1	4	9			Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	
4	1	4	9	1		Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	
4	1	4	9	1	001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	
4	1	4	10			Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	
4	1	4	10	1		Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	
4	1	4	10	1	001	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	
4	1	4	11			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
4	1	4	11	1		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
4	1	4	11	1	001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
4	1	4	12			Pendapatan Denda Pajak Daerah	
4	1	4	12	1		Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	
4	1	4	12	1	001	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Sedan	
4	1	4	12	1	002	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Jeep	
4	1	4	12	1	003	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Minibus	
4	1	4	12	1	004	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>	
4	1	4	12	1	005	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus	
4	1	4	12	1	006	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	
4	1	4	12	1	007	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
4	1	4	12	1	008	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	
4	1	4	12	1	009	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	
4	1	4	12	1	10	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua	
4	1	4	12	1	11	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Tiga	
4	1	4	12	1	12	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	
4	1	4	12	1	13	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	
4	1	4	12	1	14	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga	
4	1	4	12	2		Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	
4	1	4	12	2	001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	
4	1	4	12	2	002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	
4	1	4	12	2	003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	
4	1	4	12	2	004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus- Microbus	
4	1	4	12	2	005	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus	
4	1	4	12	2	006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	
4	1	4	12	2	007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	
4	1	4	12	2	008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	
4	1	4	12	2	009	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	
4	1	4	12	2	10	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua	
4	1	4	12	2	11	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Tiga	
4	1	4	12	2	12	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Motor yang Dioperasikan di Air	
4	1	4	12	2	13	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	
4	1	4	12	2	14	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga	
4	1	4	12	3		Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	
4	1	4	12	3	001	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Bensin	
4	1	4	12	3	002	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Solar	
4	1	4	12	3	003	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Gas	
4	1	4	12	3	004	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Lainnya	
4	1	4	12	4		Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	
4	1	4	12	4	001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	
4	1	4	12	5		Pendapatan Denda Pajak Rokok	
4	1	4	12	5	001	Pendapatan Denda Pajak Rokok	
4	1	4	12	6		Pendapatan Denda Pajak Hotel	
4	1	4	12	6	001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	
4	1	4	12	6	002	Pendapatan Denda Pajak Motel	
4	1	4	12	6	003	Pendapatan Denda Pajak Losmen	
4	1	4	12	6	004	Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata	
4	1	4	12	6	005	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata	
4	1	4	12	6	006	Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan	
4	1	4	12	6	007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	
4	1	4	12	6	008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	
4	1	4	12	7		Pendapatan Denda Pajak Restoran	
4	1	4	12	7	001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	
4	1	4	12	7	002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	
4	1	4	12	7	003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	
4	1	4	12	7	004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	
4	1	4	12	7	005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	
4	1	4	12	7	006	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya	
4	1	4	12	7	007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
4	1	4	12	8		Pendapatan Denda Pajak Hiburan	
4	1	4	12	8	001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	
4	1	4	12	8	002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran	
4	1	4	12	8	003	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	
4	1	4	12	8	004	Pendapatan Denda Pajak Pameran	
4	1	4	12	8	005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	
4	1	4	12	8	006	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap	
4	1	4	12	8	007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	
4	1	4	12	8	008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	
4	1	4	12	8	009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	
4	1	4	12	8	10	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	
4	1	4	12	9		Pendapatan Denda Pajak Reklame	
4	1	4	12	9	001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	
4	1	4	12	9	002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	
4	1	4	12	9	003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker	
4	1	4	12	9	004	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran	
4	1	4	12	9	005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	
4	1	4	12	9	006	Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara	
4	1	4	12	9	007	Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung	
4	1	4	12	9	008	Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara	
4	1	4	12	9	009	Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/ Slide	
4	1	4	12	9	10	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan	
4	1	4	12	10		Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	
4	1	4	12	10	001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	
4	1	4	12	10	002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	
4	1	4	12	11		Pendapatan Denda Pajak Parkir	
4	1	4	12	11	001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	
4	1	4	12	12		Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	
4	1	4	12	12	001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	
4	1	4	12	13		Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	
4	1	4	12	13	001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	
4	1	4	12	14		Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
4	1	4	12	14	001	Pendapatan Denda Pajak Asbes	
4	1	4	12	14	002	Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis	
4	1	4	12	14	003	Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata	
4	1	4	12	14	004	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur	
4	1	4	12	14	005	Pendapatan Denda Pajak Batu Apung	
4	1	4	12	14	006	Pendapatan Denda Pajak Batu Permata	
4	1	4	12	14	007	Pendapatan Denda Pajak Bentonit	
4	1	4	12	14	008	Pendapatan Denda Pajak Dolomit	
4	1	4	12	14	009	Pendapatan Denda Pajak Felspar	
4	1	4	12	14	10	Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (Halite)	
4	1	4	12	14	11	Pendapatan Denda Pajak Grafit	
4	1	4	12	14	12	Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit	
4	1	4	12	14	13	Pendapatan Denda Pajak Gips	
4	1	4	12	14	14	Pendapatan Denda Pajak Kalsit	
4	1	4	12	14	15	Pendapatan Denda Pajak Kaolin	
4	1	4	12	14	16	Pendapatan Denda Pajak Leusit	
4	1	4	12	14	17	Pendapatan Denda Pajak Magnesit	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
4	1	4	12	14	18	Pendapatan Denda Pajak Mika	
4	1	4	12	14	19	Pendapatan Denda Pajak Marmer	
4	1	4	12	14	20	Pendapatan Denda Pajak Nitrat	
4	1	4	12	14	21	Pendapatan Denda Pajak Opsidien	
4	1	4	12	14	22	Pendapatan Denda Pajak Oker	
4	1	4	12	14	23	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil	
4	1	4	12	14	24	Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa	
4	1	4	12	14	25	Pendapatan Denda Pajak Perlit	
4	1	4	12	14	26	Pendapatan Denda Pajak Phospat	
4	1	4	12	14	27	Pendapatan Denda Pajak Talk	
4	1	4	12	14	28	Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	
4	1	4	12	14	29	Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome	
4	1	4	12	14	30	Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat	
4	1	4	12	14	31	Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)	
4	1	4	12	14	32	Pendapatan Denda Pajak Tras	
4	1	4	12	14	33	Pendapatan Denda Pajak Yarosif	
4	1	4	12	14	34	Pendapatan Denda Pajak Zeolit	
4	1	4	12	14	35	Pendapatan Denda Pajak Basal	
4	1	4	12	14	36	Pendapatan Denda Pajak Trakit	
4	1	4	12	14	37	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	
4	1	4	12	15		Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	
4	1	4	12	15	001	Pendapatan Denda PBBP2	
4	1	4	12	16		Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
4	1	4	12	16	001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	
4	1	4	12	16	002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	
4	1	4	13			Pendapatan Denda Retribusi Daerah	
4	1	4	13	1		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	
4	1	4	13	1	001	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan	
4	1	4	13	1	002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
4	1	4	13	1	003	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
4	1	4	13	1	004	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
4	1	4	13	1	005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	
4	1	4	13	1	006	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
4	1	4	13	1	007	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
4	1	4	13	1	008	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	
4	1	4	13	1	009	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
4	1	4	13	1	10	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair	
4	1	4	13	1	11	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	
4	1	4	13	1	12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan	
4	1	4	13	1	13	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	
4	1	4	13	2		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	
4	1	4	13	2	001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
4	1	4	13	2	002	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	
4	1	4	13	2	003	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan	
4	1	4	13	2	004	Pendapatan Denda Retribusi Terminal	
4	1	4	13	2	005	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir	
4	1	4	13	2	006	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	
4	1	4	13	2	007	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
4	1	4	13	2	008	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	
4	1	4	13	2	009	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
4	1	4	13	2	10	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Penyeberangan Air	
4	1	4	13	2	11	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
4	1	4	13	3		Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	
4	1	4	13	3	001	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
4	1	4	13	3	002	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
4	1	4	13	3	003	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	
4	1	4	13	3	004	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan	
4	1	4	13	3	005	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	
4	1	4	13	3	006	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
4	1	4	14			Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	
4	1	4	14	1		Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	
4	1	4	14	1	001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	
4	1	4	15			Pendapatan dari Pengembalian	
4	1	4	15	1		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	
4	1	4	15	1	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	
4	1	4	15	2		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan	
4	1	4	15	2	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan	
4	1	4	15	3		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	
4	1	4	15	3	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	
4	1	4	15	4		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	
4	1	4	15	4	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	
4	1	4	15	5		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	
4	1	4	15	5	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	
4	1	4	15	6		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	
4	1	4	15	6	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM	
4	1	4	15	7		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	
4	1	4	15	7	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	
4	1	4	16			Pendapatan BLUD	
4	1	4	16	1		Pendapatan BLUD	
4	1	4	16	1	001	Pendapatan BLUD	
4	1	4	16	1	002	Dst...	
4	1	4	17			Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	
4	1	4	17	1		Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	
4	1	4	17	1	001	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	
4	1	4	17	2		Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	
4	1	4	17	2	001	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	
4	1	4	18			Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	
4	1	4	18	1		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	
4	1	4	18	1	001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	
4	1	4	19			Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
4	1	4	19	1		Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
4	1	4	19	1	001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
4	1	4	20			Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	
4	1	4	20	1		Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	
4	1	4	20	1	001	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	
4	1	4	21			Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
4	1	4	21	1		Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah ...	
4	1	4	21	1	001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah ...	
4	1	4	21	1	002	Dst ...	
4	1	4	22			Pendapatan Zakat	
4	1	4	22	1		Pendapatan Zakat	
4	1	4	22	1	001	Pendapatan Zakat	
4	2					PENDAPATAN TRANSFER	
4	2	1				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
4	2	1	1			Dana Perimbangan	
4	2	1	1	1		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	
4	2	1	1	1	001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	
4	2	1	1	1	002	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	
4	2	1	1	1	003	DBH PPh Pasal 21	
4	2	1	1	1	004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	
4	2	1	1	1	005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	
4	2	1	1	1	006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	
4	2	1	1	1	007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- <i>Landrent</i>	
4	2	1	1	1	008	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- <i>Royalty</i>	
4	2	1	1	1	009	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	
4	2	1	1	1	10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	
4	2	1	1	1	11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	
4	2	1	1	1	12	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	
4	2	1	1	1	13	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi	
4	2	1	1	2		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
4	2	1	1	2	001	DAU	
4	2	1	1	2	002	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	
4	2	1	1	3		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	
4	2	1	1	3	001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	
4	2	1	1	3	002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	
4	2	1	1	3	003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	
4	2	1	1	3	004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler SDLB/ SMPLB/ SMALB	
4	2	1	1	3	005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	
4	2	1	1	3	006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	
4	2	1	1	3	007	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Olahraga	
4	2	1	1	3	008	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	
4	2	1	1	3	009	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	
4	2	1	1	3	10	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler	
4	2	1	1	3	11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler	
4	2	1	1	3	12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar	
4	2	1	1	3	13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan	
4	2	1	1	3	14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler- Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	
4	2	1	1	3	15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB	
4	2	1	1	3	16	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Reguler	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
4	2	1	1	3	17	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Reguler	
4	2	1	1	3	18	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Reguler	
4	2	1	1	3	19	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Reguler	
4	2	1	1	3	20	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-	
4	2	1	1	3	21	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan- Peningkatan Pelayanan Rujukan	
4	2	1	1	3	22	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Penurunan Stunting	
4	2	1	1	3	23	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan- Pengendalian Penyakit	
4	2	1	1	3	24	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan- Balai Pelatihan Kesehatan	
4	2	1	1	3	25	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	
4	2	1	1	3	26	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	
4	2	1	1	3	27	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	
4	2	1	1	3	28	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan	
4	2	1	1	3	29	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan	
4	2	1	1	3	30	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	
4	2	1	1	3	31	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	
4	2	1	1	3	32	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	
4	2	1	1	3	33	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi- Penguatan Puskesmas-DTPK	
4	2	1	1	3	34	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi- Penguatan Pembangunan Rumah Sakit Pratama	
4	2	1	1	3	35	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi	
4	2	1	1	3	36	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi	
4	2	1	1	3	37	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi	
4	2	1	1	3	38	DAK Fisik-Bidang Transportasi-Afirmasi	
4	2	1	1	3	39	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD	
4	2	1	1	3	40	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP	
4	2	1	1	3	41	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA	
4	2	1	1	4		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	
4	2	1	1	4	001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	
4	2	1	1	4	002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	
4	2	1	1	4	003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	
4	2	1	1	4	004	DAK Non Fisik-BOP PAUD	
4	2	1	1	4	005	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	
4	2	1	1	4	006	DAK Non Fisik-TPG PNSD	
4	2	1	1	4	007	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	
4	2	1	1	4	008	DAK Non Fisik-TKG PNSD	
4	2	1	1	4	009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	
4	2	1	1	4	10	DAK Non Fisik-BOP Museum Budaya-Taman Budaya	
4	2	1	1	4	11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	
4	2	1	1	4	12	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi RS	
4	2	1	1	4	13	DAK Non Puskesmas	
4	2	1	1	4	14	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Labkesda	
4	2	1	1	4	15	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	
4	2	1	1	4	16	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	
4	2	1	1	4	17	DAK Non Fisik-PK2UKM	
4	2	1	1	4	18	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	
4	2	1	1	4	19	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	
4	2	1	1	4	20	DAK Non Fisik-Dana BLPS	
4	2	1	2			Dana Insentif Daerah (DID)	
4	2	1	2	1		DID	
4	2	1	2	1	001	DID	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
4	2	1	3			Dana Otonomi Khusus	
4	2	1	3	1		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4	2	1	3	1	001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	
4	2	1	3	2		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat	
4	2	1	3	2	001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat	
4	2	1	3	3		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	
4	2	1	3	3	001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	
4	2	1	3	4		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	
4	2	1	3	4	001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	
4	2	1	3	5		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	
4	2	1	3	5	001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	
4	2	1	4			Dana Keistimewaan	
4	2	1	4	1		Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
4	2	1	4	1	001	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
4	2	1	5			Dana Desa	
4	2	1	5	1		Dana Desa	
4	2	1	5	1	001	Dana Desa	
4	2	2				Pendapatan Transfer Antar Daerah	
4	2	2	1			Pendapatan Bagi Hasil	
4	2	2	1	1		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	
4	2	2	1	1	001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	
4	2	2	1	1	002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
4	2	2	1	1	003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
4	2	2	1	1	004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	
4	2	2	1	1	005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	
4	2	2	2			Bantuan Keuangan	
4	2	2	2	1		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	
4	2	2	2	1	001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi ...	
4	2	2	2	1	002	Dst ...	
4	2	2	2	2		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	
4	2	2	2	2	001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi ...	
4	2	2	2	2	002	Dst ...	
4	2	2	2	3		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	
4	2	2	2	3	001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...	
4	2	2	2	3	002	Dst ...	
4	2	2	2	4		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	
4	2	2	2	4	001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...	
4	2	2	2	4	002	Dst ...	
4	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
4	3	1				Pendapatan Hibah	
4	3	1	1			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
4	3	1	1	1		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
4	3	1	1	1	001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat ...	
4	3	1	1	1	002	Dst ...	
4	3	1	2			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	
4	3	1	2	1		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	
4	3	1	2	1	001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah ...	
4	3	1	2	1	002	Dst ...	
4	3	1	3			Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
4	3	1	3	1		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	
4	3	1	3	1	001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri ...	
4	3	1	3	1	002	Dst ...	
4	3	1	4			Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	
4	3	1	4	1		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	
4	3	1	4	1	001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri ...	
4	3	1	4	1	002	Dst ...	
4	3	1	4	2		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri	
4	3	1	4	2	001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri ...	
4	3	1	4	2	002	Dst ...	
4	3	1	4	3		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	
4	3	1	4	3	001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri ...	
4	3	1	4	3	002	Dst ...	
4	3	1	4	4		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri	
4	3	1	4	4	001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri ...	
4	3	1	4	4	002	Dst ...	
4	3	1	5			Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	
4	3	1	5	1		Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	
4	3	1	5	1	001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis ...	
4	3	1	5	1	002	Dst ...	
4	3	2				Dana Darurat	
4	3	2	1			Dana Darurat	
4	3	2	1	1		Dana Darurat	
4	3	2	1	1	001	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana	
4	3	3				Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
4	3	3	1			Lain-lain Pendapatan	
4	3	3	1	1		Pendapatan Hibah Dana BOS	
4	3	3	1	1	001	Pendapatan Hibah Dana BOS	
4	3	3	1	2		Pendapatan atas Pengembalian Hibah	
4	3	3	1	2	001	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	
4	3	3	1	2	002	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya	
4	3	3	1	2	003	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN	
4	3	3	1	2	004	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD	
4	3	3	1	2	005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	
4	3	3	1	2	006	Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik	
5						BELANJA DAERAH	
5	1					BELANJA OPERASI	
5	1	1				Belanja Pegawai	
5	1	1	1			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	
5	1	1	1	1		Belanja Gaji Pokok ASN	
5	1	1	1	1	001	Belanja Gaji Pokok PNS	
5	1	1	1	1	002	Belanja Gaji Pokok PPPK	
5	1	1	1	2		Belanja Tunjangan Keluarga ASN	
5	1	1	1	2	001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	
5	1	1	1	2	002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	1	1	3		Belanja Tunjangan Jabatan ASN	
5	1	1	1	3	001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	
5	1	1	1	3	002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	
5	1	1	1	4		Belanja Tunjangan Fungsional ASN	
5	1	1	1	4	001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	
5	1	1	1	4	002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	
5	1	1	1	5		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	
5	1	1	1	5	001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	
5	1	1	1	5	002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	
5	1	1	1	6		Belanja Tunjangan Beras ASN	
5	1	1	1	6	001	Belanja Tunjangan Beras PNS	
5	1	1	1	6	002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	
5	1	1	1	7		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	
5	1	1	1	7	001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	
5	1	1	1	7	002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	
5	1	1	1	8		Belanja Pembulatan Gaji ASN	
5	1	1	1	8	001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	
5	1	1	1	8	002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	
5	1	1	1	9		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	
5	1	1	1	9	001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	
5	1	1	1	9	002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	
5	1	1	1	10		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	
5	1	1	1	10	001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	
5	1	1	1	10	002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	
5	1	1	1	11		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	
5	1	1	1	11	001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	
5	1	1	1	11	002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	
5	1	1	2			Belanja Tambahan Penghasilan ASN	
5	1	1	2	1		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	
5	1	1	2	1	001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	
5	1	1	2	1	002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	
5	1	1	2	2		Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	
5	1	1	2	2	001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	
5	1	1	2	2	002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	
5	1	1	2	3		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	
5	1	1	2	3	001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	
5	1	1	2	3	002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	
5	1	1	2	4		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	
5	1	1	2	4	001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	
5	1	1	2	4	002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	
5	1	1	2	5		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	
5	1	1	2	5	001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	
5	1	1	2	5	002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	
5	1	1	3			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	
5	1	1	3	1		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	
5	1	1	3	1	001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	
5	1	1	3	1	002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
5	1	1	3	1	003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
5	1	1	3	1	004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	
5	1	1	3	1	005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	
5	1	1	3	1	006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	1	3	1	007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	
5	1	1	3	1	008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	
5	1	1	3	1	009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	
5	1	1	3	1	10	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	
5	1	1	3	1	11	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	
5	1	1	3	1	12	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	
5	1	1	3	1	13	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	
5	1	1	3	1	14	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
5	1	1	3	1	15	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	
5	1	1	3	1	16	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
5	1	1	3	2		Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
5	1	1	3	2	001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	
5	1	1	3	2	002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
5	1	1	3	2	003	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN	
5	1	1	3	2	004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
5	1	1	3	2	005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	
5	1	1	3	2	006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	
5	1	1	3	2	007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
5	1	1	3	2	008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	
5	1	1	3	2	009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
5	1	1	3	2	10	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	
5	1	1	3	2	11	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	
5	1	1	3	2	12	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	
5	1	1	3	2	13	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	
5	1	1	3	2	14	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	
5	1	1	3	2	15	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	
5	1	1	3	2	16	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	
5	1	1	3	2	17	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	
5	1	1	3	2	18	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	
5	1	1	3	2	19	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	
5	1	1	3	2	20	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	
5	1	1	3	2	21	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	1	3	2	22	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	
5	1	1	3	2	23	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	
5	1	1	3	2	24	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	
5	1	1	3	2	25	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	
5	1	1	3	2	26	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
5	1	1	3	2	27	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	
5	1	1	3	2	28	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	
5	1	1	3	2	29	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas	
5	1	1	3	2	30	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
5	1	1	3	3		Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	
5	1	1	3	3	001	Belanja TPG PNSD	
5	1	1	3	4		Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	
5	1	1	3	4	001	Belanja TKG PNSD	
5	1	1	3	5		Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	
5	1	1	3	5	001	Belanja Tamsil Guru PNSD	
5	1	1	3	6		Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	
5	1	1	3	6	001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	
5	1	1	3	7		Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	
5	1	1	3	7	001	Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai	
5	1	1	4			Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	
5	1	1	4	1		Belanja Uang Representasi DPRD	
5	1	1	4	1	001	Belanja Uang Representasi DPRD	
5	1	1	4	2		Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	
5	1	1	4	2	001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	
5	1	1	4	3		Belanja Tunjangan Beras DPRD	
5	1	1	4	3	001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	
5	1	1	4	4		Belanja Uang Paket DPRD	
5	1	1	4	4	001	Belanja Uang Paket DPRD	
5	1	1	4	5		Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	
5	1	1	4	5	001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	
5	1	1	4	6		Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	
5	1	1	4	6	001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	
5	1	1	4	7		Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	
5	1	1	4	7	001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	
5	1	1	4	8		Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	
5	1	1	4	8	001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	
5	1	1	4	9		Belanja Tunjangan Reses DPRD	
5	1	1	4	9	001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	
5	1	1	4	10		Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	
5	1	1	4	10	001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	
5	1	1	4	11		Belanja Pembulatan Gaji DPRD	
5	1	1	4	11	001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	1	4	12		Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	
5	1	1	4	12	001	Belanja Jaminan Kesehatan DPRD	
5	1	1	4	12	002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	
5	1	1	4	12	003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	
5	1	1	4	12	004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	
5	1	1	4	13		Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	
5	1	1	4	13	001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	
5	1	1	4	14		Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	
5	1	1	4	14	001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	
5	1	1	5			Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	
5	1	1	5	1		Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	
5	1	1	5	1	001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	
5	1	1	5	2		Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	
5	1	1	5	2	001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	
5	1	1	5	3		Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	
5	1	1	5	3	001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	
5	1	1	5	4		Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	
5	1	1	5	4	001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	
5	1	1	5	5		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	
5	1	1	5	5	001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	
5	1	1	5	6		Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	
5	1	1	5	6	001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	
5	1	1	5	7		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	
5	1	1	5	7	001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	
5	1	1	5	8		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	
5	1	1	5	8	001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	
5	1	1	5	9		Belanja Iuran KDH/WKDH	
5	1	1	5	9	001	Belanja Iuran KDH/WKDH	
5	1	1	5	10		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	
5	1	1	5	10	001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	
5	1	1	5	10	002	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
5	1	1	5	10	003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
5	1	1	5	10	004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	
5	1	1	5	10	005	Belanja Insentif bagi Pemungutan Pajak Rokok	
5	1	1	5	10	006	Belanja Insentif bagi Pemungutan Pajak Hotel	
5	1	1	5	10	007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	
5	1	1	5	10	008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	
5	1	1	5	10	009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	
5	1	1	5	10	10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	
5	1	1	5	10	11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	
5	1	1	5	10	12	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	
5	1	1	5	10	13	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	
5	1	1	5	10	14	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
5	1	1	5	10	15	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	1	5	10	16	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
5	1	1	5	11		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	
5	1	1	5	11	001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	
5	1	1	5	11	002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
5	1	1	5	11	003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
5	1	1	5	11	004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
5	1	1	5	11	005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	
5	1	1	5	11	006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor	
5	1	1	5	11	007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
5	1	1	5	11	008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penggantian Biaya Cetak Peta	
5	1	1	5	11	009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
5	1	1	5	11	10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengolahan Limbah Cair	
5	1	1	5	11	11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang	
5	1	1	5	11	12	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pendidikan	
5	1	1	5	11	13	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	
5	1	1	5	11	14	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	
5	1	1	5	11	15	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	
5	1	1	5	11	16	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	
5	1	1	5	11	17	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	
5	1	1	5	11	18	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	
5	1	1	5	11	19	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	
5	1	1	5	11	20	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	
5	1	1	5	11	21	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pelayanan Kepelabuhan	
5	1	1	5	11	22	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	
5	1	1	5	11	23	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyeberangan Air	
5	1	1	5	11	24	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	
5	1	1	5	11	25	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas	
5	1	1	5	11	26	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Tempat Penjualan Minuman	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
						Beralkohol	
5	1	1	5	11	27	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	
5	1	1	5	11	28	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Usaha Perikanan	
5	1	1	5	11	29	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Pengendalian Lalu Lintas	
5	1	1	5	11	30	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	
5	1	1	6			Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	
5	1	1	6	1		Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	
5	1	1	6	1	001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	
5	1	1	6	2		Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	
5	1	1	6	2	001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	
5	1	2				Belanja Barang dan Jasa	
5	1	2	1			Belanja Barang	
5	1	2	1	1		Belanja Bahan Pakai Habis	
5	1	2	1	1	001	Belanja Alat Tulis Kantor	
5	1	2	1	1	002	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	
5	1	2	1	1	003	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	
5	1	2	1	1	004	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	
5	1	2	1	1	005	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	
5	1	2	1	1	006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	
5	1	2	1	1	007	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	
5	1	2	1	1	008	Belanja Pengisian Tabung Gas	
5	1	2	1	1	009	Belanja Alat Laboratorium	
5	1	2	1	1	10	Belanja Alat Rumah Tangga Kantor	
5	1	2	1	1	11	Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir	
5	1	2	1	1	12	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi	
5	1	2	1	1	13	Belanja Perkakas Kerja	
5	1	2	1	1	14	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	
5	1	2	1	1	15	Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi	
5	1	2	1	1	16	Belanja Perlengkapan Penerangan Jalan Umum	
5	1	2	1	1	17	Belanja Bahan Peraga	
5	1	2	1	1	18	Belanja Tong Sampah	
5	1	2	1	1	19	Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan	
5	1	2	1	1	20	Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan	
5	1	2	1	1	21	Belanja Barang Pakai Habis Kebersihan	
5	1	2	1	1	22	Belanja Barang Pakai Habis Keamanan dan Ketertiban	
5	1	2	1	1	23	Belanja Barang Pakai Habis Lingkungan Hidup	
5	1	2	1	1	24	Belanja Barang Pakai Habis Penanggulangan Bencana	
5	1	2	1	1	25	Belanja Barang Pakai Habis Olahraga	
5	1	2	1	1	26	Belanja Barang Pakai Habis Kesenian dan Kebudayaan	
5	1	2	1	1	27	Belanja Barang Pakai Habis Transportasi dan Lalu Lintas	
5	1	2	1	1	28	Belanja Barang Pakai Habis Perikanan dan Kelautan	
5	1	2	1	1	29	Belanja Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan	
5	1	2	1	1	30	Belanja Barang Pakai Habis Pertamanan dan Pemakaman	
5	1	2	1	1	31	Belanja Barang Pakai Habis Perairan dan Tata Air	
5	1	2	1	1	32	Belanja Barang Pakai Habis Bangunan	
5	1	2	1	1	33	Belanja Barang Pakai Habis Jalan dan Jembatan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	1	1	34	Belanja Barang Pakai Habis Saluran	
5	1	2	1	1	35	Belanja Barang Pakai Habis Sandang	
5	1	2	1	1	36	Belanja Barang Pakai Habis Pangan	
5	1	2	1	1	37	Belanja Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi	
5	1	2	1	2		Belanja Bahan/Material	
5	1	2	1	2	001	Belanja Bahan Baku Bangunan	
5	1	2	1	2	002	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	
5	1	2	1	2	003	Belanja Bibit Ternak	
5	1	2	1	2	004	Belanja Bahan Obat-Obatan	
5	1	2	1	2	005	Belanja Bahan Kimia	
5	1	2	1	2	006	Belanja Bahan Laboratorium	
5	1	2	1	2	007	Belanja Bahan dan Pangan	
5	1	2	1	2	008	Belanja Bahan Makanan Ternak/Binatang	
5	1	2	1	2	009	Belanja Bahan Percontohan	
5	1	2	1	2	10	Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional	
5	1	2	1	2	11	Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional Khusus	
5	1	2	1	2	12	Belanja Ban Sepeda Motor Dinas Operasional	
5	1	2	1	2	13	Belanja Ban Alat-Alat Berat	
5	1	2	1	2	14	Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional	
5	1	2	1	2	15	Belanja Aki Sepeda Motor Dinas Operasional	
5	1	2	1	2	16	Belanja Aki Alat-Alat Berat	
5	1	2	1	2	17	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional	
5	1	2	1	2	18	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Khusus	
5	1	2	1	2	19	Belanja Suku Cadang Sepeda Motor Dinas Operasional	
5	1	2	1	2	20	Belanja Suku Cadang Alat-Alat Berat	
5	1	2	1	2	21	Belanja Suku Cadang Transportasi Laut dan Sungai	
5	1	2	1	2	22	Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional	
5	1	2	1	2	23	Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus	
5	1	2	1	2	24	Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional	
5	1	2	1	2	25	Belanja BBM Alat-Alat Berat/Genset	
5	1	2	1	2	26	Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai	
5	1	2	1	2	27	Belanja BBG Kendaraan Bermotor	
5	1	2	1	2	28	Belanja Suku Cadang Alat-Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi	
5	1	2	1	2	29	Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional Khusus	
5	1	2	1	2	30	Belanja Papan Nama Kepemilikan Aset	
5	1	2	1	3		Belanja Cetak/Penggandaan	
5	1	2	1	3	001	Belanja Cetak	
5	1	2	1	3	002	Belanja Penggandaan	
5	1	2	1	4		Belanja Makanan dan Minuman	
5	1	2	1	4	001	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	
5	1	2	1	4	002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
5	1	2	1	4	003	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	
5	1	2	1	4	004	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia	
5	1	2	1	4	005	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	
5	1	2	1	4	006	Belanja Makanan dan Minuman Pemberian Makanan Tambahan pada Pos Pelayanan Terpadu	
5	1	2	1	5		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	
5	1	2	1	5	001	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	
5	1	2	1	5	002	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	
5	1	2	1	5	003	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	
5	1	2	1	5	004	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	
5	1	2	1	5	005	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	1	5	006	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	
5	1	2	1	6		Belanja Pakaian Kerja	
5	1	2	1	6	001	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	
5	1	2	1	6	002	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	
5	1	2	1	6	003	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	
5	1	2	1	7		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	
5	1	2	1	7	001	Belanja Pakaian KORPRI	
5	1	2	1	7	002	Belanja Pakaian Adat Daerah	
5	1	2	1	7	003	Belanja Pakaian Batik Tradisional	
5	1	2	1	7	004	Belanja Pakaian Olahraga	
5	1	2	1	7	005	Belanja Pakaian Paskibraka	
5	1	2	1	7	006	Belanja Pakaian Jas/Safari	
5	1	2	2			Belanja Jasa	
5	1	2	2	1		Belanja Jasa Kantor	
5	1	2	2	1	001	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan	
5	1	2	2	1	002	Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	
5	1	2	2	1	003	Belanja Jasa Perangkat UKPBJ	
5	1	2	2	1	004	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	
5	1	2	2	1	005	Belanja Jasa Pengurus/Penyimpan BMD	
5	1	2	2	1	006	Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	
5	1	2	2	1	007	Belanja Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara	
5	1	2	2	1	008	Belanja Jasa Penyuluh Non ASN	
5	1	2	2	1	009	Belanja Jasa Rohaniawan	
5	1	2	2	1	10	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa	
5	1	2	2	1	11	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	
5	1	2	2	1	12	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	
5	1	2	2	1	13	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan	
5	1	2	2	1	14	Belanja Telepon	
5	1	2	2	1	15	Belanja Air	
5	1	2	2	1	16	Belanja Listrik	
5	1	2	2	1	17	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	
5	1	2	2	1	18	Belanja Surat Kabar/Majalah	
5	1	2	2	1	19	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	
5	1	2	2	1	20	Belanja Paket/Pengiriman	
5	1	2	2	1	21	Belanja Sertifikasi	
5	1	2	2	1	22	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	
5	1	2	2	1	23	Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	
5	1	2	2	1	24	Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
5	1	2	2	1	25	Belanja Jasa Kebersihan (<i>Cleaning Service</i>)	
5	1	2	2	1	26	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	
5	1	2	2	1	27	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	
5	1	2	2	1	28	Belanja Jasa Jalan/Tol	
5	1	2	2	1	29	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	
5	1	2	2	1	30	Belanja Penambahan Daya	
5	1	2	2	1	31	Belanja Registrasi/Keanggotaan	
5	1	2	2	1	32	Belanja Perawatan Pasien Tidak Mampu	
5	1	2	2	1	33	Belanja Penguburan Jenazah Masyarakat Tidak Mampu	
5	1	2	2	1	34	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	
5	1	2	2	1	35	Belanja Jasa Pemindahan Benda Bersejarah	
5	1	2	2	1	36	Belanja Pelayanan Santunan Sosial	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	2	1	37	Belanja SPP Siswa Kurang Mampu	
5	1	2	2	1	38	Belanja Pelayanan Kesehatan Korban Bencana	
5	1	2	2	1	39	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	
5	1	2	2	1	40	Belanja Jasa Pengambilan/Pengumpulan/ Pengangkutan Sampah	
5	1	2	2	1	41	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	
5	1	2	2	1	42	Belanja Jasa Operator Bus Sekolah	
5	1	2	2	1	43	Belanja Jasa Pelayanan Pengisian BBG/BBM	
5	1	2	2	1	44	Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian/Rumah Tangga	
5	1	2	2	1	45	Belanja Jasa Pengurusan Perkara Hukum	
5	1	2	2	1	46	Belanja Jasa Boga	
5	1	2	2	1	47	Belanja Jasa Penyedia Tenaga Kerja	
5	1	2	2	1	48	Belanja Jasa Asuransi, Perbankan, dan Keuangan	
5	1	2	2	1	49	Belanja Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kependudukan	
5	1	2	2	1	50	Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	
5	1	2	2	1	51	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	
5	1	2	2	1	52	Belanja Jasa Pengepakan, Pengangkutan, Pengurusan, dan Penyampaian Barang	
5	1	2	2	1	53	Belanja Jasa Penjahitan/Konveksi	
5	1	2	2	1	54	Belanja Jasa Impor/Ekspor	
5	1	2	2	1	55	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	
5	1	2	2	1	56	Belanja Jasa Penyewaan	
5	1	2	2	1	57	Belanja Jasa Penyelaman	
5	1	2	2	1	58	Belanja Jasa Akomodasi	
5	1	2	2	1	59	Belanja Jasa Angkutan Penumpang	
5	1	2	2	1	60	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	
5	1	2	2	1	61	Belanja Jasa Pengelolaan Aset	
5	1	2	2	1	62	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	
5	1	2	2	1	63	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	
5	1	2	2	1	64	Belanja Jasa Rawat Jalan (Khusus Pimpinan Daerah)	
5	1	2	2	1	65	Belanja Jasa Rawat Inap (Khusus Pimpinan Daerah)	
5	1	2	2	1	66	Belanja Jasa Tindakan Medis (Khusus Pimpinan Daerah)	
5	1	2	2	1	67	Belanja Jasa Pemeriksaan Penunjang (Khusus Pimpinan Daerah)	
5	1	2	2	1	68	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan dan Kebugaran (Khusus Pimpinan Daerah)	
5	1	2	2	1	69	Belanja Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	
5	1	2	2	1	70	Belanja Pelayanan Keluarga Berencana	
5	1	2	2	1	71	Belanja Jasa Operator dan Petugas Penanganan Angkutan Kebersihan	
5	1	2	2	1	72	Belanja Jasa Advokat Bidang Perdata	
5	1	2	2	1	73	Belanja Jasa Advokat Bidang TUN	
5	1	2	2	1	74	Belanja Jasa Advokat Bidang Pidana	
5	1	2	2	1	75	Belanja Jasa Operator Teknisi	
5	1	2	2	1	76	Belanja Pengolahan Air Limbah	
5	1	2	2	1	77	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan Lalu Lintas	
5	1	2	2	1	78	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	
5	1	2	2	1	79	Belanja Jasa Teknologi Informasi dan Kehumasan	
5	1	2	2	1	80	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan	
5	1	2	2	1	81	Belanja Jasa Pemotongan Reklame	
5	1	2	2	1	82	Belanja Jasa Operator Kapal Penyeberangan	
5	1	2	2	1	83	Belanja Jasa Tiketing	
5	1	2	2	1	84	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	2	2		Belanja Jasa Asuransi	
5	1	2	2	2	001	Belanja Asuransi Kesehatan	
5	1	2	2	2	002	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	
5	1	2	2	3		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	
5	1	2	2	3	001	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	
5	1	2	2	3	002	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	
5	1	2	2	4		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	
5	1	2	2	4	001	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	
5	1	2	2	4	002	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	
5	1	2	2	4	003	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	
5	1	2	2	5		Belanja Sewa Alat Berat	
5	1	2	2	5	001	Belanja Sewa Ekskavator	
5	1	2	2	5	002	Belanja Sewa Bulldoser	
5	1	2	2	5	003	Belanja Sewa <i>Dump Truck</i>	
5	1	2	2	5	004	Belanja Sewa Mesin Giling	
5	1	2	2	5	005	Belanja Sewa <i>Shovel Loader</i>	
5	1	2	2	5	006	Belanja Sewa <i>Tyre Roler</i>	
5	1	2	2	5	007	Belanja Sewa <i>Asphalt Finisher</i>	
5	1	2	2	5	008	Belanja Sewa Direksi Kit	
5	1	2	2	5	009	Belanja Sewa <i>Generator Set</i>	
5	1	2	2	5	10	Belanja Sewa Kontainer/Trailer	
5	1	2	2	5	11	Belanja Sewa <i>Crane</i>	
5	1	2	2	6		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	
5	1	2	2	6	001	Belanja Sewa Meja/Kursi	
5	1	2	2	6	002	Belanja Sewa Komputer dan <i>Printer</i>	
5	1	2	2	6	003	Belanja Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/ HDTV	
5	1	2	2	6	004	Belanja Sewa Tenda	
5	1	2	2	6	005	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	
5	1	2	2	6	006	Belanja Sewa Mesin Fotokopi	
5	1	2	2	6	007	Belanja Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer dan Lainnya	
5	1	2	2	6	008	Belanja Sewa <i>Sound System</i>	
5	1	2	2	6	009	Belanja Sewa Alat Kesenian	
5	1	2	2	6	10	Belanja Sewa Alat Olahraga	
5	1	2	2	6	11	Belanja Sewa Alat Kerja	
5	1	2	2	6	12	Belanja Sewa Level/Panggung	
5	1	2	2	6	13	Belanja Sewa Alat/Peraga	
5	1	2	2	7		Belanja Jasa Konsultansi	
5	1	2	2	7	001	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	
5	1	2	2	7	002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	
5	1	2	2	7	003	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	
5	1	2	2	7	004	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	
5	1	2	2	7	005	Belanja Jasa Konsultansi <i>Event Organizer</i>	
5	1	2	2	7	006	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/ Keuangan/SDM	
5	1	2	2	7	007	Belanja Jasa Konsultansi Hukum/Politik/ Ekonomi/Sosial/Budaya	
5	1	2	2	7	008	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal	
5	1	2	2	7	009	Belanja Jasa Konsultansi Rekayasa (Engineering)	
5	1	2	2	7	10	Belanja Jasa Konsultansi Perancangan	
5	1	2	2	8		Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	
5	1	2	2	8	001	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi	
5	1	2	2	8	002	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Jalan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	2	8	003	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	
5	1	2	2	8	004	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Air Minum	
5	1	2	2	8	005	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	
5	1	2	2	8	006	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	
5	1	2	2	8	007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	
5	1	2	2	8	008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
5	1	2	2	8	009	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	
5	1	2	2	8	10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan	
5	1	2	2	8	11	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur	
5	1	2	2	8	12	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan	
5	1	2	2	8	13	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan	
5	1	2	2	8	14	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian	
5	1	2	2	8	15	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kawasan	
5	1	2	2	8	16	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Pariwisata	
5	1	2	2	8	17	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	
5	1	2	2	8	18	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan	
5	1	2	2	8	19	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Perumahan Rakyat	
5	1	2	2	9		Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	
5	1	2	2	9	001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	
5	1	2	2	9	002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	
5	1	2	2	9	003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	
5	1	2	2	10		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	
5	1	2	2	10	001	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	
5	1	2	2	10	002	Belanja Sosialisasi	
5	1	2	2	10	003	Belanja Bimbingan Teknis	
5	1	2	2	10	004	Belanja Diklat Kepemimpinan	
5	1	2	2	11		Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	
5	1	2	2	11	001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	
5	1	2	2	11	002	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
5	1	2	2	11	003	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
5	1	2	2	11	004	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	
5	1	2	2	11	005	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	
5	1	2	2	11	006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	
5	1	2	2	11	007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	2	11	008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	
5	1	2	2	11	009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	
5	1	2	2	11	10	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	
5	1	2	2	11	11	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	
5	1	2	2	11	12	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	
5	1	2	2	11	13	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	
5	1	2	2	11	14	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
5	1	2	2	11	15	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
5	1	2	2	11	16	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
5	1	2	2	12		Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	
5	1	2	2	12	001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	
5	1	2	2	12	002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
5	1	2	2	12	003	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
5	1	2	2	12	004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
5	1	2	2	12	005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	
5	1	2	2	12	006	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor	
5	1	2	2	12	007	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
5	1	2	2	12	008	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penggantian Biaya Cetak Peta	
5	1	2	2	12	009	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
5	1	2	2	12	10	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengolahan Limbah Cair	
5	1	2	2	12	11	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang	
5	1	2	2	12	12	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pendidikan	
5	1	2	2	12	13	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	
5	1	2	2	12	14	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-	
5	1	2	2	12	15	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	
5	1	2	2	12	16	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyediaan Tempat Pelelangan	
5	1	2	2	12	17	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	
5	1	2	2	12	18	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	
5	1	2	2	12	19	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	2	12	20	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	
5	1	2	2	12	21	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pelayanan Kepelabuhan	
5	1	2	2	12	22	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	
5	1	2	2	12	23	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyeberangan Air	
5	1	2	2	12	24	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	
5	1	2	2	12	25	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan	
5	1	2	2	12	26	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
5	1	2	2	12	27	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan	
5	1	2	2	12	28	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Usaha Perikanan	
5	1	2	2	12	29	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Pengendalian Lalu Lintas	
5	1	2	2	12	30	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	
5	1	2	3			Belanja Pemeliharaan	
5	1	2	3	1		Belanja Pemeliharaan Tanah	
5	1	2	3	1	001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	
5	1	2	3	1	002	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	
5	1	2	3	1	003	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Industri	
5	1	2	3	1	004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	
5	1	2	3	1	005	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	
5	1	2	3	1	006	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	
5	1	2	3	1	007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah Persil Lainnya	
5	1	2	3	1	008	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah	
5	1	2	3	1	009	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering	
5	1	2	3	1	10	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non	
5	1	2	3	1	11	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan	
5	1	2	3	1	12	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus	
5	1	2	3	1	13	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput	
5	1	2	3	1	14	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian	
5	1	2	3	1	15	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan	
5	1	2	3	1	16	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya	
5	1	2	3	1	17	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Olahraga	
5	1	2	3	1	18	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Parkir	
5	1	2	3	1	19	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Penimbunan Barang	
5	1	2	3	1	20	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
						Pemancar dan Studio Alam	
5	1	2	3	1	21	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	
5	1	2	3	1	22	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Terbang	
5	1	2	3	1	23	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Jalan	
5	1	2	3	1	24	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Bangunan Air	
5	1	2	3	1	25	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Bangunan Instalasi	
5	1	2	3	1	26	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Bangunan Jaringan	
5	1	2	3	1	27	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Bangunan Bersejarah	
5	1	2	3	1	28	Belanja Pemeliharaan Tanah untuk Makam	
5	1	2	3	1	29	Belanja Pemeliharaan Tanah untuk Taman	
5	1	2	3	1	30	Belanja Pemeliharaan Tanah untuk Latihan	
5	1	2	3	1	31	Belanja Pemeliharaan Tanah Daerah Pertahanan	
5	1	2	3	1	32	Belanja Pemeliharaan Tanah Lapangan PBB	
5	1	2	3	1	33	Belanja Pemeliharaan Tanah Kampung	
5	1	2	3	1	34	Belanja Pemeliharaan Emplasment	
5	1	2	3	1	35	Belanja Pemeliharaan Lapangan Lainnya	
5	1	2	3	2		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
5	1	2	3	2	001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	
5	1	2	3	2	002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Grader</i>	
5	1	2	3	2	003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Excavator</i>	
5	1	2	3	2	004	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Pile Driver	
5	1	2	3	2	005	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Hauler	
5	1	2	3	2	006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	
5	1	2	3	2	007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	
5	1	2	3	2	008	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>	
5	1	2	3	2	009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Loader</i>	
5	1	2	3	2	10	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar	
5	1	2	3	2	11	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	
5	1	2	3	2	12	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	
5	1	2	3	2	13	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Dredger	
5	1	2	3	2	14	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator	
5	1	2	3	2	15	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung- <i>Amphibi Dredger</i>	
5	1	2	3	2	16	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik	
5	1	2	3	2	17	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	
5	1	2	3	2	18	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	
5	1	2	3	2	19	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Penarik	
5	1	2	3	2	20	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Feeder	
5	1	2	3	2	21	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Compressor	
5	1	2	3	2	22	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	
5	1	2	3	2	23	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	
5	1	2	3	2	24	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Mesin Bor	
5	1	2	3	2	25	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Unit Pemeliharaan Lapangan	
5	1	2	3	2	26	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Pengolahan Air Kotor	
5	1	2	3	2	27	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	3	2	28	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-	
5	1	2	3	2	29	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Mesin Tatoo	
5	1	2	3	2	30	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Perlengkapan Kebakaran Hutan	
5	1	2	3	2	31	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan Selam	
5	1	2	3	2	32	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan SAR Mountenering	
5	1	2	3	2	33	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan Intelijen	
5	1	2	3	2	34	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	
5	1	2	3	2	35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	
5	1	2	3	2	36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	
5	1	2	3	2	37	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
5	1	2	3	2	38	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	
5	1	2	3	2	39	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	
5	1	2	3	2	40	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	
5	1	2	3	2	41	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur	
5	1	2	3	2	42	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	
5	1	2	3	2	43	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan	
5	1	2	3	2	44	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	
5	1	2	3	2	45	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	
5	1	2	3	2	46	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	
5	1	2	3	2	47	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	
5	1	2	3	2	48	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	
5	1	2	3	2	49	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	
5	1	2	3	2	50	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	
5	1	2	3	2	51	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	
5	1	2	3	2	52	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	
5	1	2	3	2	53	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	
5	1	2	3	2	54	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	
5	1	2	3	2	55	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	
5	1	2	3	2	56	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	
5	1	2	3	2	57	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	3	2	58	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	
5	1	2	3	2	59	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	
5	1	2	3	2	60	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)	
5	1	2	3	2	61	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	
5	1	2	3	2	62	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	
5	1	2	3	2	63	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin	
5	1	2	3	2	64	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	
5	1	2	3	2	65	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	
5	1	2	3	2	66	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las	
5	1	2	3	2	67	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	
5	1	2	3	2	68	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	
5	1	2	3	2	69	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	
5	1	2	3	2	70	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	
5	1	2	3	2	71	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	
5	1	2	3	2	72	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	
5	1	2	3	2	73	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools)	
5	1	2	3	2	74	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)	
5	1	2	3	2	75	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	
5	1	2	3	2	76	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	
5	1	2	3	2	77	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	
5	1	2	3	2	78	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	
5	1	2	3	2	79	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	
5	1	2	3	2	80	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	
5	1	2	3	2	81	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	
5	1	2	3	2	82	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	
5	1	2	3	2	83	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes <i>Inteligensia</i>	
5	1	2	3	2	84	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian	
5	1	2	3	2	85	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	3	2	86	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	
5	1	2	3	2	87	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur- Alat Ukur- <i>Oscilloscope</i>	
5	1	2	3	2	88	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- <i>Universal Tester</i>	
5	1	2	3	2	89	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/ <i>Pembanding</i>	
5	1	2	3	2	90	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur <i>Lain-Lain</i>	
5	1	2	3	2	91	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/ <i>Biara</i>	
5	1	2	3	2	92	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/ <i>Biara</i>	
5	1	2	3	2	93	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran <i>Kering</i>	
5	1	2	3	2	94	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran <i>Bahan Bangunan</i>	
5	1	2	3	2	95	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran <i>Lainnya</i>	
5	1	2	3	2	96	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	
5	1	2	3	2	97	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- <i>Specific Set</i>	
5	1	2	3	2	98	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam	
5	1	2	3	2	99	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan	
5	1	2	3	2	100	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu	
5	1	2	3	2	101	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Instrument Workshop	
5	1	2	3	2	102	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur <i>Lainnya</i>	
5	1	2	3	2	103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	
5	1	2	3	2	104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	
5	1	2	3	2	105	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen	
5	1	2	3	2	106	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	
5	1	2	3	2	107	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	
5	1	2	3	2	108	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing	
5	1	2	3	2	109	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	
5	1	2	3	2	110	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	
5	1	2	3	2	111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	
5	1	2	3	2	112	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan <i>Lainnya</i>	
5	1	2	3	2	113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	
5	1	2	3	2	114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	
5	1	2	3	2	115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	
5	1	2	3	2	116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	
5	1	2	3	2	117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor <i>Lainnya</i>	
5	1	2	3	2	118	Belanja Pemeliharaan Rumah Tangga-Alat Meubelair	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	3	2	119	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Pengukur Waktu	
5	1	2	3	2	120	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Pembersih	
5	1	2	3	2	121	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Pendingin	
5	1	2	3	2	122	Belanja Rumah Dapur	
5	1	2	3	2	123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	
5	1	2	3	2	124	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Pemadam Kebakaran	
5	1	2	3	2	125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat	
5	1	2	3	2	126	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	
5	1	2	3	2	127	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	
5	1	2	3	2	128	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	
5	1	2	3	2	129	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	
5	1	2	3	2	130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	
5	1	2	3	2	131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	
5	1	2	3	2	132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	
5	1	2	3	2	133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film	
5	1	2	3	2	134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Gambar	
5	1	2	3	2	135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Cetak	
5	1	2	3	2	136	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	
5	1	2	3	2	137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	
5	1	2	3	2	138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi <i>Telephone</i>	
5	1	2	3	2	139	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	
5	1	2	3	2	140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	
5	1	2	3	2	141	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	
5	1	2	3	2	142	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	
5	1	2	3	2	143	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	
5	1	2	3	2	144	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	
5	1	2	3	2	145	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	
5	1	2	3	2	146	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	3	2	147	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit	
5	1	2	3	2	148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	
5	1	2	3	2	149	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW	
5	1	2	3	2	150	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW	
5	1	2	3	2	151	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM	
5	1	2	3	2	152	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF	
5	1	2	3	2	153	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF	
5	1	2	3	2	154	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW	
5	1	2	3	2	155	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW	
5	1	2	3	2	156	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM	
5	1	2	3	2	157	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF	
5	1	2	3	2	158	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	
5	1	2	3	2	159	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF	
5	1	2	3	2	160	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF	
5	1	2	3	2	161	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF	
5	1	2	3	2	162	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF	
5	1	2	3	2	163	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave FPU	
5	1	2	3	2	164	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave Terrestrial	
5	1	2	3	2	165	Belanja Pemeliharaan Alat Studio,	
5	1	2	3	2	166	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Dummy Load	
5	1	2	3	2	167	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher Antena	
5	1	2	3	2	168	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	
5	1	2	3	2	169	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Feeder	
5	1	2	3	2	170	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Humidity Control	
5	1	2	3	2	171	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program Input Equipment	
5	1	2	3	2	172	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF	
5	1	2	3	2	173	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	3	2	174	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF	
5	1	2	3	2	175	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF	
5	1	2	3	2	176	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima	
5	1	2	3	2	177	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF	
5	1	2	3	2	178	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan	
5	1	2	3	2	179	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF	
5	1	2	3	2	180	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF	
5	1	2	3	2	181	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	
5	1	2	3	2	182	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	
5	1	2	3	2	183	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF	
5	1	2	3	2	184	Belanja Pemeliharaan Alat Studio,	
5	1	2	3	2	185	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF	
5	1	2	3	2	186	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF	
5	1	2	3	2	187	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF	
5	1	2	3	2	188	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF	
5	1	2	3	2	189	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	
5	1	2	3	2	190	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF	
5	1	2	3	2	191	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah	
5	1	2	3	2	192	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi	
5	1	2	3	2	193	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	
5	1	2	3	2	194	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio	
5	1	2	3	2	195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	
5	1	2	3	2	196	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	
5	1	2	3	2	197	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System	
5	1	2	3	2	198	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Very High Frequence Omni Range (VOR)	
5	1	2	3	2	199	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Distance Measuring Equipment (DME)	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	3	2	200	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar	
5	1	2	3	2	201	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi	
5	1	2	3	2	202	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	
5	1	2	3	2	203	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	
5	1	2	3	2	204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	
5	1	2	3	2	205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	
5	1	2	3	2	206	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	
5	1	2	3	2	207	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	
5	1	2	3	2	208	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	
5	1	2	3	2	209	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	
5	1	2	3	2	210	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	
5	1	2	3	2	211	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	
5	1	2	3	2	212	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	
5	1	2	3	2	213	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	
5	1	2	3	2	214	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	
5	1	2	3	2	215	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	
5	1	2	3	2	216	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	
5	1	2	3	2	217	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	
5	1	2	3	2	218	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	
5	1	2	3	2	219	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi <i>Anatomy</i>	
5	1	2	3	2	220	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah	
5	1	2	3	2	221	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi	
5	1	2	3	2	222	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir	
5	1	2	3	2	223	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	
5	1	2	3	2	224	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	
5	1	2	3	2	225	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	3	2	226	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	
5	1	2	3	2	227	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU	
5	1	2	3	2	228	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran	
5	1	2	3	2	229	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung	
5	1	2	3	2	230	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Traditional Medicine	
5	1	2	3	2	231	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi	
5	1	2	3	2	232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	
5	1	2	3	2	233	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut	
5	1	2	3	2	234	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara	
5	1	2	3	2	235	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian	
5	1	2	3	2	236	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga	
5	1	2	3	2	237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	
5	1	2	3	2	238	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	
5	1	2	3	2	239	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	
5	1	2	3	2	240	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia	
5	1	2	3	2	241	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika	
5	1	2	3	2	242	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi	
5	1	2	3	2	243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	
5	1	2	3	2	244	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	
5	1	2	3	2	245	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	
5	1	2	3	2	246	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cokok Tanam	
5	1	2	3	2	247	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	
5	1	2	3	2	248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	
5	1	2	3	2	249	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	
5	1	2	3	2	250	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	
5	1	2	3	2	251	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	
5	1	2	3	2	252	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	3	2	253	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	
5	1	2	3	2	254	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	
5	1	2	3	2	255	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	
5	1	2	3	2	256	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	
5	1	2	3	2	257	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	
5	1	2	3	2	258	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika	
5	1	2	3	2	259	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi	
5	1	2	3	2	260	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan	
5	1	2	3	2	261	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir	
5	1	2	3	2	262	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan	
5	1	2	3	2	263	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola	
5	1	2	3	2	264	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi	
5	1	2	3	2	265	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan	
5	1	2	3	2	266	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	
5	1	2	3	2	267	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	
5	1	2	3	2	268	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	
5	1	2	3	2	269	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam	
5	1	2	3	2	270	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	
5	1	2	3	2	271	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	
5	1	2	3	2	272	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil	
5	1	2	3	2	273	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	
5	1	2	3	2	274	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	
5	1	2	3	2	275	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik	
5	1	2	3	2	276	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik	
5	1	2	3	2	277	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	
5	1	2	3	2	278	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	
5	1	2	3	2	279	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	3	2	280	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya	
5	1	2	3	2	281	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass	
5	1	2	3	2	282	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi	
5	1	2	3	2	283	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	
5	1	2	3	2	284	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan	
5	1	2	3	2	285	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi	
5	1	2	3	2	286	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika	
5	1	2	3	2	287	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang	
5	1	2	3	2	288	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	
5	1	2	3	2	289	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri	
5	1	2	3	2	290	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	
5	1	2	3	2	291	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan	
5	1	2	3	2	292	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	
5	1	2	3	2	293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	
5	1	2	3	2	294	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi	
5	1	2	3	2	295	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan	
5	1	2	3	2	296	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim	
5	1	2	3	2	297	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai	
5	1	2	3	2	298	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi	
5	1	2	3	2	299	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi	
5	1	2	3	2	300	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang	
5	1	2	3	2	301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	
5	1	2	3	2	302	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Analytical Instrument	
5	1	2	3	2	303	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument Probe/Sensor	
5	1	2	3	2	304	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool	
5	1	2	3	2	305	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Glassware Plastic/Utensils	
5	1	2	3	2	306	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit	
5	1	2	3	2	307	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	3	2	308	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	
5	1	2	3	2	309	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	
5	1	2	3	2	310	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	
5	1	2	3	2	311	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	
5	1	2	3	2	312	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	
5	1	2	3	2	313	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	
5	1	2	3	2	314	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	
5	1	2	3	2	315	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	
5	1	2	3	2	316	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	
5	1	2	3	2	317	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	
5	1	2	3	2	318	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	
5	1	2	3	2	319	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	
5	1	2	3	2	320	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	
5	1	2	3	2	321	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan	
5	1	2	3	2	322	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	
5	1	2	3	2	323	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	
5	1	2	3	2	324	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Radiation Detector	
5	1	2	3	2	325	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>	
5	1	2	3	2	326	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-	
5	1	2	3	2	327	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Recorder Display</i>	
5	1	2	3	2	328	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- System/Power Supply	
5	1	2	3	2	329	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Measuring/ Testing Device</i>	
5	1	2	3	2	330	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Opto Electronics	
5	1	2	3	2	331	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Accelerator	
5	1	2	3	2	332	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Reactor Experimental System	
5	1	2	3	2	333	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	3	2	334	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan	
5	1	2	3	2	335	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	
5	1	2	3	2	336	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan- Proteksi Lingkungan	
5	1	2	3	2	337	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan- Meteorological Equipment	
5	1	2	3	2	338	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan- Sumber Radiasi	
5	1	2	3	2	339	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	
5	1	2	3	2	340	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya- Radiation Application Equipment	
5	1	2	3	2	341	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya- Non Destructive Test (NDT) Device	
5	1	2	3	2	342	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya- Peralatan Hidrologi	
5	1	2	3	2	343	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	
5	1	2	3	2	344	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	
5	1	2	3	2	345	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	
5	1	2	3	2	346	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	
5	1	2	3	2	347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup- Laboratorium Lingkungan	
5	1	2	3	2	348	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	
5	1	2	3	2	349	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	
5	1	2	3	2	350	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Towing Carriage	
5	1	2	3	2	351	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber	
5	1	2	3	2	352	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System	
5	1	2	3	2	353	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Cavitation Tunnel	
5	1	2	3	2	354	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Overhead Cranes	
5	1	2	3	2	355	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Peralatan Umum	
5	1	2	3	2	356	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> - Pemesinan: <i>Model Ship Workshop</i>	
5	1	2	3	2	357	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Propeller Model Workshop	
5	1	2	3	2	358	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Mechanical Workshop	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	3	2	359	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Precision Mechanical Workshop	
5	1	2	3	2	360	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Painting Shop	
5	1	2	3	2	361	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Ship Model Preparation Shop	
5	1	2	3	2	362	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Electrical Workshop	
5	1	2	3	2	363	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB	
5	1	2	3	2	364	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Photo and Film Equipment	
5	1	2	3	2	365	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-	
5	1	2	3	2	366	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	
5	1	2	3	2	367	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	
5	1	2	3	2	368	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	
5	1	2	3	2	369	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	
5	1	2	3	2	370	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	
5	1	2	3	2	371	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	
5	1	2	3	2	372	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natus	
5	1	2	3	2	373	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran	
5	1	2	3	2	374	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	
5	1	2	3	2	375	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat	
5	1	2	3	2	376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat	
5	1	2	3	2	404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	
5	1	2	3	2	405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	
5	1	2	3	2	406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	
5	1	2	3	2	407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	
5	1	2	3	2	408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	
5	1	2	3	2	409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	
5	1	2	3	2	410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	
5	1	2	3	2	411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan	
5	1	2	3	2	412	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik	
5	1	2	3	2	413	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen	
5	1	2	3	2	414	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	
5	1	2	3	2	415	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	3	2	416	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/Electric	
5	1	2	3	2	417	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual	
5	1	2	3	2	418	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya	
5	1	2	3	2	419	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk	
5	1	2	3	2	420	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar	
5	1	2	3	2	421	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya	
5	1	2	3	2	422	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka	
5	1	2	3	2	423	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek	
5	1	2	3	2	424	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar	
5	1	2	3	2	425	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu	
5	1	2	3	2	426	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya	
5	1	2	3	2	427	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur- Peralatan Sumur Minyak	
5	1	2	3	2	428	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran	
5	1	2	3	2	429	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya	
5	1	2	3	2	430	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG	
5	1	2	3	2	431	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi- Produksi Lainnya	
5	1	2	3	2	432	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak	
5	1	2	3	2	433	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	
5	1	2	3	2	434	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam	
5	1	2	3	2	435	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax	
5	1	2	3	2	436	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya	
5	1	2	3	2	437	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik	
5	1	2	3	2	438	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik	
5	1	2	3	2	439	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	
5	1	2	3	2	440	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur	
5	1	2	3	2	441	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Produksi-Tes Unit	
5	1	2	3	2	442	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya	
5	1	2	3	2	443	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi	
5	1	2	3	2	444	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara	
5	1	2	3	2	445	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya	
5	1	2	3	2	446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	
5	1	2	3	2	447	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
						Masker	
5	1	2	3	2	448	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	
5	1	2	3	2	449	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman	
5	1	2	3	2	450	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	
5	1	2	3	2	451	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	
5	1	2	3	2	452	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong	
5	1	2	3	2	453	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	
5	1	2	3	2	454	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air	
5	1	2	3	2	455	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya	
5	1	2	3	2	456	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan	
5	1	2	3	2	457	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan	
5	1	2	3	2	458	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan	
5	1	2	3	2	459	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	
5	1	2	3	2	460	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	
5	1	2	3	2	461	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik	
5	1	2	3	2	462	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya	
5	1	2	3	2	463	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	
5	1	2	3	2	464	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan	
5	1	2	3	2	465	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	
5	1	2	3	2	466	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment	
5	1	2	3	2	467	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment	
5	1	2	3	2	468	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening Equipment	
5	1	2	3	2	469	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Classifier	
5	1	2	3	2	470	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment	
5	1	2	3	2	471	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment	
5	1	2	3	2	472	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment	
5	1	2	3	2	473	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Leaching Equipment	
5	1	2	3	2	474	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation Equipment	
5	1	2	3	2	475	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering Equipment	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	3	2	476	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Centrifuge for Solid Liquid</i>	
5	1	2	3	2	477	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment	
5	1	2	3	2	478	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Drying Equipment	
5	1	2	3	2	479	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment	
5	1	2	3	2	480	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Separation Equipment</i>	
5	1	2	3	2	481	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Distillation Equipment	
5	1	2	3	2	482	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Separation Equipment	
5	1	2	3	2	483	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Isotope Separation Equipment	
5	1	2	3	2	484	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid	
5	1	2	3	2	485	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment	
5	1	2	3	2	486	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment	
5	1	2	3	2	487	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment	
5	1	2	3	2	488	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer Equipment	
5	1	2	3	2	489	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Mechanical Process</i>	
5	1	2	3	2	490	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment	
5	1	2	3	2	491	Belanja Pemeliharaan Proses/Produksi-Unit Proses/Produksi-Unit Proses/Produksi Lainnya	
5	1	2	3	2	492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	
5	1	2	3	2	493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	
5	1	2	3	2	494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	
5	1	2	3	2	495	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Runway/Threshold Light	
5	1	2	3	2	496	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Visual Approach Slope Indicator (VASI)	
5	1	2	3	2	497	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Approach Light	
5	1	2	3	2	498	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway Identification Light (REILS)	
5	1	2	3	2	499	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Signal	
5	1	2	3	2	500	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Flood Lights	
5	1	2	3	2	501	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	
5	1	2	3	2	502	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu- Rambu Lalu Lintas Laut	
5	1	2	3	2	503	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu- Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	3	2	504	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-	
5	1	2	3	2	505	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan	
5	1	2	3	2	506	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga- Peralatan Senam	
5	1	2	3	2	507	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Air	
5	1	2	3	2	508	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Udara	
5	1	2	3	2	509	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Lainnya	
5	1	2	3	3		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
5	1	2	3	3	001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	
5	1	2	3	3	002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	
5	1	2	3	3	003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	
5	1	2	3	3	004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	
5	1	2	3	3	005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	
5	1	2	3	3	006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	
5	1	2	3	3	007	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium	
5	1	2	3	3	008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
5	1	2	3	3	009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	
5	1	2	3	3	10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
5	1	2	3	3	11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	
5	1	2	3	3	12	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	
5	1	2	3	3	13	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	
5	1	2	3	3	14	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	
5	1	2	3	3	15	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	
5	1	2	3	3	16	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-	
5	1	2	3	3	17	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	
5	1	2	3	3	18	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	
5	1	2	3	3	19	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan	
5	1	2	3	3	20	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan	
5	1	2	3	3	21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	
5	1	2	3	3	22	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	3	3	23	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	
5	1	2	3	3	24	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan	
5	1	2	3	3	25	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	
5	1	2	3	3	26	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Penampung Sekam	
5	1	2	3	3	27	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
5	1	2	3	3	28	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	
5	1	2	3	3	29	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	
5	1	2	3	3	30	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
5	1	2	3	3	31	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika	
5	1	2	3	3	32	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	
5	1	2	3	3	33	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	
5	1	2	3	3	34	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	
5	1	2	3	3	35	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus	
5	1	2	3	3	36	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	
5	1	2	3	3	37	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
5	1	2	3	3	38	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	
5	1	2	3	3	39	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	
5	1	2	3	3	40	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	
5	1	2	3	3	41	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	
5	1	2	3	3	42	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	
5	1	2	3	3	43	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel	
5	1	2	3	3	44	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel	
5	1	2	3	3	45	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Flat/Rumah Susun	
5	1	2	3	3	46	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	
5	1	2	3	3	47	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan	
5	1	2	3	3	48	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Apartemen	
5	1	2	3	3	49	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	
5	1	2	3	3	50	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	3	3	51	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi	
5	1	2	3	3	52	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	
5	1	2	3	3	53	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	
5	1	2	3	3	54	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	
5	1	2	3	3	55	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	
5	1	2	3	3	56	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	
5	1	2	3	3	57	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	
5	1	2	3	3	58	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan	
5	1	2	3	3	59	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya	
5	1	2	3	3	60	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas- Tugu/Tanda Batas Administrasi	
5	1	2	3	3	61	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas- Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	
5	1	2	3	3	62	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	
5	1	2	3	3	63	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	
5	1	2	3	3	64	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas- Tugu/Tanda Batas Lainnya	
5	1	2	3	4		Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
5	1	2	3	4	001	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Nasional	
5	1	2	3	4	002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Provinsi	
5	1	2	3	4	003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	
5	1	2	3	4	004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kota	
5	1	2	3	4	005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Desa	
5	1	2	3	4	006	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Tol	
5	1	2	3	4	007	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kereta Api	
5	1	2	3	4	008	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang	
5	1	2	3	4	009	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Khusus	
5	1	2	3	4	10	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya	
5	1	2	3	4	11	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional	
5	1	2	3	4	12	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	
5	1	2	3	4	13	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	
5	1	2	3	4	14	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	
5	1	2	3	4	15	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	
5	1	2	3	4	16	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol	
5	1	2	3	4	17	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api	
5	1	2	3	4	18	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	
5	1	2	3	4	19	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	3	4	20	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan Penyeberangan	
5	1	2	3	4	21	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	
5	1	2	3	4	22	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan Pengukur	
5	1	2	3	4	23	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan Lainnya	
5	1	2	3	4	24	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Waduk Irigasi	
5	1	2	3	4	25	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi	
5	1	2	3	4	26	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi	
5	1	2	3	4	27	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembuang Irigasi	
5	1	2	3	4	28	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi	
5	1	2	3	4	29	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pelengkap Irigasi	
5	1	2	3	4	30	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Sawah Irigasi	
5	1	2	3	4	31	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya	
5	1	2	3	4	32	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Waduk Pasang Surut	
5	1	2	3	4	33	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pengambilan Pasang Surut	
5	1	2	3	4	34	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pembawa Pasang Surut	
5	1	2	3	4	35	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	
5	1	2	3	4	36	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pengaman Pasang Surut	
5	1	2	3	4	37	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pelengkap Pasang Surut	
5	1	2	3	4	38	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Sawah Pasang Surut	
5	1	2	3	4	39	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	
5	1	2	3	4	40	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	
5	1	2	3	4	41	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	
5	1	2	3	4	42	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	
5	1	2	3	4	43	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	
5	1	2	3	4	44	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	
5	1	2	3	4	45	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	
5	1	2	3	4	46	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	
5	1	2	3	4	47	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-	
5	1	2	3	4	48	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	3	4	49	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	
5	1	2	3	4	50	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	
5	1	2	3	4	51	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	
5	1	2	3	4	52	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	
5	1	2	3	4	53	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	
5	1	2	3	4	54	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	
5	1	2	3	4	55	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	
5	1	2	3	4	56	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	
5	1	2	3	4	57	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	
5	1	2	3	4	58	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	
5	1	2	3	4	59	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	
5	1	2	3	4	60	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	
5	1	2	3	4	61	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	
5	1	2	3	4	62	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	
5	1	2	3	4	63	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-	
5	1	2	3	4	64	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	
5	1	2	3	4	65	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	
5	1	2	3	4	66	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	
5	1	2	3	4	67	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	
5	1	2	3	4	68	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	
5	1	2	3	4	69	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	
5	1	2	3	4	70	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor	
5	1	2	3	4	71	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	
5	1	2	3	4	72	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor	
5	1	2	3	4	73	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	
5	1	2	3	4	74	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	
5	1	2	3	4	75	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	3	4	76	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	
5	1	2	3	4	77	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	
5	1	2	3	4	78	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	
5	1	2	3	4	79	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	
5	1	2	3	4	80	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	
5	1	2	3	4	81	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri	
5	1	2	3	4	82	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian	
5	1	2	3	4	83	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	
5	1	2	3	4	84	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	
5	1	2	3	4	85	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	
5	1	2	3	4	86	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	
5	1	2	3	4	87	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	
5	1	2	3	4	88	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan	
5	1	2	3	4	89	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	
5	1	2	3	4	90	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	
5	1	2	3	4	91	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	
5	1	2	3	4	92	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	
5	1	2	3	4	93	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	
5	1	2	3	4	94	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	
5	1	2	3	4	95	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	
5	1	2	3	4	96	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	
5	1	2	3	4	97	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	
5	1	2	3	4	98	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	
5	1	2	3	4	99	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi	
5	1	2	3	4	100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	
5	1	2	3	4	101	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	
5	1	2	3	4	102	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera	
5	1	2	3	4	103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	
5	1	2	3	4	104	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	3	4	105	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	
5	1	2	3	4	106	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi	
5	1	2	3	4	107	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	
5	1	2	3	4	108	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat	
5	1	2	3	4	109	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya	
5	1	2	3	4	110	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Gardu Gas	
5	1	2	3	4	111	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Jaringan Pipa Gas	
5	1	2	3	4	112	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Pengolahan Gas	
5	1	2	3	4	113	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Gas Lainnya	
5	1	2	3	4	114	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	
5	1	2	3	4	115	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir	
5	1	2	3	4	116	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	
5	1	2	3	4	117	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya	
5	1	2	3	4	118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	
5	1	2	3	4	119	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	
5	1	2	3	4	120	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	
5	1	2	3	4	121	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	
5	1	2	3	4	122	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	
5	1	2	3	4	123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air	
5	1	2	3	4	124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	
5	1	2	3	4	125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	
5	1	2	3	4	126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	
5	1	2	3	4	127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	
5	1	2	3	4	128	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah	
5	1	2	3	4	129	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air	
5	1	2	3	4	130	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	
5	1	2	3	4	131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	
5	1	2	3	4	132	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi	
5	1	2	3	4	133	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	
5	1	2	3	4	134	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas	
5	1	2	3	4	135	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM	
5	1	2	3	4	136	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya	
5	1	2	3	5		Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
5	1	2	3	5	001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	
5	1	2	3	5	002	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat	
5	1	2	3	5	003	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama	
5	1	2	3	5	004	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	3	5	005	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa	
5	1	2	3	5	006	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	
5	1	2	3	5	007	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	
5	1	2	3	5	008	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	
5	1	2	3	5	009	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	
5	1	2	3	5	10	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial	
5	1	2	3	5	11	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan	
5	1	2	3	5	12	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	
5	1	2	3	5	13	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual	
5	1	2	3	5	14	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (<i>Microform</i>)	
5	1	2	3	5	15	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	
5	1	2	3	5	16	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi	
5	1	2	3	5	17	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli	
5	1	2	3	5	18	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran	
5	1	2	3	5	19	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya	
5	1	2	3	5	20	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Musik-Karya Musik	
5	1	2	3	5	21	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Musik-Musik Lainnya	
5	1	2	3	5	22	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika (Graphic Material)	
5	1	2	3	5	23	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)-Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>) Lainnya	
5	1	2	3	5	24	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita	
5	1	2	3	5	25	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita Lainnya	
5	1	2	3	5	26	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Tarscalt-Tarscalt	
5	1	2	3	5	27	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Tarscalt-Tarscalt Lainnya	
5	1	2	3	5	28	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	
5	1	2	3	5	29	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan	
5	1	2	3	5	30	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian	
5	1	2	3	5	31	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	3	5	32	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan	
5	1	2	3	5	33	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	
5	1	2	3	5	34	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan	
5	1	2	3	5	35	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	
5	1	2	3	5	36	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	
5	1	2	3	5	37	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	
5	1	2	3	5	38	Belanja Pemeliharaan Piaraan-Hewan Pengaman	
5	1	2	3	5	39	Belanja Pemeliharaan Piaraan-Hewan Pengangkut	
5	1	2	3	5	40	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang	
5	1	2	3	5	41	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya	
5	1	2	3	5	42	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Potong	
5	1	2	3	5	43	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Perah	
5	1	2	3	5	44	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Unggas	
5	1	2	3	5	45	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Lainnya	
5	1	2	3	5	46	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya	
5	1	2	3	5	47	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya	
5	1	2	3	5	48	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Crustacea</i> (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)- <i>Crustacea</i> Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	
5	1	2	3	5	49	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)	
5	1	2	3	5	50	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Coelenterata</i> (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)- <i>Coelenterata</i> Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)	
5	1	2	3	5	51	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)	
5	1	2	3	5	52	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)- Amphibia Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)	
5	1	2	3	5	53	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)	
5	1	2	3	5	54	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Mammalia</i> (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)- <i>Mammalia</i> Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)	
5	1	2	3	5	55	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)	
5	1	2	3	5	56	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya	
5	1	2	3	5	57	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman	
5	1	2	3	5	58	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi	
5	1	2	3	5	59	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	2	3	5	60	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya- Tanaman Koleksi	
5	1	2	3	5	61	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi	
5	1	2	3	5	62	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi	
5	1	2	3	5	63	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil	
5	1	2	3	5	64	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	
5	1	2	3	5	65	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi	
5	1	2	3	6		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
5	1	2	3	6	001	Belanja Jasa Servis	
5	1	2	3	6	002	Belanja Penggantian Suku Cadang	
5	1	2	3	6	003	Belanja Minyak Pelumas	
5	1	2	3	6	004	Belanja Jasa KIR	
5	1	2	3	6	005	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	
5	1	2	3	6	006	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi	
5	1	2	3	6	007	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	
5	1	2	3	6	008	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
5	1	2	4			Belanja Perjalanan Dinas	
5	1	2	4	1		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
5	1	2	4	1	001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
5	1	2	4	2		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	
5	1	2	4	2	001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	
5	1	2	4	3		Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas	
5	1	2	4	3	001	Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas Dalam Daerah	
5	1	2	4	3	002	Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas Luar Daerah	
5	1	2	4	4		Belanja Pemulangan Pegawai	
5	1	2	4	4	001	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah	
5	1	2	4	4	002	Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	
5	1	2	5			Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
5	1	2	5	1		Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
5	1	2	5	1	001	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	
5	1	2	5	1	002	Belanja Barang dan/atau Jasa yang	
5	1	2	5	2		Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat atau Pihak Ketiga	
5	1	2	5	2	001	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat	
5	1	2	5	2	002	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Pihak Ketiga	
5	1	2	5	3		Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	
5	1	2	5	3	001	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	
5	1	2	5	3	002	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga	
5	1	3				Belanja Bunga	
5	1	3	1			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	
5	1	3	1	1		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
5	1	3	1	1	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat ... atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
5	1	3	1	1	002	Dst ...	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	3	1	2		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	
5	1	3	1	2	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat ... atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	
5	1	3	1	2	002	Dst ...	
5	1	3	1	3		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah	
5	1	3	1	3	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat ... atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah	
5	1	3	1	3	002	Dst ...	
5	1	3	1	4		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	
5	1	3	1	4	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat ... atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	
5	1	3	1	4	002	Dst ...	
5	1	3	1	5		Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	
5	1	3	1	5	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	
5	1	3	1	5	002	Dst ...	
5	1	3	1	6		Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang	
5	1	3	1	6	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang	
5	1	3	1	6	002	Dst ...	
5	1	3	2			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	
5	1	3	2	1		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek	
5	1	3	2	1	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah ...-Jangka Pendek	
5	1	3	2	1	002	Dst ...	
5	1	3	3			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	
5	1	3	3	1		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB- BUMN-Jangka Pendek	
5	1	3	3	1	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB- BUMN ...-Jangka Pendek	
5	1	3	3	1	002	Dst ...	
5	1	3	3	2		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB- BUMN-Jangka Menengah	
5	1	3	3	2	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB- BUMN ...-Jangka Menengah	
5	1	3	3	2	002	Dst ...	
5	1	3	3	3		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB- BUMN-Jangka Panjang	
5	1	3	3	3	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB- BUMN ...-Jangka Panjang	
5	1	3	3	3	002	Dst ...	
5	1	3	3	4		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB- BUMD-Jangka Pendek	
5	1	3	3	4	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB- BUMD ...-Jangka Pendek	
5	1	3	3	4	002	Dst ...	
5	1	3	3	5		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB- BUMD-Jangka Menengah	
5	1	3	3	5	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB- BUMD ...-Jangka Menengah	
5	1	3	3	5	002	Dst ...	
5	1	3	3	6		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB- BUMD-Jangka Panjang	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	3	3	6	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB- BUMD ...-Jangka Panjang	
5	1	3	3	6	002	Dst ...	
5	1	3	3	7		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB- Swasta-Jangka Pendek	
5	1	3	3	7	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB- Swasta ...-Jangka Pendek	
5	1	3	3	7	002	Dst ...	
5	1	3	3	8		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB- Swasta-Jangka Menengah	
5	1	3	3	8	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB- Swasta ...-Jangka Menengah	
5	1	3	3	8	002	Dst ...	
5	1	3	3	9		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB- Swasta-Jangka Panjang	
5	1	3	3	9	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB- Swasta ...-Jangka Panjang	
5	1	3	3	9	002	Dst ...	
5	1	3	4			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	
5	1	3	4	1		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMN-Jangka Pendek	
5	1	3	4	1	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Pendek	
5	1	3	4	1	002	Dst ...	
5	1	3	4	2		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah	
5	1	3	4	2	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Menengah	
5	1	3	4	2	002	Dst ...	
5	1	3	4	3		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang	
5	1	3	4	3	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Panjang	
5	1	3	4	3	002	Dst ...	
5	1	3	4	4		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMD-Jangka Pendek	
5	1	3	4	4	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Pendek	
5	1	3	4	4	002	Dst ...	
5	1	3	4	5		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah	
5	1	3	4	5	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Menengah	
5	1	3	4	5	002	Dst ...	
5	1	3	4	6		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMD-Jangka Panjang	
5	1	3	4	6	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Panjang	
5	1	3	4	6	002	Dst ...	
5	1	3	4	7		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-Swasta-Jangka Pendek	
5	1	3	4	7	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Pendek	
5	1	3	4	7	002	Dst ...	
5	1	3	4	8		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-Swasta-Jangka Menengah	
5	1	3	4	8	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Menengah	
5	1	3	4	8	002	Dst ...	
5	1	3	4	9		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-Swasta-Jangka Panjang	
5	1	3	4	9	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Panjang	
5	1	3	4	9	002	Dst ...	
5	1	3	5			Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	
5	1	3	5	1		Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	3	5	1	001	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	
5	1	3	6			Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD	
5	1	3	6	1		Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD- Jangka Pendek	
5	1	3	6	1	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD ... – Jangka Pendek	
5	1	3	6	1	002	Dst ...	
5	1	3	6	2		Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD- Jangka Menengah	
5	1	3	6	2	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD ... – Jangka Menengah	
5	1	3	6	2	002	Dst ...	
5	1	3	6	3		Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD- Jangka Panjang	
5	1	3	6	3	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD ... – Jangka Panjang	
5	1	3	6	3	002	Dst ...	
5	1	4				Belanja Subsidi	
5	1	4	1			Belanja Subsidi kepada BUMN	
5	1	4	1	1		Belanja Subsidi kepada BUMN	
5	1	4	1	1	001	Belanja Subsidi kepada BUMN ...	
5	1	4	1	1	002	Dst ...	
5	1	4	2			Belanja Subsidi kepada BUMD	
5	1	4	2	2		Belanja Subsidi kepada BUMD	
5	1	4	2	2	001	Belanja Subsidi kepada BUMD ...	
5	1	4	2	2	002	Dst ...	
5	1	4	3			Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	
5	1	4	3	1		Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	
5	1	4	3	1	001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta ...	
5	1	4	3	1	002	Dst ...	
5	1	5				Belanja Hibah	
5	1	5	1			Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	
5	1	5	1	1		Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	
5	1	5	1	1	001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat ...	
5	1	5	1	1	002	Dst ...	
5	1	5	1	2		Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	
5	1	5	1	2	001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	
5	1	5	1	2	002	Dst ...	
5	1	5	1	3		Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	
5	1	5	1	1	001	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat ...	
5	1	5	1	2	001	Dst ...	
5	1	5	2			Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
5	1	5	2	1		Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah	
5	1	5	2	1	001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah ...	
5	1	5	2	1	002	Dst ...	
5	1	5	2	2		Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
5	1	5	2	2	001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah ...	
5	1	5	2	2	002	Dst ...	
5	1	5	2	3		Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
5	1	5	2	3	001	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah ...	
5	1	5	2	3	002	Dst ...	
5	1	5	3			Belanja Hibah kepada BUMN	
5	1	5	3	1		Belanja Hibah Uang kepada BUMN	
5	1	5	3	1	001	Belanja Hibah Uang kepada BUMN ...	
5	1	5	3	1	002	Dst ...	
5	1	5	3	2		Belanja Hibah Barang kepada BUMN	
5	1	5	3	2	001	Belanja Hibah Barang kepada BUMN ...	
5	1	5	3	2	002	Dst ...	
5	1	5	3	3		Belanja Hibah Jasa kepada BUMN	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	5	3	3	001	Belanja Hibah Jasa kepada BUMN ...	
5	1	5	3	3	002	Dst ...	
5	1	5	4			Belanja Hibah kepada BUMD	
5	1	5	4	1		Belanja Hibah Uang kepada BUMD	
5	1	5	4	1	001	Belanja Hibah Uang kepada BUMD ...	
5	1	5	4	1	002	Dst ...	
5	1	5	4	2		Belanja Hibah Barang kepada BUMD	
5	1	5	4	2	001	Belanja Hibah Barang kepada BUMD ...	
5	1	5	4	2	002	Dst ...	
5	1	5	4	3		Belanja Hibah Jasa kepada BUMD	
5	1	5	4	3	001	Belanja Hibah Jasa kepada BUMD ...	
5	1	5	4	3	002	Dst ...	
5	1	5	5			Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	
5	1	5	5	1		Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	
5	1	5	5	1	001	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga ... yang Berbadan Hukum Indonesia	
5	1	5	5	1	002	Dst ...	
5	1	5	5	2		Belanja Hibah Barang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	
5	1	5	5	2	001	Belanja Hibah Barang kepada Badan/Lembaga ... yang Berbadan Hukum Indonesia	
5	1	5	5	2	002	Dst ...	
5	1	5	5	3		Belanja Hibah Jasa kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	
5	1	5	5	3	001	Belanja Hibah Jasa kepada Badan/Lembaga	
5	1	5	5	3	001	Dst ...	
5	1	5	5	4		Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	
5	1	5	5	4	001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia	
5	1	5	5	4	002	Dst ...	
5	1	5	5	5		Belanja Hibah Barang kepada Organisasi	
5	1	5	5	5	001	Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia	
5	1	5	5	5	002	Dst ...	
5	1	5	5	6		Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	
5	1	5	5	6	001	Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia	
5	1	5	5	6	002	Dst ...	
5	1	5	6			Belanja Hibah Dana BOS	
5	1	5	6	1		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	
5	1	5	6	1	001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri ...	
5	1	5	6	1	002	Dst ...	
5	1	5	6	2		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	
5	1	5	6	2	001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta ...	
5	1	5	6	2	002	Dst ...	
5	1	5	6	3		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	
5	1	5	6	3	001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta ...	
5	1	5	6	3	002	Dst ...	
5	1	5	6	4		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	1	5	6	4	001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta ...	
5	1	5	6	4	002	Dst ...	
5	1	5	7			Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	
5	1	5	7	1		Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	
5	1	5	7	1	001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ...	
5	1	5	7	1	002	Dst ...	
5	1	6				Belanja Bantuan Sosial	
5	1	6	1			Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	
5	1	6	1	1		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	
5	1	6	1	1	001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu...	
5	1	6	1	1	002	Dst ...	
5	1	6	1	2		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	
5	1	6	1	2	001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu ...	
5	1	6	1	2	002	Dst ...	
5	1	6	2			Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	
5	1	6	2	1		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	
5	1	6	2	1	001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga ...	
5	1	6	2	1	002	Dst ...	
5	1	6	2	2		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	
5	1	6	2	2	001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga ...	
5	1	6	2	2	002	Dst ...	
5	1	6	3			Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	
5	1	6	3	1		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	
5	1	6	3	1	001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat ...	
5	1	6	3	1	002	Dst ...	
5	1	6	3	2		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	
5	1	6	3	2	001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat ...	
5	1	6	3	2	002	Dst ...	
5	1	6	4			Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	
5	1	6	4	1		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	
5	1	6	4	1	001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) ...	
5	1	6	4	1	002	Dst ...	
5	1	6	4	2		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	
5	1	6	4	2	001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) ...	
5	1	6	4	2	002	Dst ...	
5	2					BELANJA MODAL	
5	2	1				Belanja Modal Tanah	
5	2	1	1			Belanja Modal Tanah	
5	2	1	1	1		Belanja Modal Tanah Persil	
5	2	1	1	1	001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	2	1	1	1	002	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	
5	2	1	1	1	003	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri	
5	2	1	1	1	004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	
5	2	1	1	1	005	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	
5	2	1	1	1	006	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	
5	2	1	1	1	007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	
5	2	1	1	2		Belanja Modal Tanah Non Persil	
5	2	1	1	2	001	Belanja Modal Tanah Basah	
5	2	1	1	2	002	Belanja Modal Tanah Kering	
5	2	1	1	2	003	Belanja Modal Tanah Perkebunan	
5	2	1	1	2	004	Belanja Modal Tanah Hutan	
5	2	1	1	2	005	Belanja Modal Tanah Tandus	
5	2	1	1	2	006	Belanja Modal Tanah Padang Alang- Alang/Rumput	
5	2	1	1	2	007	Belanja Modal Tanah Pertanian	
5	2	1	1	2	008	Belanja Modal Tanah Pertambangan	
5	2	1	1	2	009	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	
5	2	1	1	3		Belanja Modal Lapangan	
5	2	1	1	3	001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	
5	2	1	1	3	002	Belanja Modal Tanah Lapangan Parkir	
5	2	1	1	3	003	Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang	
5	2	1	1	3	004	Belanja Modal Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	
5	2	1	1	3	005	Belanja Modal Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	
5	2	1	1	3	006	Belanja Modal Tanah Lapangan Terbang	
5	2	1	1	3	007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	
5	2	1	1	3	008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	
5	2	1	1	3	009	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi	
5	2	1	1	3	10	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Jaringan	
5	2	1	1	3	11	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Bersejarah	
5	2	1	1	3	12	Belanja Modal Tanah untuk Makam	
5	2	1	1	3	13	Belanja Modal Tanah untuk Taman	
5	2	1	1	3	14	Belanja Modal Tanah untuk Latihan	
5	2	1	1	3	15	Belanja Modal Tanah Daerah Pertahanan	
5	2	1	1	3	16	Belanja Modal Tanah Lapangan PBB	
5	2	1	1	3	17	Belanja Modal Tanah Kampung	
5	2	1	1	3	18	Belanja Modal <i>Emplasment</i>	
5	2	1	1	3	19	Belanja Modal Lapangan Lainnya	
5	2	2				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
5	2	2	1			Belanja Modal Alat Besar	
5	2	2	1	1		Belanja Modal Alat Besar Darat	
5	2	2	1	1	001	Belanja Modal <i>Tractor</i>	
5	2	2	1	1	002	Belanja Modal <i>Grader</i>	
5	2	2	1	1	003	Belanja Modal <i>Excavator</i>	
5	2	2	1	1	004	Belanja Modal <i>Pile Driver</i>	
5	2	2	1	1	005	Belanja Modal <i>Hauler</i>	
5	2	2	1	1	006	Belanja Modal <i>Asphalt Equipment</i>	
5	2	2	1	1	007	Belanja Modal <i>Compacting Equipment</i>	
5	2	2	1	1	008	Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment	
5	2	2	1	1	009	Belanja Modal <i>Loader</i>	
5	2	2	1	1	10	Belanja Modal Alat Pengangkat	
5	2	2	1	1	11	Belanja Modal Mesin Proses	
5	2	2	1	1	12	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	
5	2	2	1	2		Belanja Modal Alat Besar Apung	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	2	2	1	2	001	Belanja Modal <i>Dredger</i>	
5	2	2	1	2	002	Belanja Modal <i>Floating Excavator</i>	
5	2	2	1	2	003	Belanja Modal <i>Amphibi Dredger</i>	
5	2	2	1	2	004	Belanja Modal Kapal Tarik	
5	2	2	1	2	005	Belanja Modal Mesin Proses Apung	
5	2	2	1	2	006	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	
5	2	2	1	3		Belanja Modal Alat Bantu	
5	2	2	1	3	001	Belanja Modal Alat Penarik	
5	2	2	1	3	002	Belanja Modal <i>Feeder</i>	
5	2	2	1	3	003	Belanja Modal <i>Compressor</i>	
5	2	2	1	3	004	Belanja Modal <i>Electric Generating Set</i>	
5	2	2	1	3	005	Belanja Modal Pompa	
5	2	2	1	3	006	Belanja Modal Mesin Bor	
5	2	2	1	3	007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	
5	2	2	1	3	008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	
5	2	2	1	3	009	Belanja Modal Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	
5	2	2	1	3	10	Belanja Modal Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	
5	2	2	1	3	11	Belanja Modal Mesin <i>Tatoo</i>	
5	2	2	1	3	12	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	
5	2	2	1	3	13	Belanja Modal Peralatan Selam	
5	2	2	1	3	14	Belanja Modal Peralatan SAR <i>Mountenering</i>	
5	2	2	1	3	15	Belanja Modal Peralatan Intelijen	
5	2	2	1	3	16	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	
5	2	2	2			Belanja Modal Alat Angkutan	
5	2	2	2	1		Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	
5	2	2	2	1	001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	
5	2	2	2	1	002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	
5	2	2	2	1	003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
5	2	2	2	1	004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	
5	2	2	2	1	005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	
5	2	2	2	1	006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	
5	2	2	2	1	007	Belanja Modal Kendaraan Tempur	
5	2	2	2	1	008	Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel	
5	2	2	2	1	009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	
5	2	2	2	2		Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
5	2	2	2	2	001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	
5	2	2	2	2	002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	
5	2	2	2	2	003	Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	
5	2	2	2	2	004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	
5	2	2	2	3		Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	
5	2	2	2	3	001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	
5	2	2	2	3	002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	
5	2	2	2	3	003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	
5	2	2	2	3	004	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	
5	2	2	2	3	005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	
5	2	2	2	4		Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	
5	2	2	2	4	001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	
5	2	2	2	4	002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	
5	2	2	2	4	003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	
5	2	2	2	4	004	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	
5	2	2	2	5		Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	2	2	2	5	001	Belanja Modal Kapal Terbang	
5	2	2	2	5	002	Belanja Modal Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya	
5	2	2	3			Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	
5	2	2	3	1		Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	
5	2	2	3	1	001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	
5	2	2	3	1	002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	
5	2	2	3	1	003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	
5	2	2	3	1	004	Belanja Modal Perkakas Bengkel <i>Service</i>	
5	2	2	3	1	005	Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin	
5	2	2	3	1	006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	
5	2	2	3	1	007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus	
5	2	2	3	1	008	Belanja Modal Peralatan Las	
5	2	2	3	1	009	Belanja Modal Perkakas Pabrik Es	
5	2	2	3	1	10	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	
5	2	2	3	2		Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	
5	2	2	3	2	001	Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	
5	2	2	3	2	002	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	
5	2	2	3	2	003	Belanja Modal Perkakas Bengkel <i>Service</i>	
5	2	2	3	2	004	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	
5	2	2	3	2	005	Belanja Modal Perkakas Standard (<i>Standard Tools</i>)	
5	2	2	3	2	006	Belanja Modal Perkakas Khusus (<i>Special Tools</i>)	
5	2	2	3	2	007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	
5	2	2	3	2	008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	
5	2	2	3	2	009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	
5	2	2	3	2	10	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	
5	2	2	3	2	11	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	
5	2	2	3	2	12	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	
5	2	2	3	2	13	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	
5	2	2	3	3		Belanja Modal Alat Ukur	
5	2	2	3	3	001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	
5	2	2	3	3	002	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Inteligensia	
5	2	2	3	3	003	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian	
5	2	2	3	3	004	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	
5	2	2	3	3	005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	
5	2	2	3	3	006	Belanja Modal <i>Oscilloscope</i>	
5	2	2	3	3	007	Belanja Modal <i>Universal Tester</i>	
5	2	2	3	3	008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	
5	2	2	3	3	009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	
5	2	2	3	3	10	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	
5	2	2	3	3	11	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	
5	2	2	3	3	12	Belanja Modal Takaran Kering	
5	2	2	3	3	13	Belanja Modal Takaran Bahan Bangunan	
5	2	2	3	3	14	Belanja Modal Takaran Lainnya	
5	2	2	3	3	15	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	
5	2	2	3	3	16	Belanja Modal <i>Specific Set</i>	
5	2	2	3	3	17	Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam	
5	2	2	3	3	18	Belanja Modal Alat Pengukur Penglihatan	
5	2	2	3	3	19	Belanja Modal Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu	
5	2	2	3	3	20	Belanja Modal Alat Ukur Instrument Workshop	
5	2	2	3	3	21	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	
5	2	2	4			Belanja Modal Alat Pertanian	
5	2	2	4	1		Belanja Modal Alat Pengolahan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	2	2	4	1	001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	
5	2	2	4	1	002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	
5	2	2	4	1	003	Belanja Modal Alat Panen	
5	2	2	4	1	004	Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	
5	2	2	4	1	005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	
5	2	2	4	1	006	Belanja Modal Alat <i>Processing</i>	
5	2	2	4	1	007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	
5	2	2	4	1	008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	
5	2	2	4	1	009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	
5	2	2	4	1	10	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	
5	2	2	5			Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	
5	2	2	5	1		Belanja Modal Alat Kantor	
5	2	2	5	1	001	Belanja Modal Mesin Ketik	
5	2	2	5	1	002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	
5	2	2	5	1	003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	
5	2	2	5	1	004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	
5	2	2	5	1	005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	
5	2	2	5	2		Belanja Modal Alat Rumah Tangga	
5	2	2	5	2	001	Belanja Modal Meubelair	
5	2	2	5	2	002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	
5	2	2	5	2	003	Belanja Modal Alat Pembersih	
5	2	2	5	2	004	Belanja Modal Alat Pendingin	
5	2	2	5	2	005	Belanja Modal Alat Dapur	
5	2	2	5	2	006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	
5	2	2	5	2	007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	
5	2	2	5	3		Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
5	2	2	5	3	001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	
5	2	2	5	3	002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	
5	2	2	5	3	003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	
5	2	2	5	3	004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	
5	2	2	5	3	005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	
5	2	2	5	3	006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	
5	2	2	5	3	007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	
5	2	2	6			Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
5	2	2	6	1		Belanja Modal Alat Studio	
5	2	2	6	1	001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	
5	2	2	6	1	002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	
5	2	2	6	1	003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	
5	2	2	6	1	004	Belanja Modal Peralatan Cetak	
5	2	2	6	1	005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	
5	2	2	6	1	006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	
5	2	2	6	2		Belanja Modal Alat Komunikasi	
5	2	2	6	2	001	Belanja Modal Alat Komunikasi <i>Telephone</i>	
5	2	2	6	2	002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	
5	2	2	6	2	003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	
5	2	2	6	2	004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	
5	2	2	6	2	005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	
5	2	2	6	2	006	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	
5	2	2	6	2	007	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	
5	2	2	6	2	008	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	
5	2	2	6	2	009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	
5	2	2	6	2	10	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	2	2	6	2	11	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	
5	2	2	6	3		Belanja Modal Peralatan Pemancar	
5	2	2	6	3	001	Belanja Modal Peralatan Pemancar MF/MW	
5	2	2	6	3	002	Belanja Modal Peralatan Pemancar HF/SW	
5	2	2	6	3	003	Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM	
5	2	2	6	3	004	Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF	
5	2	2	6	3	005	Belanja Modal Peralatan Pemancar SHF	
5	2	2	6	3	006	Belanja Modal Peralatan Antena MF/MW	
5	2	2	6	3	007	Belanja Modal Peralatan Antena HF/SW	
5	2	2	6	3	008	Belanja Modal Peralatan Antena VHF/FM	
5	2	2	6	3	009	Belanja Modal Peralatan Antena UHF	
5	2	2	6	3	10	Belanja Modal Peralatan Antena SHF/Parabola	
5	2	2	6	3	11	Belanja Modal Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF	
5	2	2	6	3	12	Belanja Modal Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF	
5	2	2	6	3	13	Belanja Modal Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF	
5	2	2	6	3	14	Belanja Modal Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF	
5	2	2	6	3	15	Belanja Modal Peralatan <i>Microwave</i> FPU	
5	2	2	6	3	16	Belanja Modal Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>	
5	2	2	6	3	17	Belanja Modal Peralatan <i>Microwave</i> TVRO	
5	2	2	6	3	18	Belanja Modal Peralatan <i>Dummy Load</i>	
5	2	2	6	3	19	Belanja Modal <i>Switcher</i> Antena	
5	2	2	6	3	20	Belanja Modal <i>Switcher</i> /Menara Antena	
5	2	2	6	3	21	Belanja Modal <i>Feeder</i>	
5	2	2	6	3	22	Belanja Modal <i>Humidity Control</i>	
5	2	2	6	3	23	Belanja Modal Program <i>Input Equipment</i>	
5	2	2	6	3	24	Belanja Modal Peralatan Antena Penerima VHF	
5	2	2	6	3	25	Belanja Modal Peralatan Pemancar LF	
5	2	2	6	3	26	Belanja Modal Unit Pemancar MF+HF	
5	2	2	6	3	27	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar MF+HF	
5	2	2	6	3	28	Belanja Modal Peralatan Penerima	
5	2	2	6	3	29	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima LF	
5	2	2	6	3	30	Belanja Modal Penerima MF	
5	2	2	6	3	31	Belanja Modal Penerima HF	
5	2	2	6	3	32	Belanja Modal Peralatan Penerima MF+HF	
5	2	2	6	3	33	Belanja Modal Penerima VHF	
5	2	2	6	3	34	Belanja Modal Penerima UHF	
5	2	2	6	3	35	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima SHF	
5	2	2	6	3	36	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF	
5	2	2	6	3	37	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF	
5	2	2	6	3	38	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF	
5	2	2	6	3	39	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF	
5	2	2	6	3	40	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF	
5	2	2	6	3	41	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	
5	2	2	6	3	42	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF	
5	2	2	6	3	43	Belanja Modal Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah	
5	2	2	6	3	44	Belanja Modal Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi	
5	2	2	6	3	45	Belanja Modal Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	
5	2	2	6	3	46	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio	
5	2	2	6	3	47	Belanja Modal Sumber Tenaga	
5	2	2	6	3	48	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	
5	2	2	6	4		Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	2	2	6	4	001	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System	
5	2	2	6	4	002	Belanja Modal Very High Frequence Omni Range (VOR)	
5	2	2	6	4	003	Belanja Modal <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>	
5	2	2	6	4	004	Belanja Modal Radar	
5	2	2	6	4	005	Belanja Modal Alat Pangatur Telekomunikasi	
5	2	2	6	4	006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	
5	2	2	6	4	007	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	
5	2	2	7			Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	
5	2	2	7	1		Belanja Modal Alat Kedokteran	
5	2	2	7	1	001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	
5	2	2	7	1	002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	
5	2	2	7	1	003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	
5	2	2	7	1	004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	
5	2	2	7	1	005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	
5	2	2	7	1	006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	
5	2	2	7	1	007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	
5	2	2	7	1	008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	
5	2	2	7	1	009	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	
5	2	2	7	1	10	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	
5	2	2	7	1	11	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	
5	2	2	7	1	12	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	
5	2	2	7	1	13	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	
5	2	2	7	1	14	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	
5	2	2	7	1	15	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	
5	2	2	7	1	16	Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	
5	2	2	7	1	17	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	
5	2	2	7	1	18	Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi	
5	2	2	7	1	19	Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir	
5	2	2	7	1	20	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	
5	2	2	7	1	21	Belanja Darurat	
5	2	2	7	1	22	Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa	
5	2	2	7	1	23	Belanja Ortopedi	
5	2	2	7	1	24	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	
5	2	2	7	1	25	Belanja Modal Alat Kedokteran ICCU	
5	2	2	7	1	26	Belanja	
5	2	2	7	1	27	Belanja Modal Alat Kedokteran Traditional Medicine	
5	2	2	7	1	28	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	
5	2	2	7	1	29	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	
5	2	2	7	2		Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	
5	2	2	7	2	001	Belanja Modal Alat Kesehatan Matra Laut	
5	2	2	7	2	002	Belanja Modal Alat Kesehatan Matra Udara	
5	2	2	7	2	003	Belanja Modal Alat Kesehatan Kepolisian	
5	2	2	7	2	004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	
5	2	2	7	2	005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	
5	2	2	8			Belanja Modal Alat Laboratorium	
5	2	2	8	1		Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	
5	2	2	8	1	001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	
5	2	2	8	1	002	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	
5	2	2	8	1	003	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrokimia	
5	2	2	8	1	004	Belanja Modal Alat Laboratorium Model Hidrolika	
5	2	2	8	1	005	Belanja Modal Alat Laboratorium Batuan/Geologi	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	2	2	8	1	006	Belanja Modal Alat Bangunan Konstruksi	
5	2	2	8	1	007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	
5	2	2	8	1	008	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	
5	2	2	8	1	009	Belanja Modal Alat Laboratorium Cocok Tanam	
5	2	2	8	1	10	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	
5	2	2	8	1	11	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	
5	2	2	8	1	12	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	
5	2	2	8	1	13	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	
5	2	2	8	1	14	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	
5	2	2	8	1	15	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi	
5	2	2	8	1	16	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	
5	2	2	8	1	17	Belanja Modal Alat Laboratorium Film	
5	2	2	8	1	18	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	
5	2	2	8	1	19	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	
5	2	2	8	1	20	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	
5	2	2	8	1	21	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrodinamika	
5	2	2	8	1	22	Belanja Modal Alat Laboratorium Klimatologi	
5	2	2	8	1	23	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Peleburan	
5	2	2	8	1	24	Belanja Modal Alat Laboratorium Pasir	
5	2	2	8	1	25	Belanja Modal Alat Pembuatan Cetakan	
5	2	2	8	1	26	Belanja Modal Alat Laboratorium Pembuatan Pola	
5	2	2	8	1	27	Belanja Modal Alat Laboratorium Metalografi	
5	2	2	8	1	28	Belanja Modal Pengelasan	
5	2	2	8	1	29	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	
5	2	2	8	1	30	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	
5	2	2	8	1	31	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	
5	2	2	8	1	32	Belanja Modal Alat Laboratorium Pelapisan Logam	
5	2	2	8	1	33	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	
5	2	2	8	1	34	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	
5	2	2	8	1	35	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Tekstil	
5	2	2	8	1	36	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	
5	2	2	8	1	37	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	
5	2	2	8	1	38	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik	
5	2	2	8	1	39	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Keramik	
5	2	2	8	1	40	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	
5	2	2	8	1	41	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	
5	2	2	8	1	42	Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	
5	2	2	8	1	43	Belanja Modal Alat Laboratorium Energi Surya	
5	2	2	8	1	44	Belanja Modal Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass	
5	2	2	8	1	45	Belanja Modal Alat Laboratorium Oseanografi	
5	2	2	8	1	46	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	
5	2	2	8	1	47	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi Perairan	
5	2	2	8	1	48	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	
5	2	2	8	1	49	Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika	
5	2	2	8	1	50	Belanja Modal Alat Laboratorium Tambang	
5	2	2	8	1	51	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	
5	2	2	8	1	52	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Industri	
5	2	2	8	1	53	Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan	
5	2	2	8	1	54	Belanja Modal Laboratorium Kearsipan	
5	2	2	8	1	55	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	
5	2	2	8	1	56	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	
5	2	2	8	1	57	Belanja Modal Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
						Sistem Propulasi	
5	2	2	8	1	58	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	
5	2	2	8	1	59	Belanja Modal Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim	
5	2	2	8	1	60	Belanja Modal Alat Laboratorium Teknik Pantai	
5	2	2	8	1	61	Belanja Modal Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi	
5	2	2	8	1	62	Belanja Modal Alat Laboratorium Populasi	
5	2	2	8	1	63	Belanja Modal Alat Pengukur Gelombang	
5	2	2	8	1	64	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	
5	2	2	8	2		Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
5	2	2	8	2	001	Belanja Modal <i>Analytical Instrument</i>	
5	2	2	8	2	002	Belanja Modal <i>Instrument Probe/Sensor</i>	
5	2	2	8	2	003	Belanja Modal <i>General Laboratory Tool</i>	
5	2	2	8	2	004	Belanja Modal <i>Glassware Plastic/Utensils</i>	
5	2	2	8	2	005	Belanja Modal <i>Laboratory Safety Equipment</i>	
5	2	2	8	2	006	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	
5	2	2	8	3		Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	
5	2	2	8	3	001	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	
5	2	2	8	3	002	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	
5	2	2	8	3	003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	
5	2	2	8	3	004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	
5	2	2	8	3	005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	
5	2	2	8	3	006	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	
5	2	2	8	3	007	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS	
5	2	2	8	3	008	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Agama	
5	2	2	8	3	009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	
5	2	2	8	3	10	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	
5	2	2	8	3	11	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	
5	2	2	8	3	12	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN	
5	2	2	8	3	13	Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	
5	2	2	8	3	14	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	
5	2	2	8	3	15	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	
5	2	2	8	3	16	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	
5	2	2	8	4		Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	
5	2	2	8	4	001	Belanja Modal <i>Radiation Detector</i>	
5	2	2	8	4	002	Belanja Modal Modular Counting and Scientific Electronic	
5	2	2	8	4	003	Belanja Modal <i>Assembly/Counting System</i>	
5	2	2	8	4	004	Belanja Modal <i>Recorder Display</i>	
5	2	2	8	4	005	Belanja Modal <i>System/Power Supply</i>	
5	2	2	8	4	006	Belanja Modal <i>Measuring/Testing Device</i>	
5	2	2	8	4	007	Belanja Modal <i>Opto Electronics</i>	
5	2	2	8	4	008	Belanja Modal <i>Accelerator</i>	
5	2	2	8	4	009	Belanja Modal <i>Reactor Experimental System</i>	
5	2	2	8	4	10	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	
5	2	2	8	5		Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	
5	2	2	8	5	001	Alat Ukur Fisika Kesehatan	
5	2	2	8	5	002	Alat Kesehatan Kerja	
5	2	2	8	5	003	Proteksi Lingkungan	
5	2	2	8	5	004	<i>Meteorological Equipment</i>	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	2	2	8	5	005	Sumber Radiasi	
5	2	2	8	5	006	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	
5	2	2	8	6		Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	
5	2	2	8	6	001	Belanja Modal Radiation Application Equipment	
5	2	2	8	6	002	Belanja Modal Non Destructive Test (NDT) Device	
5	2	2	8	6	003	Belanja Modal Peralatan Hidrologi	
5	2	2	8	6	004	Belanja Modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>	
5	2	2	8	7		Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
5	2	2	8	7	001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	
5	2	2	8	7	002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	
5	2	2	8	7	003	Belanja Modal Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	
5	2	2	8	7	004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	
5	2	2	8	7	005	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	
5	2	2	8	7	006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	
5	2	2	8	8		Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	
5	2	2	8	8	001	Belanja Modal <i>Towing Carriage</i>	
5	2	2	8	8	002	Belanja Modal <i>Wave Generator and Absorber</i>	
5	2	2	8	8	003	Belanja Modal Data Acquisition and Analyzing System	
5	2	2	8	8	004	Belanja Modal <i>Cavitation Tunnel</i>	
5	2	2	8	8	005	Belanja Modal <i>Overhead Cranes</i>	
5	2	2	8	8	006	Belanja Modal Peralatan Umum	
5	2	2	8	8	007	Belanja Modal Pemesinan:Model Ship Workshop	
5	2	2	8	8	008	Belanja Modal Pemesinan:Propeller Model Workshop	
5	2	2	8	8	009	Belanja Modal Pemesinan : Mechanical Workshop	
5	2	2	8	8	10	Belanja Modal Pemesinan:Precision Mechanical Workshop	
5	2	2	8	8	11	Belanja Modal Pemesinan: <i>Painting Shop</i>	
5	2	2	8	8	12	Belanja Modal Pemesinan:Ship Model Preparation Shop	
5	2	2	8	8	13	Belanja Modal Pemesinan: <i>Electrical Workshop</i>	
5	2	2	8	8	14	Belanja Modal MOB	
5	2	2	8	8	15	Belanja Modal <i>Photo and Film Equipment</i>	
5	2	2	8	8	16	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	
5	2	2	8	9		Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	
5	2	2	8	9	001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	
5	2	2	8	9	002	Belanja Modal Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	
5	2	2	8	9	003	Belanja Modal Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	
5	2	2	8	9	004	Belanja Modal Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	
5	2	2	8	9	005	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	
5	2	2	8	9	006	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	
5	2	2	8	9	007	Belanja Modal Alat Laboratorium Natus	
5	2	2	8	9	008	Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran	
5	2	2	8	9	009	Belanja Modal Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	
5	2	2	8	9	10	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Perangkat	
5	2	2	8	9	11	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	
5	2	2	10			Belanja Modal Komputer	
5	2	2	10	1		Belanja Modal Komputer Unit	
5	2	2	10	1	001	Belanja Modal Komputer Jaringan	
5	2	2	10	1	002	Belanja Modal <i>Personal Computer</i>	
5	2	2	10	1	003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	
5	2	2	10	2		Belanja Modal Peralatan Komputer	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	2	2	10	2	001	Belanja Modal Peralatan <i>Mainframe</i>	
5	2	2	10	2	002	Belanja Modal Peralatan <i>Mini Computer</i>	
5	2	2	10	2	003	Belanja Modal Peralatan <i>Personal Computer</i>	
5	2	2	10	2	004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	
5	2	2	10	2	005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	
5	2	2	11			Belanja Modal Alat Eksplorasi	
5	2	2	11	1		Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	
5	2	2	11	1	001	Belanja Modal Optik	
5	2	2	11	1	002	Belanja Modal Ukur/Instrumen	
5	2	2	11	1	003	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	
5	2	2	11	2		Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	
5	2	2	11	2	001	Belanja Modal Mekanik	
5	2	2	11	2	002	Belanja Modal Elektronik/ <i>Electric</i>	
5	2	2	11	2	003	Belanja Modal Manual	
5	2	2	11	2	004	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya	
5	2	2	12			Belanja Modal Alat Pengeboran	
5	2	2	12	1		Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	
5	2	2	12	1	001	Belanja Modal Bor Mesin Tumbuk	
5	2	2	12	1	002	Belanja Modal Bor Mesin Putar	
5	2	2	12	1	003	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya	
5	2	2	12	2		Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	
5	2	2	12	2	001	Belanja Modal Bangka	
5	2	2	12	2	002	Belanja Modal Pantek	
5	2	2	12	2	003	Belanja Modal Putar	
5	2	2	12	2	004	Belanja Modal Peralatan Bantu	
5	2	2	12	2	005	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya	
5	2	2	13			Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	
5	2	2	13	1		Belanja Modal Sumur	
5	2	2	13	1	001	Belanja Modal Peralatan Sumur Minyak	
5	2	2	13	1	002	Belanja Modal Sumur Pemboran	
5	2	2	13	1	003	Belanja Modal Sumur Lainnya	
5	2	2	13	2		Belanja Modal Produksi	
5	2	2	13	2	001	Belanja Modal RIG	
5	2	2	13	2	002	Belanja Modal Produksi Lainnya	
5	2	2	13	3		Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	
5	2	2	13	3	001	Belanja Modal Alat Pengolahan Minyak	
5	2	2	13	3	002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	
5	2	2	13	3	003	Belanja Modal Alat Pengolahan <i>Steam</i>	
5	2	2	13	3	004	Belanja Modal Alat Pengolahan <i>Wax</i>	
5	2	2	13	3	005	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya	
5	2	2	14			Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	
5	2	2	14	1		Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	
5	2	2	14	1	001	Belanja Modal Mekanik	
5	2	2	14	1	002	Belanja Modal Elektrik	
5	2	2	14	1	003	Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	
5	2	2	14	2		Belanja Modal Alat Bantu Produksi	
5	2	2	14	2	001	Belanja Modal Perawatan Sumur	
5	2	2	14	2	002	Belanja Modal Tes Unit	
5	2	2	14	2	003	Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya	
5	2	2	15			Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	
5	2	2	15	1		Belanja Modal Alat Deteksi	
5	2	2	15	1	001	Belanja Modal Radiasi	
5	2	2	15	1	002	Belanja Modal Suara	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	2	2	15	1	003	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	
5	2	2	15	2		Belanja Modal Alat Pelindung	
5	2	2	15	2	001	Belanja Modal Baju Pengaman	
5	2	2	15	2	002	Belanja Modal Masker	
5	2	2	15	2	003	Belanja Modal Topi Kerja	
5	2	2	15	2	004	Belanja Modal Sabuk Pengaman	
5	2	2	15	2	005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	
5	2	2	15	2	006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	
5	2	2	15	3		Belanja Modal Alat SAR	
5	2	2	15	3	001	Belanja Modal Alat Penolong	
5	2	2	15	3	002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	
5	2	2	15	3	003	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	
5	2	2	15	3	004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	
5	2	2	15	4		Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	
5	2	2	15	4	001	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan	
5	2	2	15	4	002	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan	
5	2	2	15	4	003	Belanja Modal Pendaratan	
5	2	2	15	4	004	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	
5	2	2	15	4	005	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	
5	2	2	15	4	006	Belanja Modal Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>	
5	2	2	15	4	007	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Lainnya	
5	2	2	16			Belanja Modal Alat Peraga	
5	2	2	16	1		Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	
5	2	2	16	1	001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	
5	2	2	16	1	002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	
5	2	2	16	1	003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan	
5	2	2	17			Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	
5	2	2	17	1		Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	
5	2	2	17	1	001	Belanja Modal Liquid-Liquid Contractor Equipment	
5	2	2	17	1	002	Belanja Modal <i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>	
5	2	2	17	1	003	Belanja Modal Solid-Solid Screening Equipment	
5	2	2	17	1	004	Belanja Modal <i>Solid-Solid Classifier</i>	
5	2	2	17	1	005	Belanja Modal <i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>	
5	2	2	17	1	006	Belanja Modal Solid Liquid Crystallization Equipment	
5	2	2	17	1	007	Belanja Modal Ion Exchange Absortion Equipment	
5	2	2	17	1	008	Belanja Modal <i>Leaching Equipment</i>	
5	2	2	17	1	009	Belanja Modal Gravity Sedimentation Equipment	
5	2	2	17	1	10	Belanja Modal Solid Liquid Filtering Equipment	
5	2	2	17	1	11	Belanja Modal <i>Centrifuge for Solid Liquid</i>	
5	2	2	17	1	12	Belanja Modal Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment	
5	2	2	17	1	13	Belanja Modal <i>Gas-Solid Drying Equipment</i>	
5	2	2	17	1	14	Belanja Modal Gas-Solid Fluidised Bed Equipment	
5	2	2	17	1	15	Belanja Modal Gas-Solid Separation Equipment	
5	2	2	17	1	16	Belanja Modal Gas-Liquid Distillation Equipment	
5	2	2	17	1	17	Belanja Modal Gas-Liquid Separation Equipment	
5	2	2	17	1	18	Belanja Modal <i>Isotope Separation Equipment</i>	
5	2	2	17	1	19	Belanja Modal Transport and Storage Equipment for Liquid	
5	2	2	17	1	20	Belanja Modal Solid Material Handling Equipment	
5	2	2	17	1	21	Belanja Modal Size Reduction Size Balargement Equipment	
5	2	2	17	1	22	Belanja Modal <i>Heat Generating Equipment</i>	
5	2	2	17	1	23	Belanja Modal <i>Heat Transfer Equipment</i>	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	2	2	17	1	24	Belanja Modal <i>Mechanical Process</i>	
5	2	2	17	1	25	Belanja Modal <i>Chemical Reaction Equipment</i>	
5	2	2	17	1	26	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	
5	2	2	18			Belanja Modal Rambu-Rambu	
5	2	2	18	1		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	
5	2	2	18	1	001	Belanja Modal Rambu Bersuar	
5	2	2	18	1	002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	
5	2	2	18	1	003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	
5	2	2	18	2		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
5	2	2	18	2	001	Belanja Modal <i>Runway/Threshold Light</i>	
5	2	2	18	2	002	Belanja Modal Visual Approach Slope Indicator (VASI)	
5	2	2	18	2	003	Belanja Modal <i>Approach Light</i>	
5	2	2	18	2	004	Belanja Modal Runway Identification Light (REILS)	
5	2	2	18	2	005	Belanja Modal <i>Signal</i>	
5	2	2	18	2	006	Belanja Modal <i>Flood Lights</i>	
5	2	2	18	2	007	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	
5	2	2	18	3		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	
5	2	2	18	3	001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	
5	2	2	18	3	002	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	
5	2	2	19			Belanja Modal Peralatan Olahraga	
5	2	2	19	1		Belanja Modal Peralatan Olahraga	
5	2	2	19	1	001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	
5	2	2	19	1	002	Belanja Modal Peralatan Permainan	
5	2	2	19	1	003	Belanja Modal Peralatan Senam	
5	2	2	19	1	004	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air	
5	2	2	19	1	005	Belanja Modal Peralatan Olahraga Udara	
5	2	2	19	1	006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	
5	2	3				Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
5	2	3	1			Belanja Modal Bangunan Gedung	
5	2	3	1	1		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	
5	2	3	1	1	001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	
5	2	3	1	1	002	Belanja Modal Bangunan Gudang	
5	2	3	1	1	003	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	
5	2	3	1	1	004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	
5	2	3	1	1	005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	
5	2	3	1	1	006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	
5	2	3	1	1	007	Belanja Modal Bangunan Oseanarium/Observatorium	
5	2	3	1	1	008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
5	2	3	1	1	009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	
5	2	3	1	1	10	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
5	2	3	1	1	11	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	
5	2	3	1	1	12	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	
5	2	3	1	1	13	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	
5	2	3	1	1	14	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	
5	2	3	1	1	15	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan	
5	2	3	1	1	16	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	
5	2	3	1	1	17	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	
5	2	3	1	1	18	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	
5	2	3	1	1	19	Belanja Modal Bangunan Pengujian Kelaikan	
5	2	3	1	1	20	Belanja Modal Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan	
5	2	3	1	1	21	Belanja Modal Bangunan Rumah Tahanan	
5	2	3	1	1	22	Belanja Modal Bangunan Gedung Krematorium	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	2	3	1	1	23	Belanja Modal Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	
5	2	3	1	1	24	Belanja Modal Bangunan Tempat Persidangan	
5	2	3	1	1	25	Belanja Modal Bangunan Terbuka	
5	2	3	1	1	26	Belanja Modal Bangunan Penampung Sekam	
5	2	3	1	1	27	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
5	2	3	1	1	28	Belanja Modal Bangunan Industri	
5	2	3	1	1	29	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	
5	2	3	1	1	30	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
5	2	3	1	1	31	Belanja Modal Bangunan Peralatan Geofisika	
5	2	3	1	1	32	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	
5	2	3	1	1	33	Belanja Modal Bangunan Parkir	
5	2	3	1	1	34	Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik	
5	2	3	1	1	35	Belanja Modal Bangunan Stasiun Bus	
5	2	3	1	1	36	Belanja Modal Taman	
5	2	3	1	1	37	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
5	2	3	1	2		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
5	2	3	1	2	001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	
5	2	3	1	2	002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	
5	2	3	1	2	003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	
5	2	3	1	2	004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	
5	2	3	1	2	005	Belanja Modal Asrama	
5	2	3	1	2	006	Belanja Modal Hotel	
5	2	3	1	2	007	Belanja Modal Motel	
5	2	3	1	2	008	Belanja Modal Flat/Rumah Susun	
5	2	3	1	2	009	Belanja Modal Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	
5	2	3	1	2	10	Belanja Modal Panti Asuhan	
5	2	3	1	2	11	Belanja Modal Apartemen	
5	2	3	1	2	12	Belanja Modal Rumah Tidak Bersusun	
5	2	3	1	2	13	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	
5	2	3	2			Belanja Modal Monumen	
5	2	3	2	1		Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	
5	2	3	2	1	001	Belanja Modal Candi	
5	2	3	2	1	002	Belanja Modal Tugu	
5	2	3	2	1	003	Belanja Modal Bangunan Peninggalan	
5	2	3	2	1	004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	
5	2	3	3			Belanja Modal Bangunan Menara	
5	2	3	3	1		Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	
5	2	3	3	1	001	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	
5	2	3	3	1	002	Belanja Modal Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	
5	2	3	3	1	003	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	
5	2	3	3	1	004	Belanja Modal Bangunan Menara Pengawas	
5	2	3	3	1	005	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	
5	2	3	4			Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	
5	2	3	4	1		Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	
5	2	3	4	1	001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	
5	2	3	4	1	002	Belanja Modal Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	
5	2	3	4	1	003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	
5	2	3	4	1	004	Belanja Modal Pagar	
5	2	3	4	1	005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	
5	2	4				Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
5	2	4	1			Belanja Modal Jalan dan Jembatan	
5	2	4	1	1		Belanja Modal Jalan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	2	4	1	1	001	Belanja Modal Jalan Nasional	
5	2	4	1	1	002	Belanja Modal Jalan Provinsi	
5	2	4	1	1	003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	
5	2	4	1	1	004	Belanja Modal Jalan Kota	
5	2	4	1	1	005	Belanja Modal Jalan Desa	
5	2	4	1	1	006	Belanja Modal Jalan Tol	
5	2	4	1	1	007	Belanja Modal Jalan Kereta Api	
5	2	4	1	1	008	Belanja Modal Landasan Pacu Pesawat Terbang	
5	2	4	1	1	009	Belanja Modal Jalan Khusus	
5	2	4	1	1	10	Belanja Modal Jalan Lainnya	
5	2	4	1	2		Belanja Modal Jembatan	
5	2	4	1	2	001	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Nasional	
5	2	4	1	2	002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	
5	2	4	1	2	003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan	
5	2	4	1	2	004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	
5	2	4	1	2	005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	
5	2	4	1	2	006	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Tol	
5	2	4	1	2	007	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kereta Api	
5	2	4	1	2	008	Belanja Modal Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	
5	2	4	1	2	009	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus	
5	2	4	1	2	10	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	
5	2	4	1	2	11	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	
5	2	4	1	2	12	Belanja Modal Jembatan Pengukur	
5	2	4	1	2	13	Belanja Modal Jembatan Lainnya	
5	2	4	2			Belanja Modal Bangunan Air	
5	2	4	2	1		Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	
5	2	4	2	1	001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	
5	2	4	2	1	002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	
5	2	4	2	1	003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	
5	2	4	2	1	004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	
5	2	4	2	1	005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	
5	2	4	2	1	006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	
5	2	4	2	1	007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	
5	2	4	2	1	008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	
5	2	4	2	2		Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	
5	2	4	2	2	001	Belanja Surut	
5	2	4	2	2	002	Belanja Modal Pasang Surut	
5	2	4	2	2	003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut	
5	2	4	2	2	004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	
5	2	4	2	2	005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut	
5	2	4	2	2	006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pasang Surut	
5	2	4	2	2	007	Belanja Modal Bangunan Sawah Pasang Surut	
5	2	4	2	2	008	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	
5	2	4	2	3		Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	
5	2	4	2	3	001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	
5	2	4	2	3	002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	
5	2	4	2	3	003	Belanja Modal Pengembangan Rawa	
5	2	4	2	3	004	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa	
5	2	4	2	3	005	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa	
5	2	4	2	3	006	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa	
5	2	4	2	3	007	Belanja Modal Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	
5	2	4	2	3	008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	2	4	2	4		Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	
5	2	4	2	4	001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	
5	2	4	2	4	002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	
5	2	4	2	4	003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	
5	2	4	2	4	004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	
5	2	4	2	4	005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	
5	2	4	2	4	006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	
5	2	4	2	4	007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	
5	2	4	2	5		Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
5	2	4	2	5	001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	
5	2	4	2	5	002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	
5	2	4	2	5	003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	
5	2	4	2	5	004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	
5	2	4	2	5	005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	
5	2	4	2	5	006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	
5	2	4	2	5	007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	
5	2	4	2	5	008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	
5	2	4	2	6		Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	
5	2	4	2	6	001	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	
5	2	4	2	6	002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	
5	2	4	2	6	003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	
5	2	4	2	6	004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	
5	2	4	2	6	005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	
5	2	4	2	6	006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	
5	2	4	2	7		Belanja Modal Bangunan Air Kotor	
5	2	4	2	7	001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	
5	2	4	2	7	002	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Kotor	
5	2	4	2	7	003	Belanja Kotor	
5	2	4	2	7	004	Belanja Kotor	
5	2	4	2	7	005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	
5	2	4	2	7	006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	
5	2	4	3			Belanja Modal Instalasi	
5	2	4	3	1		Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	
5	2	4	3	1	001	Belanja Modal Instalasi Air Permukaan	
5	2	4	3	1	002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	
5	2	4	3	1	003	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	
5	2	4	3	1	004	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal	
5	2	4	3	1	005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	
5	2	4	3	2		Belanja Modal Instalasi Air Kotor	
5	2	4	3	2	001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	
5	2	4	3	2	002	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Industri	
5	2	4	3	2	003	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Pertanian	
5	2	4	3	2	004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	
5	2	4	3	3		Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	
5	2	4	3	3	001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	
5	2	4	3	3	002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	
5	2	4	3	3	003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	2	4	3	3	004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	
5	2	4	3	4		Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
5	2	4	3	4	001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan	
5	2	4	3	4	002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	
5	2	4	3	4	003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	
5	2	4	3	4	004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	
5	2	4	3	5		Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	
5	2	4	3	5	001	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	
5	2	4	3	5	002	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	
5	2	4	3	5	003	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	
5	2	4	3	5	004	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	
5	2	4	3	5	005	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	
5	2	4	3	5	006	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	
5	2	4	3	5	007	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	
5	2	4	3	5	008	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	
5	2	4	3	5	009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	
5	2	4	3	5	10	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	
5	2	4	3	5	11	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/ Gelombang Samudera	
5	2	4	3	5	12	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	
5	2	4	3	6		Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	
5	2	4	3	6	001	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Induk	
5	2	4	3	6	002	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi	
5	2	4	3	6	003	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik	
5	2	4	3	6	004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	
5	2	4	3	7		Belanja Modal Instalasi Pertahanan	
5	2	4	3	7	001	Belanja Modal Instalasi Pertahanan di Darat	
5	2	4	3	7	002	Belanja Modal Instalasi Pertahanan Lainnya	
5	2	4	3	8		Belanja Modal Instalasi Gas	
5	2	4	3	8	001	Belanja Modal Instalasi Gardu Gas	
5	2	4	3	8	002	Belanja Modal Instalasi Jaringan Pipa Gas	
5	2	4	3	8	003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Gas	
5	2	4	3	8	004	Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya	
5	2	4	3	9		Belanja Modal Instalasi Pengaman	
5	2	4	3	9	001	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	
5	2	4	3	9	002	Belanja Modal Instalasi Reaktor Nuklir	
5	2	4	3	9	003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	
5	2	4	3	9	004	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	
5	2	4	3	10		Belanja Modal Instalasi Lain	
5	2	4	3	10	001	Belanja Modal Instalasi Lain	
5	2	4	4			Belanja Modal Jaringan	
5	2	4	4	1		Belanja Modal Jaringan Air Minum	
5	2	4	4	1	001	Belanja Modal Jaringan Pembawa	
5	2	4	4	1	002	Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi	
5	2	4	4	1	003	Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi	
5	2	4	4	1	004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	
5	2	4	4	1	005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	
5	2	4	4	2		Belanja Modal Jaringan Listrik	
5	2	4	4	2	001	Belanja Modal Jaringan Transmisi	
5	2	4	4	2	002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	2	4	4	2	003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	
5	2	4	4	3		Belanja Modal Jaringan Telepon	
5	2	4	4	3	001	Belanja Modal Jaringan Telepon di atas Tanah	
5	2	4	4	3	002	Belanja Modal Jaringan Telepon di bawah Tanah	
5	2	4	4	3	003	Belanja Modal Jaringan Telepon di dalam Air	
5	2	4	4	3	004	Belanja Modal Jaringan dengan Media Udara	
5	2	4	4	3	005	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	
5	2	4	4	4		Belanja Modal Jaringan Gas	
5	2	4	4	4	001	Belanja Modal Jaringan Pipa Gas Transmisi	
5	2	4	4	4	002	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	
5	2	4	4	4	003	Belanja Modal Jaringan Pipa Dinas	
5	2	4	4	4	004	Belanja Modal Jaringan BBM	
5	2	4	4	4	005	Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya	
5	2	5				Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
5	2	5	1			Belanja Modal Bahan Perpustakaan	
5	2	5	1	1		Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	
5	2	5	1	1	001	Belanja Modal Buku Umum	
5	2	5	1	1	002	Belanja Modal Buku Filsafat	
5	2	5	1	1	003	Belanja Modal Buku Agama	
5	2	5	1	1	004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	
5	2	5	1	1	005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	
5	2	5	1	1	006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	
5	2	5	1	1	007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	
5	2	5	1	1	008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	
5	2	5	1	1	009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	
5	2	5	1	1	10	Belanja Modal Serial	
5	2	5	1	1	11	Belanja Modal Buku Laporan	
5	2	5	1	1	12	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	
5	2	5	1	2		Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	
5	2	5	1	2	001	Belanja Modal Audio Visual	
5	2	5	1	2	002	Belanja Modal Bentuk Mikro (<i>Microform</i>)	
5	2	5	1	2	003	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	
5	2	5	1	3		Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	
5	2	5	1	3	001	Belanja Modal Bahan Kartografi	
5	2	5	1	3	002	Belanja Modal Naskah (Manuskrip)/Asli	
5	2	5	1	3	003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	
5	2	5	1	3	004	Belanja Modal Kartografi, Naskah, Dan Lukisan Lainnya	
5	2	5	1	4		Belanja Modal Musik	
5	2	5	1	4	001	Belanja Modal Karya Musik	
5	2	5	1	4	002	Belanja Modal Musik Lainnya	
5	2	5	1	5		Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)	
5	2	5	1	5	001	Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)	
5	2	5	1	5	002	Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya	
5	2	5	1	6		Belanja Modal Three Dimensional Artifacts and Realita	
5	2	5	1	6	001	Belanja Modal Three Dimensional Artifacts And Realita	
5	2	5	1	6	002	Belanja Modal Three Dimensional Artifacts And Realita Lainnya	
5	2	5	1	7		Belanja Modal <i>Tarscalt</i>	
5	2	5	1	7	001	Belanja Modal <i>Tarscalt</i>	
5	2	5	1	7	002	Belanja Modal <i>Tarscalt</i> Lainnya	
5	2	5	2			Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
5	2	5	2	1		Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	2	5	2	1	001	Belanja Modal Alat Musik	
5	2	5	2	1	002	Belanja Modal Lukisan	
5	2	5	2	1	003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	
5	2	5	2	1	004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	
5	2	5	2	2		Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	
5	2	5	2	2	001	Belanja Modal Pahatan	
5	2	5	2	2	002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	
5	2	5	2	2	003	Belanja Modal Barang Kerajinan	
5	2	5	2	2	004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	
5	2	5	2	3		Belanja Modal Tanda Penghargaan	
5	2	5	2	3	001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	
5	2	5	2	3	002	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	
5	2	5	3			Belanja Modal Hewan	
5	2	5	3	1		Belanja Modal Hewan Piaraan	
5	2	5	3	1	001	Belanja Modal Hewan Pengaman	
5	2	5	3	1	002	Belanja Modal Hewan Pengangkut	
5	2	5	3	1	003	Belanja Modal Hewan Kebun Binatang	
5	2	5	3	1	004	Belanja Modal Hewan Piaraan Lainnya	
5	2	5	3	2		Belanja Modal Ternak	
5	2	5	3	2	001	Belanja Modal Ternak Potong	
5	2	5	3	2	002	Belanja Modal Ternak Perah	
5	2	5	3	2	003	Belanja Modal Ternak Unggas	
5	2	5	3	2	004	Belanja Modal Ternak Lainnya	
5	2	5	3	3		Belanja Modal Hewan Lainnya	
1	3	5	3	3	001	Belanja Modal Hewan Lainnya	
5	2	5	4			Belanja Modal Biota Perairan	
5	2	5	4	1		Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	
1	3	5	4	1	001	Belanja Modal Ikan Budidaya	
5	2	5	4	2		Belanja Modal Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	
5	2	5	4	2	001	Belanja Modal Crustea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)	
5	2	5	4	3		Belanja Modal Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)	
5	2	5	4	3	001	Belanja Modal Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)	
5	2	5	4	4		Belanja Modal <i>Coelenterata</i> (Ubur-ubur dan	
5	2	5	4	4	001	Belanja Modal <i>Coelenterata</i> Budidaya (Ubur- ubur dan Sebangsanya)	
5	2	5	4	5		Belanja Modal <i>Echinodermata</i> (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)	
5	2	5	4	5	001	Belanja Modal Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)	
5	2	5	4	6		Belanja Modal Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)	
5	2	5	4	6	001	Belanja Modal Amphibia Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)	
5	2	5	4	7		Belanja Modal Reptilia (Buaya, Penyu, Kura- kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)	
5	2	5	4	7	001	Belanja Modal Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)	
5	2	5	4	8		Belanja Modal Mammalia (Paus, Lumba- lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)	
5	2	5	4	8	001	Belanja Modal Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)	
5	2	5	4	9		Belanja Modal Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di Dalam Air)	
5	2	5	4	9	001	Belanja Modal Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	2	5	4	10		Belanja Modal Biota Perairan Lainnya	
5	2	5	4	10	001	Belanja Modal Budidaya Biota Perairan Lainnya	
5	2	5	5			Belanja Modal Tanaman	
5	2	5	5	1		Belanja Modal Tanaman	
5	2	5	5	1	001	Belanja Modal Tanaman	
5	2	5	6			Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	
5	2	5	6	1		Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	
5	2	5	6	1	001	Belanja Modal Hewan Koleksi	
5	2	5	6	1	002	Belanja Modal Biota Perairan Koleksi	
5	2	5	6	1	003	Belanja Modal Tanaman Koleksi	
5	2	5	6	1	004	Belanja Modal Mikroba Koleksi	
5	2	5	6	1	005	Belanja Modal Batuan Koleksi	
5	2	5	6	1	006	Belanja Modal Fosil	
5	2	5	6	1	007	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	
5	2	5	7			Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	
5	2	5	7	1		Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	
5	2	5	7	1	001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	
5	3					BELANJA TIDAK TERDUGA	
5	3	1				Belanja Tidak Terduga	
5	3	1	1			Belanja Tidak Terduga	
5	3	1	1	1		Belanja Tidak Terduga	
5	3	1	1	1	001	Belanja Tidak Terduga	
5	4					BELANJA TRANSFER	
5	4	1				Belanja Bagi Hasil	
5	4	1	1			Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	
5	4	1	1	1		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	
5	4	1	1	1	001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten ...	
5	4	1	1	1	002	Dst ...	
5	4	1	1	2		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	
5	4	1	1	2	001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota ...	
5	4	1	1	2	002	Dst ...	
5	4	1	1	3		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
5	4	1	1	3	001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ...	
5	4	1	1	3	002	Dst ...	
5	4	2				Belanja Bantuan Keuangan	
5	4	2	1			Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	
5	4	2	1	1		Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	
5	4	2	1	1	001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi ...	
5	4	2	1	1	002	Dst ...	
5	4	2	1	2		Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	
5	4	2	1	2	001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi ...	
5	4	2	1	2	002	Dst ...	
5	4	2	2			Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	
5	4	2	2	1		Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	
5	4	2	2	1	001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ...	
5	4	2	2	1	002	Dst ...	
5	4	2	2	2		Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	
5	4	2	2	2	001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota ...	
5	4	2	2	2	002	Dst ...	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
5	4	2	3			Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	
5	4	2	3	1		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	
5	4	2	3	1	001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota ...	
5	4	2	3	1	002	Dst ...	
5	4	2	3	2		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	
5	4	2	3	2	001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota ...	
5	4	2	3	2	002	Dst ...	
5	4	2	4			Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	
5	4	2	4	1		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	
5	4	2	4	1	001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi ...	
5	4	2	4	1	002	Dst ...	
5	4	2	4	2		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	
5	4	2	4	2	001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi ...	
5	4	2	4	2	002	Dst ...	
5	4	2	5			Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	
5	4	2	5	1		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	
5	4	2	5	1	001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ...	
5	4	2	5	1	002	Dst ...	
5	4	2	5	2		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	
5	4	2	5	2	001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ...	
5	4	2	5	2	002	Dst ...	
5	4	2	6			Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	
5	4	2	6	1		Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	
5	4	2	6	1	001	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota ...	
5	4	2	6	1	002	Dst ...	
6						PEMBIAYAAN DAERAH	
6	1					PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
6	1	1				Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
6	1	1	1			Pelampauan Penerimaan PAD	
6	1	1	1	1		Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	
6	1	1	1	1	001	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	
6	1	1	1	1	002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	
6	1	1	1	1	003	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bahan	
6	1	1	1	1	004	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Permukaan	
6	1	1	1	1	005	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Rokok	
6	1	1	1	1	006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	
6	1	1	1	1	007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	
6	1	1	1	1	008	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan	
6	1	1	1	1	009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	
6	1	1	1	1	10	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	
6	1	1	1	1	11	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir	
6	1	1	1	1	12	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah	
6	1	1	1	1	13	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Sarang Burung Walet	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
6	1	1	1	1	14	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
6	1	1	1	1	15	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	
6	1	1	1	1	16	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
6	1	1	1	2		Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	
6	1	1	1	2	001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	
6	1	1	1	2	002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa	
6	1	1	1	2	003	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu	
6	1	1	1	3		Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6	1	1	1	3	001	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	
6	1	1	1	3	002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	
6	1	1	1	4		Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	
6	1	1	1	4	001	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	
6	1	1	1	4	002	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	
6	1	1	1	4	003	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	
6	1	1	1	4	004	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Kerja Sama Daerah	
6	1	1	1	4	005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	
6	1	1	1	4	006	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.	
6	1	1	1	4	007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga	
6	1	1	1	4	008	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	
6	1	1	1	4	009	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	
6	1	1	1	4	10	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	
6	1	1	1	4	11	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
6	1	1	1	4	12	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	
6	1	1	1	4	13	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah	
6	1	1	1	4	14	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	
6	1	1	1	4	15	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	
6	1	1	1	4	16	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari BLUD	
6	1	1	1	4	17	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	
6	1	1	1	4	18	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	
6	1	1	1	4	19	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
6	1	1	1	4	20	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	
6	1	1	1	4	21	Pelampauan Penerimaan PAD-Pelanggaran Peraturan Daerah	
6	1	1	1	4	22	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Zakat	
6	1	1	2			Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	
6	1	1	2	1		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	
6	1	1	2	1	001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan	
6	1	1	2	1	002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Insentif Daerah	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
6	1	1	2	1	003	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Otonomi Khusus	
6	1	1	2	1	004	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Keistimewaan	
6	1	1	2	1	005	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Desa	
6	1	1	2	2		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	
6	1	1	2	2	001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	
6	1	1	2	2	002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan	
6	1	1	3			Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	
6	1	1	3	1		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	
6	1	1	3	1	001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
6	1	1	3	1	002	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	
6	1	1	3	1	003	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	
6	1	1	3	1	004	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri	
6	1	1	3	1	005	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	
6	1	1	3	2		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Dana Darurat	
6	1	1	3	2	001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Dana Darurat	
6	1	1	3	3		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
6	1	1	3	3	001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
6	1	1	4			Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	
6	1	1	4	1		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pencairan Dana Cadangan	
6	1	1	4	1	001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-	
6	1	1	4	2		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6	1	1	4	2	001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN	
6	1	1	4	2	002	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD	
6	1	1	4	3		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Pinjaman Daerah	
6	1	1	4	3	001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	
6	1	1	4	3	002	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	
6	1	1	4	3	003	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank	
6	1	1	4	3	004	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
6	1	1	4	3	005	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pinjaman Daerah dari Masyarakat	
6	1	1	4	4		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
6	1	1	4	4	001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah	
6	1	1	4	4	002	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
6	1	1	4	4	003	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
6	1	1	4	4	004	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
6	1	1	4	4	005	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	
6	1	1	4	4	006	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD	
6	1	1	4	4	007	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN	
6	1	1	4	4	008	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN	
6	1	1	4	4	009	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	
6	1	1	4	4	10	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	
6	1	1	4	4	11	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada	
6	1	1	4	4	12	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	
6	1	1	4	4	13	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD	
6	1	1	4	5		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	
6	1	1	4	5	001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD	
6	1	1	5			Penghematan Belanja	
6	1	1	5	1		Penghematan Belanja-Belanja Operasi	
6	1	1	5	1	001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	
6	1	1	5	1	002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	
6	1	1	5	1	003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	
6	1	1	5	1	004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	
6	1	1	5	1	005	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	
6	1	1	5	1	006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	
6	1	1	5	1	007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Barang	
6	1	1	5	1	008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	
6	1	1	5	1	009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Pemeliharaan	
6	1	1	5	1	10	Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Perjalanan Dinas	
6	1	1	5	1	11	Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Barang dan/atau Jasa untuk	
6	1	1	5	1	12	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	
6	1	1	5	1	13	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
6	1	1	5	1	14	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	
6	1	1	5	1	15	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
6	1	1	5	1	16	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Masyarakat (Obligasi)	
6	1	1	5	1	17	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman BLUD	
6	1	1	5	1	18	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMN	
6	1	1	5	1	19	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMD	
6	1	1	5	1	20	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	
6	1	1	5	1	21	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Pusat	
6	1	1	5	1	22	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
6	1	1	5	1	23	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada BUMN	
6	1	1	5	1	24	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada BUMD	
6	1	1	5	1	25	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	
6	1	1	5	1	26	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS	
6	1	1	5	1	27	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	
6	1	1	5	1	28	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-	
6	1	1	5	1	29	Penghematan Belanja Bantuan Sosial- Bantuan Sosial kepada Keluarga	
6	1	1	5	1	30	Penghematan Belanja Bantuan Sosial- Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	
6	1	1	5	1	31	Penghematan Belanja Bantuan Sosial- Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	
6	1	1	5	2		Penghematan Belanja-Belanja Modal	
6	1	1	5	2	001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	
6	1	1	5	2	002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	
6	1	1	5	2	003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	
6	1	1	5	2	004	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur	
6	1	1	5	2	005	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian	
6	1	1	5	2	006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	
6	1	1	5	2	007	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
6	1	1	5	2	008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	
6	1	1	5	2	009	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	
6	1	1	5	2	10	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	
6	1	1	5	2	11	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi	
6	1	1	5	2	12	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran	
6	1	1	5	2	13	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	
6	1	1	5	2	14	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi	
6	1	1	5	2	15	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja	
6	1	1	5	2	16	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga	
6	1	1	5	2	17	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi	
6	1	1	5	2	18	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu	
6	1	1	5	2	19	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga	
6	1	1	5	2	20	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	
6	1	1	5	2	21	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen	
6	1	1	5	2	22	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara	
6	1	1	5	2	23	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti	
6	1	1	5	2	24	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	
6	1	1	5	2	25	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	
6	1	1	5	2	26	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi	
6	1	1	5	2	27	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	
6	1	1	5	2	28	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
						Perpustakaan	
6	1	1	5	2	29	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
6	1	1	5	2	30	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan	
6	1	1	5	2	31	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan	
6	1	1	5	2	32	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman	
6	1	1	5	2	33	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya	
6	1	1	5	2	34	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi	
6	1	1	5	3		Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	
6	1	1	5	3	001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	
6	1	1	5	4		Sisa Belanja Transfer	
6	1	1	5	4	001	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	
6	1	1	5	4	002	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	
6	1	1	5	4	003	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	
6	1	1	5	4	004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan	
6	1	1	5	4	005	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	
6	1	1	5	4	006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	
6	1	1	5	4	007	Sisa Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	
6	1	1	6			Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	
6	1	1	6	1		Uang Jaminan	
6	1	1	6	1	001	Uang Jaminan	
6	1	1	7			Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	
6	1	1	7	1		Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	
6	1	1	7	1	001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	
6	1	1	7	2		Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	
6	1	1	7	2	001	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	
6	1	1	8			Sisa Belanja Lainnya	
6	1	1	8	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	
6	1	1	8	1	001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	
6	1	1	8	2		Sisa Dana BOS	
6	1	1	8	2	001	Sisa Dana BOS	
6	1	1	8	3		Sisa Dana Kapitasi	
6	1	1	8	3	001	Sisa Dana Kapitasi	
6	1	2				Pencairan Dana Cadangan	
6	1	2	1			Pencairan Dana Cadangan	
6	1	2	1	1		Pencairan Dana Cadangan	
6	1	2	1	1	001	Pencairan Dana Cadangan Nomor ...	
6	1	2	1	1	002	Dst ...	
6	1	3				Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6	1	3	1			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
6	1	3	1	1		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN	
6	1	3	1	1	001	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN ...	
6	1	3	1	1	002	Dst ...	
6	1	3	2			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
6	1	3	2	1		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD	
6	1	3	2	1	001	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD ...	
6	1	3	2	1	002	Dst ...	
6	1	4				Penerimaan Pinjaman Daerah	
6	1	4	1			Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	
6	1	4	1	1		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
6	1	4	1	1	001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
6	1	4	1	1	002	Dst ...	
6	1	4	1	2		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	
6	1	4	1	2	001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	
6	1	4	1	2	002	Dst ...	
6	1	4	1	3		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah	
6	1	4	1	3	001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...- Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah	
6	1	4	1	3	002	Dst ...	
6	1	4	1	4		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	
6	1	4	1	4	001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...- Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	
6	1	4	1	4	002	Dst ...	
6	1	4	1	5		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	
6	1	4	1	5	001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya ... sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	
6	1	4	1	5	002	Dst ...	
6	1	4	1	6		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang	
6	1	4	1	6	001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya ... sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang	
6	1	4	1	6	002	Dst ...	
6	1	4	2			Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	
6	1	4	2	1		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah- Jangka Pendek	
6	1	4	2	1	001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah ...- Jangka Pendek	
6	1	4	2	1	002	Dst ...	
6	1	4	3			Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	
6	1	4	3	1		Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN-Jangka Pendek	
6	1	4	3	1	001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN ...-Jangka Pendek	
6	1	4	3	1	002	Dst ...	
6	1	4	3	2		Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN-Jangka Menengah	
6	1	4	3	2	001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN ...-Jangka Menengah	
6	1	4	3	2	002	Dst ...	
6	1	4	3	3		Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN-Jangka Panjang	
6	1	4	3	3	001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN ...-Jangka Panjang	
6	1	4	3	3	002	Dst ...	
6	1	4	3	4		Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Pendek	
6	1	4	3	4	001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD ...-Jangka Pendek	
6	1	4	3	4	002	Dst ...	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
6	1	4	3	5		Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Menengah	
6	1	4	3	5	001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD ...-Jangka Menengah	
6	1	4	3	5	002	Dst ...	
6	1	4	3	6		Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Panjang	
6	1	4	3	6	001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD ...-Jangka Panjang	
6	1	4	3	6	002	Dst ...	
6	1	4	3	7		Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta-Jangka Pendek	
6	1	4	3	7	001	Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta ...-Jangka Pendek	
6	1	4	3	7	001	Dst ...	
6	1	4	3	8		Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta-Jangka Menengah	
6	1	4	3	8	001	Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta ...-Jangka Menengah	
6	1	4	3	8	002	Dst ...	
6	1	4	3	9		Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta-Jangka Panjang	
6	1	4	3	9	001	Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta ...-Jangka Panjang	
6	1	4	3	9	002	Dst ...	
6	1	4	4			Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	
6	1	4	4	1		Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN-Jangka Pendek	
6	1	4	4	1	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN ...- Jangka Pendek	
6	1	4	4	1	002	Dst ...	
6	1	4	4	2		Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN-Jangka Menengah	
6	1	4	4	2	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN ...- Jangka Menengah	
6	1	4	4	2	002	Dst ...	
6	1	4	4	3		Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN-Jangka Panjang	
6	1	4	4	3	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN ...- Jangka Panjang	
6	1	4	4	3	002	Dst ...	
6	1	4	4	4		Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD-Jangka Pendek	
6	1	4	4	4	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD ...- Jangka Pendek	
6	1	4	4	4	002	Dst ...	
6	1	4	4	5		Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD-Jangka Menengah	
6	1	4	4	5	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD ...- Jangka Menengah	
6	1	4	4	5	002	Dst ...	
6	1	4	4	6		Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD-Jangka Panjang	
6	1	4	4	6	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD ...- Jangka Panjang	
6	1	4	4	6	001	Dst ...	
6	1	4	4	7		Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta-Jangka Pendek	
6	1	4	4	7	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta ...- Jangka Pendek	
6	1	4	4	7	002	Dst ...	
6	1	4	4	8		Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta-Jangka Menengah	
6	1	4	4	8	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta ...- Jangka Menengah	
6	1	4	4	8	002	Dst ...	
6	1	4	4	9		Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta-Jangka Panjang	
6	1	4	4	9	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta ...- Jangka Panjang	
6	1	4	4	9	002	Dst ...	
6	1	4	5			Pinjaman Daerah dari Masyarakat	
6	1	4	5	1		Obligasi Daerah	
6	1	4	5	1	001	Obligasi Daerah	
6	1	5				Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
6	1	5	1			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
6	1	5	1	1		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
6	1	5	1	1	001	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat ...	
6	1	5	1	1	002	Dst ...	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
6	1	5	1	2		Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat	
6	1	5	1	2	001	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat ...	
6	1	5	1	2	002	Dst ...	
6	1	5	2			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
6	1	5	2	1		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
6	1	5	2	1	001	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya ...	
6	1	5	2	1	002	Dst ...	
6	1	5	2	2		Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
6	1	5	2	2	001	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah ...	
6	1	5	2	2	002	Dst ...	
6	1	5	3			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	
6	1	5	3	1		Penerimaan BUMD	
6	1	5	3	1	001	Penerimaan BUMD ...	
6	1	5	3	1	002	Dst ...	
6	1	5	3	2		Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD	
6	1	5	3	2	001	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD ...	
6	1	5	3	2	002	Dst ...	
6	1	5	4			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN	
6	1	5	4	1		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN	
6	1	5	4	1	001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN ...	
6	1	5	4	1	002	Dst ...	
6	1	5	4	2		Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN	
6	1	5	4	2	001	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN ...	
6	1	5	4	2	002	Dst ...	
6	1	5	5			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	
6	1	5	5	1		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	
6	1	5	5	1	001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	
6	1	5	5	1	002	Dst ...	
6	1	5	5	2		Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	
6	1	5	5	2	001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi ...	
6	1	5	5	2	002	Dst ...	
6	1	5	6			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	
6	1	5	6	1		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	
6	1	5	6	1	001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	
6	1	5	6	2		Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	
6	1	5	6	2	001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	
6	1	5	7			Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD	
6	1	5	7	1		Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD	
6	1	5	7	1	001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD ...	
6	1	5	7	1	002	Dst ...	
6	1	6				Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	
6	1	6	1			Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD	
6	1	6	1	1		Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD-Jangka Pendek	
6	1	6	1	1	001	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD ...- Jangka Pendek	
6	1	6	1	1	002	Dst ...	
6	1	6	1	2		Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD-Jangka Menengah	
6	1	6	1	2	001	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD ...- Jangka Menengah	
6	1	6	2	2	002	Dst ...	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
6	1	6	1	3		Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD-Jangka Panjang	
6	1	6	1	3	001	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD ...- Jangka Panjang	
6	1	6	1	3	002	Dst ...	
6	2					PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
6	2	1				Pembentukan Dana Cadangan	
6	2	1	1			Pembentukan Dana Cadangan	
6	2	1	1	1		Pembentukan Dana Cadangan	
6	2	1	1	1	001	Pembentukan Dana Cadangan Nomor ...	
6	2	1	1	1	002	Dst ...	
6	2	2				Penyertaan Modal Daerah	
6	2	2	1			Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
6	2	2	1	1		Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	
6	2	2	1	1	001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN ...	
6	2	2	1	1	002	Dst ...	
6	2	2	2			Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	
6	2	2	2	1		Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	
6	2	2	2	1	001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD ...	
6	2	2	2	1	002	Dst ...	
6	2	3				Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	
6	2	3	1			Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	
6	2	3	1	1		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
6	2	3	1	1	001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
6	2	3	1	1	002	Dst ...	
6	2	3	1	2		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	
6	2	3	1	2	001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	
6	2	3	1	2	002	Dst ...	
6	2	3	1	3		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah	
6	2	3	1	3	001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah	
6	2	3	1	3	002	Dst ...	
6	2	3	1	4		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	
6	2	3	1	4	001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	
6	2	3	1	4	002	Dst ...	
6	2	3	1	5		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	
6	2	3	1	5	001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya ... sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	
6	2	3	1	5	002	Dst ...	
6	2	3	1	6		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai	
6	2	3	1	6	001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya ... sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang	
6	2	3	1	6	002	Dst ...	
6	2	3	2			Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	
6	2	3	2	1		Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
6	2	3	2	1	001	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah ...-Jangka Pendek	
6	2	3	2	1	002	Dst ...	
6	2	3	3			Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	
6	2	3	3	1		Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN- Jangka Pendek	
6	2	3	3	1	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN ...- Jangka Pendek	
6	2	3	3	1	002	Dst ...	
6	2	3	3	2		Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN- Jangka Menengah	
6	2	3	3	2	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN ...- Jangka Menengah	
6	2	3	3	2	002	Dst ...	
6	2	3	3	3		Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN- Jangka Panjang	
6	2	3	3	3	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN ...- Jangka Panjang	
6	2	3	3	3	002	Dst ...	
6	2	3	3	4		Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD- Jangka Pendek	
6	2	3	3	4	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD- Jangka Pendek	
6	2	3	3	4	002	Dst ...	
6	2	3	3	5		Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD- Jangka Menengah	
6	2	3	3	5	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD ...- Jangka Menengah	
6	2	3	3	5	002	Dst ...	
6	2	3	3	6		Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD- Jangka Panjang	
6	2	3	3	6	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD ...- Jangka Panjang	
6	2	3	3	6	002	Dst ...	
6	2	3	3	7		Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta- Jangka Pendek	
6	2	3	3	7	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta ...- Jangka Pendek	
6	2	3	3	7	002	Dst ...	
6	2	3	3	8		Pembayaran Pinjaman Jangka Menengah	
6	2	3	3	8	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta ...- Jangka Menengah	
6	2	3	3	8	002	Dst ...	
6	2	3	3	9		Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang	
6	2	3	3	9	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta ...- Jangka Panjang	
6	2	3	3	9	002	Dst ...	
6	2	3	4			Pembayaran Pinjaman dari Keuangan Bukan Bank (LKBB)	
6	2	3	4	1		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN- Jangka Pendek	
6	2	3	4	1	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN ...- Jangka Pendek	
6	2	3	4	1	002	Dst ...	
6	2	3	4	2		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN- Jangka Menengah	
6	2	3	4	2	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN ...- Jangka Menengah	
6	2	3	4	2	002	Dst ...	
6	2	3	4	3		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN- Jangka Panjang	
6	2	3	4	3	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN ...- Jangka Panjang	
6	2	3	4	3	002	Dst ...	
6	2	3	4	4		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD- Jangka Pendek	
6	2	3	4	4	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD- Jangka Pendek	
6	2	3	4	4	002	Dst ...	
6	2	3	4	5		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD- Jangka Menengah	
6	2	3	4	5	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD ...-	
6	2	3	4	5	002	Dst ...	
6	2	3	4	6		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD- Jangka Panjang	
6	2	3	4	6	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD ...- Jangka Panjang	
6	2	3	4	6	002	Dst ...	
6	2	3	4	7		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta- Jangka Pendek	
6	2	3	4	7	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta ...- Jangka Pendek	
6	2	3	4	7	002	Dst ...	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
6	2	3	4	8		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta- Jangka Menengah	
6	2	3	4	8	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta ...- Jangka Menengah	
6	2	3	4	8	002	Dst ...	
6	2	3	4	9		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta- Jangka Panjang	
6	2	3	4	9	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta ...- Jangka Panjang	
6	2	3	4	9	002	Dst ...	
6	2	3	5			Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat	
6	2	3	5	1		Pembayaran Obligasi Daerah	
6	2	3	5	1	001	Pembayaran Obligasi Daerah	
6	2	4				Pemberian Pinjaman Daerah	
6	2	4	1			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
6	2	4	1	1		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
6	2	4	1	1	001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat ...	
6	2	4	1	1	002	Dst ...	
6	2	4	1	2		Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat	
6	2	4	1	2	001	Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat ...	
6	2	4	1	2	002	Dst ...	
6	2	4	2			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
6	2	4	2	1		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
6	2	4	2	1	001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah ...	
6	2	4	2	1	002	Dst ...	
6	2	4	2	2		Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
6	2	4	2	2	001	Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah ...	
6	2	4	2	2	002	Dst ...	
6	2	4	3			Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	
6	2	4	3	1		Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	
6	2	4	3	1	001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD ...	
6	2	4	3	1	002	Dst ...	
6	2	4	3	2		Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD	
6	2	4	3	2	001	Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD ...	
6	2	4	3	2	002	Dst ...	
6	2	4	4			Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN	
6	2	4	4	1		Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN	
6	2	4	4	1	001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN ...	
6	2	4	4	1	002	Dst ...	
6	2	4	4	2		Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN	
6	2	4	4	2	001	Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN ...	
6	2	4	4	2	002	Dst ...	
6	2	4	5			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi	
6	2	4	5	1		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi	
6	2	4	5	1	001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi ...	
6	2	4	5	1	002	Dst ...	
6	2	4	5	2		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi	
6	2	4	5	2	001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi ...	
6	2	4	5	2	002	Dst ...	
6	2	4	6			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	
6	2	4	6	1		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
6	2	4	6	1	001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	
6	2	4	6	2		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat	
6	2	4	6	2	001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat	
6	2	4	7			Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD	
6	2	4	7	1		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD	
6	2	4	7	1	001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD ...	
6	2	4	13	1	002	Dst ...	
6	2	5				Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	
6	2	5	1			Pinjaman BLUD	
6	2	5	1	1		Pinjaman BLUD-Jangka Pendek	
6	2	5	1	1	001	Pinjaman BLUD ...-Jangka Pendek	
6	2	5	1	1	002	Dst ...	
6	2	5	1	2		Pinjaman BLUD-Jangka Menengah	
6	2	5	1	2	001	Pinjaman BLUD ...-Jangka Menengah	
6	2	5	1	2	002	Dst ...	
6	2	5	1	3		Pinjaman BLUD-Jangka Panjang	
6	2	5	1	3	001	Pinjaman BLUD ...-Jangka Panjang	
6	2	5	1	3	002	Dst ...	

D. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR REKENING LAPORAN OPERASIONAL

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
						.	
7						PENDAPATAN DAERAH-LO	
7	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	
7	1	1				Pajak Daerah-LO	
7	1	1	1			Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	
7	1	1	1	1		PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO	
7	1	1	1	1	1	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi-LO	
7	1	1	1	1	2	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum-LO	
7	1	1	1	1	3	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat-LO	
7	1	1	1	1	4	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah-LO	
7	1	1	1	2		PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -LO	
7	1	1	1	2	1	PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Pribadi-LO	
7	1	1	1	2	2	PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Umum-LO	
7	1	1	1	2	3	PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Pemerintah Pusat- LO	
7	1	1	1	2	4	PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Pemerintah Daerah-LO	
7	1	1	1	3		PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	
7	1	1	1	3	1	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi-LO	
7	1	1	1	3	2	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum-LO	
7	1	1	1	3	3	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat -LO	
7	1	1	1	3	4	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah-LO	
7	1	1	1	4		PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -LO	
7	1	1	1	4	1	PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pribadi-LO	
7	1	1	1	4	2	PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Umum-LO	
7	1	1	1	4	3	PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pemerintah Pusat-LO	
7	1	1	1	4	4	PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pemerintah Daerah- LO	
7	1	1	1	5		PKB-Mobil Bus-Bus-LO	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
7	1	1	1	5	1	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi-LO	
7	1	1	1	5	2	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum-LO	
7	1	1	1	5	3	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat-LO	
7	1	1	1	5	4	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah-LO	
7	1	1	1	6		PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -LO	
7	1	1	1	6	1	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -Pribadi-LO	
7	1	1	1	6	2	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -Umum-LO	
7	1	1	1	6	3	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -Pemerintah Pusat-LO	
7	1	1	1	6	4	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -Pemerintah Daerah-LO	
7	1	1	1	7		PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -LO	
7	1	1	1	7	1	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -Pribadi- LO	
7	1	1	1	7	2	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -Umum- LO	
7	1	1	1	7	3	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> - Pemerintah Pusat-LO	
7	1	1	1	7	4	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> - Pemerintah Daerah-LO	
7	1	1	1	8		PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -LO	
7	1	1	1	8	1	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Pribadi-LO	
7	1	1	1	8	2	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Umum-LO	
7	1	1	1	8	3	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Pemerintah Pusat-LO	
7	1	1	1	8	4	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Pemerintah Daerah-LO	
7	1	1	1	9		PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -LO	
7	1	1	1	9	1	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -Pribadi- LO	
7	1	1	1	9	2	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -Umum-LO	
7	1	1	1	9	3	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> - Pemerintah Pusat-LO	
7	1	1	1	9	4	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> - Pemerintah Daerah-LO	
7	1	1	1	10		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	
7	1	1	1	10	1	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Pribadi-LO	
7	1	1	1	10	2	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Umum-LO	
7	1	1	1	10	3	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Pemerintah Pusat-LO	
7	1	1	1	10	4	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Pemerintah Daerah-LO	
7	1	1	1	11		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	
7	1	1	1	11	1	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pribadi-LO	
7	1	1	1	11	2	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Umum-LO	
7	1	1	1	11	3	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pemerintah Pusat-LO	
7	1	1	1	11	4	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pemerintah Daerah-LO	
7	1	1	1	12		PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO	
7	1	1	1	12	1	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi-LO	
7	1	1	1	12	2	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum-LO	
7	1	1	1	12	3	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat-LO	
7	1	1	1	12	4	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah-LO	
7	1	1	1	13		PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar- LO	
7	1	1	1	13	1	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar- Pribadi-LO	
7	1	1	1	13	2	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar- Umum-LO	
7	1	1	1	13	3	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar- Pemerintah Pusat-LO	
7	1	1	1	13	4	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar- Pemerintah Daerah-LO	
7	1	1	1	14		PKB-Mobil Roda Tiga-LO	
7	1	1	1	14	1	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi-LO	
7	1	1	1	14	2	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum-LO	
7	1	1	1	14	3	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat-LO	
7	1	1	1	14	4	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah-LO	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
7	1	1	2			Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)– LO	
7	1	1	2	1		BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan -LO	
7	1	1	2	1	1	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO	
7	1	1	2	2		BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -LO	
7	1	1	2	2	1	BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -LO	
7	1	1	2	3		BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	
7	1	1	2	3	1	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	
7	1	1	2	4		BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -LO	
7	1	1	2	4	1	BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -LO	
7	1	1	2	5		BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO	
7	1	1	2	5	1	BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO	
7	1	1	2	6		BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -LO	
7	1	1	2	6	1	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -LO	
7	1	1	2	7		BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -LO	
7	1	1	2	7	1	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -LO	
7	1	1	2	8		BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -LO	
7	1	1	2	8	1	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -LO	
7	1	1	2	9		BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -LO	
7	1	1	2	9	1	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -LO	
7	1	1	2	10		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- LO	
7	1	1	2	10	1	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- LO	
7	1	1	2	11		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- LO	
7	1	1	2	11	1	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- LO	
7	1	1	2	12		BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO	
7	1	1	2	12	1	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO	
7	1	1	2	13		BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO	
7	1	1	2	13	1	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO	
7	1	1	2	14		BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO	
7	1	1	2	14	1	BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO	
7	1	1	3			Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	
7	1	1	3	1		PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO	
7	1	1	3	1	1	PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO	
7	1	1	3	2		PBBKB Bahan Bakar Solar-LO	
7	1	1	3	2	1	PBBKB Bahan Bakar Solar-LO	
7	1	1	3	3		PBBKB Bahan Bakar Gas-LO	
7	1	1	3	3	1	PBBKB Bahan Bakar Gas-LO	
7	1	1	3	4		PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO	
7	1	1	3	4	1	PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO	
7	1	1	4			Pajak Air Permukaan-LO	
7	1	1	4	1		Pajak Air Permukaan-LO	
7	1	1	4	1	1	Pajak Air Permukaan-LO	
7	1	1	5			Pajak Rokok-LO	
7	1	1	5	1		Pajak Rokok-LO	
7	1	1	5	1	1	Pajak Rokok-LO	
7	1	1	6			Pajak Hotel-LO	
7	1	1	6	1		Pajak Hotel-LO	
7	1	1	6	1	1	Pajak Hotel-LO	
7	1	1	6	2		Pajak Motel-LO	
7	1	1	6	2	1	Pajak Motel-LO	
7	1	1	6	3		Pajak Losmen-LO	
7	1	1	6	3	1	Pajak Losmen-LO	
7	1	1	6	4		Pajak Gubuk Pariwisata-LO	
7	1	1	6	4	1	Pajak Gubuk Pariwisata-LO	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
7	1	1	6	5		Pajak Wisma Pariwisata-LO	
7	1	1	6	5	1	Pajak Wisma Pariwisata-LO	
7	1	1	6	6		Pajak Pesanggrahan-LO	
7	1	1	6	6	1	Pajak Pesanggrahan-LO	
7	1	1	6	7		Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	
7	1	1	6	7	1	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	
7	1	1	6	8		Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO	
7	1	1	6	8	1	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO	
7	1	1	7			Pajak Restoran-LO	
7	1	1	7	1		Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	
7	1	1	7	1	1	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	
7	1	1	7	2		Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	
7	1	1	7	2	1	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	
7	1	1	7	3		Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	
7	1	1	7	3	1	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	
7	1	1	7	4		Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO	
7	1	1	7	4	1	Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO	
7	1	1	7	5		Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	
7	1	1	7	5	1	Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	
7	1	1	7	6		Pajak Bar dan Sejenisnya-LO	
7	1	1	7	6	1	Pajak Bar dan Sejenisnya-LO	
7	1	1	7	7		Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	
7	1	1	7	7	1	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	
7	1	1	8			Pajak Hiburan-LO	
7	1	1	8	1		Pajak Tontonan Film-LO	
7	1	1	8	1	1	Pajak Tontonan Film-LO	
7	1	1	8	2		Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO	
7	1	1	8	2	1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana- LO	
7	1	1	8	3		Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO	
7	1	1	8	3	1	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO	
7	1	1	8	4		Pajak Pameran-LO	
7	1	1	8	4	1	Pajak Pameran-LO	
7	1	1	8	5		Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	
7	1	1	8	5	1	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	
7	1	1	8	6		Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO	
7	1	1	8	6	1	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO	
7	1	1	8	7		Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i> -LO	
7	1	1	8	7	1	Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i> -LO	
7	1	1	8	8		Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	
7	1	1	8	8	1	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	
7	1	1	8	9		Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ <i>Spa</i> , dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)-LO	
7	1	1	8	9	1	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)-LO	
7	1	1	8	10		Pajak Pertandingan Olahraga-LO	
7	1	1	8	10	1	Pajak Pertandingan Olahraga-LO	
7	1	1	9			Pajak Reklame-LO	
7	1	1	9	1		Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	
7	1	1	9	1	1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	
7	1	1	9	2		Pajak Reklame Kain-LO	
7	1	1	9	2	1	Pajak Reklame Kain-LO	
7	1	1	9	3		Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
7	1	1	9	3	1	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	
7	1	1	9	4		Pajak Reklame Selebaran-LO	
7	1	1	9	4	1	Pajak Reklame Selebaran-LO	
7	1	1	9	5		Pajak Reklame Berjalan-LO	
7	1	1	9	5	1	Pajak Reklame Berjalan-LO	
7	1	1	9	6		Pajak Reklame Udara-LO	
7	1	1	9	6	1	Pajak Reklame Udara-LO	
7	1	1	9	7		Pajak Reklame Apung-LO	
7	1	1	9	7	1	Pajak Reklame Apung-LO	
7	1	1	9	8		Pajak Reklame Suara-LO	
7	1	1	9	8	1	Pajak Reklame Suara-LO	
7	1	1	9	9		Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i> -LO	
7	1	1	9	9	1	Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i> -LO	
7	1	1	9	10		Pajak Reklame Peragaan-LO	
7	1	1	9	10	1	Pajak Reklame Peragaan-LO	
7	1	1	10			Pajak Penerangan Jalan-LO	
7	1	1	10	1		Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	
7	1	1	10	1	1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	
7	1	1	10	2		Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	
7	1	1	10	2	1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	
7	1	1	11			Pajak Parkir-LO	
7	1	1	11	1		Pajak Parkir-LO	
7	1	1	11	1	1	Pajak Parkir-LO	
7	1	1	12			Pajak Air Tanah-LO	
7	1	1	12	1		Pajak Air Tanah-LO	
7	1	1	12	1	1	Pajak Air Tanah-LO	
7	1	1	13			Pajak Sarang Burung Walet-LO	
7	1	1	13	1		Pajak Sarang Burung Walet-LO	
7	1	1	13	1	1	Pajak Sarang Burung Walet-LO	
7	1	1	14			Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	
7	1	1	14	1		Pajak Asbes-LO	
7	1	1	14	1	1	Pajak Asbes-LO	
7	1	1	14	2		Pajak Batu Tulis-LO	
7	1	1	14	2	1	Pajak Batu Tulis-LO	
7	1	1	14	3		Pajak Batu Setengah Permata-LO	
7	1	1	14	3	1	Pajak Batu Setengah Permata-LO	
7	1	1	14	4		Pajak Batu Kapur-LO	
7	1	1	14	4	1	Pajak Batu Kapur-LO	
7	1	1	14	5		Pajak Batu Apung-LO	
7	1	1	14	5	1	Pajak Batu Apung-LO	
7	1	1	14	6		Pajak Batu Permata-LO	
7	1	1	14	6	1	Pajak Batu Permata-LO	
7	1	1	14	7		Pajak Bentonit-LO	
7	1	1	14	7	1	Pajak Bentonit-LO	
7	1	1	14	8		Pajak Dolomit-LO	
7	1	1	14	8	1	Pajak Dolomit-LO	
7	1	1	14	9		Pajak Felspar-LO	
7	1	1	14	9	1	Pajak Felspar-LO	
7	1	1	14	10		Pajak Garam Batu (<i>Halite</i>)-LO	
7	1	1	14	10	1	Pajak Garam Batu (<i>Halite</i>)-LO	
7	1	1	14	11		Pajak Grafit-LO	
7	1	1	14	11	1	Pajak Grafit-LO	
7	1	1	14	12		Pajak Granit/Andesit-LO	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
7	1	1	14	12	1	Pajak Granit/Andesit-LO	
7	1	1	14	13		Pajak Gips-LO	
7	1	1	14	13	1	Pajak Gips-LO	
7	1	1	14	14		Pajak Kalsit-LO	
7	1	1	14	14	1	Pajak Kalsit-LO	
7	1	1	14	15		Pajak Kaolin-LO	
7	1	1	14	15	1	Pajak Kaolin-LO	
7	1	1	14	16		Pajak Leusit-LO	
7	1	1	14	16	1	Pajak Leusit-LO	
7	1	1	14	17		Pajak Magnesit-LO	
7	1	1	14	17	1	Pajak Magnesit-LO	
7	1	1	14	18		Pajak Mika-LO	
7	1	1	14	18	1	Pajak Mika-LO	
7	1	1	14	19		Pajak Marmer-LO	
7	1	1	14	19	1	Pajak Marmer-LO	
7	1	1	14	20		Pajak Nitrat-LO	
7	1	1	14	20	1	Pajak Nitrat-LO	
7	1	1	14	21		Pajak Opsidien-LO	
7	1	1	14	21	1	Pajak Opsidien-LO	
7	1	1	14	22		Pajak Oker-LO	
7	1	1	14	22	1	Pajak Oker-LO	
7	1	1	14	23		Pajak Pasir dan Kerikil-LO	
7	1	1	14	23	1	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	
7	1	1	14	24		Pajak Pasir Kuarsa-LO	
7	1	1	14	24	1	Pajak Pasir Kuarsa-LO	
7	1	1	14	25		Pajak Perlit-LO	
7	1	1	14	25	1	Pajak Perlit-LO	
7	1	1	14	26		Pajak Phospat-LO	
7	1	1	14	26	1	Pajak Phospat-LO	
7	1	1	14	27		Pajak Talk-LO	
7	1	1	14	27	1	Pajak Talk-LO	
7	1	1	14	28		Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)-LO	
7	1	1	14	28	1	Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)-LO	
7	1	1	14	29		Pajak Tanah Diatome-LO	
7	1	1	14	29	1	Pajak Tanah Diatome-LO	
7	1	1	14	30		Pajak Tanah Liat-LO	
7	1	1	14	30	1	Pajak Tanah Liat-LO	
7	1	1	14	31		Pajak Tawas (Alum)-LO	
7	1	1	14	31	1	Pajak Tawas (Alum)-LO	
7	1	1	14	32		Pajak Tras-LO	
7	1	1	14	32	1	Pajak Tras-LO	
7	1	1	14	33		Pajak Yarosif-LO	
7	1	1	14	33	1	Pajak Yarosif-LO	
7	1	1	14	34		Pajak Zeolit-LO	
7	1	1	14	34	1	Pajak Zeolit-LO	
7	1	1	14	35		Pajak Basal-LO	
7	1	1	14	35	1	Pajak Basal-LO	
7	1	1	14	36		Pajak Trakit-LO	
7	1	1	14	36	1	Pajak Trakit-LO	
7	1	1	14	37		Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	
7	1	1	14	37	1	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	
7	1	1	15			Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	
7	1	1	15	1		PBBP2-LO	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
7	1	1	15	1	1	PBBP2-LO	
7	1	1	16			Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	
7	1	1	16	1		BPHTB-Pemindahan Hak-LO	
7	1	1	16	1	1	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	
7	1	1	16	2		BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	
7	1	1	16	2	1	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	
7	1	2				Retribusi Daerah-LO	
7	1	2	1			Retribusi Jasa Umum-LO	
7	1	2	1	1		Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	
7	1	2	1	1	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas- LO	
7	1	2	1	1	2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling-LO	
7	1	2	1	1	3	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu-LO	
7	1	2	1	1	4	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Balai Pengobatan-LO	
7	1	2	1	1	5	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	
7	1	2	1	1	6	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	
7	1	2	1	2		Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	
7	1	2	1	2	1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	
7	1	2	1	3		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO	
7	1	2	1	3	1	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO	
7	1	2	1	3	2	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO	
7	1	2	1	4		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	
7	1	2	1	4	1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	
7	1	2	1	5		Retribusi Pelayanan Pasar-LO	
7	1	2	1	5	1	Retribusi Pelataran-LO	
7	1	2	1	5	2	Retribusi Los-LO	
7	1	2	1	5	3	Retribusi Kios-LO	
7	1	2	1	6		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	
7	1	2	1	6	1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	
7	1	2	1	7		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	
7	1	2	1	7	1	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO	
7	1	2	1	7	2	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran-LO	
7	1	2	1	7	3	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa-LO	
7	1	2	1	8		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	
7	1	2	1	8	1	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)-LO	
7	1	2	1	8	2	Retribusi Penyediaan Peta Foto-LO	
7	1	2	1	8	3	Retribusi Penyediaan Peta Digital-LO	
7	1	2	1	8	4	Retribusi Penyediaan Peta Tematik-LO	
7	1	2	1	8	5	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)-LO	
7	1	2	1	9		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	
7	1	2	1	9	1	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	
7	1	2	1	10		Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO	
7	1	2	1	10	1	Retribusi Rumah Tangga-LO	
7	1	2	1	10	2	Retribusi Perkantoran-LO	
7	1	2	1	10	3	Retribusi Industri-LO	
7	1	2	1	11		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	
7	1	2	1	11	1	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	
7	1	2	1	11	2	Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus-LO	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
7	1	2	1	12		Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	
7	1	2	1	12	1	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis-LO	
7	1	2	1	12	2	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis-LO	
7	1	2	1	12	3	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis-LO	
7	1	2	1	13		Retribusi Pengawasan dan Menara Telekomunikasi-LO	
7	1	2	1	13	1	Retribusi Pengawasan dan Menara Telekomunikasi-LO	
7	1	2	2			Retribusi Jasa Usaha-LO	
7	1	2	2	1		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	
7	1	2	2	1	1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	
7	1	2	2	1	2	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	
7	1	2	2	1	3	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	
7	1	2	2	1	4	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	
7	1	2	2	1	5	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	
7	1	2	2	1	6	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	
7	1	2	2	2		Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	
7	1	2	2	2	1	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO	
7	1	2	2	2	2	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO	
7	1	2	2	3		Retribusi Tempat Pelelangan-LO	
7	1	2	2	3	1	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO	
7	1	2	2	3	2	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	
7	1	2	2	4		Retribusi Terminal-LO	
7	1	2	2	4	1	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum- LO	
7	1	2	2	4	2	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO	
7	1	2	2	4	3	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	
7	1	2	2	5		Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	
7	1	2	2	5	1	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	
7	1	2	2	6		Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	
7	1	2	2	6	1	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	
7	1	2	2	7		Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	
7	1	2	2	7	1	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	
7	1	2	2	8		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	
7	1	2	2	8	1	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	
7	1	2	2	9		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	
7	1	2	2	9	1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	
7	1	2	2	10		Retribusi Penyeberangan di Air-LO	
7	1	2	2	10	1	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO	
7	1	2	2	10	2	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang-LO	
7	1	2	2	11		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	
7	1	2	2	11	1	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	
7	1	2	2	11	2	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LO	
7	1	2	2	11	3	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	
7	1	2	2	11	4	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan-LO	
7	1	2	3			Retribusi Perizinan Tertentu-LO	
7	1	2	3	1		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	
7	1	2	3	1	1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	
7	1	2	3	2		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	
7	1	2	3	2	1	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
7	1	2	3	3		Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	
7	1	2	3	3	1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	
7	1	2	3	4		Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	
7	1	2	3	4	1	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan-LO	
7	1	2	3	4	2	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan-LO	
7	1	2	3	5		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO	
7	1	2	3	5	1	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu-LO	
7	1	2	3	5	2	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu-LO	
7	1	2	3	5	3	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu-LO	
7	1	2	3	6		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	
7	1	2	3	6	1	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing-LO	
7	1	3				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	
7	1	3	1			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	
7	1	3	1	1		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	
7	1	3	1	1	1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN ...-LO	
7	1	3	1	1	2	Dst ...	
7	1	3	2			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	
7	1	3	2	1		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	
7	1	3	2	1	1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) ... -LO	
7	1	3	2	1	2	Dst ... -LO	
7	1	3	2	2		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO	
7	1	3	2	2	1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) ...-LO	
7	1	3	2	2	2	Dst ...-LO	
7	1	3	2	3		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	
7	1	3	2	3	1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) ...-LO	
7	1	3	2	3	2	Dst ...-LO	
7	1	3	2	4		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)-LO	
7	1	3	2	4	1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah) ...-LO	
7	1	3	2	4	2	Dst ...-LO	
7	1	3	6	5		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)-LO	
7	1	3	6	5	1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi) ...-LO	
7	1	3	6	5	2	Dst ...-LO	
7	1	4				Lain-lain PAD yang Sah-LO	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
7	1	4	1			Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	
7	1	4	1	1		Hasil Penjualan Tanah-LO	
7	1	4	1	1	1	Hasil Penjualan Tanah	
7	1	4	1	2		Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	
7	1	4	1	2	1	Hasil Penjualan Alat Besar-LO	
7	1	4	1	2	2	Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO	
7	1	4	1	2	3	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO	
7	1	4	1	2	4	Hasil Penjualan Alat Pertanian-LO	
7	1	4	1	2	5	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	
7	1	4	1	2	6	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO	
7	1	4	1	2	7	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan	
7	1	4	1	2	8	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-LO	
7	1	4	1	2	10	Hasil Penjualan Komputer-LO	
7	1	4	1	2	11	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-LO	
7	1	4	1	2	12	Hasil Penjualan Alat Pengeboran-LO	
7	1	4	1	2	13	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO	
7	1	4	1	2	14	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-LO	
7	1	4	1	2	15	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-LO	
7	1	4	1	2	16	Hasil Penjualan Alat Peraga-LO	
7	1	4	1	2	17	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-LO	
7	1	4	1	2	18	Hasil Penjualan Rambu-Rambu-LO	
7	1	4	1	2	19	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-LO	
7	1	4	1	3		Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	
7	1	4	1	3	1	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-LO	
7	1	4	1	3	2	Hasil Penjualan Monumen-LO	
7	1	4	1	3	3	Hasil Penjualan Bangunan Menara-LO	
7	1	4	1	3	4	Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO	
7	1	4	1	4		Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO	
7	1	4	1	4	1	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-LO	
7	1	4	1	4	2	Hasil Penjualan Bangunan Air-LO	
7	1	4	1	4	3	Hasil Penjualan Instalasi-LO	
7	1	4	1	4	4	Hasil Penjualan Jaringan-LO	
7	1	4	1	5		Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	
7	1	4	1	5	1	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-LO	
7	1	4	1	5	2	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO	
7	1	4	1	5	3	Hasil Penjualan Hewan-LO	
7	1	4	1	5	4	Hasil Penjualan Biota Perairan-LO	
7	1	4	1	5	5	Hasil Penjualan Tanaman-LO	
7	1	4	1	5	6	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-LO	
7	1	4	1	5	7	Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi-LO	
7	1	4	1	6		Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	
7	1	4	1	6	1	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO	
7	1	4	1	6	2	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-	
7	1	4	2			Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	
7	1	4	2	1		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-LO	
7	1	4	2	1	1	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-LO	
7	1	4	2	2		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO	
7	1	4	2	2	1	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar- LO	
7	1	4	2	2	2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-LO	
7	1	4	2	2	3	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO	
7	1	4	2	2	4	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-LO	
7	1	4	2	2	5	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
						Tangga-LO	
7	1	4	2	2	6	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO	
7	1	4	2	2	7	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO	
7	1	4	2	2	8	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-LO	
7	1	4	2	2	10	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer- LO	
7	1	4	2	2	11	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-LO	
7	1	4	2	2	12	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-LO	
7	1	4	2	2	13	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO	
7	1	4	2	2	14	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-LO	
7	1	4	2	2	15	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-LO	
7	1	4	2	2	16	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga- LO	
7	1	4	2	2	17	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-LO	
7	1	4	2	2	18	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu- Rambu-LO	
7	1	4	2	2	19	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga-LO	
7	1	4	2	3		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO	
7	1	4	2	3	1	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO	
7	1	4	2	3	2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen- LO	
7	1	4	2	3	3	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara-LO	
7	1	4	2	3	4	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO	
7	1	4	2	4		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO	
7	1	4	2	4	1	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-LO	
7	1	4	2	4	2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-LO	
7	1	4	2	4	3	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-LO	
7	1	4	2	4	4	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-LO	
7	1	4	2	5		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO	
7	1	4	2	5	1	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-LO	
7	1	4	2	5	2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO	
7	1	4	2	5	3	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-LO	
7	1	4	2	5	4	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-LO	
7	1	4	2	5	5	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman- LO	
7	1	4	2	5	6	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-LO	
7	1	4	2	5	7	Hasil Selisih Lebih Tukar Aset Tetap Dalam Renovasi-LO	
7	1	4	2	6		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-LO	
7	1	4	2	6	1	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO	
7	1	4	2	6	2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO	
7	1	4	3			Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	
7	1	4	3	1		Hasil Sewa BMD-LO	
7	1	4	3	1	1	Hasil Sewa BMD-LO	
7	1	4	3	2		Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	
7	1	4	3	2	1	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO	
7	1	4	3	3		Hasil dari Bangun Guna Serah-LO	
7	1	4	3	3	1	Hasil dari Bangun Guna Serah-LO	
7	1	4	3	4		Hasil dari Bangun Serah Guna-LO	
7	1	4	3	4	1	Hasil dari Bangun Serah Guna-LO	
7	1	4	3	5		Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur- LO	
7	1	4	3	5	1	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO	
7	1	4	4			Hasil Kerja Sama Daerah-LO	
7	1	4	4	1		Hasil Kerja Sama Daerah-LO	
7	1	4	4	1	1	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
7	1	4	5			Jasa Giro-LO	
7	1	4	5	1		Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	
7	1	4	5	1	1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	
7	1	4	5	2		Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	
7	1	4	5	2	1	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	
7	1	4	5	3		Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO	
7	1	4	5	3	1	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan ...-LO	
7	1	4	5	3	2	Dst ...	
7	1	4	5	4		Jasa Giro pada BLUD-LO	
7	1	4	5	4	1	Jasa Giro pada BLUD ...-LO	
7	1	4	5	4	2	Dst ...	
7	1	4	5	5		Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	
7	1	4	5	5	1	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS ...-LO	
7	1	4	5	5	2	Dst ...	
7	1	4	5	6		Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	
7	1	4	5	6	1	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP ...-LO	
7	1	4	5	6	2	Dst ...	
7	1	4	6			Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	
7	1	4	6	1		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	
7	1	4	6	1	1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	
7	1	4	7			Pendapatan Bunga-LO	
7	1	4	7	1		Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	
7	1	4	7	1	1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	
7	1	4	8			Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	
7	1	4	8	1		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	
7	1	4	8	1	1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	
7	1	4	8	2		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	
7	1	4	8	2	1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	
7	1	4	9			Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	
7	1	4	9	1		Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	
7	1	4	9	1	1	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	
7	1	4	10			Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO	
7	1	4	10	1		Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO	
7	1	4	10	1	1	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO	
7	1	4	11			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	
7	1	4	11	1		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	
7	1	4	11	1	1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	
7	1	4	12			Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	
7	1	4	12	1		Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	
7	1	4	12	1	1	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Sedan-LO	
7	1	4	12	1	2	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Jeep-LO	
7	1	4	12	1	3	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Minibus-LO	
7	1	4	12	1	4	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -LO	
7	1	4	12	1	5	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-LO	
7	1	4	12	1	6	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- Pick Up-LO	
7	1	4	12	1	7	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- Light Truck-LO	
7	1	4	12	1	8	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- Truck-LO	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
7	1	4	12	1	9	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- Blind Van-LO	
7	1	4	12	1	10	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	
7	1	4	12	1	11	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	
7	1	4	12	1	12	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO	
7	1	4	12	1	13	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-LO	
7	1	4	12	1	14	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-LO	
7	1	4	12	2		Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	
7	1	4	12	2	1	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang- Sedan-LO	
7	1	4	12	2	2	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang- Jeep-LO	
7	1	4	12	2	3	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang- Minibus-LO	
7	1	4	12	2	4	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus- Microbus-LO	
7	1	4	12	2	5	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO	
7	1	4	12	2	6	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	
7	1	4	12	2	7	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	
7	1	4	12	2	8	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	
7	1	4	12	2	9	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO	
7	1	4	12	2	10	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua-LO	
7	1	4	12	2	11	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Tiga-LO	
7	1	4	12	2	12	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO	
7	1	4	12	2	13	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO	
7	1	4	12	2	14	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga - LO	
7	1	4	12	3		Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	
7	1	4	12	3	1	Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO	
7	1	4	12	3	2	Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Solar- LO	
7	1	4	12	3	3	Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Gas- LO	
7	1	4	12	3	4	Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Lainnya-LO	
7	1	4	12	4		Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO	
7	1	4	12	4	1	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO	
7	1	4	12	5		Pendapatan Denda Pajak Rokok-LO	
7	1	4	12	5	1	Pendapatan Denda Pajak Rokok-LO	
7	1	4	12	6		Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	
7	1	4	12	6	1	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	
7	1	4	12	6	2	Pendapatan Denda Pajak Motel-LO	
7	1	4	12	6	3	Pendapatan Denda Pajak Losmen-LO	
7	1	4	12	6	4	Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata-LO	
7	1	4	12	6	5	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata-LO	
7	1	4	12	6	6	Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan-LO	
7	1	4	12	6	7	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	
7	1	4	12	6	8	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO	
7	1	4	12	7		Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	
7	1	4	12	7	1	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	
7	1	4	12	7	2	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	
7	1	4	12	7	3	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	
7	1	4	12	7	4	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan	
7	1	4	12	7	5	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	
7	1	4	12	7	6	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya- LO	
7	1	4	12	7	7	Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
7	1	4	12	8		Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO	
7	1	4	12	8	1	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film-LO	
7	1	4	12	8	2	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana-LO	
7	1	4	12	8	3	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO	
7	1	4	12	8	4	Pendapatan Denda Pajak Pameran-LO	
7	1	4	12	8	5	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	
7	1	4	12	8	6	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap-LO	
7	1	4	12	8	7	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	
7	1	4	12	8	8	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	
7	1	4	12	8	9	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	
7	1	4	12	8	10	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga-LO	
7	1	4	12	9		Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	
7	1	4	12	9	1	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron-LO	
7	1	4	12	9	2	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain-LO	
7	1	4	12	9	3	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/ Stiker-LO	
7	1	4	12	9	4	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran- LO	
7	1	4	12	9	5	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan-LO	
7	1	4	12	9	6	Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara-LO	
7	1	4	12	9	7	Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung-LO	
7	1	4	12	9	8	Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara-LO	
7	1	4	12	9	9	Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/Slide- LO	
7	1	4	12	9	10	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan-LO	
7	1	4	12	10		Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan-LO	
7	1	4	12	10	1	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	
7	1	4	12	10	2	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	
7	1	4	12	11		Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	
7	1	4	12	11	1	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	
7	1	4	12	12		Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	
7	1	4	12	12	1	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	
7	1	4	12	13		Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet- LO	
7	1	4	12	13	1	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet- LO	
7	1	4	12	14		Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- LO	
7	1	4	12	14	1	Pendapatan Denda Pajak Asbes-LO	
7	1	4	12	14	2	Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis-LO	
7	1	4	12	14	3	Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata-LO	
7	1	4	12	14	4	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur-LO	
7	1	4	12	14	5	Pendapatan Denda Pajak Batu Apung-LO	
7	1	4	12	14	6	Pendapatan Denda Pajak Batu Permata-LO	
7	1	4	12	14	7	Pendapatan Denda Pajak Bentonit-LO	
7	1	4	12	14	8	Pendapatan Denda Pajak Dolomit-LO	
7	1	4	12	14	9	Pendapatan Denda Pajak Felspar-LO	
7	1	4	12	14	10	Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (<i>Halite</i>)- LO	
7	1	4	12	14	11	Pendapatan Denda Pajak Grafit-LO	
7	1	4	12	14	12	Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit-LO	
7	1	4	12	14	13	Pendapatan Denda Pajak Gips-LO	
7	1	4	12	14	14	Pendapatan Denda Pajak Kalsit-LO	
7	1	4	12	14	15	Pendapatan Denda Pajak Kaolin-LO	
7	1	4	12	14	16	Pendapatan Denda Pajak Leusit-LO	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
7	1	4	12	14	17	Pendapatan Denda Pajak Magnesit-LO	
7	1	4	12	14	18	Pendapatan Denda Pajak Mika-LO	
7	1	4	12	14	19	Pendapatan Denda Pajak Marmer-LO	
7	1	4	12	14	20	Pendapatan Denda Pajak Nitrat-LO	
7	1	4	12	14	21	Pendapatan Denda Pajak Opsidien-LO	
7	1	4	12	14	22	Pendapatan Denda Pajak Oker-LO	
7	1	4	12	14	23	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil-LO	
7	1	4	12	14	24	Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa-LO	
7	1	4	12	14	25	Pendapatan Denda Pajak Perlit-LO	
7	1	4	12	14	26	Pendapatan Denda Pajak Phospat-LO	
7	1	4	12	14	27	Pendapatan Denda Pajak Talk-LO	
7	1	4	12	14	28	Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO	
7	1	4	12	14	29	Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome-LO	
7	1	4	12	14	30	Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat-LO	
7	1	4	12	14	31	Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)-LO	
7	1	4	12	14	32	Pendapatan Denda Pajak Tras-LO	
7	1	4	12	14	33	Pendapatan Denda Pajak Yarosif-LO	
7	1	4	12	14	34	Pendapatan Denda Pajak Zeolit-LO	
7	1	4	12	14	35	Pendapatan Denda Pajak Basal-LO	
7	1	4	12	14	36	Pendapatan Denda Pajak Trakit-LO	
7	1	4	12	14	37	Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	
7	1	4	12	15		Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	
7	1	4	12	15	1	Pendapatan Denda PBBP2-LO	
7	1	4	12	16		Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	
7	1	4	12	16	1	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak- LO	
7	1	4	12	16	2	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	
7	1	4	13			Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	
7	1	4	13	1		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO	
7	1	4	13	1	1	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	
7	1	4	13	1	2	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	
7	1	4	13	1	3	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO	
7	1	4	13	1	4	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	
7	1	4	13	1	5	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar- LO	
7	1	4	13	1	6	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	
7	1	4	13	1	7	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	
7	1	4	13	1	8	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	
7	1	4	13	1	9	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	
7	1	4	13	1	10	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO	
7	1	4	13	1	11	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	
7	1	4	13	1	12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	
7	1	4	13	1	13	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	
7	1	4	13	2		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	
7	1	4	13	2	1	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	
7	1	4	13	2	2	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	
7	1	4	13	2	3	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan-LO	
7	1	4	13	2	4	Pendapatan Denda Retribusi Terminal-LO	
7	1	4	13	2	5	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	
7	1	4	13	2	6	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
7	1	4	13	2	7	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	
7	1	4	13	2	8	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	
7	1	4	13	2	9	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	
7	1	4	13	2	10	Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air-LO	
7	1	4	13	2	11	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	
7	1	4	13	3		Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO	
7	1	4	13	3	1	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	
7	1	4	13	3	2	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	
7	1	4	13	3	3	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	
7	1	4	13	3	4	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	
7	1	4	13	3	5	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO	
7	1	4	13	3	6	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	
7	1	4	14			Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	
7	1	4	14	1		Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	
7	1	4	14	1	1	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	
7	1	4	15			Pendapatan dari Pengembalian-LO	
7	1	4	15	1		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO	
7	1	4	15	1	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO	
7	1	4	15	2		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan-LO	
7	1	4	15	2	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan-LO	
7	1	4	15	3		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	
7	1	4	15	3	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	
7	1	4	15	4		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	
7	1	4	15	4	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	
7	1	4	15	5		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	
7	1	4	15	5	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK-LO	
7	1	4	15	6		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)-LO	
7	1	4	15	6	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM-LO	
7	1	4	15	7		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-LO	
7	1	4	15	7	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKN-LO	
7	1	4	16			Pendapatan dari BLUD-LO	
7	1	4	16	1		Pendapatan dari BLUD ...-LO	
7	1	4	16	1	1	Pendapatan dari BLUD ...-LO	
7	1	4	16	1	2	Dst ...	
7	1	4	17			Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	
7	1	4	17	1		Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD-LO	
7	1	4	17	1	1	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD-LO	
7	1	4	17	2		Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO	
7	1	4	17	2	1	Pendapatan Denda Hasil dari Kerjasama Penyediaan Infrastruktur-LO	
7	1	4	18			Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	
7	1	4	18	1		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	
7	1	4	18	1	1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
7	1	4	19			Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO	
7	1	4	19	1		Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO	
7	1	4	19	1	1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO	
7	1	4	20			Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	
7	1	4	20	1		Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	
7	1	4	20	1	1	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	
7	1	4	21			Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	
7	1	4	21	1		Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	
7	1	4	21	1	1	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah ...-LO	
7	1	4	21	1	2	Dst ...-LO	
7	1	4	22			Pendapatan Zakat-LO	
7	1	4	22	1		Pendapatan Zakat-LO	
7	1	4	22	1	1	Pendapatan Zakat-LO	
7	2					PENDAPATAN TRANSFER-LO	
7	2	1				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	
7	2	1	1			Dana Perimbangan-LO	
7	2	1	1	1		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	
7	2	1	1	1	1	DBH PBB-LO	
7	2	1	1	1	2	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	
7	2	1	1	1	3	DBH PPh Pasal 21-LO	
7	2	1	1	1	4	DBH CHT-LO	
7	2	1	1	1	5	DBH SDA Minyak Bumi-LO	
7	2	1	1	1	6	DBH SDA Gas Bumi-LO	
7	2	1	1	1	7	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	
7	2	1	1	1	8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	
7	2	1	1	1	9	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	
7	2	1	1	1	10	DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	
7	2	1	1	1	11	DBH SDA Kehutanan-DR-LO	
7	2	1	1	1	12	DBH SDA Perikanan-LO	
7	2	1	1	1	13	DBH SDA Panas Bumi-LO	
7	2	1	1	2		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	
7	2	1	1	2	1	DAU-LO	
7	2	1	1	2	2	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	
7	2	1	1	3		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	
7	2	1	1	3	1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	
7	2	1	1	3	2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	
7	2	1	1	3	3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO	
7	2	1	1	3	4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SDLB/SMPLB/SMALB-LO	
7	2	1	1	3	5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	
7	2	1	1	3	6	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah-LO	
7	2	1	1	3	7	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Olahraga-LO	
7	2	1	1	3	8	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	
7	2	1	1	3	9	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	
7	2	1	1	3	10	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-LO	
7	2	1	1	3	11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-LO	
7	2	1	1	3	12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	
7	2	1	1	3	13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	
7	2	1	1	3	14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler- Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan-LO	
7	2	1	1	3	15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB-LO	
7	2	1	1	3	16	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Reguler-LO	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
7	2	1	1	3	17	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Reguler-LO	
7	2	1	1	3	18	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Reguler-LO	
7	2	1	1	3	19	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah- Reguler-LO	
7	2	1	1	3	20	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK- LO	
7	2	1	1	3	21	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan- Peningkatan Pelayanan Rujukan-LO	
7	2	1	1	3	22	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan- Penurunan Stunting-LO	
7	2	1	1	3	23	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan- Pengendalian Penyakit-LO	
7	2	1	1	3	24	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan-LO	
7	2	1	1	3	25	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	
7	2	1	1	3	26	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO	
7	2	1	1	3	27	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	
7	2	1	1	3	28	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-LO	
7	2	1	1	3	29	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan-LO	
7	2	1	1	3	30	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	
7	2	1	1	3	31	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO	
7	2	1	1	3	32	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan-LO	
7	2	1	1	3	33	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi- Penguatan Puskesmas-DTPK-LO	
7	2	1	1	3	34	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi- Penguatan Pembangunan Rumah Sakit Pratama-LO	
7	2	1	1	3	35	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman- Afirmasi-LO	
7	2	1	1	3	36	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi-LO	
7	2	1	1	3	37	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi-LO	
7	2	1	1	3	38	DAK Fisik-Bidang Transportasi-Afirmasi-LO	
7	2	1	1	3	39	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD-LO	
7	2	1	1	3	40	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP-LO	
7	2	1	1	3	41	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA-LO	
7	2	1	1	4		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	
7	2	1	1	4	1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	
7	2	1	1	4	2	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi-LO	
7	2	1	1	4	3	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	
7	2	1	1	4	4	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	
7	2	1	1	4	5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	
7	2	1	1	4	6	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	
7	2	1	1	4	7	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	
7	2	1	1	4	8	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	
7	2	1	1	4	9	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	
7	2	1	1	4	10	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya-LO	
7	2	1	1	4	11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	
7	2	1	1	4	12	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi RS-LO	
7	2	1	1	4	13	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas- LO	
7	2	1	1	4	14	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Labkesda-LO	
7	2	1	1	4	15	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan-LO	
7	2	1	1	4	16	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	
7	2	1	1	4	17	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	
7	2	1	1	4	18	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	
7	2	1	1	4	19	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan	
7	2	1	1	4	20	DAK Non Fisik-Dana BLPS-LO	
7	2	1	2			Dana Insentif Daerah (DID)-LO	
7	2	1	2	1		DID-LO	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
7	2	1	2	1	1	DID-LO	
7	2	1	3			Dana Otonomi Khusus-LO	
7	2	1	3	1		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-LO	
7	2	1	3	1	1	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-LO	
7	2	1	3	2		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat- LO	
7	2	1	3	2	1	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat- LO	
7	2	1	3	3		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh-LO	
7	2	1	3	3	1	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh-LO	
7	2	1	3	4		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua-LO	
7	2	1	3	4	1	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua-LO	
7	2	1	3	5		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat-LO	
7	2	1	3	5	1	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat-LO	
7	2	1	4			Dana Keistimewaan-LO	
7	2	1	4	1		Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta-LO	
7	2	1	4	1	1	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta-LO	
7	2	1	5			Dana Desa-LO	
7	2	1	5	1		Dana Desa-LO	
7	2	1	5	1	1	Dana Desa-LO	
7	2	2				Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	
7	2	2	1			Pendapatan Bagi Hasil-LO	
7	2	2	1	1		Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	
7	2	2	1	1	1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	
7	2	2	1	1	2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	
7	2	2	1	1	3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	
7	2	2	1	1	4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	
7	2	2	1	1	5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	
7	2	2	2			Bantuan Keuangan	
7	2	2	2	1		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	
7	2	2	2	1	1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi ...	
7	2	2	2	1	2	Dst ...	
7	2	2	2	2		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	
7	2	2	2	2	1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi ...	
7	2	2	2	2	2	Dst ...	
7	2	2	2	3		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	
7	2	2	2	3	1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota ...	
7	2	2	2	3	2	Dst ...	
7	2	2	2	4		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	
7	2	2	2	4	1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota ...	
7	2	2	2	4	2	Dst ...	
7	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	
7	3	1				Pendapatan Hibah-LO	
7	3	1	1			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	
7	3	1	1	1		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	
7	3	1	1	1	1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat ...-LO	
7	3	1	1	1	2	Dst ...	
7	3	1	2			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	
7	3	1	2	1		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	
7	3	1	2	1	1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah ...- LO	
7	3	1	2	1	2	Dst ...	
7	3	1	3			Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
						Dalam Negeri-LO	
7	3	1	3	1		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	
7	3	1	3	1	1	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	
7	3	1	3	1	2	Dst ...	
7	3	1	4			Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	
7	3	1	4	1		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	
7	3	1	4	1	1	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri ...-LO	
7	3	1	4	1	2	Dst ...	
7	3	1	4	2		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri-LO	
7	3	1	4	2	1	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri ...-LO	
7	3	1	4	2	2	Dst ...	
7	3	1	4	3		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	
7	3	1	4	3	1	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri ...-LO	
7	3	1	4	3	2	Dst ...	
7	3	1	4	4		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri-LO	
7	3	1	4	4	1	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri ...-LO	
7	3	1	4	4	2	Dst ...	
7	3	1	5			Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	
7	3	1	5	1		Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	
7	3	1	5	1	1	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis ...-LO	
7	3	1	5	1	2	Dst ...	
7	3	2				Dana Darurat-LO	
7	3	2	1			Dana Darurat-LO	
7	3	2	1	1		Dana Darurat-LO	
7	3	2	1	1	1	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana-LO	
7	3	3				Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	
7	3	3	1			Lain-lain Pendapatan-LO	
7	3	3	1	1		Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	
7	3	3	1	1	1	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	
7	3	3	1	2		Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO	
7	3	3	1	2	1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah-LO	
7	3	3	1	2	2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya-LO	
7	3	3	1	2	3	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN-LO	
7	3	3	1	2	4	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD-LO	
7	3	3	1	2	5	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	
7	3	3	1	2	6	Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik-LO	
7	4					SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	
7	4	1				Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	
7	4	1	1			Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	
7	4	1	1	1		Surplus Penjualan Tanah-LO	
7	4	1	1	1	1	Surplus Penjualan Tanah-LO	
7	4	1	1	2		Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	
7	4	1	1	2	1	Surplus Penjualan Alat Besar-LO	
7	4	1	1	2	2	Surplus Penjualan Alat Angkutan-LO	
7	4	1	1	2	3	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur- LO	
7	4	1	1	2	4	Surplus Penjualan Alat Pertanian-LO	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
7	4	1	1	2	5	Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	
7	4	1	1	2	6	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO	
7	4	1	1	2	7	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO	
7	4	1	1	2	8	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-LO	
7	4	1	1	2	10	Surplus Penjualan Komputer-LO	
7	4	1	1	2	11	Surplus Penjualan Alat Eksplorasi-LO	
7	4	1	1	2	12	Surplus Penjualan Alat Pengeboran-LO	
7	4	1	1	2	13	Surplus Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO	
7	4	1	1	2	14	Surplus Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-LO	
7	4	1	1	2	15	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-LO	
7	4	1	1	2	16	Surplus Penjualan Alat Peraga-LO	
7	4	1	1	2	17	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi- LO	
7	4	1	1	2	18	Surplus Penjualan Rambu-Rambu-LO	
7	4	1	1	2	19	Surplus Penjualan Peralatan Olahraga-LO	
7	4	1	1	3		Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan-LO	
7	4	1	1	3	1	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-LO	
7	4	1	1	3	2	Surplus Penjualan Monumen-LO	
7	4	1	1	3	3	Surplus Penjualan Bangunan Menara-LO	
7	4	1	1	3	4	Surplus Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO	
7	4	1	1	4		Surplus Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi- LO	
7	4	1	1	4	1	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-LO	
7	4	1	1	4	2	Surplus Penjualan Bangunan Air-LO	
7	4	1	1	4	3	Surplus Penjualan Instalasi-LO	
7	4	1	1	4	4	Surplus Penjualan Jaringan-LO	
7	4	1	1	5		Surplus Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	
7	4	1	1	5	1	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-LO	
7	4	1	1	5	2	Surplus Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO	
7	4	1	1	5	3	Surplus Penjualan Hewan-LO	
7	4	1	1	5	4	Surplus Penjualan Biota Perairan-LO	
7	4	1	1	5	5	Surplus Penjualan Tanaman-LO	
7	4	1	1	5	6	Surplus Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-	
7	4	1	1	5	7	Surplus Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi- LO	
7	4	1	1	6		Surplus Penjualan Aset Lainnya-LO	
7	4	1	1	6	1	Surplus Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO	
7	4	1	1	6	2	Surplus Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain- Lain-LO	
7	4	1	2			Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	
7	4	1	2	1		Surplus Tukar Menukar Tanah-LO	
7	4	1	2	1	1	Surplus Tukar Menukar Tanah -LO	
7	4	1	2	2		Surplus Tukar Menukar Peralatan dan Mesin- LO	
7	4	1	2	2	1	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-LO	
7	4	1	2	2	2	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-LO	
7	4	1	2	2	3	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO	
7	4	1	2	2	4	Surplus Tukar Menukar Alat Pertanian-LO	
7	4	1	2	2	5	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	
7	4	1	2	2	6	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO	
7	4	1	2	2	7	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO	
7	4	1	2	2	8	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-LO	
7	4	1	2	2	10	Surplus Tukar Menukar Komputer-LO	
7	4	1	2	2	11	Surplus Tukar Menukar Alat Eksplorasi-LO	
7	4	1	2	2	12	Surplus Tukar Menukar Alat Pengeboran-LO	
7	4	1	2	2	13	Surplus Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
7	4	1	2	2	14	Surplus Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi- LO	
7	4	1	2	2	15	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-LO	
7	4	1	2	2	16	Surplus Tukar Menukar Alat Peraga-LO	
7	4	1	2	2	17	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/ Produksi-LO	
7	4	1	2	2	18	Surplus Tukar Menukar Rambu-Rambu-LO	
7	4	1	2	2	19	Surplus Tukar Menukar Peralatan Olahraga-LO	
7	4	1	2	3		Surplus Tukar Bangunan-LO	
7	4	1	2	3	1	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO	
7	4	1	2	3	2	Surplus Tukar Menukar Monumen-LO	
7	4	1	2	3	3	Surplus Tukar Menukar Bangunan Menara-LO	
7	4	1	2	3	4	Surplus Tukar Kontrol/Pasti-LO	
7	4	1	2	4		Surplus Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO	
7	4	1	2	4	1	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan- LO	
7	4	1	2	4	2	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-LO	
7	4	1	2	4	3	Surplus Tukar Menukar Instalasi-LO	
7	4	1	2	4	4	Surplus Tukar Menukar Jaringan-LO	
7	4	1	2	5		Surplus Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO	
7	4	1	2	5	1	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan- LO	
7	4	1	2	5	2	Surplus Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO	
7	4	1	2	5	3	Surplus Tukar Menukar Hewan-LO	
7	4	1	2	5	4	Surplus Tukar Menukar Biota Perairan-LO	
7	4	1	2	5	5	Surplus Tukar Menukar Tanaman-LO	
7	4	1	2	5	6	Surplus Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-LO	
7	4	1	2	5	7	Surplus Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi-LO	
7	4	1	2	6		Surplus Tukar Menukar Aset Lainnya-LO	
7	4	1	2	6	1	Surplus Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO	
7	4	1	2	6	2	Surplus Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO	
7	4	1	3			Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang- LO	
7	4	1	3	1		Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang	
7	4	1	3	1	1	Surplus Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara-LO	
7	4	1	3	1	2	Surplus Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah-LO	
7	4	1	3	1	3	Surplus Pelepasan Investasi dalam Obligasi-LO	
7	4	1	3	1	4	Surplus Pelepasan Investasi dalam Proyek Pembangunan-LO	
7	4	1	3	1	5	Surplus Pelepasan Dana Bergulir-LO	
7	4	1	3	2		Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen-LO	
7	4	1	3	2	1	Surplus Pelepasan Penyertaan Modal-LO	
7	4	2				Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	
7	4	2	1			Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	
7	4	2	1	1		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah-LO	
7	4	2	1	1	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah ...-LO	
7	4	2	1	1	2	Dst ...	
7	4	2	1	2		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang-LO	
7	4	2	1	2	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang ...-LO	
7	4	2	1	2	2	Dst ...	
7	4	2	1	3		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO	
7	4	2	1	3	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah ...-LO	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
7	4	2	1	3	2	Dst ...	
7	4	2	1	4		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO	
7	4	2	1	4	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang ...-LO	
7	4	2	1	4	2	Dst ...	
7	4	2	1	5		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Menengah-LO	
7	4	2	1	5	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Menengah ...-LO	
7	4	2	1	5	2	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Menengah ...-LO	
7	4	2	1	6		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Panjang-LO	
7	4	2	1	6	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Panjang ...-LO	
7	4	2	1	6	2	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Panjang ...-LO	
7	4	2	2			Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	
7	4	2	2	1		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- BUMN-Jangka Menengah-LO	
7	4	2	2	1	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- BUMN-Jangka Menengah ...-LO	
7	4	2	2	1	2	Dst ...	
7	4	2	2	2		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- BUMN-Jangka Panjang-LO	
7	4	2	2	2	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- BUMN-Jangka Panjang ...-LO	
7	4	2	2	2	2	Dst ...	
7	4	2	2	3		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- BUMD-Jangka Menengah-LO	
7	4	2	2	3	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- BUMD-Jangka Menengah ...-LO	
7	4	2	2	3	2	Dst ...	
7	4	2	2	4		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- BUMD-Jangka Panjang-LO	
7	4	2	2	4	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- BUMD-Jangka Panjang ...-LO	
7	4	2	2	4	2	Dst ...	
7	4	2	2	5		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Menengah-LO	
7	4	2	2	5	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Menengah ...-LO	
7	4	2	2	5	2	Dst ...	
7	4	2	2	6		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Panjang-LO	
7	4	2	2	6	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Panjang ...-LO	
7	4	2	2	6	2	Dst ...	
7	4	2	3			Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	
7	4	2	3	1		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Menengah-LO	
7	4	2	3	1	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Menengah ...-LO	
7	4	2	3	1	2	Dst ...	
7	4	2	3	2		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Panjang-LO	
7	4	2	3	2	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Panjang ...-LO	
7	4	2	3	2	2	Dst ...	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
7	4	2	3	3		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Menengah-LO	
7	4	2	3	3	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-	
7	4	2	3	3	2	Dst ...	
7	4	2	3	4		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Panjang-LO	
7	4	2	3	4	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Panjang ...-LO	
7	4	2	3	4	2	Dst ...	
7	4	2	3	5		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Menengah-LO	
7	4	2	3	5	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Menengah ...-LO	
7	4	2	3	5	2	Dst ...	
7	4	2	3	6		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Panjang-LO	
7	4	2	3	6	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Panjang ...-LO	
7	4	2	3	6	2	Dst ...	
7	4	2	4			Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO	
7	4	2	4	1		Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO	
7	4	2	4	1	1	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO	
8						BEBAN DAERAH	
8	1					BEBAN OPERASI	
8	1	1				Beban Pegawai	
8	1	1	1			Beban Gaji dan Tunjangan ASN	
8	1	1	1	1		Beban Gaji Pokok ASN	
8	1	1	1	1	1	Beban Gaji Pokok PNS	
8	1	1	1	1	2	Beban Gaji Pokok PPPK	
8	1	1	1	2		Beban Tunjangan Keluarga ASN	
8	1	1	1	2	1	Beban Tunjangan Keluarga PNS	
8	1	1	1	2	2	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	
8	1	1	1	3		Beban Tunjangan Jabatan ASN	
8	1	1	1	3	1	Beban Tunjangan Jabatan PNS	
8	1	1	1	3	2	Beban Tunjangan Jabatan PPPK	
8	1	1	1	4		Beban Tunjangan Fungsional ASN	
8	1	1	1	4	1	Beban Tunjangan Fungsional PNS	
8	1	1	1	4	2	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	
8	1	1	1	5		Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	
8	1	1	1	5	1	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	
8	1	1	1	5	2	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	
8	1	1	1	6		Beban Tunjangan Beras ASN	
8	1	1	1	6	1	Beban Tunjangan Beras PNS	
8	1	1	1	6	2	Beban Tunjangan Beras PPPK	
8	1	1	1	7		Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	
8	1	1	1	7	1	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	
8	1	1	1	7	2	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	
8	1	1	1	8		Beban Pembulatan Gaji ASN	
8	1	1	1	8	1	Beban Pembulatan Gaji PNS	
8	1	1	1	8	2	Beban Pembulatan Gaji PPPK	
8	1	1	1	9		Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	
8	1	1	1	9	1	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	
8	1	1	1	9	2	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	
8	1	1	1	10		Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	
8	1	1	1	10	1	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	
8	1	1	1	10	2	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	
8	1	1	1	11		Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	1	1	11	1	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	
8	1	1	1	11	2	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	
8	1	1	2			Beban Tambahan Penghasilan ASN	
8	1	1	2	1		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	
8	1	1	2	1	1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	
8	1	1	2	1	2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	
8	1	1	2	2		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	
8	1	1	2	2	1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	
8	1	1	2	2	2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	
8	1	1	2	3		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	
8	1	1	2	3	1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	
8	1	1	2	3	2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	
8	1	1	2	4		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	
8	1	1	2	4	1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	
8	1	1	2	4	2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	
8	1	1	2	5		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	
8	1	1	2	5	1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	
8	1	1	2	5	2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	
8	1	1	3			Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	
8	1	1	3	1		Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	
8	1	1	3	1	1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	
8	1	1	3	1	2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
8	1	1	3	1	3	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
8	1	1	3	1	4	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	
8	1	1	3	1	5	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	
8	1	1	3	1	6	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	
8	1	1	3	1	7	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	
8	1	1	3	1	8	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	
8	1	1	3	1	9	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	
8	1	1	3	1	10	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	
8	1	1	3	1	11	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	
8	1	1	3	1	12	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	
8	1	1	3	1	13	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	
8	1	1	3	1	14	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
8	1	1	3	1	15	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
8	1	1	3	1	16	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
8	1	1	3	2		Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	
8	1	1	3	2	1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	
8	1	1	3	2	2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	
8	1	1	3	2	3	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
8	1	1	3	2	4	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum -Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	1	3	2	5	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pelayanan Pasar	
8	1	1	3	2	6	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	
8	1	1	3	2	7	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
8	1	1	3	2	8	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	
8	1	1	3	2	9	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
8	1	1	3	2	10	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	
8	1	1	3	2	11	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	
8	1	1	3	2	12	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	
8	1	1	3	2	13	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	
8	1	1	3	2	14	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah	
8	1	1	3	2	15	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	
8	1	1	3	2	16	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan	
8	1	1	3	2	17	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	
8	1	1	3	2	18	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	
8	1	1	3	2	19	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	
8	1	1	3	2	20	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	
8	1	1	3	2	21	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	
8	1	1	3	2	22	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan	
8	1	1	3	2	23	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	
8	1	1	3	2	24	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	
8	1	1	3	2	25	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan	
8	1	1	3	2	26	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
8	1	1	3	2	27	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	
8	1	1	3	2	28	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	
8	1	1	3	2	29	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas	
8	1	1	3	2	30	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
8	1	1	3	3		Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	
8	1	1	3	3	1	Beban TPG PNSD	
8	1	1	3	4		Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	
8	1	1	3	4	1	Beban TKG PNSD	
8	1	1	3	5		Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	
8	1	1	3	5	1	Beban Tamsil Guru PNSD	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	1	3	6		Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	
8	1	1	3	6	1	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	
8	1	1	3	7		Beban Jasa Pelayanan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
8	1	1	3	7	1	Beban Jasa Pelayanan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
8	1	1	4			Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	
8	1	1	4	1		Beban Uang Representasi DPRD	
8	1	1	4	1	1	Beban Uang Representasi DPRD	
8	1	1	4	2		Beban Tunjangan Keluarga DPRD	
8	1	1	4	2	1	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	
8	1	1	4	3		Beban Tunjangan Beras DPRD	
8	1	1	4	3	1	Beban Tunjangan Beras DPRD	
8	1	1	4	4		Beban Uang Paket DPRD	
8	1	1	4	4	1	Beban Uang Paket DPRD	
8	1	1	4	5		Beban Tunjangan Jabatan DPRD	
8	1	1	4	5	1	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	
8	1	1	4	6		Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	
8	1	1	4	6	1	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	
8	1	1	4	7		Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	
8	1	1	4	7	1	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	
8	1	1	4	8		Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	
8	1	1	4	8	1	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	
8	1	1	4	9		Beban Tunjangan Reses DPRD	
8	1	1	4	9	1	Beban Tunjangan Reses DPRD	
8	1	1	4	10		Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	
8	1	1	4	10	1	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	
8	1	1	4	11		Beban Pembulatan Gaji DPRD	
8	1	1	4	11	1	Beban Pembulatan Gaji DPRD	
8	1	1	4	12		Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	
8	1	1	4	12	1	Beban Jaminan Kesehatan DPRD	
8	1	1	4	12	2	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	
8	1	1	4	12	3	Beban Jaminan Kematian DPRD	
8	1	1	4	12	4	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	
8	1	1	4	13		Beban Tunjangan Transportasi DPRD	
8	1	1	4	13	1	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	
8	1	1	4	14		Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	
8	1	1	4	14	1	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	
8	1	1	5			Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	
8	1	1	5	1		Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	
8	1	1	5	1	1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	
8	1	1	5	2		Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	
8	1	1	5	2	1	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	
8	1	1	5	3		Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	
8	1	1	5	3	1	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	
8	1	1	5	4		Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	
8	1	1	5	4	1	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	
8	1	1	5	5		Beban Tunjangan KDH/WKDH	
8	1	1	5	5	1	Beban Tunjangan KDH/WKDH	
8	1	1	5	6		Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	
8	1	1	5	6	1	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	
8	1	1	5	7		Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	1	5	7	1	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	
8	1	1	5	8		Beban Iuran KDH/WKDH	
8	1	1	5	8	1	Beban Iuran KDH/WKDH	
8	1	1	5	9		Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	
8	1	1	5	9	1	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	
8	1	1	5	10		Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	
8	1	1	5	10	1	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	
8	1	1	5	10	2	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
8	1	1	5	10	3	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
8	1	1	5	10	4	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	
8	1	1	5	10	5	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok	
8	1	1	5	10	6	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	
8	1	1	5	10	7	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	
8	1	1	5	10	8	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	
8	1	1	5	10	9	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	
8	1	1	5	10	10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	
8	1	1	5	10	11	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	
8	1	1	5	10	12	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	
8	1	1	5	10	13	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	
8	1	1	5	10	14	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
8	1	1	5	10	15	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
8	1	1	5	10	16	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
8	1	1	5	11		Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	
8	1	1	5	11	1	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	
8	1	1	5	11	2	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
8	1	1	5	11	3	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
8	1	1	5	11	4	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
8	1	1	5	11	5	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	
8	1	1	5	11	6	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	
8	1	1	5	11	7	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
8	1	1	5	11	8	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penggantian Biaya Cetak Peta	
8	1	1	5	11	9	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
8	1	1	5	11	10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	1	5	11	11	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	
8	1	1	5	11	12	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	
8	1	1	5	11	13	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	
8	1	1	5	11	14	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	
8	1	1	5	11	15	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	
8	1	1	5	11	16	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	
8	1	1	5	11	17	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	
8	1	1	5	11	18	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	
8	1	1	5	11	19	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	
8	1	1	5	11	20	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	
8	1	1	5	11	21	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	
8	1	1	5	11	22	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	
8	1	1	5	11	23	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyeberangan Air	
8	1	1	5	11	24	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	
8	1	1	5	11	25	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan bagi KDH/WKDH	
8	1	1	5	11	26	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
8	1	1	5	11	27	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	
8	1	1	5	11	28	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	
8	1	1	5	11	29	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Pengendalian Lalu Lintas	
8	1	1	5	11	30	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
8	1	1	6			Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	
8	1	1	6	1		Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	
8	1	1	6	1	1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	
8	1	1	6	2		Beban Dana Operasional KDH/WKDH	
8	1	1	6	2	1	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	
8	1	2				Beban Barang dan Jasa	
8	1	2	1			Beban Barang	
8	1	2	1	1		Beban Bahan Pakai Habis	
8	1	2	1	1	1	Beban Alat Tulis Kantor	
8	1	2	1	1	2	Beban Dokumen/Administrasi Tender	
8	1	2	1	1	3	Beban Alat Listrik dan Elektronik	
8	1	2	1	1	4	Beban Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	
8	1	2	1	1	5	Beban Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	
8	1	2	1	1	6	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	1	1	7	Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	
8	1	2	1	1	8	Beban Pengisian Tabung Gas	
8	1	2	1	1	9	Beban Alat Laboratorium	
8	1	2	1	1	10	Beban Alat Rumah Tangga Kantor	
8	1	2	1	1	11	Beban Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir	
8	1	2	1	1	12	Beban Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi	
8	1	2	1	1	13	Beban Perkakas Kerja	
8	1	2	1	1	14	Beban Alat Kesehatan Pakai Habis	
8	1	2	1	1	15	Beban Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi	
8	1	2	1	1	16	Beban Perlengkapan Penerangan Jalan Umum	
8	1	2	1	1	17	Beban Bahan Peraga	
8	1	2	1	1	18	Beban Tong Sampah	
8	1	2	1	1	19	Beban Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan	
8	1	2	1	1	20	Beban Barang Pakai Habis Kesehatan	
8	1	2	1	1	21	Beban Barang Pakai Habis Kebersihan	
8	1	2	1	1	22	Beban Barang Pakai Habis Keamanan dan Ketertiban	
8	1	2	1	1	23	Beban Barang Pakai Habis Lingkungan Hidup	
8	1	2	1	1	24	Beban Barang Pakai Habis Penanggulangan Bencana	
8	1	2	1	1	25	Beban Barang Pakai Habis Olahraga	
8	1	2	1	1	26	Beban Barang Pakai Habis Kesenian dan Kebudayaan	
8	1	2	1	1	27	Beban Barang Pakai Habis Transportasi dan Lalu Lintas	
8	1	2	1	1	28	Beban Barang Pakai Habis Perikanan dan	
8	1	2	1	1	29	Beban Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan	
8	1	2	1	1	30	Beban Barang Pakai Habis Pertamanan dan Pemakaman	
8	1	2	1	1	31	Beban Barang Pakai Habis Perairan dan Tata Air	
8	1	2	1	1	32	Beban Barang Pakai Habis Bangunan	
8	1	2	1	1	33	Beban Barang Pakai Habis Jalan dan Jembatan	
8	1	2	1	1	34	Beban Barang Pakai Habis Saluran	
8	1	2	1	1	35	Beban Barang Pakai Habis Sandang	
8	1	2	1	1	36	Beban Barang Pakai Habis Pangan	
8	1	2	1	1	37	Beban Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi	
8	1	2	1	2		Beban Bahan/Material	
8	1	2	1	2	1	Beban Bahan Baku Bangunan	
8	1	2	1	2	2	Beban Bahan/Bibit Tanaman	
8	1	2	1	2	3	Beban Bibit Ternak	
8	1	2	1	2	4	Beban Bahan Obat-Obatan	
8	1	2	1	2	5	Beban Bahan Kimia	
8	1	2	1	2	6	Beban Bahan Laboratorium	
8	1	2	1	2	7	Beban Bahan dan Pangan	
8	1	2	1	2	8	Beban Bahan Makanan Ternak/Binatang	
8	1	2	1	2	9	Beban Bahan Percontohan	
8	1	2	1	2	10	Beban Ban Kendaraan Dinas Operasional	
8	1	2	1	2	11	Beban Ban Kendaraan Dinas Operasional Khusus	
8	1	2	1	2	12	Beban Ban Sepeda Motor Dinas Operasional	
8	1	2	1	2	13	Beban Ban Alat-Alat Berat	
8	1	2	1	2	14	Beban Aki Kendaraan Dinas Operasional	
8	1	2	1	2	15	Beban Aki Sepeda Motor Dinas Operasional	
8	1	2	1	2	16	Beban Aki Alat-Alat Berat	
8	1	2	1	2	17	Beban Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional	
8	1	2	1	2	18	Beban Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Khusus	
8	1	2	1	2	19	Beban Suku Cadang Sepeda Motor Dinas Operasional	
8	1	2	1	2	20	Beban Suku Cadang Alat-Alat Berat	
8	1	2	1	2	21	Beban Suku Cadang Transportasi Laut dan Sungai	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	1	2	22	Beban BBM Kendaraan Dinas Operasional	
8	1	2	1	2	23	Beban BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus	
8	1	2	1	2	24	Beban BBM Sepeda Motor Dinas Operasional	
8	1	2	1	2	25	Beban BBM Alat-Alat Berat/Genset	
8	1	2	1	2	26	Beban BBM Transportasi Laut dan Sungai	
8	1	2	1	2	27	Beban BBG Kendaraan Bermotor	
8	1	2	1	2	28	Beban Suku Cadang Alat-Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi	
8	1	2	1	2	29	Beban Aki Kendaraan Dinas Operasional Khusus	
8	1	2	1	2	30	Beban Papan Nama Kepemilikan Aset	
8	1	2	1	3		Beban Cetak/Penggandaan	
8	1	2	1	3	1	Beban Cetak	
8	1	2	1	3	2	Beban Penggandaan	
8	1	2	1	4		Beban Makanan dan Minuman	
8	1	2	1	4	1	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	
8	1	2	1	4	2	Beban Makanan dan Minuman Rapat	
8	1	2	1	4	3	Beban Makanan dan Minuman Tamu	
8	1	2	1	4	4	Beban Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia	
8	1	2	1	4	5	Beban Makanan dan Minuman Lembur	
8	1	2	1	4	6	Beban Makanan dan Minuman Pemberian Makanan Tambahan pada Pos Pelayanan Terpadu	
8	1	2	1	5		Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	
8	1	2	1	5	1	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	
8	1	2	1	5	2	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	
8	1	2	1	5	3	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	
8	1	2	1	5	4	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	
8	1	2	1	5	5	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	
8	1	2	1	5	6	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	
8	1	2	1	6		Beban Pakaian Kerja	
8	1	2	1	6	1	Beban Pakaian Kerja Lapangan	
8	1	2	1	6	2	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	
8	1	2	1	6	3	Beban Pakaian Kerja Bengkel	
8	1	2	1	7		Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	
8	1	2	1	7	1	Beban Pakaian KORPRI	
8	1	2	1	7	2	Beban Pakaian Adat Daerah	
8	1	2	1	7	3	Beban Pakaian Batik Tradisional	
8	1	2	1	7	4	Beban Pakaian Olahraga	
8	1	2	1	7	5	Beban Pakaian Paskibraka	
8	1	2	1	7	5	Beban Pakaian Jas/Safari	
8	1	2	2			Beban Jasa	
8	1	2	2	1		Beban Jasa Kantor	
8	1	2	2	1	1	Beban Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan	
8	1	2	2	1	2	Beban Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	
8	1	2	2	1	3	Beban Jasa Perangkat UKPBJ	
8	1	2	2	1	4	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	
8	1	2	2	1	5	Beban Jasa Pengurus/Penyimpan BMD	
8	1	2	2	1	6	Beban Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	
8	1	2	2	1	7	Beban Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara	
8	1	2	2	1	8	Beban Jasa Penyuluh Non ASN	
8	1	2	2	1	9	Beban Jasa Rohaniawan	
8	1	2	2	1	10	Beban Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa	
8	1	2	2	1	11	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	2	1	12	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	
8	1	2	2	1	13	Beban Jasa Tenaga Pengamanan	
8	1	2	2	1	14	Beban Telepon	
8	1	2	2	1	15	Beban Air	
8	1	2	2	1	16	Beban Listrik	
8	1	2	2	1	17	Beban Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	
8	1	2	2	1	18	Beban Surat Kabar/Majalah	
8	1	2	2	1	19	Beban Kawat/Faksimili/Internet/Pos	
8	1	2	2	1	20	Beban Paket/Pengiriman	
8	1	2	2	1	21	Beban Sertifikasi	
8	1	2	2	1	22	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	
8	1	2	2	1	23	Beban Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	
8	1	2	2	1	24	Beban Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
8	1	2	2	1	25	Beban Jasa Kebersihan (<i>Cleaning Service</i>)	
8	1	2	2	1	26	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	
8	1	2	2	1	27	Beban Jasa Pengukuran Tanah	
8	1	2	2	1	28	Beban Jasa Jalan/Tol	
8	1	2	2	1	29	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	
8	1	2	2	1	30	Beban Penambahan Daya	
8	1	2	2	1	31	Beban Registrasi/Keanggotaan	
8	1	2	2	1	32	Beban Perawatan Pasien Tidak Mampu	
8	1	2	2	1	33	Beban Penguburan Jenazah Masyarakat Tidak Mampu	
8	1	2	2	1	34	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	
8	1	2	2	1	35	Beban Jasa Pemindahan Benda Bersejarah	
8	1	2	2	1	36	Beban Pelayanan Santunan Sosial	
8	1	2	2	1	37	Beban SPP Siswa Kurang Mampu	
8	1	2	2	1	38	Beban Pelayanan Kesehatan Korban Bencana	
8	1	2	2	1	39	Beban Jasa Pengolahan Sampah	
8	1	2	2	1	40	Beban Jasa Pengambilan/Pengumpulan/ Pengangkutan Sampah	
8	1	2	2	1	41	Beban Jasa Analisa Laboratorium	
8	1	2	2	1	42	Beban Jasa Operator Bus Sekolah	
8	1	2	2	1	43	Beban Jasa Pelayanan Pengisian BBG/BBM	
8	1	2	2	1	44	Beban Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian/Rumah Tangga	
8	1	2	2	1	45	Beban Jasa Pengurusan Perkara Hukum	
8	1	2	2	1	46	Beban Jasa Boga	
8	1	2	2	1	47	Beban Jasa Penyedia Tenaga Kerja	
8	1	2	2	1	48	Beban Jasa Asuransi, Perbankan, dan Keuangan	
8	1	2	2	1	49	Beban Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kependudukan	
8	1	2	2	1	50	Beban Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	
8	1	2	2	1	51	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	
8	1	2	2	1	52	Beban Jasa Pengemasan, Pengangkutan, Pengurusan, dan <u>Penyampaian Barang</u>	
8	1	2	2	1	53	Beban Jasa Penjahitan/Konveksi	
8	1	2	2	1	54	Beban Jasa Impor/Ekspor	
8	1	2	2	1	55	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	
8	1	2	2	1	56	Beban Jasa Penyewaan	
8	1	2	2	1	57	Beban Jasa Penyelaman	
8	1	2	2	1	58	Beban Jasa Akomodasi	
8	1	2	2	1	59	Beban Jasa Angkutan Penumpang	
8	1	2	2	1	60	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	
8	1	2	2	1	61	Beban Jasa Pengelolaan Aset	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	2	1	62	Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan	
8	1	2	2	1	63	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	
8	1	2	2	1	64	Beban Jasa Rawat Jalan (Khusus Pimpinan Daerah)	
8	1	2	2	1	65	Beban Jasa Rawat Inap (Khusus Pimpinan Daerah)	
8	1	2	2	1	66	Beban Jasa Tindakan Medis (Khusus Pimpinan Daerah)	
8	1	2	2	1	67	Beban Jasa Pemeriksaan Penunjang (Khusus Pimpinan Daerah)	
8	1	2	2	1	68	Beban Jasa Perawatan Kesehatan dan Kebugaran (Khusus Pimpinan Daerah)	
8	1	2	2	1	69	Beban Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	
8	1	2	2	1	70	Beban Pelayanan Keluarga Berencana	
8	1	2	2	1	71	Beban Jasa Operator dan Petugas Penanganan Angkutan Kebersihan	
8	1	2	2	1	72	Beban Jasa Advokat Bidang Perdata	
8	1	2	2	1	73	Beban Jasa Advokat Bidang TUN	
8	1	2	2	1	74	Beban Jasa Advokat Bidang Pidana	
8	1	2	2	1	75	Beban Jasa Operator Teknisi	
8	1	2	2	1	76	Beban Pengolahan Air Limbah	
8	1	2	2	1	77	Beban Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan Lalu Lintas	
8	1	2	2	1	78	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	
8	1	2	2	1	79	Beban Jasa Teknologi Informasi dan Kehumasan	
8	1	2	2	1	80	Beban Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan	
8	1	2	2	1	81	Beban Jasa Pemotongan Reklame	
8	1	2	2	1	82	Beban Jasa Operator Kapal Penyeberangan	
8	1	2	2	1	83	Beban Jasa Tiketing	
8	1	2	2	1	84	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	
8	1	2	2	2		Beban Jasa Asuransi	
8	1	2	2	2	1	Beban Asuransi Kesehatan	
8	1	2	2	2	2	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	
8	1	2	2	3		Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	
8	1	2	2	3	1	Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	
8	1	2	2	3	2	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat	
8	1	2	2	4		Beban Sewa Sarana Mobilitas	
8	1	2	2	4	1	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	
8	1	2	2	4	2	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	
8	1	2	2	4	3	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara	
8	1	2	2	5		Beban Sewa Alat Berat	
8	1	2	2	5	1	Beban Sewa Ekskavator	
8	1	2	2	5	2	Beban Sewa Bulldoser	
8	1	2	2	5	3	Beban Sewa <i>Dump Truck</i>	
8	1	2	2	5	4	Beban Sewa Mesin Giling	
8	1	2	2	5	5	Beban Sewa <i>Shovel Loader</i>	
8	1	2	2	5	6	Beban Sewa <i>Tyre Roler</i>	
8	1	2	2	5	7	Beban Sewa <i>Asphalt Finisher</i>	
8	1	2	2	5	8	Beban Sewa Direksi Kit	
8	1	2	2	5	9	Beban Sewa Generator Set	
8	1	2	2	5	10	Beban Sewa Kontainer/Trailer	
8	1	2	2	5	11	Beban Sewa <i>Crane</i>	
8	1	2	2	6		Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	
8	1	2	2	6	1	Beban Sewa Meja/Kursi	
8	1	2	2	6	2	Beban Sewa Komputer dan <i>Printer</i>	
8	1	2	2	6	3	Beban Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV	
8	1	2	2	6	4	Beban Sewa Tenda	
8	1	2	2	6	5	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	2	6	6	Beban Sewa Mesin Fotokopi	
8	1	2	2	6	7	Beban Sewa <i>OS/Hardware/Software</i> /Jaringan Komputer dan Lainnya	
8	1	2	2	6	8	Beban Sewa <i>Sound System</i>	
8	1	2	2	6	9	Beban Sewa Alat Kesenian	
8	1	2	2	6	10	Beban Sewa Alat Olahraga	
8	1	2	2	6	11	Beban Sewa Alat Kerja	
8	1	2	2	6	12	Beban Sewa Level/Panggung	
8	1	2	2	6	13	Beban Sewa Alat/Peraga	
8	1	2	2	7		Beban Jasa Konsultansi	
8	1	2	2	7	1	Beban Jasa Konsultansi Penelitian	
8	1	2	2	7	2	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	
8	1	2	2	7	3	Beban Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	
8	1	2	2	7	4	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	
8	1	2	2	7	5	Beban Jasa Konsultansi <i>Event Organizer</i>	
8	1	2	2	7	6	Beban Jasa Konsultansi Manajemen/ Keuangan/SDM	
8	1	2	2	7	7	Beban Jasa Konsultansi Hukum/Politik/ Ekonomi/Sosial/Budaya	
8	1	2	2	7	8	Beban Jasa Konsultansi Penilaian/ <i>Appraisal</i>	
8	1	2	2	7	9	Beban Jasa Konsultansi Rekayasa (<i>Engineering</i>)	
8	1	2	2	7	10	Beban Jasa Konsultansi Perancangan	
8	1	2	2	8		Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>)	
8	1	2	2	8	1	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi	
8	1	2	2	8	2	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Jalan	
8	1	2	2	8	3	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	
8	1	2	2	8	4	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility</i>)	
8	1	2	2	8	5	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	
8	1	2	2	8	6	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	
8	1	2	2	8	7	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	
8	1	2	2	8	8	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
8	1	2	2	8	9	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Ketenagalistrikan	
8	1	2	2	8	10	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan	
8	1	2	2	8	11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Konservasi Energi	
8	1	2	2	8	12	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan	
8	1	2	2	8	13	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan	
8	1	2	2	8	14	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian	
8	1	2	2	8	15	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Kawasan	
8	1	2	2	8	16	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Pariwisata	
8	1	2	2	8	17	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Kesehatan	
8	1	2	2	8	18	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Lembaga Masyarakat	
8	1	2	2	8	19	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Perumahan Rakyat	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	2	9		Beban Beasiswa Pendidikan PNS	
8	1	2	2	9	1	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	
8	1	2	2	9	2	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	
8	1	2	2	9	3	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	
8	1	2	2	10		Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	
8	1	2	2	10	1	Beban Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	
8	1	2	2	10	2	Beban Sosialisasi	
8	1	2	2	10	3	Beban Bimbingan Teknis	
8	1	2	2	10	4	Beban Diklat Kepemimpinan	
8	1	2	2	11		Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	
8	1	2	2	11	1	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	
8	1	2	2	11	2	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
8	1	2	2	11	3	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
8	1	2	2	11	4	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	
8	1	2	2	11	5	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	
8	1	2	2	11	6	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	
8	1	2	2	11	7	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	
8	1	2	2	11	8	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	
8	1	2	2	11	9	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	
8	1	2	2	11	10	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	
8	1	2	2	11	11	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	
8	1	2	2	11	12	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	
8	1	2	2	11	13	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	
8	1	2	2	11	14	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
8	1	2	2	11	15	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
8	1	2	2	11	16	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
8	1	2	2	12		Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	
8	1	2	2	12	1	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	
8	1	2	2	12	2	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
8	1	2	2	12	3	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
8	1	2	2	12	4	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
8	1	2	2	12	5	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	
8	1	2	2	12	6	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian	
8	1	2	2	12	7	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	2	12	8	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penggantian Biaya Cetak Peta	
8	1	2	2	12	9	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
8	1	2	2	12	10	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	
8	1	2	2	12	11	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	
8	1	2	2	12	12	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	
8	1	2	2	12	13	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	
8	1	2	2	12	14	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	
8	1	2	2	12	15	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	
8	1	2	2	12	16	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	
8	1	2	2	12	17	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	
8	1	2	2	12	18	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	
8	1	2	2	12	19	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	
8	1	2	2	12	20	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	
8	1	2	2	12	21	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	
8	1	2	2	12	22	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	
8	1	2	2	12	23	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyeberangan Air	
8	1	2	2	12	24	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	
8	1	2	2	12	25	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	
8	1	2	2	12	26	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
8	1	2	2	12	27	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	
8	1	2	2	12	28	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	
8	1	2	2	12	29	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Pengendalian Lalu Lintas bagi Pegawai Non ASN	
8	1	2	2	12	30	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas	
8	1	2	3			Beban Pemeliharaan	
8	1	2	3	1		Beban Pemeliharaan Tanah	
8	1	2	3	1	1	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	
8	1	2	3	1	2	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	
8	1	2	3	1	3	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri	
8	1	2	3	1	4	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	3	1	5	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	
8	1	2	3	1	6	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	
8	1	2	3	1	7	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	
8	1	2	3	1	8	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- Tanah Basah	
8	1	2	3	1	9	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- Tanah Kering	
8	1	2	3	1	10	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-	
8	1	2	3	1	11	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- Tanah Hutan	
8	1	2	3	1	12	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- Tanah Tandus	
8	1	2	3	1	13	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- Tanah Padang Alang-Alang/Rumput	
8	1	2	3	1	14	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- Tanah Pertanian	
8	1	2	3	1	15	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- Tanah Pertambangan	
8	1	2	3	1	16	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-	
8	1	2	3	1	17	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	
8	1	2	3	1	18	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir	
8	1	2	3	1	19	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang	
8	1	2	3	1	20	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	
8	1	2	3	1	21	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	
8	1	2	3	1	22	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah	
8	1	2	3	1	23	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan	
8	1	2	3	1	24	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air	
8	1	2	3	1	25	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi	
8	1	2	3	1	26	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan	
8	1	2	3	1	27	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah	
8	1	2	3	1	28	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah	
8	1	2	3	1	29	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	
8	1	2	3	1	30	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan	
8	1	2	3	1	31	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan	
8	1	2	3	1	32	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB	
8	1	2	3	1	33	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Kampung	
8	1	2	3	1	34	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Emplasment	
8	1	2	3	1	35	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Lapangan Lainnya	
8	1	2	3	2		Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
8	1	2	3	2	1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	
8	1	2	3	2	2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	
8	1	2	3	2	3	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	
8	1	2	3	2	4	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Pile Driver	
8	1	2	3	2	5	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar	
8	1	2	3	2	6	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	
8	1	2	3	2	7	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- Compacting Equipment	
8	1	2	3	2	8	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- Aggregate and Concrete Equipment	
8	1	2	3	2	9	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	
8	1	2	3	2	10	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	
8	1	2	3	2	11	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar	
8	1	2	3	2	12	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	3	2	13	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Dredger	
8	1	2	3	2	14	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator	
8	1	2	3	2	15	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Amphibi Dredger	
8	1	2	3	2	16	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik	
8	1	2	3	2	17	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar	
8	1	2	3	2	18	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	
8	1	2	3	2	19	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik	
8	1	2	3	2	20	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Feeder	
8	1	2	3	2	21	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Compressor	
8	1	2	3	2	22	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	
8	1	2	3	2	23	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	
8	1	2	3	2	24	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Mesin Bor	
8	1	2	3	2	25	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Unit Pemeliharaan Lapangan	
8	1	2	3	2	26	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	
8	1	2	3	2	27	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	
8	1	2	3	2	28	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	
8	1	2	3	2	29	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Mesin Tatoo	
8	1	2	3	2	30	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Perlengkapan Kebakaran Hutan	
8	1	2	3	2	31	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan Selam	
8	1	2	3	2	32	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan SAR Mountenering	
8	1	2	3	2	33	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan Intelijen	
8	1	2	3	2	34	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	
8	1	2	3	2	35	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	
8	1	2	3	2	36	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	
8	1	2	3	2	37	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
8	1	2	3	2	38	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	
8	1	2	3	2	39	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	
8	1	2	3	2	40	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor	
8	1	2	3	2	41	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur	
8	1	2	3	2	42	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	
8	1	2	3	2	43	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	
8	1	2	3	2	44	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	
8	1	2	3	2	45	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	
8	1	2	3	2	46	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	
8	1	2	3	2	47	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	
8	1	2	3	2	48	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	3	2	49	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	
8	1	2	3	2	50	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	
8	1	2	3	2	51	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	
8	1	2	3	2	52	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	
8	1	2	3	2	53	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	
8	1	2	3	2	54	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	
8	1	2	3	2	55	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	
8	1	2	3	2	56	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	
8	1	2	3	2	57	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang	
8	1	2	3	2	58	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	
8	1	2	3	2	59	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	
8	1	2	3	2	60	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	
8	1	2	3	2	61	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	
8	1	2	3	2	62	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	
8	1	2	3	2	63	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin	
8	1	2	3	2	64	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	
8	1	2	3	2	65	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	
8	1	2	3	2	66	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las	
8	1	2	3	2	67	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	
8	1	2	3	2	68	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	
8	1	2	3	2	69	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	
8	1	2	3	2	70	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	
8	1	2	3	2	71	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	
8	1	2	3	2	72	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	
8	1	2	3	2	73	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur- Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	
8	1	2	3	2	74	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)	
8	1	2	3	2	75	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	
8	1	2	3	2	76	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	3	2	77	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	
8	1	2	3	2	78	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	
8	1	2	3	2	79	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan <i>Feeting</i>	
8	1	2	3	2	80	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	
8	1	2	3	2	81	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	
8	1	2	3	2	82	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	
8	1	2	3	2	83	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligencia	
8	1	2	3	2	84	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian	
8	1	2	3	2	85	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain	
8	1	2	3	2	86	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	
8	1	2	3	2	87	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Oscilloscope	
8	1	2	3	2	88	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Universal Tester	
8	1	2	3	2	89	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	
8	1	2	3	2	90	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	
8	1	2	3	2	91	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	
8	1	2	3	2	92	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara	
8	1	2	3	2	93	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering	
8	1	2	3	2	94	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan	
8	1	2	3	2	95	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya	
8	1	2	3	2	96	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	
8	1	2	3	2	97	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Specific Set	
8	1	2	3	2	98	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam	
8	1	2	3	2	99	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan	
8	1	2	3	2	100	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu	
8	1	2	3	2	101	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Instrument Workshop	
8	1	2	3	2	102	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	
8	1	2	3	2	103	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	
8	1	2	3	2	104	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	
8	1	2	3	2	105	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen	
8	1	2	3	2	106	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	
8	1	2	3	2	107	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	
8	1	2	3	2	108	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	3	2	109	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	
8	1	2	3	2	110	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	
8	1	2	3	2	111	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	
8	1	2	3	2	112	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	
8	1	2	3	2	113	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	
8	1	2	3	2	114	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	
8	1	2	3	2	115	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	
8	1	2	3	2	116	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah	
8	1	2	3	2	117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	
8	1	2	3	2	118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Meubelair	
8	1	2	3	2	119	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	
8	1	2	3	2	120	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	
8	1	2	3	2	121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	
8	1	2	3	2	122	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	
8	1	2	3	2	123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	
8	1	2	3	2	124	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	
8	1	2	3	2	125	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Meja Kerja Pejabat	
8	1	2	3	2	126	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Meja Rapat Pejabat	
8	1	2	3	2	127	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Kerja Pejabat	
8	1	2	3	2	128	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Rapat Pejabat	
8	1	2	3	2	129	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	
8	1	2	3	2	130	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	
8	1	2	3	2	131	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Lemari dan Arsip Pejabat	
8	1	2	3	2	132	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	
8	1	2	3	2	133	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	
8	1	2	3	2	134	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	
8	1	2	3	2	135	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	
8	1	2	3	2	136	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	
8	1	2	3	2	137	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	
8	1	2	3	2	138	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	3	2	139	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	
8	1	2	3	2	140	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	
8	1	2	3	2	141	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	
8	1	2	3	2	142	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	
8	1	2	3	2	143	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	
8	1	2	3	2	144	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	
8	1	2	3	2	145	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	
8	1	2	3	2	146	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	
8	1	2	3	2	147	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit	
8	1	2	3	2	148	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	
8	1	2	3	2	149	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW	
8	1	2	3	2	150	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW	
8	1	2	3	2	151	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM	
8	1	2	3	2	152	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF	
8	1	2	3	2	153	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF	
8	1	2	3	2	154	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW	
8	1	2	3	2	155	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW	
8	1	2	3	2	156	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM	
8	1	2	3	2	157	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan	
8	1	2	3	2	158	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	
8	1	2	3	2	159	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF	
8	1	2	3	2	160	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF	
8	1	2	3	2	161	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF	
8	1	2	3	2	162	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi,	
8	1	2	3	2	163	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave FPU	
8	1	2	3	2	164	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave Terrestrial	
8	1	2	3	2	165	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave TVRO	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	3	2	166	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Dummy Load	
8	1	2	3	2	167	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher Antena	
8	1	2	3	2	168	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Switcher/Menara Antena	
8	1	2	3	2	169	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Feeder	
8	1	2	3	2	170	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Humidity Control	
8	1	2	3	2	171	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program Input Equipment	
8	1	2	3	2	172	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF	
8	1	2	3	2	173	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF	
8	1	2	3	2	174	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF	
8	1	2	3	2	175	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF	
8	1	2	3	2	176	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima	
8	1	2	3	2	177	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan	
8	1	2	3	2	178	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF	
8	1	2	3	2	179	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF	
8	1	2	3	2	180	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF	
8	1	2	3	2	181	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	
8	1	2	3	2	182	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi,	
8	1	2	3	2	183	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF	
8	1	2	3	2	184	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF	
8	1	2	3	2	185	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF	
8	1	2	3	2	186	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF	
8	1	2	3	2	187	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF	
8	1	2	3	2	188	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF	
8	1	2	3	2	189	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	
8	1	2	3	2	190	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF	
8	1	2	3	2	191	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	3	2	192	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi	
8	1	2	3	2	193	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	
8	1	2	3	2	194	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio	
8	1	2	3	2	195	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	
8	1	2	3	2	196	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	
8	1	2	3	2	197	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System	
8	1	2	3	2	198	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- Very High Frequence Omni Range (VOR)	
8	1	2	3	2	199	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- Distance Measuring Equipment (DME)	
8	1	2	3	2	200	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- Radar	
8	1	2	3	2	201	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- Alat Pengatur Telekomunikasi	
8	1	2	3	2	202	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	
8	1	2	3	2	203	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	
8	1	2	3	2	204	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	
8	1	2	3	2	205	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	
8	1	2	3	2	206	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	
8	1	2	3	2	207	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	
8	1	2	3	2	208	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	
8	1	2	3	2	209	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	
8	1	2	3	2	210	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	
8	1	2	3	2	211	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	
8	1	2	3	2	212	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	
8	1	2	3	2	213	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	
8	1	2	3	2	214	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	
8	1	2	3	2	215	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	
8	1	2	3	2	216	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	
8	1	2	3	2	217	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	3	2	218	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	
8	1	2	3	2	219	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	
8	1	2	3	2	220	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah	
8	1	2	3	2	221	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi	
8	1	2	3	2	222	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan	
8	1	2	3	2	223	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	
8	1	2	3	2	224	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	
8	1	2	3	2	225	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa	
8	1	2	3	2	226	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	
8	1	2	3	2	227	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU	
8	1	2	3	2	228	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU	
8	1	2	3	2	229	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung	
8	1	2	3	2	230	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>	
8	1	2	3	2	231	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi	
8	1	2	3	2	232	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	
8	1	2	3	2	233	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut	
8	1	2	3	2	234	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara	
8	1	2	3	2	235	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian	
8	1	2	3	2	236	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga	
8	1	2	3	2	237	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	
8	1	2	3	2	238	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	
8	1	2	3	2	239	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	
8	1	2	3	2	240	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia	
8	1	2	3	2	241	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika	
8	1	2	3	2	242	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi	
8	1	2	3	2	243	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	
8	1	2	3	2	244	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	3	2	245	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	
8	1	2	3	2	246	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam	
8	1	2	3	2	247	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	
8	1	2	3	2	248	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	
8	1	2	3	2	249	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	
8	1	2	3	2	250	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	
8	1	2	3	2	251	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	
8	1	2	3	2	252	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi	
8	1	2	3	2	253	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	
8	1	2	3	2	254	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	
8	1	2	3	2	255	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	
8	1	2	3	2	256	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	
8	1	2	3	2	257	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	
8	1	2	3	2	258	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika	
8	1	2	3	2	259	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi	
8	1	2	3	2	260	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan	
8	1	2	3	2	261	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir	
8	1	2	3	2	262	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan	
8	1	2	3	2	263	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola	
8	1	2	3	2	264	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi	
8	1	2	3	2	265	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan	
8	1	2	3	2	266	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	
8	1	2	3	2	267	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	
8	1	2	3	2	268	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	
8	1	2	3	2	269	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam	
8	1	2	3	2	270	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	
8	1	2	3	2	271	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	
8	1	2	3	2	272	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil	
8	1	2	3	2	273	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	3	2	274	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	
8	1	2	3	2	275	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik	
8	1	2	3	2	276	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik	
8	1	2	3	2	277	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	
8	1	2	3	2	278	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	
8	1	2	3	2	279	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	
8	1	2	3	2	280	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya	
8	1	2	3	2	281	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	
8	1	2	3	2	282	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi	
8	1	2	3	2	283	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	
8	1	2	3	2	284	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan	
8	1	2	3	2	285	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit	
8	1	2	3	2	286	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika	
8	1	2	3	2	287	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang	
8	1	2	3	2	288	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	
8	1	2	3	2	289	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri	
8	1	2	3	2	290	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	
8	1	2	3	2	291	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan	
8	1	2	3	2	292	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	
8	1	2	3	2	293	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	
8	1	2	3	2	294	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi	
8	1	2	3	2	295	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan	
8	1	2	3	2	296	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim	
8	1	2	3	2	297	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai	
8	1	2	3	2	298	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi	
8	1	2	3	2	299	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi	
8	1	2	3	2	300	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang	
8	1	2	3	2	301	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	3	2	302	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Analytical Instrument</i>	
8	1	2	3	2	303	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Instrument Probe/Sensor</i>	
8	1	2	3	2	304	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>General Laboratory Tool</i>	
8	1	2	3	2	305	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Glassware Plastic/Utensils</i>	
8	1	2	3	2	306	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Laboratory Safety Equipment</i>	
8	1	2	3	2	307	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	
8	1	2	3	2	308	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	
8	1	2	3	2	309	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	
8	1	2	3	2	310	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	
8	1	2	3	2	311	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	
8	1	2	3	2	312	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	
8	1	2	3	2	313	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	
8	1	2	3	2	314	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	
8	1	2	3	2	315	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	
8	1	2	3	2	316	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik	
8	1	2	3	2	317	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	
8	1	2	3	2	318	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	
8	1	2	3	2	319	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	
8	1	2	3	2	320	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	
8	1	2	3	2	321	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan	
8	1	2	3	2	322	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	
8	1	2	3	2	323	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	
8	1	2	3	2	324	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Radiation Detector	
8	1	2	3	2	325	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Modular Counting and Scientific Electronic	
8	1	2	3	2	326	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-	
8	1	2	3	2	327	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Recorder Display	
8	1	2	3	2	328	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- System/Power Supply	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	3	2	329	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Measuring/Testing Device</i>	
8	1	2	3	2	330	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Opto Electronics	
8	1	2	3	2	331	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat	
8	1	2	3	2	332	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Reactor Experimental System	
8	1	2	3	2	333	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	
8	1	2	3	2	334	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan	
8	1	2	3	2	335	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	
8	1	2	3	2	336	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan	
8	1	2	3	2	337	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan- Meteorological Equipment	
8	1	2	3	2	338	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi	
8	1	2	3	2	339	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	
8	1	2	3	2	340	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application Equipment	
8	1	2	3	2	341	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Non Destructive Test (NDT) Device</i>	
8	1	2	3	2	342	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Peralatan Hidrologi	
8	1	2	3	2	343	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	
8	1	2	3	2	344	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	
8	1	2	3	2	345	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat	
8	1	2	3	2	346	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	
8	1	2	3	2	347	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	
8	1	2	3	2	348	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	
8	1	2	3	2	349	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	
8	1	2	3	2	350	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-	
8	1	2	3	2	351	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber	
8	1	2	3	2	352	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System	
8	1	2	3	2	353	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Cavitation Tunnel	
8	1	2	3	2	354	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica- Overhead Cranes</i>	
8	1	2	3	2	355	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Peralatan Umum	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	3	2	356	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Model Ship Workshop	
8	1	2	3	2	357	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Propeller Model Workshop	
8	1	2	3	2	358	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Mechanical Workshop	
8	1	2	3	2	359	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Precision Mechanical Workshop	
8	1	2	3	2	360	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Painting Shop	
8	1	2	3	2	361	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> - Pemesinan: <i>Ship Model Preparation Shop</i>	
8	1	2	3	2	362	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> - Pemesinan: <i>Electrical Workshop</i>	
8	1	2	3	2	363	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB	
8	1	2	3	2	364	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Photo and Film Equipment	
8	1	2	3	2	365	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	
8	1	2	3	2	366	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	
8	1	2	3	2	367	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	
8	1	2	3	2	368	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	
8	1	2	3	2	369	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	
8	1	2	3	2	370	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	
8	1	2	3	2	371	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	
8	1	2	3	2	372	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natus	
8	1	2	3	2	373	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran	
8	1	2	3	2	374	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	
8	1	2	3	2	375	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat	
8	1	2	3	2	376	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	
8	1	2	3	2	404	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Jaringan	
8	1	2	3	2	405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	
8	1	2	3	2	406	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Unit Lainnya	
8	1	2	3	2	407	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	
8	1	2	3	2	408	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	
8	1	2	3	2	409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	3	2	410	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	
8	1	2	3	2	411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	
8	1	2	3	2	412	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik	
8	1	2	3	2	413	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen	
8	1	2	3	2	414	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	
8	1	2	3	2	415	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik	
8	1	2	3	2	416	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/Electric	
8	1	2	3	2	417	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual	
8	1	2	3	2	418	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya	
8	1	2	3	2	419	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk	
8	1	2	3	2	420	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar	
8	1	2	3	2	421	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya	
8	1	2	3	2	422	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka	
8	1	2	3	2	423	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek	
8	1	2	3	2	424	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar	
8	1	2	3	2	425	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu	
8	1	2	3	2	426	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya	
8	1	2	3	2	427	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak	
8	1	2	3	2	428	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran	
8	1	2	3	2	429	Beban Pemeliharaan Alat Produksi,	
8	1	2	3	2	430	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG	
8	1	2	3	2	431	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya	
8	1	2	3	2	432	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak	
8	1	2	3	2	433	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	
8	1	2	3	2	434	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan <i>Steam</i>	
8	1	2	3	2	435	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax	
8	1	2	3	2	436	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya	
8	1	2	3	2	437	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik	
8	1	2	3	2	438	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik	
8	1	2	3	2	439	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	
8	1	2	3	2	440	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur	
8	1	2	3	2	441	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	3	2	442	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi- Alat Bantu Produksi Lainnya	
8	1	2	3	2	443	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Deteksi-Radiasi	
8	1	2	3	2	444	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Deteksi-Suara	
8	1	2	3	2	445	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya	
8	1	2	3	2	446	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Baju Pengaman	
8	1	2	3	2	447	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Masker	
8	1	2	3	2	448	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Topi Kerja	
8	1	2	3	2	449	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Sabuk Pengaman	
8	1	2	3	2	450	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	
8	1	2	3	2	451	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	
8	1	2	3	2	452	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat SAR-Alat Penolong	
8	1	2	3	2	453	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	
8	1	2	3	2	454	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air	
8	1	2	3	2	455	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat SAR-Alat SAR Lainnya	
8	1	2	3	2	456	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan	
8	1	2	3	2	457	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan	
8	1	2	3	2	458	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan	
8	1	2	3	2	459	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	
8	1	2	3	2	460	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	
8	1	2	3	2	461	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik	
8	1	2	3	2	462	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya	
8	1	2	3	2	463	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	
8	1	2	3	2	464	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan	
8	1	2	3	2	465	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	
8	1	2	3	2	466	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment	
8	1	2	3	2	467	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment	
8	1	2	3	2	468	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening Equipment	
8	1	2	3	2	469	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Classifier	
8	1	2	3	2	470	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment	
8	1	2	3	2	471	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	3	2	472	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion	
8	1	2	3	2	473	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Leaching Equipment	
8	1	2	3	2	474	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gravity Sedimentation Equipment</i>	
8	1	2	3	2	475	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering Equipment	
8	1	2	3	2	476	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid	
8	1	2	3	2	477	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling (Expressor)- Equipment	
8	1	2	3	2	478	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Drying Equipment	
8	1	2	3	2	479	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment	
8	1	2	3	2	480	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Separation Equipment	
8	1	2	3	2	481	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Distillation Equipment	
8	1	2	3	2	482	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Separation Equipment	
8	1	2	3	2	483	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Isotope Separation Equipment	
8	1	2	3	2	484	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid	
8	1	2	3	2	485	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment	
8	1	2	3	2	486	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan	
8	1	2	3	2	487	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Heat Generating Equipment</i>	
8	1	2	3	2	488	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Heat Transfer Equipment</i>	
8	1	2	3	2	489	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Mechanical Process</i>	
8	1	2	3	2	490	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment	
8	1	2	3	2	491	Beban Pemeliharaan Peralatan	
8	1	2	3	2	492	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	
8	1	2	3	2	493	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	
8	1	2	3	2	494	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	
8	1	2	3	2	495	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara-Runway/Threshold Light	
8	1	2	3	2	496	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara-Visual Approach Slope Indicator (VASI)	
8	1	2	3	2	497	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara-Approach Light	
8	1	2	3	2	498	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara-Runway Identification Light (REILS)	
8	1	2	3	2	499	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara-Signal	
8	1	2	3	2	500	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara-Flood Lights	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	3	2	501	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	
8	1	2	3	2	502	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	
8	1	2	3	2	503	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	
8	1	2	3	2	504	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	
8	1	2	3	2	505	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	
8	1	2	3	2	506	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	
8	1	2	3	2	507	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air	
8	1	2	3	2	508	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara	
8	1	2	3	2	509	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	
8	1	2	3	3		Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
8	1	2	3	3	1	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	
8	1	2	3	3	2	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	
8	1	2	3	3	3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	
8	1	2	3	3	4	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	
8	1	2	3	3	5	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	
8	1	2	3	3	6	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	
8	1	2	3	3	7	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium	
8	1	2	3	3	8	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
8	1	2	3	3	9	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	
8	1	2	3	3	10	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
8	1	2	3	3	11	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	
8	1	2	3	3	12	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	
8	1	2	3	3	13	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	
8	1	2	3	3	14	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	
8	1	2	3	3	15	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	
8	1	2	3	3	16	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	
8	1	2	3	3	17	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	
8	1	2	3	3	18	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	
8	1	2	3	3	19	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	3	3	20	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan	
8	1	2	3	3	21	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	
8	1	2	3	3	22	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium	
8	1	2	3	3	23	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	
8	1	2	3	3	24	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan	
8	1	2	3	3	25	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	
8	1	2	3	3	26	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	
8	1	2	3	3	27	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
8	1	2	3	3	28	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	
8	1	2	3	3	29	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peternakan/Perikanan	
8	1	2	3	3	30	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
8	1	2	3	3	31	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika	
8	1	2	3	3	32	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	
8	1	2	3	3	33	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	
8	1	2	3	3	34	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	
8	1	2	3	3	35	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus	
8	1	2	3	3	36	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	
8	1	2	3	3	37	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
8	1	2	3	3	38	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	
8	1	2	3	3	39	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-	
8	1	2	3	3	40	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	
8	1	2	3	3	41	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	
8	1	2	3	3	42	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	
8	1	2	3	3	43	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel	
8	1	2	3	3	44	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel	
8	1	2	3	3	45	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	
8	1	2	3	3	46	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	
8	1	2	3	3	47	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan	
8	1	2	3	3	48	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
						Tempat Tinggal-Apartemen	
8	1	2	3	3	49	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	
8	1	2	3	3	50	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	
8	1	2	3	3	51	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi	
8	1	2	3	3	52	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	
8	1	2	3	3	53	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	
8	1	2	3	3	54	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	
8	1	2	3	3	55	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	
8	1	2	3	3	56	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	
8	1	2	3	3	57	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	
8	1	2	3	3	58	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas	
8	1	2	3	3	59	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya	
8	1	2	3	3	60	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	
8	1	2	3	3	61	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	
8	1	2	3	3	62	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	
8	1	2	3	3	63	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pagar	
8	1	2	3	3	64	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	
8	1	2	3	4		Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
8	1	2	3	4	1	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Nasional	
8	1	2	3	4	2	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Provinsi	
8	1	2	3	4	3	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	
8	1	2	3	4	4	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kota	
8	1	2	3	4	5	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Desa	
8	1	2	3	4	6	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Tol	
8	1	2	3	4	7	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kereta Api	
8	1	2	3	4	8	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang	
8	1	2	3	4	9	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Khusus	
8	1	2	3	4	10	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya	
8	1	2	3	4	11	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan pada Jalan Nasional	
8	1	2	3	4	12	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan pada Jalan Provinsi	
8	1	2	3	4	13	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan pada Jalan Kabupaten	
8	1	2	3	4	14	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan pada Jalan Kota	
8	1	2	3	4	15	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan pada Jalan Desa	
8	1	2	3	4	16	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan pada Jalan Tol	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	3	4	17	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan pada Jalan Kereta Api	
8	1	2	3	4	18	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	
8	1	2	3	4	19	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan pada Jalan Khusus	
8	1	2	3	4	20	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan Penyeberangan	
8	1	2	3	4	21	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	
8	1	2	3	4	22	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan Pengukur	
8	1	2	3	4	23	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan Lainnya	
8	1	2	3	4	24	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Waduk Irigasi	
8	1	2	3	4	25	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi	
8	1	2	3	4	26	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi	
8	1	2	3	4	27	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembuang Irigasi	
8	1	2	3	4	28	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi	
8	1	2	3	4	29	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pelengkap Irigasi	
8	1	2	3	4	30	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Sawah Irigasi	
8	1	2	3	4	31	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya	
8	1	2	3	4	32	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut	
8	1	2	3	4	33	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut	
8	1	2	3	4	34	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut	
8	1	2	3	4	35	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	
8	1	2	3	4	36	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	
8	1	2	3	4	37	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut	
8	1	2	3	4	38	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut	
8	1	2	3	4	39	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	
8	1	2	3	4	40	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	
8	1	2	3	4	41	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	
8	1	2	3	4	42	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	
8	1	2	3	4	43	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	
8	1	2	3	4	44	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	
8	1	2	3	4	45	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	
8	1	2	3	4	46	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	3	4	47	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya	
8	1	2	3	4	48	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	
8	1	2	3	4	49	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	
8	1	2	3	4	50	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	
8	1	2	3	4	51	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	
8	1	2	3	4	52	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	
8	1	2	3	4	53	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	
8	1	2	3	4	54	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	
8	1	2	3	4	55	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	
8	1	2	3	4	56	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	
8	1	2	3	4	57	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	
8	1	2	3	4	58	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	
8	1	2	3	4	59	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	
8	1	2	3	4	60	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	
8	1	2	3	4	61	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	
8	1	2	3	4	62	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	
8	1	2	3	4	63	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan	
8	1	2	3	4	64	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	
8	1	2	3	4	65	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	
8	1	2	3	4	66	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	
8	1	2	3	4	67	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	
8	1	2	3	4	68	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	
8	1	2	3	4	69	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	
8	1	2	3	4	70	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor	
8	1	2	3	4	71	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	
8	1	2	3	4	72	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	3	4	73	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	
8	1	2	3	4	74	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	
8	1	2	3	4	75	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	
8	1	2	3	4	76	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	
8	1	2	3	4	77	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	
8	1	2	3	4	78	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	
8	1	2	3	4	79	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	
8	1	2	3	4	80	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	
8	1	2	3	4	81	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri	
8	1	2	3	4	82	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian	
8	1	2	3	4	83	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	
8	1	2	3	4	84	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	
8	1	2	3	4	85	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	
8	1	2	3	4	86	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	
8	1	2	3	4	87	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	
8	1	2	3	4	88	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan	
8	1	2	3	4	89	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	
8	1	2	3	4	90	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	
8	1	2	3	4	91	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	
8	1	2	3	4	92	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	
8	1	2	3	4	93	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	
8	1	2	3	4	94	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	
8	1	2	3	4	95	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	
8	1	2	3	4	96	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	
8	1	2	3	4	97	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir	
8	1	2	3	4	98	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	
8	1	2	3	4	99	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	
8	1	2	3	4	100	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	
8	1	2	3	4	101	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	3	4	102	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera	
8	1	2	3	4	103	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	
8	1	2	3	4	104	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	
8	1	2	3	4	105	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	
8	1	2	3	4	106	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	
8	1	2	3	4	107	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	
8	1	2	3	4	108	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat	
8	1	2	3	4	109	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya	
8	1	2	3	4	110	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Gardu Gas	
8	1	2	3	4	111	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Jaringan Pipa Gas	
8	1	2	3	4	112	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Pengolahan Gas	
8	1	2	3	4	113	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Gas Lainnya	
8	1	2	3	4	114	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	
8	1	2	3	4	115	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir	
8	1	2	3	4	116	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	
8	1	2	3	4	117	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya	
8	1	2	3	4	118	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain- Instalasi Lain	
8	1	2	3	4	119	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	
8	1	2	3	4	120	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	
8	1	2	3	4	121	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	
8	1	2	3	4	122	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	
8	1	2	3	4	123	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	
8	1	2	3	4	124	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Transmisi	
8	1	2	3	4	125	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Distribusi	
8	1	2	3	4	126	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya	
8	1	2	3	4	127	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	
8	1	2	3	4	128	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah	
8	1	2	3	4	129	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air	
8	1	2	3	4	130	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	
8	1	2	3	4	131	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	
8	1	2	3	4	132	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan Pipa Gas Transmisi	
8	1	2	3	4	133	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan Pipa Distribusi	
8	1	2	3	4	134	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan Pipa Dinas	
8	1	2	3	4	135	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan BBM	
8	1	2	3	4	136	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan Gas Lainnya	
8	1	2	3	5		Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	3	5	1	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	
8	1	2	3	5	2	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat	
8	1	2	3	5	3	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama	
8	1	2	3	5	4	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial	
8	1	2	3	5	5	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa	
8	1	2	3	5	6	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	
8	1	2	3	5	7	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	
8	1	2	3	5	8	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	
8	1	2	3	5	9	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	
8	1	2	3	5	10	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial	
8	1	2	3	5	11	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan	
8	1	2	3	5	12	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	
8	1	2	3	5	13	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual	
8	1	2	3	5	14	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (Microform)	
8	1	2	3	5	15	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	
8	1	2	3	5	16	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi	
8	1	2	3	5	17	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli	
8	1	2	3	5	18	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran	
8	1	2	3	5	19	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah dan Lukisan Lainnya	
8	1	2	3	5	20	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Musik-Karya Musik	
8	1	2	3	5	21	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Musik-Musik Lainnya	
8	1	2	3	5	22	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika (Graphic Material)	
8	1	2	3	5	23	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya	
8	1	2	3	5	24	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita	
8	1	2	3	5	25	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita Lainnya	
8	1	2	3	5	26	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Tarscalt-Tarscalt	
8	1	2	3	5	27	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Tarscalt-Tarscalt Lainnya	
8	1	2	3	5	28	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	
8	1	2	3	5	29	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	3	5	30	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian	
8	1	2	3	5	31	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya	
8	1	2	3	5	32	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan	
8	1	2	3	5	33	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah	
8	1	2	3	5	34	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan	
8	1	2	3	5	35	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	
8	1	2	3	5	36	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang	
8	1	2	3	5	37	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	
8	1	2	3	5	38	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Pengaman	
8	1	2	3	5	39	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Pengangkut	
8	1	2	3	5	40	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Kebun Binatang	
8	1	2	3	5	41	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Piaraan Lainnya	
8	1	2	3	5	42	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Potong	
8	1	2	3	5	43	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Perah	
8	1	2	3	5	44	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Unggas	
8	1	2	3	5	45	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Lainnya	
8	1	2	3	5	46	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya- Hewan Lainnya	
8	1	2	3	5	47	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya	
8	1	2	3	5	48	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)- Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	
8	1	2	3	5	49	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)	
8	1	2	3	5	50	Beban Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Coelenterata</i> (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)- <i>Coelenterata</i> Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)	
8	1	2	3	5	51	Beban Pemeliharaan Biota Perairan- Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)	
8	1	2	3	5	52	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)-Amphibia budidaya (Kodok dan Sebangsanya)	
8	1	2	3	5	53	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)-Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)	
8	1	2	3	5	54	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)	
8	1	2	3	5	55	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)	
8	1	2	3	5	56	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya	
8	1	2	3	5	57	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	2	3	5	58	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi	
8	1	2	3	5	59	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi	
8	1	2	3	5	60	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi	
8	1	2	3	5	61	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi	
8	1	2	3	5	62	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi	
8	1	2	3	5	63	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil	
8	1	2	3	5	64	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	
8	1	2	3	5	65	Beban Pemeliharaan Aset dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi	
8	1	2	3	6		Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	
8	1	2	3	6	1	Beban Jasa Servis	
8	1	2	3	6	2	Beban Penggantian Suku Cadang	
8	1	2	3	6	3	Beban Minyak Pelumas	
8	1	2	3	6	4	Beban Jasa KIR	
8	1	2	3	6	5	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	
8	1	2	3	6	6	Beban Perpanjangan Surat Izin Mengemudi	
8	1	2	3	6	7	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	
8	1	2	3	6	8	Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
8	1	2	4			Beban Perjalanan Dinas	
8	1	2	4	1		Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
8	1	2	4	1	1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
8	1	2	4	2		Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	
8	1	2	4	2	1	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	
8	1	2	4	3		Beban Perjalanan Dinas Pindah Tugas	
8	1	2	4	3	1	Beban Perjalanan Dinas Pindah Tugas Dalam Daerah	
8	1	2	4	3	2	Beban Perjalanan Dinas Pindah Tugas Luar Daerah	
8	1	2	4	4		Beban Pemulangan Pegawai	
8	1	2	4	4	1	Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah	
8	1	2	4	4	2	Beban Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	
8	1	2	5			Beban Barang untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
8	1	2	5	1		Beban Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
8	1	2	5	1	1	Beban Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	
8	1	2	5	1	2	Beban Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga	
8	1	2	5	2		Beban Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat atau Pihak Ketiga	
8	1	2	5	2	1	Beban Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat	
8	1	2	5	2	2	Beban Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Pihak Ketiga	
8	1	2	5	3		Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	
8	1	2	5	3	1	Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	
8	1	2	5	3	2	Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga	
8	1	3				Beban Bunga	
8	1	3	1			Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat	
8	1	3	1	1		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	3	1	1	1	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat ... atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah	
8	1	3	1	1	2	Dst ...	
8	1	3	1	2		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	
8	1	3	1	2	1	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat ... atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang	
8	1	3	1	2	2	Dst ...	
8	1	3	1	3		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah	
8	1	3	1	3	1	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat ... atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Menengah	
8	1	3	1	3	2	Dst ...	
8	1	3	1	4		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	
8	1	3	1	4	1	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...- Jangka Panjang	
8	1	3	1	4	2	Dst ...	
8	1	3	1	5		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Menengah	
8	1	3	1	5	1	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Pinjaman Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Menengah	
8	1	3	1	5	2	Dst ...	
8	1	3	1	6		Beban Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-Jangka Panjang	
8	1	3	1	6	1	Beban Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-Jangka Panjang	
8	1	3	1	6	1	Dst ...	
8	1	3	2			Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	
8	1	3	2	1		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek	
8	1	3	2	1	1	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain ...-Jangka Pendek	
8	1	3	2	1	2	Dst ...	
8	1	3	3			Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	
8	1	3	3	1		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMN-Jangka Pendek	
8	1	3	3	1	1	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMN ...- Jangka Pendek	
8	1	3	3	1	2	Dst ...	
8	1	3	3	2		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah	
8	1	3	3	2	1	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMN ...- Jangka Menengah	
8	1	3	3	2	2	Dst ...	
8	1	3	3	3		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang	
8	1	3	3	3	1	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMN ...- Jangka Panjang	
8	1	3	3	3	2	Dst ...	
8	1	3	3	4		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMD-Jangka Pendek	
8	1	3	3	4	1	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMD ...- Jangka Pendek	
8	1	3	3	4	2	Dst ...	
8	1	3	3	5		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah	
8	1	3	3	5	1	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMD ...- Jangka Menengah	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	3	3	5	2	Dst ...	
8	1	3	3	6		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang	
8	1	3	3	6	1	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMD ...-Jangka Panjang	
8	1	3	3	6	2	Dst ...	
8	1	3	3	7		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-Swasta-Jangka Pendek	
8	1	3	3	7	1	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-Swasta ...-Jangka Pendek	
8	1	3	3	7	2	Dst ...	
8	1	3	3	8		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah	
8	1	3	3	8	1	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-Swasta ...-Jangka Menengah	
8	1	3	3	8	2	Dst ...	
8	1	3	3	9		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-Swasta-Jangka Panjang	
8	1	3	3	9	1	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-Swasta ...-Jangka Panjang	
8	1	3	3	9	2	Dst ...	
8	1	3	4			Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	
8	1	3	4	1		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMN-Jangka Pendek	
8	1	3	4	1	1	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Pendek	
8	1	3	4	1	2	Dst ...	
8	1	3	4	2		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah	
8	1	3	4	2	1	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMN ... -Jangka Menengah	
8	1	3	4	2	2	Dst ...	
8	1	3	4	3		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang	
8	1	3	4	3	1	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Panjang	
8	1	3	4	3	2	Dst ...	
8	1	3	4	4		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMD-Jangka Pendek	
8	1	3	4	4	1	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Pendek	
8	1	3	4	4	2	Dst ...	
8	1	3	4	5		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah	
8	1	3	4	5	1	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Menengah	
8	1	3	4	5	2	Dst ...	
8	1	3	4	6		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMD-Jangka Panjang	
8	1	3	4	6	1	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Panjang	
8	1	3	4	6	2	Dst ...	
8	1	3	4	7		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-Swasta ... -Jangka Pendek	
8	1	3	4	7	1	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-Swasta ... -Jangka Pendek	
8	1	3	4	7	2	Dst ...	
8	1	3	4	8		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Menengah	
8	1	3	4	8	1	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Menengah	
8	1	3	4	8	2	Dst ...	
8	1	3	4	9		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-Swasta-Jangka Panjang	
8	1	3	4	9	1	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Panjang	
8	1	3	4	9	2	Dst ...	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	3	5			Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat	
8	1	3	5	1		Beban Bunga Utang kepada Masyarakat atas Obligasi	
8	1	3	5	1	1	Belanja Bunga Utang kepada masyarakat (Obligasi)	
8	1	3	6			Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD-Jangka Pendek	
8	1	3	6	1		Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD-Jangka Pendek	
8	1	3	6	1	1	Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD ...-Jangka Pendek	
8	1	3	6	1	2	Dst ...	
8	1	3	6	2		Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD-Jangka Menengah	
8	1	3	6	2	1	Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD ...-Jangka Menengah	
8	1	3	6	2	2	Dst ...	
8	1	3	6	3		Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD-Jangka Panjang	
8	1	3	6	3	1	Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD ...-Jangka Panjang	
8	1	3	6	3	2	Dst ...	
8	1	4				Beban Subsidi	
8	1	4	1			Beban Subsidi kepada BUMN	
8	1	4	1	1		Beban Subsidi kepada BUMN ...	
8	1	4	1	1	1	Beban Subsidi kepada BUMN ...	
8	1	4	1	2		Dst ...	
8	1	4	1	2	1	Dst ...	
8	1	4	2			Beban Subsidi kepada BUMD	
8	1	4	2	1		Beban Subsidi kepada BUMD ...	
8	1	4	2	1	1	Beban Subsidi BUMD ...	
8	1	4	2	2		Dst ...	
8	1	4	2	2	1	Dst ...	
8	1	4	3			Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	
8	1	4	3	1		Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta ...	
8	1	4	3	1	1	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta ...	
8	1	4	3	2		Dst ...	
8	1	4	3	2	1	Dst ...	
8	1	5				Beban Hibah	
8	1	5	1			Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	
8	1	5	1	1		Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	
8	1	5	1	1	1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat ...	
8	1	5	1	1	1	Dst ...	
8	1	5	1	2		Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	
8	1	5	1	2	1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat ...	
8	1	5	1	2	2	Dst ...	
8	1	5	1	2		Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	
8	1	5	1	2	1	Beban Hibah jasa kepada Pemerintah Pusat ...	
8	1	5	1	2	2	Dst ...	
8	1	5	2			Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
8	1	5	2	1		Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
8	1	5	2	1	1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
8	1	5	2	1	2	Dst ...	
8	1	5	2	2		Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
8	1	5	2	2	1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya ...	
8	1	5	2	2	2	Dst ...	
8	1	5	2	3		Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
8	1	5	2	3	1	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat ...	
8	1	5	2	3	2	Dst ...	
8	1	5	3			Beban Hibah kepada BUMN	
8	1	5	3	1		Beban Hibah Uang kepada BUMN	
8	1	5	3	1	1	Beban Hibah Uang kepada BUMN ...	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	5	3	1	2	Dst ...	
8	1	5	3	2		Beban Hibah Barang kepada BUMN ...	
8	1	5	3	2	1	Beban Hibah Barang kepada BUMN ...	
8	1	5	3	2	2	Dst ...	
8	1	5	3	3		Beban Hibah Jasa kepada BUMN ...	
8	1	5	3	3	1	Beban Hibah Jasa kepada BUMN ...	
8	1	5	3	3	2	Dst ...	
8	1	5	4			Beban Hibah Uang kepada BUMD	
8	1	5	4	1		Beban Hibah Uang kepada BUMD ...	
8	1	5	4	1	1	Beban Hibah Uang kepada BUMD ...	
8	1	5	4	1	2	Dst ...	
8	1	5	4	2		Beban Hibah Barang kepada BUMD ...	
8	1	5	4	2	1	Beban Hibah Barang kepada BUMD ...	
8	1	5	4	2	2	Dst ...	
8	1	5	4	3		Beban Hibah Jasa kepada BUMD ...	
8	1	5	4	3	1	Beban Hibah Jasa kepada BUMD ...	
8	1	5	4	3	2	Dst ...	
8	1	5	5			Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	
8	1	5	5	1		Beban Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	
8	1	5	5	1	1	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga ... yang Berbadan Hukum Indonesia	
8	1	5	5	1	1	Dst ...	
8	1	5	5	2		Beban Hibah Barang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	
8	1	5	5	2	1	Beban Hibah Barang kepada Badan/Lembaga ... yang Berbadan Hukum Indonesia	
8	1	5	5	2	2	Dst ...	
8	1	5	5	3		Beban Hibah Jasa kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	
8	1	5	5	3	1	Beban Hibah Jasa kepada Badan/Lembaga ... yang Berbadan Hukum Indonesia	
8	1	5	5	3	2	Dst ...	
8	1	5	5	4		Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	
8	1	5	5	4	1	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia	
8	1	5	5	4	2	Dst ...	
8	1	5	5	5		Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	
8	1	5	5	5	1	Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia	
8	1	5	5	5	2	Dst ...	
8	1	5	5	6		Beban Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	
8	1	5	5	6	1	Beban Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia	
8	1	5	5	6	2	Dst ...	
8	1	5	6			Beban Hibah Dana BOS	
8	1	5	6	1		Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	
8	1	5	6	1	1	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri ...	
8	1	5	6	1	2	Dst ...	
8	1	5	6	2		Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	
8	1	5	6	2	1	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta ...	
8	1	5	6	2	2	Dst ...	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	1	5	6	3		Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta ...	
8	1	5	6	3	1	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta ...	
8	1	5	6	3	2	Dst ...	
8	1	5	6	4		Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	
8	1	5	6	4	1	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta ...	
8	1	5	6	4	2	Dst ...	
8	1	5	7			Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	
8	1	5	7	1		Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ...	
8	1	5	7	1	1	Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ...	
8	1	5	7	1	2	Dst ...	
8	1	6				Beban Bantuan Sosial	
8	1	6	1			Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	
8	1	6	1	1		Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	
8	1	6	1	1	1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu ...	
8	1	6	1	1	2	Dst ...	
8	1	6	1	2		Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	
8	1	6	1	2	1	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Individu yang Direncanakan ...	
8	1	6	1	2	2	Dst ...	
8	1	6	2			Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	
8	1	6	2	1		Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	
8	1	6	2	1	1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga ...	
8	1	6	2	1	2	Dst ...	
8	1	6	2	2		Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga ...	
8	1	6	2	2	1	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga ...	
8	1	6	2	2	2	Dst ...	
8	1	6	3			Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	
8	1	6	3	1		Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	
8	1	6	3	1	1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat ...	
8	1	6	3	1	2	Dst ...	
8	1	6	3	2		Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	
8	1	6	3	2	1	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat ...	
8	1	6	3	2	2	Dst ...	
8	1	6	4			Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	
8	1	6	4	1		Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) ...	
8	1	6	4	1	1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) ...	
8	1	6	4	1	1	Dst ...	
8	1	6	4	2		Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	
8	1	6	4	2	1	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) ...	
8	1	6	4	2	1	Dst ...	
8	2					Beban Penyusutan dan Amortisasi	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	2	1				Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	
8	2	1	1			Beban Penyusutan Alat Besar	
8	2	1	1	1		Beban Penyusutan Alat Besar Darat	
8	2	1	1	1	1	Beban Penyusutan <i>Tractor</i>	
8	2	1	1	1	2	Beban Penyusutan <i>Grader</i>	
8	2	1	1	1	3	Beban Penyusutan <i>Excavator</i>	
8	2	1	1	1	4	Beban Penyusutan <i>Pile Driver</i>	
8	2	1	1	1	5	Beban Penyusutan <i>Hauler</i>	
8	2	1	1	1	6	Beban Penyusutan <i>Asphalt Equipment</i>	
8	2	1	1	1	7	Beban Penyusutan <i>Compacting Equipment</i>	
8	2	1	1	1	8	Beban Penyusutan Aggregate and Concrete Equipment	
8	2	1	1	1	9	Beban Penyusutan <i>Loader</i>	
8	2	1	1	1	10	Beban Penyusutan Alat Pengangkat	
8	2	1	1	1	11	Beban Penyusutan Mesin Proses	
8	2	1	1	1	12	Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya	
8	2	1	1	2		Beban Penyusutan Alat Besar Apung	
8	2	1	1	2	1	Beban Penyusutan <i>Dredger</i>	
8	2	1	1	2	2	Beban Penyusutan <i>Floating Excavator</i>	
8	2	1	1	2	3	Beban Penyusutan <i>Amphibi Dredger</i>	
8	2	1	1	2	4	Beban Penyusutan Kapal Tarik	
8	2	1	1	2	5	Beban Penyusutan Mesin Proses Apung	
8	2	1	1	2	6	Beban Penyusutan Alat Besar Apung Lainnya	
8	2	1	1	3		Beban Penyusutan Alat Bantu	
8	2	1	1	3	1	Beban Penyusutan Alat Penarik	
8	2	1	1	3	2	Beban Penyusutan <i>Feeder</i>	
8	2	1	1	3	3	Beban Penyusutan <i>Compressor</i>	
8	2	1	1	3	4	Beban Penyusutan <i>Electric Generating Set</i>	
8	2	1	1	3	5	Beban Penyusutan Pompa	
8	2	1	1	3	6	Beban Penyusutan Mesin Bor	
8	2	1	1	3	7	Beban Lapangan	
8	2	1	1	3	8	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Air Kotor	
8	2	1	1	3	9	Beban Penyusutan Pembangkit Panas/Steam Generator	
8	2	1	1	3	10	Beban Penyusutan Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	
8	2	1	1	3	11	Beban Penyusutan Mesin <i>Tattoo</i>	
8	2	1	1	3	12	Beban Penyusutan Perlengkapan Kebakaran Hutan	
8	2	1	1	3	13	Beban Penyusutan Peralatan Selam	
8	2	1	1	3	14	Beban Penyusutan Peralatan SAR <i>Mountenering</i>	
8	2	1	1	3	15	Beban Penyusutan Peralatan Intelijen	
8	2	1	1	3	16	Beban Penyusutan Alat Bantu Lainnya	
8	2	1	2			Beban Penyusutan Alat Angkutan	
8	2	1	2	1		Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	
8	2	1	2	1	1	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	
8	2	1	2	1	2	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	
8	2	1	2	1	3	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
8	2	1	2	1	4	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	
8	2	1	2	1	5	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	
8	2	1	2	1	6	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus	
8	2	1	2	1	7	Beban Penyusutan Kendaraan Tempur	
8	2	1	2	1	8	Beban Penyusutan Alat Angkutan Kereta Rel	
8	2	1	2	1	9	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	
8	2	1	2	2		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
8	2	1	2	2	1	Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	
8	2	1	2	2	2	Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	2	1	2	2	3	Beban Penyusutan Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	
8	2	1	2	2	4	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	
8	2	1	2	3		Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor	
8	2	1	2	3	1	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	
8	2	1	2	3	2	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	
8	2	1	2	3	3	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	
8	2	1	2	3	4	Beban Penyusutan Bermotor Militer	
8	2	1	2	3	5	Beban Penyusutan Bermotor Lainnya	
8	2	1	2	4		Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	
8	2	1	2	4	1	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	
8	2	1	2	4	2	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	
8	2	1	2	4	3	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	
8	2	1	2	4	4	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	
8	2	1	2	5		Beban Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara	
8	2	1	2	5	1	Beban Penyusutan Kapal Terbang	
8	2	1	2	5	2	Beban Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	
8	2	1	3			Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	
8	2	1	3	1		Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	
8	2	1	3	1	1	Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	
8	2	1	3	1	2	Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)	
8	2	1	3	1	3	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Listrik	
8	2	1	3	1	4	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel <i>Service</i>	
8	2	1	3	1	5	Beban Penyusutan Perkakas Pengangkat	
8	2	1	3	1	6	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kayu	
8	2	1	3	1	7	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Khusus	
8	2	1	3	1	8	Beban Penyusutan Peralatan Las	
8	2	1	3	1	9	Beban Penyusutan Perkakas Pabrik Es	
8	2	1	3	1	10	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin Lainnya	
8	2	1	3	2		Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	
8	2	1	3	2	1	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	
8	2	1	3	2	2	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Listrik	
8	2	1	3	2	3	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel <i>Service</i>	
8	2	1	3	2	4	Beban Penyusutan Perkakas Pengangkat	
8	2	1	3	2	5	Beban Penyusutan Perkakas Standar (Standard Tools)	
8	2	1	3	2	6	Beban Penyusutan Perkakas Khusus (Special Tools)	
8	2	1	3	2	7	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kerja	
8	2	1	3	2	8	Beban Penyusutan Peralatan Tukang Besi	
8	2	1	3	2	9	Beban Penyusutan Peralatan Tukang Besi	
8	2	1	3	2	10	Beban Penyusutan Peralatan Tukang Kayu	
8	2	1	3	2	11	Beban Penyusutan Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	
8	2	1	3	2	12	Beban Penyusutan Peralatan Bengkel Khusus Peladam	
8	2	1	3	2	13	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	
8	2	1	3	3		Beban Penyusutan Alat Ukur	
8	2	1	3	3	1	Beban Penyusutan Alat Ukur Universal	
8	2	1	3	3	2	Beban Penyusutan Alat Ukur/Test Inteligensia	
8	2	1	3	3	3	Beban Penyusutan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	
8	2	1	3	3	4	Beban Penyusutan Alat Ukur/Tes Klinis Lain	
8	2	1	3	3	5	Beban Penyusutan Alat Kalibrasi	
8	2	1	3	3	6	Beban Penyusutan <i>Oscilloscope</i>	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	2	1	3	3	7	Beban Penyusutan <i>Universal Tester</i>	
8	2	1	3	3	8	Beban Penyusutan Alat Ukur/Pembanding	
8	2	1	3	3	9	Beban Penyusutan Alat Ukur Lain-Lain	
8	2	1	3	3	10	Beban Penyusutan Alat Timbangan/Biara	
8	2	1	3	3	11	Beban Penyusutan Anak Timbangan/Biara	
8	2	1	3	3	12	Beban Penyusutan Takaran Kering	
8	2	1	3	3	13	Beban Penyusutan Takaran Bahan Bangunan	
8	2	1	3	3	14	Beban Penyusutan Takaran Lainnya	
8	2	1	3	3	15	Beban Penyusutan Alat Penguji Kendaraan Bermotor	
8	2	1	3	3	16	Beban Penyusutan <i>Specific Set</i>	
8	2	1	3	3	17	Beban Penyusutan Alat Pengukur Keadaan Alam	
8	2	1	3	3	18	Beban Penyusutan Alat Pengukur Penglihatan	
8	2	1	3	3	19	Beban Penyusutan Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu	
8	2	1	3	3	20	Beban Penyusutan Alat Ukur Instrument Workshop	
8	2	1	3	3	21	Beban Penyusutan Alat Ukur Lainnya	
8	2	1	4			Beban Penyusutan Alat Pertanian	
8	2	1	4	1		Beban Penyusutan Alat Pengolahan	
8	2	1	4	1	1	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	
8	2	1	4	1	2	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	
8	2	1	4	1	3	Beban Penyusutan Alat Panen	
8	2	1	4	1	4	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	
8	2	1	4	1	5	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian	
8	2	1	4	1	6	Beban Penyusutan Alat <i>Processing</i>	
8	2	1	4	1	7	Beban Penyusutan Alat Pasca Panen	
8	2	1	4	1	8	Beban Penyusutan Alat Produksi Perikanan	
8	2	1	4	1	9	Beban Penyusutan Alat-Alat Peternakan	
8	2	1	4	1	10	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Lainnya	
8	2	1	5			Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	
8	2	1	5	1		Beban Penyusutan Alat Kantor	
8	2	1	5	1	1	Beban Penyusutan Mesin Ketik	
8	2	1	5	1	2	Beban Penyusutan Mesin Hitung/Mesin Jumlah	
8	2	1	5	1	3	Beban Penyusutan Alat Reproduksi (Penggandaan)	
8	2	1	5	1	4	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	
8	2	1	5	1	5	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	
8	2	1	5	2		Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	
8	2	1	5	2	1	Beban Penyusutan Meubelair	
8	2	1	5	2	2	Beban Penyusutan Alat Pengukur Waktu	
8	2	1	5	2	3	Beban Penyusutan Alat Pembersih	
8	2	1	5	2	4	Beban Penyusutan Alat Pendingin	
8	2	1	5	2	5	Beban Penyusutan Alat Dapur	
8	2	1	5	2	6	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	
8	2	1	5	2	7	Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran	
8	2	1	5	3		Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
8	2	1	5	3	1	Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	
8	2	1	5	3	2	Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat	
8	2	1	5	3	3	Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	
8	2	1	5	3	4	Beban Penyusutan Kursi Rapat Pejabat	
8	2	1	5	3	5	Beban Penyusutan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	
8	2	1	5	3	6	Beban Penyusutan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	
8	2	1	5	3	7	Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat	
8	2	1	6			Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
8	2	1	6	1		Beban Penyusutan Alat Studio	
8	2	1	6	1	1	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	2	1	6	1	2	Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	
8	2	1	6	1	3	Beban Penyusutan Peralatan Studio Gambar	
8	2	1	6	1	4	Beban Penyusutan Peralatan Cetak	
8	2	1	6	1	5	Beban Penyusutan Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	
8	2	1	6	1	6	Beban Penyusutan Alat Studio Lainnya	
8	2	1	6	2		Beban Penyusutan Alat Komunikasi	
8	2	1	6	2	1	Beban Penyusutan Alat Komunikasi <i>Telephone</i>	
8	2	1	6	2	2	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio SSB	
8	2	1	6	2	3	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio HF/FM	
8	2	1	6	2	4	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio VHF	
8	2	1	6	2	5	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio UHF	
8	2	1	6	2	6	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Sosial	
8	2	1	6	2	7	Beban Penyusutan Alat-Alat Sandi	
8	2	1	6	2	8	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Khusus	
8	2	1	6	2	9	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	
8	2	1	6	2	10	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Satelit	
8	2	1	6	2	11	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Lainnya	
8	2	1	6	3		Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	
8	2	1	6	3	1	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar MF/MW	
8	2	1	6	3	2	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar HF/SW	
8	2	1	6	3	3	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar VHF/FM	
8	2	1	6	3	4	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar UHF	
8	2	1	6	3	5	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar SHF	
8	2	1	6	3	6	Beban Penyusutan Peralatan Antena MF/MW	
8	2	1	6	3	7	Beban Penyusutan Peralatan Antena HF/SW	
8	2	1	6	3	8	Beban Penyusutan Peralatan Antena VHF/FM	
8	2	1	6	3	9	Beban Penyusutan Peralatan Antena UHF	
8	2	1	6	3	10	Beban Penyusutan Peralatan Antena SHF/Parabola	
8	2	1	6	3	11	Beban Penyusutan Peralatan Translator VHF/VHF	
8	2	1	6	3	12	Beban Penyusutan Peralatan Translator UHF/UHF	
8	2	1	6	3	13	Beban Penyusutan Peralatan Translator VHF/UHF	
8	2	1	6	3	14	Beban Penyusutan Peralatan Translator UHF/VHF	
8	2	1	6	3	15	Beban Penyusutan Peralatan <i>Microwave</i> FPU	
8	2	1	6	3	16	Beban Penyusutan Peralatan Microwave Terrestrial	
8	2	1	6	3	17	Beban Penyusutan Peralatan <i>Microwave</i> TVRO	
8	2	1	6	3	18	Beban Penyusutan Peralatan <i>Dummy Load</i>	
8	2	1	6	3	19	Beban Penyusutan <i>Switcher</i> Antena	
8	2	1	6	3	20	Beban Penyusutan <i>Switcher</i> /Menara Antena	
8	2	1	6	3	21	Beban Penyusutan <i>Feeder</i>	
8	2	1	6	3	22	Beban Penyusutan <i>Humidity Control</i>	
8	2	1	6	3	23	Beban Penyusutan Program <i>Input Equipment</i>	
8	2	1	6	3	24	Beban Penyusutan Peralatan Antena Penerima VHF	
8	2	1	6	3	25	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar LF	
8	2	1	6	3	26	Beban Penyusutan Unit Pemancar MF+HF	
8	2	1	6	3	27	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar MF+HF	
8	2	1	6	3	28	Beban Penyusutan Peralatan Penerima	
8	2	1	6	3	29	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima LF	
8	2	1	6	3	30	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima MF	
8	2	1	6	3	31	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima HF	
8	2	1	6	3	32	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF	
8	2	1	6	3	33	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	
8	2	1	6	3	34	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	
8	2	1	6	3	35	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima SHF	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	2	1	6	3	36	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF	
8	2	1	6	3	37	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF	
8	2	1	6	3	38	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF	
8	2	1	6	3	39	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF	
8	2	1	6	3	40	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF	
8	2	1	6	3	41	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	
8	2	1	6	3	42	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar	
8	2	1	6	3	43	Beban Penyusutan Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah	
8	2	1	6	3	44	Beban Penyusutan Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi	
8	2	1	6	3	45	Beban Penyusutan Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	
8	2	1	6	3	46	Beban Penyusutan Peralatan Perlengkapan Radio	
8	2	1	6	3	47	Beban Penyusutan Sumber Tenaga	
8	2	1	6	3	48	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar Lainnya	
8	2	1	6	4		Beban Navigasi	
8	2	1	6	4	1	Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System	
8	2	1	6	4	2	Beban Penyusutan <i>Very High Frequence Omni Range</i> (VOR)	
8	2	1	6	4	3	Beban Penyusutan Equipment (DME)	
8	2	1	6	4	4	Beban Penyusutan Radar	
8	2	1	6	4	5	Beban Penyusuta Telekomunikasi	
8	2	1	6	4	6	Beban Penyusutan untuk Dokumentasi	
8	2	1	6	4	7	Beban Penyusutan Navigasi Lainnya	
8	2	1	7			Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	
8	2	1	7	1		Beban Penyusutan Alat Kedokteran	
8	2	1	7	1	1	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	
8	2	1	7	1	2	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gigi	
8	2	1	7	1	3	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	
8	2	1	7	1	4	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah	
8	2	1	7	1	5	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	
8	2	1	7	1	6	Beban Penyusutan Alat Kedokteran THT	
8	2	1	7	1	7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Mata	
8	2	1	7	1	8	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	
8	2	1	7	1	9	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	
8	2	1	7	1	10	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Anak	
8	2	1	7	1	11	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Poliklinik	
8	2	1	7	1	12	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	
8	2	1	7	1	13	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	
8	2	1	7	1	14	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Jantung	
8	2	1	7	1	15	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Radiodiagnostic	
8	2	1	7	1	16	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	
8	2	1	7	1	17	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Transfusi Darah	
8	2	1	7	1	18	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Radioterapi	
8	2	1	7	1	19	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Nuklir	
8	2	1	7	1	20	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	
8	2	1	7	1	21	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gawat Darurat	
8	2	1	7	1	22	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Jiwa	
8	2	1	7	1	23	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	
8	2	1	7	1	24	Beban Penyusutan Alat Kedokteran ICU	
8	2	1	7	1	25	Beban Penyusutan Alat Kedokteran ICCU	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	2	1	7	1	26	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah Jantung	
8	2	1	7	1	27	Beban Penyusutan Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>	
8	2	1	7	1	28	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Anestesi	
8	2	1	7	1	29	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Lainnya	
8	2	1	7	2		Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum	
8	2	1	7	2	1	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Matra Laut-LO	
8	2	1	7	2	2	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Matra Udara	
8	2	1	7	2	3	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kepolisian	
8	2	1	7	2	4	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Olahraga	
8	2	1	7	2	5	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya	
8	2	1	8			Beban Penyusutan Alat Laboratorium	
8	2	1	8	1		Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	
8	2	1	8	1	1	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	
8	2	1	8	1	2	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	
8	2	1	8	1	3	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Hidrokimia	
8	2	1	8	1	4	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Model Hidrolika	
8	2	1	8	1	5	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Batuan/ Geologi	
8	2	1	8	1	6	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	
8	2	1	8	1	7	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	
8	2	1	8	1	8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	
8	2	1	8	1	9	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Cocok Tanam	
8	2	1	8	1	10	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	
8	2	1	8	1	11	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum	
8	2	1	8	1	12	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mikrobiologi	
8	2	1	8	1	13	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia	
8	2	1	8	1	14	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Patologi	
8	2	1	8	1	15	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Immunologi	
8	2	1	8	1	16	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Hematologi	
8	2	1	8	1	17	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Film	
8	2	1	8	1	18	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Makanan	
8	2	1	8	1	19	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Farmasi	
8	2	1	8	1	20	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika	
8	2	1	8	1	21	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Hidrodinamika	
8	2	1	8	1	22	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Klimatologi	
8	2	1	8	1	23	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Peleburan	
8	2	1	8	1	24	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pasir	
8	2	1	8	1	25	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan	
8	2	1	8	1	26	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pembuatan Pola	
8	2	1	8	1	27	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Metalografi	
8	2	1	8	1	28	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pengelasan	
8	2	1	8	1	29	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	
8	2	1	8	1	30	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	
8	2	1	8	1	31	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Metrologi	
8	2	1	8	1	32	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pelapisan Logam	
8	2	1	8	1	33	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	
8	2	1	8	1	34	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	
8	2	1	8	1	35	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji Tekstil	
8	2	1	8	1	36	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	
8	2	1	8	1	37	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	2	1	8	1	38	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik	
8	2	1	8	1	39	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji Keramik	
8	2	1	8	1	40	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	
8	2	1	8	1	41	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian	
8	2	1	8	1	42	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	
8	2	1	8	1	43	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Energi Surya	
8	2	1	8	1	44	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	
8	2	1	8	1	45	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Oseanografi	
8	2	1	8	1	46	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	
8	2	1	8	1	47	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Biologi Perairan	
8	2	1	8	1	48	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Biologi	
8	2	1	8	1	49	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Geofisika	
8	2	1	8	1	50	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Tambang	
8	2	1	8	1	51	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	
8	2	1	8	1	52	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Industri	
8	2	1	8	1	53	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	
8	2	1	8	1	54	Beban Penyusutan Laboratorium Kearsipan	
8	2	1	8	1	55	Beban Penyusutan Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	
8	2	1	8	1	56	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lain	
8	2	1	8	1	57	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi	
8	2	1	8	1	58	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pendidikan	
8	2	1	8	1	59	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Teknologi	
8	2	1	8	1	60	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Teknik Pantai	
8	2	1	8	1	61	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi	
8	2	1	8	1	62	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Populasi	
8	2	1	8	1	63	Beban Penyusutan Alat Pengukur Gelombang	
8	2	1	8	1	64	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Lainnya	
8	2	1	8	2		Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir	
8	2	1	8	2	1	Beban Penyusutan <i>Analytical Instrument</i>	
8	2	1	8	2	2	Beban Penyusutan <i>Instrument Probe/Sensor</i>	
8	2	1	8	2	3	Beban Penyusutan <i>General Laboratory Tool</i>	
8	2	1	8	2	4	Beban Penyusutan <i>Glassware Plastic/ Utensils</i>	
8	2	1	8	2	5	Beban Penyusutan <i>Laboratory Safety Equipment</i>	
8	2	1	8	2	6	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	
8	2	1	8	3		Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah	
8	2	1	8	3	1	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	
8	2	1	8	3	2	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika	
8	2	1	8	3	3	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	
8	2	1	8	3	4	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	
8	2	1	8	3	5	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	
8	2	1	8	3	6	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas	
8	2	1	8	3	7	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS	
8	2	1	8	3	8	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama	
8	2	1	8	3	9	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	
8	2	1	8	3	10	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian	
8	2	1	8	3	11	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	2	1	8	3	12	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	
8	2	1	8	3	13	Beban Penyusutan Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	
8	2	1	8	3	14	Beban Penyusutan Alat Peraga Kejuruan	
8	2	1	8	3	15	Beban Penyusutan Alat Peraga PAUD/TK	
8	2	1	8	3	16	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	
8	2	1	8	4		Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	
8	2	1	8	4	1	Beban Penyusutan <i>Radiation Detector</i>	
8	2	1	8	4	2	Beban Penyusutan Modular Counting And Scientific Electronic	
8	2	1	8	4	3	Beban Penyusutan <i>Assembly/Counting System</i>	
8	2	1	8	4	4	Beban Penyusutan <i>Recorder Display</i>	
8	2	1	8	4	5	Beban Penyusutan <i>System/Power Supply</i>	
8	2	1	8	4	6	Beban Penyusutan <i>Measuring/Testing Device</i>	
8	2	1	8	4	7	Beban Penyusutan <i>Opto Electronics</i>	
8	2	1	8	4	8	Beban Penyusutan <i>Accelerator</i>	
8	2	1	8	4	9	Beban Penyusutan Reactor Experimental System	
8	2	1	8	4	10	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	
8	2	1	8	5		Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	
8	2	1	8	5	1	Beban Penyusutan Alat Ukur Fisika Kesehatan	
8	2	1	8	5	2	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kerja	
8	2	1	8	5	3	Beban Penyusutan Proteksi Lingkungan	
8	2	1	8	5	4	Beban Penyusutan <i>Meteorological Equipment</i>	
8	2	1	8	5	5	Beban Penyusutan Sumber Radiasi	
8	2	1	8	5	6	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	
8	2	1	8	6		Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	
8	2	1	8	6	1	Beban Penyusutan Radiation Application Equipment	
8	2	1	8	6	2	Beban Penyusutan <i>Non Destructive Test (NDT) Device</i>	
8	2	1	8	6	3	Beban Penyusutan Peralatan Hidrologi	
8	2	1	8	6	4	Beban Penyusutan Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	
8	2	1	8	7		Beban Penyusutan Lingkungan Hidup	
8	2	1	8	7	1	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	
8	2	1	8	7	2	Alat Laboratorium Kualitas Udara	
8	2	1	8	7	3	Beban Penyusutan Kebisingan dan Getaran	
8	2	1	8	7	4	Beban Penyusutan Laboratorium Lingkungan	
8	2	1	8	7	5	Beban Penyusutan Penunjang	
8	2	1	8	7	6	Beban Penyusutan Alat Lingkungan Hidup Lainnya	
8	2	1	8	8		Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	
8	2	1	8	8	1	Beban Penyusutan <i>Towing Carriage</i>	
8	2	1	8	8	2	Beban Penyusutan Wave Generator and Absorber	
8	2	1	8	8	3	Beban Penyusutan Data Acquisition and Analyzing System	
8	2	1	8	8	4	Beban Penyusutan <i>Cavitation Tunnel</i>	
8	2	1	8	8	5	Beban Penyusutan <i>Overhead Cranes</i>	
8	2	1	8	8	6	Beban Penyusutan Peralatan Umum	
8	2	1	8	8	7	Beban Penyusutan Pemesinan:Model Ship Workshop	
8	2	1	8	8	8	Beban Penyusutan Pemesinan:Propeller Model Workshop	
8	2	1	8	8	9	Beban Penyusutan Pemesinan:Mechanical Workshop	
8	2	1	8	8	10	Beban Penyusutan Pemesinan:Precision Mechanical Workshop	
8	2	1	8	8	11	Beban Penyusutan <i>Pemesinan:Painting Shop</i>	
8	2	1	8	8	12	Beban Penyusutan Pemesinan:Ship Model Preparation Shop	
8	2	1	8	8	13	Beban Penyusutan Pemesinan:Electrical Workshop	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	2	1	8	8	14	Beban Penyusutan MOB	
8	2	1	8	8	15	Beban Penyusutan <i>Photo and Film Equipment</i>	
8	2	1	8	8	16	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	
8	2	1	8	9		Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	
8	2	1	8	9	1	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	
8	2	1	8	9	2	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	
8	2	1	8	9	3	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik	
8	2	1	8	9	4	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	
8	2	1	8	9	5	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	
8	2	1	8	9	6	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	
8	2	1	8	9	7	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Natus	
8	2	1	8	9	8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran	
8	2	1	8	9	9	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	
8	2	1	8	9	10	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji Perangkat	
8	2	1	8	9	11	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	
8	2	1	10			Beban Penyusutan Komputer	
8	2	1	10	1		Beban Penyusutan Komputer Unit	
8	2	1	10	1	1	Beban Penyusutan Komputer Jaringan	
8	2	1	10	1	2	Beban Penyusutan <i>Personal Computer</i>	
8	2	1	10	1	3	Beban Penyusutan Komputer Unit Lainnya	
8	2	1	10	2		Beban Penyusutan Peralatan Komputer	
8	2	1	10	2	1	Beban Penyusutan Peralatan <i>Mainframe</i>	
8	2	1	10	2	2	Beban Penyusutan Peralatan <i>Mini Computer</i>	
8	2	1	10	2	3	Beban Penyusutan Peralatan <i>Personal Computer</i>	
8	2	1	10	2	4	Beban Penyusutan Peralatan Jaringan	
8	2	1	10	2	5	Beban Lainnya	
8	2	1	11			Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	
8	2	1	11	1		Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi	
8	2	1	11	1	1	Beban Penyusutan Optik	
8	2	1	11	1	2	Beban Penyusutan Ukur/Instrumen	
8	2	1	11	1	3	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	
8	2	1	11	2		Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika	
8	2	1	11	2	1	Beban Penyusutan Mekanik	
8	2	1	11	2	2	Beban Penyusutan Elektronik/ <i>Electric</i>	
8	2	1	11	2	3	Beban Penyusutan Manual	
8	2	1	11	2	4	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya	
8	2	1	12			Beban Penyusutan Alat Pengeboran	
8	2	1	12	1		Beban Penyusutan Alat Pengeboran Mesin	
8	2	1	12	1	1	Beban Penyusutan Bor Mesin Tumbuk	
8	2	1	12	1	2	Beban Penyusutan Bor Mesin Putar	
8	2	1	12	1	3	Beban Penyusutan Alat Pengeboran Mesin Lainnya	
8	2	1	12	2		Beban Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin	
8	2	1	12	2	1	Beban Penyusutan Bangka	
8	2	1	12	2	2	Beban Penyusutan Pantek	
8	2	1	12	2	3	Beban Penyusutan Putar	
8	2	1	12	2	4	Beban Penyusutan Peralatan Bantu	
8	2	1	12	2	5	Beban Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya	
8	2	1	13			Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
8	2	1	13	1		Beban Penyusutan Sumur	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	2	1	13	1	1	Beban Penyusutan Peralatan Sumur Minyak	
8	2	1	13	1	2	Beban Penyusutan Sumur Pemboran	
8	2	1	13	1	3	Beban Penyusutan Sumur Lainnya	
8	2	1	13	2		Beban Penyusutan Produksi	
8	2	1	13	2	1	Beban Penyusutan RIG	
8	2	1	13	2	2	Beban Penyusutan Produksi Lainnya	
8	2	1	13	3		Beban Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian	
8	2	1	13	3	1	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Minyak	
8	2	1	13	3	2	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Air	
8	2	1	13	3	3	Beban Penyusutan Alat Pengolahan <i>Steam</i>	
8	2	1	13	3	4	Beban Penyusutan Alat Pengolahan <i>Wax</i>	
8	2	1	13	3	5	Beban Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian Lainnya	
8	2	1	14			Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	
8	2	1	14	1		Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	
8	2	1	14	1	1	Beban Penyusutan Mekanik	
8	2	1	14	1	2	Beban Penyusutan Elektrik	
8	2	1	14	1	3	Beban Penyusutan Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	
8	2	1	14	2		Beban Penyusutan Alat Bantu Produksi	
8	2	1	14	2	1	Beban Penyusutan Perawatan Sumur	
8	2	1	14	2	2	Beban Penyusutan Tes Unit	
8	2	1	14	2	3	Beban Penyusutan Alat Bantu Produksi Lainnya	
8	2	1	15			Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	
8	2	1	15	1		Beban Penyusutan Alat Deteksi	
8	2	1	15	1	1	Beban Penyusutan Radiasi	
8	2	1	15	1	2	Beban Penyusutan Suara	
8	2	1	15	1	3	Beban Penyusutan Alat Deteksi Lainnya	
8	2	1	15	2		Beban Penyusutan Alat Pelindung	
8	2	1	15	2	1	Beban Penyusutan Baju Pengaman	
8	2	1	15	2	2	Beban Penyusutan Masker	
8	2	1	15	2	3	Beban Penyusutan Topi Kerja	
8	2	1	15	2	4	Beban Penyusutan Sabuk Pengaman	
8	2	1	15	2	5	Beban Penyusutan Sepatu Lapangan	
8	2	1	15	2	6	Beban Penyusutan Alat Pelindung Lainnya	
8	2	1	15	3		Beban Penyusutan Alat SAR	
8	2	1	15	3	1	Beban Penyusutan Alat Penolong	
8	2	1	15	3	2	Beban Penyusutan Alat Pendukung Pencarian	
8	2	1	15	3	3	Beban Penyusutan Alat Kerja Bawah Air	
8	2	1	15	3	4	Beban Penyusutan Alat SAR Lainnya	
8	2	1	15	4		Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan	
8	2	1	15	4	1	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan	
8	2	1	15	4	2	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan	
8	2	1	15	4	3	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan	
8	2	1	15	4	4	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	
8	2	1	15	4	5	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	
8	2	1	15	4	6	Beban Penyusutan Alat Ukur Peralatan Fasleyktrik	
8	2	1	15	4	7	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan Lainnya	
8	2	1	16			Beban Penyusutan Alat Peraga	
8	2	1	16	1		Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	
8	2	1	16	1	1	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan	
8	2	1	16	1	2	Beban Penyusutan Alat Peraga Percontohan	
8	2	1	16	1	3	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	2	1	17			Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	
8	2	1	17	1		Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi	
8	2	1	17	1	1	Beban Penyusutan Liquid-Liquid Contractor Equipment	
8	2	1	17	1	2	Beban Penyusutan <i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>	
8	2	1	17	1	3	Beban Penyusutan Solid-Solid Screening Equipment	
8	2	1	17	1	4	Beban Penyusutan <i>Solid-Solid Classifier</i>	
8	2	1	17	1	5	Beban Penyusutan Solid-Liquid Mixing Equipment	
8	2	1	17	1	6	Beban Penyusutan <i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>	
8	2	1	17	1	7	Beban Penyusutan Ion Exchange Absortion Equipment	
8	2	1	17	1	8	Beban Penyusutan <i>Leaching Equipment</i>	
8	2	1	17	1	9	Beban Penyusutan Gravity Sedimentation Equipment	
8	2	1	17	1	10	Beban Penyusutan Solid Liquid Filtering Equipment	
8	2	1	17	1	11	Beban Penyusutan <i>Centrifuge For Solid Liquid</i>	
8	2	1	17	1	12	Beban Penyusutan Liquid From Solid Expelling (Expressor)-Equipment	
8	2	1	17	1	13	Beban Penyusutan <i>Gas-Solid Drying Equipment</i>	
8	2	1	17	1	14	Beban Penyusutan Gas-Solid Fluidised Bed Equipment	
8	2	1	17	1	15	Beban Penyusutan Gas-Solid Separation Equipment	
8	2	1	17	1	16	Beban Penyusutan Gas-Liquid Distillation Equipment	
8	2	1	17	1	17	Beban Penyusutan Gas-Liquid Separition Equipment	
8	2	1	17	1	18	Beban Penyusutan Isotope Separation Equipment	
8	2	1	17	1	19	Beban Penyusutan Transport and Storage Equipment For Liquid	
8	2	1	17	1	20	Beban Penyusutan Equipment	
8	2	1	17	1	21	Beban Penyusutan Balargement Equipment	
8	2	1	17	1	22	Beban Penyusutan <i>Heat Generating Equipment</i>	
8	2	1	17	1	23	Beban Penyusutan <i>Heat Transfer Equipment</i>	
8	2	1	17	1	24	Beban Penyusutan <i>Mechanical Process</i>	
8	2	1	17	1	25	Beban Penyusutan Chemical Equipment	
8	2	1	17	1	26	Beban Penyusutan Proses/Produksi Lainnya	
8	2	1	18			Beban Penyusutan Rambu-Rambu	
8	2	1	18	1		Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	
8	2	1	18	1	1	Beban Penyusutan Rambu Bersuar	
8	2	1	18	1	2	Beban Penyusutan Rambu Tidak Bersuar	
8	2	1	18	1	3	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	
8	2	1	18	2		Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
8	2	1	18	2	1	Beban Penyusutan <i>Runway/Threshold Light</i>	
8	2	1	18	2	2	Beban Penyusutan Visual Approach Slope Indicator (VASI)	
8	2	1	18	2	3	Beban Penyusutan <i>Approach Light</i>	
8	2	1	18	2	4	Beban Penyusutan Runway Identification Light (REILS)	
8	2	1	18	2	5	Beban Penyusutan <i>Signal</i>	
8	2	1	18	2	6	Beban Penyusutan <i>Flood Lights</i>	
8	2	1	18	2	7	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	
8	2	1	18	3		Beban Penyusutan Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	
8	2	1	18	3	1	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	
8	2	1	18	3	1	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	
8	2	1	19			Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	
8	2	1	19	1		Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	
8	2	1	19	1	1	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Atletik	
8	2	1	19	1	2	Beban Penyusutan Peralatan Permainan	
8	2	1	19	1	3	Beban Penyusutan Peralatan Senam	
8	2	1	19	1	4	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Air	
8	2	1	19	1	5	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Udara	
8	2	1	19	1	6	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	2	2				Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	
8	2	2	1			Beban Penyusutan Bangunan Gedung	
8	2	2	1	1		Bangunan Gedung Tempat Kerja	
8	2	2	1	1	1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	
8	2	2	1	1	2	Beban Penyusutan Bangunan Gudang	
8	2	2	1	1	3	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	
8	2	2	1	1	4	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Instalasi	
8	2	2	1	1	5	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Laboratorium	
8	2	2	1	1	6	Beban Penyusutan Bangunan Kesehatan	
8	2	2	1	1	7	Beban Penyusutan Bangunan Oseanarium/Observatorium	
8	2	2	1	1	8	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
8	2	2	1	1	9	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat	
8	2	2	1	1	10	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
8	2	2	1	1	11	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	
8	2	2	1	1	12	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	
8	2	2	1	1	13	Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	
8	2	2	1	1	14	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool	
8	2	2	1	1	15	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pemotong Hewan	
8	2	2	1	1	16	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Perpustakaan	
8	2	2	1	1	17	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Museum	
8	2	2	1	1	18	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	
8	2	2	1	1	19	Beban Penyusutan Bangunan Pengujian Kelaikan	
8	2	2	1	1	20	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan	
8	2	2	1	1	21	Beban Penyusutan Bangunan Rumah Tahanan	
8	2	2	1	1	22	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Krematorium	
8	2	2	1	1	23	Beban Penyusutan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	
8	2	2	1	1	24	Beban Penyusutan Bangunan Tempat Persidangan	
8	2	2	1	1	25	Beban Penyusutan Bangunan Terbuka	
8	2	2	1	1	26	Beban Penyusutan Bangunan Penampung Sekam	
8	2	2	1	1	27	Beban Penyusutan Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
8	2	2	1	1	28	Beban Penyusutan Bangunan Industri	
8	2	2	1	1	29	Beban Penyusutan Bangunan Peternakan/ Perikanan	
8	2	2	1	1	30	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
8	2	2	1	1	31	Beban Penyusutan Bangunan Peralatan Geofisika	
8	2	2	1	1	32	Beban Penyusutan Bangunan Fasilitas Umum	
8	2	2	1	1	33	Beban Penyusutan Bangunan Parkir	
8	2	2	1	1	34	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pabrik	
8	2	2	1	1	35	Beban Penyusutan Bangunan Stasiun Bus	
8	2	2	1	1	36	Beban Penyusutan Taman	
8	2	2	1	1	37	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
8	2	2	1	2		Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal	
8	2	2	1	2	1	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I	
8	2	2	1	2	2	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan II	
8	2	2	1	2	3	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan III	
8	2	2	1	2	4	Beban Penyusutan Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	
8	2	2	1	2	5	Beban Penyusutan Asrama	
8	2	2	1	2	6	Beban Penyusutan Hotel	
8	2	2	1	2	7	Beban Penyusutan Motel	
8	2	2	1	2	8	Beban Penyusutan Flat/Rumah Susun	
8	2	2	1	2	9	Beban Penyusutan Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	
8	2	2	1	2	10	Beban Penyusutan Panti Asuhan	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	2	2	1	2	11	Beban Penyusutan Apartemen	
8	2	2	1	2	12	Beban Penyusutan Rumah Tidak Bersusun	
8	2	2	1	2	13	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	
8	2	2	2			Beban Penyusutan Monumen	
8	2	2	2	1		Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	
8	2	2	2	1	1	Beban Penyusutan Candi	
8	2	2	2	1	2	Beban Penyusutan Tugu	
8	2	2	2	1	3	Beban Penyusutan Bangunan Peninggalan	
8	2	2	2	1	4	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	
8	2	2	3			Beban Penyusutan Bangunan Menara	
8	2	2	3	1		Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan	
8	2	2	3	1	1	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	
8	2	2	3	1	2	Beban Penyusutan Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	
8	2	2	3	1	3	Beban Penyusutan Bangunan Menara Telekomunikasi	
8	2	2	3	1	4	Beban Pengawas	
8	2	2	3	1	5	Beban Penyusutan Perambuan Lainnya	
8	2	2	4			Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	
8	2	2	4	1		Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	
8	2	2	4	1	1	Beban Penyusutan Administrasi	
8	2	2	4	1	2	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	
8	2	2	4	1	3	Beban Penyusutan Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	
8	2	2	4	1	4	Beban Penyusutan Pagar	
8	2	2	4	1	5	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Lainnya	
8	2	3				Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	
8	2	3	1			Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	
8	2	3	1	1		Beban Penyusutan Jalan	
8	2	3	1	1	1	Beban Penyusutan Jalan Nasional	
8	2	3	1	1	2	Beban Penyusutan Jalan Provinsi	
8	2	3	1	1	3	Beban Penyusutan Jalan Kabupaten	
8	2	3	1	1	4	Beban Penyusutan Jalan Kota	
8	2	3	1	1	5	Beban Penyusutan Jalan Desa	
8	2	3	1	1	6	Beban Penyusutan Jalan Tol	
8	2	3	1	1	7	Beban Penyusutan Jalan Kereta Api	
8	2	3	1	1	8	Beban Penyusutan Landasan Pacu Pesawat Terbang	
8	2	3	1	1	9	Beban Penyusutan Jalan Khusus	
8	2	3	1	1	10	Beban Penyusutan Jalan Lainnya	
8	2	3	1	2		Beban Penyusutan Jembatan	
8	2	3	1	2	1	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Nasional	
8	2	3	1	2	2	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Provinsi	
8	2	3	1	2	3	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Kabupaten	
8	2	3	1	2	4	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Kota	
8	2	3	1	2	5	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Desa	
8	2	3	1	2	6	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Tol	
8	2	3	1	2	7	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Kereta Api	
8	2	3	1	2	8	Beban Penyusutan Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	
8	2	3	1	2	9	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Khusus	
8	2	3	1	2	10	Beban Penyusutan Jembatan Penyeberangan	
8	2	3	1	2	11	Beban Penyusutan Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	
8	2	3	1	2	12	Beban Penyusutan Jembatan Pengukur	
8	2	3	1	2	13	Beban Penyusutan Jembatan Lainnya	
8	2	3	2			Beban Penyusutan Bangunan Air	
8	2	3	2	1		Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	2	3	2	1	1	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Irigasi	
8	2	3	2	1	2	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Irigasi	
8	2	3	2	1	3	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Irigasi	
8	2	3	2	1	4	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Irigasi	
8	2	3	2	1	5	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Irigasi	
8	2	3	2	1	6	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Irigasi	
8	2	3	2	1	7	Beban Penyusutan Bangunan Sawah Irigasi	
8	2	3	2	1	8	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi Lainnya	
8	2	3	2	2		Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut	
8	2	3	2	2	1	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Pasang Surut	
8	2	3	2	2	2	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pasang Surut	
8	2	3	2	2	3	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pasang Surut	
8	2	3	2	2	4	Beban Penyusutan Saluran Pembuang Pasang Surut	
8	2	3	2	2	5	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pasang Surut	
8	2	3	2	2	6	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pasang Surut	
8	2	3	2	2	7	Beban Penyusutan Bangunan Sawah Pasang Surut	
8	2	3	2	2	8	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan	
8	2	3	2	3		Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	
8	2	3	2	3	1	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	
8	2	3	2	3	2	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	
8	2	3	2	3	3	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	
8	2	3	2	3	4	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	
8	2	3	2	3	5	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	
8	2	3	2	3	6	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	
8	2	3	2	3	7	Beban Penyusutan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	
8	2	3	2	3	8	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya	
8	2	3	2	4		Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	
8	2	3	2	4	1	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	
8	2	3	2	4	2	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	
8	2	3	2	4	3	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	
8	2	3	2	4	4	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	
8	2	3	2	4	5	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	
8	2	3	2	4	6	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	
8	2	3	2	4	7	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	
8	2	3	2	5		Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
8	2	3	2	5	1	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	
8	2	3	2	5	2	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	
8	2	3	2	5	3	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	
8	2	3	2	5	4	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	
8	2	3	2	5	5	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	
8	2	3	2	5	6	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	
8	2	3	2	5	7	Beban Penyusutan Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	
8	2	3	2	5	8	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	
8	2	3	2	6		Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	2	3	2	6	1	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	
8	2	3	2	6	2	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	
8	2	3	2	6	3	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	
8	2	3	2	6	4	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	
8	2	3	2	6	5	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	
8	2	3	2	6	6	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	
8	2	3	2	7		Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	
8	2	3	2	7	1	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor	
8	2	3	2	7	2	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Air Kotor	
8	2	3	2	7	3	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Kotor	
8	2	3	2	7	4	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Air Kotor	
8	2	3	2	7	5	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Kotor	
8	2	3	2	7	6	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor Lainnya	
8	2	3	3			Beban Penyusutan Instalasi	
8	2	3	3	1		Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku	
8	2	3	3	1	1	Beban Penyusutan Instalasi Air Permukaan	
8	2	3	3	1	2	Beban Penyusutan Instalasi Air Sumber/Mata Air	
8	2	3	3	1	3	Beban Penyusutan Instalasi Air Tanah Dalam	
8	2	3	3	1	4	Beban Penyusutan Instalasi Air Tanah Dangkal	
8	2	3	3	1	5	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	
8	2	3	3	2		Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	
8	2	3	3	2	1	Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Domestik	
8	2	3	3	2	2	Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Industri	
8	2	3	3	2	3	Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Pertanian	
8	2	3	3	2	4	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor Lainnya	
8	2	3	3	3		Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	
8	2	3	3	3	1	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	
8	2	3	3	3	2	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	
8	2	3	3	3	3	Beban Penyusutan Bangunan Penampung Sampah	
8	2	3	3	3	4	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	
8	2	3	3	4		Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
8	2	3	3	4	1	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan	
8	2	3	3	4	2	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	
8	2	3	3	4	3	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	
8	2	3	3	4	4	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	
8	2	3	3	5		Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	
8	2	3	3	5	1	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	
8	2	3	3	5	2	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	
8	2	3	3	5	3	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro	
8	2	3	3	5	4	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	
8	2	3	3	5	5	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	
8	2	3	3	5	6	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	
8	2	3	3	5	7	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	
8	2	3	3	5	8	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	
8	2	3	3	5	9	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	
8	2	3	3	5	10	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	
8	2	3	3	5	11	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
						Samudera/Gelombang Samudera	
8	2	3	3	5	12	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	
8	2	3	3	6		Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	
8	2	3	3	6	1	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Induk	
8	2	3	3	6	2	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	
8	2	3	3	6	3	Beban Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	
8	2	3	3	6	4	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	
8	2	3	3	7		Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan	
8	2	3	3	7	1	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan di Darat	
8	2	3	3	7	2	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan Lainnya	
8	2	3	3	8		Beban Penyusutan Instalasi Gas	
8	2	3	3	8	1	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Gas	
8	2	3	3	8	2	Beban Penyusutan Instalasi Jaringan Pipa Gas	
8	2	3	3	8	3	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Gas	
8	2	3	3	8	4	Beban Penyusutan Instalasi Gas Lainnya	
8	2	3	3	9		Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	
8	2	3	3	9	1	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	
8	2	3	3	9	2	Beban Penyusutan Instalasi Reaktor Nuklir	
8	2	3	3	9	3	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Limbah Radio Aktif	
8	2	3	3	9	4	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Lainnya	
8	2	3	3	10		Beban Penyusutan Instalasi Lain	
8	2	3	3	10	1	Beban Penyusutan Instalasi Lain	
8	2	3	4			Beban Penyusutan Jaringan	
8	2	3	4	1		Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	
8	2	3	4	1	1	Beban Penyusutan Jaringan Pembawa	
8	2	3	4	1	2	Beban Penyusutan Jaringan Induk Distribusi	
8	2	3	4	1	3	Beban Penyusutan Jaringan Cabang Distribusi	
8	2	3	4	1	4	Beban Penyusutan Jaringan Sambungan ke Rumah	
8	2	3	4	1	5	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum Lainnya	
8	2	3	4	2		Beban Penyusutan Jaringan Listrik	
8	2	3	4	2	1	Beban Penyusutan Jaringan Transmisi	
8	2	3	4	2	2	Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	
8	2	3	4	2	3	Beban Penyusutan Jaringan Listrik Lainnya	
8	2	3	4	3		Beban Penyusutan Jaringan Telepon	
8	2	3	4	3	1	Beban Penyusutan Jaringan Telepon diatas Tanah	
8	2	3	4	3	2	Beban Penyusutan Jaringan Telepon dibawah Tanah	
8	2	3	4	3	3	Beban Penyusutan Jaringan Telepon di dalam Air	
8	2	3	4	3	4	Beban Penyusutan Jaringan dengan Media Udara	
8	2	3	4	3	5	Beban Penyusutan Jaringan Telepon Lainnya	
8	2	3	4	4		Beban Penyusutan Jaringan Gas	
8	2	3	4	4	1	Beban Penyusutan Jaringan Pipa Gas Transmisi	
8	2	3	4	4	2	Beban Penyusutan Jaringan Pipa Distribusi	
8	2	3	4	4	3	Beban Penyusutan Jaringan Pipa Dinas	
8	2	3	4	4	4	Beban Penyusutan Jaringan BBM	
8	2	3	4	4	5	Beban Penyusutan Jaringan Gas Lainnya	
8	2	4				Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
8	2	4	1			Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
8	2	4	1	1		Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian	
8	2	4	1	1	1	Beban Penyusutan Alat Musik	
8	2	4	2			Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	
8	2	4	2	1		Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	
8	2	4	2	1	1	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	
8	2	5				Beban Penyusutan Aset Lainnya	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	2	5	1			Beban Penyusutan Aset Lainnya	
8	2	5	1	1		Beban Ketiga	
8	2	5	1	1	1	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa	
8	2	5	1	1	2	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	
8	2	5	1	1	3	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	
8	2	5	1	1	4	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan dengan Infrastruktur	
8	2	6				Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	
8	2	6	1			Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	
8	2	6	1	1		Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	
8	2	6	1	1	1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise	
8	2	6	1	1	2	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	
8	2	6	1	1	3	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	
8	2	2	1	1	4	Beban Amortisasi Software	
8	2	6	1	1	5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	
8	3					BEBAN TRANSFER	
8	3	1				Beban Bagi Hasil	
8	3	1	1			Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	
8	3	1	1	1		Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	
8	3	1	1	1	1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	
8	3	1	1	1	2	Dst ...	
8	3	1	1	2		Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	
8	3	1	1	2	1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	
8	3	1	1	2	2	Dst ...	
8	3	1	1	3		Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
8	3	1	1	3	1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
8	3	1	1	3	2	Dst ...	
8	3	2				Beban Bantuan Keuangan	
8	3	2	1			Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	
8	3	2	1	1		Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	
8	3	2	1	1	1	Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi ...	
8	3	2	1	1	2	Dst ...	
8	3	2	1	2		Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	
8	3	2	1	2	1	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi ...	
8	3	2	1	2	2	Dst ...	
8	3	2	2			Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	
8	3	2	2	1		Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	
8	3	2	2	1	1	Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota ...	
8	3	2	2	1	2	Dst ...	
8	3	2	2	2		Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	
8	3	2	2	2	1	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota ...	
8	3	2	2	2	2	Dst ...	
8	3	2	3			Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	
8	3	2	3	1		Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	
8	3	2	3	1	1	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota ...	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	3	2	3	1	2	Dst ...	
8	3	2	3	2		Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	
8	3	2	3	2	1	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota ...	
8	3	2	3	2	2	Dst ...	
8	3	2	4			Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	
8	3	2	4	1		Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	
8	3	2	4	1	1	Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi ...	
8	3	2	4	1	2	Dst ...	
8	3	2	4	2		Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	
8	3	2	4	2	1	Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi ...	
8	3	2	4	2	2	Dst ...	
8	3	2	5			Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	
8	3	2	5	1		Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	
8	3	2	5	1	1	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa ...	
8	3	2	5	1	2	Dst ...	
8	3	2	5	2		Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	
8	3	2	5	2	1	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa ...	
8	3	2	5	2	2	Dst ...	
8	3	2	6			Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	
8	3	2	6	1		Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	
8	3	2	6	1	1	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	
8	3	2	6	1	2	Dst ...	
8	4					BEBAN TAK TERDUGA	
8	4	1				Beban Tak Terduga	
8	4	1	1			Beban Tak Terduga	
8	4	1	1	1		Beban Tak Terduga	
8	4	1	1	1	1	Beban Tak Terduga	
8	5					DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	
8	5	1				Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	
8	5	1	1			Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	
8	5	1	1	1		Defisit Penjualan Tanah-LO	
8	5	1	1	1	1	Defisit Penjualan Tanah-LO	
8	5	1	1	2		Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	
8	5	1	1	2	1	Defisit Penjualan Alat Besar-LO	
8	5	1	1	2	2	Defisit Penjualan Alat Angkutan-LO	
8	5	1	1	2	3	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur- LO	
8	5	1	1	2	4	Defisit Penjualan Alat Pertanian-LO	
8	5	1	1	2	5	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	
8	5	1	1	2	6	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO	
8	5	1	1	2	7	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO	
8	5	1	1	2	8	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-LO	
8	5	1	1	2	10	Defisit Penjualan Komputer-LO	
8	5	1	1	2	11	Defisit Penjualan Alat Eksplorasi-LO	
8	5	1	1	2	12	Defisit Penjualan Alat Pengeboran-LO	
8	5	1	1	2	13	Defisit Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO	
8	5	1	1	2	14	Defisit Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-LO	
8	5	1	1	2	15	Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-LO	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	5	1	1	2	16	Defisit Penjualan Alat Peraga-LO	
8	5	1	1	2	17	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-LO	
8	5	1	1	2	18	Defisit Penjualan Rambu-Rambu-LO	
8	5	1	1	2	19	Defisit Penjualan Peralatan Olahraga-LO	
8	5	1	1	3		Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	
8	5	1	1	3	1	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-LO	
8	5	1	1	3	2	Defisit Penjualan Monumen-LO	
8	5	1	1	3	3	Defisit Penjualan Bangunan Menara-LO	
8	5	1	1	3	4	Defisit Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO	
8	5	1	1	4		Defisit Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi- LO	
8	5	1	1	4	1	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-LO	
8	5	1	1	4	2	Defisit Penjualan Bangunan Air-LO	
8	5	1	1	4	3	Defisit Penjualan Instalasi-LO	
8	5	1	1	4	4	Defisit Penjualan Jaringan-LO	
8	5	1	1	5		Defisit Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	
8	5	1	1	5	1	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-LO	
8	5	1	1	5	2	Defisit Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO	
8	5	1	1	5	3	Defisit Penjualan Hewan-LO	
8	5	1	1	5	4	Defisit Penjualan Biota Perairan-LO	
8	5	1	1	5	5	Defisit Penjualan Tanaman-LO	
8	5	1	1	5	6	Defisit Penjualan Barang Koleksi Non Budaya- LO	
8	5	1	1	5	7	Defisit Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi- LO	
8	5	1	1	6		Defisit Penjualan Aset Lainnya-LO	
8	5	1	1	6	1	Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO	
8	5	1	1	6	2	Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain- LO	
8	5	1	2			Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	
8	5	1	2	1		Defisit Tukar Menukar Tanah-LO	
8	5	1	2	1	1	Defisit Tukar Menukar Tanah -LO	
8	5	1	2	2		Defisit Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO	
8	5	1	2	2	1	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-LO	
8	5	1	2	2	2	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-LO	
8	5	1	2	2	3	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO	
8	5	1	2	2	4	Defisit Tukar Menukar Alat Pertanian-LO	
8	5	1	2	2	5	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	
8	5	1	2	2	6	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO	
8	5	1	2	2	7	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO	
8	5	1	2	2	8	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-LO	
8	5	1	2	2	10	Defisit Tukar Menukar Komputer-LO	
8	5	1	2	2	11	Defisit Tukar Menukar Alat Eksplorasi-LO	
8	5	1	2	2	12	Defisit Tukar Menukar Alat Pengeboran-LO	
8	5	1	2	2	13	Defisit Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO	
8	5	1	2	2	14	Defisit Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi- LO	
8	5	1	2	2	15	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja- LO	
8	5	1	2	2	16	Defisit Tukar Menukar Alat Peraga-LO	
8	5	1	2	2	17	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-LO	
8	5	1	2	2	18	Defisit Tukar Menukar Rambu-Rambu-LO	
8	5	1	2	2	19	Defisit Tukar Menukar Peralatan Olahraga-LO	
8	5	1	2	3		Defisit Tukar Menukar Gedung dan Bangunan- LO	
8	5	1	2	3	1	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO	
8	5	1	2	3	2	Defisit Tukar Menukar Monumen-LO	
8	5	1	2	3	3	Defisit Tukar Menukar Bangunan Menara-LO	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	5	1	2	3	4	Defisit Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO	
8	5	1	2	4		Defisit Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO	
8	5	1	2	4	1	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-LO	
8	5	1	2	4	2	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-LO	
8	5	1	2	4	3	Defisit Tukar Menukar Instalasi-LO	
8	5	1	2	4	4	Defisit Tukar Menukar Jaringan-LO	
8	5	1	2	5		Defisit Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO	
8	5	1	2	5	1	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-LO	
8	5	1	2	5	2	Defisit Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO	
8	5	1	2	5	3	Defisit Tukar Menukar Hewan-LO	
8	5	1	2	5	4	Defisit Tukar Menukar Biota Perairan-LO	
8	5	1	2	5	5	Defisit Tukar Menukar Tanaman-LO	
8	5	1	2	5	6	Defisit Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-LO	
8	5	1	2	5	7	Defisit Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi-LO	
8	5	1	2	6		Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-LO	
8	5	1	2	6	1	Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO	
8	5	1	2	6	2	Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain- Lain-LO	
8	5	1	3			Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	
8	5	1	3	1		Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-LO	
8	5	1	3	1	1	Defisit Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara-LO	
8	5	1	3	1	2	Defisit Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah-LO	
8	5	1	3	1	3	Defisit Pelepasan Investasi dalam Obligasi-LO	
8	5	1	3	1	4	Defisit Pelepasan Investasi dalam Proyek Pembangunan-LO	
8	5	1	3	1	5	Defisit Pelepasan Dana Bergulir-LO	
8	5	1	3	2		Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen-LO	
8	5	1	3	2	1	Defisit Pelepasan Penyertaan Modal-LO	
8	5	2				Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	
8	5	2	1			Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	
8	5	2	1	1		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah	
8	5	2	1	1	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah ...-LO	
8	5	2	1	1	2	Dst ...	
8	5	2	1	2		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang-LO	
8	5	2	1	2	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang ...-LO	
8	5	2	1	2	2	Dst ...	
8	5	2	1	3		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO	
8	5	2	1	3	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka	
8	5	2	1	3	2	Dst ...	
8	5	2	1	4		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO	
8	5	2	1	4	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang ...-LO	
8	5	2	1	4	2	Dst ...	
8	5	2	1	5		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Menengah-LO	
8	5	2	1	5	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Menengah ...-LO	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	5	2	1	5	2	Dst ...	
8	5	2	1	6		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Panjang-LO	
8	5	2	1	6	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Panjang ...-LO	
8	5	2	1	6	2	Dst ...	
8	5	2	2			Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	
8	5	2	2	1		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN- Jangka Menengah-LO	
8	5	2	2	1	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN- Jangka Menengah ...-LO	
8	5	2	2	1	2	Dst ...	
8	5	2	2	2		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN- Jangka Panjang-LO	
8	5	2	2	2	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN- Jangka Panjang ...-LO	
8	5	2	2	2	2	Dst ...	
8	5	2	2	3		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Menengah-LO	
8	5	2	2	3	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Menengah-LO	
8	5	2	2	3	2	Dst ...	
8	5	2	2	4		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Panjang-LO	
8	5	2	2	4	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Panjang ...-LO	
8	5	2	2	4	2	Dst ...	
8	5	2	2	5		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta- Jangka Menengah-LO	
8	5	2	2	5	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta- Jangka Menengah-LO	
8	5	2	2	5	2	Dst ...	
8	5	2	2	6		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-	
8	5	2	2	6	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta- Jangka Panjang ...-LO	
8	5	2	2	6	2	Dst ...	
8	5	2	3			Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	
8	5	2	3	1		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Menengah-LO	
8	5	2	3	1	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Menengah ...-LO	
8	5	2	3	1	2	Dst ...	
8	5	2	3	2		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Panjang-LO	
8	5	2	3	2	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Panjang ...-LO	
8	5	2	3	2	2	Dst ...	
8	5	2	3	3		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Menengah-LO	
8	5	2	3	3	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Menengah ...-LO	
8	5	2	3	3	2	Dst ...	
8	5	2	3	4		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Panjang-LO	
8	5	2	3	4	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Panjang ...-LO	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun	Saldo Normal
8	5	2	3	4	2	Dst ...	
8	5	2	3	5		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Menengah-LO	
8	5	2	3	5	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Menengah ...-LO	
8	5	2	3	5	2	Dst ...	
8	5	2	3	6		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Panjang-LO	
8	5	2	3	6	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Panjang ...-LO	
8	5	2	3	6	2	Dst ...	
8	5	2	4			Defisit Penyelesaian Obligasi-LO	
8	5	2	4	1		Defisit Penyelesaian Obligasi-LO	
8	5	2	4	1	1	Defisit Penyelesaian Obligasi-LO	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

